
M. Adnan Amal

Kepulauan Rempah-Rempah

Perjalanan Sejarah Maluku Utara
1250 - 1950

Kata Pengantar:
Prof. Dr. A.B. Lopian

Kepulauan Rempah-Rempah

Perjalanan Sejarah Maluku Utara

1250 - 1950

Penulis: M. Adnan Amal

Penyunting: Taufik Adnan Amal

DAFTAR ISI

- Kata Sambutan Gubernur Maluku Utara
- Pengantar Edisi Pertama
- Catatan Penulis untuk Edisi Revisi
- Pengantar Prof. Dr. A.B. Lopian
- Bab 1 Profil Maluku
- Bab 2 Kerajaan-kerajaan Maluku dalam Mitos dan Legenda
- Bab 3 Jailolo: Kerajaan Maluku Tertua
- Bab 4 Ternate: Kerajaan Maluku Terbesar
- Bab 5 Tidore: Kerajaan Besar Maluku
- Bab 6 Kesultanan Bacan
- Bab 7 Kerajaan-kerajaan Kecil Maluku
- Bab 8 Rempah-rempah Maluku dan Kedatangan Bangsa Asing
- Bab 9 Penyebaran Agama Islam dan Kristen di Maluku
- Bab 10 Lahirnya VOC
- Bab 11 Maluku, Inggris dan Nuku
- Bab 12 Maluku Utara Pasca VOC: Perubahan Struktur pemerintahan
- Bab 13 Maluku Utara: 1817-1914
- Bab 14 Balans Pemerintahan Kolonial Belanda (1817-1942)
- Bab 15 Maluku Utara di Era Kebangkitan Nasional
- Bab 16 Maluku Utara di bawah Pendudukan Jepang (1942-1945)
- Bab 17 Maluku Utara di Masa Revolusi Kemerdekaan
- Bab 18 Maluku Utara di Bawah NIT
- Lampiran 1: Daftar Para Kolano Ternate
- Lampiran 2: Daftar Par Kolano Tidore
- Lampiran 3: Daftar Para Gubernur Portugis di Maluku
- Lampiran 4: Benteng Portugis di Tidore dan Para Komandannya
- Lampiran 5: Daftra Para Gubernur Spanyol di Maluku
- Lampiran 6: Para Gubernur VOC di Maluku
- Lampiran 7: Para Residen Inggris di Maluku
- Glosarium
- Daftar Pustaka

KATA SAMBUTAN GUBERNUR MALUKU UTARA

Buku **KEPULAUAN REMPAH-REMPAH** telah mencakup pelbagai informasi penting mengenai daerah Maluku Utara selama 700 tahun, dan mencakup kurun waktu yang dimulai pada masa awal berdirinya kerajaan-kerajaan lokal yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Moloku Kie Raha (1250) hingga masa lima tahun pasca Proklamasi Kemerdekaan RI (1950).

Di samping sarat dengan informasi kesejarahan sepanjang kurun waktu tersebut, buku ini juga telah memajang potret Maluku Utara *hampir seutuhnya*.

Pergolakan yang telah melanda kawasan ini, baik yang bercorak internal antara sesama kerajaan lokal yang berkuasa untuk memperebutkan hegemoni politik maupun antara kerajaan lokal versus kekuasaan asing kolonialis untuk mempertahankan integritas dan harga diri, hingga antara kekuasaan asing *an sich* untuk memantapkan pengaruh politik imperialistis, dalam rangka memperebutkan hak-hak monopoli perdagangan rempah-rempah yang telah berlangsung selama hampir tiga abad (1500-1800).

Pergolakan-pergolakan seperti itulah yang telah mewarnai sejarah Maluku Utara selama tiga ratus tahun, yang berakhir dengan hilangnya kebebasan, kemerdekaan dan integritas rakyat Maluku Utara, sama seperti rakyat daerah-daerah lain di seluruh nusantara.

Tetapi, apabila terdapat sesuatu yang patut dibanggakan dari sejarah Maluku Utara seperti telah ditulis dalam buku ini, maka secara pribadi saya dapat merasakannya, karena dari seluruh perang kolonial yang telah berlangsung di berbagai daerah di seluruh nusantara, hanya rakyat Maluku Utara di bawah pimpinan seorang Babullah dari Ternate yang secara heroik berhasil mengusir kaum penjajah Portugis keluar dari Maluku Utara dalam keadaan yang amat terhina.

Fakta historis inilah yang patut dibanggakan seluruh rakyat Maluku Utara, khususnya generasi muda yang tidak pernah lagi mengalami perang seperti telah dilakukan nenek moyang mereka.

Mengakhiri sambutan singkat ini, saya ingin menggarisbawahi dua hal pokok yang sangat berperan dalam lahirnya buku ini:

Pertama: Buku ini telah menyajikan suatu ikhtisar sejarah Maluku Utara yang komprehensif dan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami;

Kedua: Untuk pertama kali sebuah buku tentang sejarah Maluku Utara ditulis seorang putra daerah yang berdedikasi tinggi, dan dengan mengakses hasil-hasil penelitian kearsipan dan dokumen-dokumen sebagai sumber primer, serta dengan menggunakan referensi kepustakaan yang luas.

Atas dasar kedua alasan tersebut, saya menyambut dengan gembira penerbitan buku ini.

Kepada penulisnya saya sampaikan: **B R A V O !**

Ternate, 6 November 2006

Gubernur Maluku Utara

Drs. H. Thaib Armaiyn

PENGANTAR EDISI PERTAMA

Sejak Françoise Valentijn menerbitkan karya monumentalnya, *Oud en Nieuw Oost Indie*, khususnya dalam jilid 1b, "Beschrijving der Moluccas,"¹ maka telaah tentang sejarah Maluku (Utara) yang komprehensif bisa dikatakan terhenti untuk waktu yang cukup lama. Hampir seratus empat puluh tahun kemudian barulah muncul karya P. van der Crab, *De Moluksche Eilanden*,² dengan fokus yang sama seperti Valentijn, tetapi dengan tambahan materi dan bahan-bahan kontemporer pada masa itu.

Sejak saat itu, sampai penghujung abad ke-20, belum muncul karya-karya yang mendeskripsikan sejarah Maluku (Utara) sebagaimana telah dilakukan kedua penulis Belanda di atas, sekalipun telah banyak lahir monograf mengenai daerah-daerah tertentu di kawasan tersebut.³ Baru pada 1993 Leonard J. Andaya, seorang penulis non-Belanda, mempublikasi bukunya, *The World of Maluku*,⁴ yang berupaya merekonstruksi sejarah Maluku secara komprehensif dengan menyerap data dari para penulis dan dokumen-dokumen Belanda, serta sumber-sumber Spanyol, Portugis dan Inggris.

Karya-karya Valentijn dan van der Crab telah menjadi klasik dan sulit diperoleh dewasa ini. Di Indonesia, karya-karya tersebut hanya dikoleksi oleh Perpustakaan Nasional, Jakarta, dan mungkin oleh pribadi-pribadi tertentu. Demikian pula, buku Andaya, meskipun tergolong baru, tidak banyak beredar di Indonesia. Karena itu, buku yang -- menurut hemat penulis -- teramat penting ini jarang dirujuk sebagai referensi penulisan sejarah Maluku (Utara) modern.

Sementara para pakar sejarah Maluku (Utara) yang sangat berotoritas semisal Paramita S. Abdurachman, A.B. Lopian, R.Z. Leirissa dan lainnya, lebih menitikberatkan telaah mereka pada fragmen-fragmen strategis tertentu sejarah Maluku (Utara) untuk memberi gambaran yang lebih mendalam.

Paramita, misalnya, banyak menelaah sumber-sumber primer sejarah Maluku (Utara),⁵ dan campur tangan Barat dalam perniagaan rempah-rempah.⁶ Sementara Lopian mengkaji keragaman persatuan Maluku Kie Raha,⁷ dan Leirissa menulis tentang Halmahera Timur dan Raja Jailolo,⁸ sebuah hasil telaah tentang sejarah kawasan Halmahera Timur dan kemelut aristokrasi Jailolo setelah meninggalnya Sultan Nuku dari Tidore.

Berbagai kajian para penulis Indonesia yang baru saja dikemukakan, sebagian besarnya mengungkap aspek-aspek strategis tertentu sejarah Maluku Utara dan menyajikan bahan baku yang akan memperkaya materi sejarahnya. Tetapi, selain hal-hal

¹ Amsterdam: Dordrecht 1724. Edisi S. Keyzer, s'Gravenhage, 1856.

² Batavia: Lange & Co., 1862.

³ Lihat misalnya W. Ph. Coolhaas, *Kroniek van het Rijk Batjan* (Jakarta, 1923); Ch. van Fraassen, *Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel*, 2 vols. (Leiden, 1987); dan E.J. Katoppo, *Nuku* (Bandung, 1957).

⁴ Honolulu: Univ. of Hawaii Press, 1993.

⁵ Lihat tulisannya, "Kegunaan Sumber-sumber Portugis dan Spanyol untuk Pembuktian Sejarah Maluku," *MISI*, vol. viii, no. 3 (1980).

⁶ Lihat tulisannya, "Moluccan Spice Responses to the Intrusions of the West," *Dynamic of History*, (Amsterdam, 1978).

⁷ Lihat misalnya, *The Diversivide Unity of Maluku Kie Raha*, (Kyoto, 1984), dan *Bacan and the Early History of North Maluku*, Halmahera and Beyond, KITVL Press, 1994, pp. 11-22.

⁸ Jakarta, 1996.

tersebut, yang paling dibutuhkan saat ini adalah sebuah karya yang dapat menyuguhkan peta kesejarahan Maluku Utara secara deskriptif dan ditulis secara populer.

Penulis sendiri telah lama mencita-citakan menyusun sebuah buku sejarah yang dapat mendekati kualifikasi tersebut. Sekalipun demikian, disadari bahwa hal itu sangat sukar dilakukan oleh seorang amatir tanpa kerja keras, kemauan yang kuat dan keseriusan. Demikianlah, buku ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita akan sebuah buku sejarah Maluku Utara yang komprehensif dan populer itu.

Dalam menyusun buku ini, penulis telah berusaha berlaku obyektif dengan mengemukakan fakta-fakta sejarah secara apa adanya berdasarkan rujukan yang tersedia. Demikian pula, buku ini berupaya menyajikan potret Maluku Utara yang sebenarnya dengan segala kelebihan serta kekurangannya. Pergulatan rakyat Maluku Utara selama berabad-abad dalam menghadapi berbagai tantangan dan berbagai respon yang telah mereka berikan merupakan tema pokok buku ini.

Potret tersebut memperlihatkan bagaimana karakter dan wujud dari berbagai tantangan serta bagaimana rakyat Maluku Utara di bawah kepemimpinan formal dan informal menempuh cara-cara penyelesaiannya menurut situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Dari sudut inilah sejarah Maluku Utara semestinya dilihat.

Sejarah kepulauan rempah-rempah ini juga diwarnai dengan semaraknya peperangan, baik perang antara sesama warganya sendiri untuk memperebutkan hegemoni, maupun perang untuk mempertahankan harga diri, kehormatan dan integritas melawan tindak sewenang-wenang kekuasaan asing.

Di balik kecemasan, ketakutan dan ketidakpastian, kawasan ini telah melahirkan sejumlah *hero* dan tokoh-tokoh panutan. Tetapi, sejumlah tokoh pengecut, tidak percaya diri dan pribadi-pribadi yang lemah juga ikut dilahirkan. Karena mereka semua adalah pelaku yang telah tampil di atas pentas sejarah daerah ini, maka -- terlepas dari positif atau negatifnya kadar peranan masing-masing -- mereka harus diakomodasikan dan dicatat.

Selaras dengan premis ini, setiap negeri -- dengan pengecualian Jailolo, Ternate, Tidore dan Bacan yang secara nyata memang menjadi pelaku sejarah -- betapapun kecilnya, harus pula memperoleh tempat yang semestinya. Dengan demikian, daerah-daerah seperti Makian, Tobelo, Galela, Loloda, Gamkonora, Maba, Patani, Weda, dan lainnya, harus dipertimbangkan dan direkam.

Mengakhiri pengantar ini penulis ingin menyampaikan dari lubuk hatinya yang terdalam ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang langsung atau tidak langsung membantu pekerjaan penulis. Secara khusus, ucapan ini ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Pemerintah Kota Ternate, dan Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi Maluku Utara, yang telah memberikan sokongan dana yang memungkinkan penulis melakukan penelitian kepustakaan dan kearsipan selama lebih dari dua bulan di Jakarta.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pimpinan dan pengelola Perpustakaan Nasional, terutama kepada para petugas di lantai lima, Perpustakaan LIPI dan Arsip Nasional, yang telah memberikan kemudahan untuk mengakses koleksi buku langka dan dokumen-dokumen kearsipan yang mencakup berbagai kontrak politik, berbagai resolusi dan laporan umum, serta surat-surat di bawah bundel "Ternate." Tanpa bantuan lembaga-lembaga tersebut, buku ini tidak mungkin dapat ditulis.

Selanjutnya, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada almarhum Drs. A. Bahar Andili, mantan Bupati Halmahera Tengah, yang selain memotivasi dan memberikan

dorongan kuat yang konstan, juga telah menantang penulis untuk menyusun buku ini.⁹ Terima kasih serupa juga disampaikan kepada Drs. Fachri Ammarie yang telah bekerja keras dan melakukan berbagai ikhtiar sampai naskah ini naik ke percetakan. Demikian pula, terima kasih juga dihaturkan kepada Rektor Universitas Khairun yang telah memprakarsai penerbitan buku ini.

Ternate, 16 Nopember 2001

⁹ Pada 6 Nopember 2001, Drs. A. Bahar Andili berpulang ke hadirat Ilahi. Satu setengah bulan menjelang kepergiannya, penulis telah menyerahkan satu eksemplar draft buku ini kepadanya. Dan sepuluh hari setelah draft tersebut berada di tangan almarhum, ia sempat menelepon penulis dan mengemukakan pandangan serta sarannya mengenai isi draft tersebut.

CATATAN PENULIS UNTUK EDISI REVISI

Pada edisi ini perlu diberikan beberapa catatan klarifikasi. Dalam bab 1 sampai bab 11, penulis menggunakan nama *Maluku* untuk menggantikan *Maluku Utara*. Pergantian ini bukanlah tanpa alasan. Rangkaian pulau penghasil rempah-rempah – Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan kepulauan Bacan – sudah sejak masa awal dikenal secara mundial dengan nama Maluku. Nama ini pula yang dalam tambo Dinasti Tang dari Cina (618-906) disebutkan sebagai Mi-li-ki, dan buku Nagarakartagama (1365) menuliskannya dengan *Maloko*, sementara para pedagang Arab menamakannya *Jazirah al-Mamluk*.

Bangsa Portugis sebelum mengunjungi kawasan ini menyebutnya dengan *Kepulauan Rempah-rempah (as Ilhas de Crafo)*. Setelah mereka datang ke sini pada awal abad ke-16, barulah diketahui nama asli kawasan kepulauan ini sebagai *Molucco*. Karena jumlah pulauanya banyak, mereka menamakannya *Moluccas*. Bangsa Belanda yang tiba hampir seabad kemudian menyebutnya *Molukken*, untuk wilayah yang kini bernama Propinsi Maluku Utara.

Apabila di sana sini nama tersebut masih ditulis dengan Maluku Utara, terutama dalam bab 12 dan seterusnya, maka yang dimaksudkan adalah Maluku seperti dalam pengertian historis yang disebutkan di atas, yang juga sesuai dengan perkembangan sejarah ketatapemerintahan di kawasan ini sejak awal abad ke-19.

Pada edisi kedua yang direvisi ini, jilid I dan II edisi pertama disatukan dengan tidak menyertakan bab tentang kronik pada kedua jilid buku tersebut. Bahkan, bab Ternate, Tidore, Jailolo, dan Moro ditulis ulang berkenaan dengan referensi baru yang diperoleh. Karena revisi yang dilakukan cukup luas, judul buku juga mengalami perubahan.

Penulis sangat berterima kasih kepada Prof. Dr.A.B. Lopian, yang telah berkenan menulis Kata Pengantar, dan kepada Taufik Adnan Amal yang telah bersusah-payah meluangkan waktu di antara berbagai kesibukannya untuk melakukan penyuntingan ulang terhadap naskah edisi revisi ini. Terima kasih serupa juga disampaikan kepada Wardah Amelia yang telah membantu mengetik seluruh naskah tambahan, kepada Nyonya Ida Djafaar atas saran dan masukannya, serta semua pihak yang tak bisa disebutkan satu per satu, yang telah membantu penerbitan buku ini, khususnya kepada sdr. Petrarca Karetji dari SOFEI Makassar yang telah memprakarsai suatu pembahasan kritis atas naskah buku ini dengan organisasi Mahasiswa KEMAMORA di Salatiga sebagai langkah awal sebelum draft buku naik ke percetakan.

Banyak masukan dan saran berharga telah diajukan peserta diskusi kepada penulis, akan tetapi mengingat waktu yang amat terbatas, maka selain salah cetak yang telah dibetulkan, saran-saran selebihnya akan diupayakan dalam edisi berikutnya. Kepada KEMAMORA saya sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Penulis juga berterima kasih kepada Sdr. Rachmad Sabang dari BAKTI Makassar, Bank Dunia di Jakarta yang membiayai penelitian penulis, dan Clara Smith, kandidat doktor dari Universitas London.

Ternate, 1 Juni 2006

PENGANTAR PROF. DR. A. B. LAPIAN

Pengetahuan kita tentang sejarah Maluku Utara sangat terbatas. Umumnya diketahui bahwa pada abad ke-16 orang Portugis datang, disusul oleh orang Spanyol, dan kemudian orang Belanda. Berikut ada adu kekuatan Negara-negara Barat untuk menguasai daerah penghasil rempah-rempah ini. Juga diketahui sedikit tentang perlawanan Pangeran Nuku pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Tetapi sejak VOC terlibat dengan perang suksesi di Mataram, apalagi sesudah harga rempah-rempah menurun di pasar Eropa, Belanda lebih banyak memperhatikan eksploitasi pulau Jawa saja dan kemudian di paruh akhir abad ke-19 membuka perkebunan di Sumatera. Maka kesan umum seolah-olah sejarah Maluku Utara berhenti.

Begitu pula buku-buku tentang Sejarah Indonesia. Kisah sejarah hanya membuntuti arah perhatian Belanda, dari Maluku ke Jawa, lalu ke Sumatera. Sewaktu-waktu perhatian beralih ke daerah lain jika Belanda harus menghadapi perlawanan setempat, misalnya ke Makassar pada abad ke-17 dan awal abad ke-20, atau ke Banjarmasin pada tahun 1860-an, atau ke Lombok pada tahun 1894, dan seterusnya. Jadi sesungguhnya kisah sejarah tanah air di masa pra-kemerdekaan lebih banyak mengikuti perhatian pemerintah Batavia!

Karya Bapak Adnan Amal S.H. yang berjudul *Maluku Utara, Perjalanan Sejarah 1250-1800* (Ternate, Universitas Khairun, 2002) dan *Maluku Utara, Perjalanan Sejarah 1800-1950* yang ditulis bersama Irza Arnyta Djafaar dan diterbitkan tahun berikutnya, mengisi kekosongan pengetahuan kita tentang kawasan ini yang dahulu pernah mengundang begitu banyak pengunjung dari segala penjuru dunia untuk memperoleh cengkih yang hanya terdapat di pulau-pulau ini, jika tidak lewat perdagangan malahan diambil secara paksa! Sekarang dua buku tersebut—setelah diadakan revisi—diterbitkan dalam satu jilid. Tentu saja kami, bersama seluruh pembaca yang menaruh minat terhadap sejarah kawasan ini, menyambut dengan gembira upaya penerbitan kembali buku ini.

Sebagai sarjana hukum, penulis buku yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon, kini aktif mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Khairun di Ternate, namun perhatian beliau terhadap ilmu sejarah yang telah dimulai sejak duduk di bangku sekolah menengah tidak pernah berkurang, sehingga di masa pensiun beliau giat mencari data di Perpustakaan Nasional, Perpustakaan LIPI dan Arsip Nasional sehingga dapat menuangkan hasil penelitiannya dalam sebuah karya yang kaya akan informasi tentang masa lampau daerah Maluku Utara. Malahan sekarang beliau mulai berfikir bahwa “masuk Fakultas Hukum kemudian berkarier sebagai hakim, mungkin suatu kekeliruan!” Tetapi kami berpendapat bahwa justru karier sebagai hakim adalah dasar yang baik untuk mengadakan penelitian sejarah. Seorang hakim sebagaimana pun seorang sejarawan harus bersikap kritis terhadap sumber informasi, menyimaknya dan mempertimbangkan sumber-sumber mana yang dapat diandalkan dan yang mana tidak dapat diterima, untuk merekonstruksi sebuah peristiwa.

Sejarawan Amerika terkenal, Bernard Lewis, pernah mengemukakan ada tiga jenis sejarah yakni *history believed*, *history invented*, dan *history reconstructed*. Jenis pertama, yaitu sejarah yang umumnya diyakini di kalangan masyarakat tertentu, bisa benar tetapi bisa juga hanya sebuah mitos. Diperlukan bukti-bukti kuat untuk mendukungnya sehingga dapat

disusun kembali menjadi sebuah kisah sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Informasi sejarah dalam buku ini disajikan dalam bentuk kronik yang merupakan bekal pengetahuan yang berharga untuk memahami masa lampau Maluku Utara. Mudah-mudahan di kemudian hari kita akan memperoleh suatu kisah yang komprehensif, suatu kajian sebagai hasil sebuah dialog penulis dengan masa lampau berdasarkan segudang sumber yang telah dikumpulkan beliau.

Sepatutnyalah kami bersama peminat sejarah Maluku Utara lainnya mengucapkan selamat atas penerbitan buku ini. Semoga bapak M. Adnan Amal masih terus berkarya!

Adrian B. Lopian
Tomohon, Juni 2006.

BAB 1

Profil Maluku

Zaman Purba

Penelitian arkeologis yang dilakukan Australian National University – seperti dikemukakan Matthew Spring dalam tulisannya, "Recent Advances in Our Knowledge of Molucca's Earliest History"¹ – mengungkapkan bahwa Maluku telah didiami manusia sejak zaman es (*pleistocene*), sekurang-kurangnya 30.000 tahun lalu. Ketika itu, Maluku merupakan kawasan kritis yang menjadi mata rantai penghubung antara kawasan Pasifik dan Asia Tenggara. Menurut sejumlah sarjana, kawasan ini memiliki peran penting dalam masa prasejarah. Ia merupakan daerah lintas strategis bagi perpindahan penduduk Asia Tenggara ke Melanesia dan Mikronesia. Bahkan, Richard Shutler Jr. mengemukakan hipotesis bahwa Halmahera, pulau terbesar di Maluku, merupakan kunci untuk menetapkan lokasi tanah asal penduduk yang berbahasa Austronesia. Situs dan benda prasejarah telah ditemukan di pulau Waidoba dan Taneti (Kayoa), serta di Doro dan Tanjung Luari (Kao dan Tobelo). Sementara benda-benda peninggalan tradisi batu besar, berupa batu-besar (megalitik) di Ternate dan batu-kecil (neolitik) di Waidoba, juga telah ditemukan.²

Penduduk pertama Australia dan Papua mungkin telah menetap di kawasannya sekitar 60.000 tahun yang silam. Mereka berasal dari Asia serta sampai ke Australia dan Papua dengan melintasi Maluku. Ketika itu, bagian pulau Aru terletak pada kontinen yang sama dengan daratan Papua dan Australia. Hal ini terlihat dari persamaan jenis burung dan hewan. Burung Cendrawasih, misalnya, dapat ditemukan di Aru ataupun di Papua. Sementara Kangguru terdapat baik di Aru, Papua maupun Australia.

Beberapa daerah di Maluku – seperti Golo dan pulau Gebe – diperkirakan telah dihuni manusia sejak 33.000 tahun silam. Demikian pula, Morotai (Daeo dan Tanjung Pinang) telah dihuni manusia sekitar 10.000 hingga 15.000 tahun lalu. Sementara Periode "modern" baru berlangsung 3500 tahun silam, setelah zaman es berlalu.

Penduduk pertama kepulauan Maluku, seperti halnya daerah-daerah Nusantara lainnya, adalah ras Mongolid dan Austromelanesoid yang datang dari Asia Tenggara. Dari kedua ras itu, ras Austromelanesoid merupakan pemukim terbesar di Maluku. Mereka datang secara bergelombang dan menetap di beberapa pemukiman yang terisolasi. Unsur budaya paling dominan di Halmahera Utara, misalnya, adalah Austromelanesoid. Hal ini bisa dilihat dalam bahasanya yang tergolong serumpun dengan bahasa-bahasa Austronesia, seperti bahasa Papua dan bahasa-bahasa kepulauan Pasifik.

Suatu penelitian yang dilakukan para ahli Belanda pada abad ke-18 menunjukkan adanya kemiripan beberapa rincian antara orang-orang Gamraange dan orang-orang Papua kepulauan – pada masa belakangan, kedua wilayah ini masuk ke dalam kawasan kekuasaan Kesultanan Tidore. Demikian pula, suatu penelitian sejarah linguistik menunjukkan bahwa

¹ Sumber: Internet <http://artolpha.anu.au/web/arc/resources/pacifis/maluku-utara>

² Santoso Sugondho "Penelitian Arkeologi Maluku Utara", dalam E.K.H. Masinambouw (ed.) *Halmahera dan Raja Ampat*.

antara 10.000 hingga 15.000 tahun lalu, orang-orang berbahasa Papua pertama kali mendiami kawasan timur Indonesia, dan bahasa yang dituturkan orang-orang Halmahera Utara serta Morotai, termasuk bahasa orang-orang Papua Barat, dapat diklasifikasikan ke dalam rumpun bahasa Austronesia.

Perubahan dan pergantian budaya di Maluku baru terjadi sekitar 2000 tahun silam, setelah datangnya orang-orang Negroid. Penduduk baru ini, yang menggunakan bahasa Austronesia, menghuni seluruh bagian kepulauan Maluku. Jejak arkeologis menunjukkan bahwa bahasa-bahasa Austronesia telah melintasi pulau-pulau di Asia Tenggara menuju bagian utara Papua dan keluar ke kepulauan Melanesia, Polynesia dan Mikronesia. Bahasa dan budaya Austronesia juga melintasi Selandia Baru melalui pesisir pantai Papua. Ia juga menyebar ke Asia Tenggara sampai ke Madagaskar di Afrika. Pemukiman tertua orang Austronesia terdapat di pulau Kayoa. Setelah itu, pemukiman ini berkembang ke daerah-daerah lain di Maluku Utara dan di Seram Barat, pulau Ambon serta Hitu. Jejak budaya yang sama juga dapat ditemukan di pulau Aru.

Perubahan budaya selanjutnya – dari zaman batu ke zaman tembikar – di daerah Maluku terjadi kira-kira 2000 tahun silam, bertepatan dengan dimulainya kegiatan manusia yang bersifat ekonomis. Menurut Sarasin bersaudara,³ setelah orang Negroid, datang pula orang Melayu ke Maluku dalam dua gelombang. Gelombang pertama disebut *proto-Melayu* dan gelombang kedua *doutro-Melayu*. Setelah kedatangan gelombang kedua, *proto-Melayu* terdesak. Untuk mempertahankan eksistensinya, mereka menyingkir ke daerah pedalaman serta membentuk komunitas terpencil. Orang-orang Alifuru di pedalaman Halmahera dan suku-suku terasing lainnya mungkin berasal dari kelompok yang tersingkir ini. Mereka lazimnya mendiami tepian danau atau hulu sungai serta terdiri dari beberapa suku: suku Tobaru di Galela, Wayoli di Sahu, Boenge di Ibu, Pagu di Kao, Kusuri di Tobelo, dan suku-suku lainnya yang terdapat di Halmahera Timur serta kepulauan Sula. Walaupun bagian terbesar dari suku-suku ini telah dimukimkan kembali, sisa-sisanya masih dapat ditemukan terutama di Halmahera Utara dan Halmahera Timur.

Geografi

Maluku Utara adalah daerah kepulauan yang terletak pada lintasan garis khatulistiwa dan berada pada 124° sampai 129° bujur timur dan 3° lintang utara sampai 3° lintang selatan. Ada sekitar 353 pulau besar dan kecil -- baik yang berpenghuni ataupun belum -- di wilayah ini. Pulau terbesarnya dan paling utama adalah Halmahera, menyusul pulau-pulau penting lainnya seperti Obi, Sula, Morotai, Bacan, Makian, Ternate dan Tidore.

Luas wilayah daratan Maluku Utara mencapai 32.000 km², sementara kawasan lautnya sebesar 107.381 km². Di sebelah utara kawasan ini berbatasan dengan Samudera Pasifik, di sebelah selatan dengan Laut Seram, di sebelah timur dengan Laut Halmahera, dan di sebelah barat dengan Laut Maluku.

Fisiografi Maluku Utara⁴ dibentuk oleh relief-relief besar, di mana palung-palung oseanis dan punggung-punggung pegunungan saling berganti secara amat mencolok. Kepulauan ini terdiri dari dua lengkungan kesatuan kepulauan yang berjalan melalui Filipina,

³ Drs. H.M. Shaleh Putuhena, *Penyebaran Agama Islam di Maluku*, (Makassar: Balai Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat IAIN Alauiddin, 1995), p. 21.

⁴ Untuk fisiografis dan topografis Maluku Utara, lihat A. Bahar Andili, *Profil Daerah Maluku Utara*, dalam Masinambouw (ed.), Halmahera dan Raja Ampat, pp. 3 ff.

Sangir Talaud, Minahasa, yang dilingkupi oleh lekuk Sulawesi, palung Sangihe yang vulkanis, dan lengkungan kontinen Melanesis yang bergerak dari Papua (Irian) bagian utara, Halmahera Timur dan berakhir di Maluku Utara bagian utara yang nir-vulkanis.

Secara topografis, sebagian besar Maluku Utara terdiri dari pulau-pulau vulkanis dan pulau karang, dengan jenis tanah dominan berupa tanah kompleks *brown forest soil*, tanah mediteran, tanah latosol dan tanah renzina. Penyebaran daratannya terdiri dari kelompok pulau besar, seperti Halmahera, kelompok pulau sedang, seperti Morotai, Bacan, Obi, Taliabu dan Mangoli, serta kelompok pulau kecil, seperti Ternate, Tidore, Makian, Kayoa, dan sebagainya.

Asal-usul Nama "Maluku"

Van Fraassen,⁵ sembari mengutip Pigeaud, mengemukakan bahwa nama Maluku telah dicatat dalam *Nagarakertagama* (1365) sebagai "Maloko." Diduga bahwa penulis *Nagarakertagama* telah mengadopsi nama itu dari kebanyakan pedagang Arab yang melakukan kegiatan perniagaan di Nusantara.

Dalam hikayat Dinasti Tang (618-906) disebutkan eksistensi suatu kawasan yang digunakan untuk menentukan arah daerah Ho-ling (Kaling) yang terletak di sebelah baratnya. Kawasan ini bernama "Mi-li-ki," yang diperkirakan sebagai sebutan untuk Maluku. Penulis-penulis Cina dari zaman Dinasti Tang, yang menyebutnya sebagai "Mi-li-ku," tidak dapat memastikan lokasi sesungguhnya kawasan yang ditunjuk dengan nama tersebut. Pada masa kemudian barulah diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan "Mi-li-ku" itu adalah gugusan pulau-pulau Ternate, Tidore, Makian, Bacan dan Moti.⁶

Dalam rumpun bahasa daerah Maluku Utara, seperti bahasa Galela, dikenal adanya kata "luku" yang sering diberi awalan "ma." Dalam bahasa daerah Halmahera Utara itu, kata "luku" berarti "dalam." Dengan menambahkan preposisi "ma" kepada kata "luku," ungkapan "Maluku" bermakna "dalam sekali."⁷ Dalam bahasa Tobelo, ada juga kata "loko", tetapi dengan makna yang sama dengan kata serupa dalam bahasa Ternate yang berarti "gunung." Kata "loko," dalam bahasa Galela, memiliki makna "batu karang" atau "batu cadas." Apakah kata-kata dari bahasa daerah ini menunjuk kepada asal-usul nama "Maluku" merupakan suatu pertanyaan yang jawabannya tidak dapat dipastikan.

Suatu konstruk pendapat yang dibangun tentang asal-usul nama "Maluku" mengembalikan kata ini kepada ungkapan "loko" yang berarti "gunung." Ungkapan ini, seperti ditunjukkan di atas, dikenal dalam bahasa-bahasa di daerah Maluku Utara. Ungkapan "Ternate maloko" bermakna "Ternate makie" atau "gunung Ternate." Dari ungkapan ini muncul kata bersayap: "Ternate se Tidore, Moti se Mara Maloko Kie Raha" ("Ternate dan Tidore, Moti dan Makian, mempunyai empat gunung"). Kata "loko" berubah pengucapannya menjadi "luku," maka terjadilah ungkapan: "Ternate se Tidore, Moti se Mara Maluku kie raha" ("Ternate dan Tidore, Moti dan Makian, dunia dari empat gunung").

Pendapat lain, dengan mengutip beberapa informan lokal, menyatakan bahwa "Maluku" terbentuk dari kata "moloku," yang dalam bahasa Ternate bermakna "menggenggam, menyatukan" dan erat kaitannya dengan nama konfederasi empat kerajaan

⁵ Ch. F. van Fraassen, *Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel*, (disertasi, Leiden: 1987), vol. 1, pp. 24 f.

⁶ Paramita R. Abdurachman, "Moluccan Responses to the First Intrusions of the West," *Dynamic of History*, eds. Haryati Subadio, et. al., (Amsterdam: North Holland Pub. Co., 1978), p. 163.

⁷ Van Fraassen, *Ternate*, vol. 1., pp. 24 f.

tradisional, *Moloku Kie Raha* ("persatuan empat kerajaan"), serta dengan moto persekutuan tersebut, *moi-moi i moloku* ("semua dalam satu kesatuan / genggam").⁸ Tetapi, pendapat ini sulit diterima berdasarkan beberapa alasan berikut:

Pertama: Kata "loku" bukan berasal dari bahasa Ternate, tetapi dari bahasa Melayu pasaran yang juga digunakan di Ambon dan Manado. "Loku" memiliki banyak arti: Dalam ungkapan "beras satu loku" ("satu genggam beras"), kata ini merujuk kepada takaran. Kata ini juga bermakna "mengangkat," misalnya dalam ungkapan "loku samua" ("angkat semua"), "loku-loku" ("alat pengangkat sampah"). Selanjutnya, kata "loku" bisa bermakna "membersihkan." Apabila seorang bayi atau anak kecil buang hajat besar, maka ungkapan "loku" dalam konteks ini bermakna "membersihkan." Dengan demikian, dalam bahasa Melayu pasaran, "loku" memiliki makna yang beragam. Selain itu, kata ini tidak identik dengan "konfederasi", yang merupakan suatu istilah ketatanegaraan.

Kedua: Sepanjang sejarah kerajaan-kerajaan di Maluku, belum pernah terbentuk suatu konfederasi. Sultan Khairun dari Ternate pernah mengimpikan Ternate berkonfederasi dengan Jailolo di bawah kepemimpinannya. Demikian pula, Sultan Nuku dari Tidore pernah mencita-citakan suatu konfederasi antara Tidore dan Jailolo, serta untuk itu ia menghidupkan kembali kerajaan Jailolo – yang telah dianeksasi secara total oleh Ternate di bawah Sultan Mandar Syahsyah sejak 1636 – serta mengangkat *Sangaji Tahane* (Makian) sebagai Sultan Jailolo. Tetapi, baik Khairun maupun Nuku tidak pernah berhasil mewujudkan cita-cita mereka. Apabila dikatakan bahwa persekutuan Moloku Kie Raha dibentuk dalam suatu pertemuan di Moti pada 1322,⁹ maka perlu dijelaskan bahwa pertemuan yang dilakukan oleh empat kerajaan Maluku di Moti pada tahun itu sama sekali tidak mengagendakan pembicaraan tentang konfederasi.¹⁰

Ada pendapat yang lebih populer tentang asal-usul kata "Maluku." Menurut pendapat ini, kata "Maluku" terambi dari kata Arab "malik" yang berarti "raja." Pedagang Arab menamakan deretan pulau-pulau di bagian utara Maluku sebagai "jazirah al-mamluk" ("kepulauan raja-raja"), yang menunjuk kepada empat kerajaan di zaman bahari yang sangat berpengaruh secara politis dan ketatanegaraan, yaitu Jailolo, Ternate, Tidore dan Bacan. Tetapi, tidak semua kerajaan itu selalu tetap dalam persekutuan untuk jangka waktu lama. Ternate merupakan kerajaan terkemuka, menyusul Tidore.¹¹

Nama Maluku sudah dikenal secara nasional sebelum masa Hayam Wuruk (1350-1389). Ketika kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya, pedagang-pedagang Melayu dan Jawa telah tiba di Maluku untuk berniaga. Sejak berkuasanya Kolano Kamalu di Ternate, telah banyak berdatangan pedagang Jawa dan Melayu serta menetap di sana. Bahkan Kolano Kamalu menikahi seorang perempuan Melayu. Orang-orang Jawa dan Melayu inilah yang membawa rempah-rempah Maluku ke pelabuhan-pelabuhan penting di pesisir utara Jawa, sampai ke Aceh dan Malaka.

Tetapi, nama Maluku ketika itu belum dikenal luas secara mundial. Kawasan ini masih merupakan *terra in cognita*. Ketika orang Portugis pertama kali tiba di Maluku pada 1512, misi yang dipimpin Antonie de Abreu – bertolak dari Malaka dalam bulan Desember 1511 –

⁸ Shaleh Putuhena, *Penyebaran Agama Islam di Maluku*, p. 16.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Tentang pertemuan Moti dan hasilnya dalam bab 4.

¹¹ H.J. de Graaf, *De Geschiedenis van Ambon en de Zuid Molukken*, (Wever BV, Franeken, 1971), p. 20, dan kata pengantar, p. 5. Paramita Abduachman, dalam *Moluccan Responses*, juga menyinggung sumber-sumber pedagang Arab tentang nama Maluku tersebut.

tidak mengetahui bahwa Banda adalah sebagian dari Maluku. Alfonso d'Albuquerque yang mengeluarkan perintah pelayaran untuk misi ini hanya menugaskan untuk berlayar ke *as ilhas de crafo* atau pulau rempah-rempah. Baru setelah 1514, nama Maluku dikenal. Orang-orang Portugis yang menemukan bahwa Maluku itu terdiri dari banyak pulau kemudian menamakannya "Moluccos." Dalam laporan-laporan yang dikirim setelah ekspedisi pertama, nama pulau rempah-rempah itu diganti dengan Maluku. Sementara bangsa Spanyol yang tiba 9 tahun kemudian (1521), secara resmi menyebut Maluku untuk daerah yang mereka kunjungi.

Arti Nama "Maluku"

Nama "Maluku" memiliki tiga pengertian:

- a. Maluku ditinjau dari sudut sejarah;
- b. Maluku ditinjau dari sudut perdagangan dan pelayaran; dan
- c. Maluku ditinjau dari sudut administrasi dan kelembagaan pemerintahan.¹²

a. Maluku dari Sudut Sejarah

Untuk pengertian pertama, yakni dari sudut sejarah, yang dimaksudkan Maluku pada zaman bahari hanya terbatas pada pulau-pulau di kawasan utara Maluku, yaitu Ternate, Tidore, Makian, Moti dan Bacan. Antonio Galvao, yang menjabat sebagai Gubernur Portugis ke-7 di Maluku antara 1536-1540, menulis dalam *Historia das Moluccas*:

Nama sebenarnya kepulauan Maluku terbatas pada pulau-pulau yang berada di bawah pemerintahan dan raja-raja Maluku, dan lebih khusus lagi adalah: Ternate, Tidore, Moti, Makian, Kayoa, Bacan, Labuha, yang sebelumnya bernama: Gapi, Duko, Moti, Makian (Mara), Maligo, Seki, dan Kasiruta.¹³

Sementara P.H. van der Kemp¹⁴ berpendapat bahwa Maluku yang sebenarnya meliputi Ternate, Tidore, Bacan dan Halmahera (Jailolo). Pendapat serupa juga dikemukakan Naidah, penulis *Hikayat Ternate*: "Maluku artinya Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan." Menurutnya, hal ini disebabkan "Maluku kie raha ma asal rimoi bato, ma-kabasaran se ma-istiadat rimoi bato." ("Empat gunung Maluku sesungguhnya punya satu asal-usul, punya kemegahan dan budaya yang sama").¹⁵

b. Maluku dari Sudut Perdagangan dan Pelayaran

Dalam pengertian kedua, yakni Maluku ditinjau dari sisi perdagangan dan pelayaran, maka yang menjadi rujukannya adalah Traktat London 1824 – perjanjian bilateral antara Inggris dan Belanda – berikut pertukaran nota di antara kedua kerajaan Eropa ini berkenaan dengan traktat tersebut. Menurut Traktat London, yang termasuk daerah Maluku untuk pelayaran dan perdagangan meliputi Sulawesi di belahan barat, Papua di belahan timur, Timor

¹² P.H. van der Kemp, *Het Ned. Indische Bestuur van 1817 op 1818*. Martinus Nyhoff s'Gravenhage, 1917, p. 323 f.

¹³ Antonio Galvao, *Historia das Moluccas*, tr. Herbert M. Jacobs SJ. Rome: Jesuit Historical Institute, 1971, p. 36.

¹⁴ P.H. van der Kemp, *op.cit.*

¹⁵ Naidah, *Sejarah Ternate*, (1878), p. 382.

di belahan selatan, dan Kalimantan di belahan utara, termasuk pulau-pulau yang ada di dalamnya.

c. Maluku dari Sudut Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan

Untuk pengertian ketiga, Maluku ditinjau dari sudut administrasi dan kelembagaan pemerintahan, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Traktat London tahun 1824, administrasi pemerintahan Maluku meliputi: Beberapa pulau yang dulu dikenal dengan nama Maluku pada masa-masa awal yaitu: Ternate, Tidore, Bacan, dan Halmahera/Jailolo, yang menurut Traktat London tersebut diperluas berdasarkan nota pemerintah Belanda dan Kerajaan Inggris, sehingga meliputi: Sulawesi di barat, Papua (Nieuw Guinea) di timur, dan Timor di selatan. Pada tahap berikutnya, kepulauan Maluku hanya meliputi: Ambon, Banda, Ternate, Tidore, Bacan, serta Manado/dan semua daerah yang berada di bawah kekuasaannya, sesuai Lembaran Negara tahun 1824 no. 9 a, 21 a, 26 a, dan 28 a.
- b) Pada 1840, Pemerintahan Maluku hanya terdiri dari: Kepulauan Ambon, kepulauan Banda, dan Ternate, serta semua daerah yang berada di bawah kewenangan Ambon, Banda, dan Ternate. sementara Manado dikeluarkan dari pemerintahan Maluku, dan dijadikan Residensi tersendiri.

Maluku Sebelum Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat

Situasi Politik

Sejarah Maluku identik dengan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di daerah ini. Sekalipun sebagian besar mitos dan legenda, seperti telah dibahas dalam bab lalu, hanya menyebutkan eksistensi 4 kerajaan besar di Maluku, kenyataan historis menunjukkan bahwa di kawasan ini terdapat lebih dari 4 kerajaan. Empat kerajaan yang disebut dalam berbagai mitos dan legenda – secara kronologis adalah Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan – memang merupakan kerajaan-kerajaan besar yang berpengaruh dan telah eksis sejak paruh pertama abad ke-13. Di samping itu, ada beberapa kerajaan kecil lainnya – seperti Loloda, Moro dan Obi – yang tidak begitu berpengaruh lantaran didominasi kerajaan-kerajaan besar, tetapi telah menghiasi lembar sejarah Maluku dan pantas dicatat. Penguasa kerajaan-kerajaan di Maluku ini disebut *Kolano* (dari bahasa Jawa *Kelana*) atau raja, dan setelah memeluk agama Islam sebutan kolano diubah menjadi sultan.

Di antara empat kerajaan besar di atas, hanya Ternate dan Tidore yang mempunyai posisi penting dalam situasi politik, ekonomi, maupun militer. Keduanya mempunyai pandangan politik yang hampir sama yaitu ekspansionis, dan karenanya mempunyai kekuatan militer yang relatif hampir berimbang. Bedanya, dalam mengimplementasikan ambisi ekspansionismenya, Ternate mengarahkan bidikannya ke barat sementara Tidore ke timur.

Demikianlah, Kerajaan Ternate menanamkan pengaruh dan kontrolnya atas Ambon dan bagian barat pulau-pulau Seram. Pada abad ke-16 domonion Ternate akhirnya membentang dari Mindanao di utara hingga Flores di selatan, dari Sulawesi Utara (Manado, Gorontalo, dan kepulauan Sangir Talaud) hingga pantai timur Sulawesi Tengah (Kayeli, Tobungku, Banggai), dari pantai timur Sulawesi Selatan (Buton) hingga Seram Barat dan Banda. Kerajaan ini juga mulai mengobok-obok wilayah Kerajaan Jailolo, Loloda, dan Moro, yang berakhir dengan lenyapnya kerajaan-kerajaan tersebut dan menjadi bagian integral

Kerajaan Ternate. Pada pertengahan abad ke-16, puncak kedigdayaan Ternate tercapai di masa pemerintahan Sultan Khairun (1535-1545) dan dari 1546-1570 serta Sultan Babullah (1570-1583).

Sementara Tidore sebagai pesaing Ternate dalam ekspansi teritorial, membidik kawasan timur. Setelah menguasai hampir tiga perempat Halmahera dan Seram Timur, Tidore berhasil menguasai Kepulauan Raja Ampat, kemudian Papua Daratan dan menjadikan daerah-daerah tersebut sebagai Vasalnya. Walaupun secara politis kedua kerajaan ini bersaing ketat, akan tetapi suatu perang terbuka dan frontal tidak pernah terjadi. Kadang terjadi insiden kecil mewarnai hubungan keduanya, tetapi tidak sampai menimbulkan ofensif militer secara terbuka. Pulau Makian misalnya, beberapa kali beralih tangan antara kedua kerajaan, tetapi hal itu lebih disebabkan keinginan untuk menguasai sumber-sumber daya alam (ekonomi) dan bukan politik atau militer. Bahkan pada tahun 1332 ke empat kerajaan menandatangani sebuah persekutuan yang terkenal dengan nama *Moti Verbond*. Selain persaingan politik dan perebutan hegemoni regional, sejak 1512 telah timbul persaingan baru, yaitu upaya untuk menggaet mitra asing (Barat) ke pihak masing-masing.

Ketika terbetik berita bahwa armada Portugis telah tiba di Banda, Sultan Ternate Bayamullah (Boleif), segera mengirimkan *juanga* (perahu tempur) untuk menjemput Francisco Serrao di Ambon. Sultan Tidore juga melakukan tindakan serupa tetapi kalah cepat, sehingga ketika utusannya tiba di Ambon, Francisco Serrao telah lebih dulu diboyong ke Ternate.

Kerajaan Jailolo, sebagai kerajaan tertua yang eksis lebih dahulu dari ketiga kerajaan besar lainnya, pernah memiliki kekuasaan yang kuat baik di bidang politik maupun militer, dan menjadi kerajaan adidaya di kawasan Maluku. Tetapi pengaruh politik dan militer kerajaan ini tidak berlangsung lama. Dengan bantuan Portugis, Ternate berhasil melikuidasi kerajaan tersebut pada tahun 1551. Dari sebuah kerajaan besar, Ternate berhasil mendegradasinya hingga menjadi sebuah distrik (*sangaji*). Sejak saat itu Jailolo tidak pernah berhasil mengembalikan dan membangun kekuasaannya seperti semula.

Bacan, kerajaan yang semula adalah Kerajaan Makian dan dipindahkan ke Pulau Kasiruta karena letusan gunung berapi Kie Besi, hanya memiliki teritori di pulau Bacan dan Kasiruta. Dalam perjalanan selanjutnya, kerajaan ini berhasil menguasai beberapa perkampungan di pantai utara Pulau Seram dan wilayah Gane Barat di selatan Halmahera. Dalam persaingan politik antara Ternate dan Tidore, Bacan lebih dekat kepada Tidore. Kerajaan ini juga memainkan peranan penting dalam sejarah penyebaran misi Katolik di Maluku. Bahkan pada tahun 1557, Raja Bacan yang baru dilantik, Alauddin, mengonversi agamanya dari Islam ke Kristen Katolik. Ia menyatakan seluruh kerajaan dan keluarganya menjadi Kristen dan mengganti namanya dengan Dom Joao. Atas ultimatum Babullah, Dom Joao kembali lagi memeluk agama Islam.

Ketiga kerajaan kecil lainnya tidak mempunyai peranan baik politik, ekonomi, maupun militer, yang relevan. Kerajaan Obi dicaplok Bacan, sementara Moro dan Loloda di Halmahera Utara oleh Babullah digabungkan dengan Ternate.

Situasi Pemerintahan

Karena Maluku merupakan jazirah kerajaan, tidak mengherankan bila gaya pemerintahannya adalah monarki yang dielaborasi dengan unsur-unsur adat dan tradisi. Takhta adalah lambang supremasi pemerintahan yang diduduki seorang raja sebagai pengambil keputusan akhir atas semua urusan kerajaan dan pemerintahan. Raja dibantu suatu

birokrasi yang disebut *Bobato* (semacam Menteri), yang dikepalai seorang *jogugu* (perdana menteri), yang selalu dijabat tokoh-tokoh kepercayaan raja. Pimpinan militer dipegang seorang *Kapita Lau* (Panglima Laut) yang selalu dijabat putera mahkota atau salah seorang putera raja lainnya. Wilayah Kerajaan terbagi dalam beberapa *Jiko* (semacam distrik) yang dipimpin seorang *Sangaji* (dari bahasa Jawa: Sang Aji) yang disebut *Jiko Ma Kolano* (Kepala Pemerintahan Wilayah) yang membawahkan sejumlah *Soa* (komunitas setingkat desa) yang dikepalai seorang *Kimalaha*.

Di samping seorang *Sangaji* yang menjalankan tugas pemerintahan, raja juga mengangkat seorang *Utusang* sebagai wakil pribadi raja untuk mengurus kepentingan kerajaan, seperti mengumpulkan upeti dan tugas-tugas khusus lainnya. Pada daerah-daerah taklukan yang bukan kerajaan, raja mengangkat seorang *Salahakan* (Gubernur), sementara daerah-daerah taklukan yang sudah ada rajanya maka raja tetap memegang kekuasaan dan daerahnya menjadi vasal.

Situasi Ekonomi

Kekayaan Maluku terutama diperoleh dari rempah-rempah cengkih. Tanaman rempah-rempah ini mula-mula tumbuh secara liar di pulau Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Kasiruta. Cengkih baru dibudidayakan mulai tahun 1450. Kekayaan akan rempah-rempah tersebut telah menyebabkan para pedagang Cina, Melayu, Jawa, Arab, Persia, dan Gujarat datang di daerah-daerah ini dengan membawa tekstil, beras, perhiasan dan kebutuhan hidup lainnya untuk ditukar dengan rempah-rempah.

Para pedagang asing tersebut meraup keuntungan berlipat ganda dari pada rakyat kerajaan-kerajaan Ternate, Tidore, dan Bacan penghasil rempah-rempah. Tetapi para sultan, terutama Ternate dan Tidore yang menguasai sentra-sentra perdagangan rempah-rempah, juga menjadi kaya raya dan sangat makmur.

Bahan makanan utama rakyat Maluku adalah sagu, beras, dan ikan. Tetapi sagu dan beras tidak dihasilkan oleh Ternate dan Tidore. Kedua jenis bahan pangan ini didatangkan dari Moro, Bacan, Sahu, dan wilayah Halmahera lainnya.

Situasi Keagamaan

Sebelum masuknya Islam, kepercayaan yang dianut raja dan rakyat adalah Animisme. Walaupun dalam sejarah Indonesia dikatakan bahwa sebelum masuknya Islam, Kerajaan Majapahit yang Hindu itu telah menguasai seluruh Nusantara, namun di Maluku tidak terdapat bukti kesejarahan bahwa rakyat dan para rajanya pernah menjadi penganut agama Hindu. Di kawasan ini tidak pernah ditemukan candi atau prasasti yang mengidentifikasi hal itu. Bertolak dari bukti-bukti kesejarahan tersebut, sangat disangsikan apakah kekuasaan Majapahit yang besar itu pernah sempat menanamkan pengaruhnya di Maluku.

BAB 2

Kerajaan-kerajaan Maluku dalam Mitos dan Legenda

Mitos Kelahiran Kerajaan-kerajaan Maluku

Sejumlah mitos mengisahkan kelahiran dan asal-usul kerajaan-kerajaan di Maluku, khususnya empat kerajaan besar: Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Naidah, salah seorang klan Jiko yang menjabat sebagai Hukum Soasio dari 1859-1864 dan penulis *Sejarah Ternate*, berceritera tentang riwayat kelahiran raja-raja Maluku yang mirip legenda Jaya Katwang di Jawa Timur. Naskahnya, yang ditulis dalam bahasa Ternate, telah diterjemahkan oleh P. van der Crab -- mantan Residen Ternate (1863-1864) -- ke dalam bahasa Belanda dan diberi anotasi, kemudian diterbitkan pada 1878 dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indie (BKI)*.¹ Hikayat ini diberi judul oleh Crab: "Geschiedenis van Ternate, in der Ternataanschen en Maleischen Tekst, beschreven door der Ternataan Naidah, met Vertaling en Aantekeringen door P. van der Crab" (*Sejarah Ternate*, dalam Teks berbahasa Ternate dan Melayu, ditulis oleh Naidah, seorang Ternate, dengan terjemahan dan catatan oleh P. van der Crab).

Tentang asal-usul kerajaan-kerajaan besar Maluku, Naidah menuturkan:

Syahdan, mendaratlah di Ternate seorang Arab bernama Jafar Sadek (terkadang disebut juga Jafar Noh).² Dia naik ke atas sebuah bukit bernama Jore-jore dan membangun rumahnya di sana. Di kaki bukit itu terdapat sebuah danau kecil bernama Ake Santosa. Suatu petang, ketika hendak mandi, Jafar Sadek melihat tujuh bidadari sedang mandi di danau itu. Jafar Sadek menyembunyikan salah satu sayap ketujuh bidadari itu. Setelah puas mandi, ketujuh bidadari bersiap-siap pulang, tetapi salah seorang di antaranya, bernama Nur Sifa, tidak dapat terbang pulang karena sayapnya hilang. Nur Sifa adalah puteri bungsu di antara ketujuh bersaudara itu.

Karena tidak punya sayap, Nur Sifa terpaksa tinggal di bumi dan kawin dengan Jafar Sadek. Dari perkawinan ini lahirlah tiga orang anak laki-laki, dan masing-masing diberi nama: yang tertua Buka, yang kedua Darajat dan yang ketiga Sahajat.

Pada suatu hari, ketika Nur Sifa memandikan si bungsu Sahajat, ia melihat bayangan sayapnya yang terpantul di air mandi Sahajat. Ia melihat ke atas dan sayapnya tersisip di atap rumahnya, tempat suaminya menyembunyikannya. Ia lalu mengambil sayapnya dan mencoba terbang sebanyak tiga kali. Tetapi, setiap kali terbang, si bungsu Sahajat selalu menangis. Ia lalu menampung air susunya pada sebuah gelas serta berpesan kepada si sulung Buka agar memberi minum adiknya bila menangis, dan agar memberitahukan ayahnya kalau pulang, bahwa ibunya telah kembali ke tempat asalnya. Setelah itu, Nur Sifa terbang tanpa mengindahkan tangisan Sahajat.

¹ BKI, 26. pp.381-493.

² Tanggal 6 Muharram 643 H/1245 M disebut Naidah sebagai tanggal kedatangan Jafar Sadek ke Ternate

Ketika Jafar Sadek tiba di rumah dan mendengar pemberitahuan Buka, ia pun menangis. Tangisan Jafar Sadek didengar seekor burung elang laut (Ternate: *guheba*) yang bertanya kepadanya apa yang telah terjadi.³ Setelah Jafar Sadek menceritakan segalanya, burung itu menawarkan jasa menerbangkannya ke Kayangan dengan menaiki punggungnya. Sesampainya di Kayangan, Jafar Sadek bertemu ayah Nur Sifa dan berkata kepadanya: "Isteri saya, anak Anda." Penguasa Langit (*heer van de hemel*) itu lalu menghadirkan tujuh bidadari yang secara lahiriah mirip, baik wajah, postur tubuh maupun perawakannya. Jafar Sadek diminta menunjuk isterinya, salah seorang di antara ketujuh bidadari yang serupa itu, dengan syarat bila ia tidak dapat menunjuk secara tepat, ia harus mati. Ia boleh membawa pulang isterinya bila dapat menunjuknya dengan tepat.

Dalam keadaan bingung, datanglah seekor lalat besar berwarna hijau (Ternate: *gufu sang*) hinggap di pundaknya dan menawarkan jasa sambil meminta imbalan. Kepada *gufu sang* Jafar Sadek menjanjikan semua yang berbau busuk di muka bumi ini untuknya, dan *gufu sang* menyetujuinya dengan pesan: "Perhatikan baik-baik, saya akan terbang mengelilingi semua bidadari itu, tetapi pada siapa aku hinggap, itulah isterimu." *Gufu sang* mengenal Nur Sifa dan bau badannya sebagai seorang yang tengah menyusui. Atas bantuan *gufu sang*, Jafar Sadek menunjuk dengan tepat isterinya, dan akhirnya Penguasa Kayangan menerima Jafar Sadek sebagai anggota keluarganya serta merestui perkawinannya.

Selama tinggal di Kayangan, Jafar Sadek dan Nur Sifa dikaruniai seorang putera yang diberi nama Mashur Malamo. Setelah putera itu berusia setahun, mereka pamit hendak kembali ke bumi. Tetapi, setiap kali akan kembali, si kecil selalu menangis. Maka Penguasa Langit itu berkata: "Pasti ia mau penutup kepalaku" (Ternate: *kopiah*). Ketika *kopiah* itu dikenakan di kepala si kecil, ia pun diam. Maka kembalilah keluarga itu ke bumi, dan Mashur Malamo dengan *kopiah* yang dibawanya dari langit, pemberian kakeknya si Penguasa Langit.

Ketika Jafar Sadek dan Nur Sifa tiba di bumi, mereka bersua kembali dengan ketiga anaknya yang telah lama ditinggalkan. Nur Sifa memberi tanda-tanda tertentu sebagai tempat duduk keempat anaknya. Anak pertama, Buka, diberinya sepotong buncak pohon (Ternate: *age*). Buka kemudian bertolak ke Makian dan menjadi cikal-bakal Kerajaan Bacan. Anak kedua, Darajat, mendapat tempat duduk sepotong kayu terapung (Ternate: *ginoti*). Ia bertolak ke Moti dan menjadi cikal bakal Kerajaan Jailolo. Anak ketiga, Sahajat, memperoleh batu (Ternate: *mari*) sebagai tempat duduk. Ia pergi ke Tidore dan menjadi cikal-bakal Kerajaan Tidore. Anak keempat, Mashur Malamo, memperoleh tempat duduk sebuah kursi dan menjadi cikal-bakal Kerajaan Ternate. *Kopiah* pemberian kakeknya yang dibawa dari langit menjadi mahkota Kerajaan Ternate.⁴

Hikayat Bacan

Pada 1923, W. Ph. Coolhaas mempublikasi *Hikayat Bacan* dalam *Tijdschrift van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschap* (jilid LXIII, penerbitan kedua). Belakangan, hikayat ini diterbitkan terpisah dalam bentuk buku dengan judul *Kroniek van het Rijk Batjan*, dengan teks dalam bahasa Belanda dan Melayu. Sekalipun tidak diketahui siapa penulis *Hikayat Bacan*, suntingan Coolhaas ini merupakan salah satu sumber penting tentang sejarah Bacan, dan kerajaan Maluku lainnya.

³ Dalam cerita ini *guheba* disebutkan juga sebagai burung garuda

⁴ Naidah, *Sejarah Ternate*, pp. 382-384.

Hikayat Bacan menuturkan mitos kelahiran empat kerajaan Maluku secara agak berbeda dari versi Naidah dalam *Sejarah Ternate* yang telah dikemukakan di atas. Tokoh sentral dalam *Hikayat Bacan* masih tetap seorang Arab bernama Jafar Noh atau Jafar Sadek. *Hikayat Bacan* tidak menyebut nama isterinya, demikian pula tujuh bidadari Kayangan, seperti dituturkan Naidah. Jika Naidah menyebutkan jumlah anak Jafar Sadek sebanyak empat orang dan semuanya laki-laki, maka *Hikayat Bacan* menyebut lima orang, empat laki-laki dan seorang perempuan. Kisah kelahiran raja-raja pendiri kerajan di Maluku dalam versi *Hikayat Bacan* adalah sebagai berikut:

Di zaman dahulu kala, Ternate, Tidore, Moti, Makian dan Bacan bersambung menjadi satu semenanjung dan semuanya bernama Gapi. Di semenanjung ini terdapat banyak negeri yang dikepalai masing-masing kepalanya dengan kekuasaannya sendiri-sendiri. Kepala tiap-tiap negeri itu bergelar Ambasoja. Maka terdapatlah Ambasoja seperti Kasiruta, Sungebodol, Indapoat, Lata-lata, Supae, Mandioli, Topa atau Ombi, Sungai Ra, Amasing, Salap dan Samboki. Ambasoja adalah bahasa Bacan yang bermakna Ngofamanyira atau Datu, yang berarti Kimalaha atau Sangaji.

Syahdan, tiba di tanah Gapi seorang dari tanah Arab bernama Noh Ibnu Jafar Sadek. Ia memperoleh lima anak, empat laki-laki dan seorang perempuan, di atas bukit tanah Gapi. Ketika anak-anak itu sudah besar, bapaknya berkata kepada mereka: "Aku berdoa memohon kepada Allah SWT supaya kamu dijadikan Raja Moloku di tanah yang berlain-lainan". Maka Jafar Sadek pun berdoa sesuai perkataannya itu.

Tiba-tiba datang gelap-gulita, guntur dan kilat, angin ribut serta hujan lebat semalam suntuk hingga terbit fajar di pagi hari. Ketika pagi tiba, semenanjung dari Ternate sampai Bacan sudah terputus-putus dan berselang-seling menjadi pulau Ternate, Tidore, Moti dan Makian.

Maka tiap-tiap anak dari keempat anak laki-laki itu diberi tempat. Anak pertama, bernama Said Muhammad Bakir atau Said Husin, di atas gunung Makian dan bergelar Maharaja Yang Bertakhta Kerajaan Moloku Astana Bacan, Negeri Komolo Besi Limau Dolik. Anak Kedua menjadi Moloku Jailolo. Anak Ketiga menjadi Moloku Tidore. Dan anak keempat menjadi Moloku Ternate. Yang kelima, anak perempuan, pergi ke tanah Gapi di Banggai dan bermukim di sana.⁵

Hikayat Rua – Ake Rica

Baru-baru ini tersiar sebuah kisah di internet tentang mitos terbentuknya kerajaan-kerajaan di Maluku. Kisah tersebut adalah sebagai berikut:

Sekitar abad ke-13, empat kerajaan besar eksis di kepulauan Maluku Utara. Keempat penguasanya saling berhubungan antara satu dengan lainnya, tetapi memiliki pengaruh yang berbeda. Mereka adalah anak keturunan seorang guru agama dari tanah Arab yang pada 1204 singgah di Rua Akerica, sebuah kampung yang terletak 24 km di sebelah barat pulau Ternate.

Guru agama itu mendakwahkan agama Islam dan, setelah berhasil, ia menikahi anak perempuan keluarga lokal terhormat. Dari perkawinan tersebut, pasangan ini memperoleh delapan orang anak, empat laki-laki dan empat perempuan.

⁵ *Hikayat Bacan* tidak menyebut nama anak kedua, ketiga dan keempat, demikian pula nama anak perempuan Jafar Sadek. Tetapi, van Fraassen menyebut nama anak perempuan itu adalah Saharnawi atau Sarnawi. Raja-raja Loloda berasal dari keturunan Sarnawi. Lihat van Frassen, *op.cit.* jilid I, catatan kaki 5, p. 462.

Ketika anak-anak itu dewasa, yang laki-lakinya mencari jalan masing-masing untuk mendirikan kerajaan. Salah seorang anak laki-laki pergi ke pulau Makian dan mendirikan Kerajaan Kie Besi. Tetapi, lantaran ancaman gunung berapi, ia kemudian pindah ke pulau Bacan. Anak laki-laki lainnya pergi ke pulau Moti dan mendirikan Kerajaan Tuanane. Tetapi, karena pulau ini sangat tandus, ia pindah ke Jailolo di Halmahera. Anak laki-laki ketiga bermukim di pulau Tidore dan mendirikan Kerajaan Duku. Sementara anak laki-laki termuda pergi ke Gapi di pulau Ternate dan mendirikan Kerajaan Gapi, serta bergelar Sultan Cico.

Keempat kerajaan di atas itulah yang dikenal sebagai “Moluku Kie Raha,” atau Empat Kerajaan Kepulauan. Tetapi, dari keempat kerajaan tersebut, hanya Ternate dan Tidore yang berhasil dan berkembang.⁶

Tentang Kedatangan Jafar Sadek ke Maluku

Dalam legenda-legenda di atas, Jafar Sadek – yang disebut sebagai ayah dari pendiri kerajaan-kerajaan di Maluku – dikatakan datang ke Ternate dari tanah Arab. Tentang kedatangannya ke Maluku ini, ketika itu bernama Gapi, Kronik Bacan menuturkan sebagai berikut:

Ketika Jafar Sadek masih di tanah Arab, pada suatu hari ia dalam keadaan sedih dan bertafakkur. Tiba-tiba datang seorang utusan Tuhan dan berkata kepadanya: "Wahai Noh Jafar, pergilah ke arah timur. Di sana engkau akan menemukan empat orang tua." Jafar Sadek lalu bangkit dari renungannya dan langsung berangkat.⁷

Menurut versi *Sejarah Ternate* yang ditulis Naidah, Jafar Sadek terdampar di Ternate karena kapalnya rusak dalam suatu pelayaran dari Jawa. Dalam *Sejarah Ternate*⁸ Naidah menulis sebagai berikut: “*Toma enage Mashurmalamo ibaba Djafar Sadek ohero ngofa atomodi toma kaha Jawa simara isa toma Ternate*”.(Dahulu, ayah Mashurmalamo Djafar Sadek, memperoleh 7 orang anak di tanah Jawa, barulah datang ke Ternate).

Naidah mencatat Djafar Sadek tiba di Ternate pada hari senin tanggal 6 Muharram tahun 643 Hijriah.⁹ Dalam bukunya, Prof. de Graaf dan Th.G.Th.Pigeaud *Chinese Muslim in Java in the 15th and 16th centuries*¹⁰ menyatakan, bahwa Jafar Sadek adalah seorang dari Mesir yang dikirim pemerintahnya ke Jawa sebagai *Ambassador Plenipotentiary* (Duta Besar Berkuasa penuh) dari kesultanan Mesir Dinasti Abbasiyah. Tetapi menurut sumber-sumber Cina, Jafar Sadek adalah Ja Tek Su, seorang muslim ahli perkapalan Cina yang menjadi muballigh Islam di Jawa pada abad ke XV.

Menurut sejarah Ternate versi Tidore, Jafar Sadek tidak menikahi Nurul Sifa puteri bungsu dari kayangan, tetapi ia menjadi suami seorang perempuan bangsawan Tidore bernama Tasuma.

Sementara *Hikayat Bacan*¹¹ menyebutkan bahwa Jafar Sadek tiba di Gapi tanpa menggunakan alat pelayaran apapun. Ia tiba-tiba saja keluar dari laut dan naik ke pantai Gapi

⁶ *History*, Courtesy of ITPB, 26 August 2000, ID 17613.

⁷ *Hikayat Bacan*, pp. 492-493.

⁸ BKI, 1873, 26 pp.384ff.

⁹ *Ibid.*p.492.

¹⁰ Monash Papers on South Asia, no.12. M.C. Ricklefs (ed.), pp.30-31.

¹¹ *Ibid.*

– ketika itu semua pulau masih bersambung menjadi satu semenanjung bernama Gapi. *Hikayat Bacan* selanjutnya menuturkan bahwa karena Jafar Sadek tiba-tiba keluar dari laut ke tepi pantai, banyak orang yang berdatangan kepadanya. Orang-orang itu gembira dan menjabat tangannya lalu menciumnya. Mereka kemudian mengaraknya keliling kampung mereka yang bernama Foramadiah. Setelah itu, kepala persekutuan membawa Jafar Sadek ke kediamannya dan di tempat itu ia memberitahukan bahwa ia datang dari tanah Arab serta bernama Noh Bin Jafar Sadek. Ia lalu naik ke gunung dan mendakwahkan agama Islam. Semua penduduk Gapi kemudian memeluk agama tersebut.

Menurut Sejarah Bacan, Jafar Sadek mempunyai empat anak laki-laki dan empat anak perempuan. Kedelapan putera-puteri Jafar Sadek adalah:

a. *Anak laki-laki:*

1. Said Muhammad Bakir, yang kemudian mendirikan dan menjadi Raja Bacan;
2. Said Ahmad Sani, yang kemudian mendirikan dan menjadi Raja Jailolo;
3. Said Muhammad Nukil, yang kemudian mendirikan dan menjadi Raja Tidore; dan
4. Said Muhammad Nurussafar, yang kemudian mendirikan dan menjadi Raja Ternate.

b. *Anak Perempuan:*

1. Boki Saharnawi, induk Marsaoli Sukiloti;
2. Boki Sadarnawi, induk Jalakafo;
3. Boki Sagarnawi, induk Soa Ciu; dan
4. Boki Siti Dewa, induk Marsaoli Mardike.

Sementara Raja-raja Tobungku berinduk pada Boki Sadarnawi, raja-raja Banggai pada Boki Saharnawi, dan raja-raja Loloda pada Boki Sagarnawi.¹²

Dari berbagai legenda dan mitos di atas, hikayat yang ditulis Naidah paling populer. Bahkan, di kalangan tertentu rakyat Maluku Utara, mitos versi Naidah itu dipandang dan dituturkan secara turun-temurun sebagai sebuah kebenaran sejati.

Di samping *Sejarah Ternate* yang ditulis Naidah, ada juga sebuah naskah yang disebut sebagai hikayat Ternate, dipublikasikan pada 1938. Sayangnya naskah ini tidak terdapat dalam koleksi penulis dan tidak berhasil diperoleh. Menurut berita yang penulis peroleh dari sumber Kedutaan Kerajaan Belanda di Jakarta, apa yang dikenal dengan hikayat Ternate tersebut di atas, adalah sebuah naskah tulis tangan yang kini tersimpan pada Perpustakaan Kerajaan di Leiden negeri Belanda. Sekalipun demikian, sebagaimana halnya dengan Hikayat Bacan, naskah ini tidak sepopuler *Sejarah Ternate* yang ditulis Naidah.

Berbagai sebutan alternatif juga diberikan kepada keempat kerajaan (tanah) Maluku tersebut. Naidah memberikan nama alternatif untuk tanah Bacan sebagai Besi, tanah Jailolo sebagai Tuanane, tanah Tidore sebagai Duko, dan Ternate sebagai Gapi. Di samping istilah "tanah" – yang merupakan sinonim dari negeri atau kerajaan – Naidah juga mengemukakan nama alternatif berupa nama "binatang" sebagai suatu asosiasi untuk kerajaan-kerajaan tersebut. Bacan disebut sebagai *goheka* (katak), Jailolo sebagai *bilolo* (sejenis siput/keong laut

¹² Van Fraassen, *op.cit.*, jilid I, p. 462, catatan kaki no. 5.

yang lazimnya digunakan untuk memancing ikan), Tidore sebagai *soho* (babi), dan Ternate sebagai *hai* (kaki seribu atau ulat).¹³

Perlu juga dicatat sebutan lainnya bagi keempat kerajaan tersebut:

1. Jailolo : *Jiko ma-kolano*, "penguasa teluk."
2. Tidore : *Kie ma-kolano*, "penguasa gunung."
3. Ternate: *Kolano Maluku*, "penguasa Maluku."
4. Bacan : *dehe ma-kolano*, "penguasa tanjung."

Di samping sebutan untuk empat kerajaan di atas, kerajaan Loloda juga disebut sebagai *Ngara ma-beno*, "tembok pintu gerbang," karena letaknya paling utara yang menjadi pintu masuk ke kerajaan-kerajaan lain.¹⁴

Menurut Naidah, setelah kembali dari kayangan, isteri Jafar Sadek, Nur Sifa, memberikan sebutan penguasa di atas kepada keempat anaknya. Pemberian *ronga* (nama) melambangkan peringkat, dan tempat duduk atau *dodego* melambangkan posisi.

¹³ Naidah, *Sejarah Ternate*, p. 382.

¹⁴ Andaya, Leonard Y., *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*, Honolulu: Univ. of Hawaii Press, 1993, p.51.

BAB 3

Jailolo: Kerajaan Maluku Tertua

Asal-usul dan Senioritas Jailolo

Dalam urutan berdirinya kerajaan-kerajaan Maluku, Jailolo dipandang sebagai kerajaan tertua. Walaupun diakui sebagai kerajaan tertua oleh kerajaan-kerajaan Maluku lainnya, tidak dapat dipastikan kapan kerajaan ini didirikan. Yang dapat dicatat hanyalah peristiwa kesejarahan bahwa pada masa awal ada seorang raja perempuannya yang kawin dengan Raja Loloda, sebuah kerajaan di bagian utara pulau Halmahera – mungkin merupakan kerajaan yang lebih tua dari Jailolo. Menurut cerita rakyat di daerah ini, perkawinan antara Ratu Jailolo dengan Raja Loloda merupakan perkawinan politik untuk memberikan akses kepada Jailolo menguasai seluruh Halmahera. Politik Jailolo berhasil, sebab sebelum tahun 1250, teritorial Kerajaan Jailolo telah meliputi hampir seluruh Halmahera, termasuk Loloda. Sumber *Nagarakartagama* mengungkapkan bahwa ketika Jailolo terbentuk sebagai Kerajaan, wilayahnya belum mencakup Halmahera Utara bagian barat, karena di sana terdapat Kerajaan Loloda. Di samping itu, di bagian utara Halmahera juga terdapat Kerajaan Moro, yang pada masa belakangan menjadi sasaran perluasan Kerajaan Jailolo di bawah Katarabumi pada abad ke-16.

Bagian barat Kerajaan Jailolo adalah Batu Cina, yang letaknya berhadapan dengan Kepulauan Maluku – yakni pulau-pulau Ternate, Tidore, Moti, dan Makian.¹ Jailolo semula adalah nama sebuah desa, dan kerajaan yang berdiri di desa itu kemudian diberi nama yang sama. Menurut sumber *Nagarakartagama*, yang disusun oleh Mpu Prapanca, kemungkinan kolano pertama Jailolo adalah seorang perempuan yang berkuasa secara tiran dan memerintah dengan tangan besi.²

Setelah Ratu Jailolo yang tiran itu wafat, Loloda terlihat mampu melepaskan diri dari kekuasaan Jailolo. Sebab, ketika berlangsung pertemuan Moti pada abad ke-14, Raja Loloda berikhtiar untuk menghadiri pertemuan tersebut, tetapi terhalang oleh angin ribut, yang menyebabkannya mendarat di Dufa-dufa, Ternate.

Karena memerintah dengan tangan besi, terjadi perlawanan dan pembangkangan terhadap Kolano Jailolo, yang diikuti dengan eksodus para pembangkang politik ke pulau-pulau kecil di sekitar Halmahera: Ternate, Tidore, Moti, dan Makian. Di pulau-pulau inilah para pemberontak Jailolo mendirikan kerajaan-kerajaan – salah satu di antaranya yang terbesar dan terkuat adalah Ternate – yang, pada gilirannya, merongrong dan bahkan mengakhiri eksistensi Kerajaan Jailolo.

¹ Valentijn, Françoise, *Oud en Nieuw Oost Indie*, vol.1b, Dordrecht-Amsterdam, 1724, p.93.

² Paramita R. Abdurrahman: *Molucan Responses to the First Intrusions of the West*, Amsterdam: North Holland Pub.Co.1978, p.163.

Tentang status Jailolo sebagai kerajaan tertua, pendapat berbeda dikemukakan oleh Prof. Lopian³. Dalam salah satu publikasinya tahun 1994, dengan menelaah berbagai mitos yang berhasil direkam Portugis sekitar tahun 1544, Prof. Lopian sampai pada kesimpulan bahwa garis Raja-raja Maluku berawal dari empat buah telur naga yang menetas tiga orang laki-laki dan seorang perempuan⁴. Dari tiga orang anak laki-laki itu, seorang menjadi Raja Bacan, yang lain menjadi Raja Papua, dan seorang lagi menjadi penguasa Butung dan Banggai, sementara yang perempuan menjadi permaisuri Raja Loloda.

Berdasarkan versi ini, maka hanya terdapat dua kelompok Maluku Utara, *Bacan sebagai yang tertua* dan *Loloda* yang mewakili rakyat yang bertutur dengan bahasa Halmahera Utara. Tidak ada penyebutan tentang Ternate, Tidore, dan Jailolo⁵.

Nama Halmahera menurut sumber-sumber Portugis adalah *Batucina de Moro*, atau Batu cina yang merujuk pada kerajaan tua di Halmahera Utara yang masih eksis hingga abad ke-17, di mana Portugis berhasil mengkonversi agama sebagian penduduknya ke Kristen. Namun *Batucina* tidak punya hubungan samasekali dengan orang-orang Cina, sebagai bangsa asing pertama yang menemukan Maluku, dan memperoleh keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah.

Batucina dalam pengucapan orang-orang Portugis menjadi *Bat (a) Chin (a)* yang dalam teks-teks lama ditulis sebagai *Batchian*. Menurut Lopian, adalah sebuah *salah ucap* dari kata *Bacan*, kekuatan tertua di Maluku yang punya pengaruh jauh hingga Seram dan pulau-pulau di Sulawesi Utara. Oleh karena itu menurut Lopian, kerajaan tertua di Maluku Utara adalah Bacan, yang berkedudukan di Jailolo.

Sekali waktu, Kerajaan Jailolo pernah berada di bawah kekuasaan seorang asing bernama Syarif, yang diduga datang dari Makkah. Ia adalah adik Sultan Mindanao (Mangindanao) dan Sultan Borneo.⁶ Tetapi, dalam sumber-sumber sejarah tidak dijelaskan kapan Syarif dari Makkah itu berkuasa.

Ancaman dan Ekspansi Ternate terhadap Jailolo

Ancaman Ternate terhadap Jailolo dimulai pada 1284, ketika Siale – Kolano Ternate ketiga – menyerang beberapa desa Kerajaan Jailolo dan mendudukinya. Pada 1304, Kolano Ternate lainnya, Ngara Malamo, menyerang Jailolo dan menduduki untuk waktu yang lama beberapa desa di Batu Cina, di bagian selatan Jailolo.

Sekalipun dalam *Pertemuan Moti* (1322) – yang melahirkan *Persekutuan Moti (Motir Verbond)* – Jailolo diakui sebagai kerajaan peringkat pertama dari tiga kerajaan lain (Ternate, Tidore, Bacan) dalam hal senioritasnya, tetapi hal ini tidak mengakhiri ambisi Ternate untuk mencaplok Jailolo. Pada 1343, Kolano Ternate, Tulu Malamo, tidak lagi mengakui keputusan *Motir Verbond*, dan menyerang serta menduduki Jailolo. Raja Jailolo ketika itu tidak dapat berbuat sesuatupun, walaupun tindakan Tulu Malamo menuai reaksi keras dari Kolano Tidore dan Bacan.

³ Lopian, A.B. *Bacan and the Early History of North Maluku*, Halmahera and Beyond, L.E. Visser (ed.) Leiden, KITLV Press, 1994 pp.11-22.

⁴ Mitos tersebut terkenal dengan nama *Bikusagara*, disebut menurut nama tokoh dalam mitos itu. Mitos ini direkam Antonio Galvao, Gubernur Portugis Maluku paling populer yang berkuasa antara tahun 1536-1539. Pen.

⁵ Lopian, A.B. *Op.Cit.*p.13ff.

⁶ Thomas Forrest, *A Voyage to New Guinea and the Moluccas*, Kuala Lumpur: Oxford Univ. Press, 1969, p. 31.

Sekalipun serbuan Tulu Malamo atas Jailolo telah menuai reaksi keras dari kerajaan-kerajaan lainnya di Maluku, pada 1359 Kolano Ternate, Gapi Malamo, kembali menyatakan tantangannya terhadap Jailolo. Kali ini agresi yang dilancarkan Ternate tidak berhasil. Bala tentara Jailolo dapat menghalau tentara Ternate keluar dari wilayahnya. Kegagalan inilah yang barangkali menyebabkan dilangsungkannya perkawinan politik antara putera sulung Kolano Ternate pengganti Gapi Malamo, yakni Kolano Gapi Baguna, dengan puteri Kolano Jailolo, Kaicil Kawalu, pada 1372. Tetapi, perkawinan politik ini tampaknya tidak berhasil mengimplementasikan ambisi politik Ternate untuk mendominasi Jailolo.

Antara waktu perkawinan politik tersebut hingga berkuasanya Katarabumi di Jailolo, masih terlihat serangkaian upaya agresi Ternate terhadap Jailolo. Pada 1380, Kumala Putu, Kolano Ternate ke-17, berupaya menyerbu dan menduduki Jailolo. Demikian pula, Kolano Marhum menyerbu Jailolo pada 1465. Kolano Ternate ini relatif berhasil menanamkan pengaruhnya. Sebab, ketika terjadi perang suksesi di kalangan keturunan bangsawan Jailolo, Jamilu, salah satu bangsawan Jailolo kepercayaan Ternate, memenangkannya. Tetapi, Jamilu tidak menduduki takhta Jailolo, karena diangkat oleh Marhum sebagai Raja Muda di Ambon. Pada 1524, Taruwese, Raja Muda Ternate, melanjutkan upaya pendudukan Jailolo yang gagal, karena berhasil dihalau bala tentara Jailolo. Tiga tahun kemudian (1527), Taruwese mencoba melakukan usaha yang sama dengan bantuan Portugis. Kali ini ia berhasil menduduki sebagian Jailolo, tetapi tidak untuk waktu yang lama.

Persekutuan Jailolo-Spanyol

Sejak 1521, ketika sisa-sisa armada Magellan mencapai Tidore, Jailolo telah menjalin persahabatan dengan Spanyol untuk menghadapi Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Jailolo selalu berharap akan kunjungan orang-orang Spanyol ke kerajaannya. Pada 1 Maret 1532, Sultan Jailolo Zainal Abidin Syah, secara sengaja berupaya memancing perhatian Raja Spanyol Charles V dengan layanannya yang baik kepada orang-orang Spanyol. Ia juga menawarkan kerajaannya sebagai *vazal* Spanyol. Ia menyatakan bahwa pada ekspedisi Spanyol sebelumnya, ayahnya, Sultan Jusuf, telah menawarkan hal serupa. Tetapi, tawaran ini tidak memperoleh respon. Karena itu, sekali lagi ia mengulangi tawaran yang sama dengan harapan akan memperoleh tanggapan Spanyol di masa depan.

Pada 1527, Herman Cortes ditugaskan mengirinkan sebuah armada Spanyol ke kepulauan rempah-rempah guna membantu orang-orang Looyza yang sudah berada di Tidore. Armada itu bertolak dari Spanyol baru – sebutan untuk Mexico pada waktu itu – pada 31 Oktober 1527, dengan beranggotakan tiga kapal di bawah pimpinan Alvares de Saanedra, sepupu Cortes.

Di antara ke-3 kapal itu, satu di antaranya bernama *Florida*, yang membawa 450 tentara Spanyol lengkap dengan persenjataannya. Ketika Florida dan kedua kapal lainnya tiba di Tidore, orang-orang Portugis dan pasukan Kerajaan Ternate yang berkekuatan 1000 tentara, dipimpin Don Jonge Menexes dan Taruwese, sedang menyerbu Mareku – ibu kota Kerajaan Tidore yang baru dibangun. Setelah diobrak-abrik dan dirampok, pasukan gabungan itu menyerbu benteng Spanyol di dekatnya. Ketika kapal Florida tiba, kaum penyerbu dapat dipukul mundur oleh armada Spanyol. Portugis lari ke Ternate dan Taruwese ke Makian.

Setelah memukul mundur pasukan Portugis dan Ternate, armada Spanyol berlayar ke Jailolo dan disambut hangat Sultan Zainal Abidin Syah. Spanyol kemudian menempatkan 27 orang pasukannya di Jailolo atas permintaan Zainal Abidin. Pada tahun itu juga (1527), Zainal Abidin wafat dan digantikan puteranya, Sultan Yusuf.

Orang-orang Spanyol memberikan senjata kepada rakyat Jailolo dan melatih mereka menggunakannya, sehingga rakyat kerajaan ini diharapkan mampu mempertahankan diri. Spanyol juga membenahi benteng Jailolo dan menempatkan persenjataan artileri untuk memperkuat pertahanan dan meningkatkan kemampuan bela diri terhadap berbagai gangguan keamanan. Penduduk lokal dilatih untuk mengatasi dan meloloskan diri bila terjadi pengepungan yang dilakukan orang-orang Portugis.

Katarabumi: Kolano Jailolo Terbesar

Pada 1529, bangsawan tinggi Katarabumi (Catabruno) diangkat sebagai Mangkubumi Jailolo. Dengan pengangkatan Katarabumi, Ternate mulai mengalami kesulitan dalam melakukan ambisi politiknya. Berkat bantuan Kerajaan Tidore, Katarabumi berhasil menangkis semua serbuan Ternate yang dibantu Portugis.

Pada 1533 Sultan Jusuf wafat dan digantikan puteranya, Firuz Alauddin, sebagai penguasa Jailolo. Karena Sultan Jailolo itu masih di bawah umur dan sering sakit-sakitan, Katarabumi ditunjuk sebagai Mangkubumi untuk menjalankan roda pemerintahan Kesultanan Jailolo.

Sementara itu, Gubernur Portugis Tristao d'Ataide menuduh orang-orang Spanyol yang ada di Jailolo telah memberikan perlindungan kepada 4 hingga 5 negeri yang dahulu berada di bawah kekuasaan Portugis. Dengan alasan tersebut, Ataide mengerahkan tentaranya menyerang dan – setelah mengepung selama beberapa waktu – memerintahkan Jailolo menyerah. Sultan Jailolo yang masih di bawah umur, Firuz Alauddin, dibawa ke Benteng Gamlamo di Ternate untuk “berobat.” Evakuasi ini merupakan konspirasi antara d'Ataide dengan Katarabumi, yang ketika itu menjabat sebagai Mangkubumi Kesultanan Jailolo. Persekongkolan ini baru terungkap setelah berbagai hadiah yang diberikan d'Ataide kepada Katarabumi secara berlebihan, termasuk hadiah payung emas dan pakaian dalam jumlah besar, diketahui umum.

Pada 1534, Katarabumi mengambil-alih Kesultanan Jailolo dan memproklamasikan dirinya sebagai Kolano, setelah putera mahkota yang berobat di rumah sakit Portugis di Ternate mati diracuni orang-orang suruhan Katarabumi. Dalam proklamasinya, Katarabumi mengatakan bahwa ia akan memerintah Jailolo atas nama Raja Portugal, “Raja pertama yang akan memberikan *kevazalannya* dengan wibawa Kerajaan.”⁷ Selama berkuasa, Katarabumi berhasil membebaskan seluruh wilayah Kesultanan Jailolo yang diduduki Kesultanan Ternate.

Tetapi, keberhasilan Katarabumi mengusir kekuasaan Ternate dari wilayah Kesultanan Jailolo dan penyerbuan-penyerbuan yang dilakukannya ke Kerajaan Moro telah menimbulkan kecurigaan orang-orang Portugis. Mereka tidak menyangka bahwa Katarabumi bisa tampil sebagai kekuatan baru yang tangguh dan disegani di seluruh kawasan Maluku. Semua pernyataan

⁷ Andaya, Leonard J., *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*, Honolulu: Univ. of Hawaii Press, 1933 pp.121-122.

Katarabumi yang pro-Portugis ternyata hanya kamufase untuk menutupi serbuan-serbuannya dan politik anti Kristen serta anti Portugis yang dilakukannya di Kerajaan Moro.

Sukses Katarabumi juga telah menimbulkan kecemburuan Ternate. Dalam berbagai pernyataan yang diberikan beberapa waktu setelah penobatannya, Katarabumi selalu berujar bahwa raja-raja Maluku ingin tetap bersahabat dengan Portugis. Pernyataan ini sangat membingungkan Gubernur d'Ataide, karena Katarabumi terus menyerang Misi Jesuit di Moro, dan bersekutu dengan Deyalo, Sultan Ternate yang dilengserkan Portugis dari takhtanya dan sedang dicari-cari. Dengan Deyalo, Katarabumi membuat persetujuan membantunya merebut takhta Kesultanan Ternate. Sebagai imbalannya, daerah Moro menjadi milik Jailolo.

Katarabumi dan Konspirasi Raja-raja Maluku

Ketika Sultan Khairun berkuasa di Ternate, pada 1540 ia mulai menjalankan kebijakan bertetangga-baik dengan tujuan menjalin Ternate-Jailolo ke dalam sebuah ikatan imperium dengan mahkota Ternate sebagai pimpinannya. Tetapi, cita-cita Khairun tidak sempat terlaksana, karena kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan di dalam Kesultannya berkenaan dengan Kristenisasi yang dilakukan Misi Jesuit.

Khairun yang menginginkan Kerajaan Moro menjadi *vazal*-nya dengan mendudukkan salah seorang puteranya sebagai raja, mencoba mengambil hati Portugis, terutama para misionaris, dengan memberikan kemudahan yang bersifat membantu operasi misi di kerajaan Moro. Akibatnya, terjadi perkembangan pesat Kristenisasi di dalam komunitas-komunitas utama kerajaan tersebut – seperti di Tolo, Mamuya, Pune, Sugala (Morotia), Sakita, Mira, dan Rao (Morotai) – yang pada akhirnya merepotkan Khairun sendiri. Sampai pada 1547, hampir seluruh kerajaan Moro, praktis telah berada di bawah kekuasaan Misi Jesuit, yang mendapat dukungan kuat dari tentara dan penguasa Portugis di bawah Gubernur Bernaldyn de Sousa.

Untuk mengantisipasi keadaan ini, Khairun mengundang Sultan Bacan, Tidore, dan Kolano Katarabumi untuk membahas dan mencari solusinya. Dalam pertemuan rahasia itu, para raja Maluku dengan suara bulat sepakat akan menyetop laju dan perkembangan misi Jesuit. Para Sultan itu setuju untuk *mengenyahkan orang-orang Kristen dari Maluku*.⁸ Segi-segi politik kesepakatan ini ditangani Sultan Khairun, dan upaya militernya diserahkan kepada Katarabumi.

Serangan atas Kerajaan Moro

Pada 1536, Katarabumi dan pasukannya yang besar menuju Moro. Kampung Sugala di pesisir utara Morotia diserang. Setelah Sugala jatuh ke tangannya, penduduk Kristen setempat dimurtadkannya. Orang-orang Sugala yang sudah murtad itu kemudian menuntut agar Pastor Alvarez dan beberapa orang Portugis menyerahkan kapal yang tengah mereka buat. Pastor Alvarez dapat meloloskan diri bersama bawahannya, tetapi mereka ditangkap oleh armada Jailolo lainnya. Hanya dengan tipu muslihat, Alvarez akhirnya tiba di Ternate.

⁸ Francois Valentijn, *Oud en Nieuw Oost Indien*, vol.1b, (Dordrecht-Amsterdam, 1724), pp.203.

Dari Sugala, Katarabumi melanjutkan operasinya dengan membersihkan kampung-kampung Tutumaloleo dan Lalonga dari unsur-unsur Kristen. Dari sana Katarabumi menyerbu Pune kemudian mengepung Mamuya, ibukota kerajaan Moro. Setelah seminggu terkepung, Katarabumi memberi waktu 24 jam kepada Raja Moro, Tioliza – yang telah menganut Kristen dan mengganti namanya menjadi Don Joao – agar menyerah. Bila tidak, pasukan Jailolo akan membakar semua ladang dan kebun kelapa penduduk Mamuya. Katarabumi juga menuntut agar orang-orang Portugis yang selama ini mengawal Raja Moro ikut menyerah.

Sebelum batas waktu berakhir, orang-orang Portugis pengawal Raja Moro telah melarikan diri ke hutan, tetapi mereka dibunuh rakyat setempat. Pada malam sebelum penyerahan diri, Raja Moro Tioliza membunuh sendiri istri dan anak-anaknya agar tidak tertawan atau jatuh ke tangan musuh. Don Joao alias Tioliza bermaksud melakukan bunuh diri, tetapi sempat dicegah oleh anak buahnya. Keesokan harinya, Tioliza menyerahkan diri kepada Katarabumi. Atas permohonan kaum kerabatnya, Raja Moro itu tidak dibunuh.

Dari Mamuya, pasukan Katarabumi meneruskan serangannya ke Tolo, pusat Misi Jesuit di Kerajaan Moro. Tetapi di Tolo, Katarabumi mendapat perlawanan kuat. Kampung berpenduduk 3000 jiwa itu, dengan bantuan tentara Portugis yang ditempatkan di situ, berhasil menahan serangan Katarabumi dan baru menyerah sebulan kemudian.

Ketika Tolo diserbu, terdapat 36 orang Kristen Tolo yang berhasil meloloskan diri ke Ternate dan melaporkan situasinya kepada Gubernur. Pasukan Portugis dalam jumlah besar kemudian dikerahkan menyerang Galela dan Pune. Dalam penyerbuan itu, pasukan Portugis membakar habis kedua kampung tersebut, meskipun Pune adalah pemukiman Kristen. Setelah itu, pasukan Portugis menduduki Tolo serta mengusir Katarabumi dan pasukannya kembali ke Jailolo.

Sejak Katarabumi melakukan serbuannya ke kerajaan Moro, dalam hal ini Morotia, banyak orang Kristen dimurtadkan. Bahkan, di Cawa dekat Tolo, orang-orang yang sudah murtad membakar atau menghancurkan gereja dan altarnya sendiri. Sementara Portugis di Ternate tidak tahu-menahu tentang penyerbuan Katarabumi atas Moro. Gubernur Portugis di Ternate de Freitas baru mengetahui penyerbuan itu pada 20 Maret 1543, setelah 36 orang-orang Moro yang meloloskan diri dari Tolo memberikan laporannya. Orang-orang Kristen Moro baru dipulihkan keimanannya setelah Fransiscus Xaverius mengunjungi daerah ini antara bulan September 1546 hingga Januari 1547.

Serbuan Katarabumi ke Moro, dukungannya kepada Deyalo, berikut pernyataan-pernyataannya yang kontroversial tentang hubungan Portugis-Jailolo, telah menimbulkan kesan Portugis bahwa Katarabumi adalah pribadi yang sukar dipercaya dan, karena itu, harus disisihkan dari percaturan politik dan militer di Maluku. Tetapi, Portugis menilai bahwa Katarabumi cukup tangguh dari segi militer. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa untuk mengusirnya dari Morotia – selain pengerahan pasukan dalam jumlah besar – Portugis memerlukan waktu 3 bulan.

Sebagai balasan atas aksi-aksi Katarabumi, Bernaldin de Sousa – yang diangkat sebagai Gubernur untuk kedua kalinya – berencana memberi “pelajaran” kepada Katarabumi dengan menyerbu Jailolo pada 1551. Walaupun perang ini diprakarsai Portugis sendiri, tetapi label yang diberikan kepadanya adalah “serbuan Ternate dengan bantuan Portugis.”

Serbuan Portugis ke Jailolo

Pada 1551, Portugis memutuskan menyerbu Jailolo dan meminta keikutsertaan Ternate dalam ekspedisi militer ini. Ternate mula-mula menolaknya, tetapi akhirnya terpaksa menerima permintaan itu. Rencana penyerbuan Portugis ke Jailolo telah diketahui terlebih dahulu melalui agen-agen Jailolo dalam ketentaraan Ternate. Karena itu, untuk menghadapi serbuan tersebut, benteng Jailolo diperkuat dan tembok-temboknya yang rusak diperbaiki serta ketinggiannya ditambah, sehingga “seekor tikuspun tidak dapat melewatinya.” Benteng dipersenjatai dengan 100 pucuk senjata laras panjang, 18 pucuk meriam serta sebuah “mortir” dan berbagai senjata lainnya buatan Jawa, berikut berbagai peralatan untuk mengatasi kepungan.

Pasukan Alifuru Jailolo dalam jumlah besar disiapkan dengan beragam senjata tradisional, seperti tombak, kelewang, dan lembing. Reputasi mereka dalam perang hutan begitu menakutkan, dan pasukan ini sewaktu-waktu dapat menghilang tanpa diketahui jejaknya. Akan tetapi, setelah Portugis memperketat pengepungannya selama lebih dari 3 bulan, benteng yang dipersenjatai sangat kuat itu akhirnya jatuh. Jailolo, di bawah pimpinan Katarabumi yang perkasa itu akhirnya takluk tanpa syarat. Katarabumi pun menyerah, walaupun Portugis tidak pernah masuk ke dalam benteng dan meletuskan senapannya. Blokade yang lama menyebabkan terputusnya hubungan dengan dunia luar dan kekurangan perbekalan.

Lengsernya Katarabumi

Setelah ada isyarat dari dalam benteng tentang penyerahan, Portugis memerintahkan pintu benteng dibuka untuk memperlihatkan volume persenjataan dan posisi pertahanan benteng selama beberapa hari. Menurut sumber-sumber Portugis,⁹ Katarabumi menolak menyaksikan penyerahan Jailolo. Dengan mengenakan jubah pemberian Gubernur d’Ataide, Sultan Jailolo itu menghilang pada suatu malam yang gelap dan masuk hutan. Ia menjalani hidup sebagai seorang pertapa.

Tetapi, menurut suatu sumber gereja, pada saat-saat terakhir, Katarabumi ingin mengonversi agamanya menjadi Kristen Katolik. Ketika akan dibaptis dan para pastor telah siap di depannya, mereka meminta agar sebelum dibaptis Katarabumi harus menceraikan istri-istrinya dan menyisahkan satu orang saja. Katarabumi menolak permintaan ini, sehingga pembaptisan gagal dilakukan. Beberapa hari kemudian, masih dalam tahun 1551, Katarabumi wafat karena minum racun.

Sepeninggal Katarabumi, Jailolo kehilangan dinamika dan kekuatannya sebagai sebuah kerajaan. Ia hanya meninggalkan nama dan identitas sebagai bekas sebuah kerajaan tertua dan terbesar pada masa awal kelahiran kerajaan-kerajaan Maluku. Jailolo juga telah meninggalkan identitasnya sebagai salah satu dari empat pilar kerajaan Maluku – yakni: Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan – yang dikenal sebagai *Moloku Kie Raha*.

Menurut para pengamat sejarah Maluku, kerjasama yang dijalin Jailolo di bawah Katarabumi dengan kerajaan-kerajaan Maluku lainnya telah memperkuat posisi Sultan Khairun dari Ternate dalam menghadapi Portugis maupun Misi Jesuit yang membencinginya, terutama dengan Gubernur Jordao de Freitas yang pongah.

⁹ Andaya, *Op.cit.* pp 130.

Jailolo pasca Katarabumi

Setelah wafatnya Katarabumi dan Sultan Khairun, pada 1600 Sultan Saidi dari Ternate menyerbu kembali Jailolo dan mendudukinya dengan bantuan Portugis. Kolano Jailolo, Saubo, pengganti Katarabumi, terpaksa melarikan diri. Setelah menggalang kembali kekuatannya, Saubo berhasil memperkecil kekalahannya. Bahkan, beberapa waktu setelah Sultan Saidi ditangkap Spanyol dan diasingkan ke Manila, Saubo berhasil merebut kembali seluruh wilayah kekuasaannya.

Pada 1611, Spanyol menyerbu dan menduduki Jailolo. Ketika itu, Ternate tengah menggalang persekutuan dengan Belanda. Raja Jailolo pun diboyong ke Ternate dan sejak saat itu tidak pernah lagi bertakhta di kerajaannya. Setelah Spanyol meninggalkan Jailolo pada 1620, Ternate menjadikan Jailolo sebagai kerajaan *vazal*-nya. Raja Jailolo terakhir, Kaicil Alam, tetap ditempatkan di Ternate, bukan di ibukota kerajaannya. Ia dipandang sebagai anggota keluarga Kesultanan Ternate dan dinikahkan dengan Puteri Boki Gamalama, adik Sultan Sibori Amsterdam, meskipun perkawinan ini berakhir dengan perceraian. Pada 1684 Kolano Jailolo terakhir, Kaicil Alam, wafat. Sejak saat itu Jailolo hanya menjadi sebuah distrik di bawah otoritas Ternate. Kepala distrik Jailolo dipegang oleh seorang *sangaji*. Pada 1858, kepala distrik Jailolo bergelar *Fanyira*.¹⁰

Tuntutan Restorasi Kesultanan Jailolo

Orang pertama yang menghendaki agar Kesultanan Jailolo dihidupkan kembali adalah Sultan Tidore, Saifuddin Iskandar Zulkarnain (1657-1689). Baik dalam percakapan maupun surat-surat yang dikirim kepada Gubernur VOC, Padtbrugge, Saifuddin selalu meminta agar Kesultanan Jailolo dihidupkan kembali dan Kaicil Alam – penerus takhta Kesultanan Jailolo – dipulihkan kekuasaannya sebagai Sultan Jailolo. Alasan-alasan utama yang diajukan Saifuddin adalah restorasi Kesultanan Jailolo akan mengatasi kemelut yang melanda Maluku dan memulihkan perdamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat. Demikian pula, Maluku secara tradisional tegak di atas empat landasan atau tonggak – yaitu Kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo – dan dengan dilikuidasinya Jailolo, Maluku kini sangat lemah, karena hanya tegak di atas tiga tonggak.

Gagasan Saifuddin tidak memperoleh respon VOC, karena hutang budi dan kedekatan VOC kepada Ternate. Tetapi, di kalangan keluarga keraton Ternate sendiri, gagasan Saifuddin cukup memperoleh sambutan positif. Kaicil Kalamata dan para *bobato* lainnya, di masa pemerintahan Sibori Amsterdam, pernah mengusulkan agar Kaicil Alam didudukkan kembali ke atas takhta Jailolo. Sibori, tentu saja menolak gagasan ini dengan alasan bahwa Portugislah yang menghapus Kerajaan Jailolo, bukan Ternate.

¹⁰ Ch. F. van Fraassen, "Types of Socio-Political Structure in North Halmaheran History" dalam Masinambouw, *Op.Cit.*, pp. 87 ff.

Kasus Kesultanan Jailolo Bentuk Nuku¹¹

Ketika Nuku dinobatkan sebagai Raja atas Papua serta Seram Timur, kemudian sebagai Sultan Tidore, gagasan Saifuddin di atas bergema kembali. Seusai dinobatkan sebagai Sultan Tidore, Nuku menghidupkan kembali Kesultanan Jailolo dan mengangkat *Sangaji* Tahane sebagai Sultan Jailolo dengan gelar Muhammad Arif Billa. Alasan penghidupan kembali Kesultanan Jailolo sama dengan yang dikemukakan sebelumnya oleh Sultan Saifuddin kepada Gubernur Padtbrugge. Walaupun demikian, upaya Nuku ini tidak dapat dilepaskan dari gagasannya untuk mengimbangi hegemoni dan superioritas Ternate. Kesultanan Ternate memang dengan cerdas telah menunggangi Belanda guna mempertahankan hegemoni dan superioritasnya.

Sultan Jailolo yang diangkat Nuku, Muhammad Arif Billa, bukanlah pendatang baru dalam struktur Kesultanan Tidore. Di awal karirnya, Billa menjabat sebagai *Sangaji* Tahane (Makian), kemudian selama 13 tahun menjadi Jogugu Kesultanan Tidore, sejak berkuasanya Sultan Kamaluddin (1784-1797), kakak Nuku. Meski Billa adalah seorang Tahane atau Makian, tetapi lantaran jabatan yang dipangku ia mendapatkan kualifikasi bangsawan setingkat kaicil. Sudah sejak 1786 Billa memimpin suatu faksi dalam lapisan para *bobato* Tidore yang memihak Nuku dalam pergolakan politik kesultanan tersebut.

Pada 1796, Billa ditangkap atas perintah Sultan Kamaluddin, setelah terkuak hubungan yang dijalinnya dengan Nuku. Tetapi, karena campur tangan VOC, Billa dibebaskan. Menjelang penyerbuan Nuku ke Tidore, Billa melarikan diri dan bergabung dengannya. Ia bahu membahu dengan Nuku dalam perjuangan pembebasan Tidore, dan diangkat sebagai salah seorang panglima Nuku yang handal.

Ketika Inggris mengembalikan Maluku kepada Belanda, yang kemudian berkuasa antara 1803-1810, Nuku untuk pertama kalinya menawarkan sebuah perundingan kepada Belanda pada 1804. Perundingan ini ditawarkan Nuku dengan salah satu persyaratan pengakuan Belanda atas Kesultanan Jailolo sebagai sebuah kerajaan merdeka dan berdaulat penuh.

Bagi Nuku, pengakuan atas Jailolo sebagai salah satu syarat perundingan merupakan suatu kemestian. Menurut adat, pengangkatan Sultan Jailolo telah memperoleh persetujuan para *bobato* Kesultanan Tidore, para *bobato* Halmahera Timur – Weda, Maba dan Patani – serta mendapat dukungan *bobato* Halmahera Utara – Jailolo, Sau, Tobelo, Galela, dan Raja Loloda serta Kao. Dukungan luas seperti itu cukup memberikan keabsahan bagi Billa sebagai Sultan Jailolo.¹² Tetapi, Belanda menolak tawaran dan prasyarat Nuku.

Setelah berita penolakan Belanda tersiar, pasukan Sultan Jailolo di Toniku mulai dimobilisasi untuk menggempur Halmahera Utara. Nuku sendiri merancang rencana penyerbuan, dan Billa ditugasi memimpin serta melaksanakannya. Armada yang akan ambil bagian dalam operasi militer ini direncanakan terdiri dari: 1 *juanga* Sultan Jailolo, 1 *juanga* putera-putera Sultan Jailolo, 8 *juanga* orang Tobelo dan Kao, 6 *juanga* dari Loloda, 1 *juanga* dari Tolofuo, 4 *juanga* dari Sau, 2 *juanga* dari Galela, 6 *juanga* dari Patani, 6 *juanga* dari Weda, 6 *juanga* dari Tidore, dan 5 *juanga* dari Papua.¹³

¹¹ Lihat R.Z. Leirissa, *Halmahera Timur, Op.Cit.*,. Buku ini, hingga sekarang, merupakan sumber informasi paling lengkap tentang Kesultanan Jailolo bentuk Nuku.

¹² Surat Nuku kepada Gubernur Wieling, tertanggal 11 Juli 1804, dikutip dalam Leirissa, *ibid.*, p. 154.

¹³ *Ibid.*, p. 168.

Tujuan operasi adalah untuk memperoleh legitimasi para *sangaji* di Halmahera Utara bagi Sultan Jailolo. Tetapi, Nuku tidak menyadari bahwa sejak 1635 Jailolo telah lebur dan menjadi wilayah Kesultanan Ternate, yang melakukan pembinaan sedemikian rupa sehingga sangat sulit bagi rakyat di kawasan Jailolo maupun Halmahera Utara mengubah loyalitas mereka kepada Ternate, terutama di kalangan orang Alifuru, walaupun sebagian rakyat Tobelo dan Galela adalah pengikut setia Nuku selama belasan tahun.

Dengan demikian, upaya Nuku menghidupkan kembali Kerajaan Jailolo – dalam kenyataannya hanya merupakan kerajaan *vazal* Tidore, karena pemerintahan Nuku berada di atasnya – tidak sepenuhnya berhasil lantaran orang-orang Alifuru tidak mau mengakui Sultan Jailolo yang ditunjuk Nuku sebagai raja mereka. Orang-orang ini tetap menyatakan kesetiannya kepada Kesultanan Ternate. Hanya beberapa kampung di pantai barat Halmahera yang dapat dikuasai Jailolo.¹⁴ Orang Tobelo Tai – yakni Tobelo Boenge dan Tobelo Kao – pimpinan *Sangaji* Kuwasauwa dan *Sangaji* Sau mengakui Sultan Jailolo, tetapi *Sangaji* Galela serta orang Alifuru Jailolo dan Ibu menolak legitimasinya.

Operasi Halmahera Utara yang direncanakan Nuku itu mengalami kegagalan dan tidak pernah dilaksanakan, walaupun sebelumnya Nuku telah mengirim sejumlah tim ke wilayah tersebut untuk mensosialisasikannya. Hasil sosialisasi yang tidak menggembirakan barangkali yang membuat rencana penyerbuan dibatalkan.

Sementara itu, Sultan Ternate, Muhammad Yassin, mengusulkan suatu kompromi kepada Pemerintah Belanda di Ternate sehubungan dengan prasyarat Nuku. Usulan itu adalah agar kawasan Toniku di pantai barat Halmahera, yang masuk wilayah Kesultanan Tidore, ditetapkan sebagai wilayah Sultan Jailolo dan rakyatnya, serta agar mereka diberi izin untuk memperoleh suplai bahan pangan dari wilayah Gane Dalam, yang masuk wilayah kekuasaan Ternate.¹⁵

Setelah wafatnya Nuku pada 14 Nopember 1805, Dewan Kerajaan mengangkat Zainal Abidin sebagai Sultan Tidore menggantikannya. Pada masa Zainal Abidin inilah Gubernur Wieling meminta agar Sultan Tidore menyerahkan Sultan Jailolo kepada Belanda. Zainal Abidin, yang menemui kesulitan dalam menyerahkan Sultan Jailolo, menyatakan kepada Gubernur Wieling bahwa secara politis maupun militer Sultan Jailolo, Muhammad Arif Billa, tidak punya potensi dan kemampuan untuk membahayakan pemerintah. Karena itu, menurut Zainal Abidin, ia tidak perlu ditangkap. Argumentasi ini tidak dapat diterima Belanda, yang kemudian memandang Zainal Abidin sebagai orang yang tidak bisa diajak kerjasama.

Akibatnya, Belanda menyerbu Tidore dan merampas benteng-benteng kesultanan itu pada Nopember 1806. Zainal Abidin mengerahkan armadanya untuk menangkal serbuan tersebut, tetapi upayanya menemui kegagalan.¹⁶ Tentara Belanda juga menyerbu Soasio, ibukota Tidore, dan membumihanguskannya, termasuk istana Salero.

Para *sangaji* dan *kimalaha* yang menjadi anggota Dewan Kerajaan dipaksa menandatangani perjanjian yang menempatkan Tidore langsung di bawah pemerintahan Belanda, selama sultan baru belum diangkat. Perjanjian ini dipaksakan Belanda lantaran naiknya Zainal Abidin ke atas takhta Tidore menggantikan Nuku tidak sepengetahuan dan seizin Belanda. Demikian juga, Belanda melarang komunikasi antara para *bobato* Tidore dengan rekan-rekannya

¹⁴ E. Katopo, *Nuku*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984, p. 131.

¹⁵ *Ibid.*, p. 153.

¹⁶ De Clerq, *Op.Cit.*, p. 168.

di Halmahera Timur, serta menjanjikan amnesti kepada seluruh bangsawan Tidore yang bersedia bekerjasama, terkecuali Sultan Jailolo.

Sebelum Belanda menyerbu Tidore, Zainal Abidin, Sultan Jailolo dan sejumlah bangsawan Tidore telah menyingkir ke Halmahera Timur. Zainal Abidin menuju ke Patani, dan Sultan Jailolo membangun markasnya di Weda. Ketika Belanda menyerbu Weda dan menghancurkan markasnya, Sultan Jailolo masuk hutan serta berkelana di pedalaman Weda. Pada 1807, Sultan Jailolo pertama, Muhammad Arif Billa, wafat karena kecelakaan. Billa mati tergelincir ke dalam sebuah jurang dan dimakamkan di dekat sebuah sungai di Weda.

Setelah Sultan Muhammad Arif Billa wafat, ia digantikan oleh puteranya, Kimalaha Sugi – sebelumnya menjabat sebagai *Ngofa Jou* (putera mahkota). Sultan Jailolo ke-2 ini bergelar Muhammad Asgar. Ketika Inggris (*East India Company*) menduduki Ternate pada 1810, Muhammad Asgar tidak diakui sebagai Sultan Jailolo, karena "belum pernah diangkat oleh suatu penguasa yang berhak, dan tidak berhak untuk menggunakan gelar itu (yakni gelar sultan – pen.)."¹⁷ Inggris lalu menangkap dan menahan Muhammad Asgar dan menahannya di Ambon hingga 1817. Ketika Inggris menyerahkan kembali kekuasaan Maluku kepada Belanda, Asgar ikut pula diserahkan sebagai tahanan. Pada tahun ini juga, Asgar mengajukan permohonan kepada panitia pengambilalihan kekuasaan dari Inggris kepada Belanda agar ia dibebaskan dan diperkenankan kembali memimpin masyarakat Halmahera.

Permohonan Asgar tidak ditanggapi. Karena itu, ia menyurat kepada Laksamana A.A. Buyskes, yang tengah berada di Ambon dalam rangka penyelesaian Perang Pattimura, dan mengajukan sekali lagi permintaannya. Sebagai alasan bagi permohonannya, Asgar mengemukakan bahwa di masa lampau Kerajaan Jailolo pernah eksis, sehingga amat wajar bila ia menuntut untuk menghidupkan kembali kerajaan tersebut. Kesultanan Jailolo baru ini telah lahir dan menjadi kenyataan ketika masyarakat Halmahera mengangkat ayahnya, Muhammad Arif Billa, sebagai sultan mereka. Buyskes tidak menghiraukan permohonan Asgar. Bahkan, tidak lama kemudian ia dibuang ke Jepara pada 1817. Tetapi, pada 1825, Asgar dikembalikan ke Maluku kemudian diangkat oleh Pemerintah Belanda sebagai Sultan Jailolo II yang berkedudukan di Seram Pasir.

Sejak Belanda menyerbu dan membumihanguskan Tidore, pada 1806 Hajuddin bersama 3000 pengikutnya dari Halmahera Timur dan Tobelo-Tai berpindah-pindah tempat karena dikejar Belanda. Akhirnya Hajuddin beserta pengikutnya mendirikan koloni mereka di Seram Pasir. Di kalangan pengikutnya, Hajuddin dikenal sebagai Sultan Jailolo III yang berkuasa di Seram Pasir.¹⁸

Hingga 1821, jumlah pengungsi yang berada di Seram Pasir telah mencapai 7000 orang. Para pengungsi ini tidak hanya berasal dari Halmahera Timur, tetapi juga dari Halmahera Utara – Tobelo, Kao serta Galela – dan Papua yang mendukung Hajuddin, termasuk pribumi Seram Pasir dan sekitarnya, seperti penduduk Negeri Lisabata, Hative serta Seram Timur. Para pendatang baru di Seram Pasir itu adalah orang-orang yang melarikan diri dari kejaran pasukan Sultan Muhammad Tahir, yang sejak 1810 berkuasa sebagai Sultan Tidore ke-21. Para pendatang ini dipimpin oleh *Sangaji* Rubacola dan Kapita Laut Naimuddin dari Weda.

¹⁷ R.Z. Leirissa, *Halmahera Timur dan Raja Jailolo*, Jakarta: Balai Pustaka, 1966. pp. 145.

¹⁸ Leirissa, *Halmahera Timur*, *Op.Cit.*, *passim*.

Dengan semakin bertambah jumlah pengikutnya, Hajuddin merasa perlu mendapatkan legitimasi atas kekuasaannya dari Pemerintah Belanda. Ia menyurati Gubernur Ambon dan meminta pengertian baiknya mengenai masyarakat Halmahera di Seram Pasir, dan agar ia diizinkan membentuk sebuah kerajaan di Halmahera untuk mengatur pengikutnya. Upaya Hajuddin gagal, bahkan membuatnya makin diburu. Belanda menganjurkan rakyat agar tidak berhubungan dengan Sultan Jailolo III yang telah dinyatakan sebagai penjahat, dan menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang dapat menangkapnya hidup atau mati.

Tetapi, sebegitu jauh tak satupun rakyat Seram Pasir melakukan hal-hal yang dikehendaki Belanda. Ini secara jelas menunjukkan betapa kuat pengaruh dan kharisma Hajuddin. Baru setelah Peter Merkus menjabat sebagai Gubernur Ambon (1822-1828), ajakan damai Sultan Jailolo III, Hajuddin, memperoleh tanggapan positif.

Sementara itu, sepanjang abad ke-19, di perairan Indonesia Timur, khususnya di perairan Maluku dan Kepulauan Ambon, aksi-aksi perompakan yang melibatkan orang Tobelo dan Galela sedang marak. Para bajak laut Halmahera Utara ini bahkan menjalin kerjasama dengan bajak laut Mindanao dan Sulu dari Filipina Selatan. Di perairan Maluku, aksi-aksi perompakan juga melibatkan sejumlah orang Halmahera Timur dan Tobelo yang bermukim di Seram Pasir. Aksi-aksi ini telah membuat pelayaran dan perdagangan di kawasan tersebut sangat terganggu.

Para pejabat Gubernur di Ambon berpendapat bahwa operasi-operasi bajak laut dalam wilayah Maluku itu didalangi Sultan Jailolo III, Hajuddin. Karena itu, menurut pendapat Gubernur Merkus, jika Hajuddin bisa dijinakkan, perompakan yang sangat mengganggu pelayaran dan perdagangan di perairan Maluku serta Kepulauan Ambon akan dapat ditanggulangi dan dihentikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Merkus mulai menjalin kontak resmi yang intens dengan Hajuddin. Kontak ini pada akhirnya membawa kedua pihak ke meja perundingan untuk membahas pembentukan Kesultanan Jailolo di Seram Pasir. Dalam usulnya mengenai agenda perundingan, Hajuddin menuntut agar ia diakui sebagai penguasa Halmahera. Tetapi, tuntutan ini ditolak Gubernur Merkus yang, sebaliknya, mengusulkan agar kerajaan yang akan dibentuk itu berlokasi di Seram Pasir. Hajuddin akhirnya menyetujui proposal tersebut dan menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada Gubernur Merkus. Ia juga mengajukan syarat bahwa yang akan menjadi penguasa Kesultanan Jailolo di Seram Pasir adalah kakaknya, Muhammad Asgar. Sementara ia sendiri cukup menjabat sebagai Raja Muda.

Setelah berkonsultasi dengan Batavia, Merkus dapat menerima persyaratan yang diajukan Hajuddin. Muhammad Asgar pun didatangkan ke Ambon dari Jepara untuk ikut menandatangani perjanjian, yang dilakukan pada 25 Januari 1826. Tidak lama setelah itu, Muhammad Asgar dilantik sebagai Sultan Jailolo II, yang berkuasa atas Seram Pasir – tidak termasuk daerah pedalaman. Dalam upacara di Benteng Victoria, Ambon, Sultan Jailolo II itu mengucapkan sumpah setia kepada Kerajaan Belanda. Sebagai Sultan, Muhammad Asgar bergelar *Paduka Seri Tuwan Sulthan al-Wasatu Billahil Alim, Sulthan Muhammad Saleh Amiruddin Khalifatullah Atas Muka Bumi Daerah Alam Maluku Yang Maha Mulia, Raja Yang Memegang Parenta di atas Takhta Kerajaan Tanah Seram*.¹⁹

Dalam perjanjian sebelum pelantikan Sultan Jailolo II, disebutkan bahwa seluruh kedaulatan dalam Kerajaan Seram Pasir terletak di tangan Gubernur, yang diwakili seorang

¹⁹ *Ibid.*

pejabat Hindia Belanda. Wilayah Kerajaan Seram Pasir tidak termasuk daerah pedalaman, dan Sultan diberi hak memungut pajak dari rakyat yang berada dalam wilayah kerajaannya. Sultan Jailolo II juga dilengkapi dengan sejumlah *bobato* yang diambil dari tokoh-tokoh Halmahera Timur dan Tobelo yang bergelar *kimalaha* serta *sangaji*.

Sebenarnya, kekuatan dan kewibawaan Sultan Jailolo II tidak hanya terletak pada dukungan para *bobato* belaka, tetapi pada dukungan Gubernur – dalam hal ini Gubernur Ambon, Merkus. Kekuasaan Sultan Jailolo hanya dapat terjamin karena dukungan dan bantuan Gubernur Merkus dalam upayanya mengatasi operasi-operasi perompakan di kawasan Maluku. Merkus bahkan menyerukan kepada bawahannya untuk memberikan dukungan serupa kepada Sultan Jailolo II. Pemerintah Belanda memberi tunjangan kepada Sultan Jailolo II sebesar f. 250 setiap bulannya.

Setelah Merkus tidak lagi menjabat gubernur, mulai muncul perselisihan antara Sultan Jailolo II dengan Gubernur Ambon. Pihak Gubernur menilai bahwa sultan mulai terlibat dengan para bajak laut Tobelo. Pada 1831, Sultan Jailolo II berselisih dengan Komandan Militer Wahai, yang juga menjabat sebagai asisten residen. Komandan militer itu melaporkan kepada Gubernur Maluku bahwa Sultan Jailolo II berencana menyerang Benteng Wahai. Gubernur akhirnya memerintahkan menangkap Sultan Jailolo II, walaupun kemudian dibebaskan karena laporan tersebut didasarkan pada keterangan palsu.

Beberapa saat setelah insiden tersebut, Sultan Jailolo II, Muhammad Asgar, memutuskan pindah dari Seram Pasir karena daerah ini tidak subur untuk pertanian, sehingga banyak rakyatnya yang miskin dan beralih menjadi bajak laut. Ia kemudian mengajukan permintaan kepada Pemerintah Belanda agar ia dan rakyatnya diizinkan kembali ke Halmahera.

Ketika berkunjung ke Ambon pada 1832, Sultan Jailolo II mengajukan kembali permohonan pindah ke Obi, pulau yang telah dibeli VOC dari Sultan Bacan. Sementara pengikut Asgar mendesaknya agar mereka kembali ke Halmahera Timur. Dengan demikian, Asgar dan rakyatnya memiliki keinginan yang berbeda tentang kepindahan itu. Tetapi, permohonan pindah tersebut ditolak Gubernur. Sultan Jailolo II akhirnya memutuskan menempuh jalan sendiri. Ia mengutus adiknya ke Bacan untuk menjajaki kemungkinan pindah, namun upaya ini tidak membuahkan hasil.

Untuk menyelesaikan kemelut Kesultanan Jailolo, Gubernur Jenderal akhirnya mengutus Pieter Merkus – saat itu menjabat sebagai anggota *Raad van Indie* – ke Ambon. Pemecahan masalah yang diusulkan Merkus terdiri dari dua alternatif:

1. Sultan Jailolo II di Seram Pasir dipensiunkan dan diganti dengan Hajuddin sebagai Sultan Jailolo III.
2. Kesultanan Jailolo dibubarkan dan seluruh keluarga kerajaan diasingkan.

Alternatif pertama gagal dijalankan, karena Hajuddin menolak menggantikan kakaknya. Gubernur Ellinghuizen, yang menjadi juru runding Pemerintah Belanda, akhirnya melaksanakan alternatif kedua. Pada akhir 1832, Ellinghuizen mengunjungi Wahai. Dengan alasan untuk mengadakan perundingan di atas kapal yang sengaja didatangkan ke Wahai, Gubernur mengundang Sultan Jailolo II, Raja Muda Hajuddin, Jogugu Jamaluddin, dan Kapita Laut Kamadian, beserta seluruh keluarga mereka – semua berjumlah 60 orang – ke atas kapal. Setelah semuanya berada di atas kapal, mereka ditangkap dan kapal itu pun berlayar menuju Ambon.

Dari Ambon, rombongan tahanan Kesultanan Jailolo diangkut dengan dua kapal ke Batavia, kemudian ke Cianjur, tempat mereka diasingkan. Kesultanan Jailolo di Seram Pasir pun dilikuidasi, dan berakhirilah kasus Kesultanan Jailolo. Pada 1844, rombongan tahanan Kesultanan Jailolo – kecuali Hajjuddin dan Jamaluddin, putera Sultan Jailolo II – dikembalikan lagi ke Maluku.

Pasca likuidasi Kesultanan Jailolo, pengikut-pengikut Sultan Jailolo asal Halmahera Timur kembali ke daerah asal mereka, setelah sekitar setengah abad menyatakan kesetiaannya kepada Sultan Jailolo. Namun, orang Tobelo dan Galela menolak perintah Gubernur Ambon untuk kembali ke daerah asalnya, dan tetap bermukim di Seram Pasir. Sebagian dari mereka kemudian bergabung dengan para bajak laut yang beroperasi hingga ke utara Jawa Timur.

Upaya Menghidupkan Kembali Kesultanan Jailolo

a. Pemberontakan Dano Baba Hasan

Pada 1876, Dano Baba Hasan berupaya menghidupkan kembali Kesultanan Jailolo. Ia meminta Pemerintah Belanda mengakuinya sebagai Sultan Jailolo. Baba Hasan sebenarnya adalah kerabat Kedaton Ternate yang pada 1832 diangkat sebagai *Salahakan* di Seram oleh Sultan Muhammad Zain. Pada 1876 ia berada di Halmahera Timur dan didatangi banyak penduduk yang memintanya bersedia diangkat sebagai Sultan Jailolo, meneruskan warisan kerajaan Sultan Muhammad Asgar.

Berdasarkan permintaan tersebut, Baba Hasan ke Ambon dan menuntut kepada Gubernur Maluku agar diakui sebagai Sultan Jailolo. Gubernur menolak tuntutan ini dan Baba Hasan kembali ke Halmahera Timur. Sekembalinya ke Halmahera Timur, ia mewajibkan rakyat menyerahkan upeti dan membayar pajak kepadanya. Pajak diri ditetapkan sebesar f. 4,- bagi yang sudah berumah tangga, dan f. 2,- bagi yang masih lajang.

Pada 1876, atas desakan para *sangaji* dan *bobato* Weda, Waigeo, Maba dan Patani, Baba Hasan mulai melakukan pemberontakan. Ia mengerahkan pengikut-pengikutnya dari Halmahera Utara (Tobelo dan Galela) serta rakyat Halmahera Timur sendiri. Dengan kekuatan pasukan yang besar, Baba Hasan menyerbu Kao dan membumihanguskannya pada 3 September 1876. setelah pembumihangusan Kao, pada 7 September, Baba Hasan beserta pasukannya memasuki Tobelo. Residen Ternate, A.J. Langeveld, sangat terkejut mendengar laporan pemberontakan tersebut.

Para sultan Maluku – Ternate, Tidore dan Bacan – yang menerima laporan pemberontakan itu, bersiap-siap membantu Residen Ternate memadamkannya. Langeveld lalu mengerahkan tentara Gubernemen, tetapi tertahan selama beberapa hari lantaran angin topan. Sementara itu, Sultan Bacan mencoba menghentikan aksi pemberontakan Baba Hasan dengan mengutus Kaicil Jamal untuk merundingkan perdamaian. Upaya Kaicil Jamal hampir berhasil, tetapi Baba Hasan dicegah para *sangaji* Maba, Patani, Gane dan Mafa untuk berdamai. Mereka mendesak Baba Hasan meneruskan perlawanan dan berupaya meyakinkan bahwa bala bantuan orang Tobelo dan Galela dari Bacan akan segera tiba. Bahkan, menurut para *sangaji* tersebut, bala bantuan dari Papua sedang dalam perjalanan menuju Tobelo.

Ketika pasukan Belanda, Ternate dan Tidore mulai mendarat di utara Tobelo, bala bantuan orang Tobelo-Galela dari Bacan yang ditunggu tak kunjung tiba, demikian pula dengan bala bantuan dari Papua. Posisi Baba Hasan semakin terjepit, karena pasukannya yang ada tidak mampu menahan lajunya tentara koalisi Belanda-Ternate-Tidore. Pasukan Baba Hasan, yang terdiri dari orang Halmahera Timur dan Galela, sudah mengisyaratkan tidak mampu melakukan perlawanan dan bersiap-siap menyerah. Hanya orang-orang Tobelo fanatik yang masih terus bertempur.

Karena situasi yang tidak menjanjikan peluang apapun, pada penghujung Mei 1877, Baba Hasan mengontak Kaicil Jamal dari tempat persembunyian. Kurirnya menyampaikan pesan bahwa Baba Hasan dan pasukannya siap berdamai. Kaicil Jamal meneruskan pesan ini kepada Residen Tobias, pengganti Langeveld, yang telah tiba di Tobelo. Segera Residen Ternate memerintahkan pasukan koalisi menghentikan pertempuran, dan peletakkan senjata Baba Hasan pun diumumkan.

Pada 21 Juni, Baba Hasan mengakhiri pemberontakannya. Dengan diantar Kaicil Jamal, ia menyerahkan diri kepada Residen Tobias dan segera ditahan, kemudian dideportasi ke Ternate. Beberapa bulan kemudian, ia diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman pengasingan ke pulau Muntok di Sumatera. Di pulau inilah Baba Hasan menjalani hukuman dan mengakhiri hidup didampingi keluarganya.²⁰

Akibat pemberontakan Baba Hasan, Pemerintah Belanda – dengan keputusan Gubernur Maluku – menempatkan masing-masing seorang *posthouder* di Galela dan Bicoli. Penempatan *posthouder* di kedua kota itu dimaksudkan untuk mengawasi aktivitas pengikut-pengikut fanatik Sultan Jailolo, terutama orang Tobelo-Galela dan Halmahera Timur.

Belanda juga memberikan berbagai penghargaan kepada sejumlah pimpinan militer Kesultanan Ternate dan Tidore atas keberhasilan menumpas pemberontakan Baba Hasan. Pejabat sipil yang dipandang sangat berperan dalam aksi penumpasan pemberontakan juga dianugerahi penghargaan. Raden Mas Nursewan, pegawai pada Kantor Keresidenan Ternate, memperoleh anugerah medali emas dan uang gratifikasi sebanyak f. 250. Haji Arifin bin Soleman, juru tulis Kantor Keresidenan, mendapat medali perak dan uang gratifikasi sebesar f. 250. Kapita Hongi Said Muhammad, komandan pasukan Ternate, memperoleh medali perak dan gratifikasi sejumlah f. 1000 untuk dirinya dan f. 500 untuk para komandan pasukannya. Kapita Perang Aman dari pasukan Ternate mendapatkan hadiah pisau berburu, dan selanjutnya diangkat oleh Sultan Ternate sebagai utusan di Tobelo. Haji Jafar, juga dari Ternate, mendapat sebuah mushaf al-Quran yang dijilid amat indah. Kapita Laut Tidore, Kaicil Muhammad Tahir, dianugerahi senapan berburu. Kaicil Ajaran, juga dari Tidore, memperoleh sebuah arloji emas.²¹

b. Pemberontakan Dano Jaeyudin di Weda-Waigeo

Hampir setengah abad setelah pemberontakan Baba Hasan ditumpas, sebuah percobaan pemberontakan yang mirip muncul di Weda pada 1914. Seorang dano dari Ambon, bernama Dano Jaeyudin, yang masih keturunan Baba Hasan, menuntut dan memproklamasikan Kesultanan Jailolo serta mengangkat dirinya sebagai Yang Dipertuan Agung Kesultanan Jailolo.

²⁰ F.S.A de Clerq, *Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate*, (Leiden: E.J. Brill, 1890), p. 185.

²¹ de Clerq, *Op.Cit.*, p. 185 dan catatan kaki no. 2.

Dano Jae berhasil melakukan kontak dengan rakyat Waigeo di Halmahera Timur dengan menyatakan dirinya sebagai ahli waris Sultan Jailolo, dan karena itu berhak atas takhta Jailolo.

Berbeda dengan Baba Hasan, kemampuan Dano Jae mengorganisasi gerakannya bisa diketahui secara dini oleh Pemerintah Belanda dan Kesultanan Tidore. Karena itu, gerakan pemberontakannya dapat ditumpas habis sebelum meluas oleh sebuah detasemen polisi lapangan yang dikirim dari Ternate. Dano Jae sendiri ditangkap dan dipenjarakan.

Usaha-usaha Memulihkan Identitas Jailolo

Perseteruan akut antara Ternate-Tidore sejak berabad-abad telah memberi peluang kepada VOC untuk menguasai Maluku dengan mudah. Nuku, pahlawan nasional dari Tidore, adalah tokoh yang paling intens memperjuangkan restorasi Kerajaan Jailolo. Nuku yakin bahwa anihilasi Kerajaan Jailolo yang dilakukan Ternate dengan bantuan kekuasaan asing (Portugis dan VOC) sejak abad ke-16, telah melemahkan kerajaan-kerajaan Maluku. Hal ini akan menenyapkan identitasnya dan berujung pada dikuasainya kerajaan-kerajaan Maluku oleh kekuasaan asing (Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris).

Sebab itu, menurut Nuku, perlu aksi bersama – baik politik maupun militer – untuk mengakhiri dan mengembalikan Maluku pada status merdeka seperti sediakala, sebelum bangsa-bangsa asing datang ke daerah ini. Rakyat Tidore dan daerah-daerah di seberang laut, Halmahera Timur dan Utara, juga menyadari hal yang sama. Atas dasar persamaan persepsi itulah, Nuku menganggap rakyat di daerah-daerah yang disebut di atas telah mempercayakan kepadanya untuk mengembalikan status Jailolo sebagai kerajaan dalam semangat *Moloku Kie Raha*.

Jailolo yang telah tercabik-cabik dan tersingkir dari wadah Maluku, juga telah kehilangan identitasnya sebagai kerajaan paling senior dalam ranking kerajaan-kerajaan Maluku. Jailolo secara *de jure* telah lenyap, karena Ternate telah menjadikannya sebagai wilayah seberangnya yang tak terpisahkan. Dengan demikian, menurut Nuku, memulihkan identitas Jailolo berarti mengembalikan Maluku ke zaman keemasannya. Nuku menginginkan agar Jailolo bersama kerajaan-kerajaan Maluku yang lain memasuki sebuah lingkaran baru dengan terciptanya keserasian, persamaan, dan perdamaian.

Sungguhpun cita-cita Nuku tentang Jailolo sukar diimplementasikan, tetapi pengaruhnya cukup besar, khususnya terhadap rakyat Tidore. Pada tahun 1765, sebanyak 146 orang penduduk Tomalou (Tidore) tiba di Jailolo di bawah pimpinan seorang Imam dan dua orang *khatib*. Mereka datang ke Jailolo dengan maksud menobatkan seseorang bernama Abu Laif – yang mengaku sebagai keturunan langsung keluarga Kerajaan Jailolo – sebagai Sultan Jailolo yang baru. Tetapi, aksi Imam Tomalou ini gagal, karena orang-orang Alifuru Jailolo menolak memberikan kesetiaan kepada Abu Laif. Akibatnya, timbul sengketa antara orang-orang Tomalou dengan orang-orang Alifuru. Pak Imam dan kedua khatibnya tidak kembali ke Tidore, karena terlanjur ditangkap Pemerintah Belanda, yang ikut campur tangan dalam peristiwa ini.²²

Insiden ini dipandang tidak signifikan oleh rakyat, karena hanya menghentikan untuk sementara upaya mereka untuk menghidupkan kembali Kerajaan Jailolo. Lima belas tahun setelah insiden tersebut, Imam Cobo, juga dari Tidore, bersama 35 pengikutnya mendarat di

²² Andaya, *Op.Cit.* pp.215

Jailolo. Berita yang sampai ke telinga Imam Cobo adalah keturunan Katarabumi, sejak penyebuan Portugis yang melengserkannya dari takhta Jailolo, tidak lagi hidup di kota tetapi telah membaur dengan orang-orang Alifuru dan hidup di hutan-hutan. Imam Cobo dan pengikutnya masuk ke dalam hutan Jailolo untuk mencari seseorang yang mungkin merupakan keturunan kerajaan untuk dilantik sebagai raja baru Jailolo. Tetapi, setelah sebulan menjelajahi hutan Jailolo, orang yang mereka cari tidak kunjung ditemukan. Sang Imam malah ditangkap Pemerintah Belanda dan diinterogasi sebelum dipulangkan ke Cobo.²³

Ilustrasi di atas memperlihatkan kepedulian Nuku pada takhta Jailolo dan pengaruhnya di kalangan rakyat Tidore. Dalam surat-menyurat dengan Pemerintah Belanda, Nuku pernah menyatakan dirinya sebagai pewaris takhta Jailolo dan ketika dinobatkan sebagai *Jou Barakati* oleh pengikut-pengikutnya di Seram, ia menghimbau rakyat Maluku dan Papua untuk memberikan perhatiannya kepada Jailolo.

Sebab-sebab Kegagalan Saifuddin dan Nuku Menghidupkan kembali Kerajaan Jailolo

Tuntutan untuk menghidupkan kembali kerajaan Jailolo dengan alasan menegakkan Maluku di atas 4 tonggak kerajaan, baik oleh Saifuddin maupun oleh Nuku, selalu disampaikan kepada gubernur VOC yang tengah berkuasa. Mereka samasekali melupakan peranan kerajaan Ternate yang menganeksasi Jailolo sebagai bagian integral kerajaan ini, dan ikatannya yang begitu erat antara VOC dengan kerajaan Ternate.

Sebenarnya, kalau segala sesuatunya bergantung kepada para gubernur VOC, maka sejak tuntutan Saifuddin kepada Gubernur Padtbrugge, tuntutan tersebut mungkin telah dipertimbangkan. Akan tetapi penolakan pemerintah VOC Belanda untuk menghidupkan kembali Kerajaan Jailolo adalah semata-mata karena faktor-faktor yang menyangkut hubungan baik VOC-Ternate sebagai partnernya yang paling dipercayainya, serta kesetiaan dan kepatuhan kerajaan ini kepada VOC.

Seandainya Saifuddin dan Nuku melakukan pendekatan atas dasar persaudaraan sesama kesultanan Maluku dengan penuh kebijakan yang tidak mengakibatkan kerajaan Ternate kehilangan muka, maka besar kemungkinan Ternate akan melepaskan Jailolo, bahkan mungkin kerajaan ini akan memelopori pemulihan kembali kesultanan tersebut sesuai permintaan kedua sultan Tidore itu.

Setelah Nuku wafat pada 14 Nopember 1805, pemeliharaan pilar-pilar Maluku hanya bertopang pada Ternate, Tidore, dan Bacan. Jailolo telah mati dan Bacan dalam keadaan lemah. Jailolo memang masih sering disebut-sebut dalam upacara-upacara formal berkenaan dengan statusnya sebagai salah satu dari empat pilar yang menopang Maluku pada zaman bahari. Demikian pula, Jailolo juga secara formal masih tetap diidentifikasi sebagai salah satu unsur *Moloku Kie Raha* yaitu: Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Tetapi, lebih dari itu tidak!

²³ Ibid, p.221.

BAB 4

Ternate: Kerajaan Maluku Terbesar

Asal-usul

Pada 1250, terjadi eksodus besar-besaran orang-orang Halmahera – di bawah Kerajaan Jailolo – ke berbagai pulau di bagian barat pulau tersebut seperti pulau Ternate, Tidore, Moti dan Makian. Eksodus ini terjadi akibat konflik politik antara Raja Jailolo yang absolut-otoriter dengan kelompok-kelompok politik lokal. Di antara pelarian tersebut ada yang mendarat di Ternate dan mendirikan pemukiman mereka di dekat puncak Gunung Gamalama. Pemilihan tempat ini atas pertimbangan keamanan – yakni untuk menghilangkan jejak dari kemungkinan pengejaran pasukan Jailolo. Komunitas tertua tersebut adalah di Tobona, terletak di antara puncak Gamalama yang saat itu belum meletus.¹

Komunitas Tobona dikepalai seorang pimpinan yang disebut “Momole.” Pembentukan komunitas Tobona inilah yang menandai permulaan masa kekuasaan Momole, sebagai awal masa pra-kolano (raja). Momole pemukiman Tobona bernama *Guna*. Karena pelarian politik orang-orang Halmahera makin bertambah, para imigran tersebut lalu membangun pemukiman baru bernama Foradiahi – sekitar tahun 1254. Pemukiman Foradiahi dipimpin Mole Matiti. Setelah itu, terbentuk pemukiman ketiga yakni Sampala, di bawah otoritas *Momole Ciko* (baca Siko). Berbeda dengan Tobona, kedua pemukiman terakhir dibangun tidak jauh dari pantai. Bahkan, Sampala terletak di tepi pantai. Hal ini mungkin memperlihatkan bahwa komunitas-komunitas di Ternate tidak lagi memperhitungkan Kerajaan Jailolo sebagai ancaman. Jarak antara satu pemukiman dengan pemukiman lainnya di masa awal Ternate ini relatif cukup jauh, sehingga komunikasi di antara kampung-kampung tersebut relatif sulit dan kurang lancar. Keadaan semacam ini berjalan selama beberapa tahun.

Pada 1257, komunitas Tobona, sebagai komunitas pelopor, mengambil prakarsa menyelenggarakan suatu musyawarah. Tidak jelas di mana musyawarah itu berlangsung. Kemungkinan di Tobona, karena komunitas inilah yang memprakarsainya. Pendapat lain menyatakan musyawarah tersebut berlangsung di Foradiahi, yang terletak di tengah, antara Sampala dan Tobona. Kemungkinan lainnya, musyawarah dilakukan di Sampala, mengingat Momole Sampala-lah yang kemudian terpilih memimpin seluruh pemukiman yang ada. Musyawarah diadakan dengan agenda tunggal: menggalang persatuan di antara ketiga komunitas tersebut dan mengangkat pemimpinnya. Musyawarah memufakati aturan di antara ketiga komunitas tersebut, dan akhirnya mengangkat Ciko sebagai pemimpin ketiga komunitas.

Setelah pengangkatannya sebagai pimpinan komunitas tritunggal, Ciko mengubah gelarnya dari Momole menjadi *Kolano* – bermakna "raja." Demikian pula, namanya juga diubah menjadi Mashur Malamo. Peristiwa ini mengawali era kolano di Ternate. Setelah beberapa waktu

¹ Gunung Gamalama mulai meletus pada 1686.

menjadikan Sampala sebagai pusat kekuasaan, Ciko – yang berkuasa hingga 1272 – kemudian membangun ibu kota baru di tepi pantai, yang diberi nama Gamlamo (Negeri Besar).

Pengangkatan Ciko sebagai Kolano pertama Ternate, dituturkan dalam mitos sbb:

Pada suatu hari Momole Guna, Kepala Persekutuan Tobona, menjelajahi hutan mencari pohon enau untuk menyadap tuaknya. Ia tiba di suatu lintasan jalan dan menemukan sebuah lesung terbuat dari emas. Momole Guna mengambilnya dan membawa pulang ke rumah. Lesung emas itu kemudian menjadi tontonan yang aneh bagi warga Tobona. Karena yang ingin melihatnya makin banyak berdatangan, Momole Guna tidak mau menahannya lebih lama lagi dan memutuskan untuk memberikannya kepada Momole Molematiti, pimpinan komunitas Foramadiah, yang terletak di bawah Tobona. Mole matiti yang telah menerima lesung aneh itu, juga mengalami hal yang sama seperti dialami Momole Guna dari Tobona. Karena tidak betah, ia berikan kepada Ciko dari Sampala. Ciko menerima lesung itu berikut segala keajaibannya dan dengan demikian ia memperoleh kehormatan menjadi penguasa atas pulau Ternate yang berakhir dengan penobatannya sebagai Raja pertama pulau itu dengan gelar Kolano.²

Setelah Mashur Malamo (1257-1272) dinobatkan sebagai Kolano pertama, berkuasa di Kerajaan Ternate secara beturut-turut: Kaicil Yamin (1272-1284), Kaicil Siale (1284-1298), Kamalu (1298-1304), dan Kaicil Ngaro Lamo (1304-1317).

Ekspansi Ternate

Di kawasan Indonesia timur, Ternate merupakan kerajaan terbesar dan terluas daerah kekuasaannya. Peletak dasar politik ekspansionis Kerajaan Ternate ini adalah Kolano Ngaro Malamo. Pada masa pemerintahannya, beberapa desa di Jailolo mulai dianeksasinya. Pada masa awal perkembangan ekspansi Ternate, patut disebutkan bahwa keluarga *Fala Raha* – yang terdiri dari klan Tomaito, Tomagola, Limatahu, dan Marsaoli – adalah pelaksana-pelaksana ekspansi Ternate.

Pada akhir abad ke-15, klan Tomaito mengirimkan ekspedisi ke kepulauan Sula dan membawa kawasan ini menjadi daerah seberang laut Ternate yang pertama. Untuk jasa-jasanya, Raja Ternate mengangkat klan Tomaito sebagai *Salahakan* (Gubernur) kepulauan Sula dan Sulabesi.

Demikian pula, pada akhir abad ke-16, keluarga Tomagola memperluas wilayah seberang laut Ternate ke Buru. Klan Tomagola, di bawah pimpinan Kibuba, mulai menduduki Seram dan sekitarnya, kemudian melangkah ke kepulauan Ambon, sebelum akhir tahun 1600. Kibuba sendiri ketika itu belum beragama, tetapi akhirnya ia memeluk Islam dan menikah dengan Baifta Broly, putri seorang Ternate bernama Sehe Jumali yang bermukim di Makian. Dari perkawinan ini lahir 3 orang anak: Dudu, Samarau, dan Molicanga. Dudu melanjutkan kepemimpinan klan Tomagola setelah wafatnya Kibuba.

Setelah Dudu meninggal, keluarga Tomagola berada di bawah dua sub-klan, masing-masing dipimpin Samarau dan Molicanga. Dari kedua pimpinan sub-klan Tomagola itu, Samarau yang paling menonjol. Hal ini menyebabkannya diutus Sultan Khairun sebagai *Salahakan* di Ambon. Samarau mempunyai dua orang putera: Rubohongi dan Saptiron. Dari kedua putera

² Andaya, Leonard Y. *Op. Cit.* p.50 dan Valentijn Oud en Nieuw, vol.1b pp.282-283.

Samaran itu, Rubohongi merupakan orang kepercayaan dan pembantu utama Babullah. Setelah Babullah dinobatkan sebagai Sultan Ternate, ia mengirim Rubohongi ke Ambon (1570) sebagai *Salahakan* untuk menggantikan ayahnya, Samarau, yang sudah tua. Di bawah Rubohongi, Ternate berhasil memantapkan posisinya atas Seram, Buru dan sekitarnya. Rubohongi juga berlayar ke Tomimi dan mempersembahkan Teluk Tomimi di Sulawesi Tengah kepada Kesultanan Ternate.

Rubohongi mempunyai lima anak: Jumali, Angsara, Kasigu, Dayan, dan Basaib. Jumali, putera pertama Rubohongi, memiliki seorang putera bernama Sabadin, yang menurunkan Majira. Pada masa pemerintahan Sultan Hamzah, Majira menjadi *Salahakan*, dan melakukan pemberontakan melawan VOC.

Keturunan Rubohongi lainnya yang menjadi *Salahakan* adalah Luhu dan Leilato, masing-masing adalah putera Dayan dan Basaib. Pada masa kekuasaan merekalah Portugis mulai datang ke Ambon (1515).³ Tetapi, di bawah para *Salahakan* klan Tomagola ini pula, Ternate mendominasi kepulauan Amboina, termasuk pulau Buru, Ambalau, Manipa, Kelang, Buano, Seram, Seram Laut, Nusalaut, Honimoa (Saparua), Oma (Haruku) dan Ambon sendiri.

Keluarga Tomagola secara berkesinambungan menjadi *Salahakan* dan memerintah negeri-negeri di atas hingga akhir abad ke-17. Pada akhir abad ini, Sultan Mandar Syah menyerahkan kepulauan Amboina kepada VOC, berdasarkan perjanjian Ternate-VOC tertanggal 12 Oktober 1676. Sementara keluarga Limatahu dan Marsaoly terus melakukan upaya untuk mengokohkan dominasi Ternate atas daerah seberang lautnya, yang menyebabkan timbulnya pengaruh kuat di pusat kekuasaan.

Aktivitas penaklukan Ternate paling spektakuler terjadi pada masa pemerintahan Sultan Babullah (1570-1583). Pada masa ini, wilayah kesultanan Ternate membentang dari Mindanao di utara sampai Bima di selatan, dan dari Makassar di barat sampai Banda di timur. Babullah adalah Sultan Ternate terbesar dan dikenal sebagai “penguasa 72 pulau” yang seluruhnya berpenghuni.⁴ Di masa pemerintahan Babullah, Ternate tampil sebagai kerajaan paling kuat dan berpengaruh dalam politik maupun militer di kawasan timur Indonesia. Bahkan pada masa ini, ketiga kerajaan Maluku lainnya “tidak berkutik”.

Bab, demikian rakyat menyapanya, menurut sebuah sumber,⁵ mampu mengerahkan 90.700 tentara bila diperlukan. Kontributor terbesar pasukan Bab – di atas 10.000 pasukan – adalah Veranulla dan Ambon (15.000 tentara), Teluk Tomimi (12000), Batu Cina dan sekitar Halmahera Utara (10.000), Gorontalo dan Limbotto (11.000), serta Yafera (10.000). Penyumbang pasukan terkecil adalah Moti dan Hiri, masing-masing 300 tentara.

Keberhasilan Babullah tidak lepas dari keberanian dan kecakapan sejumlah panglima dan komandan tentaranya, seperti Kapita Laut Kapalaya dan *Salahakan* Rubohongi. Kapalaya adalah penakluk pantai timur Sulawesi, khususnya Buton, dan Rubohongi adalah penakluk Maluku Tengah dan kawasan Teluk Tomimi.

Enam tahun setelah bertakhta, Bab sudah menguasai pulau-pulau di Ambon, Hoamoal di Seram, Buru, Manipa, Ambalau, Kelang, dan Buano. Empat tahun kemudian, Bab menguasai

³ Rumphius, G.E.: *Ambonsche Landbeschrijving*, 1679, Z.J.Manusama (ed.), Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1983, pp.213,244.

⁴ Rincian nama-nama pulau tersebut terdapat dalam Valentijn, *Op.Cit.*p.35f.

⁵ Forest, Thomas: *A Voyage to New Guinea and the Moluccas*, Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1969, p.35.

negeri-negeri di sepanjang pantai timur Sulawesi, seperti Banggai, Tobungku, Buton, Tiboro, dan Pangasani. Setelah itu, giliran Makassar dan Selayar serta berbagai daerah lainnya di Sulawesi Tengah dan Utara – mulai Gorontalo dan Limbatto, Bolaang Mangondow, Bual, Toli-toli, hingga Tomini dan Parigi – masuk ke dalam kekuasaan Bab.

Pengelolaan Pemerintahan Daerah Seberang Laut

Bagaimana Ternate mengelola daerah-daerah kekuasaannya di seberang laut yang tersebar di berbagai kawasan timur Indonesia itu? Untuk wilayah seperti Kepulauan Sula dan Maluku Tengah, yang masing-masing ditaklukkan oleh klan Tomaito dan Tomagola, pemerintahannya dijalankan oleh seorang *Salahakan* (Gubernur) dari kedua klan itu secara turun-temurun. Di daerah-daerah ini Sultan menjalankan pemerintahannya secara langsung dan efektif. *Salahakan* merupakan kepala pemerintahan lokal yang melaksanakan kebijakan Sultan. Ia dibantu sejumlah *Sangaji* dan Kimalaha (eksekutif negeri) yang ditempatkan di daerah-daerah yang dipandang penting. Bentuk pemerintahan langsung seperti ini hanya terdapat di kepulauan Sula, di bawah *Salahakan* klan Tomaito, dan di Maluku Tengah di bawah *Salahakan* klan Tomagola.

Di Halmahera, pemerintahan dipegang langsung oleh Sultan Ternate, melalui kepala-kepala wilayah yang dipegang *Sangaji* (kepala wilayah lokal) dan kepala eksekutif negeri yang berada di bawah Kimalaha. Sementara untuk daerah-daerah taklukan di seberang laut yang berada di bawah kekuasaan raja-raja lokal, Sultan menjalankan pemerintahan secara tidak langsung. Raja-raja lokal diberi wewenang penuh untuk menjadi eksekutif atas nama Sultan Ternate. Pengangkatan para raja tersebut dilakukan Sultan Ternate berdasarkan hasil pemilihan lembaga-lembaga adat setempat. Hal ini dilakukan di daerah-daerah Buton, Banggai, Tual, Toli-toli, Gorontalo, Limbotto, dan daerah lain di Sulawesi Utara dan Sangir Talaud. Tetapi, lantaran pengawasan dan administrasi yang buruk, pemerintahan raja-raja lokal itu tidak efisien.

Di samping para raja lokal dan *Sangaji*, Ternate juga mengirimkan *Utusang* – wakil khusus Sultan – ke sejumlah wilayahnya. Tugas seorang utusang adalah mengurus upeti yang menjadi beban daerah, tetapi tanpa kewenangan pemerintahan.

Ternate pada Masa Sida Arif Malamo

Setelah wafatnya Kolano Ngara Malamo, peletak dasar politik ekspansionis Ternate, pada 1317, ia digantikan oleh Patsyaranya Malamo (1317-1322), menyusul Sida Arif Malamo (1317-1331). Untuk tokoh terakhir ini, perlu dicatat sejumlah prestasi yang diraihinya untuk “membuka” Ternate menjadi Bandar utama perdagangan di wilayah Maluku.

Sida Arif Malamo dan Bandar Niaga Ternate

Pada masa pemerintahan Sida Arif Malamo, Ternate, Tidore, dan Bacan mulai kedatangan pedagang manca negara maupun nusantara. Dari mancanegara adalah pedagang-pedagang Cina, Arab dan Gujarat. Sementara para pedagang nusantara datang dari Jawa, Malaka, dan Makassar. Para pedagang ini mulai menetap atau membuka pos-pos niaga di Ternate, Tidore,

dan Makian. Keadaan ini direspon secara cepat oleh Sida Arif dengan memberikan kemudahan-kemudahan yang diperlukan para pedagang tersebut. Ternate kemudian muncul sebagai kota dagang dengan berbagai fasilitas yang menarik.

Kolano Sida Arif mendirikan pasar untuk mempertemukan para pedagang asing dan nusantara tersebut. Di pasar Ternate, rakyat menggelar dagangannya mulai dari rempah-rempah, bahan makanan seperti sagu dan ikan, buah-buahan dari Moro, daging, hasil pandai besi seperti parang dan alat-alat pertanian, hingga beragam kebutuhan hidup lainnya. Sementara para pedagang asing dan nusantara menjual tekstil, berbagai perhiasan emas perak dan batu mulia, beras, dan alat-alat keperluan rumah tangga, seperti kaca, piring, mangkuk dari porselen dan sebagainya.

Kolano Sida Arif juga mengisi waktu luangnya untuk bergaul dengan para pedagang asing. Ia bahkan belajar bahasa Arab dan Cina, serta mengenakan jubah dan destar serta pakaian yang digunakan para pedagang Cina. Sida Arif menghimbau rakyatnya mempelajari teknologi pembuatan perahu junk dan cara menggunakan layar serta navigasi.

Persekutuan Moti (Motir Verbond)

Karena pergaulan dengan orang-orang asing begitu luas dan pasar yang tumbuh demikian cepat, Ternate mengalami peningkatan kemakmuran begitu deras. Kemajuan itu diiringi pula oleh penguasaan teknologi pelayaran dan pembuatan kapal yang berhasil diserap dari para pedagang asing dan nusantara. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dan ekonomi rakyat kerajaan Tidore dan Bacan, yang berujung pada ketegangan yang kian memanas antara Ternate dan kerajaan Maluku lainnya. Berbagai aksi dan gangguan keamanan – seperti perampokan, penghadangan, dan bentrokan kecil lainnya – antara rakyat kawula Tidore dan Bacan dengan kawula Ternate mulai merebak, nyaris tak terkendalikan.

Untuk meredakan berbagai kemelut tersebut, Sida Arif mengambil prakarsa mengundang para Kolano Tidore, Jailolo, dan Bacan, untuk menghadiri sebuah pertemuan yang diselenggarakan di Moti pada 1322. Agenda pertemuan membahas upaya perdamaian sekaligus meredakan ketegangan antar kerajaan Maluku, penyeragaman bentuk-bentuk kelembagaan kerajaan, serta penentuan peringkat dan senioritas peserta musyawarah. Delegasi Jailolo dipimpin seorang perempuan (tak jelas nama dan posisinya), Bacan dipimpin Muhammad Hasan, dan Tidore dipimpin Kolano Sele. Loloda juga mengirim rajanya, tetapi karena dilanda topan, perahunya terpaksa mendarat di Dufa-dufa Ternate.

Musyawarah akhirnya menyepakati seluruh agenda pertemuan, kecuali tentang penentuan peringkat. Bacan menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai peringkat pertama berdasarkan alasan kesejarahan: Raja Bacan berasal dari keturunan Buka, putera tertua Jafar Sadek dan Nur Sifa. Alasan ini ditolak peserta lain, dengan alasan bahwa tidak dapat disangkal sebelum kerajaan-kerajaan Ternate, Tidore, dan Bacan berdiri, Jailolo telah lebih dulu eksis. Karena itu, Jailolo harus dipandang sebagai kerajaan paling tua dan paling senior.

Di kalangan populis Ternate berkembang anggapan bahwa *Pertemuan Moti* telah melahirkan konfederasi empat kerajaan Maluku, dengan Ternate sebagai pemimpinnya. Pendapat ini tidak beralasan karena:

1. Dalam pertemuan Moti tidak terdapat agenda pembicaraan yang membahas masalah konfederasi, dan keputusan-keputusan yang diambil pertemuan tidak pernah menyebutkan tentang pembentukan sebuah konfederasi.
2. Untuk sebuah konfederasi selalu disyaratkan seseorang yang menjadi kepalanya. Hal ini mustahil dapat diimplementasikan, mengingat persaingan dan perseteruan Ternate-Tidore yang laten dan akut. Salah satu pihak akan menolak bila pihak lain memimpin konfederasi, begitu pula sebaliknya.

Oleh karena itu, pertemuan Moti hanya menghasilkan sebuah *persekutuan* (Verbond) antar keempat kerajaan yang menjadi pesertanya.⁶ Sisi positif dan implementasi hasil-hasil dan keputusan pertemuan Moti adalah redanya ketegangan antara kerajaan peserta, penyeragaman lembaga-lembaga kerajaan dan lembaga-lembaga pemerintahan dari Pusat sampai ke daerah-daerah.

Sejak 1322, Maluku mengalami masa damai dan aman dari berbagai intrik politik dan permusuhan. Persekutuan Moti telah berhasil meredam untuk sementara ambisi-ambisi permusuhan dan ekspansif para anggotanya, berikut ancaman militer dari dua kerajaan besar. Perseteruan dan persaingan Ternate dan Tidore, merosot secara drastis. Rakyat Maluku dapat menikmati suasana damai dan aman selama lebih dari 20 tahun.

Tetapi, perdamaian yang ditegakkan dengan susah payah itu segera sirna, ketika Tulu Malamo naik takhta pada 1343. Kolano Ternate yang ambisius ini secara unilateral membatalkan perjanjian Moti, yang dengan susah payah diupayakan pendahulunya, dan menempatkan dirinya pada peringkat pertama, menggantikan kedudukan Jailolo sebagai yang paling senior. Keputusannya ini mendapat reaksi keras dari 3 kerajaan lainnya.

Pernyataan pembatalan *Motir Verbond* disusul Tulu Malamo dengan penyerbuan ke Makian, sebuah Bandar perdagangan rempah-rempah manca negara. Alasan penyerbuan ini adalah penguasaan sumber kekayaan rempah-rempah, karena pulau ini menghasilkan cengkih berkualitas prima (cengkih Raja). Setelah Makian, Kepulauan Sula diserbu oleh Kolano Ngolo Macahaya atau Bayanullah (1350-1375), menyusul Jailolo oleh Marhum (1465-1486).

Zainal Abidin: Sultan Ternate Pertama

Di tengah maraknya politik ekspansi, Zainal Abidin naik takhta dan berkuasa di Kerajaan Ternate (1468-1500), menggantikan ayahnya Marhum. Di akhir pemerintahan Marhum, Ternate mengalami proses Islamisasi yang intens, dan Marhum – walaupun tetap menggunakan titel kolano – merupakan Kolano Ternate pertama yang menerima Islam. Putera Marhum, Zainal Abidin, memperoleh didikan Islam sejak kanak-kanak hingga dewasa di bawah bimbingan juru dakwah terkenal, Datu Maula Husein, yang dapat dianggap sebagai pembawa Islam ke Maluku, khususnya ke Ternate.

Datu Maula Husein: Penyebar Islam di Ternate

⁶ F.S.A. de Clerq. *Op.Cit.*p.148, menyebutnya sebagai Persekutuan Moti (*Motir Verbond*) untuk aliansi yang dihasilkan pertemuan ini.

Datu Maula Husein berhasil mendekati istana dan menjalin hubungan persahabatan dengan Kolano Marhum. Menurut sebuah sumber, Maula Husein berasal dari Minangkabau. Ia bermukim beberapa lama di Gresik, kemudian datang ke Ternate sebagai pedagang merangkap juru dakwah. Ia pandai membaca al-Quran dan suaranya amat merdu. Hampir setiap malam ia membaca kitab suci itu dengan tilawah yang baik dan menarik pribumi Ternate. Akibatnya, banyak pribumi Ternate datang ke rumahnya sekedar mendengar tilawah al-Quran, dan jumlahnya semakin membengkak dari hari ke hari.

Di antara pengunjung pribumi ini ada yang mengajukan permintaan untuk diajarkan membaca al-Quran seperti yang dilakukan Maula Husein. Tetapi dengan cara halus, Datu Maula mengatakan bahwa al-Quran adalah kitab suci orang Islam, dan untuk membacanya seseorang harus terlebih dahulu menjadi Muslim. Orang-orang Ternate tidak keberatan menerima persyaratan itu. Sejak saat itulah mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam, dan Maula Husein membuka pengajian untuk mengajarkan mereka membaca al-Quran serta mempelajari agama Islam.

Datu Maula Husein juga ahli kaligrafi. Keahliannya digunakan untuk menulis ayat-ayat suci al-Quran di atas sebilah papan. Keahlian ini juga membuat kawula Ternate kagum dan berhasrat mempelajarinya. Dakwah Maula Husein akhirnya menerobos masuk ke dalam istana. Kolano Marhum sendiri tertarik dan sering mengundang Maula Husein membaca al-Quran serta berdakwah di istana. Akhirnya, Kolano Marhum memeluk Islam dan memerintahkan para *Bobato* dan keluarganya untuk mengikuti jejaknya. Dengan demikian, Kolano Marhum telah membidani lahirnya komunitas Muslim pertama kerajaan Ternate. Marhum wafat pada 1468, dan untuk pertama kali dalam sejarah Kerajaan Ternate, seorang Kolano dimakamkan sesuai syariat Islam.

Zainal Abidin dan Islamisasi Maluku

Dalam banyak hal, Zainal Abidin memiliki sifat, watak dan kepribadian yang tidak jauh berbeda dengan ayahnya. Tetapi, dalam bidang keagamaan, Zainal Abidin melebihi ayahnya. Salah satu prestasi terbesarnya di bidang ini adalah perubahan struktur pemerintahan setelah kerajaan Ternate menerima Islam sebagai agama resmi.

Zainal Abidin memperoleh didikan formal dari Datu Maula Husein. Setelah itu, ia belajar di sekolah tinggi Islam Gresik yang dipimpin Sunan Giri (1495). Sejak hari-hari pertama bertakhta, Zainal Abidin melakukan sejumlah tindakan yang mendatangkan perubahan-perubahan struktural dan menetapkan sejumlah konvensi baru dan mendasar bagi kerajaannya. Perubahan struktural, institusional, bahkan yudisial yang diintrodusirnya dapat dikemukakan berikut ini:

1. Gelar *Kolano* yang digunakan raja-raja sebelumnya diganti dengan gelar Sultan yang lebih Islami.
2. Ternate dengan resmi menerima Islam sebagai agama kerajaan dan sejak itu menjadi kesultanan.
3. Lembaga baru dalam struktur pemerintahan dibentuk dengan diangkatnya "*Lembaga Jolebe*" atau *bobato* berjubah putih – bertugas membantu sultan dalam urusan keagamaan Islam – untuk mendampingi *bobato* berjubah hitam yang telah ada – bertugas membantu sultan dalam urusan pemerintahan.

4. Sultan adalah Pembina agama Islam atau *Amir al-din* yang membawahi *jolebe* berjabah putih. *Jolebe* terdiri dari seorang *Kalem* (Qadhi), 4 orang *Imam*, 8 orang *Khatib* dan 16 orang *Moding*, yang membantu *Amir al-din* menjalankan fungsi-fungsi keagamaan dan syariat Islam.

Perubahan struktur dan kelembagaan Kesultanan Ternate telah membawa pengaruh besar terhadap kerajaan-kerajaan lainnya di Maluku. Kerajaan-kerajaan seperti Tidore dan Bacan, akhirnya juga terpengaruh dan menerapkan struktur dan kelembagaan kerajaannya mengikuti struktur dan kelembagaan baru yang diintroduksi Ternate.

Zainal Abidin Belajar Islam di Gresik

Pada 1495, dengan didampingi gurunya Datu Maula Husein, Zainal Abidin bertolak ke Gresik untuk belajar di Sekolah Tinggi Islam pimpinan Sunan Giri. Ia diterima belajar di lembaga pendidikan itu selama 3 bulan, dan dikenal di sekolahnya sebagai *Sultan Bualawa* (Sultan Cengkih). Menjadi murid salah seorang Wali Songo yang terkenal merupakan idaman Zainal Abidin sejak remaja. Karena informasi yang disampaikan Datu Maula Husein, ia tahu betapa tingginya pengetahuan keagamaan Islam Sunan Giri, salah satu dari Wali Songo. Zainal Abidin merupakan satu-satunya Sultan asal Maluku yang menimba ilmu dari salah seorang Wali Songo.

Selama di Gresik, Zainal Abidin bertemu dengan pemimpin Hitu, Pati Tuban – dikenal juga dengan nama Pati Puteh. Keduanya menjalin persahabatan yang sangat erat dan bermaksud membentuk sebuah persekutuan Ternate-Hitu, sekembalinya mereka ke tempat masing-masing. Tetapi, keinginan ini tidak terlaksana tanpa diketahui penyebabnya. Zainal Abidin juga menggalang sebuah persekutuan dengan Sunan Giri, tetapi realisasinya juga tidak tampak.

Zainal Abidin adalah seorang militer yang handal. Pada suatu hari, ketika masih di Giri, ada seseorang sedang mengamuk dan menyerang setiap orang yang ditemuinya. Semua orang melarikan diri karena takut, kecuali Sultan Bualawa. Ketika penjahat yang mengamuk itu akan menyerangnya, Sultan Bualawa dengan sigap mencabut pedangnya dan dengan sekali tebas, kepala orang yang mengamuk itu terpisah dari tubuhnya.

Selama berada di Giri, Zainal Abidin berhasil membina persahabatan dengan orang-orang Jawa yang berpengaruh dan berkuasa. Dalam pelayaran pulang, ia sempat mampir ke Makassar dan Ambon untuk membangun hubungan persahabatan dengan berbagai penguasa lokal di sana. Selama berada di Jawa, Zainal Abidin sempat merekrut beberapa guru agama, dan yang paling terkenal dan terpandai di antara mereka adalah Tuhubahahul, yang ikut ke Ternate dan membantu Sultan menyebarkan agama dan budaya Islam di Ternate.⁷ Para ustaz dan ulama yang diboyong ke Ternate, diberi tugas sebagai guru agama, muballig, dan ada pula yang diangkat sebagai Imam. Inilah cikal bakal lembaga *Imam Jawa* dalam struktur *Bobato Akhirat* pada pemerintahan kesultanan Ternate, yang tetap eksis hingga sekarang ini.

Pada 1500, Zainal Abidin wafat. Menurut ahli sejarah Maluku lama yang dikutip Valentijn,⁸ Sultan Zainal Abidin wafat dalam suatu pertempuran di Bima, sekembalinya dari

⁷ Alwi, Des: *Sejarah Maluku; Banda Naira, Ternate, Tidore dan Ambon*. Dian Rakyat Jakarta, 2005, pp.298-299. Valentijn, *Op.Cit.* p.143.

⁸ *Ibid.*

Jawa. Pendapat ini sangat lemah, karena seperti telah diuraikan di atas, Zainal Abidin sepulangnya dari Gresik sempat mampir ke Makassar dan Ambon, serta membawa pulang beberapa ulama dan muballig asal Jawa yang kemudian menetap di Ternate, di sebuah pemukiman yang hingga kini masih eksis dan dikenal dengan nama *Fala Jawa* (rumah orang Jawa).

Bayanullah

Sultan Ternate kedua, pengganti Zainal Abidin, adalah Bayanullah. Di kalangan orang Barat, ia dikenal dengan nama Abu Lais atau Sultan Boleif, dan merupakan tokoh yang dipandang sangat pandai, terpelajar, seorang ksatria dan pedagang ulung. Ludorico di Varthema, dalam sebuah tulisan yang dibuatnya semasa Bayanullah, melukiskan Sultan Ternate itu sebagai “seorang pria terhormat dari kota Roma.”

Selanjutnya Varthema menulis tentang Ternate, yang kontras dengan gambarannya tentang Bayanullah: *Pulau ini sangat kecil walaupun dalam hal ukuran lebih panjang daripada Banda. Penduduknya lebih parah daripada Banda. Seandainya mereka tidak berperawakan seperti manusia maka mereka sama sekali tidak berbeda dengan binatang. Warna kulit mereka lebih terang dan kawasan ini lebih sejuk. Pulau ini menghasilkan cengkih sebagaimana juga pulau-pulau kecil di sekitarnya Ketika cengkih sudah matang masyarakat memukulnya dengan bulu sehingga jatuh berguguran ke atas tikar yang telah terlebih dahulu dihamparkan di atas tanah di bawah pohon. Tanah di pulau ini berpasir dan kawasan ini berada jauh di bawah garis khatulistiwa sehingga dari sini bintang utara tidak tampak. Mereka menjual cengkih dengan harga dua kali lipat harga pala.*⁹

Islam dan Civilisasi Ternate

Sultan Bayanullah menyadari segi-segi negatif keadaan kawulanya. Sebagai seorang terpelajar dan terhormat, ia mempunyai keinginan besar untuk memperbaikinya. Di masa pemerintahannya, sejumlah peraturan yang bertujuan memantapkan syariat Islam dan civilisasi bagi kawula kesultanan dikeluarkan.

Tahun 1500 patut dicatat sebagai awal civilisasi oleh penguasa dengan mengintrodukir unsur-unsur Islam dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Sultan Bayanullah, yang di kalangan orang-orang Barat dikenal dengan nama Boleif, mengeluarkan sejumlah peraturan yang kental dengan nuansa Islam, seperti:

1. *Pembatasan poligami.* Rakyat Maluku utara baik yang sudah beragama maupun yang belum, seperti yang dikeluhkan Franciscus Xaferius sendiri, bahwa: mereka tidak dapat hidup tanpa poligami. Boleif mengenakan sejumlah persyaratan berat, sehingga secara formal hampir tidak ada celah lagi yang dapat membawa seseorang untuk berpoligami.
2. *Larangan kumpul kebo dan pergundikan.* Kedua kebiasaan ini terutama dilakukan para bobato. Ada bobato yang memelihara gundik hingga puluhan orang. Sultan Bayan membuat peraturan: bobato yang memelihara gundik tanpa persetujuannya akan dipecat.

⁹ Alwi, Des. *Op.Cit.* pp. 229-300.

Sampai akhir hayatnya, Bayan hanya hidup dengan seorang istri, yaitu Nyai Cili Boki Raja Nukila, puteri Almansur Sultan Tidore, dengan 2 orang putera masing-masing Deyalo dan Boheyat

3. *Biaya dan peningset dalam perkawinan yang berlebihan dipangkas.* Peningset yang memberatkan dan permintaan-permintaan dari keluarga perempuan yang berlebihan dilarang. Ia menerapkan syarat *Ijab Kabul* perkawinan baik hal itu dilakukan secara Islam maupun adat.
4. *Perempuan wajib berpakaian secara pantas.* Pemakaian cidaku (cawat) di kalangan laki-laki dilarang. Yang ketahuan memakai cidaku akan dihukum.

Kebijakan Bayanullah lainnya yang menyangkut Islam adalah peraturannya yang menentukan bahwa untuk diangkat dalam jabatan *Bobato*, baik di pusat maupun di daerah, seseorang harus beragama Islam. Dengan peraturan ini, hampir semua *Bobato* kerajaan adalah Muslim. Dengan demikian, melalui pengaruh para *Bobato*, rakyat Maluku didorong untuk memeluk Islam.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bayan memperoleh pujian orang Barat dan dia dianggap sebagai seorang pelopor civilisasi rakyat Maluku. Sikapnya yang konkrit mengangkat harkat perempuan dalam masalah poligami dan pergundikan, oleh orang-orang Barat dipandang sebagai tindakan paling maju, cerdas, dan humanist-civilist.

Setelah Zainal Abidin, Bayanullah dapat dipandang sebagai tokoh paling berjasa dalam penyebaran agama Islam, khususnya di wilayah Kesultanan Ternate. Di samping itu, Bayanullah merupakan Sultan yang paling signifikan jasanya dalam implementasi prinsip-prinsip Islam ke dalam struktur dan lembaga-lembaga Kesultanan Ternate. Ia juga sukses mengeluarkan rakyatnya dari politeisme ke monoteisme Islam.

Bayanullah dan Portugis

Pada 1511, Bayanullah mengirim Samarau dari klan Tomagola dengan armadanya untuk mencari daerah baru bagi kesultanannya, setelah ekspedisi serupa pimpinan Tomaito berhasil menaklukkan kepulauan Sula. Samarau mula-mula menaklukkan Buru, dan dari sana ia bertolak ke Ambon dan memaksa pemimpin negeri itu menyerah. Bayanullah kemudian mengangkat Samarau menjadi *Salahakan* di Ambon, dan Tomaito menjadi *Salahakan* Kepulauan Sula.

Pada 1512, *Salahakan* Samarau melaporkan kepada Sultan Bayan tentang kedatangan armada Portugis pimpinan Antonio de Abreau di Banda, dan tentang Francisco Serrao yang mengalami nasib buruk dan masih berada di Ambon. Sultan lalu mengirim beberapa *juanga* dan mengutus Jogugu Kuliba serta *kalem* Faidua untuk dan atas nama Sultan menjemput Serrao. Sewaktu mendarat di Ternate, Sultan Bayan sendiri menjemput Serrao. Dalam perundingan pada hari-hari berikutnya, Serrao berhasil meyakinkan Sultan tentang “kejujurannya” sebagai pembeli tunggal rempah-rempah Ternate dengan harga bersaing dan syarat-syarat lunak. Tawaran Serrao diterima Sultan dan bahkan Bayan mengangkat Serrao sebagai konselor pribadi. Serrao segera mengutus salah satu dari sembilan orang anak buahnya kepada Raja Muda Portugis di Goa untuk menyampaikan hasil permufakatannya dengan Sultan Ternate. Perjanjian Bayan-Serrao meliputi pula pendirian sebuah pos dagang Portugis di Ternate.

Awal Politik Monopoli

Perjanjian Bayan-Serrao tentang perdagangan rempah-rempah antara Ternate-Portugis merupakan langkah awal politik monopoli yang mulai dijalankan penguasa asing *c.q.* Portugis dengan persetujuan penguasa pribumi. Ini merupakan awal politik monopoli dalam perdagangan rempah-rempah yang dipelopori Portugis--kelak disusul oleh kekuasaan asing (Barat) lainnya--terutama VOC. Bangsa-bangsa asing lain dari Asia yang datang lebih awal, seperti Cina, Arab, Gujarat dan lainnya, sama sekali tidak tergerak melakukan monopoli. Hal ini sangat mungkin karena mereka tidak punya kekuatan militer yang dapat memaksakan kehendaknya, seperti bangsa Portugis, Spanyol dan Belanda yang notabene semuanya berasal dari Barat.

Ada semacam kompetisi antara Sultan Bayan (Ternate) dengan Almansur (Tidore) untuk menjemput Serrao di Nusatelu, Ambon, setelah keduanya menerima laporan tentang kedatangan Serrao. Perlombaan ini tidak hanya bernuansa ekonomis, tetapi lebih bermotif penggalangan kemitraan bisnis sekaligus militer dengan kekuasaan asing yang memiliki kekuatan. Motif inilah yang kelak mendatangkan bencana. Dalam perkembangan selanjutnya, peranan mitra-mitra asing – seperti Portugis, menyusul Belanda di Ternate dan Spanyol di Tidore – tidak hanya meliputi bidang ekonomi, tetapi merembet pula ke bidang pemerintahan dan militer, serta berujung pada campur tangan kekuasaan asing dalam urusan internal kerajaan-kerajaan Maluku.

Serrao yang menjadi penasihat Kerajaan Ternate, pada 1512 juga mengirim surat kepada Magellan, seorang sahabat akrabnya dan salah satu petualang besar Portugis. Dalam surat itu Serrao memaparkan rute perjalanan ke kepulauan rempah-rempah, khususnya ke Ternate dan Tidore. Surat Serrao kepada Magellan itu telah membantu memetakan lokasi kepulauan rempah-rempah dan mendorong Magellan melakukan ekspedisi ke Tidore, setelah membelot ke Spanyol karena rencananya didukung Raja Spanyol. Serrao yang beistrakan perempuan Jawa, lama bermukim di Ternate lantaran jabatannya sebagai penasihat Sultan Bayan. Ia bahkan meninggal dan dikuburkan di Ternate.

Pada 1522, Bayanullah tutup usia dengan meninggalkan janda Nyai Cili Nukila dan dua putera yang masih di bawah umur, masing-masing Deyalo dan Boheat (Abu Hayat). Sebuah sumber menyebutkan bahwa Bayan wafat diracuni rakyatnya sendiri, yang tidak senang melihatnya akrab dengan Serrao. Tetapi, menurut sumber lain, kematian Bayan karena diracuni pedagang-pedagang Muslim yang merasa sangat dirugikan oleh pemberian hak monopoli perdagangan rempah-rempah kepada Portugis.¹⁰

Karena putera sulung Bayanullah masih di bawah umur, pemerintahan sementara dijalankan Nyai Cili Nukila sebagai Mangkubumi dan Taruwese sebagai Raja Muda. Taruwese adalah orang kuat kerajaan ketika itu yang sangat ambisius dan bekerja sangat erat dengan Gubernur Portugis de Menezes.

Kemelut Melanda Ternate

Pada 1528, Deyalo dinobatkan sebagai Sultan Ternate ketiga (1528-1529) dalam usia 20 tahun. Tetapi tidak lama kemudian, ia mulai bertengkar dengan Taruwese. Hanya setahun setelah berkuasa, pada 1529 Deyalo disingkirkan dari takhtanya oleh komplotan Portugis-Taruwese

¹⁰ Andaya, *Op.Cit.*p.117.

melalui sebuah kudeta. Deyalo mengasingkan dirinya ke Tidore, di mana pamannya Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain berkuasa. Ibu Suri Nyai Cili Nukila, yang sadar bahwa ancaman maut tengah membayangi Deyalo, cepat-cepat mengatur pelariannya. Deyalo mula-mula dibawa beberapa kilometer dari Gamlamo untuk disembunyikan. Setelah itu ia dipindahkan ke perkampungan orang Melayu, dan dari sana Deyalo dilarikan ke Tidore di tengah malam buta.

Setelah Deyalo didepak dari takhta dan sebelum penggantinya ditentukan, Pati Sarangi, suami kedua Nyai Cili, diangkat sebagai Mangkubumi. Mangkubumi ini ikut berkomplot dalam menyingkirkan Deyalo. Setelah mengetahui bahwa Deyalo telah memperoleh suaka di Tidore dan setelah tuntutan agar King Mir (sebutan untuk Sultan Amiruddin oleh Portugis) menyerahkan Deyalo ditolak, suatu pasukan gabungan Ternate-Portugis menyerbu Tidore. Tetapi, Deyalo sempat meloloskan diri ke Jailolo.

Pengusiran Deyalo membuat rakyat Ternate mulai cemas dan berujung pada pembunuhan “orang kuat” Taruwese oleh rakyat. Selama menjabat Raja Muda, Taruwese bekerja sangat erat dengan Gubernur de Menezes. Bahkan, sang Gubernur pernah merayunya dengan janji bila Taruwese mau menjadi Sultan Ternate, ia siap membantunya. Tetapi, hubungan keduanya mulai retak dan berakhir dengan perseteruan, setelah de Menezes mulai ikut campur dalam urusan internal kerajaan. Karena itu, pembunuhan Taruwese oleh rakyat dilakukan dengan bantuan Gubernur.

Setelah Deyalo dilengserkan, adiknya Boheyat dilantik menjadi Sultan Ternate keempat. Dengan tewasnya Taruwese, Boheyat berharap dapat melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan dengan baik dan bebas dari intrik-intrik politik internal, walaupun ia masih berharap adanya bantuan Gubernur Portugis yang baru Gonzalo Pereire. Tetapi, gubernur ini bernasib malang. Ketika sedang tidur nyenyak di kamarnya dalam benteng Gamlamo, ia dibunuh orang Portugis sendiri dengan bantuan orang Ternate, karena menganggap beberapa tindakan Gubernur Pereire sebagai penghinaan terhadap Sultan mereka.

Dengan tuduhan ikut berkomplot membunuh Gubernur Pereire, Boheyat ditangkap dan dipenjarakan. Setelah meringkuk setahun dalam penjara, pada 1532 da Fonceca – Gubernur Portugis baru yang menggantikan Pereire – membebaskan Boheyat dan mengangkatnya kembali sebagai Sultan Ternate. Tetapi, pada masa pemerintahan yang kedua ini, Boheyat ternyata tidak mampu menenangkan rakyat dan tidak dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Kemakmuran rakyat merosot tajam dan pemerintahannya sangat represif. Boheyat sering mengambil keputusan secara tergesa-gesa dan dikenal sebagai pendendam. Tidak heran bila rakyat menyerbu istana di akhir pemerintahannya, dan saudara tirinya Tabariji menangkap serta mengasingkannya ke Malaka, tempat ia meninggal.

Pada 1533, dalam usia 15 tahun, Tabariji, adik bungsu Deyalo (putera Nyai Cili Nukila dengan suami keduanya Pati Sarangi), dinobatkan sebagai Sultan Ternate ke-5 oleh Gubernur Portugis de Fonceca. Pelantikan Tabariji dan pemulihan kekuasaan Boheyat setelah dibebaskan dari penjara, memperlihatkan peranan dan ikut campur Portugis dalam urusan internal kerajaan yang semakin intens. Campur tangan berlebihan ini tidak disukai Tabariji, yang mengakibatkan sering timbulnya konflik di antara keduanya.

Sementara itu Vicente de Fonceca digantikan oleh Tristiao de Ataide sebagai Gubernur Maluku yang baru. Ia tiba di Ternate pada 1533, beberapa bulan setelah Tabariji dilantik sebagai Sultan. Kedatangan Ataide disertai seorang Pastor bernama Simon Vaz dan pembantunya Franchoise Alvares. Pastor Simon Vaz adalah pimpinan Kristen Katolik pertama yang dikirim ke

Maluku, meskipun pendapat lain menyatakan bahwa pembawa agama Kristen katolik pertama adalah seorang pedagang Portugis yang telah lama menetap di Maluku, yaitu Balthazar Veloso.

Gubernur Ataide sejak awal sudah tidak memperoleh simpati rakyat Ternate. Agar ditakuti rakyat, ia berlaku kejam. Bahkan, dengan bantuan Ternate dan Tidore, ia menyerang Bacan dan membunuhnya, kemudian menyerbu Jailolo. Di Bacan ia memerass para bangsawan dengan tuntutan sejumlah uang, kalau tidak maka pekuburan para sultan dan kaum bangsawan Bacan lainnya akan digusur dan diratakan dengan tanah. Tuntutan ini akhirnya dipenuhi juga oleh sultan Bacan dengan membayar sejumlah besar uang.

Ketika militer Ternate menyerang orang-orang Mamuya yang baru memeluk Kristen dan membunuh Raja Moro, Don Joao, Ataide menangkap Tabariji dan mengirimnya ke Goa bersama ibunya, Nyai Cili Nukila, dan suaminya, Pati Sarangi, untuk diadili Raja Muda Portugis di sana atas tuduhan pengkhianatan. Saudara tiri Tabariji, Khairun Jamil (1535-1545 dan 1546-1570), kemudian menggantikan posisi Tabariji sebagai Sultan Ternate.

Tindakan-tindakan Ataide yang tiranik telah menyulut kemarahan orang Ternate. Sementara orang Portugis sendiri menjadi saksi mata atas berbagai tindakan kejam Ataide yang menyebabkan sejumlah “perempuan, anak-anak dan sahaya meninggalkan rumah mereka.” Kepanikan besar juga terjadi ketika terlihat bahwa simbol kebesaran mereka dan seorang Portugis yang amat dihormati, Ourobachela, terkapar di depan gerbang benteng dalam keadaan tak bernyawa. Ataide juga menyita untuk dirinya sendiri kekayaan Nyai Cili Nukila (Boki Raja) sebelum mengirimnya ke Goa untuk diadili. Ketika pasukannya kekurangan makanan, ia memerintahkan agar seluruh makanan yang dimiliki rakyat Tobona dirampas. Ketika Kimalahanya memprotes tindakan Ataide, ia menangkap kimalaha tersebut dan memenjarakannya selama beberapa hari. Setelah keluar dari penjara, Ataide mengerahkan dua ekor anjingnya untuk memburu kimalaha Tobona kemudian menggigitnya sampai tewas dan mayatnya yang sudah tercabik-cabik dihanyutkan ke laut. Dia juga memenjarakan paman Sultan Bayan, Kuliba, yang menjemput Serrao ke Ambon. Hanya dengan permintaan yang sangat dari Tabariji ia kemudian dibebaskan setelah lehernya dikalungi dengan daging dan darah babi pada waktu meninggalkan benteng Gamlamo.

Ataide juga menyerang Jailolo, ketika sisa-sisa ekspedisi Magellan dari Spanyol melatih dan memperkuat pertahanan Jailolo. Tindakan tiranik Ataide akhirnya menyulut kemarahan rakyat Jailolo yang ingin mengembalikan Deyalo ke atas takhtanya. Mereka menyerbu Ternate dan membakar habis seluruh kota, kemudian menyerang Tidore dan Makian hingga Bacan. Di Bacan, mereka merampas sebuah kapal Portugis. Nahkoda kapal, Balthazar Vogod, dan seluruh awaknya dibunuh. Sementara sejumlah orang Portugis lainnya ditawan berikut budak-budaknya.

Di pengasingannya di Goa, Tabariji bertemu dan bersahabat dengan seorang bangsawan Portugis, Jordao de Freitas, yang kelak akan bertugas sebagai komandan benteng Gamlamo di Ternate. De Freitas sempat menghimbau Tabariji agar ia mengkonversi agamanya ke Kristen agar memperoleh bantuan Portugis meraih takhtanya kembali. Tabariji sangat tertarik dengan himbauan ini, dan memutuskan untuk beralih ke agama Kristen, karena mau berjaya. Tabariji kemudian dibaptis dan mengganti namanya dengan Don Manuel.

Melalui sebuah surat wasiat yang dibuat di Goa beberapa saat setelah konversi ke agama Kristen, Don Manuel Tabariji membuat surat hibah yang isinya “menghadiahkan pulau Ambon dan pulau-pulau sekitarnya antara pulau Buru dan Seram kepada Jordao de Freitas dan anak keturunannya yang resmi maupun tidak, selama keluarganya itu hidup”. Dokumen hibah ini

dikukuhkan kembali pada 1543 dan 1564. Dengan menggunakan surat hibah itu sebagai titel atau alas hak, pemerintah Spanyol di Manila menyerang dan merebut Ternate pada awal 1606. Selain surat hibah tersebut, Don Manuel Tabariji juga memproklamasikan Ternate sebagai kerajaan Kristen dan menjadi bagian kerajaan Portugal.

Di hadapan Raja Muda Portugis di Goa, Don Manuel Tabariji mengajukan pledoi untuk menangkis tuduhan-tuduhan Gubernur Tristiao Ataide atas dirinya sebagai pengkhianat, yang menyebabkan ia dimakzulkan, ditangkap dan diasingkan. Tabariji menolak semua tuduhan Ataide yang tidak adil dan didasarkan semata-mata pada keterangan orang-orang yang tidak menyukainya. Pledoi Tabariji begitu meyakinkan Raja Muda dan pembesar-pembesar Portugis yang mengadilinya, sehingga ia dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Raja Muda memutuskan bahwa Tabariji memperoleh rehabilitasi, dan haknya atas takhta Ternate dipulihkan. Ia harus segera dikembalikan ke Ternate.

Dapat diduga bahwa keputusan Raja Muda yang membebaskan Don Manuel Tabariji dari tuduhan Ataide, tidak lepas dari hibah wasiatnya yang memasrahkan Ambon dan sekitarnya kepada Jordao de Freitas, dan pernyataannya akan menjadikan Ternate sebagai sebuah kerajaan Kristen yang tunduk pada kerajaan Portugis. Demikian pula, beralihnya Tabariji ke agama Kristen turut dipertimbangkan. Beberapa saat setelah pembebasan dan pemulihan haknya atas kerajaan Ternate, Tabariji memproklamasikan perubahan status kerajaan Ternate dari sebuah Kerajaan Islam independen menjadi sebuah Kerajaan Kristen di bawah daulat Raja Portugis. Tetapi, proklamasi ini tidak memberikan dampak yuridis pada status Kerajaan Ternate.

Tabariji akhirnya dipulangkan ke Ternate dengan sebuah kapal yang dinahkodai de Pinto. Dalam pelayaran kembali ke Ternate, Tabariji disertai Jordao de Freitas yang akan memangku jabatannya sebagai komandan benteng Gamlamo yang baru. Freitas ditugaskan menggeser Khairun dan mendudukkan kembali Tabariji ke atas takhta Ternate. Tetapi, ketika tiba di Malaka, keduanya mengetahui bahwa rakyat Ternate telah menobatkan Khairun – tokoh yang dipandang rakyat Ternate “berwibawa, baik, dan tenang” – sebagai Sultan Ternate. Freitas mulai menyadari kesulitan yang akan dihadapinya bila ngotot dan berusaha mendudukkan Tabariji ke atas takhta Ternate. Ia memutuskan meninggalkan Tabariji di Malaka, dan berlayar sendirian ke Ternate pada bulan Nopember 1544.

Setibanya di Ternate, Freitas mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa Sultan yang lama, Tabariji, sementara dalam perjalanan ke Ternate, serta bahwa Sultan Khairun dan Kapita Laut Samarau kemungkinan besar akan diasingkan ke Goa. Freitas berharap bahwa dengan tibanya Raja Kristen Tabariji, “*api dan semangat suci akan dinyalakan secara penuh.*” Freitas juga menyatakan tak seorangpun dapat menolak untuk di-Kristenkan, sebab Ibu Suri dan ayah Tabariji – yakni Nyai Cili dan Pati Sarangi – telah melepaskan keyakinan Islamnya.¹¹ Namun, sebelum upaya Freitas menunjukkan hasil, Tabariji keburu jatuh sakit dan meninggal pada 30 Juni 1545 di Malaka.

Sejak Tabariji dilengserkan dari takhtanya, Khairun Jamil dinobatkan sebagai Sultan Ternate ke-6. Keputusan menaikkan Khairun ke atas takhta sesuai dengan tuntutan rakyat. Akan tetapi, keputusan Raja Muda di Goa yang merehabilitasi Tabariji dan akan mengembalikan takhtanya, telah menimbulkan kesulitan baru. Gubernur Ataide dan petinggi-petinggi Portugis di

¹¹ Andaya, *Op.Cit.*p.126.

Ternate, dengan alasan yang dibuat-buat, memutuskan menangkap Khairun dan mengirimnya ke Malaka untuk diadili dengan tuduhan pengkhianatan.

Khairun Jamil, yang pada mulanya diangkat Portugis menggantikan Tabariji, kemudian mengalami nasib yang sama seperti pandahulunya. Bersama Khairun, ditangkap pula Kapita Laut paling cakap dan berpengalaman luas dalam pemerintahan dan petempuran – yakni mantan *Salahakan* Kepulauan Amboina, Samarau. Keduanya diasingkan ke Malaka. Tetapi, dengan meninggalnya Tabariji, Khairun dibebaskan dan dipulangkan ke Ternate. Namun, setelah menerima pembebasannya, Khairun bermaksud pergi dulu ke Goa sebelum kembali ke Ternate.

Ternate di bawah Khairun Jamil

Pada bulan Februari 1546, Khairun tiba di Goa dan diterima Raja Muda Portugis dengan segala kehormatan dan kebesaran. Khairun menjelaskan kepada Raja Muda tersebut bahwa kedatangannya menandakan berakhirnya konfrontasi antara dia dengan Tabariji, yang kini telah tiada. Akan tetapi menurut Khairun, ada dua hal yang ingin dikonfirmasi kepada Raja Muda: *pertama*, apa sebabnya ia dilengserkan secara tidak hormat dari takhtanya, yang bertentangan dengan tradisi dan ketentuan adat yang berlaku di kerajaannya; *kedua*, apa kesalahannya sehingga ia dijatuhi hukuman pengasingan ke Malaka.

Pertanyaan Khairun itu tidak dapat dijawab secara memuaskan. Raja Muda Goa hanya menyatakan bahwa “Sekarang ini Tabariji sudah wafat, dan Raja Muda tidak keberatan memulihkan kembali haknya sebagai Sultan,” dan akan mengganti Jordao Freitas dengan Bernaldin de Sousa sebagai komandan benteng Ternate. Freitas ditarik ke Goa untuk dimintai pertanggungjawabannya mengenai upaya dan kebohongan yang telah dilakukan di hadapan publik Ternate perihal akan kembalinya Raja Kristen Don Manuel alias Tabariji.

Pada bulan Nopember 1546, Khairun kembali ke Ternate. Dengan mengenakan jubah Portugis, ia melewati gerbang benteng Gamlamo dan tampak bagi orang-orang Portugis dalam benteng itu, seolah-olah Khairun melakukan *pameran kekuatan* yang sangat mengesankan. Segera setelah kembali bertakhta, dua tindakan mendasar diambil Khairun, yakni:

- 1) Deklarasi resmi untuk menyatakan batalnya akta hibah yang dibuat Tabariji di Goa, yang menyerahkan Ambon, Buru dan Seram serta pulau-pulau sekitarnya kepada Jordao Freitas.
- 2) Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, testamen Tabariji yang menyatakan Ternate sebagai Kerajaan Kristen di bawah Portugis.

Pembatalan akta hibah dan testamen tersebut mendatangkan kelegaan bagi para sultan Maluku lainnya. Tetapi, akibat tindakan ini, orang-orang Portugis memberi label kepada Khairun sebagai “seorang yang paling fanatik kepada Islam.”

Khairun bercita-cita membangun dan menjadikan Maluku sebagai kekuatan yang tangguh. Ia menginginkan agar Jailolo bangkit sebagai kerajaan yang kuat dan bergabung dengan Ternate dalam suatu konfederasi yang akan dipimpinnya sendiri. Untuk itu ia membina hubungan khusus dengan Katarabumi, Kolano Jailolo yang dapat memahami ide-ide Khairun. Dengan Tidore, yang selalu menjadi seteru dan saingan Ternate, Khairun menginginkan agar kesultanan

ini dapat bersatu dalam sebuah ikatan uni Ternate-Tidore. Untuk itu, Khairun melakukan pekawinan politik dengan puteri penguasa Tidore, Amiruddin Iskandar Zulkarnain.

Cita-cita Khairun untuk menggalang sebuah Maluku yang kuat melalui pembentukan Konfederasi Ternate-Jailolo dan uni Ternate-Tidore, merupakan sebuah idealisme politik yang tidak mustahil untuk diimplementasikan. Tetapi, pikiran-pikiran brilian Khairun ini sukar dicerna kerajaan-kerajaan di Maluku pada masa itu. Pikiran-pikiran Khairun, mungkin merupakan idealisme yang absurd. Tetapi, ditilik dari sudut situasi dan kondisi masa itu, Khairun telah menunjukkan dirinya sebagai seorang negarawan berpikiran maju melebihi para sultan Maluku yang sezaman dengannya.

Khairun dan Keanekaragaman Agama

Kebijakan Khairun di bidang keagamaan perlu pula dicatat. Penulis dan tokoh Kristen Reformis, Francois Valentijn, menggambarkan Khairun sebagai “seorang pelaku pemerintahan yang bijaksana, seorang prajurit pemberani, seorang yang sangat hati-hati dalam menjalankan hukum dan peraturan. Tetapi, di atas semua kebesarannya itu, dia adalah pembela akidah Islam yang amat kuat.”¹²

Reputasi Khairun sebagai pembela akidah Islam terbukti setelah Portugis memberikan gambaran yang salah tentang dirinya. Khairun sendiri tidak tertarik terhadap agama Kristen, sekalipun beberapa *bobato* serta para bangsawan – seperti Nyai Cili Nukila dan suami keduanya, Kolano Sabia, *Sangaji* Gamkonora dan menantunya, Sultan Bacan Alauddin I dan seluruh keluarganya serta *Sangaji* Labuha dan rakyatnya – ramai-ramai mengkonversi agama mereka menjadi Kristen. Khairun sendiri berhubungan erat dengan Franciscus Xaverius, tetapi tidak sampai terpengaruh olehnya. Kepada Xaverius ia pernah berkata, “baik Islam maupun Kristen mempunyai tujuan yang sama. Oleh sebab itu, saya tidak perlu mengganti keyakinan saya dengan mengikuti keyakinan anda!” Bahkan, Khairun sempat mengirim puteranya, Babullah, untuk memasuki Sekolah Tinggi Jesuit Kolese Santo Paulus di Goa.

Pada 27 Oktober 1536, tiba di Ternate Antonio Galvao, Gubernur Portugis yang dipandang sebagai satu-satunya gubernur terbaik yang pernah bertugas di daerah ini. Tetapi, tugas Kristenisasi yang diembannya, di samping tugas-tugas ke gubernuran, memaksa Galvao bertindak tegas menghadapi soal kekristenan. Jadi, misalnya, ketika Kolano Sabia, kemenakan Sultan Jailolo yang telah dibaptis, diimbau Khairun agar kembali ke Islam, Galvao – yang bersahabat kental dengan Khairun – dengan pedang terhunus mengatakan kepada Khairun bahwa ia tidak berhak merubah keyakinan Sabia yang sudah Kristen untuk kembali ke agama Islam.

Pada bulan Juni 1546, Evangelis terkenal Magister Franciscus Xaverius tiba di Ternate dari Ambon setelah suatu pelayaran selama delapan hari yang meletihkan.¹³ Kedatangan Xaverius dinyatakan sebagai awal kelahiran Misi Jesuit di Maluku.¹⁴ Ia bertugas di Ternate antara Juni sampai September 1546. Antara Oktober 1546 hingga Januari 1547, ia mengunjungi jemaat Kristen di pemukiman-pemukiman Moro. Setelah itu, ia kembali lagi ke Ternate dan

¹² Dikutip dari Andaya, *Op.Cit.*p.131.

¹³ Documenta Molucensia, Vol.I.p.19.

¹⁴ *Ibid.* p.16.

bertugas di sini sampai April 1547, dan kembali ke Ambon untuk seterusnya ke Malaka serta India.

Walaupun Khairun adalah seorang Muslim yang digambarkan Valentijn sebagai “orang paling fanatik,” dalam kehidupan kesehariannya ia sebenarnya merupakan tokoh yang sarat dengan toleransi. Ia bersahabat dekat dengan Xaverius dan para pastor lainnya. Bahkan, ia pernah menyampaikan keinginannya kepada Xaverius agar salah seorang puteranya dapat memeluk agama Kristen untuk dipersiapkan menjadi Raja Kerajaan Moro. Ketika Misi Jesuit di sana tengah mengalami perkembangan pesat, tokoh-tokoh Kristen yang sezaman dengannya – semisal Antonio Galvao, Xaverius, dan Alfredo de Castro – mengakui sikap toleransi Khairun yang mendalam. Secara bijak dan arif, ia memelihara hubungan baik dengan umat Kristen Moro serta Misi Jesuit yang beroperasi di Ternate dan Moro. Beberapa orang di lingkungan keraton bahkan sempat dibaptis di masanya, seperti saudara tirinya Tabariji (Don Manuel), dan seorang Arab Jailolo yang mengaku keturunan langsung Nabi Muhammad.

Sebagai Sultan, sikap Khairun terhadap Misi Jesuit tidak selalu bermuatan politis. Dalam surat tertanggal 25 Januari 1554, yang ditujukan kepada Rektor Kolese Santo Paulus di Goa, Pastor Alfonso de Castro menulis: Sultan Khairun telah menjelaskan kepadanya bahwa tindakannya untuk memisahkan pemukiman orang-orang Muslim dan Kristen adalah untuk memberikan kemudahan kepada Misi Jesuit dalam menjalankan tugas menyebarkan agama mereka. Sultan Ternate ini, menurut Castro, juga telah menyuplai Misi Jesuit dengan sejumlah *juanga* untuk berlayar ke Moro dengan awak perahu yang siap dengan pedang terhunus untuk membunuh setiap Muslim yang mengancam keamanan orang-orang Kristen. Sultan, menurut laporan Castro, telah memperlihatkan loyalitas yang dalam dan selalu siap memberi bantuan apa saja.

Di bawah gubernur Tristao de Ataide (1533-1536), konversi ke dalam agama Kristen di kalangan pribumi Moro mulai dilakukan pada 1534. Konversi paling penting terjadi di pemukiman-pemukiman induk di Tolo dan Mamuya, di teluk Morotia. Mabuk dengan kemajuan Evangelisasi, Ataide – dalam kedudukannya sebagai Gubernur – melakukan provokasi untuk suatu pemberontakan umum. Tetapi, akibat provokasinya, banyak penduduk di pemukiman Kristen terbunuh, termasuk seorang vicaris yaitu Simon Vaz yang terbunuh di pemukiman Cao (Cio) kepulauan Morotai pada 1535.¹⁵ Sejak saat itu, tak ada lagi pastor yang dikirim ke Moro, dan pekerjaan Evangelisasi praktis macet untuk sementara waktu.

Walaupun Ataide gagal memprovokasi pemberontakan umum, kesuksesan Misi Jesuit di Moro dan Bacan membuat Ataide percaya diri dan bangga. Dalam suratnya kepada Raja Muda Portugis di Goa, Ataide menulis: “Dengan bantuan orang-orang Kristen Moro, saya berani menjadikan Maluku sebagai Portugis baru. Saya telah melihat dengan mata hati saya, bahwa tidak sukar berbuat seperti yang telah saya gambarkan di atas tanpa perlu biaya sepeserpun dari Kerajaan “.¹⁶

Sejak 1546, kegiatan misionaris di Moro kembali meningkat setelah mendapat kunjungan Magister Xaverius. Rohaniwan yang dikirim ke sana semakin banyak. Evangelisasi perkampungan-perkampungan induk Kristen di Morotia – seperti Tolo, Mamuya, Pune, dan Sugala – berkembang amat pesat. Demikian pula, Sakita, Mira, Cio, dan Rao di Morotai

¹⁵ Documenta Molucensia, Vol.I.p.13.

¹⁶ Vieliers, John, *Op.Cit.*pp.280-281.

mengalami hal serupa. Konversi agama yang dilakukan Raja Moro di Mamuya dan *Sangaji Tolo* membawa pengaruh cukup signifikan.

Kegiatan evangelisasi juga sering menuai bentrokan antar pemeluk agama. Bentrokan yang terjadi antara orang Muslim Galela dan Raja Mamuya beserta pengikutnya, dan pembunuhan terhadap vicaris Simon Vaz di Sao, misalnya, telah menimbulkan banyak korban di kedua pihak.

Persekutuan Raja-raja Maluku Menentang Portugis

Peristiwa pembunuhan Simon Vaz telah menebarkan benih permusuhan antara Gubernur Portugis dengan para sultan Maluku, khususnya Sultan Khairun. Sementara kemajuan evangelisasi yang begitu pesat dan klaim Misi bahwa sekitar 35.000 orang telah beralih agama hingga 1553 di Moro,¹⁷ telah menimbulkan kekhawatiran Khairun. Pada 1560, ia mengundang para sultan Maluku lainnya untuk membahas laju perkembangan Kristenisasi di Moro dalam suatu pertemuan rahasia. Dengan suara bulat para sultan memutuskan “menyetop laju evangelisasi dan mengenyahkan orang-orang Portugis dari Moro dan Maluku.”

Pada pertemuan tersebut, Katarabumi diberi tugas menangani aspek-aspek militer yang timbul bila suatu tindakan militer dilakukan. Sejak keputusan rahasia itu diambil, terlihat perubahan sikap Khairun sebagai “pembela akidah Islam yang serius.”¹⁸ Perubahan sikap Khairun mulai dirasakan Gubernur Duarte de Sa. Tetapi, Khairun tetap memelihara hubungan baik dan memperlihatkan sikap yang santun.

Kolano Katarabumi dengan pasukan Alifurunya mulai menyerang Morotia. Pasukannya mulai menyisir pemukiman Kristen di Sugala, Tedalo (Tutumaloleo), Rogui (Aru), Cunialonga (Lolonga), Pune, Mamuya di pesisir Galela, menyusul Tolo, Cawa, dan Samafo di Tobelo. Katarabumi tidak menyerbu Tolo, pemukiman baru yang ditempati pasukan Portugis karena menjadi pusat terpenting Misi Jesuit di Moro dan dipertahankan dengan kuat oleh pasukan Portugis. Negeri-negeri selain Tolo berhasil dibersihkan dari Misi Jesuit dan terjadi pembantaian dan pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Kristen pribumi.

Akhir Konflik dan Kematian Khairun

Pada 1566, ketika Diego Lopez de Mesquita menjabat Gubernur, ia mengajak Khairun berunding dan berdamai. Tetapi, perdamaian baru terwujud pada 1569, setelah Khairun-de Mesquita terlibat dalam perundingan yang lebih intens. Keduanya memutuskan mengakhiri konflik bersenjata di Moro. Tetapi, karena de Mesquita memandang perdamaian tersebut menguntungkan Khairun – lantaran di pemukiman-pemukiman Kristen, seperti di Sugala, Pune, dan Mamuya, penduduk pribumi Kristen ramai-ramai murtad dan meninggalkan agama Kristen – ia lalu menyusun skenario melenyapkan Khairun. Untuk meyakinkan Khairun akan iktikad baiknya, pada 1570 de Masquita mengusulkan agar perjanjian perdamaian 1569 diperbarui. Khairun menerima usul ini, dan keduanya bersumpah dengan Kitab Suci di tangannya masing-

¹⁷ Disampaikan oleh Pastor de Castro. Jumlah yang sama juga diberikan A.M.Baretta: Halmahera en Morotai, Batavia: Javasche Boekhandel, 1917.p.61.

¹⁸ Andaya, *Op.Cit.*p.131.

masing untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh perjanjian perdamaian yang baru dikukuhkan kembali.

Malam harinya, diselenggarakan pesta perdamaian di dalam benteng Gamlamo. Khairun datang memenuhi undangan dan sejak itu tak pernah kembali lagi ke istananya. Gubernur de Mesquita menyuruh seorang prajurit – yakni kemenakannya sendiri, Antonio Pimental – menusuk Khairun dengan sebuah keris. Mayat Khairun malam itu juga ditenggelamkan ke laut.

Babullah: Sultan Ternate Terbesar

Babullah Datu Syah (1570-1583), putera Khairun, dilantik menggantikan ayahnya yang terbunuh secara mengerikan di dalam benteng Gamlamo. Dalam pidato penobatannya, Babullah bersumpah menuntut balas kematian ayahnya dan akan berjuang sampai orang-orang Portugis meninggalkan negerinya. Ia juga bersumpah akan menjunjung tinggi agama Islam dan menjadikan Ternate sebagai kesultanan yang besar dan kuat secara militer, tanpa melupakan upaya untuk persatuan dan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan tetangganya.

Kebijakan Babullah dan Perang melawan Portugis

Setelah naik takhta, Babullah menciptakan hubungan baru Ternate-Portugis. Semua prakarsa yang sebelumnya selalu berawal dari Portugis, kini berbalik datang dari Ternate. Hal ini berarti semua kontrol atas Ternate dilakukan oleh kerajaan sendiri, yang ditangani Bab dengan bantuan para *Bobatonya*. Kemudahan-kemudahan yang telah diberikan Khairun kepada Misi Jesuit dihentikan. Bab bahkan memerintahkan pasukannya memburu orang Portugis sampai ke manapun dan membunuh mereka.

Orang Kristen diperintahkan Bab berkumpul di Ternate, dan bagi para pribumi diberikan opsi: kembali ke agama asal yakni Islam, atau menjadi tawanan. Dalam perjalanan ke Ternate, banyak orang Kristen yang tenggelam akibat badai dan topan yang menghantam perahu mereka. Mayoritas pribumi Kristen Moro menerima alternatif kembali ke Islam, sementara sebagian kecil menerima kenyataan menjadi tawanan. Yang menjadi Muslim kembali dipulangkan ke kampung halamannya di Moro, dan proses pemurtadan Kristen terjadi secara besar-besaran di seluruh Moro dan Bacan. Banyak penduduk lokal yang membakar gerejanya sendiri, menghancurkan altar dan benda-benda suci lainnya. Sepeninggal Khairun, konversi orang Islam ke agama Kristen dilarang dan dihentikan.

Tindakan-tindakan Bab ini didukung pemimpin-pemimpin Islam dan mengindikasikan sosok Bab sebagai “pembela Islam.” Tetapi, dengan terjadinya konversi besar-besaran ke dalam agama Islam dan berbagai kerusuhan yang menyertainya, orang-orang Portugis di Moro dan Bacan mulai dievakuasi ke benteng mereka di Ternate.

Sebagai penguasa baru, Babullah mengirim Kapita Kolasineo memimpin armada ke Ambon dan sekitarnya. Armada ini mula-mula tiba di Buru, sebuah wilayah dengan pemukiman orang-orang Islam yang loyal kepada Sultan Ternate dan selalu siap dengan *juanga* serta tenaga tempur. Dari Buru, Kolasineo menuju Residi dan Kombelo di kepulauan Hoamoal, dan kemudian menuju Hitu di Ambon untuk menambah perahu dan personil. Setelah itu, mulailah armada ini menggempur orang-orang Portugis yang berada di dalam benteng mereka di Ambon.

Sementara itu, diperoleh berita bahwa pasukan Bab di Moro telah merampas empat buah perahu Portugis yang penuh bahan makanan dan siap berlayar ke Ternate. Bab lalu menyiapkan ekspedisi untuk menyerang Moro, yang diawali dari Galela dan bergerak menuju pantai utara dan pantai selatan Halmahera utara, kemudian ke timur menuju Morotai. Semua orang Portugis yang ditemui dibunuh. Ketika pasukan Bab tiba di Tolo, mereka mendapat perlawanan sengit dari orang Kristen yang bahu-membahu dengan pasukan Portugis mempertahankan pemukiman itu. Akibat serangan pasukan Bab, banyak jatuh korban, terutama rakyat Kristen pribumi penduduk Moro, dan sebagian orang Portugis di situ.

Pada 1570, Bab mulai mengepung benteng Portugis Gamlamo, tetapi belum terlalu ketat. Sebelum Bacan menyerah, suplai makanan selalu dikirim dari pulau ini kepada penghuni benteng. Suplai serupa juga datang dari Moro dan Tidore. Orang Portugis dan penghuni benteng Gamlamo, walaupun dalam pengawasan, masih dibolehkan keluar mencari bahan pangan di siang hari. Tetapi, ketika Portugis berusaha menghubungi Goa dan Malaka guna memperoleh bantuan, pengepungan mulai diperketat oleh Bab. Selama tiga tahun pengepungan, hampir tidak ada pelayaran reguler karena cuaca buruk. Selama itu, hanya empat pelayaran reguler tiba di Ternate, tetapi tidak satupun dari kapal-kapal itu dapat menerobos blokade ke dalam benteng. Pengepungan menjadi lebih efisien ketika kelaparan dan penyakit mulai meminta korban jiwa, baik dari kalangan orang-orang Portugis maupun Kristen pribumi penghuni benteng.

Pada tahun terakhir pengepungan, hanya 400 dari 900 penghuni benteng yang masih tersisa dan mampu bertahan hidup.¹⁹ Sumber-sumber lokal menuturkan bahwa ular, tikus, anjing, kucing, bahkan cecak, telah menjadi santapan penghuni benteng. Bagi yang sakit, selain menggunakan dedaunan dan akar-akar tumbuhan, pemanggilan roh-roh nenek moyang juga menjadi medium pengobatan. Moral orang-orang Portugis telah merosot secara ekstrim.

Pada akhir 1575, Bab menerima informasi bahwa beberapa kapal Portugis berada di sekitar pulau Mayau (Batang dua), yang terletak antara Manado dan Ternate. Kehadiran kapal-kapal tersebut telah menimbulkan kekhawatiran bahwa kapal-kapal itu membawa pasukan dan bala bantuan lainnya. Karena itu, Bab memerintahkan pasukannya menyerbu benteng Gamlamo. Tetapi, sebelum penyerbuan dilakukan, Gubernur Portugis terakhir di dalam benteng – yakni Nuno Pareira de Lacerda – menawarkan perdamaian. Bab mengutus kakaknya, Kaicil Tolo, untuk memberitahu de Lacerda bahwa orang Maluku kini telah bersatu padu dan siap melawan mereka. Tak ada lagi harapan atau pilihan lain yang dapat menyelamatkan mereka, dan jangan sekali-kali berharap bantuan dari luar. Di bawah syarat-syarat yang didiktekan Bab, de Lacerda akhirnya setuju mengakhiri peperangan. Portugis setuju menyerah tanpa syarat. Mereka meminta agar Bab menyediakan perahu untuk mengevakuasi mereka ke Ambon dan keluar meninggalkan Ternate. Portugis lalu menyerah kepada Babullah pada 26 Desember 1575, bertepatan dengan peringatan Hari Suci Santo Stephen.

Tiga hari kemudian, kapal suplai dari Malaka tiba di pelabuhan Talangame Ternate. Bab memerintahkan agar kapal itu berlabuh dan membeli rempah-rempah (cengkih) sebagaimana biasanya. Kapal inilah yang kemudian mengangkut orang Portugis dan Kristen pribumi lainnya meninggalkan Ternate menuju Ambon kemudian Malaka. Bab kemudian mengirim surat kepada Raja Portugal meminta keadilan dan pertanggungjawaban atas kematian ayahnya. Kepada Gubernur Portugis terakhir yang akan meninggalkan Ternate, Bab mengatakan bahwa ia akan memelihara benteng Gamlamo untuk Raja Portugal, dan mengizinkan seorang kapten dengan 12

¹⁹ Andaya, pp.132-138, 147-148 dan 174-175.

anggota tentara tinggal di benteng itu untuk menangani kepentingan-kepentingan Portugis yang mendesak. Ketika garnisun kecil itu meninggalkan benteng Gamlamo, Bab mengambil alih dan menjadikannya sebagai kediaman resmi Sultan Ternate hingga 1606, ketika benteng tersebut diambil-alih Spanyol dari tangan Sultan Saidi, pengganti Bab.

Kebanyakan orang Portugis dan Kristen pribumi yang meninggalkan Ternate, menetap di Ambon. Tetapi, ada juga yang tetap menetap di Ternate karena telah menikah dengan perempuan pribumi Ternate. Ketika Tidore membuka kesempatan menerima orang-orang Portugis untuk menetap, mereka pindah dan menetap secara permanen di sana. Keputusan Tidore menerima pemukim Portugis ditujukan untuk menggalakkan perdagangan rempah-rempah dan membuka pasar dagang rempah-rempah internasional yang dapat menyaingi Ternate. Selain itu, dengan bantuan orang Portugis yang tersisa, Tidore dapat melawan Ternate. Tetapi, cita-cita Tidore ini digagalkan Bab dengan penyerbuannya ke pemukiman-pemukiman Tidore di pesisir utara, yang mengakibatkan penduduknya mengungsi ke hutan pegunungan. Kedatangan 100 orang Portugis untuk membangun sebuah benteng dekat istana di ibukota Kerajaan Tidore, merupakan upaya para petinggi Tidore untuk memproteksi diri dari kemungkinan serbuan Bab berikutnya. Tetapi, hal itu tidak pernah dilakukan Bab.

Ekspedisi Penaklukan Babullah

Pada 1576, setelah pemasalahan Moro selesai ditangani, Bab mengirim Rubohongi dari klan Tomagola ke Hoamoal, Buru, Manipa, Ambalau, Kelang, dan Buano, untuk menjadikan daerah ini tertutup bagi kegiatan bisnis Portugis di Ambon. Rubohongi sengaja dipilih Bab, karena ia adalah tokoh paling setia dan terpercaya. Selain itu, ayah Rubohongi – *Salahakan Samarau* – adalah tokoh kepercayaan Khairun yang merupakan penakluk daerah-daerah tersebut. Rubohongi juga ditugaskan menertibkan daerah-daerah tersebut dari segala ancaman, mengingat potensinya sebagai penghasil utama rempah-rempah di seluruh Maluku Tengah.

Pada 1580, Bab mengirim sebuah ekspedisi gabungan Ternate-Sula untuk menaklukkan negeri-negeri di sepanjang pantai timur Sulawesi yaitu Banggai, Tobungku, Tiboro, Pangasain, yang semuanya dapat dianeksasinya dengan mulus. Ekspedisi ini dipimpin Kapita Sula, Kapalaya, yang terkenal karena memiliki banyak ilmu hitam. Akan tetapi, Kapalaya menemui perlawanan sengit di Buton. Bahkan, setelah Buton berhasil ditaklukkan, perlawanan sporadis masih terus berlangsung.

Bab menjadikan Buton sebagai pasar dagang rempah-rempah Maluku dengan menyediakan semua produk Maluku, sehingga pedagang-pedagang dari Jawa, Melayu, Arab dan Cina dapat membeli rempah-rempah Maluku di Buton. Setelah menganeksasi Buton, Bab mengambil alih Selayar tanpa perlawanan yang berarti. Aneksasi Selayar menggenapi kekuasaan Babullah atas 72 pulau yang kesemuanya berpenghuni. Pada titik inilah ia digelar “Penguasa atas 72 pulau” (*Heer van twee en zeventig eilanden*).

Setelah aneksasi Selayar, Bab membuat perjanjian dengan Makassar mengenai persekutuan Kesultanan Ternate dan Goa. Ada dua syarat yang diajukan Bab: *pertama*, Raja Goa akan memeluk agama Islam; *kedua*, operasi Portugis – termasuk penyiaran agama Kristen – dalam wilayah kekuasaan Goa dilarang. Untuk menandatangani traktat ini, Bab menyempatkan diri datang ke Makassar.

Babullah Menjamu Francis Drake

Pada 14 Nopember 1579, petualang besar Inggris, Francis Drake, tiba di Moti dari Australia dengan kapal *Golden Hind* dan empat kapal lain. Setelah lego jangkar, seorang Deputi Bab naik ke atas kapal dan menjemput Drake untuk dibawa ke Ternate. *Golden Hind* menyusul keesokan harinya ke Ternate. Bab mengundang Drake ke istananya dan menerimanya dengan upacara kebesaran. Dalam pembicaraannya dengan Bab, Drake menyatakan bahwa kedatangannya ke Maluku semata-mata untuk berdagang. Bab menyambut gembira kedatangannya dengan penuh damai dan dalam kapasitas apapun.

Setelah melakukan pembicaraan dengan Bab, Drake kemudian mengundang Bab bertandang ke kapalnya. Undangan ini diterima Bab. Keesokan harinya, dengan diantar 4 buah *juanga* yang penuh hiasan rumbai-rumbai dan dengan iringan sejumlah *bobato*, Bab menuju ke *Golden Hind*. Setelah mengelilingi *Golden Hind* sebanyak empat kali, *juanga* yang ditumpangi Bab merapat ke *Golden Hind*. *Golden Hind* dan keempat kapal lain menembakkan meriam beberapa kali, sebagai tanda penghormatan. Ketika Bab menaiki tangga, trompet dibunyikan menyusul barisan musik memainkan beberapa lagu. Setelah melihat-lihat kapal dan beramah-tamah dengan para perwira, Bab permisi untuk kembali dan berjanji akan datang lagi.

Keesokan harinya, Bab mengutus seorang saudaranya membawa sepucuk surat undangan yang meminta Drake dan seluruh perwira armadanya menghadiri jamuan makan di istananya. Drake memenuhi undangan itu, dan pada hari berikutnya Drake dan seluruh perwira armadanya mendarat dan menuju istana Sultan dalam benteng Gamlamo. Drake dan rombongan disambut rakyat sampai di tangga istana. Di sini, Drake terkejut ketika berjabat tangan dengan dua orang kulit putih yang ikut menyambutnya. Konon kedua orang itu berasal dari Turki dan Italia.

Pada pertemuan kali ini Bab mengenakan pakaian kebesaran. Jasnya terbuat dari serat benang emas, dan sepatunya terbuat dari beludru merah yang disulam dengan benang emas. Dari pinggang ke bawah ia mengenakan kain bersulam emas, hiasan kepalanya bertatahkan emas selebar satu setengah inci. Di lehernya tergantung rantai emas murni yang besar-besar. Cincin di tangan kirinya bermata intan, batu zamrud, berlian merah delima, dan pirus. Sementara di tangan kanannya terdapat sebuah gelang yang ditabur dengan empat batu permata yang amat indah, dan di jari-jari tangannya terdapat cincin berbatu pirus yang besar dan indah, serta beberapa cincin intan permata lebih kecil yang ditatah dengan sangat indah. Di sebelah tempat duduk Sultan, berdiri seorang sahaya pemegang kipas yang tersulam dengan batu nilam.

Setelah Bab dan Drake usai berunding, dihidangkan makanan dari sagu, nasi dengan lauk dari kambing, ikan bubar bakar, kepiting kenari dan ayam yang dimasak dengan ramuan cengkih. Drake hanya membeli lima kwintal cengkih karena kapalnya telah sarat dengan barang-barang hasil rampokan dari kapal-kapal Spanyol yang ditemuinya dalam pelayaran. Ketika akan bertolak, Drake berjanji akan kembali ke Maluku. Bab sempat menitipkan sepucuk surat untuk Ratu Inggris, Elizabeth I, yang isinya mengajak kerajaan Inggris bekerjasama dengan Ternate dalam bidang perdagangan, dan permintaan bantuan untuk mengusir Portugis.

Sejumlah besar *juanga* Ternate, termasuk milik kerajaan yang ditumpangi Bab ikut mengantar Drake hingga ke laut lepas. Tetapi, belum terlalu jauh meninggalkan Ternate, kapal Drake diamuk topan. Untuk meringankan beban kapal, Drake memerintahkan anak buahnya membuang sebuah meriam terbesar yang ada di kapalnya. Bab memerintahkan sebuah operasi penyelaman guna mengangkat meriam itu. Para penyelam Ternate akhirnya berhasil

mengapungkan meriam itu, lalu ditarik ke darat dan ditempatkan di balik tembok benteng Gamlamo.

Babullah dan Islam

Aneksasi Ternate terhadap daerah-daerah seberang laut telah mendongkrak prestise Islam di daerah-daerah tersebut. Salah satu kebijakan Bab mengenai agama Islam adalah melarang konversi orang Islam ke agama lain, dan mengupayakan rekonversi ke agama Islam. Di samping itu, Bab juga memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada para *hukum* (Hakim) dan imam. Sebelum 1570, jabatan yudikatif Islam berada di bawah kontrol Sultan. Kini, fungsi Sultan hanya sebagai *Amir al-din* (pimpinan Islam tertinggi), sementara kebanyakan otoritas tentang Islam ditangani langsung para fungsionaris seperti *kalem*, imam, dan hukum.

Dalam operasi aneksasi di daerah-daerah seberang laut, Bab selalu disertai para imam dan hakim yang membantunya mengkoordinasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan atau diberlakukan dan untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada rakyat setempat. Pada daerah-daerah yang baru dianeksasi, Bab selalu mengingatkan penduduk setempat tentang keyakinan baru Islam yang diperkenalkan kepada mereka, dan mereka harus selalu hidup dalam perdamaian.

Hari-hari terakhir sang Penakluk

Pada 1580, kerajaan Portugis dan Spanyol bergabung di bawah sebuah uni yang dipimpin Raja Spanyol. Spanyol sendiri, yang sejak 1521 bermitra dengan Tidore, berkeinginan kuat melenyapkan Babullah untuk membalas kekalahan Portugis. Setelah 1580, pasca Uni Spanyol-Portugal, Spanyol mengirimkan beberapa ekspedisi dari Manila – salah satu pusat kekuasaannya di Timur – untuk menaklukkan benteng Gamlamo:

- 1) Ekspedisi pertama, dipimpin Francisco de Buenos, berlangsung dari Maret hingga April 1582, dengan tujuan mengontrol kembali situasi militer.
- 2) Ekspedisi kedua, dipimpin Don Juan Ronquillo, meninggalkan Manila pada September 1582 dan kembali ke Tidore pada April 1583. Ekspedisi ini bertemu dengan pelayaran Duenas untuk memenuhi permintaan mendesak dari komandan Diego de Azambuja di Tidore yang mengajukan permintaan ke Manila. Ekspedisi ini tak menghasilkan apapun, selain membawa pulang sejumlah cengkih.²⁰
- 3) Ekspedisi ketiga dilakukan dalam bulan April 1584, dipimpin oleh Pedro Sarmiento. Ekspedisi ini tidak dapat menaklukkan Ternate dan berlayar kembali dalam bulan Nopember tahun yang sama.
- 4) Pelayaran keempat dipimpin oleh Juan de Moron yang berlayar dari Manila dalam bulan Maret 1585 tetapi kembali lagi dalam bulan Juni. Suatu serangan ke Ternate gagal dilakukan karena Spanyol salah memperhitungkan situasi militer Ternate.
- 5) Sebuah armada yang dipersiapkan dengan baik dan dengan sejumlah tentara yang besar dipimpin oleh gubernur Manila Gomes Perez Dasmarinas sendiri, yang bertolak dari

²⁰ *Documenta Molucensia*, Vol.II pp.7-8.

Manila pada 1593. Tetapi sebelum meninggalkan perairan Filipina, Dasmarinas keburu terbunuh sehingga seluruh ekspedisi dibatalkan.

- 6) Akhirnya ekspedisi keenam yang dipimpin oleh Juan Juarez Gallinato. Armada ini bertolak di akhir tahun 1602 dan dalam bulan Pebruari tahun 1603 bertemu dengan armada Furtado dekat Ternate. Karena upaya untuk menyerang benteng Ternate berakhir dengan kegagalan, maka Gallinato kembali ke Manila.
- 7) Ekspedisi ketujuh, satu-satunya yang sukses, dilakukan pada 1606.²¹

Komplotan Portugis-Spanyol menculik Babullah

Pada 1583, Gubernur Spanyol di Manila, Don Consalo Ronquillo, memutuskan menangkap hidup-hidup Sultan Babullah dan membangun kembali kekuasaan Uni Spanyol-Portugis di Maluku. Ia mengumpulkan para misionaris yang pernah bertugas di Maluku untuk memperoleh informasi. Sebelum itu, ia mengirim Francisco de Duenas yang lancar berbahasa Melayu dengan menyamar sebagai pedagang Cina untuk mengumpulkan data-data intelijen. Setelah semua data diperoleh, Ronquillo memberangkatkan 300 tentara Spanyol dibantu 1500 tentara Filipina yang berlayar dalam sebuah armada berkekuatan 15 kapal. Komandan armada di tangan seorang Portugis yang ambisius, Pedro Sarmiento. Sebagai konselor ditunjuk Paul de Lima, seorang peranakan Portugis berkulit hitam kelahiran Ternate yang fasih berbahasa Ternate dan Melayu. Setibanya di Ambon, armada yang berlayar di bawah bendera Portugis ini merekrut sejumlah orang Hitu.

Tidak berapa lama setelah Bab kembali dari Makassar, armada Portugis dengan kekuatan 15 kapal dan memuat sekitar 2000 pasukan campuran Spanyol-Filipina-Hitu telah berlabuh di pelabuhan Ternate. Dengan tipu daya dan kebohongan, pemimpin armada, Pedro Sarmiento, menyatakan bahwa kunjungan armadanya ke Ternate dari Ambon adalah untuk menjalin kembali persahabatan Ternate-Portugis dengan melupakan riwayat suram masa lalu. Ia mengundang Bab bertandang ke kapalnya dan Bab bersedia. Sementara itu 40 pemuda Hitu yang kekar dan kuat telah dipilih untuk menjebak Sultan Bab.

Ketika Sultan dan pengiringnya berada di atas geladak, mereka diringkus dan dijebloskan ke dalam geladak paling bawah. Komandan armada memerintahkan seluruh kapal segera berangkat menuju Ambon. Sultan Babullah dan para *bobatonya* baru sadar bahwa mereka telah terjebak dan masuk perangkap Portugis. Dalam keadaan tak berdaya, Bab dan *bobatonya* serta 100 pengiring berada dalam tahanan Portugis. Dengan mata tertutup dan kaki dirantai, kapal berlayar menuju Ambon.

Sewaktu berlabuh di Ambon, ada beberapa orang Ternate naik ke kapal dan mencoba membebaskan Bab serta menghimbau agar ia mau melarikan diri. Tetapi, tawaran ini ditolak. Sumber-sumber berita tidak menjelaskan siapa yang ingin menyelamatkan Bab. Portugis sendiri merahasiakan sedemikian rupa, sehingga baik *Salahakan* maupun masyarakat Ternate di Ambon tidak mengetahui penahanan Bab.

²¹ *Ibid.* vol.2 p.7-8.

Setelah ditahan beberapa waktu di Ambon, Bab dibawa ke Malaka untuk selanjutnya ke Goa. Perlakuan buruk yang dialaminya selama masa tahanan menyebabkan Bab jatuh sakit dan tutup usia pada 1583 dalam pelayaran antara Malaka-Goa. Mayatnya ditenggelamkan di laut antara Malaka dan Goa – sama seperti ayahnya, Khairun Jamil, yang terkubur di laut. Keduanya mengalami nasib serupa. Sebagai penguasa bahari, jasad keduanya kembali ke laut, dan syahid sebagai korban kelicikan kekuasaan asing yang ditentangnya.

Ada beberapa versi kematian Babullah dalam sejumlah sumber sejarah. Menurut sumber-sumber Belanda, Bab mati diracuni seorang Eropa atau kawula Ternate sendiri. Versi lain mengatakan ia wafat disantet salah seorang gundiknya dan dimakamkan di bekas kota lama, Foramadiahi. Tetapi, sumber paling sah dan dibuktikan oleh berbagai dokumen adalah seperti yang disebutkan di atas.

Menurut sumber-sumber Portugis lainnya, yang menculiknya bermaksud membawanya ke Manila. Tetapi, di tengah pelayaran setelah meninggalkan Ambon, ia dinaikkan ke kapal Portugis yang membawanya ke Goa dan wafat dalam pelayaran antara Malaka-Goa. Para penculiknya, menurut sumber ini, bertekad memperlihatkan kepala Bab kepada Raja Muda Portugis di Goa untuk menegaskan bahwa sultan yang ditakuti itu kini tidak ada lagi. Jasad Bab lalu dipotong-potong dan diawetkan dengan garam, kemudian diserahkan kepada Raja Muda setibanya mereka di Goa.

Paduka Sri Sultan Babullah ibnu almarhum Sultan Khairun Jamil, lahir tanggal 10 Februari 1528, putera tertua Khairun dari Jou Boki Tanjung, permaisuri pertama. Ia memperoleh pendidikan pada Kolese Santo Paulus di Goa. Istri pertamanya Bega, seorang puteri Sulawesi; istri keduanya adalah adik Sultan Iskandar II dari Tidore. Memperoleh dua putera (Mandar Syah dan Saiduddin Barakati) dari permaisuri Bega, dan tiga orang puteri, masing-masing Ainil Yakin yang menikah dengan Sultan Jailolo Qodrat, Kandan Gogalo yang menikah dengan Sultan Tidore (Iskandar II?) serta si bungsu – tidak jelas namanya – yang menikah dengan *Sangaji Moti* setelah Bab wafat.²²

Sebelum wafat, Bab pernah berpesan kepada saudaranya, Kaicil Tolo, agar ia digantikan oleh putera keduanya yang paling disayanginya – Saiduddin Barakati, yang populer dengan panggilan Saidi – bukan oleh putera tertuanya Mandar Syah. Bab wafat pada 25 Mei 1583 dalam usia 55 tahun.

Babullah Datu Syah adalah Sultan Ternate ke-7, dan sultan teragung sepanjang sejarah Ternate. Kebesarannya terutama dikarenakan keberhasilannya mengusir kekuasaan asing yang besar dan sangat ditakuti – yakni Portugis – keluar dari Maluku dan tak pernah kembali lagi. Tidak ada satupun raja Nusantara yang dapat berbuat seperti yang telah dilakukan Babullah terhadap Portugis.

Ternate Pasca Babullah

Saiduddin Barakati, sesuai wasiat, naik takhta menggantikan Babullah sebagai Sultan Ternate ke-8 dalam usia 25 tahun. Sultan Saidi, demikian panggilan akrabnya, adalah seorang pendendam terhadap Portugis, karena tindakan mereka terhadap kakek dan ayahnya. Itulah sebabnya, meskipun Ternate menjalin hubungan baik dengan Tidore yang punya kontak khusus dengan Spanyol sejak lama, Saidi merespon secara negatif ketika penguasa tinggi Spanyol di

²² Alwi, Des, *Sejarah Maluku*, pp.389-390.

Manila berupaya mendekatinya. Atas dasar kecurigaan seperti itulah, Saidi tidak memberikan penghormatan semestinya ketika penguasa Spanyol di Tidore mengirimkan utusan kepadanya.

Menanggapi bertakhtanya Saidi, Portugis dan Spanyol – yang telah bersatu dalam suatu Uni – melihat celah dan berharap masih ada peluang merebut Ternate dengan bantuan Tidore. Pedro Sarmiento, misalnya, pernah memimpin sebuah armada dan tiba di Moti pada 1584. Ternate mengirim pasukannya untuk merebut Moti, tetapi berhasil dikalahkan Spanyol. Pulau Moti yang ditaklukkan Spanyol itu lalu diserahkan kepada Tidore. Setelah itu, sebuah skuadron dikirim dengan 400 pasukan untuk mengambil-alih benteng Gamlamo, tetapi gagal.

Sementara itu, Pangeran Tolo – paman Saidi dan saudara Babullah – berubah menjadi orang yang berambisi atas takhta Ternate. Pangeran ini menulis banyak surat kepada Gubernur Jendral Spanyol di Manila dan membeberkan kesalahan-kesalahan Saidi serta sikap anti-Spanyolnya. Ia mendesak Spanyol mengirimkan ekspedisi untuk menyingkirkan Saidi. Menurut Pangeran Tolo, rakyat akan membantu, termasuk dirinya.²³ Gubernur Jendral Spanyol di Filipina yang baru dilantik, Don Santiago de Vera, sangat tertarik dengan informasi Pangeran Tolo dan berpendapat bahwa isu itu perlu dipertimbangkan.

Sultan Saidi yang belum setahun bertakhta kini menghadapi problem yang pelik. Ia harus menghadapi dengan serius oposisi pangeran Tolo (dari dalam) yang bekerja sama dengan unsur-unsur anti Saidi, serta upaya-upaya Spanyol untuk kembali ke Ternate yang dibantu Tidore. Tidak seperti Bab yang didampingi orang kuat seperti Samarau dan Kapalaya, Saidi hanya didampingi Kapita Laut Kaicil Ali yang masih muda belia dan *jogugu* Hidayat yang berpengalaman luas.

Pada 1585, Gubernur Jendral Spanyol di Manila de Vera mengirim sebuah ekspedisi yang dipimpin Laksamana Don Juan Marones. Ketika akan mendekati Bacan, angin topan kencang menceraiberaikan kapal-kapal mereka. Bahkan beberapa kapal kandas dan tenggelam dengan membawa ke dasar laut semua perbekalan, amunisi, serta sebagian besar tentaranya. Hanya beberapa kapal yang selamat tiba di Tidore dan disambut Pangeran Tolo dan tokoh-tokoh oposisi lainnya, serta Sultan Tidore dan Bacan. Ketika sisa-sisa armada itu mencoba menyerang Ternate, pasukan penyerbu itu berhasil dipukul mundur dan melarikan diri ke Tidore dalam keadaan tercerai-berai. Laksamana Morenos akhirnya mundur dari perairan Maluku, kemudian kembali ke Manila, di tengah gemuruh sorak-sorai orang Ternate yang merayakan kemenangan mereka.

Pada 1593, Gubernur Jendral Spanyol yang menggantikan de Vera, Gomez Perez Dasmarinas, merancang sebuah ekspedisi tangguh yang terdiri dari 6 kapal layar dan mengangkut 1000 serdadu Spanyol dan 1000 tentara Filipina. Armada ini berkumpul di Cebu, Filipina Selatan. Gubernur dan 80 staf berkebangsaan Spanyol, termasuk sejumlah bangsawan Filipina, naik ke kapal tempur yang akan rendezvous di Cebu. Sejumlah 250 pendayung Cina dipaksa ikut menjadi pendayung, dengan janji upah yang tinggi. Mereka berasal dari Kanton dan rata-rata berprofesi sebagai pedagang dan perajin.

Ekspedisi ini bertolak dalam bulan Oktober 1593 dipimpin langsung Gubernur Jendral Dasmarinas sendiri. Tetapi, sebelum armada itu meninggalkan perairan Filipina, di malam pertama pelayarannya, orang-orang Cina yang menjadi pendayung secara diam-diam membantai Gubernur Jendral dan ke-80 staf Spanyolnya. Yang disisakan hidup tak lebih dari 10 orang. Putera Dasmarinas yang menjabat wakil komandan Armada dan berada di kapal lain, baru

²³ *Ibid.*p.396.

mengetahui tragedi itu esok harinya, ketika melihat kapal komando yang ditumpangi ayahnya sudah tidak ada lagi karena dilarikan orang-orang Cina ke pantai Indocina. Kapal itu kemudian disita Raja Tonkin berikut muatannya, sementara para pelarian Cina dibolehkan kembali ke negerinya.²⁴ Armada itu akhirnya kembali ke Manila.

Mendengar kegagalan Spanyol ini, Sultan Saidi merasa tidak takut lagi terhadap kemungkinan adanya serbuan Spanyol dan Portugis. Walaupun pada ekspedisi-ekspedisi Spanyol selanjutnya diperoleh bantuan dari Tidore, Bacan dan Sulawesi Utara, dan unsur-unsur oposisi dalam kerajaan seperti Pangeran Tolo, tetapi mereka gagal menduduki benteng Gamlamo. Sementara itu, antara 1591 hingga 1592, pasukan Ternate di Ambon mencoba menyerang kedudukan Portugis di sana, tetapi gagal memaksa mereka untuk meninggalkan pulau itu. Saidi berharap bahwa Portugis dan Spanyol akan meninggalkan Maluku untuk selamanya dengan tibanya Belanda sebagai pendatang baru.

Kunjungan Awal Bangsa Belanda ke Maluku

Pada 1588, Laksamana Jacob Corneliszoon van Neck tiba di Ternate dengan kapal Amsterdam dan Utrecht. Kedua kapal ini berada di Ternate dari akhir Mei hingga awal Juni 1588. Saidi bertemu dengan van Neck dan berhasil memperoleh senjata yang ditukar dengan cengkih. Sepuluh tahun kemudian (1598) Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi dengan 22 kapal Belanda yang lego jangkar di Ternate. Armada ini berlayar dari Banten dan merupakan ekspedisi ke-2 Houtman, menyusul keberhasilan ekspedisi pertamanya tahun 1595. Karena ekspedisi pertama dinilai berhasil dan pebisnis Belanda melihat potensi keuntungan rempah-rempah sangat menggiurkan, maka mereka pun membiayai ekspedisi ke-2 de Houtman.

Pada 8 Januari 1599, ekspedisi Belanda yang lain tiba di Ternate dengan kapal Zeeland dan Gelderland pimpinan Wijbrand van Warwijk dan Jacob Heemskerck. Mereka datang dari Banten. Van Warwijk mengundang Sultan Saidi ke kapalnya. Karena curiga dan takut terulang kembali musibah yang menimpa ayahnya, Babullah, ia menolak datang. Tetapi setelah dijelaskan bahwa orang Belanda tidak akan melakukan tindakan pengecut seperti yang dilakukan Portugis, Saidi mau menerima undangan itu.

Cara Saidi menghadiri undangan van Warwijk cukup unik. Sultan datang diiringi beberapa juanga yang mengepung kapal Belanda. Dengan tetap berdiri di atas juanga kerajaannya, Saidi berkomunikasi dengan van Warwijk yang berada di atas geladak kapalnya melalui seorang juru bahasa. Sultan menghadihkan 2 setengah pikul rempah-rempah kepada van Warwijk dan sebagai balasan ia memperoleh beberapa pucuk senjata. Setelah itu Sultan pamit karena waktu shalat Zuhur telah tiba.

Seminggu kemudian datang lagi sejumlah juanga mengelilingi kapal Belanda dengan membunyikan tifa dan gong. Awak kapal Belanda mengira bunyi-bunyian itu sebagai isyarat perang, dan segera menyiapkan persenjataan kapal. Ternyata juanga yang menggelar tetabuhan, tifa dan gong itu ditumpangi Sultan. Van Warwijk menyilahkan Sultan naik ke kapal, tetapi ditolaknyanya. Sultan mengutus salah seorang bobatonya naik ke atas kapalnya disertai seorang juru bahasa untuk berbicara dengan van Warwijk. Besoknya Sultan kembali lagi ke kapal Belanda itu, dan kali ini memutuskan naik ke atas kapal ditemani 3 bobato. Setelah berbincang-bincang Sultan pamit dan mengundang van Warwijk beserta seluruh perwira kapalnya ke istana.

²⁴ Alwi, *Des.Op.Cit*.p.400.

Pada hari berikutnya, van Warwijk berkunjung ke istana Sultan beserta sejumlah perwira. Van Warwijk membawa beberapa potong kain beludru aneka warna, beberapa potong kain laken, sebuah cermin besar dan beberapa pucuk senapan antik. Beberapa hari kemudian, Sultan membalas hadiah itu dengan 620 pon rempah-rempah yang dibalas van Warwijk dengan sejumlah barang pecah belah. Komunikasi yang dijalin antara Sultan Saidi dan van Warwijk akhirnya membuahkan perundingan mengenai transaksi rempah-rempah: Sultan menetapkan harga atas setiap penyerahannya, dan van Warwijk membayar tunai.

Pada 28 Juli 1599, van Warwijk kembali lagi ke Ternate dan sempat berunding dengan Sultan di atas kapal. Dalam perundingan ini disepakati bahwa van Warwijk akan menempatkan 5 orang anak buahnya di Ternate guna melakukan tukar menukar barang dan rempah-rempah langsung kepada rakyat. Ke-5 orang itu dipimpin Frank van der Does asal Amsterdam. Pada 19 Agustus 1599 van Warwijk menjemput anak buahnya dan kembali ke negerinya dengan muatan rempah-rempah.

Pada 2 Juli 1601, Jacob Corneliszoon van Neck tiba di Ternate dari Goa dengan 2 buah kapal: Amsterdam dan Gauda. Sultan sendiri sempat naik ke kapal untuk mengucapkan selamat datang. Bersama Sultan naik pula Frank van der Does dan 3 dari 5 agen Belanda yang ditugaskan van Neck tinggal di Ternate sejak 1599.

Orang Portugis di Tidore juga ingin menerima van Neck, tetapi karena acaranya sudah diagendakan dengan Saidi, van Neck menolak keinginan itu. Penolakan ini berbuntut pada pecahnya suatu insiden. Kapal-kapal Portugis muncul secara tak terduga dan menembaki kedua kapal Belanda. Kapal Belanda Amsterdam balas menembak dan menimbulkan kebakaran hebat pada kapal-kapal Portugis. Akhirnya kapal-kapal Portugis itu mengundurkan diri dengan membawa sejumlah korban. Insiden ini menewaskan 9 anak buah van Neck dan sejumlah lainnya luka-luka.

Pada 9 Juli 1601, van Neck mengunjungi Sultan Ternate di istananya, untuk berpamitan. Sultan menghimbau van Neck menunda kepulangannya sambil menunggu van Warwijk tiba, agar bersama-sama dapat menggempur Portugis di Tidore. Tetapi van Neck menyatakan bahwa ia tidak dapat menunda pelayarannya sampai van Warwijk tiba di Ternate. Pada 31 Juli 1601, van Neck meninggalkan Ternate menuju Patani. Jan Pieterzoon bersama 4 kawannya ditunjuk sebagai agen yang tinggal di Ternate untuk membeli rempah-rempah.

Pada 7 Pebruari 1602, tiba di Ternate 5 buah kapal Belanda (Gilderland, Zeeland, Utrecht, de Wachter dan sebuah kapal cepat berukuran kecil). Armada ini dipimpin Walfret Hermanzoon, tetapi tidak lama berada di Ternate karena peristiwa perampokan yang menimpa salah satu kapal mereka. Sebuah kapal kecil Portugis dengan memperlak orang-orang Tidore mendekati armada yang tengah berlabuh. Orang-orang Tidore itu lalu naik ke kapal Belanda dan merampok logistik berupa bahan makanan, tepung gandum, beras, anggur, minyak goreng, dan lainnya. Pada 7 Maret 1602, armada Belanda itu meninggalkan Ternate karena logistiknya telah menipis.

Pada 1602 ini, Sultan Saidi mengirimkan armada-armada yang terdiri dari 50 juanga dengan 800 prajurit pimpinan Kaicil Baba, salah seorang pamannya, untuk membantu masyarakat muslim Mindanao menentang Spanyol. Setelah serangkaian pertempuran terjadi, pasukan Ternate dan Melayu terpukul mundur. Armada Kaicil Baba akhirnya kembali ke Ternate. Tetapi ketika pasukan Melayu kembali lagi menghalau Spanyol, banyak orang Ternate menjadi relawan dan bergabung dengan pasukan Melayu.

Sementara itu, sebuah armada Spanyol pimpinan Juan Gallanato bertolak dari Manila di akhir 1602, dan pada Pebruari 1603 bertemu dengan armada Furtado di dekat Ternate. Tujuan Armada ini adalah menyerang benteng Gamlamo. Tetapi pasukan Ternate dengan bantuan Belanda berhasil menghalau armada Spanyol itu, dan Gallanato kembali ke Manila dengan tangan hampa. Ekspedisi Spanyol ini adalah yang ke-6 kalinya dengan tujuan merebut kembali benteng Gamlamo.

Pada Juli 1605, tiba di Ternate sebuah kapal Inggris pimpinan Henry Middleton. Sebelumnya, kapal itu singgah di Makian dan membeli 16 ton cengkih. Transaksi ini mendapat reaksi keras terutama dari unsur-unsur VOC yang mulai eksis di Ambon. Henry Middleton adalah pedagang swasta (*country trader*) Inggris, yang datang membawa sepucuk surat dari Raja James. Isi surat itu meminta Sultan Saidi mengizinkan Inggris mendirikan pos dagangnya di Ternate. Saidi tidak begitu memperhatikan pentingnya nilai persahabatan dengan Inggris ketimbang Belanda. Dalam jawabannya, Saidi menyatakan bahwa orang Inggris tidak pernah membantu Ternate melawan Portugis dan berbuat terlalu sedikit sejak Francis Drake mengunjungi negeri ini pada 1579. Pada saat itu, Sultan Babullah pernah menitipkan sebuah cincin untuk Ratu Elizabeth “untuk memperingati aliansi Ternate-Inggris”, tetapi Inggris tidak pernah mengirim bantuan. Karenanya, Saidi menyurati Pangeran Mauritius dari negeri Belanda untuk memohon izin mengirim produk negerinya yang paling eksklusif ke Belanda, “teman dan pembebasnya”, sebagai penukar pengiriman senjata yang tengah dinantikan.

Sejak awal kedatangan Belanda, hal utama yang menjadi agenda pembicaraan Saidi dengan Belanda adalah soal senjata. Upaya mempertahankan diri adalah kebijakan pemerintahannya yang memperoleh prioritas tinggi. Saidi sadar bahwa antara 1580 hingga 1602, Spanyol telah mengirim 6 ekspedisi militer dari Manila untuk menggempur dan merebut kembali Gamlamo, yang dijadikan istana resmi kesultanan Ternate. Selanjutnya, ada 2 faktor yang menjadi pendukung utama kebijakan mempersenjatai diri:

1. Sejak 1580, Portugis dan Spanyol telah bersatu di bawah satu uni dengan kepemimpinan Raja Spanyol. Persatuan kedua kerajaan yang menguasai hampir sepertiga dunia ini menciptakan kekuatan yang harus diperhitungkan
2. Apabila pada masa sebelum 1580, pusat kekuasaan Portugis adalah Malaka dan Goa yang cukup jauh letaknya dari Maluku, kini pusat kekuasaan itu pindah ke Manila yang cukup dekat dengan Maluku.

Penyerbuan Spanyol ke Ternate²⁵

Ketika terjadi gerhana bulan pada suatu malam di bulan Maret 1606 di Ternate, orang Ternate menginterpretasikan bahwa kejadian itu mengindikasikan suatu kegilaan yang akan dialami penguasa mereka atau seluruh masyarakat, dan mereka bertekad melakukan upacara “tolak bala” agar kegilaan itu tidak terjadi. Tetapi, bencana datang bahkan lebih cepat dari yang diramalkan.

²⁵ Amal, M. Adnan dan H. Syamsir Andili, *Ternate dalam Perspektif Sejarah*, dalam: *Ternate, Kelahiran dan Sejarah Sebuah Kota*, eds. Fachry Ammarie et.al., Pemerintah Kota Ternate, 2003. p.86. dyb.Andaya, *Op.Cit.*p.140.

Gubernur Jenderal Spanyol yang baru di Manila, Don Pedro da Cunha, telah lama mengamati sepak terjang Sultan Saidi dalam kaitannya dengan orang-orang Belanda. Antara 1588-1602, Saidi telah menerima lima kunjungan armada Belanda, masing-masing dipimpin Laksamana Jacob Corneliszoon van Neck (1588), de Houtman (1598), van Warwijk dan Heemskerck (1599), van der Hagen (1600), van Neck (1601) dan Hermanzoon (1602). Gubernur Jenderal da Cunha menyimpulkan bahwa jika Belanda kembali lagi ke Ternate, Sultan Saidi akan meminta bantuan mereka untuk menggempur Spanyol di Tidore. Da Cunha akhirnya memutuskan menggempur Ternate dan menangkap Saidi.

Pada 26 Maret 1606, setelah melakukan persiapan matang, sebuah ekspedisi besar Spanyol tiba di Ternate dipimpin Gubernur Jenderal Spanyol di Filipina, Don Pedro da Cunha. Ia memimpin armada yang terdiri dari 36 kapal Spanyol-Portugis, 1423 tentara Spanyol, 344 pasukan orang-orang Tagalog dan Pampangan, 679 orang dari berbagai daerah di Filipina dan bangsa-bangsa lain, dan 649 pendayung Cina. Kesemuanya berjumlah 3095 orang. Pasukan besar ini menggempur tentara Ternate yang mempertahankan benteng Gamlamo, dengan bantuan Tidore. Akhirnya, benteng itu jatuh ke tangan penyerbu dalam suatu pertempuran yang tidak seimbang. Walaupun benteng Gamlamo pada masa Babulah telah diperkuat dengan tembok tinggi yang mengelilinginya, tetapi pasukan Spanyol dengan mudah dapat merebutnya. Sultan Saidi melarikan diri, mula-mula ke Jailolo lalu ke Sahu, dengan hanya ditemani Sangaji Ngofakiaha dari Makian, ditambah keluarga Sultan serta sejumlah perempuan lainnya.

Dalam waktu 2 hari, pertahanan terakhir Ternate di Takoma menyerah tanpa syarat. Otoritas Spanyol dan juga Sultan Tidore, menghimbau agar Saidi kembali ke Ternate untuk diberi perlindungan. Saidi menerima himbauan ini dan beberapa hari kemudian, kapal komando da Cunha mendaratkan Saidi di pelabuhan Talangame. Ia disambut komandan Militer pendudukan Spanyol dan Sultan Tidore, Mole Majimu. Kedua sultan itu bersalaman dan berbincang dalam suasana saling respek. Sultan Saidi lalu menandatangani sebuah perjanjian penyerahan diri dan penyerahan benteng dengan semua asset berikut kota Gamlamo. Dalam perjanjian itu, Saidi juga menyerahkan seluruh penduduk dan pemukiman mereka, termasuk bekas Kerajaan Moro serta pulau Morotai dan Rao. Pada 10 April 1606, Spanyol memancang bendera di berbagai kawasan Ternate “atas nama yang Maha Mulia Raja Spanyol”.²⁶

Dengan jatuhnya Ternate ke dalam kekuasaan Spanyol, mulailah proses pengambilalihan aset-aset penting kerajaan dan reposisi dominasi mereka atas kota. Benteng Portugis dijadikan markas garnisun, dan pasukan ditempatkan di dalamnya. Gereja Sao Paolo direstorasi dan dikembalikan kepada Misi Jesuit untuk memulai kembali kegiatan mereka. Mesjid Raya Gamlamo dialihkan ke Misi Jesuit dan dijadikan biara. Namanya diganti dari Sigi Lamo (mesjid Agung) menjadi Biara San Francisco. Rumah adik perempuan sultan dinamakan San Augustin, dan rumah seorang bangsawan kaya diberi nama Santo Domingo.²⁷ Sultan dan Sangajinya dipaksa bersumpah tidak mengganggu atau mempersulit seorang Muslim yang akan mengganti agamanya menjadi Kristen.

Dalam pasal-pasal Kapitulasi Ternate kepada Spanyol, yang ditandatangani pada Nopember 1606, Ternate setuju mengembalikan semua budak milik orang Portugis dan Spanyol yang telah menjadi Muslim dan melarang budak-budak beragama Kristen menjadi Muslim, sekalipun yang bersangkutan memintanya.

²⁶ Andaya, *Op.Cit.* p.140.

²⁷ *Ibid.*

Sementara itu, Tidore berhasil mengambil kesempatan dalam kesempatan dan menggunakan peluang ketika Ternate sedang tak berdaya. Tidore menginformasikan kepada da Cunha, bahwa 8 desa di pulau Makian yang menjadi milik Tidore sebelumnya, telah dicaplok Ternate, yaitu: Sabale, Talafao, Tafasoho, Ngofabobawa, Bobawa, Tabalala, Lagona, dan Mogoe. Tidore menuntut agar desa-desa itu dikembalikan. Selain desa-desa itu, da Cunha memerintahkan 9 desa lainnya dibagi antara Ternate dan Tidore. Sultan Alauddin dari Bacan juga ikut protes dan minta Ternate mengembalikan pulau Kayoa, Adoba, dan Bailoro, serta beberapa desa di Seram dan pemukiman Risabata, Balomata dan lainnya yang telah diambil Ternate.²⁸

Dalam sepucuk surat tertanggal 2 Mei 1606, Raja Spanyol mengkonfirmasi tentang donasi Ternate kepada kerajaan Spanyol. Da Cunha memberitahu bahwa ia menginstruksikan Juan de Esquivel, Komandan Pasukan Spanyol, untuk tinggal di Ternate berikut pasukannya untuk memastikan hal itu, dan sedapat mungkin membantu Sultan Bacan meredam setiap perlawanan dan menghukum mereka yang membangkang. Da Cunha juga menghadiahkan wilayah Gane kepada Bacan.

Setelah penahanan Saidi, Don Pedro da Cunha dengan para penasehatnya membahas nasib Sultan Saidi, yang kini ditawan di sebuah rumah di Gamlamo dengan penjagaan ekstra ketat. Yang mereka perdebatkan adalah kemungkinan terjadi persekongkolan rakyat Ternate dengan Belanda untuk menyerang Spanyol yang bermarkas di benteng Gamlamo. Gubernur Jenderal Spanyol akhirnya memutuskan bahwa Sultan Saidi dan seluruh keluarganya diasingkan ke Manila, dan sebagai pelaksana tugas kerajaan diserahkan kepada dua orang saudaranya: Kaicil Suki dan Kaicil Kafari. Keduanya dinilai Gubernur sebagai orang yang “cinta damai dan penuh perhatian”. Sementara Komandan Militer Spanyol di Ternate, Juan de Esquivel, menempatkan kesatuan sebanyak 600 tentara untuk mempertahankan kota Ternate.

Pada Mei 1606, Sultan Saidi, putera tertuanya dan sebanyak 24 sangaji serta sejumlah Kaicil—termasuk Kaicil Hamzah, kemenakan Saidi—naik ke atas kapal Patrona yang dipimpin Kapten Villagra. Kapal ini membawa mereka ke tempat pengasingan di Manila. Tetapi, permaisuri Sultan Saidi, Celicaya, tidak ikut. Ia tetap bertahan di desa Sabubu, Sahu, dan menolak menyerahkan diri kepada Spanyol. Selain Celicaya, Jogugu Hidayat, Kapita laut Ali dan Kimalaha Aja adalah pimpinan pemerintahan yang tidak menyerahkan diri kepada Spanyol. Saidi tutup usia dan dimakamkan di Manila pada 16 Juni 1627, bersamaan dengan wafatnya Mudaffar Sultan Ternate penggantinya. Upaya Mudaffar memulangkan Saidi ke Ternate selalu gagal.

Gubernur Jenderal Pedro da Cunha sendiri baru bertolak beberapa hari setelah Patrona meninggalkan Ternate. Setibanya di Manila, da Cunha disambut sebagai pahlawan dan diarak dalam suatu parade kemenangan yang gegap gempita. Tetapi, selang 3 minggu setelah parade, penakluk Ternate itu meninggal dunia. Menurut diagnosa para dokternya, da Cunha telah diracun sejak di Ternate.

Tindakan Spanyol Pasca Penaklukan Ternate²⁹

²⁸ Andaya, p. 41

²⁹ Amal, M.Adnan dan H. Syamsir Andili, *Ternate, Kelahiran dan Sejarah Sebuah Kota*, pp.88-93.

Setelah Sultan Saidi menyerah dan diasingkan ke Manila, Spanyol dan pasukan koalisinya yakni Tidore, dikirim ke Halmahera untuk melengkapinya. Mula-mula Gamkonora digempur, menyusul Bisoa, Galela, Pune, dan Mamuya. Penduduk negeri-negeri itu sebelumnya telah menganut agama Kristen Katolik di masa kekuasaan Portugis. Bersama penduduk Tolo dan Samafo, mereka mengirim utusan untuk menghormati ekspedisi Spanyol dengan musik, dan mengusung lambang perdamaian berujud jantung pisang serta cengkih berwarna merah putih. Mereka mengutuk Sultan Saidi dan Babullah atas pemurtadan agama mereka. Mereka berjanji akan segera kembali ke agama Kristen.

Di luar Halmahera, pasukan koalisi menyerbu Mira di Morotai dan pulau Dayan ditaklukkan pasukan Tidore. Komandan ekspedisi Spanyol, Juan de Esquivel, mengirim utusan kepada petinggi wilayah-wilayah taklukan Ternate di Sulawesi Utara dengan membawa cinderamata sejumlah busana buatan Spanyol, dan mengumumkan kemerdekaan mereka dari tirani Ternate. Komandan Militer Spanyol tersebut juga menawarkan kepada daerah-daerah itu “perlindungan”. Setelah kembali dari Buol dan Toli-toli, utusan Spanyol menyampaikan sepucuk surat kepada Esquivel yang berisi permintaan penduduk agar kedua daerah itu dipersenjatai untuk melawan bajak laut Makassar.

Pada awal Nopember 1606, semua perlawanan terhadap Spanyol berakhir, dan pada 27 Nopember tahun yang sama, para petinggi Ternate yang tersisa menandatangani perjanjian 10 pasal tentang penyerahan tanpa syarat seperti akan disebutkan di bawah.

Salah satu hak yang dituntut Spanyol di luar yang tercantum dalam 10 butir perjanjian seperti tercantum di bawah, tetapi diminta langsung kepada Sultan Saidi sesaat setelah menyerah, adalah hak monopoli atas perdagangan rempah-rempah. Dengan demikian, Spanyol adalah negara asing kedua yang diberi hak monopoli setelah Portugis.

Kemenangan Spanyol atas Ternate sangat mempengaruhi perjalanan sejarah kerajaan ini, dan telah menghadirkan kekuasaan VOC Belanda selama hampir 200 tahun berikutnya, yang dilanjutkan kemudian oleh sebuah pemerintah kolonial yang diberi label Netherland Indie.

Ratu Kaidipan menyambut hangat dan mengucapkan selamat datang kepada utusan Esquivel dan mengeluarkan pernyataan bahwa “dia telah lama menanti dan mencari upaya untuk menjadikan Raja Spanyol sebagai junjungannya, karena dia selalu berperang dengan Sultan Ternate”.

Pada awal Nopember 1606 semua perlawanan terhadap Spanyol telah berakhir, dan pada 27 Nopember tahun itu juga para bobato Ternate yang tersisa menandatangani sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa Ternate takluk kepada Spanyol. Para Bobato Ternate tersebut setuju untuk:

1. Mengakui Raja Spanyol sebagai junjungan mereka
2. Spanyol akan memperoleh sepertiga dari semua upeti yang biasa diterima sultan Ternate, dan dua per tiga sisanya menjadi hak para bobato
3. Tunduk tanpa syarat kepada pemerintah Spanyol
4. Tidak melakukan hubungan dagang dengan siapapun tanpa ijin Spanyol
5. Tidak memberikan bantuan kepada pemberontak pribumi yang melawan Spanyol

6. Mengembalikan semua emas, perak, dan perhiasan serta benda-benda keagamaan lainnya kepada negeri
7. Tidak akan memaksa seorang Kristen, termasuk budak, beralih ke agama Islam
8. Anak negeri dilarang berperang antara sesamanya
9. Dilarang berbicara dan berdagang dengan orang Belanda
10. Mengumumkan semua ketentuan di atas kepada rakyat kawula Ternate baik di pusat maupun di daerah-daerah seberang laut.

Perjanjian tersebut merupakan kemenangan besar Spanyol atas Ternate pasca penyerbuan benteng Gamlamo. Pada tanggal 10 April 1606, Spanyol mengibarkan benderanya pada beberapa daerah, dan “atas nama Sri Paduka Raja Spanyol, Ternate diambil alih.”

Belanda: Pendatang Baru di Maluku

Pada saat penyerbuan Spanyol atas ibukota Gamlamo terdapat 2 orang *bobato* Ternate yang berhasil meloloskan diri, masing-masing Jogugu Hidayat dan kapita Laut Kaicil Ali. Jogugu Hidayat memerintahkan Kaicil Ali (ketika itu baru berumur 20 tahun), dengan ditemani Kimalaha Aja segera berangkat ke Banten untuk meminta bantuan Belanda. Dalam bulan Desember 1606, Kaicil Ali setelah menunggu selama 6 bulan, berhasil juga menemui Laksamana de Jonge yang baru saja tiba dari negeri Belanda. Dalam pertemuannya, Kaicil Ali memaparkan penyerbuan Spanyol atas Gamlamo, penangkapan Sultan Saidi dan keluarganya berikut sejumlah bobato dan pengasingan mereka ke Manila. Ali menjelaskan kepada de Jonge bahwa atas nama kerajaan Ternate dia meminta bantuan kompeni Belanda (VOC) agar mengenyahkan Spanyol dari kerajaannya. Laksamana Matelief de Jonge, setelah mendengar pemaparan Kaicil Ali, setuju memberi bantuan militer Belanda dengan beberapa syarat yang akan dirundingkan setelah de Jonge sendiri dan pasukannya tiba di Ternate.

Pada tanggal 29 Maret 1607 de Jonge dan Kaicil Ali bertolak dari Banten menuju Ambon, setelah Kaicil Ali menerima persyaratan yang dituntut VOC atas bantuannya kepada Ternate mengusir Spanyol. Syarat yang diajukan VOC sangat sederhana, yaitu: pemberian hak monopoli perdagangan rempah-rempah, penyediaan sejumlah pasukan tempur, ijin mendirikan benteng dan pemukiman bagi penduduk Belanda, serta tanggungan Ternate atas biaya perang. Ali menyetujui syarat-syarat itu.

Di akhir bulan April 1607 sebuah armada Belanda terdiri 7 buah kapal dan 2 kapal pemburu, berikut 530 tentara Belanda dan 50 serdadu Ambon, bersama Laksamana Matelief de Jonge dan Kapita laut Ali bertolak ke Ternate dari Ambon. Armada ini tiba di Ternate pada 13 Mei 1607. Sebelumnya, Laksamana de Jonge meminta informasi Kaicil Ali tentang jumlah pasukan Spanyol yang ada di Ternate berikut seluruh pasukan kerajaan Ternate yang ada. Menurut Ali, jumlah tentara Spanyol di benteng Gamlamo kira-kira 600 orang, sementara pasukan kerajaan Ternate sendiri sekitar 1000 personil. De Jonge agak kecewa setelah mengetahui bahwa pasukan Spanyol berjumlah lebih dari 1000 orang dan pasukan Ternate sendiri hanya 300 orang.

Langkah pertama Laksamana Matelief de Jonge ialah mendirikan sebuah benteng di sekitar kampung Melayu, dan meminta jogugu Hidayat agar mengerahkan ratusan orang Ternate

dan Jailolo untuk bekerja setiap hari membantu membangun benteng tersebut. Benteng ini bernama benteng Melayu kemudian diubah menjadi benteng Oranje.

De Jonge meminta agar Sultan Mudaffar yang telah melarikan diri ke Jailolo dipanggil pulang untuk menandatangani perjanjian yang sudah disepakati dengan Kaicil Ali. Mudaffar dan Jogugu Hidayat dengan diantar oleh Sultan Jailolo beberapa hari kemudian telah berada di Ternate. Setelah Sultan Mudaffar menandatangani perjanjian tersebut maka Belanda mulai membangun pemukiman mereka yang diberi nama Willemstad (sekarang Takoma), dan selanjutnya Belanda menciptakan zone demiliterisasi sepanjang tiga setengah kilometer antara Toboko dan Kalumata.

Enam bulan setelah kedatangan VOC-Belanda, berbagai persiapan dan kegiatan mulai dirancang. Walaupun konsentrasi pasukan Spanyol terdapat di benteng Gamlamo (kurang lebih 24 kilometer dari benteng Oranje) tetapi dengan menghitung perbandingan kekuatan, Belanda tidak langsung menyerang benteng itu. Bahkan sampai Spanyol keluar dari Maluku pada 1664, Belanda tidak pernah menyentuh benteng Gamlamo. Belanda dan koalisinya Ternate pertamanya menyerang Bacan, kemudian Tidore dan Makian yang menjadi pusat konsentrasi Spanyol di luar Ternate. Pada 1608 VOC mengangkat Gubernur pertama yaitu Paulus van Carden. Setelah tiba di Ternate gubernur VOC ini mulai mengatur serangan-serangan pasukan koalisinya atas Makian sebagai kantong konsentrasi Spanyol. Dan setelah itu Belanda lebih banyak mengurus bisnisnya daripada merancang dan melaksanakan serangan terhadap Spanyol. VOC juga mulai menjalankan hak monopolinya atas perdagangan rempah-rempah dan mengeruk keuntungan sangat besar. Oleh sebab itu pada 1612, pimpinan VOC di negeri Belanda mengangkat Pieter Both sebagai Gubernur Jenderal VOC pertama yang berkedudukan di Ternate.³⁰

Pada 26 Juni 1607, perundingan dilangsungkan antara Ternate-Belanda dan menghasilkan kesepakatan yang berintikan sebagai berikut:

1. Belanda berkewajiban membantu Ternate mengusir Spanyol dan diberi wewenang penuh untuk mengatur perencanaan dan pelaksanaannya. Semua biaya perang akan ditentukan besarnya oleh Dewan Hindia dan akan dibebankan kepada Ternate.
2. Garnisun Belanda yang dibentuk akan ditempatkan dalam daerah kekuasaan Kesultanan dan akan dibiayai oleh Kesultanan
3. Belanda berjanji akan melindungi kawula Kesultanan Ternate, baik yang ada di Ternate maupun di daerah seberang laut yang masuk ke dalam lingkup kerajaan – seperti Buru, Kambelo, Ruhu, Mau, Sangir Talaud, Moro, dan Mindanao – serta mencegah agar rakyat Ternate tidak memberikan kepatuhannya kepada Spanyol.
4. Kesultanan Ternate tidak akan menjual rempah-rempahnya kepada bangsa manapun atau kepada siapapun, kecuali kepada Belanda.
5. Tanpa persetujuan kedua belah pihak, tidak boleh diadakan perdamaian dengan Spanyol, termasuk Kesultanan Tidore.

³⁰ Amal, Adnan dan H.Syamsir Andili, *Ternate dalam Perspektif Sejarah*, Fachry Ammarie (ed.), Pemerintah Kota Ternate 2003, pp.85-94.

6. Belanda diizinkan membangun benteng di dekat perkampungan Melayu.³¹

Pada perundingan yang dilakukan de Jonge dengan Dewan Kerajaan Ternate – dihadiri juga Sultan Mudaffar dan Mangkubumi Dayo (Hidayat), Jogugu dari klan Tomagola – de Jonge bertindak untuk dan atas nama *Staten Generaal* (Parlemen Belanda). Segera setelah perjanjian ditandatangani, Belanda membangun benteng di kompleks perkampungan Melayu. Peletakan batu pertama dilakukan de Jonge sendiri pada 1607. Karena dibangun di kompleks perkampungan Melayu, pada awalnya benteng ini diberi nama Fort Melayu. Dua tahun kemudian, Gubernur Belanda pertama, Paulus van Carden, mengubah namanya menjadi Fort Oranje.

Usai dibangun, benteng Oranje dihuni 150 serdadu dengan lima perwira dan merupakan garnisun Belanda pertama di Maluku. Di dalam benteng ini pula, pada masa belakangan, terdapat pemukiman Gubernur dan Dewan Kolonial (Raad van Indie) yang membuat peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan untuk keperluan landasan operasional VOC.

Kawasan sekitar pemukiman Melayu dipilih sebagai lokasi benteng, karena letaknya yang strategis untuk mencegah penyerbuan dari laut. Pantai di depan benteng cukup landai dan penuh ditumbuhi batu karang yang luas dan sangat menyulitkan pendaratan musuh. Benteng berbentuk segi empat dengan keempat sudutnya menonjol dan mempunyai dinding yang cukup tebal. Di dalamnya terdapat asrama militer, rumah sakit, gudang mesiu dan logistik, serta rumah kediaman Gubernur dan beberapa bangunan sipil serta perkantoran. Di belakangnya terdapat lapangan yang diberi nama Oranjeveld yang dipakai untuk latihan baris-berbaris tentara dan sarana rekreasi. Dari lapangan ini, orang dapat menikmati gunung dan teluk serta tanjung-tanjung pesisir utara kepulauan Tidore.³²

Di kiri kanan benteng terdapat perkampungan orang Makassar, Cina dan Arab. Orang Bugis Makassar telah berada di Ternate sejak abad ke-14 untuk berdagang. Mereka kemudian membangun pemukiman yang kini dikenal sebagai Kampung Makassar. Selain pebisnis, ada pula orang Makassar yang dibawa ke Ternate oleh Sultan Babullah sebagai tawanan perang di masa puncak ekspansi Ternate. Mereka ditawan dari wilayah pantai timur Sulawesi Tengah, seperti Buton, Banggai, Kayeli, Tobungku, dan lainnya. Pemerintah Belanda memberi status kependudukan kepada mereka sebagai kawula Gubernemen, bukan kawula Kesultanan. Kepala masyarakat di sini diberi pangkat tituler Kapten Pertahanan Kota (*Kapitein der Schutterij*), karena orang Makassar memiliki prestasi yang membanggakan di bidang itu.

Adapun pemukiman Cina, sudah sejak awal abad ke-14 terbentuk dan diisi orang Cina yang datang langsung dari Cina ketika maraknya perdagangan rempah-rempah. Sementara orang Arab yang nenek moyangnya kebanyakan datang dari Hadramaut diberi tempat di bagian barat pemukiman Cina. Status kependudukan orang-orang Arab dan Cina sama dengan Makassar, sehingga kepala pemukiman mereka disebut *Luitenant der Arabieren* untuk orang-orang Arab, dan *Kapitein der Chinezen* untuk orang-orang Cina.

³¹ Valentijn, *Op.Cit.*p.224.

³² Selain benteng Oranje, Belanda juga membangun tiga benteng lainnya di Ternate, yaitu benteng Toloko atau Fort Hollandia, benteng Takoma atau Fort Willemstad, dan benteng Kalamata. Di Makian, Belanda membangun benteng Mauritius, dan benteng Nassau di Moti. Sementara Benteng Barneveld di Bacan adalah benteng Portugis yang direnovasi Belanda.

Aksi-aksi militer Belanda

Konsentrasi pasukan terbesar Spanyol terdapat di benteng Gamlamo – kurang lebih 600 personil – dan sekitar 100 orang terdapat di Tidore. Di Ternate, Belanda hanya menciptakan semacam garis demarkasi antara Kalumata dan Willemstad. Pergerakan tentara Spanyol praktis hanya di kawasan barat pulau, sementara Belanda sendiri bergerak antara Toboko dan Dufadufa. Daerah selebihnya dikuasai Kesultanan Ternate. Karena pasukan Belanda mendirikan posnya di Toboko, maka antara Kalumata-Toboko dijadikan daerah penyangga. Kontak senjata antara Spanyol dan Belanda di pulau Ternate hampir tidak pernah terjadi.

Serangan-serangan Belanda, dengan pertimbangan serdadu yang sedikit jumlahnya, dititikberatkan pada kawasan pulau-pulau di luar Ternate. Demikianlah, awal serangan terjadi pada 25 Juni 1608, ketika van Carden dengan 70 tentara menyerbu Makian dibantu sejumlah besar pasukan Ternate yang tidak terlatih baik. Makian berhasil diduduki. Tetapi, ketika pasukan Belanda kembali lagi ke sana pada 3 Agustus, van Carden yang memimpin pasukan koalisi itu malah tertangkap tentara Spanyol dan dibawa ke benteng Gamlamo. Ia baru dibebaskan beberapa hari kemudian, dan langsung berangkat ke Banten.

Pada 22 September 1609, Laksamana Hoen menggerakkan pasukan koalisi Belanda-Ternate menggempur sisa-sisa Portugis dan Spanyol di Tidore. Hoen membawa 2 *juanga* Ternate dengan pasukan mayoritas orang Ternate. Pasukan koalisi Spanyol-Tidore dapat menghalau para penyerang. Sebagian besar *juanga* berhasil ditenggelamkan, dan Hoen yang nyaris terbunuh mundur kembali ke Ternate.

Atas dorongan mangkubumi Hidayat, Hoen sekali lagi menyertai pasukan koalisi ke Bacan menyerbu ibukota Labuha. Tetapi, setelah terjadi dialog damai antara adik Sultan Bacan dengan Hoen, serangan batal dilakukan, walaupun pasukan Hoen sempat menakut-nakuti rakyat setempat. Sultan Bacan mengizinkan Hoen merenovasi benteng peninggalan Portugis di Bacan, yang oleh Hoen diganti namanya menjadi Barneveld.

Suatu perundingan yang diadakan kemudian antara Belanda-Ternate-Bacan berhasil membuahkan kesepakatan bahwa ketiganya akan hidup berdampingan secara damai dan akan berupaya mengusir Spanyol dari daerah mereka masing-masing. Usai penandatanganan, Hoen masih tetap berada di Bacan, karena disinyalir bahwa orang Spanyol masih sering datang ke sana dan rakyat Bacan masih mambantu mereka. Bahkan, garnisun Belanda sempat menangkap empat serdadu Spanyol yang kemudian dikirim ke Ternate.

Pelantikan Mudaffar

Pada 1610, dalam usia sangat muda (15 tahun), Mudaffar dilantik sebagai Sultan Ternate ke-9. Karena usia yang masih belia, ia belum dapat menjalankan kekuasaannya secara penuh. Menurut keputusan Dewan Kerajaan, ia harus didampingi sebuah komisi yang terdiri dari delapan orang (Komisi Tufkange), dan dipimpin seorang Belanda bernama Gerard van der Buis. Jogugu Hidayat dan Kapita Laut Kaicil Ali, termasuk ke dalam keanggotaan komisi ini.

Kehidupan pribadi Sultan Mudaffar sangat tercela. Ia adalah seorang pemadat. Orang-orang Cina memasukkan candu ke Ternate, dan karena pengaruh mereka Mudaffar menjadi penggunanya. Ketika permaisurinya menasehati agar kebiasaan buruk itu dihentikan, ia menikam

pemaisurinya dengan keris hingga tewas. Ia memerintahkan pelayannya membenamkan jenazah puteri Jailolo itu ke dasar laut. Selama berkuasa, Mudaffar juga tidak populer di kalangan rakyat. Lantaran takut dikhianati, ia lebih banyak menginap di benteng Oranje ketimbang di istananya.

Suatu pagi, komandan garnisun Belanda melaporkan bahwa sejumlah kapal, di antaranya enam fregat dan dua tongkang, yang membawa logistik untuk pasukan Spanyol telah tiba dari Manila dan tengah membongkar muatannya di pelabuhan Kastela, persis di depan benteng Gamlamo. Dua hari kemudian, tiba juga beberapa tongkang perbekalan militer, berikut 50 personil tentara Spanyol.

Pada Maret 1610, Don Jeronimo de Silva, Komandan Militer Spanyol di benteng Gamlamo, memerintahkan pasukannya menyerbu Bacan sebagai balasan atas penangkapan empat prajurit Spanyol di sana. Ibukota Labuha ditembaki kapal-kapal Spanyol. Hoen yang berada di Ternate segera mengirimkan pasukan untuk membantu Bacan menghalau pasukan penyerbu. Koalisi pasukan Belanda-Ternate-Bacan akhirnya memaksa pasukan Spanyol meninggalkan Bacan dan kembali ke benteng Gamlamo di Ternate. Pasukan koalisi ini juga berhasil memaksa Spanyol meninggalkan pulau Makian. Untuk memperkuat pertahanannya, Belanda lalu membangun tiga benteng di pulau itu.

Gagal menggempur Bacan, Spanyol mengalihkan perhatian ke Jailolo dan menyerbunya pada 1611. Serbuan ini berhasil, dan selama kurang lebih 9 tahun (1611-1620) Spanyol menguasai kerajaan itu. Akibat serbuan ini, Sultan Jailolo hijrah dan bermukim di Ternate. Ketika Spanyol meninggalkan Jailolo pada 1620, kerajaan itu jatuh ke tangan Ternate yang dibantu Belanda.

Baik sebelum maupun setelah penyerbuan Spanyol, masalah paling laten yang dihadapi Jailolo adalah merosotnya jumlah penduduk. Sejak Katarabumi berkuasa (1536-1550), Jailolo terlibat perang dengan Portugis – terutama di Morotia dan Morotai – yang ditutup dengan penyerbuan Portugis ke Jailolo pada 1551. Peperangan demi peperangan membuat penduduk Jailolo merosot dari segi kuantitasnya.

Setelah Ternate menguasai Jailolo, penduduk Moro dievakuasi ke Jailolo untuk mengatasi kekurangan penduduk. Sultan Hamzah mengevakuasi 800 orang dari kampung Cio, Sopi, Mira, dan Sakita di Morotai, sementara sebagian kecil lagi dievakuasi dari Mamuya, Samafo, Cawa, dan Tolo di Morotia. Sebagian besar pendatang baru ini ditempatkan di Jailolo dan sisanya di Dodinga. Orang-orang yang dievakuasi itu diizinkan memiliki *Sangaji* sendiri yang akan mengurus pemerintahan dan pemukimannya.

Pada April 1627, penguasa Belanda di Ternate dan Sultan Ternate sendiri mengerahkan pasukan ke Makian dan mengusir Spanyol dan sekutunya Tidore keluar dari pulau yang kaya rempah-rempah itu. Mula-mula Belanda melarang orang Tidore memasuki pulau itu, tetapi ketika larangan ini tidak diindahkan, Belanda – dengan bantuan Ternate – mulai bertindak. Akhirnya, orang Tidore dan Spanyol terusir dari Makian, dan Belanda mengukuhkan hak monopolinya atas pulau itu. Perang Makian ini merupakan perang terakhir yang diikuti Sultan Mudaffar, karena pada 16 Juni 1627 ia wafat dalam usia 32 tahun. Pada hari yang sama, Sultan Saidi, ayah Mudaffar, juga tutup usia di Manila.

Ternate di bawah Hamzah

Ketika Spanyol menyerbu Ternate dan mengasingkan Sultan Saidi beserta keluarganya ke Manila, terdapat seorang kemenakan Sultan – yakni Kaicil Hamzah – yang termasuk ke dalam rombongan tersebut. Ketika tersiar kabar kepada Gubernur Jendral Spanyol di Manila bahwa hidup Mudaffar tidak lama lagi, Hamzah diberangkatkan ke Ternate pada Januari 1627. Menurut skenario Spanyol, Hamzah adalah orang paling pas untuk menggantikan Mudaffar sebagai Sultan Ternate. Pada Februari 1627, Hamzah tiba di Ternate dan langsung ditempatkan di benteng Gamlamo. Sambil menunggu kematian Mudaffar, Hamzah dibina mental-spiritualnya. Pastor Don Pedro da Cunha, penasehat spiritual dan pembaptis Hamzah ketika beralih agama di Filipina, menyertainya ke Ternate dan tetap mendampinginya. Sebab, menurut da Cunha, “Hamzah adalah seorang Kristen terbaik dari Gamlamo.”

Hanya beberapa saat setelah Mudaffar tutup usia, Hamzah mendesak keluarga dan pejabat Kerajaan Ternate menobatkan dirinya sebagai pengganti almarhum Mudaffar. Tetapi, keluarga keraton keberatan. Alasannya, menurut tradisi dan adat istiadat Ternate, Kesultanan Islam Ternate mustahil diperintah seorang raja yang bukan Muslim, dan semua rakyat tahu bahwa Hamzah bukan lagi seorang Muslim.³³

Setelah keluarga keraton menolaknya, Hamzah berjanji ia siap kembali ke agama Islam. Di hadapan *kalem* (qadhi) dan keluarga istana, Hamzah mengucapkan dua kalimat *syahadat*. Dukungan terhadap Hamzah dari kalangan keluarga keraton dan para *bobato* datang dari dua saudaranya, masing-masing Jogugu dan Kapita Laut Ali serta Hukum Soasio. Tetapi, beberapa *bobato* dan *sangaji* serta penguasa Belanda, Gubernur Le Fabre, menganggap pelantikan Hamzah tidak masuk akal dan tidak sah karena pernah murtad dan tidak didukung rakyat banyak. Dalam proses pemilihan, hanya satu dari sembilan soa (*soa-sio*) yang berpartisipasi dalam pemilihan. *Sangaji* Makian, Gamkonora, dan Sahu, bahkan menolaknya.

Pendukung utama Hamzah, Hukum Soasio mencoba menakut-nakuti keluarga kerajaan dengan mengatakan kalau Hamzah tidak dipilih ia akan kembali ke Manila dan mengarahkan armada dan pasukan Spanyol menyerbu Ternate. Karena takut adanya penyerbuan seperti pada 1606 – sementara Belanda sendiri telah menunjukkan ketidakmampuannya mengenyahkan Spanyol dari Ternate – keluarga dan Dewan Kerajaan akhirnya menyetujui menaikkan Hamzah ke atas takhta kerajaan dengan syarat bahwa dukungan dari Belanda juga diperlukan. Hamzah mengirim utusannya ke benteng Oranje untuk meminta dukungan dengan janji bahwa selama menjadi sultan ia akan tetap loyal kepada VOC.

Sementara itu, penguasa Spanyol di Manila berharap bahwa Hamzah akan membantu Spanyol, dan itulah sebabnya Spanyol dan Misi Jesuit memberi dukungan bulat kepadanya. Spanyol yakin, sebagai seorang Kristen yang saleh Hamzah akan membantu mengonversi agama rakyatnya ke Kristen. Mereka juga bersedia membantu memecahkan masalah-masalah yang pelik dalam pemerintahannya, melalui kurir yang bisa dikirim “setiap hari” dari benteng Gamlamo. Hamzah, dengan demikian, dijagokan baik oleh VOC maupun Spanyol.

³³ Ketika diasingkan ke Manila, Hamzah adalah Muslim dan telah menikah dengan seorang puteri dari Jailolo. Tetapi, sementara berada dalam pengasingan di Manila, istrinya diceraikan. Ia kawin kembali dengan seorang perempuan Filipina. Untuk keperluan perkawinannya, Hamzah mengganti agamanya dari Islam ke Kristen dan dibaptis oleh Pastor da Cunha dengan nama baptis Don Pedro da Cunha. Nama baptis tersebut dipilih sebagai penghormatan kepada Gubernur Jendral Spanyol di Manila yang telah menaklukkan Ternate.

Pada 1627, Hamzah dilantik sebagai Sultan Ternate ke-7. Harapan da Cunha dan penguasa Spanyol kepada Hamzah ternyata berlebihan dan terlalu muluk. Begitu bertakhta, Hamzah putar haluan, dan dalam banyak hal mengabdikan pada kepentingan Belanda. Pada April 1628, misalnya, ia mengirim perintah kepada *Salahakan* Leliato di Ambon agar semua pejabat kesultanan di sana melarang rakyat menjual rempah-rempah, kecuali kepada VOC (Belanda): “Tidak satu pon rempah-rempah yang boleh dijual kepada para pedagang, selain kepada VOC”, demikian bunyi perintah Sultan Hamzah kepada *Salahakan* Leliato. Tetapi, surat perintah itu tidak ditaati dan Leliato melanggar dengan seenaknya. Gubernur Le Fabre menganggap surat perintah itu sebagai tindakan pura-pura Hamzah untuk menyenangkan Belanda, dan *Salahakan* Leliato dipandang sebagai pejabat “nakal,” karena pernah memprotes tindakan Gubernur.

Ekspedisi Kapita Laut Ali

Sejak naik takhta, Hamzah menghadapi pergolakan daerah-daerah seberang laut yang mulai membangkang otoritas Kesultanan Ternate. Di Banggai dan Buton, penyerbu-penyerbu Makassar mulai mengganggu. Demikian juga di Sula dan Seram, timbul pergolakan di sana sini. Pembangkangan terhadap perintah-perintah Sultan terjadi di Ambon dan kepulauan Hoamoal di Seram. Oleh sebab itu, untuk memulihkan situasi, Hamzah mengirimkan sebuah ekspedisi di bawah pimpinan Kapita Laut Ali. Dengan kekuatan 27 *juanga* yang mengangkut 1500 pasukan tempur, setengahnya adalah orang-orang Makian, Ali ditugaskan meredakan konflik dan pembangkangan di daerah-daerah taklukan Ternate.

Armada Ali mula-mula menuju Sula. Setelah usai menyelesaikan konflik antara rakyat Sula dengan *Salahakannya*, Ali bermaksud menuju Banggai. Karena satu dan lain pertimbangan, Ali membawa armadanya menuju Asahudi, sebuah kampung di pulau Seram. Dari sana ia menuju Ambon dengan membawa serta Kimalaha Luh, kemenakan Leliato. Ali membutuhkan waktu dua bulan untuk meredakan ketidakpuasan orang Ternate di sana, sekaligus memantau kinerja *Salahakan* Leliato dan para kimalaha berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap instruksi Hamzah agar tidak menjual cengkih selain kepada VOC. Selama dua bulan di Ambon, Ali dan pasukannya yang besar bermukim di benteng Victoria. Ali juga memantau pedagang Makassar yang bekerjasama dengan *salahakan* melakukan penyelundupan cengkih, terutama dari kepulauan Seram. VOC telah berkali-kali menyampaikan keluhan ini kepada Ternate.

Pada bulan Oktober tahun yang sama, Ali dan armadanya mendarat di Leitimor. Di depan orang-orang Makassar, Ali menyatakan bahwa mereka hendaknya tidak bermusuhan dengan warga setempat. Ali juga sempat bertemu dengan Lukaszoon, perwakilan VOC setempat. Dari sini Ali dan armadanya bertolak ke Luh. Kepada penduduk setempat Ali menghadiahkan uang sebanyak 2000 ringgit, sejumlah pakaian dan gong. Kemudian Ali memperbesar armadanya menjadi 30 *juanga*. Dengan armada sebesar itu Ali menuju Seram, lalu ke Banda untuk mengembalikan pelarian-pelarian pulau itu ke kampung halamannya. Setelah itu ia kembali lagi ke Ambon.

Sementara itu, tingkah polah Ali di Ambon mulai menyebalkan Sultan Hamzah, karena armadanya yang memakan biaya besar itu bekerja dengan hasil amat minim. Dari laporan-laporan yang diterima Hamzah, diketahui bahwa Ali melakukan banyak kesalahan. Kerjanya setiap hari bukan menertibkan para pejabat kesultanan, tetapi hanya mengobok-obok rakyat. Ali bahkan membiarkan pinisi Makassar dan perahu orang Jawa serta Melayu memasuki Lessidi di Kampelo, yang menurut ketentuan VOC merupakan kawasan terlarang bagi perahu-perahu pedagang.

Pada bulan Nopember 1629, Sultan Hamzah mengutus *Sangaji Kayu* ke Ambon dengan membawa perintah tertulis mengenai tugas-tugas Ali. Setelah bertemu dengan *Sangaji Kayu*, Ali segera bertolak dari Ambon menuju Manipa lalu ke Buru. Dari sana ia meneruskan pelayarannya ke Banggai setelah mampir di Waysama, Tomalu, dan Sula untuk memuat logistik. Dari Sula Ali berlayar ke Tobungku. Ali memergoki orang-orang Makassar yang selama ini memprovokasi rakyat setempat untuk membangkang terhadap Ternate. Ali berhasil menghalau mereka, dan di antaranya ada yang ditangkap serta dikirim ke Ternate sebagai tawanan. Dari Tombuku Ali meneruskan pelayarannya ke Buton – pulau yang selama ini menjadi surga infiltran Makassar, dan kekuasaan Kerajaan Ternate di sana hampir ludes. Untuk menertibkan dan memulihkan kembali otoritas Ternate, Ali sempat berada di pulau itu selama setahun, hingga 1632.

Selama di Buton, Ali bertemu dengan sebuah kapal dagang VOC pimpinan Antonie Caan. Ali berbicara dengan Caan dan menyerahkan sepucuk surat untuk Gubernur Jendral Spix, yang pernah dikenalnya sewaktu masih menjabat Gubernur di Ambon. Dalam surat itu, Ali memohon agar Gubernur Jendral memberi peringatan kepada Raja Makassar untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan secara damai kepada Kesultanan Ternate beberapa daerah di Buton yang dicaploknya, atau Ali akan mengerahkan pasukan untuk merebutnya secara paksa.

Yang dimaksud Ali dengan “beberapa daerah” bukan hanya meliputi seluruh pantai timur Sulawesi, tetapi mencakup juga pulau-pulau Pangesane, Selayar, dan pulau-pulau di sekitarnya, yang pada masa Babullah telah menjadi daerah aneksasi Kesultanan Ternate. Ali berhasil menertibkan Banggai dan Tobungku. Tetapi, untuk pulau Buton dan “daerah-daerah sekutunya,” Ali hanya bisa melakukan penertiban yang semu.

Ketika akan kembali ke Ternate, Ali jatuh sakit dan meninggal di Buton. Sumber-sumber sejarah mengatakan Ali meninggal diracun Raja Goa, karena berhasil menyingkapkan kontrol Goa atas Tobungku. Sumber-sumber Ternate menyatakan Ali gugur dalam suatu pertempuran sengit melawan tentara Goa yang akan mencoba merebut Buton. Tetapi setelah Ali wafat, orang-orang Makassar kembali melakukan infiltrasi dan provokasi, lantaran kekuasaan Ternate atas daerah-daerah itu tidak efektif. Selayar misalnya, beberapa waktu kemudian “diambil” Belanda dengan alasan pemerintahan Ternate atas pulau itu tidak efisien.

Pemberontakan Salahakan Luhu dan Merosotnya Popularitas Hamzah

Penyelesaian konflik di kepulauan Ambon, Seram dan sekitarnya yang tidak tuntas serta pergolakan di wilayah-wilayah pantai timur Sulawesi yang tidak mampu ditangani Hamzah, dan evakuasi penduduk Morotia serta Loloda secara besar-besaran, telah membawa pengaruh buruk bagi pemerintahan Hamzah. Para pemimpin Ternate mulai mengeritik pemerintahannya sebagai pemerintahan yang buruk. Dalam banyak hal ia berlaku otoriter dan mengambil keputusan tanpa konsultasi dengan para *bobato*. Para *Sangaji* berpengaruh, seperti *Sangaji Loloda*, Gamkonora, Sahu, Jailolo, dan Makian, mulai merasa kurang “sreg” dengan berbagai tindakan Hamzah yang dianggap otoriter.

Pada bulan Januari 1634, Kaicil Sibori Laksamana dikirim Hamzah ke Ambon sebagai utusan resmi kesultanan untuk menyampaikan pesan kepada Gubernur VOC di sana. Dalam pesan itu disebutkan bahwa Sultan Hamzah mengutus seorang pejabat tinggi urusan keuangan yang menjabat sebagai Sadaha untuk berunding dengan Gubernur guna menyelesaikan berbagai hal seputar pelanggaran yang dilakukan pedagang-pedagang Jawa, Makassar, dan Melayu serta pedagang asing lainnya yang dikeluhkan VOC. Sadaha tersebut telah tiba di Buru dan segera ke

Ambon. Ia akan didampingi *Salahakan* Lebe dan Leliato, serta Kimalaha Fakiri dari Buru. Tetapi, pertemuan dengan utusan Sultan ini tidak membawa hasil maksimal seperti yang diinginkan Belanda.

Sementara itu, pada 1641, Luhu menggempur pos-pos VOC di Hoamoal, Seram, dengan bantuan sekitar 1200 orang Makassar. Upaya VOC menahan gempuran Luhu tidak berhasil. Orang-orang Makassar membantu Luhu karena kepentingan untuk menerobos barekade VOC atas pusat-pusat produksi rempah-rempah dan mematahkan monopoli. Di samping orang Makassar, Luhu juga mendapat bantuan seorang kapita Hitu, Kakiali. Luhu kemudian menyerang berbagai pos VOC di Maluku Tengah.

Sultan Hamzah, setelah menerima laporan VOC tentang serangan-serangan Luhu, menyurat kepada Gubernur Ambon, Demmer, dan meminta agar Luhu serta keluarganya dibunuh bila menyerah atau tertangkap. Alasannya, tindakan *Salahakan* Luhu itu seakan-akan telah menyerahkan daerahnya kepada Makassar tanpa izin Sultan. Sultan Hamzah juga mengirim surat kepada para *Sangaji* di Hoamoal dan sekitarnya yang berisi perintah agar mereka tidak berbuat seperti yang dilakukan *Salahakan* Luhu. Yang dilakukan Hamzah dengan perintah mengeksekusi *Salahakan* Luhu sebenarnya bukan untuk menegakkan hukum, tetapi semata-mata untuk melindungi kepentingan monopoli VOC dan untuk memenuhi keinginan Kompeni yang telah lama menghendaki agar *Salahakan* Luhu yang ‘nakal’ itu segera diganti.

Pada 11 Februari 1643, Hamzah kembali menyurati Gubernur Ambon dan menyatakan bahwa *Salahakan* dan keluarganya, berikut Kaicil Laksamana, tidak setia lagi kepada sultan. Karenanya, ia meminta VOC menghukum mati mereka dan membantu *Salahakan* Majira yang diangkat untuk menggantikan Luhu. Surat Hamzah ini bersifat rahasia, dan hanya Gubernur Ambon sendiri yang mengetahui isinya.

Pada 14 Mei 1643, sebuah rapat diadakan untuk membahas surat Sultan Hamzah. Rapat ini dihadiri para petinggi Belanda dan Laksamana VOC Coen serta *Salahakan* Luhu. Usai rapat, *Salahakan* Luhu dan saudara tirinya, Pattiwani alias Akiwani, ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Pada 3 Juni, giliran ibu, adik perempuan, istri, dan anak perempuan Luhu serta istri Akiwani ditangkap, berikut sejumlah budak laki-laki dan perempuan. Mereka dibawa ke benteng Victoria. Pengadilan memutuskan mereka bersalah karena mencetuskan dan memimpin pemberontakan. Pada tanggal 16 Juni, mereka dihukum gantung sampai mati di depan umum di halaman depan benteng Victoria. Seorang anak perempuan Luhu yang masih remaja sempat disekap selama lima tahun di Kampalo dan dijadikan gundik Sultan Hamzah. Anak ini lalu dikirim ke Ternate untuk menjalani profesi yang sama.

Setelah Luhu dieksekusi, giliran pengikutnya di daerah mulai dibersihkan. Tulukabessy dan kakak ipar Luhu, Kakiali, yang meneruskan perlawanan, mendapat giliran dikejar dan ditangkap VOC. Dalam salah satu pertempuran, Kapita Kakiali tewas dibunuh orang sewaan VOC. Benteng pertahanan Luhu di Hitu digempur dan diduduki, tetapi pemberontakan baru berakhir tiga tahun kemudian (1646), setelah pengikut-pengikut Luhu dan para pedagang Makassar disapu bersih serta diusir dari kepulauan Ambon dan Seram. Setelah gerakan Luhu ditumpas, VOC melarang pedagang Makassar masuk ke seluruh perairan Maluku.

Eksekusi *Salahakan* Luhu dan keluarga berikut pemimpin-pemimpin pemberontak lainnya bukanlah kehendak VOC, tetapi semata-mata kehendak pribadi Sultan Hamzah. Adalah Sultan Hamzah yang memutuskan bersalahnya Luhu karena tidak setia kepada Sultan. Motif perlawanan Luhu bukan masalah setia atau tidak, tetapi semata-mata didorong rasa ketidakadilan

yang dilakukan Belanda dengan sistem monopolinya yang didukung kuat oleh Sultan Hamzah. Hamzah jelas keliru ketika memutuskan bahwa Luhu adalah pengkhianat. Menurut sumber-sumber yang sangat dekat dengan Sultan Hamzah, setelah eksekusi selesai, Hamzah menyesali keputusan yang diambilnya. Kematian Luhu menambah kemerosotan pamor Hamzah.

Pemberontakan Majira

Sebagai pengganti Luhu, Hamzah mengangkat Majira, seorang klan Tomagola kelahiran Hoamoal dan mantan Kapita setempat. Pada bulan Agustus 1643, usai eksekusi Luhu dan keluarganya, Majira dan Laksamana Coen, panglima pasukan VOC di Ambon, bertolak ke Ternate dengan menggunakan kapal Frederik Hendrik milik VOC. Majira melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sultan Hamzah sejak diangkat menjadi *Salahakan*.

Pengangkatan Majira sudah lama diinginkan VOC, setelah Luhu dipandang sebagai *Salahakan* yang “nakal.” Gubernur Ambon berharap dapat mendiktekan semua kehendaknya, karena Majira dipandang sebagai tokoh yang dapat bekerjasama dengan Belanda dan “mudah diperintah”. Di akhir bulan Agustus, Majira meninggalkan Ternate menuju Hila, negeri asal Kapita Kakiali, kakak ipar Luhu. Dari Hila, Majira menuju Ambon untuk memperkenalkan diri sebagai *Salahakan* baru kepada gubernur Ambon.

Laksamana Coen kembali menerima surat rahasia dari Sultan Hamzah yang dibawa oleh Majira. Isinya menyatakan bahwa Kaicil Laksamana dan Himam, seorang Imam dari Kampelo berselisih dengan Leliato dan mulai saling mengancam untuk membunuh. Akibat pertentangan ini, Leliato menghukum beberapa pejabat lokal seperti Dermahu, putera Pati Kampelo, seorang khatib bernama Lamuro dan Pati negeri Luhu bernama Pattilika. Orang-orang tersebut adalah pejabat penting kesultanan yang semuanya tewas dieksekusi Leliato pada 7 September 1643. Akibatnya, Leliato ditangkap dan diasingkan ke Batavia dan meninggal di sana di atas tiang gantung.

Empat tahun setelah menjabat *salahakan*, Majira melihat bahwa politik monopoli VOC telah membawa rakyat ke taraf kemiskinan yang absolut. Sejak dilarangnya orang Makassar, Jawa, dan Melayu masuk berdagang, harga rempah-rempah merosot tajam. Sementara Sultan Hamzah sendiri mendukung hak-hak monopoli VOC itu secara teguh. Ini berarti Hamzah lebih mementingkan kepentingan Belanda dari pada rakyatnya sendiri. Bahkan, karena kurang percaya kepada *Salahakan* yang baru, Hamzah mengalihkan kekuasaannya atas kepulauan Ambon dan Hitu kepada Belanda (VOC) pada 1644, dengan alasan untuk mencegah penyelundupan. Sebagai balas budi, Belanda membayar 73.000 gulden kepada Kerajaan Ternate untuk pengalihan tersebut, dengan rincian: 56.875 gulden untuk Hamzah pribadi, dan sisanya untuk kas Kerajaan. Di samping jumlah uang yang menggiurkan, Hamzah juga menerima hadiah pakaian, gong, beragam ornamen terbuat dari emas, sebuah meriam kecil dan beberapa pucuk senjata.

Pelepasan kekuasaan atas kepulauan Ambon dan Hitu telah menimbulkan kemarahan klan Tomagola dan petinggi kerajaan lainnya. Mereka memandang kebijakan tersebut sebagai tindakan yang tidak pantas dilakukan Sultan Hamzah. *Salahakan* Majira juga sangat menentang keputusan itu, karena dengan demikian daerah kewenangannya berkurang. Majira pun mulai memperlihatkan tantangannya kepada Hamzah. Sejumlah perintah Sultan yang berhubungan dengan hak monopoli VOC tidak dijalankannya secara sungguh-sungguh.

Tersiar berita yang sampai kepada Majira bahwa di Ternate sejumlah hukum dan *bobato* kesultanan mulai bertengkar dan dukungan terhadap Hamzah merosot drastis. Para *bobato* yang menentang Sultan mendapat dukungan rakyat yang makin meluas, dan unsur yang menentang Sultan mulai tampil secara terang-terangan. Suatu pemberontakan terhadap Hamzah yang mulai sakit-sakitan pun berkobar.

Selama masa pemerintahannya, Hamzah menghabiskan waktu dan energinya untuk mengabdikan pada kepentingan VOC. Sementara upayanya membenahi Hoamoal dan Hitu tidak berhasil. Kegagalan mengelola sepenggal daerah itu saja telah menunjukkan betapa ketidakmampuannya. Daerah-daerah seberang lautan lainnya yang juga larut dalam pergolakan – seperti Gorontalo, Sula, dan Taliabu serta daerah-daerah di pantai timur Sulawesi – tidak disentuhnya sama sekali.

Pada bulan Mei 1648, Hamzah wafat dan meninggalkan warisan politik dan konflik di daerah seberang laut yang akan ditangani penggantinya. Dengan penyerahan Kepulauan Ambon dan Hitu kepada Belanda, Hamzah menciptakan sebuah preseden buruk bagi daerah-daerah yang bila tak mampu diurus akan diserahkan begitu saja kepada Belanda. Hamzah wafat dengan meninggalkan hutang 12.000 ringgit kepada VOC. Ia kemudian digantikan oleh Mandar Syah sebagai Sultan Ternate ke-8 (1648-1675).

Pandangan VOC tentang *Salahakan* Majira sebagai tokoh yang dapat diperalat dan lemah ternyata keliru. Majira bukanlah tipe orang seperti itu. Pada 1651, Majira mulai mengangkat senjata dan menyerang VOC di Hoamoal. Para pengikutnya menyerbu dan menghancurkan semua benteng VOC yang ada di Maluku Tengah dan hanya menyisakan benteng di Ambon dan Lease (Saparua). De Vlaming, yang oleh Belanda diangkat sebagai Panglima Militer untuk Maluku dan Maluku Tengah, mulai bergerak menumpas pemberontakan Majira.

Niat Majira menentang VOC sebenarnya telah muncul ketika mulai menjabat sebagai *Salahakan*. Hal ini tercermin dalam sejumlah tindakannya seperti:

1. Perintah Sultan untuk segera memulangkan orang-orang Ternate di Ambon dan Maluku Tengah selalu ditunda-tunda Majira dengan berbagai alasan. Penundaan ini terkait dengan upayanya untuk membina mereka agar menyertainya dalam pemberontakan yang akan dicetuskannya.
2. Perintah-perintah Sultan Ternate, terutama pada masa Hamzah, yang selalu menguntungkan VOC dan merugikan rakyat, tidak pernah dilaksanakan Majira secara utuh. Bahkan, ada yang sama sekali diabaikan.

Dalam aksi-aksi penyerbuannya terhadap benteng-benteng VOC, Majira didukung Jan Pais, Raja Negeri Hative, Tawari, dan Hukunalo. Dengan dukungan para penguasa lokal ini, Majira berhasil menduduki Ambalau, Manipa, dan Lasidi. Di tempat-tempat tersebut, Majira menyita seluruh asset VOC.

Untuk meredam Majira, de Vlaming mengutus Simon Cos, seorang Belanda yang menjadi sahabat Majira, untuk tatap muka dan berunding langsung dengan Majira serta berbicara secara pribadi dengannya di Luhu. Dalam pertemuan itu, Cos minta agar Majira memulihkan kesetiiaannya kepada Sultan Ternate Mandar Syah. Sementara Cos dan Majira berunding, sejumlah 200 tentara VOC mengepung kediaman Majira. Seorang pembantu Letnan bernama Helwig menerobos masuk dan duduk dekat Majira untuk mengintimidasinya. *Salahakan* Majira mencabut kerisnya dan berteriak dalam bahasa Ternate: “Hari ini perjalanan tidak dapat

diteruskan!” Seruan ini oleh Belanda diartikan sebagai: “Sejak hari ini perlawanan terhadap VOC telah berakhir.” Tetapi, ini adalah siasat Majira karena, setelah itu, Majira makin tegar melawan Belanda, walaupun dalam posisi yang makin tidak menguntungkan.

Cos berpelukan dengan Majira dan pamit kembali ke Ambon. Pasukan Belanda yang mengepung rumah Majira diperintahkan kembali ke benteng Victoria di Ambon. Pada 10 maret 1651, Majira mengungsi ke hulu sungai Kabula, kemudian ke negeri Luki. Pengikut-pengikut setianya masih melanjutkan perlawanan dengan membunuh orang-orang VOC di Loala, Nusatelo, Hatuaha, Asahudi, Buano, Ambalau, dan Manipa. Kimalaha Hasi dari Buru bahkan turut bergabung dalam aksi-aksi penyerangan secara sporadis. Pemberontakan Majira makin meluas, sementara Majira sendiri telah dipecat Mandar Syah.

Pada 4 Mei 1651, Tamim Amsara – paman Sultan Mandar Syah dari pihak ibunya – tiba di Ambon sebagai utusan resmi Sultan. Tugasnya adalah mengambil alih wewenang dan tugas *Salahakan* Majira. Sementara Majira sendiri telah mengundurkan diri bersama pasukannya ke selatan pulau Seram dan melanjutkan perlawanan. Upaya Kompeni menguber Majira terus berlangsung. Negeri Luki, yang dipertahankan dengan kuat oleh pasukan Majira, diserang dan akhirnya jatuh ke tangan VOC. Tetapi, Majira tidak ditemukan di situ. Ia telah menyingkir ke pegunungan Hulong dan Erang.

Setelah Luki ditaklukkan, pasukan Belanda menyerang Hoamoal, Kelang, dan Manipa. Pasukan Majira berlindung di gunung-gunung di sekitar Hitu Besar dan membangun pertahanan di sana. Setelah Hoamoal, Kelang, dan Manipa jatuh, posisi Majira mulai lemah, terutama karena banyak personilnya yang tewas dan tertangkap. Majira dengan cepat betolak ke Makassar mencari bantuan, terutama kepada para saudagar Makassar yang selama ini telah dibantunya. Majira berhasil bertemu dengan Raja Makassar. Tetapi, Raja Makassar menasehatinya agar tidak berupaya merebut kembali Hoamoal dan Hitu, karena Belanda telah memperkuat pertahanannya di sana.

Sementara itu Belanda menuduh Mandar Syah tidak melakukan upaya apapun untuk menghentikan pemberontakan Majira, sehingga Belanda memutuskan menyelesaikannya sendiri. Pada 1656, ketika Simon Cos diangkat menjadi Gubernur dengan tujuan mengakhiri pemberontakan Majira, ia mengundang Raja Makassar – yang selama ini membantu Majira – untuk berunding. Dalam perundingan itu disepakati:

1. Semua tahanan orang Makassar akan dibebaskan dalam waktu singkat. Bantuan Makassar terhadap Majira dihentikan.
2. Orang Ambon yang menjadi pengikut Majira akan diizinkan pergi ke mana saja.
3. Setelah dibebaskan, orang-orang Makassar akan meninggalkan Ambon dan pindah ke daerah lain di luar Maluku.
4. Orang-orang Makassar tidak dibolehkan lagi membeli rempah-rempah dan dilarang mengirimkan perahu mereka beroperasi di wilayah Maluku.

Pada tahun ini juga (1656), Majira bersama saudara tirinya, Labiji, ditangkap di Makassar dan diajukan ke pengadilan. Pada akhir tahun itu, keduanya diputuskan bersalah karena memberontak dan dijatuhi hukuman mati. Ketika dijenguk Kaicil Kalamata pada 17 januari 1657, Majira tengah menunggu eksekusi di penjara. Majira adalah *Salahakan* kedua dari klan Tomagola yang memberontak terhadap Belanda di Maluku Tengah, setelah *Salahakan* Luhu.

Mandar Syah dan Ternate

Pada 6 Juni 1648, Mandar Syah dilantik sebagai Sultan Ternate ke-11 menggantikan Hamzah. Mandar Syah adalah putera tertua Mudaffar,³⁴ dan merupakan tokoh yang tidak populer di kalangan rakyat maupun *bobato*. Naiknya Mandar Syah ke atas takhta Kerajaan Ternate semata-mata karena dukungan kuat yang diberikan Belanda. Dalam pandangan keluarga kerajaan, takhta kesultanan lebih pantas diberikan kepada Kaicil Manila atau Kalamata. Tetapi, Mandar Syah adalah seorang yang cerdas dan tahu mengambil hati penguasa Belanda.

Salah satu warisan besar yang ditinggalkan Sultan Hamzah adalah pergolakan yang terjadi di daerah-daerah seberang laut (daerah taklukan), baik di Maluku Tengah maupun di pantai timur Sulawesi, dan Sulawesi Utara. Pada bulan September 1648, misalnya, bentrokan terjadi antar orang-orang Ternate dan Luki di Ambon, yang dipicu oleh perseteruan perempuan-perempuan kedua belah pihak. *Salahakan* Majira tidak berhasil menyelesaikan kasus ini. Dengan menerjunkan tentara, penguasa Belanda di Ambon dapat menuntaskannya.

Pada bulan Juni 1650, Mandar Syah yang baru 2 tahun berkuasa, menyurat kepada Gubernur Ambon yang berisikan kesediaannya melepaskan beberapa negeri di Seram – seperti Kaibobo, Elepauti, Amahai, dan Makariki – kepada VOC. Gubernur Ambon sangat menghargai kebijakan ini, tetapi di Ternate sendiri muncul reaksi keras, karena Mandar Syah bertindak secara otoriter dan mengambil keputusan tanpa sepengetahuan para hukum dan *bobato*. Sejumlah petinggi kerajaan dan keluarga istana – seperti Jogugu Kaicil Musa, Kapita Laut Kaicil Saidi dan kalangan bangsawan Tomagola, di antaranya Marafaula, Hukum Tua Laulata dan *Salahakan* Sula Terbilo, termasuk *Salahakan* Majira dan adik Sultan Mandar Syah sendiri, Kaicil Manila – menolak kebijakan tersebut.

Penolakan ini telah menimbulkan ketegangan. Sementara rakyat Ternate sendiri berada di belakang para petinggi dan keluarga kerajaan, di kalangan oposan, bahkan muncul gagasan untuk menobatkan Kaicil Manila, setelah Mandar Syah didepak. Agitasi dan provokasi telah menimbulkan rasa tidak puas di kalangan rakyat yang semakin meluas. Akhirnya, sebuah pemberontakan dalam skala kecil meletus. Mandar Syah bersama pemaisuri dan anak-anaknya melarikan diri dan minta perlindungan kepada Belanda. Ia ditempatkan di dalam benteng Oranje yang dikawal sekitar 100 orang. Pengawal yang demikian banyak menimbulkan kesulitan bagi komandan benteng Oranje dalam memberikan makan dan fasilitas lainnya. Yang sangat menjengkelkan petinggi VOC dalam benteng, ialah tabiat para pengawal Mandar Syah yang suka “mengambil” barang penghuni benteng lainnya.

Gubernur Belanda di Ternate melaporkan peristiwa pelarian Mandar Syah itu ke Batavia, dan Gubernur Jendral memerintahkan Panglima Militer VOC di Ambon, Arnold de Vlaming, untuk menyelesaikannya. De Vlaming tiba di Ternate dengan sebuah kapal yang penuh tentara. Setelah menggertak para oposan Mandar Syah, de Vlaming dapat memadamkan pemberontakan itu sebelum menjalar ke wilayah lain. Para *bobato* dan keluarga kerajaan dapat dijinakkan dan kembali mengakui otoritas Mandar Syah.

Sejarah pemerintahan Mandar Syah, adalah sejarah seorang raja yang kehilangan kebebasan dan keberanian. Dalam banyak hal, Mandar Syah sangat bergantung pada bantuan dan

³⁴ Sumber lain menyebutkan, Mandar Syah adalah putera tertua Hamzah dan dinobatkan pada 19 Juni 1648, Lihat: Andaya p.163.

kemauan baik pemerintah Belanda, sehingga pemerintah kolonial ini dengan seenaknya mengatur segala sesuatu sesuai kepentingannya. Itulah sebabnya VOC selalu menjaga hubungan baik dan kerjasama dengan Mandar Syah. Yang paling mencolok dari ketergantungan Mandar Syah kepada VOC adalah caranya menyelesaikan kericuhan yang terjadi di daerah seberang laut dengan menyerahkan kendali kekuasaan di wilayah itu kepada VOC.

Hongi Tochten dan Eradikasi Pohon Cengkih

Mulai 1652 harga rempah-rempah di pasar internasional mengalami penurunan tajam. Untuk mendongkrak harganya, produksi harus dikurangi dan pohon-pohon cengkih harus ditebang. Pohon-pohon yang akan ditebang adalah yang terdapat di Maluku, kepulauan Seram dan Buru yang selama ini selalu diganggu para penyelundup dan hak-hak monopoli VOC seringkali diterobos. Yang tidak dikenakan eradikasi hanyalah pohon-pohon cengkih yang tumbuh di pulau Ambon dan Seram.

Untuk menjalankan rencana pendongkrakan harga cengkih, VOC berunding dengan Mandar Syah. Pada awal 1652, sebuah perjanjian berhasil disepakati yang berisi klausula bahwa Mandar Syah mengizinkan VOC melakukan eradikasi pohon cengkih, dan sebagai kompensasinya Mandar Syah akan menerima *recognitie penningen* (pembayaran untuk suatu pelayanan yang pasti) yang besarnya disepakati,³⁵ sementara rakyat pemilik pohon cengkih yang ditebang memperoleh ganti rugi amat kecil.

Kebijakan eradikasi pohon cengkih mempunyai akibat luas pada rakyat di pulau-pulau penghasil utama cengkih, seperti di Moti, Makian, Bacan, Ternate, dan Tidore. Di daerah-daerah ini mulai timbul apatisme. Rakyat Makian mengganti pohon-pohon cengkih mereka yang ditebang dengan kenari. Para *bobato* yang juga pemilik pohon-pohon cengkih yang selama ini menjual hasilnya sendiri, kini ditugaskan berlayar dari pulau ke pulau mengawasi penebangan pohon-pohon cengkih (*hongt tochten*). Mereka bisa disalahkan bila ada pohon cengkih yang tidak ditebang.

Selain memperoleh *recognitie penningen*, Sultan Mandar Syah juga memperoleh bonus berupa bahan pakaian dan perhiasan yang mahal. Sementara *recognitie penningen* yang semestinya diterima para *bobato* secara tunai, diganti Sultan atau petinggi istana dengan pemberian pakaian model India, perhiasan dan barang pecah belah lain yang harganya jauh di bawah jumlah yang semestinya diterima. Pendapatan para *Bobato* sebelum dan sesudah penebangan pohon-pohon cengkih menjadi amat merosot. Mereka lebih banyak bergantung pada Sultan dan Kerajaan.

Pada bulan Nopember 1651, de Vlamming tiba di Ternate dan mengajak Mandar Syah beserta sejumlah petinggi kesultanan ke Batavia. Rombongan ini tiba pada bulan Desember tahun itu juga di Batavia. Karena kunjungan Mandar Syah ini adalah yang pertama, ia disambut penuh kehormatan. Mandar Syah memperoleh penghormatan militer ketika memasuki gerbang benteng Batavia. Dengan didampingi Kaicil Kalamata, Mandar Syah kemudian berunding dengan Gubernur Jendral VOC, Karel Reinierszoon, dan anggota Dewan Hindia.

Pada 31 Januari 1652, suatu persetujuan ditandatangani antara Ternate dan VOC, yang kandungan pokoknya dapat dikemukakan sebagai berikut:

³⁵ Lihat butir 3 isi perjanjian 31 Januari 1652 di bawah.

1. Kesultanan Ternate tidak boleh lagi mengangkat *Salahakan* baru untuk kawasan Hoamoal, dan sejak perjanjian ini ditandatangani, wilayah tersebut langsung berada di bawah pemerintahan VOC di Ambon.
2. Sultan Ternate memberi izin kepada VOC untuk menebang semua pohon cengkih yang terdapat dalam wilayah kesultanan Ternate, termasuk di Hoamoal dan pulau-pulau sekitarnya.
3. VOC akan membayar ganti rugi setiap tahun kepada Sultan dan pejabat-pejabat kesultanan Ternate, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Untuk Sultan: 2000 ringgit;
 - b. Kaicil Kalamata: 500 ringgit;
 - c. Para pembesar kesultanan sebesar 1500 ringgit (dibagi rata di antara mereka); dan
 - d. Para *sangaji* Makian sebesar 500 ringgit (dibagi rata di antara mereka).
4. Kompeni akan melakukan pelayaran untuk menebang pohon-pohon cengkih, dan sebagai ganti rugi Kesultanan Ternate akan memperoleh 12.000 ringgit tiap tahun
5. Pulau Moya dan Tofure akan dikembalikan kepada Kesultanan Ternate.

Penandatanganan perjanjian ini dari pihak Ternate adalah Sultan Mandar Syah, *Sangaji* Malayu Tamim Amsara, dan perwakilan Makian, masing-masing *Sangaji* Tahane oleh Tomi, *Sangaji* Moti oleh Tulaba, dan *Sangaji* Dowora oleh Jani Sopi Sawahi. Dari pihak Belanda (VOC) adalah Yan Maatsuiker, Gerard Demmer, Carel Haitsink, dan de Vlaming. Sementara dari Dewan Hindia adalah Cornelis Caesar dan Willem Verstigen.

Pada 8 Februari 1652, de Vlaming dan Mandar Syah serta rombongan *sangajinya* bertolak ke Ambon dengan sebuah armada yang terdiri dari 10 kapal. Armada singgah di Buton untuk mencari informasi tentang orang Makassar yang masih beroperasi di Buru. Dari berbagai laporan, diperoleh keterangan bahwa orang-orang Makassar masih meneruskan operasi mereka meskipun secara sembunyi-sembunyi. Dalam bulan Nopember tahun sebelumnya, orang-orang Ambalau telah menyerang konsentrasi-konsentrasi VOC, terutama di Buru, dengan dibantu orang Makassar. Pemimpin Ambon, Rijali, bahkan mengirim Tersina dan Limayau beserta sejumlah kora-kora ke pulau Buru.

Pada 1652 ini, Mandar Syah selain menandatangani perjanjian eradikasi, juga, menurunkan Kaicil Kalamata dari takhta Jailolo, sekembali dari Batavia. Kalamata sebelumnya diangkat Mandar Syah sebagai Raja Jailolo melalui perkawinan politik dengan tujuan untuk memantapkan aneksasi Ternate atas Jailolo yang dilakukan dengan bantuan VOC. Ternyata Kalamata hanya mampu bertahan selama 2 bulan.

Lepasnya Buton dari Ternate

Sementara itu, kekuasaan Ternate atas pulau Buton mulai goyah. Kapita laut Saidi, yang dengan susah payah melindungi pulau ini dari serangan Goa, tidak mampu lagi mempertahankannya. Ia mengusulkan agar Mandar Syah meminta bantuan VOC untuk mencegah jatuhnya Buton ke tangan Goa. Tetapi, permintaan tersebut ditolak Mandar Syah karena percaya bahwa pengaruh dan wibawanya atas rakyat Buton masih kuat. Ternyata, pengaruh dan wibawanya sudah jauh merosot dan ia tidak populer lagi di mata rakyat Buton. Untuk

mempererat hubungan Mandar Syah dengan rakyat Buton, ia menikahi puteri almarhum Raja Buton. Namun, langkah ini tidak banyak menolong.

Orang-orang Makassar (Goa) mulai menyerang pulau-pulau di sekitar Buton. Kapita Saidi dengan susah payah mencoba menghalau serangan itu, tetapi tanpa hasil lantaran rakyat Buton membantu kaum penyerang. Sementara itu, Kapita Laut Saidi sekali lagi menggalang pasukannya untuk melindungi dan mempertahankan Buton yang makin kritis. Namun, semua upaya itu tampak sia-sia. Mandar Syah mencoba melirik Kompeni setelah kembali ke Ambon dan berhasil. Dengan kapal *Zas van Gent*, de Vlaming dan Mandar Syah beserta Kalamata kembali ke Buton.

Sesampai di Buton mereka melihat kenyataan bahwa Raja Buton telah mengkhianati Mandar Syah. Ia telah menjalin persekutuan dengan Raja Goa (Makassar) dan pasukan mereka telah menceraiberaikan pasukan Kapita Laut Saidi. Melihat kenyataan itu, de Vlaming tidak dapat berbuat apapun dan meneruskan perjalanan ke Makassar. Ia meninggalkan Mandar Syah dan Kalamata di Buton. Mandar Syah lalu mengumpulkan sisa-sisa petinggi Buton yang masih setia kepadanya dan sejumlah rakyat yang masih bersimpati.

Dari jajaran petinggi Buton hadir antara lain Hukum Rau dan Lasinuru. Mandar Syah meminta agar para petinggi dan rakyat Buton mendobrak kepungan Makassar. Tetapi, semuanya sudah terlambat. Kejatuhan Buton ke tangan pasukan Goa hanya tinggal menunggu waktu. Mandar Syah terpaksa kembali ke Ternate dan membiarkan Kapita Laut Saidi beserta pasukannya untuk bertahan, sekalipun tahu bahwa Buton akan jatuh. Hanya beberapa hari setelah kepergian Mandar Syah, kapita Laut Saidi menyerah kepada pasukan Goa.

Dengan demikian, berakhirilah kekuasaan Ternate atas Buton selama lebih dari 100 tahun. Saidi dan pasukannya mengundurkan diri ke Tobungku, dan dalam perjalanannya mencoba menyerbu dan merebut desa Tiboro di barat laut Pangasena. Tetapi, rakyat Tiboro cukup berani menghadang penyerbuan Saidi. Setelah mendudukinya sebentar, Saidi meneruskan perjalanannya ke Tobungku, sebuah daerah taklukan Ternate yang lain di pantai timur Sulawesi Tengah.

Reaksi terhadap Eradikasi Cengkih

Hasil perundingan Ternate dengan Gubernur Jendral VOC di Batavia yang dituangkan dalam pesetujuan tanggal 31 Januari 1652 tentang eradikasi pohon-pohon cengkih, ditolak oleh beberapa *Sangaji* Halmahera Utara sepanjang yang menyangkut daerah mereka. Para *Sangaji* yang menolak cukup banyak. Alasan penolakannya sederhana: mereka tidak dilibatkan dalam perundingan yang menghasilkan persetujuan itu. Mereka menuntut agar suatu perundingan bilateral yang menyangkut daerah mereka kembali dibuka dan pesertanya cukup antar para *Sangaji* itu dengan VOC, tanpa perlu melibatkan Sultan Ternate.

VOC terpaksa memenuhi tuntutan para *Sangaji* itu dan perundingan dilakukan langsung di Halmahera Utara. Para *Sangaji* yang mengambil bagian dalam perundingan itu adalah *Sangaji* Mamuya, Samafo, Kimalaha Cawu, *Sangaji* Tolo, Rao, Sopi, Mira, Sakita, Tohowafe, dan Jontolo. Sementara itu, para pemuka masyarakat Makian juga mempertanyakan hal serupa. Ketika Mandar Syah dan Arnold de Vlaming singgah sebentar di Makian dalam pelayaran dari Ambon ke Ternate, para pemuka pulau penghasil cengkih terbesar itu mendatangi Mandar Syah dan de Vlaming untuk meminta penjelasan lebih rinci tentang ganti rugi atas penebangan pohon cengkih mereka. Baik Mandar Syah maupun de Vlaming mengundang mereka ke benteng Oranje di Ternate guna memperoleh penjelasan.

Pada 26 Juni 1655, suatu pertemuan berlangsung di benteng Oranje untuk menjelaskan secara rinci segala hal yang berkaitan dengan perjanjian 31 Januari 1652. Masalah harga cengkih juga dibahas dalam pertemuan itu, khususnya cengkih yang ditimbun rakyat sambil menunggu membaiknya harga.

Pemberontakan Kapita Laut Saidi

Pada 19 Juni 1655, pos-pos Kompeni di Asahudi diserbu. Menurut informasi yang diterima Kompeni di Ambon, otak pemberontakan adalah Kaicil Saidi yang berhasil mengerahkan orang-orang Tidore, dan memperoleh bantuan orang-orang Makassar serta para imam di negeri Asahudi dan sekitarnya. Dengan melumurkan darah orang Belanda yang tebus pada kedua belah tangan, para imam mengobarkan semangat para pemberontak.

Orang-orang Tidore mengundurkan diri ke Kalihe dan Elang, setelah Kompeni mengirimkan sejumlah kora-kora yang penuh dengan tentara pada 22 Juni 1655. Mundurnya para pemberontak itu telah menimbulkan kecurigaan para imam, khususnya terhadap Saidi. Menurut mereka, Saidi telah menyeleweng dari cita-cita perjuangan. Para imam bahkan menuduh Saidi lebih setia kepada Kompeni. Karena itu, mereka minta Saidi sekali lagi bersumpah setia kepada cita-cita perjuangan dengan memegang Kitab Suci al-Quran. Saidi membantah telah berkhianat dan berjanji di bawah sumpah bahwa ia akan terus berjuang sampai titik darah terakhir.

Pada 5 Agustus 1655, Saidi dan keluarganya ditawan para pemberontak atas perintah para imam yang telah mengambil alih pimpinan pemberontakan. Beberapa hari kemudian ia dibebaskan karena kesehatannya merosot secara drastis. Ia menghembuskan napasnya yang terakhir di depan istrinya yang berasal dari Buton, dan didampingi putera tunggalnya serta beberapa pengawal orang Ternate. Putera Saidi, lantaran keterlibatan dalam pemberontakan, ditangkap de Vlamming dan diasingkan ke Batavia. Sementara jandanya dikembalikan ke Buton.

Sumber lain menerangkan bahwa Saidi meninggal dalam pertempuran.³⁶ Menurut sumber ini, upaya de Vlamming merebut Asahudi mengalami kegagalan hingga beberapa kali, karena negeri itu dipertahankan Saidi cukup kuat. Para pemberontak pimpinan Saidi membangun benteng pertahanan berlapis-lapis, mulai dari kota sampai ke puncak bukit, dengan tembok-tembok batu dan dipersenjatai dengan meriam-meriam besar di beberapa tempat. Dalam beberapa kali serangan, de Vlamming gagal menguasai benteng itu. Berulang kali ia terpaksa memerintahkan pasukannya mundur. Dengan menggunakan artileri, Belanda akhirnya berhasil mengusir kaum pemberontak keluar dari Asahudi. Dengan melewati laut, para pemberontak mundur ke Kelang. Di sana Belanda berhasil menyerang mereka serta memaksa mundur ke bukit-bukit dan bertahan di benteng Kalike.

Tetapi, seorang ulama yang dendam karena diremehkan para pemberontak, akhirnya berkhianat dan memandu pasukan Belanda mencapai benteng. Dengan bantuan ulama itu, de Vlamming dan 340 pasukannya berhasil merebut benteng Kalike serta menangkap Kapita Laut Saidi. Seorang serdadu Belanda dengan pedang terhunus membacok tubuh Saidi, dan masih dalam keadaan hidup, tubuhnya dipotong-potong serta dilemparkan dari tebing karang.

Dosa terbesar Saidi dalam pandangan Belanda adalah membiarkan pedagang-pedagang Makassar – yang hendak mematahkan monopoli VOC – berseliweran di Maluku Tengah,

³⁶ Alwi, Des. *Sejarah Maluku*, pp.453-454.

produsen utama cengkih. Pedagang Makassar secara sembunyi-sembunyi memanfaatkan aparat kerajaan. Saidi bahkan merekrut orang Makassar untuk membantu pemberontakannya.

Saidi adalah bangsawan Ternate dari klan Tomagola. Sebelum menduduki jabatan Kapita Laut menggantikan Kaicil Ali, ia menempati posisi sebagai salah seorang petinggi Kesultanan Ternate. Pada 1655, bersama pasukannya ia mempertahankan Buton dari serbuan Makassar dalam pertempuran yang tidak seimbang. Pasukan Ternate menyerah. Saidi dan pasukannya lalu mundur ke Tobungku. Setelah kembali ke Ternate, ia pergi ke Asahudi.

Ketika menjabat sebagai Kapita Laut itulah Saidi mengorganisasi dan memimpin pemberontakan melawan Belanda. Sekalipun demikian, Saidi belum pernah melakukan pemberontakan terhadap Sultan dan Kesultanan Ternate. Sampai hembusan napasnya yang terakhir, ia tetap loyal kepada kesultanan. Di samping *Salahakan* Luhu dan Majira, Saidi adalah salah seorang pemberontak dari kalangan atas.

Setelah wafatnya Kapita Laut Saidi, orang-orang Makassar masih tetap membuat masalah bagi Kompeni. Karaeng Krangzou menyerbu kembali Asahudi dengan armada pimpinan Panglima Malim Bugis. Dalam serbuan ini panglima Malim tewas, dan beberapa komandan pasukan, seperti Karaeng Mpetu Tuwa dan Daim Balekan, dinyatakan hilang. Dengan tewasnya Panglima mereka, pasukan Makassar itu kembali ke Buton.

Spanyol Meninggalkan Maluku

Pada 1662, Manila diguncang isu bahwa para bajak laut Cina dalam jumlah besar yang dipimpin Coxeng akan menyerbu Manila. Gubernur Manila, Manrique de Lara, memutuskan melindungi Manila dari serbuan bajak laut. Untuk itu, ia perlu menempatkan pasukan yang akan membenteng dari Ternate hingga Zamboanga. Dalam rangka memperkuat pertahanan, pasukan-pasukan Spanyol yang ada di Ternate, Tidore – yang ditempati Spanyol sejak 1578 – dan Siau di Sulawesi Utara, ditarik ke Manila. Pada 2 Juni 1663, orang Spanyol terakhir meninggalkan benteng Gamlamo dan menandai berakhirnya pendudukan Spanyol di Maluku. Sejak penyerbuan Spanyol ke Ternate pada 1606 hingga akhir kekuasaannya, sebanyak sembilan belas gubernur yang mewakilinya telah ditempatkan di Ternate.³⁷

Belanda yang berjanji mengusir Spanyol dari Ternate, ternyata tidak punya nyali untuk melakukannya. Ternate, sejak kedatangan Belanda, terbagi menjadi dua wilayah: bagian utara dan timur dikuasai Sultan dan Belanda; sementara kawasan selatan dan barat di bawah otoritas Spanyol.

Perang sporadis yang dilakukan Belanda hanyalah melawan Jailolo, Makian, dan Bacan – semuanya di luar Ternate. Keberhasilan satu-satunya yang patut dicatat hanyalah pertempuran melawan Portugis di Ambon yang berhasil merebut kota itu beserta bentengnya. Selebihnya, yang dilakukan VOC adalah berupaya memperoleh hak monopoli atas perdagangan cengkih. Dengan hengkangnya Spanyol dari Ternate, misi-misi keagamaan – seperti Misi Jesuit – menurun kegiatannya.

³⁷ Daftar nama para Gubernur Spanyol di Maluku, lihat lampiran.

Ternate di bawah Sibori Amsterdam

Pada bulan Januari 1675, setelah lama menderita sakit, Mandar Syah tutup usia. Pengganti Mandar Syah adalah putera tertuanya, Kaicil Sibori Amsterdam. Ia dinobatkan sebagai Sultan Ternate ke-12 pada usia yang relatif masih muda, yakni 20 tahun. Naiknya Sibori ke atas takhta tidak terlepas dari upaya VOC Belanda. Setelah berhasil “menyetir” Mandar Syah, Belanda kembali berusaha melakukan hal yang sama terhadap Sibori. Hal ini tidak terlepas pula dari perilaku Sibori yang lebih Belanda ketimbang orang Belanda sendiri. VOC mengira bahwa Sibori adalah orang yang dapat diatur menurut kehendaknya. Sultan Amsterdam sendiri, beberapa waktu setelah pelantikannya, dengan bangga pernah berseloroh, “Bila ayah saya telah menjadi seorang yang separoh Belanda, maka saya adalah seorang Belanda paripurna.”

Setelah bertakhta, Sibori menikah dengan seorang puteri Kaicil Kalamata kelahiran Makassar bernama Dain Roze. Sibori memang telah lama menaksir puteri Kalamata tersebut, sejak ia berkedudukan sebagai putera mahkota. Sibori pernah menyampaikan niatnya kepada Mandar Syah agar meminang puteri Dain yang ketika itu bermukim di Makassar. Tetapi Mandar Syah keburu wafat sementara Dain Roze, ketika itu, dikabarkan telah jatuh hati kepada seorang pangeran Makassar. Namun Kalamata memutuskan lain. Ia menjodohkan puterinya dengan Sibori sungguhpun sumber lain mengungkapkan bahwa Sibori akan dicalonkan menikah dengan puteri Raja Tobukan, sebuah kerajaan di kepulauan Sangir. Bahkan Raja Tobukan sendiri telah bersiap-siap untuk mengirimkan puterinya ke Ternate.

Sibori Amsterdam bukanlah tokoh yang bijaksana dalam pemerintahan. Pikirannya selalu berubah-ubah terutama tentang suatu keputusan yang telah diambilnya. Waktunya lebih banyak dipakai untuk bersenang-senang daripada bekerja.

Reputasi pribadinya sangat jelek. Ia sangat gembira melihat orang yang teraniaya dan bila perlu meregang nyawa. Ia menyuruh membangun sebuah bak air di depan istananya, dan menyuruh budaknya membenamkan orang yang tak disukainya ke dalam bak tersebut sampai mati. Ia seorang Sultan yang selalu haus darah dan kejam terhadap istri-istrinya, dan memperlakukan mereka dengan sangat buruk. Hal serupa juga dilakukan terhadap rakyatnya.

Tidak berapa lama setelah menikah dengan Dain Roze, setiap waktu istri Sibori ini harus siap melayani nafsu seksualnya. Suatu ketika Sibori merasa bosan dengan Roze dan berencana melenyapkannya. Untung, Roze segera diberitahu para inangnya tentang niat jahat Sibori, dan dengan bantuan beberapa budaknya Roze melarikan diri ke Makassar. Dengan demikian terhindarlah ia dari kekejaman dan bahaya maut.

Setelah Dain Roze meninggal, Sibori menikahi seorang janda Cina beranak satu yang sudah dewasa. Perkawinan ini tidak bertahan lama. Sibori segera bosan, dan membenamkan istrinya ke dalam bak air sambil mencekiknya hingga mati seketika. Anak tirinya dari janda Cina itu mengalami nasib serupa ibunya. Ia dicekik Sibori hingga tewas, dan setelah itu Sibori mengawini janda anak tirinya.

Akan tetapi, setelah beberapa tahun berkuasa, penilaian Belanda terhadap Sibori berubah. Menurut analisis VOC, dalam diri Sultan Sibori ini terdapat unsur-unsur genetik yang dimiliki Khairun dan Babullah. Ketika Sultan Mandar Syah memutuskan memberi nama Belanda kepada kedua puteranya, masing-masing dengan Amsterdam dan Rotterdam, orang mengartikan bahwa hal itu dilakukan untuk menandingi superioritas Belanda.

Untuk mendemonstrasikan status barunya sebagai raja, Sibori menuntut Belanda menyediakan satu regu pengawal pribadi yang dipimpin seorang sersan dan seorang kopral serta sepuluh prajurit yang semuanya orang Belanda. Ia menolak, ketika Kapita Laut Kerajaan Ternate menyediakan satu regu pengawal yang dipimpin seorang kapita dengan sejumlah “baru-baru” (serdadu) lokal.

Begitu bertakhta, Sibori menghadapi banyak masalah warisan ayahnya yang tidak tertangani. Masalah paling krusial adalah Jailolo. Ia menghadapi konfrontasi internal dalam kasus ini, khususnya mengenai status Kaicil Alam, pewaris takhta Kerajaan Jailolo, yang pada masa Mandar Syah ditarik menjadi anggota keluarga kesultanan Ternate untuk menghapus jejak takhta Jailolo. Sementara itu, Sultan Saifuddin dari Tidore juga berkali-kali menuntut Gubernur Padtbrugge agar kerajaan Jailolo dihidupkan lagi dan Kaicil Alam diangkat sebagai sultannya.

Di kalangan internal keraton, kasus Jailolo dijadikan isu oleh Kaicil Jenar, adik Amsterdam, dan beberapa *bobato* lainnya yang sangat berpengaruh – seperti Jogugu Baressi, Kapita Laut Pancona, dan Hukum Marsaoli. Tetapi, dengan enteng Sibori menjawab bahwa yang menenyapkan Jailolo pada 1551 adalah Portugis, bukan Ternate, dan ia tidak berwenang membalik roda sejarah. Penaklukan Jailolo sudah berlangsung lama dan ia tidak dapat dipersalahkan untuk itu. Tetapi, semua argumen Sibori ini menyebabkan ia tersisih sebagai pemimpin Muslim berhadapan dengan suara-suara para ulama dan imam dari Tidore yang makin gencar mengkampanyekan “empat pilar Maluku.”

Sibori dan VOC

Tugas pertama yang dilakukan Sibori setelah setahun bertakhta adalah mengutus beberapa pejabat kerajaannya ke Batavia – atas permintaan Gubernur Ambon – untuk berunding dengan Gubernur Jendral VOC perihal daerah seberang laut Ternate di kepulauan Ambon, Maluku Tengah. Pada 12 Oktober 1676, suatu perjanjian yang sangat merugikan Ternate ditandatangani para utusan Ternate dengan Gubernur Jenderal Jan Maatsuyker. Pokok perjanjian itu menetapkan:

1. Wilayah seberang laut kesultanan Ternate di kepulauan Ambon digabungkan ke dalam Propinsi.
2. Akan diangkat penguasa-penguasa khusus di pulau Buru, Ambalau, Buano, dan Kelang.

Setelah meratifikasi perjanjian tersebut, Sibori memperoleh bintang penghargaan dari VOC. Namun, tidak disadarinya bahwa dengan perjanjian tersebut Ternate telah melepaskan seluruh kedaulatannya atas Maluku Tengah. Bermula dengan Seram, kini praktis Ternate kehilangan daerah taklukannya di seluruh Maluku Tengah.

Masalah lain yang menghadang Sibori adalah daerah seberang laut Ternate di Sulawesi Utara dan Tengah yang mulai bergolak. Di Kepulauan Sangir Talaud, Gorontalo, Limboto, Toli-toli, Jorobonto, Moutong, teluk Tamimi, Parigi, Kayali, serta lainnya di pantai timur dan utara Sulawesi otoritas Ternate mulai memudar. Sibori menyadari benar kasus ini, dan dia sendiri menghendaki agar peristiwa Buton tidak terjadi lagi. Karena itu, Sibori segera mendekati Gubernur Maluku, Padtbrugge, dan meminta bantuan Belanda memulihkan situasi di daerah-daerah tersebut. Sebagai argumennya, Sibori menunjuk perjanjian Ternate-Belanda tahun 1652 dan tahun 1676 di mana Belanda berkewajiban membantu Ternate bila diperlukan. Padtbrugge

dapat menerima alasan Sibori dan berjanji memberikan bantuan yang diinginkan, sebagai balas budi penyerahan wilayah Ternate di Maluku Tengah.

Dengan bantuan Kompeni, Ternate menyerang Gorontalo dan Limboto serta daerah-daerah pesisir timur Sulawesi untuk memulihkan loyalitas. Bahkan, pemulihan Sangir Talaud dilakukan sendiri oleh Sibori tanpa bantuan Belanda. Untuk sementara Ternate dapat berpuas diri karena berhasil memulihkan loyalitas daerah-daerah tersebut. Tetapi, loyalitas yang dipulihkan itu belum sekuat seperti pada masa kekuasaan Babullah.

Abad ke-17 merupakan masa paling suram bagi Kesultanan Ternate dalam hubungannya dengan daerah-daerah seberang laut. Satu demi satu daerah di pantai timur dan pesisir utara Sulawesi mulai melepaskan diri. Di awal abad ke-18, yang tersisa tinggal kepulauan Sanana, Tobungku, dan Banggai. Tetapi, penyebabnya bukan semata-mata kesalahan para sultan terdahulu seperti Hamzah dan Mandar Syah. Belanda juga pantas dituding sebagai salah satu kontributor utama terpuruknya Kerajaan Ternate. Dengan politik kolonial yang tidak etis dan melalui perjanjian bilateral, Belanda telah membawa kerajaan-kerajaan Maluku – khususnya Ternate – ke dalam situasi tuna kuasa. Dengan berbagai tekanan, mulai dari yang kasar hingga halus, Belanda menempatkan Ternate dalam posisi yang tidak memiliki banyak pilihan.

Perang Melawan VOC

Pada 1680, Sibori mengutus Pati Lima – seorang Muslim Seram – ke Ambon dengan kuasa penuh. Pati Lima membawa surat edaran Sibori yang ditujukan kepada semua orang Islam di Ambon, Hitu, Buru, dan Manipa. Dalam surat itu, Sibori menyerukan agar kaum Muslimin di daerah-daerah tersebut, demi akidah, menyerbu dan membunuh orang-orang Belanda, terkecuali mereka yang bersedia menjadi kawula Kesultanan Ternate. Himbauan juga dikemukakan kepada para imam di negeri-negeri itu, salah satunya adalah Hasan Sulaiman, mantan imam dan tokoh masyarakat Hitu.

Beberapa waktu kemudian, Pati Lima bertemu dengan Hasan Sulaiman di Hitu untuk membahas seruan Sultan Sibori. Gubernur Ambon yang menerima laporan tentang surat edaran Sibori, segera mengambil tindakan memburu Pati Lima beserta pengikut-pengikutnya dan menangkap mereka. Pati Lima sendiri berhasil disergap dan ditangkap di negeri Hatuwane, di pulau Honimoa, dan langsung dikirim ke benteng Victoria di Ambon. Dari tangannya berhasil disita surat edaran Sibori. Setelah diinterogasi, Pati Lima mengakui bahwa misinya adalah membunuh orang-orang Belanda atas suruhan Sibori. Pati Lima kemudian diadili dan dijatuhi hukuman gantung. Akibat surat edaran Sibori, Gubernur Ambon memerintahkan semua keluarga Belanda yang berdomisili di Ambon mengamankan diri mereka dan di malam hari berlindung di benteng Victoria.

Setelah misi Pati Lima terbongkar, para *bobato* Kesultanan Ternate merencanakan menyerah kepada Kompeni di benteng Oranje. Mereka adalah Kaicil Alam, yang ketika itu menjabat Jogugu Kerajan, Kimalaha Marsaoli dan Boki Gamalama, istri Kaicil Alam. Menurut sumber Kompeni, mereka ditangkap ketika Kompeni menyerbu keraton. Menurut sumber lain, mereka menyerah karena tidak setuju dengan tindakan Sibori. Sibori sendiri menyatakan bahwa ia mengutus sejumlah *bobato* ke Fort Oranje untuk berunding dengan Belanda, tetapi mereka ditahan dan tidak kembali lagi. Itulah sebabnya, ketika dia diminta Kompeni datang ke benteng, Sibori menolak.

Akibat penolakan tersebut, tentara Belanda menyerang istana Ternate dan menembaki negeri Soasio. Keesokan harinya, serdadu Belanda kembali datang dalam jumlah yang lebih besar dan merusak apa saja yang mereka temukan. Mereka bermaksud menangkap Sibori, tetapi rakyat mencegah dan terjadilah pertempuran sepanjang hari itu. Pasukan Sibori dapat bertahan dan tentara Belanda mengundurkan diri ke benteng setelah empat anggota pasukannya dicerai tombak dan panah. Sementara di pihak Ternate, dua orang pasukan sultan tewas dan dua lainnya cidera.

Keesokan harinya, Sultan dan keluarga serta pasukannya mundur ke Jailolo dan, dengan bantuan orang-orang Alifuru, ia dapat bertahan. Tetapi, karena kekurangan logistik dan biaya, pasukan tempur Sibori harus mencari makan sendiri, yang makin lama makin berkurang. Sibori mengirim utusan yang membawa sepucuk surat pribadinya kepada Sultan Mindanao untuk meminta bantuan keuangan, tetapi utusan ini kembali dengan tangan hampa.

Setelah tidak berhasil memperoleh bantuan Sultan Mindanao, Sibori dan para *bobatonya* mulai berpindah-pindah tempat antara Jailolo dan Sahu. Orang-orang kepercayaannya ada yang mulai berkhianat dan menyeberang ke pihak Belanda. Belanda menjanjikan hadiah besar akan diberikan kepada yang menangkap Sibori hidup-hidup. Upaya menangkap Sibori dalam keadaan hidup dapat dilakukan secara mudah berkat informasi para pengkhianat. Akhirnya, Sultan Sibori ditangkap pada suatu pagi ketika sedang mandi dan dipijat istrinya. Sultan dan permaisurinya, Mihir, ditangkap dan dinaikkan ke atas kapal Oranje yang langsung berangkat ke Batavia pada 30 Agustus 1681. Ia menjalani masa hukumannya di Batavia, sementara permaisurinya Mihir kembali ke Tidore. Kepergian Sibori ini diantar oleh Gubernur Padtbrugge.

Runtuhnya Kedaulatan Ternate

Pemberontakan Sibori adalah pemberontakan setengah hati. Dalam kedudukannya sebagai Sultan Ternate, sebenarnya ia memiliki *power*. Tetapi, kenyataannya ia kurang mendapat dukungan rakyat maupun para *bobato*. Oleh sebab itu, ketika berada di Jailolo, ia hanya mengandalkan dukungan dari orang-orang Alifuru. Sementara orang Ternate yang ada di Jailolo dan Sahu tidak memberikan dukungan kepadanya.

Setiba di Batavia, Sibori dengan ramah diterima Gubernur Jenderal dan selanjutnya menjalani masa pengasingan sampai akhir 1682. Setelah pembebasannya, ia masih menetap beberapa bulan di Batavia dan kemudian balik ke Ternate. Di awal Juli 1683, sebuah perundingan dilakukan Sibori dan Gubernur Jendral. Pada 7 Juli 1683, suatu persetujuan ditandatangani. Beberapa ketentuan penting dalam perjanjian tersebut adalah:

1. Hak Gubernur VOC untuk duduk dalam Dewan Kerajaan Ternate.
2. Semua eksekusi hukuman mati harus dengan persetujuan VOC
3. Setiap pergantian sultan harus dengan persetujuan VOC.

Sejak berlakunya perjanjian tersebut, Ternate praktis kehilangan kedaulatannya sebagai sebuah kerajaan yang merdeka. Kewenangan dasar kerajaan ini dalam pengangkatan sultan, penarikan dan penentuan kebijakan, telah dikuasai oleh Kompeni. Dengan demikian, status *de jure* kesultanan ini tidak lebih dari sebuah kerajaan *vazal* Pemerintah Kolonial Belanda melalui VOC. Harus diakui bahwa perjanjian 7 Juli 1683 dibuat di waktu posisi Ternate berada pada kondisi paling lemah. Kesetiaan daerah-daerah seberang laut hampir pupus, dan hal ini lebih

diperparah oleh kelemahan sultan yang tidak berdaya menghadapi tekanan Kompeni. Ternate telah kehilangan legitimasinya sebagai sebuah kerajaan besar dan kuat. Bahkan, kedaulatannya praktis telah diambil oleh Kompeni.

Sibori sendiri, setelah bebas dan kembali ke Ternate, praktis tidak lagi menjalankan kekuasaannya sebagai seorang raja yang berotoritas. Ia telah menjadi penguasa boneka tanpa kekuasaan. Pemerintahan Kesultanan Ternate dijalankan oleh jogugu dan petinggi kesultanan lain serta oleh Belanda sendiri. Sekalipun demikian, setelah tiba di Ternate, Sibori melakukan reformasi pemerintahan dengan mengganti pejabat-pejabat puncak. Sebagai Kapita Laut diangkat Ratibi, dan Rotterdam – adik Sibori – ditetapkan sebagai Kimalaha Tomagola. Adik Sibori yang lain, Kaicil Melayu, diangkat sebagai Kimalaha Tomaito, dan Kaicil Toloko, yang juga adik Sibori, dilantik menjadi Hukum. Sibori merayakan pembebasannya dengan menggelar sebuah pesta besar-besaran di dalam benteng Oranje. Ini merupakan pesta terakhir bagi Sultan Sibori Amsterdam, karena pada 27 April 1689 ia tutup usia.

Beberapa saat sebelum Sibori wafat, Pangeran Alam ahli waris kerajaan Jailolo terakhir turup usia, yang sekaligus mengakhiri jejak kerajaannya.

Dari Amsterdam ke Rotterdam

Setelah menjabat sebagai Mangkubumi selama dua tahun sejak wafatnya Sibori Amsterdam, pada 1692 Kaicil Toloko dikukuhkan sebagai Sultan Ternate ke-13, setelah mengalahkan saingannya Kaicil Melayu. Toloko Rotterdam adalah putera ke-5 Mandar Syah dari Ainun, istri ke-7. Setelah dinobatkan sebagai Sultan, namanya berubah menjadi Said Fathullah. Ia dilahirkan di Ternate pada 1657. Seperti kakaknya, Sibori Amsterdam, Rotterdam juga pernah menikah dengan seorang perempuan Cina.

Berbeda dengan Amsterdam yang berperawakan tinggi besar, Rotterdam berperawakan pendek dan kecil, tetapi suka berhias serta mengenakan pakaian bagus dan mahal. Bahkan, ikat pinggangnya bertatahkan berlian. Hampir semua pakaiannya buatan Eropa, di antaranya ada yang mencapai harga 1200 ringgit. Yang menarik dari Rotterdam adalah segera setelah pelantikannya sebagai sultan, ia menghentikan kebiasaan minum minuman keras dan menggantinya dengan meminum teh atau lemon. Tetapi, kebiasaan bergaul dengan orang-orang Belanda di dalam benteng Oranje tetap diteruskan. Karena itu, ia mahir berbahasa Belanda. Pergaulannya dengan orang Belanda, membuat gaya hidupnya lebih Eropa ketimbang Ternate. Permaisurinya (puteri seorang Imam Ternate) juga menyenangi busana Eropa dan perhiasan yang mahal-mahal. Ia jarang berbusana adat, atau busana tradisional lainnya. Gaya hidup seperti ini dijalani keduanya sebelum Rotterdam naik takhta.

Sebelum naik takhta, Rotterdam dikenal sebagai seorang pangeran kaya. Ia memiliki rumah pribadi dengan kebun yang luas di Kasturian, tidak jauh dari keraton. Ia memiliki uang tunai yang diperkirakan mencapai 500.000 ringgit dan emasnya ditaksir seberat 125 pon, yang disimpannya di dalam tanah. Kekayaan itulah yang menopang gaya hidupnya.

Langkah pertama yang dikerjakan Rotterdam setelah penobatannya adalah membenahi administrasi lembaga-lembaga kesultanan. Sejumlah aturan dikeluarkan untuk pembenahan administrasi tersebut. Para *bobato* harus bekerja sesuai ketentuan yang ditetapkan sultan dan tidak boleh melakukan kebijakan yang bertentangan. Rotterdam dapat dipandang sebagai sultan yang memelopori pembinaan administrasi modern bagi Kesultanan Ternate. Kedekatannya

dengan pejabat Belanda memungkinkannya mempelajari manajemen dan administrasi pemerintahan yang baik. Inilah jasa terbesar Rotterdam terhadap kerajaannya.

Pada 1700, timbul ketegangan serius antara Rotterdam dengan sultan Tidore, Abdul Fadail Mansur. Sultan Tidore yang baru dilantik itu menuduh Rotterdam berencana menyerang Tidore. Ternate membantah tuduhan tersebut dan menyatakannya tidak beralasan. Pasalnya Rotterdam pernah berucap bahwa penobatan Saifuddin sebagai Sultan Tidore tidak sah, karena yang berhak menjadi sultan seharusnya Kaicil Garonya, paman Saifuddin. Ucapan Rotterdam ini diprotes keras dan dipandang sebagai pelecehan terhadap Tidore.

Masa pemerintahan Rotterdam adalah masa yang tenang bagi kerajaan Ternate. Walaupun Rotterdam tidak menciptakan karya-karya besar yang patut diingat, tetapi ia berhasil menjadikan Ternate aman dan damai. Kedamaian dan keamanan yang diciptakan Rotterdam memungkinkan rakyat menjalani kehidupan yang tenang. Karya monumental yang diwariskan Sultan Rotterdam adalah pembukaan jalan Dodinga-Bobaneigo, yang menghubungkan Halmahera Utara dan Tengah dengan Ternate dan Tidore. Jalan ini masih digunakan hingga sekarang. Rotterdam tutup usia pada tanggal 8 Desember 1714.

Ternate di bawah Raja Laut: Kemelut Halmahera Timur dan Makian

Setelah Rotterdam wafat, Dewan Kerajaan Ternate memutuskan melantik Amir Iskandar Zulkarnain Saifuddin – putera tertua Rotterdam dari istri keempatnya, Sayira – sebagai Sultan Ternate ke-14. Amir Iskandar lahir di Ternate pada 1680 dan lebih dikenal dengan nama Raja Laut, yang diberikan ayahnya. Ia juga dikenal dengan nama Kaicil Sehe.

Masalah besar yang dihadapi Raja laut setelah bertakhta adalah mempertahankan hubungan baik dengan Tidore yang telah terbina selama ini, karena pergolakan-pergolakan rakyat di seberang laut berpotensi menimbulkan perpecahan di antara mereka dan dapat mengganggu hubungan baik Ternate-Tidore.

Pada 1716, rakyat Halmahera Timur – Maba, patani, Gebe, dan Weda – memprotes Sultan Tidore lantaran beban upeti yang dipungut terlalu memberatkan. *Sangaji* Patani menyatakan kepada rakyatnya, bila kesultanan memperlakukan mereka secara buruk, mereka akan kembali ke bawah pimpinan Kesultanan Ternate, atau bergabung sebagai warga Kompeni VOC untuk selamanya. Hanya tiga komunitas yang tetap loyal kepada Tidore, sementara sisanya ingin bergabung dengan Ternate. Para *sangaji* Patani dan Bicoli, serta sejumlah kimalaha Maba, bahkan bertolak ke Ternate menemui Raja Laut dan menyampaikan keputusan rakyat Halmahera Timur yang akan bergabung dengan Kerajaan Ternate. Kepada Sultan Raja Laut, mereka menyerahkan seorang budak laki-laki sebagai tanda kesetiaan.

Raja Laut menerima persembahan itu dan membalasnya dengan menganugerahkan tiap komunitas sebuah salawaku dan sebilah parang sebagai lambang janji perlindungan Ternate kepada komunitas tersebut. Raja Laut bahkan menganugerahkan mereka sebuah cincin bermata berlian dan mutumanikam sambil berkata, “Saya tahu bahwa *Sangaji* Patani adalah seorang jogugu juga. Saya ingin agar anda menuliskan nama di atas secarik kertas, agar semua petinggi kesultanan Tidore dapat memeriksa dengan teliti dan memberikan pertimbangan, serta mau mendatangi saya, karena saya memilikinya.”

Menurut versi lain, dalam pertemuan itu Raja laut menanyakan alasan dan kesungguhan hati mereka untuk menjadi kawula Kerajaan Ternate. Untuk itu mereka disuruh membaca al-Quran dengan tenang, kemudian mendoakan para sultan Ternate terdahulu. Semua perintah itu dipenuhi para *sangaji* dan kimalaha yang memberontak terhadap Tidore, sehingga Raja Laut mengabdikan permintaan mereka untuk bergabung sebagai kawula Kerajaan Ternate. Ketika akan kembali ke Gamsungi, Raja Laut melepaskan mereka dan menghadiahkan sepuluh potong pakaian, dua kotak mesiu, seratus pucuk senapan kecil, dan 160 tumang sagu.

Setelah pertemuan itu, salah seorang *sangaji* Maba bersama pengikutnya meninggalkan Ternate untuk menetap di Galela, salah satu daerah Kesultanan Ternate di Halmahera Utara. Dengan hijrahnya orang-orang Maba ke Galela, VOC kemudian mengangkat seorang pejabat setingkat kontrolir masing-masing di Maba dan Galela.

Para petinggi Kesultanan Tidore merasa yakin bahwa pemberontakan orang-orang Halmahera Timur dipicu oleh Ternate. Mereka mengutuk Sultan Raja Laut yang telah mendorong *Sangaji* Patani dan rakyatnya memotong upeti – seperti dilakukan komunitas Halmahera Timur – dan menahan setengahnya. Padahal, itu merupakan kewajiban adat mereka kepada Sultan Tidore. Untuk menyelesaikan “pemberontakan Halmahera Timur,” Gubernur Maluku Antonie Heinsus, yang baru dilantik dalam bulan Mei 1720, mengundang Raja Laut dan Sultan Hasanuddin dari Tidore untuk mengadakan rekonsiliasi di benteng Oranje.

Gubernur mendengar keluhan kedua belah pihak dan bertindak sebagai mediatornya. Tetapi, begitu pertemuan dibuka, soal tetek-bengek mulai muncul. Sultan Hasanuddin mengeluh bahwa Sultan Raja Laut mengenakan pakaian warna abu-abu – warna yang oleh Belanda disebut *lokje*, dan dalam bahasa Ternate bermakna “hati palsu.” Untuk menghilangkan kesan itu, Raja Laut mengganti pakaiannya dengan sebuah kemeja bergaris ditambah ikat kepala berwarna gelap, mirip pakaian yang dikenakan Sibori Amsterdam ketika berunding dengan Sultan Hamzah dari Tidore pada 1689 di tempat yang sama.

Masalah pakaian ini berkesudahan dengan gagalnya perundingan tersebut. Tetapi, gubernur bersikukuh akan mempertemukan mereka kembali, dan menyampaikan bahwa Cornelis Hasselaar, komisaris VOC untuk Ternate, akan bertindak sebagai mediator. Sementara itu Sultan Hasanuddin menyurat kepada Gubernur yang berisi penjelasan bahwa rakyat Patani, Maba, dan Gebe, telah berontak melawan kekuasaannya sejak 1718. Kerugian yang diderita Tidore akibat pemberontakan itu ditaksir 3.409 ringgit dan sejumlah korban jiwa. Karena itu, ia minta Kompeni membantu pemulihannya.

Kompeni meneruskan tuntutan tersebut kepada Ternate, tetapi Hasanuddin mencela karena tidak adanya komitmen Kompeni. Gubernur Jenderal VOC di Batavia kemudian memerintahkan komisarisnya di Ternate untuk mengupayakan rekonsiliasi bagi pihak-pihak yang bertikai. Tetapi, sementara perundingan berlangsung, pemberontakan pecah lagi di Gamraange dan kepulauan Papua Raja Ampat.

Delapan buah *juanga* dari Patani tiba di Ternate secara bersamaan dengan membawa surat dari *sangaji* Patani, Bicoli, dan raja-raja serta kimalaha Waigeo. Surat tersebut ditujukan kepada Sultan Raja Laut dan Gubernur Kompeni, yang berisi kehendak rakyat dari negeri-negeri tersebut untuk menjadi kawula Kesultanan Ternate dan Kompeni sekaligus, sebab mereka tidak dapat lebih lama mentolerir tindakan-tindakan penguasa Tidore yang menyulitkan mereka. Mereka juga menolak raja yang lama (Tidore) dan memilih menjadi kawula Ternate di Halmahera, dan menyatakan kesiapannya memerangi Tidore.

Sementara itu, pertemuan rekonsiliasi yang diprakarsai Kompeni berakhir dengan keputusan Kompeni akan menangani secara langsung aksi-aksi pemberontakan dan akan mengirimkan serdadu-serdadunya membantu Tidore. Sesuai keputusan rekonsiliasi, di awal 1722 sebuah kontingen tentara Kompeni membantu ekspedisi Tidore ke pantai timur Halmahera. Patani merupakan daerah pertama yang diserbu dan mencatat hasil gemilang, sehingga banyak warga lokal mengungsi ke wilayah Kesultanan Ternate, seperti ke Kayoa, Gane, Foya, Kao, dan Galela. Sultan Raja Laut tidak keberatan menampung mereka. Beberapa tahun sebelumnya juga pernah terjadi pengungsian warga Halmahera Timur karena menentang Sultan Tidore. Tetapi, mereka kemudian melakukan rekonsiliasi dan kembali ke daerah masing-masing. Orang-orang dari kepulauan Raja Ampat yang telah membantu masyarakat Gamraange, juga telah kembali ke negeri mereka.

Ekspedisi Tidore yang dibantu Kompeni akhirnya sukses menundukkan pemberontakan rakyat Patani, Maba, Weda, dan Bicoli. Dengan berhasilnya ekspedisi tersebut, hubungan pincang yang melanda Ternate-Tidore berakhir. Pada 6 Juni 1722, kedua kesultanan itu menandatangani sebuah perjanjian perdamaian yang berintikan bahwa masing-masing kerajaan bersepakat mencegah kawulanya beralih status dari satu kerajaan ke kerajaan lain, dan Kompeni diberi wewenang mengadili serta menghukum yang melanggar perjanjian tersebut. Berdasarkan perjanjian itu, orang-orang Patani dan Maba yang mengungsi ke Galela sejak 1720 pindah ke Salawati di kepulauan Raja Ampat yang masuk wilayah Tidore. Sebanyak 30 *juanga* digunakan untuk memindahkan mereka.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya di suatu malam di bulan Januari 1725, *Sangaji* Patani dan 150 orang pengikutnya tiba di Ternate dengan dua *juanga*. Mereka menemui Sultan Raja Laut dan menegaskan keinginan untuk menjadi kawula Ternate dan Kompeni, dan berniat untuk menetap di wilayah kesultanan Ternate. Sultan Ternate membujuk mereka agar kembali ke Patani karena telah ada perjanjian antar Ternate-Tidore sejak 6 Juni 1722. Tetapi, *Sangaji* Patani dan pengikutnya menolak sekalipun akan dibunuh. Sultan Tidore yang mengetahui peristiwa ini menyatakan kepada Kompeni ketidakmampuannya mengatasi hal itu. Gubernur Kompeni menyarankan agar Tidore mendekati Ternate dan meminta keduanya bekerjasama mengatasinya berdasarkan perjanjian damai tahun 1722. Tetapi, Sultan Ternate menolak melakukan tindakan atas nama Sultan Tidore, karena akan mengakibatkan Ternate kehilangan kepercayaan. Beberapa hari kemudian, para pembangkang Patani itu meninggalkan Ternate dan krisis yang menimpa Ternate-Tidore untuk sementara dapat diselesaikan.

Tetapi, pada 4 Juli 1726, sebanyak 17 *juanga* dan 6 perahu besar yang sarat dengan orang Papua dan Patani merapat persis di depan benteng Oranje dan mendarat di pemukiman orang Melayu di samping benteng. Dari sini orang-orang Papua dan Patani berjalan kaki menuju istana Sultan Ternate untuk melaporkan berbagai perlakuan yang mereka alami dari petinggi-petinggi Kesultanan Tidore. Kompeni mengirim pejabat untuk berbicara dengan para pembelot. Kepada pejabat Kompeni orang-orang Papua dan Patani menyatakan keinginan mereka menjadi kawula Kesultanan Ternate dan Kompeni. Mereka juga menuntut diperlakukan sebagai pengungsi dan dijamin keamanannya.

Pada 23 Mei 1728, Sultan Tidore Hasanuddin wafat secara mendadak. Di Ternate, Sultan Raja Laut merasa lega dengan kepergiannya yang selama ini menjadi batu sandungan ketidakharmonisan hubungan Ternate-Tidore.

Setelah mereda kasus “pemberontakan Halmahera Timur” yang menimpa Tidore, hal serupa juga menimpa kesultanan Ternate akibat “pemberontakan” orang-orang Makian. Pada 1742, sebanyak 180 orang Makian dan para pemimpinnya menemui Sultan Tidore untuk menanyakan cara mengalihkan status kewargaannya menjadi kawula Kesultanan Tidore. Sultan menyatakan bahwa Kesultanan Tidore hanya melindungi kawulanya yang berdiam atau bertempat tinggal di wilayah kesultannya. Orang-orang Makian puas mendengar pernyataan itu, yang berbeda dari keterangan *sangaji* mereka. Sultan juga berjanji kepada *Sangaji* Ngofakiaha, kepala pemukiman orang-orang Makian, bahwa ia membolehkan mereka tinggal di mana saja dalam wilayah kekuasaannya.

Beberapa waktu kemudian, terjadilah eksodus orang Makian yang tinggal di Foya dan Gane di Halmahera Selatan ke daerah-daerah kekuasaan Tidore. Pada mulanya rakyat yang terlebih dahulu pindah, menyusul para pemimpin mereka. Proses perpindahan ini dilakukan secara terpisah untuk menghindari hambatan Kompeni yang melarang alih kesetiaan dari suatu kesultanan kepada kesultanan lainnya.

Pada 1744, Sultan Ternate, Raja Laut, kembali menghadapi tantangan yang datang dari Kimalaha Tomagola dan Kimalaha Tomaito, dua keluarga bangsawan tinggi Ternate. Sultan memutuskan menghukum mati keduanya. Tetapi, Gubernur Maluku – yang berhak duduk dalam Dewan Kerajan Ternate dan berhak menentukan kata akhir dalam setiap eksekusi pidana mati berdasarkan perjanjian 7 Juli 1683 – menolak pelaksanaan pidana mati atas kedua kimalaha tersebut. Ia bahkan merehabilitasi dan mengembalikan kedua kepala klan itu kepada kedudukan semula.

Ketika keputusan Kompeni atas kedua kimalaha itu diumumkan, Sultan Ternate memanfaatkan peluang pembebasan mereka dengan sebuah pernyataan bahwa klan Tomagola dan Tomaito tidak dibolehkan lagi memegang jabatan-jabatan kesultanan, karena mereka terkenal dengan tradisi oposisinya terhadap sultan. Untuk jabatan jogugu di Ternate, sultan menyediakan lowongan itu bagi *Salahakan* Sulabesi, Raja Tobungku dan *Sangaji* Gamkonora, atau membiarkannya lowong untuk sementara waktu. Dengan mengosongkan beberapa posisi penting dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ternate, Raja Laut membiarkan komunitas dalam kesultannya tidak memiliki pemimpin yang dapat mengubah kontrol kebijakannya.

Kompeni menyatakan kepada Sultan Raja Laut bahwa orang-orang Makian, karena kasus pembelotan terhadap Sultan Ternate, untuk sementara dijadikan kawula Kompeni. Dalam hubungan baru ini, Kompeni sangat berhati-hati dengan para petinggi kesultanan di daerah-daerah. Kompeni memperingatkan mereka agar tetap memenuhi kewajiban kepada sultan, terutama menyangkut pengabdian. Tindakan Kompeni ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perpindahan besar-besaran kawula Kesultanan Ternate di Makian ke wilayah kekuasaan Tidore dan mempertahankan mereka agar tetap berdiam di Makian. Bahkan, sejak 1745, seluruh kompensasi Kompeni terhadap Makian tidak lagi dibayarkan kepada Sultan Ternate, tetapi langsung diterima para *bobato* yang bersangkutan di Makian. Para *bobato* ini menikmati pelayanan langsung Kompeni. Sementara Kompeni sendiri berharap memperoleh banyak keuntungan ekonomis dari perlindungannya.

Tindakan Kompeni terhadap orang-orang Makian dan ketidakberdayaan Sultan Raja Laut menyebabkan beberapa kelompok orang Alifuru di Halmahera, terutama orang-orang Tobaru Galela dan Tobelo – suku-suku yang selama ini telah membuktikan kesetiaan dan pengorbanannya kepada kesultanan Ternate – melakukan protes. Mereka menyatakan bahwa Raja

Laut tidak mampu memberikan perlindungan melawan para dano (bangsawan rendahan) yang memperlakukan mereka secara tidak manusiawi dan sering menjual anak-anak mereka sebagai budak. Sementara di Ternate sendiri, rakyat mulai mempertanyakan posisi jogugu yang telah lama dibiarkan lowong oleh Raja Laut, demikian pula posisi hukum dan Kimalaha Marsaoli.

Pada 1745, Kompeni mengadakan perjanjian dengan Kesultanan Ternate mengenai status para dano yang tidak memegang jabatan sebagai *bobato*. Kedua pihak menyepakati bahwa para dano yang tidak menjabat itu dilarang bermukim di Halmahera. Larangan ini dipaksakan Kompeni, karena takut lahan bisnisnya di Halmahera digarap para dano non-*bobato*.

Dalam kasus pembangkangan rakyat Makian, Raja Laut ternyata tidak mampu menyelesaikannya. Para *bobato* dan keluarga keraton lainnya mulai mengeritikinya. Akhirnya, karena tuntutan rakyat, Raja Laut turun dari takhta Kesultanan Ternate pada 1751. Ia sempat mengusulkan Oudhoorn Kaicil Ayan Syah sebagai penggantinya, yang disetujui secara sepenuhnya oleh Kompeni. Ayan Syah adalah putera tertua Raja Laut.

Ayan Syah

Pada 8 Desember 1751, Ayan Syah dinobatkan sebagai Sultan Ternate ke-15. Ia harus bekerja keras mengembalikan kewibawaan Kesultanan Ternate, terutama memulihkan pembangkangan orang-orang Makian. Ia juga diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan serta memelihara pengadilan dari segala bentuk campur tangan luar.

Tindakan pertama yang dilakukan Ayan Syah setelah bertakhta adalah mengisi lowongan posisi jogugu, hukum, dan Kimalaha Marsaoli yang telah lama dikosongkan Raja Laut. Ia mengangkat Pattisarana Puancha Amiri Yusuf sebagai Jogugu, sementara Haerun dan Pattylatu sebagai Hukum Soasio dan Kimalaha Marsaoli.

Langkah Ayan Syah lainnya adalah memulihkan semua hak para pangeran dan mengupayakan rekonsiliasi untuk membuktikan kepada rakyatnya, terutama orang-orang Alifuru di Halmahera, bahwa ia sangat memperhatikan kepentingan mereka. Dalam masa pemerintahan yang singkat, sekitar empat tahun, Ayan Syah berhasil melerai sengketa atau pertikaian kekuasaan antara sultan di pusat kesultanan dan para *sangaji* serta *bobato* di daerah-daerah.

Setelah melakukan konsolidasi ke dalam, Ayan Syah melakukan langkah paling penting dan bersejarah, yaitu rekonsiliasi dengan pembangkang-pembangkang Makian. Pada akhir Mei 1752, Ayan Syah mengundang seluruh *bobato* Makian, baik *bobato* dunia maupun *bobato* akhirat, untuk duduk berhadapan dalam suatu perundingan di istana Sultan Ternate. Dalam pertemuan itu, Ayan Syah mendengar dengan tekun semua isi hati para *bobato*, mulai dari yang halus sampai yang kasar, dan menampung semua usul dan tuntutan mereka.

Dalam kesempatan itu, Sultan Ayan Syah berpidato dengan penuh emosi, tetapi dengan nada membenarkan kritik-kritik tentang kurangnya perhatian kesultanan kepada masyarakat Makian. Sultan menyatakan penyesalannya atas kejadian tersebut, dan berjanji akan memulihkan semua yang salah ke arah kebenaran serta akan memperhatikan keluh kesah mereka mengenai ketidakadilan yang mereka rasakan. Pada 4 Juni 1752, seluruh *bobato* Makian berikrar memperbaiki kesetiaan mereka kepada kesultanan Ternate. Sejak ikrar itu diucapkan, rakyat Makian kembali ke haribaan Ternate.

Karena alasan kesehatan, Ayan Syah ingin mengundurkan diri dari takhta kerajaan, tetapi rakyat tetap mempertahankannya hingga tiba ajalnya. Ia wafat pada 24 Agustus 1755 dengan meninggalkan seorang putera, Kaicil Amiri, dan seorang puteri, Boki Mihirsan.

Pengganti Ayan Syah adalah adiknya sendiri, Amir Iskandar Muda atau Pangeran Zwammerdam. Ia dilahirkan di Ternate pada 1692, putera kedua Raja laut dari permaisurinya Boki Mariam. Zwammerdam dinobatkan sebagai Sultan Ternate pada 24 Agustus 1754.³⁸ Ia menikah dengan Boki Sowoli, puteri Kaicil Bayan yang pernah menjabat sebagai Kapita laut.

Sejak wafatnya Ayan Syah, Ternate tidak lagi memiliki sultan yang pemerintahan ataupun karyanya patut dikenang. Hal ini disebabkan semakin menguatnya kekuasaan Pemerintah VOC, sementara para sultan di seluruh Maluku – termasuk Ternate – mulai melorot kekuasaannya. Pengangkatan para sultan untuk sebagian besar terjadi karena intervensi VOC, sehingga para sultan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Belanda.

Ternate Selama dan Setelah Abad ke-18

Selama abad ke-18, kondisi Ternate tidak banyak mengalami perubahan berarti. Sebagai mitra, Ternate dipandang cukup baik oleh Kompeni. Dibandingkan kesultanan-kesultanan tetangga lainnya, yakni Tidore dan Bacan, Ternate punya prestasi bagus dalam menjalankan *hongji tochten*, yang nota bene seluruhnya untuk kepentingan Kompeni. Dalam pandangan Kompeni, Ternate adalah sahabat yang bisa diandalkan. Hal ini bisa dilihat pada *acte van investiture* (kewajiban melakukan investasi) yang dikeluarkan di Batavia pada 17 Juli 1780 dan ditandatangani di benteng Oranje, di mana Kompeni mengeritik dan membenahi sikap kurang bersahabat Tidore serta Bacan, sementara Ternate mendapat pujian atas kerjasamanya dengan Kompeni.

Pada penghujung abad ke-18, Kompeni membalas jasa orang-orang Ternate dengan menganugerahkan penghargaan kepada Jogugu Sabtu dan Marsaoli Pattisaranga. Keduanya, secara berturut-turut, dianugerahi pangkat mayor dan kapten perang, serta masing-masing memperoleh bintang perak bergambar singa emas ditengahnya, yang dilingkari sebuah karangan bunga berwarna emas, dengan tulisan: "Kesetian Ternate dalam tahun 1800."³⁹

Pada 21 Juni 1801, Gubernur Cransen menyerahkan Maluku kepada Inggris. Penyerahan ini dilakukan di Ternate. Selanjutnya Inggris menempatkan residen pertamanya, H. Webber, di Ternate. Tetapi, Inggris tidak lama bercokol di Ternate. Pada 1803, Inggris menyerahkan kembali Ternate kepada Belanda. Sebuah komisi untuk pengambilalihan dan restabilisasi propinsi di wilayah timur, dikepalai Cransen, tiba di Ternate pada Agustus 1803 untuk melaksanakan tugasnya.

Pada 1804, Peter Adrianus Goldbach ditetapkan sebagai Gubernur Maluku, dan pada tahun berikutnya ia digantikan oleh Carel Lodewijk Wieling. Pada masa ini, Maluku untuk sementara waktu disubordinasikan ke Ambon.

Pada 1807, Muhammad Ali dinobatkan sebagai Sultan Ternate, menggantikan Sultan Muhammad Yasin yang mangkat dalam tahun ini. Ternate kemudian menandatangani sebuah perjanjian dengan Belanda di benteng Oranje pada 16 Mei 1807. Pasal 14 perjanjian tersebut

³⁸ Sumber VOC menyatakan bahwa ia baru dilantik pada 31 Desember 1754.

³⁹ De Clerq, *Op.Cit.*, p. 167, catatan kaki 1.

berbunyi: "Sultan dan pembesar-pembesar Kerajaan (Ternate – pen.) akan tetap setia kepada pelindung mereka, Pemerintah Hindia Timur Belanda."

Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada 1810, Belanda kembali menyerahkan Maluku kepada Inggris di bawah Kapten Tucker. Tahun berikutnya, Inggris mengangkat Kapten Forbes sebagai komandan militer dan kepala pemerintahan sipil, yang kemudian diganti oleh W. Ewer dalam jabatan residen "untuk seluruh urusan Maskapai India Timur (East India Company) di Maluku."

Antara 1813-1816, Inggris menempatkan beberapa residen di Ternate, yaitu W.G. McKenzie, W.B. Martin, R. Stuart, dan setelah itu mengangkat kembali W.G. McKenzie untuk jabatan yang sama.⁴⁰ Tetapi, kembalinya McKenzie menjabat Residen Maluku di Ternate menandai berakhirnya masa pemerintahan Inggris yang relatif singkat di Maluku. Dengan surat keputusan Komisaris Penyerahan Kekuasaan Kepulauan Maluku, tertanggal 5 April 1817, diangkat komisaris untuk pengambilalihan Ternate dan daerah taklukannya yang dijabat oleh Letnan Kolonel J. Graaf, komandan fregat Maria Reigensbergen, dan J.A. Neijs, administrator di Ambon. Keduanya tiba di Ternate pada 24 April 1817, dan satu minggu kemudian – 30 April 1817 – dilakukan pengambilalihan Ternate dari Residen McKenzie. Pada 1818, J.A. Neijs diangkat sebagai Residen Maluku yang pertama.

Setelah penandatanganan Traktat London pada 1824, Pemerintah Belanda melakukan reorganisasi pemerintahan, dan Propinsi Ambon maupun Maluku dibubarkan. Sebagai gantinya, dibentuk Propinsi Kepulauan Maluku yang terdiri atas beberapa *afdeling*. Maluku Utara (sebelumnya: Maluku) ditetapkan sebagai salah satu *afdeling*. *Afdeling Noord Molukken* (Maluku Utara) adalah "Ternate en onderhorigen" (Ternate dan daerah taklukannya), yang hanya terdiri dari Halmahera Utara dan Barat, kepulauan Sula, Pulau-pulau dalam kelompok Banggai, beberapa daerah swapraja kecil di pantai timur Sulawesi – yaitu Bolante, Mindong, Tomeiki dan Tombuku – serta Ternate sendiri.⁴¹ Reorganisasi ini tidak hanya menyangkut Ternate, Tidore, Bacan, tetapi sejumlah besar kerajaan lainnya di Indonesia juga mengalami hal serupa.

Reorganisasi pemerintahan oleh Belanda ini juga didasarkan pada persetujuannya dengan Ternate dan Tidore pada 1817. Dalam persetujuan ini, antara lain, dinyatakan:

1. Kesultanan Ternate dan Tidore mengakui kekuasaan tertinggi dan kedaulatan Pemerintah Hindia Belanda yang berlaku atas kedua kesultanan tersebut.
2. Kedua kesultanan itu menyatakan seluruh wilayah kesultananannya menjadi wilayah Pemerintah Hindia Belanda, dan berjanji membantu Gubernur bila terjadi perang dengan menyediakan sarana dan personil secara bersama-sama.
3. Kedua kesultanan itu berjanji tidak akan membuat perjanjian atau perikatan apapun tanpa izin Gubernur, dan keduanya tidak akan membuat peraturan-peraturan perdagangan dalam negeri, tetapi harus mengacu kepada peraturan-peraturan serupa yang telah dibuat Gubernur.
4. Kedua kesultanan itu mengakui hak-hak Gubernur atas pegawai-pegawai pribumi yang berada di bawah kewenangan sultan. Dalam keadaan darurat, sultan harus membantu Gubernur dengan tenaga dan sarana yang diperlukan.

⁴⁰ *Ibid.* p.168 -170.

⁴¹ P.H. van der Kemp, *Het Nederland Indisch Bestuur van 1817 op 1818*, s'Gravenhage: Martinus Nyhoff, 1917, p. 334.

Perjanjian ini dibuat di benteng Oranje pada 3 Mei 1817 oleh Gubernur Jenderal van der Cappelen dan Sultan Muhammad Ali dari Ternate serta Sultan Muhammad Tahir dari Tidore. Dengan penandatanganan perjanjian tersebut, Ternate – demikian pula Tidore – resmi menjadi kesultanan dalam lingkungan kekuasaan Pemerintah atau Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan kemerdekaan serta kedaulatan keduanya pun berakhir.

Makna penting Ternate, sejak kesultanan ini berada di bawah VOC hingga bubarnya perusahaan dagang tersebut, adalah bahwa kesultanan ini pernah mencatat prestasi sebagai ibukota Netherland Indie dan menjadi tempat kedudukan tiga gubernur jenderal pertama VOC, masing-masing Pieter Both (1610-1614), Gerard Reynst (1614-1615), dan Dr. Laurens Reael (1616-1619).

Di pulau kecil Ternate, terjadi peristiwa-peristiwa besar selama tiga abad (1500-1800) dalam sejarah rempah-rempah Maluku. Sejarah Ternate juga mencatat peristiwa-peristiwa besar lainnya yang menentukan eksistensi penjajahan sebuah kekuasaan asing besar pada zamannya, yaitu masuk dan terusirnya Portugis dari Maluku, berbagai pertarungan perebutan kekuasaan asing – Portugis, Spanyol dan Belanda. Disamping itu, persaingan politik lokal, khususnya antara Ternate dan Tidore, juga menghiasi lembaran sejarah Ternate.

Berbagai keputusan regional penting yang bersejarah bagi VOC selama hampir dua abad (1607-1800) dilahirkan di Ternate. Tetapi, kita juga menyaksikan banyak tragedi sejarah yang dipentaskan di pulau kecil ini. Beberapa penguasa Ternate telah merobohkan salah satu dari keempat pilar Maluku dengan dilikuidasinya Kerajaan Jailolo. Barangkali tepat gelar yang diberikan kepada Ternate sebagai "*Maluku ma-kolano*" (penguasa Maluku).⁴²

⁴² Leonard Y. Andaya, *Op.Cit.*, p. 111.

Bab 5

Tidore: Kerajaan Besar Maluku

Masa Awal

Kerajaan besar kedua di Maluku setelah Ternate adalah Tidore. Tidak dapat dipastikan kapan kerajaan ini didirikan. Valentijn-Keyzer¹ mencatat bahwa Kerajaan Tidore pada mulanya terletak di pegunungan Batu Cina, di sebelah selatan Dodinga. Tetapi, tidak dapat dipastikan kapan pusat kerajaan itu dipindahkan ke pulau Tidore yang sekarang ini dan siapa raja pertamanya.

Data tentang raja-raja Tidore di masa awal, dalam literatur sejarah, dicatat de Clerq dalam bentuk kronik singkat.² Dari buku de Clerq tersebut dapat diprediksi bahwa ketika Kolano Ternate pertama dilantik pada 1257, Kerajaan Tidore belum berdiri. Antara 1277 hingga 1322, terdapat 6 kolano yang bertakhta di Tidore, masing-masing:

1. Busa Muangi
2. Bubu
3. Bali Banga
4. Buku Madoya
5. Kie Matiti
6. Sele.

Para ahli mencatat bahwa kerajaan Tidore mulai eksis pada 1274, tujuh belas tahun setelah Mashur Malamo bertakhta di Ternate. Selanjutnya, Valentijn mencatat dua kolano yang bertakhta di Tidore pada paruhan pertama abad ke-14: pertama adalah Nuruddin, yang berkuasa pada 1334, dan kedua adalah Hasan Syah, pengganti Nuruddin, yang berkuasa pada 1373. Kedua kolano ini belum menggunakan gelar sultan, sekalipun dapat dipastikan bahwa agama Islam telah masuk ke dalam lingkungan Kerajaan Tidore. Gelar *sultan* baru disandang Caliati, yang berkuasa mulai 1495 hingga 1512. Pembimbing spritual Caliati, Syekh Mansur, memberinya nama Jamaluddin. Antara Kolano Hasan Syah dan Sultan Jamaluddin terdapat mata rantai penguasa yang terputus, karena tidak terdapat rekaman sejarah tentang siapa yang berkuasa di Tidore pada masa ini.

Apabila ekspansi teritorial yang dilakukan Ternate mengarah ke utara dan bagian barat Nusantara, Tidore melakukannya ke arah timur. Sebutan yang diberikan kepada kerajaan ini

¹ F.Valentijn-Keyzer, *Oud en Nieuw Oost Indie*, H.C.Susan &C.H.Zoon (s'Garvenhage: 1856), jilid I, p.245.

² De Clerq, F.S.A. *Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate*, E.J.Brill, Leiden 1890. pp. 154-155. Kronik tersebut telah diterjemahkan penulis buku ini, dan diterbitkan oleh IKMU Makassar, 1993.

adalah *Kie ma-Kolano*, "Raja Gunung," yang menjalankan kekuasaannya sebatas pulau berikut gunung (*kie*) yang ada di pulau itu.

Sebutan *Kie ma-Kolano* bagi Tidore sebenarnya tidak cocok, sebab kerajaan ini berkuasa tidak terbatas pada pulau itu saja. Dalam sejarah ketatanegaraan dan ketatapemerintahan Tidore, kerajaan ini menguasai sejumlah pulau dan wilayah yang luas. Ia menguasai Halmahera Tengah dan Timur – Weda, Maba, Patani dan Gebe – Seram Pasir atau Seram Timur, Ambon dan desadesa lain di bawah Rarakit, Werinamatu, Ulisiwa dan sekitarnya, kepulauan Raja Ampat dan Papua daratan yang amat luas itu. Sultan Almansur adalah salah satu penguasa yang paling getol melakukan ekspansi teritorial Kesultanan Tidore. Ia juga merupakan Sultan Tidore pertama yang menerima Spanyol sebagai mitra asing pertama ketika tiba di ibukota kesultanan pada 1521.

Tidore selalu terlibat persaingan ketat dengan Ternate. Persaingan tersebut terutama terjadi di bidang politik dalam rangka merebut hegemoni Maluku. Untuk itu, masing-masing kesultanan selalu siap berebut mitra asing. Ketika berita kedatangan Portugis di Ambon di bawah pimpinan Francisco Serrao sampai ke Ternate dan Tidore, terjadi perlombaan kedua kesultanan itu menjemput Serrao. Tetapi, perlombaan ini dimenangkan Ternate. Tidore kalah cepat. Ketika *juanga* Tidore tiba di Nusa Telu, Serrao telah dalam pelayaran ke Ternate diboyong Kaicil Vaidua, paman Boleif sendiri. Karena itu, ketika Spanyol mendarat di Tidore sembilan tahun kemudian, Almansur segera memikatnya. Sebuah kemitraan antara Tidore dan Spanyol pun digalang, yang berlangsung sekitar satu setengah abad (1521-1663).

Sultan Almansur bergelar *Malikiddin Mansur Kaicil Mulako*. Kapan ia naik takhta, tidak dapat dipastikan. Tetapi, Valentijn mencatat bahwa Almansur naik takhta sekitar 1512.³ Tidak lama setelah ia berkuasa, orang Portugis pertama, Francisco Serrao, tiba di Ternate atas usaha Sultan Ternate Bayanullah (Boleif).

Spanyol dan Almansur

Sisa-sisa armada Magellan, yang melakukan pelayaran atas dukungan Raja Spanyol untuk mencari "kepulauan rempah-rempah," akhirnya tiba di Tidore pada 8 Nopember 1521, setelah mengalami berbagai kesulitan yang bahkan meminta nyawa Magellan sendiri. Sultan Tidore, Almansur, menyambut kedatangan mereka dengan hangat dan penuh keramahan.

Pigafetta, seorang sejarawan dan etnolog Italia yang turut dalam ekspedisi itu, mencatat pandangan matanya ketika ekspedisi Spanyol itu tiba di Tidore:

Tiga jam setelah matahari terbenam, pada hari jumat 8 Nopember 1521, kami memasuki sebuah pelabuhan di Tidore, kemudian lego jangkar dekat pantai dan menembakkan meriam beberapa kali. Pada keesokan harinya, Raja mendekati perahu kami dengan *juanga* kerajaannya dan setelah mengitari sebanyak dua kali, kami menghampirinya dengan sebuah sekoci kapal untuk memperlihatkan penghormatan kami kepadanya.

Raja duduk di bawah tirai sutra yang mengelilinginya dari semua arah terik matahari. Di hadapannya duduk seorang puteranya sambil memegang tongkat kerajaan, dan dua orang lainnya memegang sebuah kendi emas untuk menyiram apabila raja akan membasuh tangan, dan ada dua orang lain yang memegang 2 buah kotak berisi pinang-sirih.

Raja menyatakan kepada pimpinan armada bahwa ekspedisi ini diterima dengan senang hati di Tidore, dan Raja menambahkan bahwa sejak beberapa waktu lalu ia pernah bermimpi dalam

³ Valentijn, vol.Ib p.106.

tidurnya, bahwa akan datang beberapa kapal ke Maluku dari tempat yang agak jauh. Raja telah bertukar pikiran dengan bulan untuk memastikan kedatangan kapal-kapal yang kini telah berlabuh.

Ketika Raja akan naik ke kapal, semua pengiring mencium tangannya, dan para perwira kapal mengantarnya ke haluan. Ia memasuki haluan kapal dari geladak bagian atas. Setelah duduk di kursi berlapis beludru merah, Raja diselimuti dengan sebuah jubah beludru berwarna kuning model Turki. Untuk menampilkan penghormatan yang lebih agung, para perwira duduk bersila di depannya. Setelah semua duduk, raja angkat bicara. Ia menyatakan bahwa seluruh masyarakat Tidore rindu untuk menjalin persahabatan dan kesetiaan kepada Raja Spanyol.

Seluruh perwira dan awak kapal diizinkan turun ke darat, dan menurut raja, "Seluruh Tidore harus dianggap sebagai rumah kalian sendiri." Nakoda kapal kemudian menyerahkan sejumlah hadiah: sebuah jubah, kursi Eropa, kain linen halus, sutra brokat, beberapa potong kain India yang dibordir dengan emas dan perak, berbagai rantai kalung dan manik-manik, tiga cermin besar, cangkir minum, sejumlah gunting, sisir, pisau serta berbagai benda berharga lainnya. Kepada puteranya dihadiahkan sepotong kain yang diaplikasikan dengan emas dan perak, sebuah jubah, sebuah cermin besar, dan dua buah pisau. Sembilan orang *bobato* yang menyertainya masing-masing memperoleh sepotong kain sutera, jubah, dan pisau.

Dua hari setelah kedatangan armada Spanyol, Almansur mengundang mereka ke istana di Mareku untuk suatu jamuan makan siang. Dalam pembicaraan dengan kapten kapal, Raja mengizinkan mereka menggelar dagangannya di pasar. Raja membantu membuatkan tempat-tempat berjualan dari bambu dan atap, sehingga terjadilah perdagangan tukar-menukar. Sepotong kain merah ditukar dengan cengkih satu bahar (550 pon), 50 pasang gunting dengan satu bokor cengkih, tiga buah gong dengan dua bokor cengkih. Dengan cepat seluruh cengkih di Tidore ludes, sehingga harus dicari di tempat lain seperti di Moti, Makian, dan Bacan.⁴

Kegiatan Spanyol di Tidore telah menyita perhatian orang-orang Portugis dan petinggi Kerajaan Ternate. Tetapi, Spanyol berhasil memperoleh cengkih cukup banyak dan kini bersiap-siap kembali. Ketika hendak bertolak pulang, salah satu kapalnya bocor dan perlu diperbaiki dengan mengganti beberapa buah papannya. Almansur berjanji menyediakan bahan kayu dan tukang yang diperlukan. Kapal segera naik ke darat, tetapi karena bantuan kayu dari Raja belum tiba, awak kapal berusaha sendiri dan berhasil memperbaikinya. Di akhir Desember 1521, orang-orang Spanyol kembali siap bertolak. Tetapi, atas desakan Almansur kepada Kapten Victoria del Cano, empat anak buahnya ditinggalkan di Tidore untuk meneruskan perdagangan. Kapten kapal berjanji akan ada ekspedisi Spanyol berikutnya yang menggantikan mereka.

Setelah itu, kapal Victoria mengangkat sauh dan berlayar di bawah komandan Kapten del Cano dengan 47 awak Spanyol, 13 awak Filipina berbahasa Melayu sebagai penerjemah, dan beberapa orang Tidore. Sebuah *juanga* mengantar kapal Victoria hingga ke laut lepas. Sementara kapal Trinidad yang akan menyusul kemudian, justru kandas di pantai Tidore sehingga 49 awaknya turun dan bergabung dengan empat awak Victoria yang ditinggalkan di Tidore. Victoria sendiri akhirnya tiba dengan selamat di Spanyol.

Sejak kedatangan ekspedisi Spanyol di Tidore, Sultan Almansur berhasil menjalin hubungan sedemikian eratnya, sehingga suatu perjanjian militer antara Tidore dan Spanyol dibuat untuk mengimbangi persekutuan serupa yang mengikat Ternate-Portugis. Perjanjian militer yang dibuat kedua kerajaan Maluku dengan mitra asingnya itu dimaksudkan untuk memberikan rasa

⁴ Alwi, Des. *Sejarah Maluku*, pp.324-328.

aman. Akan tetapi, seperti kemudian terbukti, konflik kedua mitra mereka yang sama-sama Barat itu akhirnya menyeret dan melibatkan Ternate serta Tidore.

Sungguhpun demikian, Almansur berpendapat bahwa antara Tidore dan Spanyol terdapat persamaan rencana untuk menghadapi persekutuan Ternate-Portugis. Sebab, bagi Portugis, Spanyol adalah saingan yang cukup serius. Itulah sebabnya, Antonio de Brito, Gubernur Portugis pertama untuk Maluku, merasa perlu membangun sebuah benteng di Ternate berikut perkampungan bagi orang-orang portugis.

Pada masa Almansur bertakhta, ibukota Tidore berada di Mareku dan menjadi pusat kekuasaan. Rakyat Tidore memandang kota ini punya harkat tersendiri sebagai sumber kegiatan sultan. Mareku juga dipandang sebagai pusat kesaktian yang disandang para sultan. Walaupun istilah yang diberikan oleh tradisi dan mitos kepada penguasa Tidore adalah *kie ma kolano* (penguasa Gunung), akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya ia disebut juga sebagai *Kaicil Maluku* (Pangeran Maluku).

Produksi rempah-rempah dan kemajuan perdagangan, berikut berakar dengan kuatnya agama Islam, menjadikan Tidore bersama Ternate dikenal sebagai pusat dunia Maluku yang utama.

Diberitakan bahwa pada suatu ketika Almansur memberi perintah kepada *Sangaji Patani*, Sahmardan, untuk mencarikan seorang warga atau seorang penduduk dari kampung-kampung sekitarnya yang berani dan kuat untuk membantu Raja melawan Ternate. Sahmardan mohon diri untuk melaksanakan titah itu dan melakukan perjalanan mengeliling pulau-pulau hingga akhirnya menjangkau Waigeo. Di suatu tempat bernama Kabu, ia bertemu dengan Kapita Waigeo bernama Gurabesi.

Ketika Gurabesi memperoleh informasi bahwa Sultan Almansur membutuhkan orang paling berani dan paling kuat, Sahmardan dan Gurabesi lalu menghadap Sultan. Sepuluh tahun kemudian, kedua orang inilah yang mempersembahkan Papua daratan untuk Kerajaan Tidore dalam suatu perjalanan Almansur ke daerah itu setelah “dibereskan” Sahmardan dan Gurabesi. Gurabesi pun kemudian diangkat menjadi *Sangaji Waigeo*.⁵ Ceritera lain mengemukakan bahwa kepulauan Raja Ampat dianeksasi Tidore hanya atas upaya empat orang kapita, masing-masing Kapita Maba, Patani, Bicoli, dan Buli. Di daerah seberang laut ini, Sahmardan diangkat sebagai *salahakan* dan Gurabesi dalam posisi yang sama di Biak.

Kemelut Spanyol-Portugis

Pada 1526, Almansur wafat, tetapi hingga awal 1529 belum ditetapkan penggantinya. Akibatnya timbul kevakuman, dan hal ini memberi peluang kepada dua kekuasaan asing yang saling bersaing di Maluku: Portugis dan Spanyol. Kevakuman ini menimbulkan dualisme dalam pemerintahan Tidore, karena Portugis maupun Spanyol sama-sama menjalankan kekuasaannya. Rakyat bingung dan para *bobato* tidak mampu mengatasinya.

Kehadiran Spanyol di Tidore, telah mendorong Portugis dan Ternate menggempur Tidore. Pada akhir tahun 1524, dua tahun sebelum kepergian Almansur, sebuah pasukan gabungan Ternate-Portugis dipimpin Wakil Sultan Taruwese yang ambisius menyerbu Mareku, ibu kota Tidore. Tidak kurang dari 600 tentara gabungan Ternate-Portugis terlibat dalam penyerbuan ini.

⁵ Andaya, *loc.cit.*

Setelah ibukota diobrak-abrik, kaum penyerbu mengundurkan diri. Akan tetapi, sebagian orang Portugis tidak mau meninggalkan Mareku sungguhpun mitra penyerbunya, pasukan-pasukan Ternate, sudah mundur dan kembali ke Ternate. Inilah awal keberadaan orang-orang Portugis di Tidore.

Kehadiran Spanyol di Tidore telah menimbulkan ketegangan bagi Ternate dan Portugis, karena kapal-kapal Spanyol telah melayari seluruh pelosok perairan Maluku. Portugis pernah memergoki sebuah kapal Spanyol tengah berada di pelabuhan Samafo di selatan Tobelo, tanpa bisa dilacak apa tujuannya.

Pada 1526, sebuah armada Spanyol yang terdiri dari lima kapal dan membawa sekitar 300 orang prajurit bertolak dari Lisboa menuju Tidore, dipimpin Martin Ignatius Karkafe. Kedatangan Karkafe ke Tidore telah mengejutkan Gubernur Portugis di Ternate, Jorge de Menezes. Ia lalu mengutus Manuel Fancon dan Wakil Sultan Taruwese ke Tidore dengan membawa sepucuk surat untuk Karkafe. Dalam jawabannya, Karkafe menjelaskan bahwa kedatangan armadanya ke Tidore atas perintah atasannya. Karkafe juga menyatakan bahwa pelayarannya ke Maluku melalui jalur yang dilewati Magellan dan tidak melalui jalur timur seperti yang dilakukan Portugis. Karena itu, pelayarannya memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam pernyataan Paus Alexander VI tentang pembagian wilayah antara Spanyol dan Portugis, dan karena itu pula ia berhak berbuat seperti yang dilakukannya sejauh ini. Karkafe sendiri meninggal di Ambon pada 1527.

Yang dimaksud Karkafe dalam jawabannya itu adalah pernyataan Paus Alexander VI pada 1493 dan Traktat Terdesallas 1494. Pernyataan dan traktat ini telah membagi dunia dalam dua kekuasaan, masing-masing Spanyol dan Portugis. Daerah Maluku masuk dalam kawasan di bawah Portugis, sehingga pada 1512 Portugis mendarangi pulau itu sekaligus seluruh perairan Maluku. Itulah sebabnya Charles V mengklaim kepulauan Maluku.

Tidore dan Portugis

Ketika dua kapal dari ekspedisi Magellan mengunjungi Tidore pada 1521, Portugis memutuskan membangun sebuah benteng di Ternate. Pada 1529, penguasa Portugis dan Spanyol menandatangani perjanjian Zaragoza. Charles lalu melepaskan klaimnya atas Maluku dengan kompensasi 350.000 *ducats*. Tetapi, kompensasi ini tidak serta merta menyebabkan Spanyol keluar dari Maluku. Armadanya masih tetap datang ke Maluku, yang dikirim dari Spanyol langsung atau dari Mexico dengan menyeberangi Samudera Pasifik. Karena ekspedisi langsung dari Spanyol mengikuti jalur Magellan dirasakan terlalu jauh, ekspedisi-ekspedisi ke Maluku selalu diberangkatkan dari Spanyol baru (Mexico) dengan menyeberangi samudera Pasifik yang lebih pendek jaraknya.⁶

Walaupun Tidore membenci Portugis karena menjadi mitra Ternate, dan karena serangan-serangannya yang telah beberapa kali dilakukan terhadap kerajaan ini, akan tetapi atas perintah Raja Portugis, pada 1578 Portugis membangun pemukimannya di suatu areal terbatas. Di samping itu, Portugis juga membangun benteng yang diberi nama *Dos Reis Mogos*. Hingga awal abad ke-17, silih berganti kapten Portugis memimpin benteng ini:

1. 1578 - Oktober 1581: Diego de Azambuya de Melo,

⁶ Lihat *Documenta Malucensia*, Vol.I.p.11.

2. Oktober - Desember 1582: Alvaro de Castro
3. Februari 1582 - 1586: Diego de Azambuya
4. Februari 1586 - 1589: Duarte Pereira de Sampaio
5. 1589 - 1592: Rui Dias da Cunha
6. 1592 - 1595: Tristao de Sousa
7. 1595 - Nopember 1598: Juliao de Noronha
8. 1598 - 1602: Rui Gonsalves de Seculira
9. 1602 - 1605: Pedro Alvares de Abreau
10. 1605: Manuel de Melo (tidak pernah melakukan tugasnya).⁷

Berbeda dengan Ternate, para kapten benteng Tidore tidak mencampuri sama sekali urusan-urusan internal kesultanan. Tugas utama mereka hanya melakukan perdagangan rempah-rempah, atas izin Sultan Gapi Baguna dan Mole Majimu. Sultan Gapi Baguna pada awalnya menampakkan sikap bersahabat dengan orang Portugis yang ada di Tidore untuk menghadapi pertumbuhan kekuatan Ternate. Tetapi, ketika memberi izin pendirian benteng kepada Portugis di Tidore pada 1578, Gapi Baguna merasa perlu mengundang seorang pastor untuk meminta pertimbangannya. Ia menekankan bahwa apabila sebuah gereja kelak didirikan di dekat benteng, harus ada jaminan bahwa tidak akan ada upaya mengonversi agama rakyat Tidore. Pada 1605, benteng Portugis yang ada di Tidore ini diserbu dan berhasil direbut Belanda.

Kebijakan Gapi Baguna diambil untuk menenggang rasa orang-orang asing dan mencegah mereka beralih ke Ternate. Tetapi, ia melarang kegiatan dan tindakan yang bersifat militer. Kebijakan ini membuat posisi orang-orang Portugis dan Misi Jesuit sangat sulit, untuk tidak mengatakan sangat berbahaya. Ketika Gapi Baguna mulai uzur, orang-orang Portugis di Tidore mulai cemas akan nasib mereka dan bagaimana sikap penggantinya kelak.

Para Sultan Tidore di masa itu selalu melarang campur tangan Portugis dalam masalah-masalah internal kerajaan. Karena itu, hal-hal krusial seperti yang terjadi pada kerajaan Ternate tidak terjadi di Tidore. Kebijakan ini pula yang menyelamatkan Tidore dari intrik-intrik dan persekongkolan politik pada setiap kali pengangkatan sultan baru.

Ketika Gapi Baguna wafat pada 1599, terdapat dua kandidat yang bersaing memperebutkan takhta Tidore. Kedua-duanya terbunuh, sehingga akhirnya Mole Majimu yang memperoleh mahkota kerajaan Tidore. Ia dikenal sebagai tokoh yang bersahabat dengan orang-orang Portugis.⁸

Amiruddin Iskandar Zulkarnain

Pada 1529, sekitar tiga tahun setelah Almansur wafat, putera bungsu Almansur, Amiruddin Iskandar Zulkarnain, dilantik sebagai Sultan Tidore. Di kalangan orang Barat ia dikenal sebagai *King Mir*. Tetapi, karena Amiruddin masih di bawah umur, Dewan Kerajaan Tidore menunjuk Kaicil Rade sebagai Mangkubumi. Kaicil Rade adalah seorang bangsawan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Documenta Malucensia*, Vol.II,pp.9-10.

tinggi Tidore yang amat terpelajar pada masanya, seorang negosiator ulung yang fasih berbahasa Spanyol dan Portugis. Karena integritasnya kepada kerajaan dan intelektualitasnya yang tinggi, ia sangat disegani penguasa Spanyol dan Portugis. Gubernur Portugis Antonio Galvao sangat memuji kemampuan tokoh Tidore ini. Selain itu, Rade juga prajurit yang handal dan pemberani.

Pada masa pemerintahan Amiruddin inilah, Sultan Deyalo dimakzulkan Portugis dari takhta kesultanan Ternate dan melarikan diri ke Tidore. Di Tidore, Deyalo memperoleh perlindungan Amiruddin. Deyalo meloloskan diri dari Gamlamo yang dijaga dengan ketat oleh tentara Portugis. Mula-mula ia diberangkatkan ke suatu tempat yang terletak beberapa kilometer dari pemukiman orang-orang Melayu. Dan dari sana, ia dibawa dengan perahu ke Tidore untuk memperoleh perlindungan Sultan Amiruddin.

Penolakan Sultan Amiruddin untuk menyerahkan Deyalo kepada Portugis membuka jalan bagi Portugis untuk menyerang Tidore beberapa tahun kemudian. Pasukan gabungan Ternate-Portugis melacak pelarian Deyalo dan berdasarkan informasi yang mereka peroleh akhirnya dipastikan bahwa Deyalo telah menyingkir ke Jailolo. Kasus Deyalo tidak hanya membawa krisis di lingkungan Kerajaan Ternate, tetapi nyaris menimbulkan bentrokan senjata antara Ternate dan Tidore. Situasi baru mereda ketika Gubernur Portugis Fonceca mengangkat Tabariji, adik Deyalo, menjadi Sultan Ternate.

Di akhir kekuasaan Sultan Amiruddin, sebuah armada dengan kekuatan 170 serdadu Portugis dan dibantu beberapa ratus orang Ternate menyerang Tidore pada 1535. Delapan buah pemukiman di tepi barat Tidore berhasil direbut, tetapi gerak laju pasukan gabungan Ternate-Portugis tersebut dapat dihentikan setelah pasukan Tidore yang didukung kuat rakyat menahan laju pasukan penyebu.

Pada tahun berikutnya, Taruwese – yang bersekutu dengan seorang petualang Portugis bernama Don Jonge – kembali menyerbu ibukota Tidore dengan dukungan 100 serdadu Portugis dan 1000 pasukan Ternate. Serbuan ini dilakukan Taruwese dan Don Jonge tanpa persetujuan gubernur Portugis. Ibukota Tidore, yang baru dibangun akibat serbuan tahun lalu, habis dijarah kemudian dibakar.

Tentara Spanyol di Tidore, walaupun berjumlah sedikit dibandingkan pasukan penyerbu Ternate-Portugis, menolak menyerah ketika diberi ultimatum. Di bawah kapten Ferdinand de Rotour, pasukan gabungan Tidore-Spanyol menawarkan perdamaian dengan syarat Deyalo, yang diuber Taruwese, dibolehkan hijrah ke Jailolo. Dengan demikian, perang itu dapat dihentikan.

Perang Tidore – Portugis

Pada 27 Oktober 1536, Gubernur Portugis yang baru, Antonio Galvao, tiba di Ternate. Ia merupakan gubernur pertama yang dipilih langsung Raja Portugis berdasarkan prestasinya. Galvao mendapati kota Ternate yang hangus dan porak poranda. Semua fasilitas kota hancur. Banyak orang Portugis, budak, dan tawanan mati. Harga bahan kebutuhan pokok melambung sangat tinggi. Karena itu, tindakan awal Galvao adalah “menurunkan” harga kebutuhan pokok yang berhasil dicapainya dalam waktu relatif singkat.⁹

Ketika sedang sibuk menata ulang segala yang telah dirusaki gubernur sebelumnya, de Ataide, Galvao memperoleh informasi bahwa para sultan Maluku tengah bermusyawarah di

⁹ A. Galvao, *Op.Cit.*p.321ff.

Tidore untuk mempersiapkan peperangan melawannya, karena mengiranya berperangai sama dengan Ataide. Melalui komandan armadanya, Gonzalo Vas Sernache, Galvao mengirimkan pesan menawarkan perundingan damai. Pesan ini ditolak para sultan, karena yakin akan kekuatannya yang telah mengalahkan de Ataide dalam sejumlah pertempuran.

Galvao mengadakan perundingan dengan dewannya dan membahas suatu ekspedisi militer untuk mengatasi persekutuan para sultan Maluku. Mayoritas dewan berpendapat bahwa tidak mungkin menggempur Tidore dan melawan sekian banyak pasukan para sultan tanpa minta bantuan ke Goa. Galvao sendiri berpendapat bahwa bantuan tidak mungkin tiba dalam waktu singkat, walaupun Raja Muda Goa adalah ayahnya sendiri. Sementara itu, logistik terus menipis.¹⁰

Akhirnya, dengan mempercayakan pertahanan benteng Gamlamo kepada Ataide, mantan gubernur yang digantikannya, Galvao pergi ke Talangame, di mana kapal-kapal Portugis berlabuh. Ia meminta Kapten Fernao Henriques dan anak buahnya untuk bersiap siaga dan menunggu perintah darinya. Galvao akhirnya berangkat dengan dua kapal besar, sebuah brigantine (kapal bertiang dua) dan beberapa buah *juanga* di bawah pimpinan kaptennya, masing-masing Gonzalo Vas, Fernao Leitao, Francisco de Monray dan Balthazar Viloso. Pasukan yang ikut serta dalam ekspedisi ini adalah 170 tentara regular, 100 penembak jitu, 120 budak dan sejumlah bangsawan serta ksatria Portugis.

Sementara di Tidore, kesultanan-kesultanan yang bersekutu memiliki 40 hingga 50 ribu tentara di bawah pimpinan Kapita Laut Tidore, Kaicil Rade. Pasukan ini dilengkapi dengan bom, senapan, tombak, pedang, dan perisai hasil jarahan dari orang-orang Portugis dan Spanyol. Di samping itu terdapat juga pasukan berkuda dan pasukan pemanah.

Armada Portugis mulai melepaskan tembakan dan menghancurkan kampung-kampung di sepanjang pesisir pantai yang dilaluinya. Tembakan ini dibalas pasukan gabungan. Tembakan menembak di antar kedua pasukan pun dimulai. Setelah meredanya kontak senjata antara pasukan Portugis dan pasukan para sultan, Galvao mengirim kurir kepada Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain dan para sultan lainnya untuk menyampaikan bahwa ia datang bukan untuk memerangi mereka, tetapi untuk persahabatan dan perdamaian serta akan memberikan penawaran jika mereka merasa disakiti. Namun, kurir Galvao malah dibunuh dan pasukan Tidore sepanjang hari mencaci-makinya. Galvao memerintahkan pasukannya agar tidak terpancing melayani cacian dan kata-kata hinaan itu.¹¹

Setelah itu, Tidore menembakkan artilerinya semalam suntuk dan dibalas oleh Armada Galvao. Ketika pagi tiba, pasukan Galvao mulai mendarat di bagian bawah kota. Meriam-meriam Tidore menyambut pendaratan ini dengan tembakan gencar yang memaksa pasukan Portugis mundur dan naik kembali ke kapalnya. Keesokan harinya, sebuah regu intelijen Portugis berhasil menawan seorang tentara Tidore yang kemudian diinterogasi dan dipaksa membeberkan jaringan pertahanan serta benteng-benteng utama Tidore berikut kekuatan pasukannya.

Dengan jasa tawanan tersebut sebagai penunjuk jalan, Galvao melakukan serangan fajar pada hari berikutnya dengan tujuan menaklukkan salah satu benteng yang terletak di bukit. Pasukan Portugis yang didaratkan terdiri dari 120 tentara regular, 80 penembak jitu serta sejumlah budak. Menurut Galvao,¹² pertahanan pasukan para sultan terdiri dari beberapa lapis.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, p.243.

¹² *Ibid.*, p.249.

Paling depan adalah pasukan Ternate di bawah pimpinan Sultan Deyalo, di samping kanannya pasukan Tidore, di sebelahnya lagi pasukan Bacan pimpinan Sultan Raudin (Alauddin?), dan di sebelah kiri pasukan Jailolo yang dipimpin Kolano Katarabumi.

Lantaran telah mengetahui kelemahan musuh, Galvao dapat memenangkan pertempuran dan menaklukkan benteng tersebut. Sultan Deyalo bahkan terluka parah dan dilarikan anak buahnya. Setelah benteng jatuh, pasukan gabungan Tidore mundur. Pasukan Portugis lalu membakar rumah dan desa-desa di sekitarnya, serta bergerak masuk ke ibukota Tidore untuk melakukan tindakan bumi hangus serupa. Kemenangan Portugis atas pasukan gabungan ini tercapai pada 21 Desember 1536.

Sultan Tidore kemudian mengirimkan kurir kepada Galvao untuk menawarkan sebuah perundingan damai. Tetapi, karena kurir itu bukan tokoh kunci, Galvao memberitahukan sultan agar mengirimkan seorang pejabat resmi, dan menyampaikan pesan khusus bahwa Portugis ingin berdamai. Setelah segala sesuatunya dilaporkan kepada Sultan Amiruddin, kurir yang sama kembali lagi dengan membawa pesan Sultan agar Gubernur Galvao datang ke negeri Seli dan Kaicil Rade nantinya telah berada di sana. Galvao dan pengawalinya kemudian pergi ke Seli yang cukup jauh, dan ternyata Kaicil Rade – yang dikenal di kalangan Portugis sebagai “seorang pria berwibawa dan berperilaku paling santun” – juga telah berada di sana bersama pasukan pengawalinya. Setelah bersalaman, mereka duduk. Gubernur berbasa-basi memuji Kaicil Rade yang, dalam pertempuran Portugis melawan pasukan gabungan, menjadi komandan pasukan tersebut.

Berikut adalah dialog antara Galvao dan Kaicil Rade, Kapita Laut Tidore dan panglima gabungan pasukan Tidore, seperti direkam Galvao dalam karyanya *Historica das Molucas*.¹³

“*Sir* Kaicil Rade, saya tahu bahwa anda adalah seorang laki-laki bermartabat tinggi dan terhormat. Dan sebagai tambahan bagi kemuliaan derajat anda, anda terkenal sebagai yang paling adil dan baik hati di negeri ini. Selama ini Anda menjadi komandan tertinggi melawan Portugis, seperti terlihat oleh beragamnya tanda-tanda yang anda kenakan dan oleh keberanian anda yang luar biasa. Tentang semua yang telah saya dengar mengenai anda, saya dengan senang hati menganugerahkan kepada anda, atas nama Raja Portugis, kerajaan ini; karena bukan keinginan saya agar kakak anda memerintahnya, ataupun salah satu dari raja-raja yang lain, karena mereka telah memberontak setiap hari melawan benteng (Portugis – pen.). Jika para komandan dan orang Portugis berbuat kejahatan terhadap mereka, ada gubernur tempat mereka mengeluhkannya. Atau, mereka bisa mengirim keluhan mereka kepada Raja Portugis, karena Raja berpikiran begitu terbuka dan baik hatinya, sehingga ia tidak saja berbuat keadilan kepada mereka, seperti yang diperintahkannya kepada para komandan, tetapi juga akan memberi mereka banyak bantuan dan kehormatan”.

Kapita Laut Kaicil Rade, dengan menggunakan bahasa Spanyol dan Portugis, menjawab pernyataan Gubernur Galvao:

“Tuan Gubernur, saya menganggap pujian anda terhadap saya dan pemerintahan yang anda janjikan, keduanya sebagai kebaikan. Tetapi, bagaimana anda bisa berharap saya menerima tawaran yang bertolak belakang dengan kewajiban dan kehormatan saya? Apa kata orang jika mendengar hal ini? Untuk apa saya, yang datang untuk membuat kesepakatan antara anda dan saudara saya, meminta kepada anda apa yang menjadi haknya? Dengan cara semacam itu, saya akan kehilangan semuanya – seperti kata anda – yang saya capai dalam waktu begitu lama, melalui keserakahan sesaat. Akan terkutuklah pemerintahan yang berdasarkan pada hilangnya apa yang telah dicapai dengan segala daya upaya, untuk dunia ini dan dunia mendatang. Saya telah mengikhlasakan diri saya dalam posisi seorang budak bagi saudara kandung saya, dan saya tidak akan mengizinkan aib menimpa saya dan keturunan saya”.

¹³ Ibid, p.258.

Ketika mengucapkan pernyataan di atas, Kaicil Rade tampak terharu dan meneteskan air mata. Melihat itu, Galvao merasa iba dan berkata: "Sir Kaicil Rade, saya sangat menyesal melihat anda menunjukkan kelemahan ini, yang wanita pun tak pantas melakukannya, apalagi seorang petinggi seperti anda". Kaicil Rade langsung menjawab:

"Tuan Gubernur, Ini bukan akibat kelemahan, ataupun kehilangan kehidupan dan negara, karena saya tahu hal-hal itu terjadi di dunia. Tetapi, dari perasaan, saya tahu bagaimana saya lahir di sebuah negeri yang jahat dan saya mesti dipandang sebagai salah seorang puteranya. Karena itu, tuan Gubernur, saya mohon kepada anda agar berhenti mendesak saya dengan berbagai tawaran tentang kerajaan ini dan agar anda membiarkan saudara saya tetap bertakhta. Saya berjanji kepada anda bahwa dia tidak akan memberontak selama masa tugas anda, atau gubernur lainnya selama saya masih hidup. Saya akan menerima tawaran anda bagi kerajaan yang sedang kesulitan ini dengan tanggung jawab saya bahwa anda akan dilayani dengan baik olehnya, jika saja sadara saya dan keluarga kami tetap dalam status bebas".

Menurut Galvao, kata-kata dan janji Kaicil Rade terbukti benar adanya. Ia dapat dipercaya dan mereka akhirnya bersahabat karib. Setelah beberapa lama berunding, Galvao dan Kaicil Rade mencapai kata sepakat untuk berdamai dan Portugis akan keluar dari Tidore. Untuk itu, Galvao meminta Sultan Tidore harus bertemu dengannya agar ia dapat mendengar sendiri secara langsung kata-kata damai yang disampaikan Sultan. Kaicil Rade berjanji akan menyampaikan permintaan tersebut kepada Sultan. Keesokan harinya, Kaicil Rade menyampaikan pesan bahwa Sultan akan menemui Gubernur di Seli.

Hari berikutnya, ketika masih pagi sekali, para pengawal Galvao melaporkan telah melihat banyak orang yang datang tanpa senjata. Paling depan terlihat Kaicil Rade, dan dibelakangnya Sultan Tidore didampingi para *bobatonya*. Setelah membicarakan berbagai masalah, kedua pihak menyepakati perdamaian. Selesai pertemuan tersebut, Galvao naik ke kapalnya dan meninggalkan Tidore, kembali ke Ternate.

Isi pokok perjanjian perdamaian antara Tidore-Portugis terdiri dari dua pasal:

1. Semua rempah-rempah hanya boleh dijual kepada Portugis dengan harga sama yang dibayarkan Portugis kepada Ternate.
2. Portugis akan menarik armadanya dari Tidore.

Setelah tercipta perdamaian antara Tidore dengan Portugis, atas prakarsa Kaicil Rade, Bacan dan Jailolo juga membuat perdamaian dengan Portugis berdasarkan syarat-syarat yang sama: monopoli perdagangan rempah-rempah oleh Portugis, dan Portugis harus keluar dari wilayah mereka.

Tidore di bawah Sultan Saifuddin

Pada 1547, Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain tutup usia. Kaicil Rade sendiri sudah berusia lanjut dan terlalu tua menerima amanat takhta kesultanan Tidore. Sejak wafatnya Sultan Amiruddin hingga bertakhtanya Sultan Saifuddin – yakni dari 1547 hingga 1557 – telah berkuasa di Tidore tiga sultan secara berturut-turut: Kie Mansur, Iskandar Sani, dan Gapi Baguna. Tetapi, dibandingkan Sultan Saifuddin (1657-1689), ketiga Sultan Tidore tersebut memiliki prestasi yang biasa-biasa saja untuk dikenang. Apabila Ternate memiliki Khairun dan Babullah yang harus dikenang sepanjang masa, maka Sultan Tidore sekaliber itu tercermin pada diri Saifuddin dan Nuku. Apabila Khairun bisa menuntaskan masalah melalui hikmah dan kebijaksanaan, maka

sikap seperti itu terdapat pada Saifuddin. Demikian pula, apabila Babullah dapat mencapai solusi suatu masalah lewat tindakan militer, hal serupa juga terlihat pada diri Nuku.

Selama masa pemerintahannya sekitar 32 tahun, tidak pernah terbetik berita bahwa Sultan Saifuddin pernah menghunus pedang atau mengerahkan tentara untuk menyelesaikan suatu masalah. Sesuai wataknya, Saifuddin adalah pasifis, sarat dengan ide-ide yang kadang sukar diimplementasikan. Pada masa Saifuddin, Tidore dapat merehabilitasi dirinya menjadi sebuah kerajaan penting di samping Ternate, dengan daerah seberang laut yang tetap utuh, dan memperoleh legalitas dari Pemerintah Belanda yang berkuasa. Tetapi, berbeda dengan Ternate, Saifuddin tidak pernah meminta bantuan asing, bahkan selalu menjaga jarak dengan kekuasaan kolonial. Sekutu tradisional Tidore masa lalu – yakni Spanyol – telah pergi, sementara Belanda memandang Tidore sebagai “anak nakal.”

Gagasan Saifuddin tentang Restorasi Empat Pilar Maluku

Salah satu gagasan Saifuddin yang kuat dan tetap diperjuangkannya secara konsisten adalah membangun kembali Maluku yang bertopang di atas 4 pilar: Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Baik dalam tatap muka maupun dalam berbagai surat yang dikirim kepada Gubernur Maluku Padtbrugge, Saifuddin selalu memperingatkan bahwa di masa lalu ada empat kerajaan yang eksis di Maluku. Dengan berdiri tegak di atas empat pilar yang kuat itulah Maluku selalu bersatu, aman dan makmur. Ia mengingatkan kepada semua kerajaan Maluku untuk mengenang kembali masa lalu Maluku yang jaya itu.

Ketika bertemu dengan Gubernur Maluku, Padtbrugge, Saifuddin sekali lagi menyatakan bahwa menghidupkan kembali Jailolo adalah sebuah tuntutan sejarah. Sebab, Maluku di masa lalu terdiri atas empat kerajaan (*Moloku Kie Raha*), bukan tiga kerajaan seperti sekarang. Bila Jailolo ikut menegakkan Maluku sebagai salah satu dari keempat pilar tersebut, Saifuddin yakin bahwa Maluku yang damai dan sejahtera akan terwujud. Saifuddin juga mengemukakan bahwa kehadiran kekuasaan asing seperti Portugis, Spanyol dan Belanda, serta aksi-aksi politik dan militer yang dilakukannya telah menyebabkan Maluku terpecah-pecah, merusak sendi-sendi persatuannya dan melemahkan posisi Maluku. Ketiadaan Jailolo berarti bahwa Maluku hanya tegak di atas tiga pilar. Gagasan Saifuddin inilah yang mengilhami Sultan Nuku di akhir abad ke-18, dan untuk mengimplementasikannya Nuku lalu memproklamasikan berdirinya kembali Kerajaan Jailolo.

Negosiasi dengan Speelman

Sisi lain dari kebijakan yang ditempuh Saifuddin adalah berupaya memperoleh legitimasi yuridis dan praktis atas daerah seberang laut Tidore, seperti kepulauan Raja Ampat dan Papua daratan. Pada 13 Maret 1667, Laksamana Speelman, salah seorang petinggi puncak VOC di Batavia, berkunjung ke Ternate. Saifuddin bersama Mandar Syah turut menyambutnya. Dua hari kemudian, berlangsung pertemuan bilateral antara Speelman dengan Saifuddin dan para *bobatonya* di benteng Oranje Ternate.

Saifuddin memasukkan masalah kepulauan raja Ampat dan Papua daratan sebagai salah satu agenda perundingan, di samping masalah monopoli cengkik yang telah lama dituntut VOC. Dalam perundingan ini, Saifuddin berhasil “menukar” hak monopoli atas cengkik dengan pengakuan VOC terhadap hak-hak kerajaan Tidore atas kepulauan Raja Ampat dan Papua daratan.

Pengakuan VOC atas hak teritorial Tidore ini merupakan prestasi terbesar Sultan Saifuddin, dan sekaligus menepis berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Kandungan pokok perjanjian yang disepakati pada 28 Maret 1667, setelah berunding selama dua hari, adalah sebagai berikut:

1. Kompeni VOC mengakui hak-hak dan kedaulatan Kesultanan Tidore atas kepulauan Raja Ampat dan Papua daratan
2. Kesultanan Tidore memberikan hak monopoli perdagangan rempah-rempah dalam wilayahnya kepada Kompeni.¹⁴

Mengambil-alih Peran Ternate

Saifuddin adalah seorang sultan sekaligus politikus. Apabila para Sultan Tidore sebelumnya selalu bersikap non-kooperatif kepada Belanda, Saifuddin melihat lebih jauh ke depan dan selalu mendahulukan kepentingan kerajaan ketimbang berbuat pamrih. Politik non-kooperatif yang selama ini dipegang para sultan sebelumnya dipengaruhi para ulama yang memandang “kafir” bekerjasama dengan Belanda. Saifuddin lebih pragmatis. Ia ingin menciptakan horizon baru dalam hubungan Kerajaan Tidore dengan VOC untuk menggapai tujuan yang lebih jauh. Politik anti-Kompeni (VOC) perlahan-lahan mulai dikendurkannya.

Ketika Saifuddin membuat perjanjian untuk memberikan hak monopoli perdagangan rempah-rempah kepada VOC, reaksi keras bukan hanya datang dari para ulama dan kalangan istana, tetapi juga dari para *sangaji* di daerah-daerah. Padahal, pemberian hak monopoli oleh Saifuddin 150 tahun lebih belakangan dibandingkan Ternate. Untuk pemberian hak monopoli ini, Tidore memperoleh 2400 ringgit tiap tahun sebagai imbalannya.

Di kalangan rakyat dan orang-orang yang anti monopoli, beredar rumor bahwa Saifuddin yang menandatangani pemberian hak monopoli perdagangan rempah-rempah dengan Gubernur Belanda untuk Maluku, Simon Cos, juga telah menggadaikan kerajaan Tidore kepada VOC. Saifuddin membantah keras semua rumor tersebut dan menjelaskan tujuan yang ingin diraih adalah untuk memperbesar peranan Tidore dalam percaturan regional.

Saifuddin tahu bahwa peran Ternate, setelah wafatnya Babullah, semakin merosot dan kekuatan kerajaan ini hanya bergantung pada dukungan dan kesediaan negara asing untuk menolongnya. Saifuddin cukup mengerti bahwa Ternate kini tengah bergelut dengan makin merosotnya loyalitas daerah-daerah seberang laut: Buton telah melepaskan diri dan bergabung dengan Makassar, Selayar telah diambil VOC, sementara daerah-daerah lain di Maluku Tengah sedang dilanda perang melawan VOC. Demikian pula, daerah-daerah di pantai timur Sulawesi, seperti Tobungku dan Banggai, mengalami pergolakan serupa. Saifuddin paham bahwa Ternate kini telah terkuras sumber daya manusia maupun keuangannya, karena biaya menumpas pemberontakan di daerah-daerah seberang laut seperti Buton, Maluku Tengah dan kepulauan Ambon cukup besar.

Kebijakan Damai dan Takhta untuk Rakyat

¹⁴ Naskah perjanjian Tidore-VOC dalam bentuk aslinya tertulis dalam bahasa Belanda (huruf Latin) dan dalam bahasa Tidore (huruf Arab), dan masih tersimpan dengan baik di Arsip Nasional RI di Jakarta.

Ada dua kebijakan Saifuddin yang patut dicatat untuk mengenang Sultan Tidore yang agung ini:

Pertama, Kebijakan damai yang tidak hanya ducapkan sebagai hiasan bibir semata, tetapi sungguh-sungguh diupayakannya sebagai seorang pasifis. Selama 32 tahun berkuasa, tidak ada pertumpahan darah yang disebabkan oleh ofensi yang dilakukan Tidore, maupun oleh pihak lain terhadap kerajaan ini atau sebagian daerahnya. Ternate, yang selama ini menjadi seterunya, dapat dirangkul dan dapat hidup berdampingan secara damai. Ia berhasil mengajak Mandar Syah, Sultan Ternate yang sezaman dengannya, membina perdamaian. Mandar Syah dapat menerima kebijakan ini, karena ia dapat memusatkan perhatian untuk menangani daerah seberang lautnya yang bergolak.

Kedua, Apabila sultan-sultan sebelumnya menggunakan bagian terbesar anggaran belanja dan pendapatan kerajaan untuk membangun sumber daya manusia guna tujuan-tujuan militer, maka Saifuddin melakukan hal sebaliknya. Belanja militer dipangkas hingga jumlah terendah, dan usaha-usaha peningkatan kemakmuran rakyat ditingkatkan.

Kompensasi yang diterima dari VOC untuk pemberian hak monopoli perdagangan cengkih, hanya sedikit yang dipakai untuk menunjang kehidupannya yang amat sederhana. Bagian terbesar kompensasi tersebut dipakai untuk meningkatkan kemakmuran kawulanya. Makan, minum, dan cara berbusananya sangat sederhana untuk ukuran seorang sultan yang mempunyai penghasilan kerajaan yang cukup besar. Saifuddin dapat bergaul dengan siapa saja, dan pintu istananya selalu terbuka bagi rakyat. Apabila ada rakyat yang mengadukan perlakuan *bobato* terhadapnya, ia segera menyelesaikannya. Ia sering terlihat sedang berbicara dengan rakyat di tengah jalan, di tepi pantai atau di tempat-tempat umum seperti pasar dan lain-lain. Ia juga memberikan perhatian khusus kepada rakyat di daerah seberang laut, terutama di Halmahera Timur, Seram, dan Papua.

Di atas sudah disinggung bahwa Saifuddin menjalankan kebijakan dan praktik yang lebih moderat terhadap VOC untuk mengambil alih peran Ternate yang makin merosot akibat kesulitannya menghadapi pudarnya loyalitas daerah-daerah seberang laut. Tetapi, pada saat Ternate mencoba mempertahankan hegemoninya atas Maluku dengan kekuatan yang tersisa dan melakukan rehabilitasi serta konsolidasi untuk memperkuat kedudukan sebagai pusat kekuasaan bagi daerah-daerah seberang laut yang mulai goyah, Tidore di bawah Saifuddin tidak terpengaruh. Sebab, Saifuddin masih menguasai penuh daerah seberang lautnya. Dalam perjalanan sejarah Tidore, kerajaan ini *belum pernah* meminta bantuan VOC, seperti yang dilakukan Ternate di bawah Hamzah, Mandar Syah atau Sibori, untuk menghadapi kemerosotan loyalitas daerah seberang laut. Hal inilah yang membedakan Saifuddin dari ketiga sultan Ternate tersebut. Gaya kepemimpinan Saifuddin seperti ini pula yang membedakannya dengan para sultan Tidore sebelumnya.

Dalam gaya pemerintahannya, Saifuddin menjalankan pemerintahan yang dualistis. Terhadap VOC ia menjalankan gaya pemerintahan pragmatis, sementara ke dalam kerajaan dan rakyatnya sendiri Saifuddin agak tradisional. Hal ini dapat disimak pada garis politik yang diberlakukan di daerah-daerah seberang laut. Ia menjalankan tradisi yang selama ini telah baku dan menjadi prinsip yang mengikat rakyat dan kerajaannya. Ketika menuntut agar Ternate mengembalikan Makian kepada Tidore, dalil yang dipakai Saifuddin sebagai alas haknya adalah: "Secara tradisional Makian adalah hak Tidore sejak lama, dan rakyat setempat hanya mengenal kepemimpinan Kesultanan Tidore." Ketika Gubernur VOC menanyakan kampung-kampung

mana saja dari pulau Makian yang masuk ke dalam kesultanan Tidore, Saifuddin hanya menjawab dengan enteng: “Semua kampung masuk kerajaan Tidore!”¹⁵

Tidore dan VOC

Pada 1607, Laksamana Kornelis Matelief de Jonge tiba di Ternate dari Banten melalui Ambon. Sultan yang bertakhta di Tidore pada saat itu adalah Mole Majimu (1599-1626). Prinsip politik yang dijalankan para sultan Tidore sejak itu adalah menjaga jarak dan sangat pamrih untuk mempertahankan independensi kerajaan ini.

Kehadiran Belanda di Maluku berbeda secara mendasar dari kehadiran Portugis dan Spanyol. Belanda datang ke Maluku karena *dikoro* (diundang) oleh Ternate. Sementara Portugis dan Spanyol datang karena perintah: “Cari dan temukan pulau rempah-rempah!” Tetapi, sikap pamrih (*zakelijik*) yang menjadi haluan politik pemegang keputusan Tidore, tidak terlepas dari pengaruh kuat para ulama yang sejak awal telah memberi fatwa: *bekerja sama dengan Belanda haram hukumnya*.

Sikap dan kebijakan Kerajaan Tidore ini pada mulanya hanya diberlakukan Sultan Mole Majimu. Setelah itu, sikap dan kebijakan tersebut berkembang dan menjadi preseden yang diikuti para sultan berikutnya, dan mencapai puncak pada masa pemerintahan Nuku, Sultan Tidore terbesar (1797-1805). Pengecualiannya hanya pada masa Saifuddin, yang menjalankan praktik kooperatif terbatas untuk mencairkan kebekuan politik Tidore, ketika ia menandatangani pemberian hak monopoli kepada Gubernur Simon Cos yang kemudian dikukuhkan dalam perjanjian 28 Maret 1667.

Hubungan paling intens Tidore-VOC berlangsung terutama pada masa pemerintahan Sultan Saifuddin. Dengan kerjasama secara terbatas, ia dapat mempengaruhi hubungan VOC dengan Ternate, dan dengan demikian tercipta keseimbangan Ternate-Tidore dalam politik regional. Tetapi, tuntutan Tidore menghidupkan kembali kerajaan Jailolo selalu gagal, karena Belanda selalu mengutamakan kemitraannya dengan Ternate, yang telah menganeksasi kerajaan tersebut. Atas dasar kemitraan VOC-Ternate itu, tidak mungkin bagi VOC mengabaikan tuntutan Saifuddin tanpa persetujuan Ternate. Kendala utama dalam upaya Saifuddin merestorasi Jailolo bukan terletak pada VOC, tetapi pada Ternate.

Pendekatan Saifuddin dalam kasus Jailolo kurang mempertimbangkan peranan Ternate, karena ia memandang bahwa kunci utama kasus Jailolo berada pada Gubernur VOC. Seandainya Saifuddin bisa mendekati Ternate – Mandar Syah atau Sibori – dan membawa sultan Ternate ke meja perundingan, hasilnya tentu akan lain.

Ambisi Saifuddin untuk menciptakan perimbangan kekuatan (*balance of power*) antara Ternate-Tidore patut dipuji. Akan tetapi, Saifuddin kurang menyadari bahwa sekali VOC menerobos masuk ke dalam lingkungan kekuasaan keraton, pantang untuk mendepaknya keluar. Hal ini terbukti pada situasi internal Keraton Ternate sejak zaman Mudaffar dan mencapai puncaknya pada masa Mandar Syah dan Sibori. Harus diakui kebijakan Saifuddin menjaga jarak dan sangat pamrih terhadap VOC cukup berhasil, sehingga tidak pernah terjadi campur tangan VOC pada urusan internal kerajaan Tidore.

¹⁵ *Documenta Malucensia*, Vol.II pp.3-4.

Sultan Saifuddin tutup usia

Menjelang akhir kekuasaannya, Sultan Saifuddin yang cerdas, bijak, dan selalu pamrih terhadap VOC, menderita penyakit lepra – penyakit yang sangat ditakuti dan belum ditemukan obatnya saat itu. Walaupun dalam keadaan sakit, ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia mengisolasi diri dalam sebuah kamar kerja yang dibuat khusus, dan semua perintah diberikan dari balik kamarnya.

Karena penyakitnya makin memburuk, rakyat mengangkat puteranya, Kaicil Seram, untuk menggantikannya. Dewan Kerajaan dan para *bobato* Tidore melihat bahwa Kaicil Seram, suami Boki Gamalama dari Ternate, cukup mampu untuk menjabat sebagai Sultan Tidore, mengingat pengalamannya sebagai *Salahakan* Seram yang cukup lama – itulah sebabnya rakyat Tidore menyapanya dengan Kaicil Seram.

Pada 2 Oktober 1687, Sultan Saifuddin – Sultan Tidore teragung setelah Sultan Nuku – wafat di istana Kesultanan Tidore. Beberapa hari kemudian, Kaicil Seram dilantik menggantikannya dengan gelar *Sultan Hamzah Fahrudin*.

Tidore pasca Saifuddin

Kepergian Saifuddin membawa implikasi berat bagi Kesultanan Tidore. Dalam kurun waktu hampir seratus tahun, Tidore tidak lagi memiliki sultan sekaliber Saifuddin hingga tampilnya Nuku di atas pentas kekuasaan pada 1780. Pergolakan demi pergolakan mulai terjadi, terutama di daerah-daerah seberang laut, yang harus dihadapi para sultan pengganti Saifuddin.

Pada 1716, wilayah kesultanan Tidore di Halmahera Timur bergolak. Rakyat Weda, Patani, Maba, Bicoli, dan Gebe memberontak karena beratnya beban upeti yang mesti mereka persembahkan kepada pihak kesultanan, terutama kewajiban untuk menyediakan *ambar* yang sulit diperoleh, kepada Sultan Amir, pengganti Sultan Hamzah Fahrudin. Karena itu rakyat di daerah-daerah tersebut menantang sambil berucap, “Kami siap dibunuh, sebab mustahil bisa memperoleh ambar.”

Dengan susah payah Tidore memadamkan pemberontakan itu. Untuk pertama kali dalam sejarah Kerajaan Tidore, Sultan Amir menerima tawaran VOC untuk membantunya memadamkan pemberontakan. Pemberontakan ini dimanfaatkan Sultan Raja Laut dari Ternate untuk kepentingan politiknya. Ketika para pemberontak menghadap Raja Laut di Ternate dan meminta menerima mereka menjadi kawula kesultannya serta menempatkan mereka di wilayah kekuasaan Ternate, Raja Laut menerima mereka dengan kebesaran. Mereka kemudian ditempatkan di Kayoa, Gane Barat, Foya, Kao, dan Galela. Enam tahun kemudian, setelah tercapai persetujuan Ternate-Tidore yang difasilitasi Kompeni (1772), barulah mereka direlokasi ke tempat asal mereka. Tetapi hubungan baik Tidore dengan kawulanya di daerah-daerah tersebut baru kembali pulih enam tahun kemudian (1728).

Kemunduran Tidore yang gawat menyebabkan Kompeni mengambil-alih beberapa wilayah kekuasaannya di Maluku Tengah. Pada 1768, Sultan Tidore Jamaluddin (1756-1780) melepaskan hak-hak kesultannya atas Seram Timur kepada Kompeni dengan alasan bahwa kawasan itu selalu digunakan orang Makassar, Bugis dan Bali untuk perdagangan gelap.

Pada bulan Mei 1779, Gubernur Maluku, William Jacob Cransen, menuduh Kaicil Asgar dan Raja Muda Bacan telah bekerja sama dan membantu komplotan perompak dan penyelundup Mindanao pimpinan Iranum. Karena itu, kekuasaan keduanya dibatasi. Di Tidore, Kompeni membentuk sebuah pemerintahan transisi yang dikepalai 5 kepala pemerintahan (*regent*) di bawah pimpinan Kaicil Gajira. Pembentukan pemerintahan transisi ini dimaksudkan untuk menggembosi kekuasaan Sultan Jamaluddin.

Pada 1780, VOC menuduh Tidore dan Bacan melakukan penyelundupan dengan bantuan para perompak di Mindanao. Sultan Jamaluddin mencoba melakukan pellawanan dengan membangkang perintah-perintah Kompeni, tetapi akibatnya sangat gawat. Kompeni mencopot Jamaluddin dari takhta Tidore dan menggantikannya dengan Patra Alam, sekalipun sebelumnya (1779) Jamaluddin dan para *bobatonya* telah mengumumkan pengakuan atas kedaulatan Kompeni.¹⁶ Setelah diturunkan dari singgasananya, Jamaluddin beserta keluarganya ditangkap pada 2 Juli 1780. Ia diasingkan ke Batavia, kemudian dipindahkan ke Sri Lanka dan meninggal di sana.

Campur tangan Kompeni yang terlalu jauh terhadap urusan internal Kesultanan Tidore ini tidak disenangi Kaicil Nuku dan rakyat, yang berpuncak pada penyerangan rakyat ke istana Sultan Patra Alam pada 1783. Patra Alam akhirnya dicopot VOC dari takhta kesultanan Tidore kemudian diasingkan ke Jawa.

Asal muasal pencopotan Patra Alam adalah terbetik berita yang sampai kepada Kompeni bahwa seseorang bernama Haji Umar bekerjasama dengan Iranum – seorang warga Mindanao dan Sulu yang menjadi kepala penyelundup dan perompak yang beroperasi di perairan Maluku, Sulawesi sampai ke Ambon dan daerah-daerah Maluku Tengah lainnya. Iranum sering terlihat di Tidore. Kompeni juga memperoleh informasi bahwa ada 190 perahu Mindanao dan Sulu di bawah pimpinan Iranum beroperasi di Maba, bekerjasama dengan Haji Umar menyelundupkan rempah-rempah. Bagi Kompeni, tindakan penyelundupan rempah-rempah merupakan dosa tak berampun. Itulah sebabnya, ketika Haji Umar tertangkap pada 1808, ia dijatuhi hukuman mati dalam usia cukup lanjut, 94 tahun. Keterlibatan Tidore dalam hal ini, menurut Kompeni, terlihat jelas karena tidak ada upaya serius untuk memberantas penyelundupan. Konsekuensinya, Patra Alam diturunkan dari takhtanya.

Menurut adat istiadat Tidore, Patra Alam tidak berhak menjabat sebagai Sultan Tidore, karena hanya merupakan keturunan raja muda, bukan sultan. Nuku menentang kebijakan penobatan Patra Alam sebagai Sultan Tidore, karena merasa paling berhak atas takhta Tidore. Beberapa pekan sebelum pelantikan Patra Alam, Nuku meloloskan diri ke luar Tidore dan pergi ke Patani untuk mengorganisasi sebuah pemberontakan melawan Kompeni dan Sultan Tidore.

Puncak keterpurukan Tidore terjadi pada masa pemerintahan Sultan Kamaluddin (1784-1797). Sultan yang gemar berjudi ini terpaksa melarikan diri ke Ternate untuk menghindari penyerbuan Kaicil Nuku. Konon, sewaktu melarikan diri, Kamaluddin tidak lupa membawa serta kartu ceki (judi), selain mahkota kesultanannya.

Nuku: Sultan Tidore Terbesar

¹⁶ De Clerq, *Op.Cit.*p.166. Lihat juga Dr.F.W. Stapel: *Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum 1753-1779* s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1955. p.433.

Kaicil Nuku yang berhasil meloloskan diri dari Tidore menjelang penobatan Patra Alam, kemudian mendirikan markas besar perlawanannya di antara Patani dan Weda. Ia mengirim pembantu-pembantunya ke Maba, Seram Timur, Kepulauan Raja Ampat serta Papua untuk mencari dukungan. Nuku juga merekrut orang-orang Mindanao yang ada di Patani, orang-orang Tobelo, Galela dan Loloda yang bermukim di Halmahera Timur dan Seram Pasir. Kepada para pembantunya, Nuku menginstruksikan agar mengontak orang Spanyol dan Inggris jika bertemu di perairan Maluku untuk membantunya melikuidasi kekuasaan Kompeni.

Pada 1780, Nuku memproklamasikan dirinya sebagai Sultan Tidore dan menyatakan kesultanan sebagai sebuah negara merdeka yang lepas dari kekuasaan Kompeni Belanda. Kesultanan Tidore yang dimaksudkannya meliputi seluruh wilayah Tidore yang utuh, termasuk Makian dan Kayoa, di samping Halmahera Tengah dan Timur, kepulauan Raja Ampat dan Papua daratan, seluruh Seram Timur, pulau-pulau Keffing, Geser, Seram Laut, pulau-pulau Garang, Watubela, dan Tor.¹⁷

Setelah berjuang beberapa tahun, Nuku memperoleh kemenangan yang gemilang. Ia berhasil membebaskan kesultanan dari kekuasaan Belanda dan mengembalikan pamornya. Penghujung abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 adalah era keemasan Tidore di bawah Nuku.

Ada empat konsep politik yang ingin diwujudkan Nuku. *Pertama*, mempersatukan seluruh wilayah kesultanan Tidore sebagai suatu kebulatan yang utuh. *Kedua*, memulihkan kembali empat pilar kekuasaan kerajaan Maluku. *Ketiga*, mengupayakan sebuah persekutuan antara keempat kerajaan Maluku. *Keempat*, mengenyahkan kekuasaan dan penjajahan asing dari Maluku.¹⁸

Untuk butir pertama, gagasan ini langsung dilaksanakan begitu Nuku menduduki takhta Kesultanan Tidore. Bahkan, pembebasan Seram telah dimulai sejak Nuku mengawali pemberontakannya. Aneksasi Makian, Kayoa, seluruh Halmahera Selatan dari Gane hingga Foya – yang sebelumnya di bawah kekuasaan Ternate – dimaksudkan untuk menekan Ternate agar kesultanan itu bersedia ikut dalam perdamaian dan menerima konsep politik Nuku. Sementara Kesultanan Bacan sudah sejak awal menjalin persekutuan dengan Nuku.

Untuk butir kedua, Nuku merealisasikannya dengan menghidupkan kembali Kerajaan Jailolo. Ia menunjuk Muhammad Arif Billah – mantan Jojou (jogugu) Tidore di masa Sultan Kamaluddin, yang ketika itu menjabat sebagai *Sangaji* Tahane dan pembantu setia Nuku dalam pemberontakan – sebagai Sultan Jailolo. Sama dengan pendahulunya, Sultan Saifuddin, Nuku berpendapat “selama empat kerajaan Maluku belum pulih, tidak akan ada keamanan dan ketentraman di kepulauan ini.”

Untuk butir ketiga, Nuku tidak memperoleh dukungan Ternate, walaupun Bacan dan Jailolo menyetujuinya. Peperangan dan pengepungan yang dijalankan Nuku atas Ternate, dalam rangka mengusir Belanda, barangkali membuat Ternate tidak dapat menyetujui gagasan tentang persekutuan empat kerajaan Maluku.

Butir keempat gagasan Nuku juga sulit terlaksana sepenuhnya. Terkecuali Tidore yang secara militer cukup kuat, Ternate, Bacan dan Jailolo praktis tidak berdaya, sehingga upaya mengenyahkan kekuasaan asing di Maluku merupakan impian di siang bolong.

¹⁷ E. Katoppo, *Nuku*. Jakarta: Sinar Harapan 1984, p.216.

¹⁸ *Ibid.*

Bagi Tidore sendiri, keempat gagasan politik Nuku itu berhasil dijalankan. Nuku berhasil menghidupkan kembali kebesaran Kesultanan Tidore dengan kembali menguasai seluruh wilayah Tidore seutuhnya. Ia juga berhasil menghidupkan kembali Kerajaan Jailolo, sehingga untuk pertama kalinya dalam jangka waktu yang relatif cukup lama, Maluku berdiri tegak di atas empat pilar seperti di masa awal kelahirannya. Selanjutnya, ia berhasil menciptakan persekutuan tiga dari empat kerajaan Maluku: Tidore, Bacan, dan Jailolo, kecuali Ternate. Sementara terusirnya Belanda untuk sementara waktu dari Tidore merupakan keberhasilan Nuku yang lain. Pada titik ini, kebesaran Nuku dapat dibandingkan dengan keagungan Sultan Babullah yang telah menengahkan Portugis dari Ternate.

Pada 14 Nopember 1805, Maluku kehilangan seorang sultan yang semasa hidupnya dikenal sebagai *Jou Barakati*, atau di kalangan orang Inggris disapa dengan *Lord of Fortune*.¹⁹ Kepergian Nuku merupakan kehilangan besar bagi rakyat Maluku, khususnya warga Kesultanan Tidore. Wafatnya Nuku dalam usia 67 tahun tidak hanya membawa kesedihan bagi rakyat Kesultanan Tidore--wilayahnya meliputi Halmahera Timur (Weda, Patani, Gebe dan Bicoli), Seram Utara dan Timur, kepulauan Raja Ampat dan Papua daratan--tetapi juga memberi kedukaan bagi rakyat Tobelo, Galela dan Loloda yang telah bergabung ke dalam barisan Nuku sejak awal perjuangannya, ketika Nuku menyingkir ke kepulauan Raja Ampat, Papua daratan, Seram dan Halmahera Timur, hingga saat terakhir ketika ia menghembuskan nafas yang penghabisan.

Nuku, seperti disebut Andaya, adalah “salah satu pemimpin yang sukar dicari padanannya di Asia Tenggara.” Selain memiliki kecerdasan dan karisma yang kuat, Nuku terkenal akan keberanian dan kekuatan batinnya. Ia berhasil mentransformasi masa lalu Maluku yang klemat ke dalam era baru yang mampu memberikan kepadanya kemungkinan menyeluruh untuk bangkit dan melepaskan diri dari segala bentuk keterikatan, ketidakbebasan dan penindasan.

Perjuangan Nuku berlangsung pada perempatan terakhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19. Ketika itu, Pemerintah Kolonial Belanda mulai merampungkan kekuasaannya atas kerajaan-kerajaan Maluku yang sudah lemah. Maluku, pada dekade-dekade tersebut, benar-benar telah kehilangan kedigdayaannya di bidang politik, ekonomi, dan terutama militer. Itulah sebabnya Belanda dengan mudah dapat mendikte segala kehendaknya.

Ternate, yang memegang supremasi di antara kerajaan-kerajaan yang bersaing di Maluku, mengandalkan kewibawaannya hanya pada otoritas Belanda. Hal serupa juga berlaku bagi Bacan dan Tidore pada masa pemerintahan Patra Alam (1780-1784) dan Kamaluddin (1784-1787).

Dalam situasi semacam itulah Nuku tampil di atas pentas historis dan berupaya melakukan restorasi Maluku dengan mentransfer ide-ide kemandirian dan kebebasan penuh bagi kerajaan-kerajaan di kawasan itu. Tetapi, pekerjaan Nuku belum sempat diselesaikan secara tuntas, ketika Tuhan memanggilnya pulang ke haribaan-Nya.

Setelah Nuku wafat, sejarah lama Tidore berulang kembali. Perebutan kekuasaan oleh pengganti-pengganti Nuku dan campur tangan pemerintah Belanda dalam suksesi Tidore, menyebabkan pamor Tidore terpuruk kembali menjadi kesultanan yang lemah.

¹⁹ *Ibid.*, p. 239.

Tidore Pasca Nuku

Orang yang dibina Nuku dan selalu menyertainya dalam setiap aktivitasnya adalah adik tirinya sendiri, Kaicil Zainal Abidin. Tokoh inilah yang diwasiatkan Nuku untuk menggantikannya jika ia berhalangan tetap. Atas dasar wasiat tersebut, para anggota Dewan Kerajaan dan *bobato* Tidore menetapkan Muhammad Zainal Abidin sebagai Sultan Tidore ke-20 untuk menggantikan Nuku pada 1805.

Pengangkatan Zainal Abidin – yang hanya dilakukan para *bobato* dan Dewan Kerajaan Tidore – tentu saja tidak berkenan di hati Gubernur Carel Lodewijk Wieling, lantaran tidak meminta persetujuannya. Karena itu, Belanda mulai mencari sebab melengserkan Zainal Abidin. Gubernur Wieling kemudian menuntut agar Sultan Tidore menyerahkan Muhammad Arif Billa, Sultan Jailolo, atas tuduhan melakukan berbagai kejahatan terhadap Pemerintah Belanda dan Kesultanan Ternate.

Sultan Jailolo, dalam sebuah ekspedisi dari Maba, dituduh mengirim armada yang dipimpin *Sangaji* Lapas – terdiri dari orang-orang Maba, Patani, dan Tobelo – ke Selat Buton untuk mencegat perahu-perahu niaga. Armada ini kemudian bergerak ke Pulau Kabaena dan Selayar untuk menyerang dan merampok desa-desa yang ada di sana. Setelah itu, armada tersebut menuju Tobungku dengan tujuan yang sama. Sultan Jailolo juga dituduh mengirim suatu armada orang Tobelo pimpinan Kapita Ngongare untuk menyerbu Taliabu di Kepulauan Sula.

Tuduhan dan tuntutan Gubernur Wieling membuat Zainal Abidin menghadapi kesulitan besar. Tidak mungkin baginya menangkap Sultan Jailolo yang memiliki pengaruh kuat dalam jajaran militer Nuku – Muhammad Arif Billa adalah mantan Panglima Militer Nuku – dan didukung pasukan tempur yang cukup handal. Lagi pula, faksi Sultan Jailolo dalam Dewan Kerajaan dan para *bobato* Tidore cukup kuat.

Karena itu, ketika menjawab tuntutan Wieling, Zainal Abidin menyatakan bahwa Sultan Jailolo secara potensial tidak lagi memiliki kekuatan untuk diperhitungkan. Jawaban ini tentu saja tidak memuaskan Belanda. Akibatnya, pada Nopember 1806, beberapa bulan setelah jawaban Zainal Abidin diterima, Belanda menyerbu Tidore dan merampas benteng-bentengnya. Dalam penyerbuan ini, ibukota Tidore, Soasio, dibumihanguskan.

Zainal Abidin mengerahkan armada *juanga* Tidore untuk menangkal serbuan Belanda itu, tetapi tidak berhasil.²⁰ Angkatan laut Belanda berhasil menceraikan armada Tidore dan menenggelamkan sebagiannya. Zainal Abidin sendiri berhasil meloloskan diri, dan bersama para *bobato* pendukungnya memindahkan markas besarnya ke Maba di Halmahera Timur. Kepindahan Zainal Abidin diikuti banyak bangsawan Tidore. Sementara para *bobato* dan bangsawan yang tinggal di Tidore dipaksa Belanda menerima perjanjian bahwa selama sultan yang baru belum dilantik, Tidore berada langsung di bawah pemerintahan Gubernemen.

Dengan bantuan pasukan Ternate, armada Belanda mulai memburu Zainal Abidin dan Sultan Jailolo, Muhammad Arif Billa, beserta pengikut-pengikutnya. Sejak meninggalkan Tidore, Sultan Jailolo bemarkas di Weda. Ketika Weda digempur Belanda, ia mengundurkan diri ke hutan. Dalam peristiwa ini, ia terpisah dari kedua anak laki-lakinya, Muhammad Asgar dan

²⁰ De Clerq, *Op.Cit.*, p. 168.

Hajuddin. Sejak itu, Muhammad Arif Billa bergerilya melawan Belanda dan wafat pada 1807, karena jatuh tergelincir di sebuah ngarai.

Zainal Abidin sendiri terpaksa memindahkan markasnya ke Patani, setelah pasukan Belanda memburunya ke Maba. Tetapi, Belanda meneruskan perburuan ke Patani. Ketika Belanda tiba di Patani, Zainal Abidin telah menyingkir ke Kepulauan Raja Ampat bersama putera Muhammad Arif Billa, Hajuddin. Sejak mengungsi ke Halmahera antara 1808-1810, Zainal Abidin muncul sebagai penguasa Kesultanan Tidore yang nyata. Ia kemudian menyerahkan kekuasaan kepada puteranya, Jamaluddin.

Sementara itu, Kaicil Muhammad Tahir – di kalangan Belanda dikenal sebagai Prins Missool – bersama keluarga dan sejumlah bangsawan Tidore lainnya berhasil mencapai Waru di Seram Timur. Ia kemudian membangun pusat pertahanannya di sini. Waru adalah negeri yang pernah dijadikan Nuku sebagai basis perlawanan melawan Belanda. Di negeri inilah Nuku dinobatkan sebagai Raja Papua dan Seram oleh rakyat setempat.

Pada 1807, Belanda sekali lagi menyerbu Soasio dan membunuhnya. Ibukota darurat Kesultanan Tidore pun dipindahkan ke Pulau Maitara, yang ketika itu dikenal sebagai tempat tetirah para bangsawan Tidore dan dikenal juga dengan nama Noorwegen. Baru pada 1810 ibukota Kesultanan Tidore dikembalikan ke Soasio.

Pada 1810, Belanda menyerahkan kekuasaannya di Maluku kepada Inggris, dan Kapten Tucker ditunjuk sebagai penguasa Inggris di Ternate. Namun, sebelum pengambil-alihan kekuasaan, Belanda telah melantik Muhammad Tahir atau Prins Misool sebagai Sultan Tidore pada 24 Januari 1810 untuk menggantikan Zainal Abidin. Intervensi politik Belanda ini menyebabkan para *bobato* Tidore di Halmahera Timur terpecah dua: faksi yang mendukung pelantikan Muhammad Tahir, serta faksi yang menolaknya dan mengikuti Zainal Abidin serta puteranya, Jamaluddin. Jamaluddin, setelah menggantikan Zainal Abidin, menyatakan diri sebagai pewaris sah atas takhta Kesultanan Tidore.

Menghadapi kemelut tersebut, Gubernemen Belanda tentu saja mendukung Muhammad Tahir. Bahkan, ketika Inggris mengambil-alih kekuasaan, ia harus memutuskan berpihak kepada Muhammad Tahir. Tetapi, dengan sangat bijak, Inggris berhasil membujuk Jamaluddin dengan mengangkatnya sebagai raja muda dan menjanjikan bahwa bila Muhammad Tahir telah mengakhiri kekuasaannya, Jamaluddin akan ditunjuk menggantikannya. Tetapi, janji tinggal janji. Ketika Muhammad Tahir wafat pada 1821, yang menggantikannya adalah Ahmadul Mansur, bukan Jamaluddin.

Perjanjian yang dibuat penguasa Inggris, Kolonel William Martin, dengan Jamaluddin antara lain berisi klausula bahwa sebagai Raja Muda, Jamaluddin berkuasa penuh atas distrik Weda, Maba, dan Patani di Halmahera Timur, termasuk berhak memungut upeti. Sultan Tidore, dalam perjanjian ini, dinyatakan tidak berhak mencampuri urusan pemerintahan di wilayah Jamaluddin itu.

Apa yang menyebabkan Zainal Abidin tidak tampil dalam pertarungan menghadapi Muhammad Tahir dan hanya menjagokan puteranya, Jamaluddin, yang berakhir dengan kegagalan? Sebenarnya, Gubernur Cranssen masih mendukung Zainal Abidin, sekalipun Sultan Tidore itu disalahkan karena tidak menyerahkan Sultan Jailolo, Muhammad Arif Billa, kepada Belanda. Namun, permasalahannya terletak pada ketiadaan dukungan *bobato* maupun Dewan Kerajaan Tidore serta para *bobato* di Halmahera Timur terhadap Zainal Abidin.

Suatu peristiwa memalukan juga telah mencoreng integritas Zainal Abidin sebagai sultan, ketika tengah berada di Misool, Kepulauan Raja Ampat. Waktu itu terdengar kabar bahwa ada kapal Inggris yang karam di pulau Waigeo, karena dilarikan awaknya dari Kepulauan Sula. Zainal Abidin memerintahkan Kaicil Sehe berangkat ke tempat karamnya kapal untuk melakukan penyidikan. Tatkala Kaicil Sehe meninggalkan tempat, isterinya diambil Zainal Abidin dan dijadikan selir, meski merupakan keponakannya sendiri.²¹ Tindakan Zainal Abidin ini dikecam para bangsawan kesultanan Tidore, karena dipandang melanggar norma moral dan tidak dapat dimaafkan. Sejak saat itu, Zainal Abidin ditinggalkan para bangsawan, dan jalan menuju takhta menjadi lebih lempang bagi Muhammad Tahir.

Setahun setelah Belanda berkuasa kembali di Maluku, Sultan Muhammad Tahir dan para petinggi Kesultanan Tidore mengadukan kepada Komisaris Jenderal Belanda perihal penyerahan kekuasaan atas Halmahera Timur kepada Jamaluddin. Keberatan ini juga didasarkan pada pelanggaran Inggris terhadap perjanjian 1810 dan 1814, di mana Sultan Tidore telah menyerahkan benda-benda suci kerajaan.

Pemerintah Belanda akhirnya memberangkatkan kapal Venus di bawah komandan Schuler untuk menjemput Jamaluddin yang tengah berada di Bicoli. Ia ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Baru pada 1831, ia diizinkan kembali ke Tidore dengan syarat harus melepas hak kebangsawannya. Jamaluddin wafat di Tidore pada 8 Januari 1846 sebagai rakyat biasa.

Sejak diasinkannya Jamaluddin ke Jawa (Sumedang), kemelut takhta Tidore berakhir. Distrik Weda, Maba serta Patani di Halmahera Timur dikembalikan kepada Kesultanan Tidore.²² Sultan Muhammad Tahir sendiri tutup usia pada 17 Nopember 1821, dan digantikan oleh Ahmadul Mansur.

Ternate-Tidore: Persaingan atau Perseteruan?

Perseteruan Ternate-Tidore telah berlangsung selama berabad-abad dan tidak dapat dipastikan kapan dimulai. Sebagai anjang-ancang dapat ditentukan untuk sementara bahwa rivalitas telah terjadi sejak abad ke-14, ketika Sida Arif Malamo bertakhta di Ternate (1322-1331). Kolano Ternate ini berhasil memindahkan pasar dan perdagangan rempah-rempah dari Hitu di Ambon ke Ternate. Ternate secara ekonomis mulai bangkit, karena kedatangan dan mulai menetapnya pedagang-pedagang Jawa, Melayu, Arab, Cina, dan Gujarat.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, melebihi kerajaan-kerajaan tetangganya, rakyat Kerajaan Ternate mulai meningkat kemakmurannya meninggalkan rakyat kerajaan Maluku lainnya. Kecemburuan yang diikuti tindakan-tindakan perompakan di laut dan di darat terhadap Ternate mulai terjadi. Bahkan, timbul gagasan membentuk “Persekutuan empat kolano” (Tidore, Bacan, Jailolo, dan Obi) untuk menentang Ternate. Tetapi, gagasan ini tidak menjadi kenyataan, karena Sida Arif Malamo membawa Tidore, Bacan, dan Jailolo ke pertemuan Moti yang berakhir dengan dibentuknya sebuah “persekutuan” (Motir Verbond).

Di akhir abad ke-14, ketika Ternate mengirimkan klan Tomaito dan Tomagola ke Sula dan kepulauan Ambon, Almansur dari Tidore segera pula mengirim *sangaji* Patani Samardan dan Kapita Waigeo Gurabesi ke Seram Timur, kepulauan Raja Ampat dan Papua daratan.

²¹ R.Z. Leirissa, *Halmahera Timur dan Raja Jailolo*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), p. 179.

²² De Clerq, *Op.Cit.*, p. 171.

Sampai sebatas ini boleh dikatakan bahwa sebuah persaingan sehat sedang terjadi antara Tidore dan Ternate dalam memperoleh daerah seberang laut (*periphery, overzee gebied*).

Tetapi, persaingan tidak sehat dan mulai menjurus kepada perseteruan muncul ketika kedua kerajaan ini mengawali kemitraannya dengan kekuasaan asing: Ternate dengan Portugis dan Tidore dengan Spanyol. Ternate dengan bantuan mitranya menyerbu Tidore, ketika tampuk pemerintahan Ternate dikendalikan Raja Muda Taruwese. Sebaliknya, ketika Spanyol menyerbu Ternate dan menangkap serta mengasingkan Sultan Saidi ke Manila, Tidore aktif membantunya. Demikian pula, ketika timbul pemberontakan beberapa negeri di Halmahera Timur terhadap Tidore pada 1716, yang dipelopori *Sangaji* Patani, Ternate “memberi angin” kepada kaum pemberontak dan membantu mereka dengan menyediakan tempat pengungsian dalam wilayah Kesultanan Ternate. Puncak perseteruan terjadi ketika Inggris menyerbu Ternate, di mana Sultan Nuku mengerahkan pasukan Tidore secara besar-besaran untuk menggempur VOC yang didukung penuh oleh Ternate.

Kerajaan Ternate dan Tidore sempat mengalami kerukunan yang sangat terbatas ketika kendali politik Tidore dipegang Sultan Saifuddin dan Ternate di bawah Mandar Syah. VOC (mitra Ternate) dan Inggris (mitra Tidore) merupakan dua kekuasaan asing yang paling sering memfasilitasi kedua kerajaan itu untuk berdamai. Tetapi, sejauh itu, hanya sebuah perdamaian semu yang dihasilkan keduanya.

Saifuddin dan Mandar Syah dapat dipandang sebagai dua tokoh yang paling berhasil menciptakan perdamaian Tidore dan Ternate. Tetapi, patut disayangkan keduanya tidak pernah mampu menciptakan perdamaian yang kekal atau langgeng. Perseteruan Ternate-Tidore baru berakhir secara abadi, setelah penguasa Netherland Indie mempreteli semua kekuatan mereka untuk selamanya.

BAB 6

Kesultanan Bacan

Awal Mula Kerajaan Bacan

Berbeda dengan Ternate dan Tidore yang banyak menghiasi rekaman-rekaman kesejarahan, Bacan tidak banyak memiliki catatan historis. F.Valentijn, penulis *Oud en Nieuw Oost Indien* (vol.1b), tidak pernah menulis secara rinci mengenai Bacan, dibandingkan ketika menulis tentang Ternate atau Tidore. Bahkan, ilustrasi Valentijn tentang Makian dan Jailolo jauh lebih rinci dari pada Bacan dalam buku tersebut. Selain tulisan-tulisan Coolhaas, tulisan P. van der Crab, *De Moluksche Eilanden* (Batavia, 1862), turut menyumbangkan bahan untuk bagian ini.

Kedudukan awal Kerajaan Bacan bermula di Makian Timur, kemudian dipindahkan ke Kasiruta lantaran ancaman gunung berapi Kie Besi. Kebanyakan rakyat Bacan adalah orang Makian yang ikut dalam evakuasi bersama rajanya.¹ Menurut perkiraan, Kerajaan Bacan didirikan pada 1322. Tidak jelas bagaimana proses pembentukannya, tetapi bisa ditaksir sama dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Maluku, yakni bermula dari pemukiman yang kemudian membesar dan tumbuh menjadi kerajaan.

Raja pertama Bacan, menurut hikayat Bacan, adalah Said Muhammad Bakir, atau Said Husin, yang berkuasa di gunung Makian dengan gelar *Maharaja Yang Bertakhta Kerajaan Moloku Astana Bacan, Negeri Komala Besi Limau Dolik*.² Raja pertama ini berkuasa selama 10 tahun, dan meninggal di Makian. Pada 1343, bertakhta di Kerajaan Bacan Kolano Sida Hasan. Dengan bekerja sama dengan Tidore, Sida Hasan berhasil merebut kembali Pulau Makian dan beberapa desa di sekitar pulau Bacan dari tangan Raja Ternate, Tulu Malamo.

Mata Rantai Penguasa Bacan

Kronik Bacan menyebutkan bahwa Sida Hasan naik takhta menggantikan ayahnya Muhammad Hasan.³ Pada masa Sida Hasanlah terjadi evakuasi ke Bacan. Orang-orang Makian yang dievakuasi ke Bacan menempati kawasan Dolik, Talimau dan Imbu-imbu.⁴ Raja yang berkuasa di Bacan setelah itu adalah Zainal Abidin. Kronik Bacan tidak menjelaskan kapan Sida Hasan maupun Zainal Abidin berkuasa.

¹ W.Ph.Coolhaas, "Medelingen Betrefende de Onder-afdelingen Batjan" KLTI, deel 82, afl III & IV, (1926), p.17.

² Coolhaas, "Kroniek van het Rijk Batjan," *Tijdschrift BKWG*, deel LXIII, aflevering 2, p. 477.

³ *Ibid.*, p. 495.

⁴ *Ibid.*, p. 494.

Kemungkinan besar eksis raja atau raja-raja tertentu sebagai mata rantai yang hilang antara masa Sida Hasan dan Zainal Abidin, karena Sida Hasan dikabarkan bertakhta pada 1343, sementara Zainal Abidin pada 1522. Coolhaas⁵ hanya mencatat bahwa Zainal Abidin memiliki dua putera, masing-masing Kaicil Bolatu dan Kaicil Kuliba. Kaicil Bolatu dikatakan memerintah Negeri Besi (Makian). Ketika Zainal Abidin wafat, Bolatu kembali ke Kasiruta dan menjadi raja di sana dengan gelar *Bayanu Sirullah*, sementara Kuliba kembali ke Negeri Besi dan menjalankan pemerintahan di sana. Tetapi, pemerintahannya dirasakan kurang baik oleh rakyat dan, karena itu, mereka pindah ke Tidore serta diterima kerajaan tersebut.

Bayanu Sirullah kemudian digantikan oleh Sultan Alauddin I, dan setelah itu tampuk Kesultanan Bacan dipegang Sultan Muhammad Ali, ayah angkat Sultan Babullah dari Ternate. Pemerintahan Muhammad Ali kemudian dilanjutkan Sultan Alauddin II (1660-1706). Sultan Awaluddin I dan II dikenal sebagai "Sultan Dubo-dubo", lantaran memiliki postur tubuh yang jangkung.

Pada masa pemerintahan Alauddin II, Ternate mengembalikan seluruh pulau Makian kepada Bacan. Alauddin II lalu mengangkat adiknya, Kaicil Musa, untuk menjalankan pemerintahan Kesultanan Bacan di Makian. Tetapi, pada masa Alauddin II ini juga terjadi skandal yang menghebohkan: penjualan pulau Obi oleh Sultan Bacan kepada Kompeni seharga 800 ringgit.⁶

Dikabarkan bawah Alauddin II pernah berkunjung ke Ambon bersama Kapita Lautnya. Pada 25 Februari 1660, Sultan Alauddin II bersama Kapita Laut Panunusa menumpang dua *juanga* dan mendarat di Hila, Ambon. Di sini Alauddin II bertemu dengan *Salahakan* Ternate yang ditempatkan di Ambon serta penguasa Kompeni, Huistart.

Ketika Alauddin II wafat, para *bobato* Kesultanan Bacan mengangkat Kaicil Musa sebagai penggantinya. Sultan Bacan ini bergelar *Sultan Malikiddin*. Pemerintahan Makian yang ditinggalkan Kaicil Musa, karena pengangkatannya sebagai Sultan Bacan, diserahkan kepada Kaicil Tojimplila, yang kemudian wafat di pulau tersebut.

Setelah Sultan Malikiddin meninggal dunia, ia digantikan Kaicil Kie, yang ketika bertakhta menyandang gelar *Sultan Nasruddin*. Nasruddin mengangkat Kaicil Lewan untuk memerintah Makian. Tetapi, masa pemerintahan Kaicil Lewan merupakan masa pemerintahan Kesultanan Bacan yang terakhir di Makian. Sejak saat itu, Makian dianeksasi Ternate dan kekuasaan Bacan tidak pernah lagi kembali ke sana.

Sumber lainnya menyebutkan bahwa setelah Sultan Alauddin II wafat, ia digantikan kakaknya Sultan Musom, yang kemudian digantikan oleh puteranya Mansur. Sultan Mansur dinobatkan pada 19 Juli 1683. Ia adalah seorang sultan yang cerdas dan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Ia juga memiliki keterampilan pandai emas yang dimanfaatkan untuk membuat perhiasan emas perak bagi Kesultanan Bacan. Pemerintahannya dijalankan dengan ketat, dan ia berupaya mendidik rakyatnya untuk tidak bermalasan.

Sultan Mansur digantikan adiknya Musom, yang sebelumnya menjabat sebagai Jogugu (1709). Ketika bertakhta, Musom berusia 50 tahun. Tetapi, kualitas pribadi Musom berbeda dari Mansur. Ia tidak secerdas Mansur serta berperangai pemaarah dan pendendam. Pada masa pemerintahannya berjangkit wabah cacar yang menewaskan ribuan orang. Rakyat Bacan yang

⁵ *Ibid.*, p. 495.

⁶ *Ibid.*, p. 499.

sebelumnya tercatat 12.000 jiwa, setelah wabah cacar tinggal 10.000 jiwa. Itulah sebabnya, Sultan Musom juga digelar "Raja tanpa rakyat."

Yang diketahui sebagai pemegang tampuk kekuasaan Bacan setelah itu adalah Sultan Tarafannur. Di masa pemerintahan Tarafannur, Bacan memperoleh lima daerah baru yang masuk ke dalam wilayah kekuasaannya, masing-masing Gane, Saketa, Obi, Foya dan Mafa (Halmahera Barat). Pada masa ini pula, *Sangaji* Gane membawa puterinya bernama Talimal ke Bacan untuk menjadi Ngofamanyira. Talimal adalah perempuan pertama Maluku yang menjadi Ngofamanyira. Tarafannur kemudian digantikan oleh Muhammad Sahaddin.

Kelembagaan Adat dan Sosial Bacan

Ketika Portugis tiba di Maluku (1512), Bacan merupakan salah satu dari empat kerajaan besar yang ada di Maluku. Dalam jajaran kesultanan Maluku, Bacan merupakan satu-satunya kesultanan yang berpenduduk heterogen. Sejak evakuasi kerajaan ini dari Makian, penduduk Bacan terdiri dari berbagai suku, terutama suku Makian, Galela dan Tobelo. Penduduk asli Bacan hanya berjumlah sedikit. Bahkan, pada 1850 penduduk Bacan asli tinggal 400 orang.⁷ Tiap suku dipimpin kepalanya masing-masing dan menggunakan bahasanya sendiri-sendiri. Keadaan multi etnis ini diterima Kerajaan Bacan sebagai suatu hal yang wajar.

Lembaga-lembaga adat dan sistem pemerintahan Bacan hampir sama dengan yang ada di Kesultanan Ternate dan Tidore. Satu-satunya perbedaan yang tampak adalah di Kesultanan Bacan terdapat lembaga *Sekretaris Kesultanan* yang mendampingi Sultan dalam urusan pemerintahan. Ia menata administrasi kesultanan, terutama surat keluar-masuk dari dan untuk kesultanan.

Di Kesultanan Bacan, terdapat tiga strata atau kedudukan sosial:

Pertama: Sultan dan anggota keluarganya. Di masa lalu, penguasa Bacan disebut *Koasa Ompu*, yang menyandang gelar *sultan* dan oleh rakyat biasanya disebut *Jou Kolano*. Anggota keluarga laki-laki dalam derajat pertama disebut *Kaicil* ("pangeran") dan perempuan disebut *Boki* ("puteri"). Laki-laki yang berhubungan darah dengan Sultan memegang suatu jabatan yang disebut "Dede."

Kedua: Rakyat jelata disebut *Bala*. Mereka yang telah menganut agama disebut "orang soasio", dan yang belum disebut "soa nyagimoi."

Ketiga: Bujangan atau lajang disebut *soa ngongare*. Pada zaman dahulu, dalam klasifikasi *soa ngongare* termasuk pula budak.

Kelembagaan Pemerintahan Bacan

Pemerintahan Kesultanan Bacan dijalankan oleh Sultan dengan sejumlah aparatur pemerintah yang dapat dirinci sebagai berikut:

⁷ P. van der Crab, *De Moluksche Eilanden*, Batavia: Lange & Co, 1862. p. 243 ff.

Menurut naturalis Inggris Terkenal, Wallace, yang selama enam bulan bermukim di Bacan (1859), di Bacan tidak ada penduduk asli seperti halnya di Halmahera.

1. *Bobato Dalam*, dengan sebutan dan hierarki militer seperti Mayor (khusus untuk dano), Kapiten Ngofa (khusus untuk dano), Kapita Kie (bangsawan tinggi), empat orang Letnan, masing-masing dua Letnan Ngofa dan dua Letnan Kie. Di bawah Letnan ada Alfiris dan Sersan yang mengawal pos penjagaan Sultan, kemudian Kabu yang mengenakan baju panjang dan ikat kepala hitam sewaktu menjalankan tugasnya.
2. *Bobato Luar*, yang menjalankan pemerintahan, khususnya dari kelompok soasio, misalnya Jogugu yang dibantu para Hukum (hakim) dan Kimalaha Sapanggala yang mengemban tugas dari Sultan untuk mengepalai Soa Sanani. Tugas Hukum Kesultanan Bacan tidak berbeda dari tugas seorang kepala polisi.
3. *Bobato Akhirat*, yaitu pejabat-pejabat agama Islam yang terdiri dari *Kalem* (Qadhi Kesultanan) di pusat kesultanan, dibantu sejumlah Imam, Khatib dan Moding. Ketiga jabatan terakhir ini juga terdapat di daerah-daerah. Dalam beberapa hal, Imam bekerja sama dengan Hukum. Sebagai perpanjangan tangan Jogugu, Imam membentuk pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perdata atau menjatuhkan hukuman pidana. Dalam kasus pidana, eksekusi baru bisa dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Residen. Approbasi (izin) ini mulai dijalankan setelah Belanda mereorganisasi pemerintahan Maluku sebagai sebuah keresidenan yang berpusat di Ternate.⁸

Disamping ketiga kelompok *bobato* di atas, terdapat juga jabatan-jabatan kesultanan lainnya yang penting, yaitu:

1. Kapita Laut, sebagai panglima militer.
2. Kapala Bangsa, salah seorang dari suku Soasio yang ditugaskan sultan sebagai penanggung jawab atau pelaksana kesultanan.
3. Imam Juru Tulis, Khatib Juru Tulis dan Moding Juru Tulis.
4. Imam Ngofa, Khatib Ngofa dan Dano.

Lembaga Kapita Laut pada awalnya adalah penguasa atas alat-alat transportasi laut milik kesultanan sewaktu terjadi penaklukan atau pemadaman pemberontakan. Dalam keadaan semacam itu, individu tidak dibolehkan memiliki perahu-perahu besar (*juanga*), karena semua *juanga* berada di bawah pengawasan kesultanan yang dikoordinasi oleh Kapita Laut. Tetapi, dari sekian banyak lembaga tersebut, Pemerintah Belanda hanya mengakui lembaga-lembaga berikut:

1. Kapita Laut.
2. Jogugu.
3. *Kalem* dan bawahannya.
4. Hukum.
5. Kimalaha Sapanggala.

Berbeda dengan Ternate dan Tidore, di mana sultan memiliki hak prerogatif mengangkat *jogugu* dan pejabat-pejabat kesultanan lainnya, di Bacan hak prerogatif untuk pengangkatan semacam itu tidak dimiliki sultan. Di Bacan, pejabat-pejabat kesultanan dipilih langsung oleh rakyat menurut sebuah aturan yang ditetapkan sultan. Alasan dibalik pemilihan ini adalah

⁸ *Ibid.*, p. 245.

pejabat-pejabat tersebut membawa perintah-perintah kesultanan kepada rakyat dan tidak boleh melawan lembaga-lembaga dan adat-istiadat negeri.⁹

Bacan dan VOC

Pada 7 Nopember 1653, Bacan membuat perjanjian dengan Kompeni tentang ekstirpasi cengkih. Pada 1660, Bacan bersama Ternate dan Tidore menandatangani sebuah perjanjian tentang batas-batas teritorial masing-masing kesultanan. Dalam perjanjian ini, Bacan diakui hak dan kedaulatannya atas Laiwui, Sembaki, Bacan Tua, Salap, Macoli, Wuiyama, Turongara, Piga Raja, Bariati dan Taspa. Kompeni sendiri mengakui batas-batas wilayah Bacan tersebut.

Kesultanan Bacan, selain menguasai seluruh kepulauan Bacan dan Obi, juga memiliki daerah taklukan berupa beberapa desa di Seram – yakni Lisabata, Hatuwe, Saway, Lulata, Poputa, Bowur, Tulusy, Soleman dan Hatilen – serta di Papua. Pada 1672, penduduk desa-desa di Seram meminta kepada Gubernur Kompeni di Ambon agar mereka berada langsung di bawah pemerintahan Kompeni Belanda, karena buruknya pelayanan Kesultanan Bacan. Komisaris Kompeni Padtbrugge menyetujui usul tersebut dan selama 35 tahun berikutnya daerah kekuasaan Bacan di Seram itu langsung berada di bawah pemerintahan Kompeni. Baru pada 1707, Sultan Muhammad Sahiddin dari Bacan meminta agar Kompeni mengembalikan daerah ini. Gubernur Ambon mengabulkan permintaan tersebut dan kembalilah wilayah Seram itu ke pangkuan pemerintahan Bacan. Untuk keperluan serah terima wilayah ini, Sultan Muhammad Sahiddin mengutus putera mahkotanya.

Pada 1676 Sultan Bacan membuat pernyataan tentang integrasi daerah Obi di bawah Kompeni. Hal ini tidaklah berarti bahwa Obi telah dilepaskan Bacan dan menjadi bagian dari administrasi Kompeni. Dalam kenyataannya, Obi tetap menjadi daerah Kesultanan Bacan, tetapi berada di bawah perlindungan Kompeni. Jadi, pada 6 Mei 1682, Sultan Bacan menyetujui bantuan Kompeni atas beberapa kampung di Obi seperti Gamano, Belang Bilato dan Tapa Salila.

Berbeda dengan Ternate, Bacan baru memberikan hak monopoli perdagangan rempah-rempah kepada Kompeni pada 1667. Ketika Kompeni mengeluarkan perintah untuk menebang pohon-pohon cengkih guna mendongkrak harga di pasaran dunia, Bacan bersama Tidore agak ogah-ogahan menjalankan perintah tersebut. Itulah sebabnya, pada 17 Juli 1780 Pemerintah Kompeni mengeluarkan *acte van investiture* yang menuduh Bacan – demikian juga Tidore – telah "melawan" Kompeni dan melanggar berbagai perjanjian yang telah dibuat di antara keduanya.¹⁰ Kompeni juga menuduh Bacan terlibat berbagai kasus penyelundupan rempah-rempah ke Seram Timur dan bersekongkol dengan para perompak Mindanao.¹¹ Akibatnya, Sultan Iskandar Alam dari Bacan dicopot dan digantikan dengan Kaicil Ahmad.

Ketika Nuku mengancam seluruh Maluku Utara lewat perjuangannya untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda, Kompeni minta bantuan Bacan menahan kemajuan militer Nuku dan mempertahankan kepulauan Lata-lata, Obi serta Buru. Dengan setengah hati Sultan Iskandar Alam – sebelum pencopotannya – menyiapkan sebuah *komisi peperangan* yang dipimpinnya sendiri bersama *Gezaghebber* G.F. Durr sebagai sekretaris dan beranggotakan

⁹ P. van der Crab, *Op.cit.*, p. 244 ff.

¹⁰ Dr. F.W. Stapel, *Op.cit.*, pp. 433 ff.

¹¹ *Ibid.*, pp. 453 ff.

Jogugu Naim, Kapita Laut Malik, Hukum Atiatun, Mayor Abdul Halim, Kimalaha Marsaoli Haiyat, *Sangaji* Mandioli Totoho dan Kimalaha Sapangala Bahadin.

Komisi ini menyiapkan 300 tentara yang dibiayai Kompeni. Namun, ketika Nuku menyerbu Bacan bersama armada Inggris pada 1781, Sultan Bacan dan komisi perangnya berbalik memihak Nuku. Itulah sebabnya Iskandar Alam segera dicopot dan digantikan dengan Kaicil Ahmad. Iskandar Alam dipandang tidak lagi dapat dipercaya.¹²

Sewaktu Belanda mensubordinasi Kesultanan Bacan dan kesultanan Maluku lainnya ke dalam sebuah keresidenan, Belanda menempatkan pejabat-pejabatnya di sana dalam jabatan berikut: Sejak 1883-1903 ditempatkan *Controleur*, sejak 1903-1915 ditempatkan *Posthouder*, dan sejak 1915-1942 kembali ditempatkan *Controleur*.

Rangkaian Terakhir Para Sultan Bacan

Data kesejarahan para sultan Bacan sebelum abad ke-19 memang sulit ditemukan, karena jarang tertuang dalam rekaman-rekaman sejarah. Baru pada perempatan kedua abad ke-19 – yakni sejak 1826 – data tertulis yang memberi informasi tentangnya dapat ditemukan. Dalam berbagai informasi kesejarahan ini disebutkan bahwa setelah Sultan Kamarullah, berkuasa di Bacan Sultan Muhammad Hayatuddin Syah (1826-1862), yang digantikan Sultan Muhammad Sadik Syah (1862-1889). Antara 1889 hingga 1900 terdapat kevakuman kekuasaan di Bacan. Setelah itu, berkuasa Sultan Muhammad Usman Syah (1900-1917).

Ketika Muhammad Usman Syah meninggal, ia digantikan Sultan Dede Muhsin Usman Syah, yang berjiwa kerakyatan dan sangat merakyat dalam pergaulannya. Ia adalah Residen terakhir Maluku Utara, sebelum keresidenan ini diturunkan statusnya menjadi kabupaten. Sultan Dede Muhsin Usman Syah adalah salah satu pejuang Propinsi Maluku Utara. Berdasarkan keputusan Musyawarah Besar Rakyat Maluku Utara pada 1967, Sultan Bacan ini memimpin sebuah delegasi yang terdiri dari lima orang untuk memperjuangkan Maluku Utara menjadi propinsi.¹³

Dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Maluku, Bacan digelari sebagai *dehe ma-kolano* atau "Penguasa atas jazirah paling ujung." Hal ini disebabkan letaknya di bagian paling selatan bila pulau-pulau Maluku dipandang dari utara. Walaupun Bacan tidak terlalu menonjol perannya dalam percaturan politik regional, dibandingkan dengan Ternate dan Tidore, tetapi Kesultanan ini memiliki kelebihan: Ia dapat mempertahankan kedaulatan dan integritasnya ketika kesultanan-kesultanan tetangga menghadapi masalah tersebut. Ketika Spanyol menyerbu Bacan pada 1611, Bacan berhasil mempertahankan diri dari serbuan itu. Ketika Gubernur Portugis Antonio Galvao berencana menyerbunya, Bacan berhasil membawa Galvao ke meja perundingan untuk menandatangani perjanjian perdamaian tanpa pertumpahan darah.¹⁴

Posisi Bacan di antara Kerajaan-kerajaan Maluku

¹² P.A. Leupe, "De Verdediging van Ternate onder den Gouverneur Johan Godfried Budach 1796-1799," *Tijds. Kon. Instituut*, deel VIII, pp. 290 ff.

¹³ Penulis adalah salah satu dari kelima delegasi tersebut, yang bertindak sebagai sekretaris merangkap juru bicara delegasi, dan mengenal sangat dekat Sultan Bacan, yang menjabat sebagai ketua delegasi. Tiga anggota delegasi lainnya adalah Mukhtar Mustafa, Oei Tjoe Haw dan Let. Kol. Suwignyo.

¹⁴ Antonio Galvao, *Op.cit.*, p. 267.

Ketika mengunjungi Bacan pada 1515, Thome Pires menulis berita pertamanya tentang pulau ini sebagai berikut:

“Pulau yang disebut Bacan menghasilkan cengkih, pulau lain tidak. Raja pulau ini disebut Raja Lusuf. Ia memiliki tanah dan rakyat yang banyak, melebihi raja-raja yang ada di Maluku. Dia juga memiliki banyak perahu. Raja ini adalah saudara tiri Raja Ternate, mereka menjadi sahabat karib. Kebanyakan rakyatnya masih menyembah berhala. Negeri ini mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang bagus. Dari pelabuhan ini barang-barang dan muatan diangkut ke pulau lain. Bacan merupakan mata rantai pulau-pulau yang menghubungkannya dengan Seram dan Ambon. Negeri ini menghasilkan kira-kira 5000 bahar cengkih tiap tahun. Tetapi, pulau ini tidak menghasilkan bahan makanan yang banyak ... dari pulau-pulau lain, bahan makanan itu dibawa ke pulau ini”.¹⁵

Tulisan Thome Pires di atas kurang akurat, karena ia melihat Bacan menurut kacamata sendiri. Tulisan itu dibuat empat tahun sebelum orang-orang Portugis mengunjungi Bacan untuk pertama kalinya. Tetapi, catatan Pires mengenai perdagangan cengkih cukup signifikan. Akibat perdagangan rempah-rempah, Bacan telah tampil sebagai salah satu kerajaan yang menjadi pilar Moloku Kie Raha. Tetapi, karena jumlah populasi yang kecil, kerajaan ini tidak memainkan peran yang berarti dalam situasi politik dan militer di Maluku, dibandingkan Ternate dan Tidore.

Dalam konteks persaingan Ternate-Tidore, para Sultan Bacan cukup cerdas dan bahkan cenderung oportunis dengan memilih Tidore sebagai partner. Dalam konflik yang timbul akibat persaingan Ternate-Tidore, Bacan memilih berpihak dan membantu Tidore ketimbang Ternate. Pada 1585, ketika tentara Spanyol yang dipimpin Pedro Sarmiento menyerang Ternate, Bacan dan Tidore memberikan dukungan kepada Spanyol dengan menyumbang sejumlah tentara. Hal serupa juga terjadi ketika Galvao menyerang Tidore pada 1536, Bacan dan Jailolo mendukung Tidore. Ketika Spanyol menggempur Gamlamo pada 1606 dan mendudukinya, Bacan dan Tidore membantu dengan tentara. Kasus senada juga terjadi ketika Nuku berjuang melawan Belanda dan Ternate. Bacan memberikan bantuan logistik kepada Nuku, walaupun sebelumnya pasukan Nuku telah menyerang dan menduduki ibukota Bacan.

Keberpihakan Bacan kepada Tidore tidak terlepas dari upaya untuk menanggulangi hegemonitas Ternate atas Maluku, walaupun – jika dibandingkan dengan Tidore – Bacan merupakan pemberi ibu, karena banyak putri-putri Bacan menikah dengan para Sultan Ternate, ataupun para putera mahkotanya.

Bacan dan Kristenisasi

Di masa awal, Raja Bacan bermukim di pulau Kasiruta, sementara pulau Bacan sendiri hanya ditempati seorang *sangaji*. Untuk pertama kalinya Portugis mendarat di Bacan pada 1520, sementara misi Jesuit gereja Katolik baru berada di Bacan pada tahun 1553. Ketika misi Jesuit beroperasi untuk pertama kali di daerah ini, Pater Beira sebagai pimpinan misi melaporkan, bahwa Sultan Bacan yang Muslim dan pembesar keraton lainnya “sangat memusuhi misi” dan mengekang ruang gerak mereka.

Tetapi, di luar dugaan, pada 1557 misi memperoleh kebebasan bergerak dalam wilayah Kesultanan Bacan. Pada tahun ini, Sultan Bacan yang masih muda usia (Alauddin I ?) kehilangan

¹⁵ Pires, Thome: *Suma Oriental. An Account of the East. From the Red Sea to Japan*. pp218. dikutip pada Adolf Henken: *Be my Witness to the End of the Earth*, Jakarta 2002.

pemaisurinya ketika melahirkan. Istri Sultan Bacan adalah putri Sultan Khairun dan adik Sultan Babullah, dan keduanya menikah tanpa persetujuan sang mertua.

Dengan kematian pemaisurinya, Sultan khawatir – yang sesungguhnya tidak beralasan – bahwa Khairun akan mengambil tindakan terhadap dirinya. Dia lalu berusaha memperoleh bantuan Portugis di Ternate, dan bersamaan dengan itu Sultan Bacan juga meminta agar seorang Misionaris didatangkan, karena Sultan dan keluarga ingin dibaptis.

Gubernur Duarte d’Eca mengirim Pater Antonio Vaz menemui Sultan Bacan di Kasiruta. Pada 1 Juli 1557, Sultan beserta keluarga dan sebagian besar bangsawan Bacan dipermadikan dan mengonversi agama dari Islam ke Kristen dalam suatu upacara besar. Sultan memilih nama baptis Don Joao, sama dengan nama Raja Portugis ketika itu. Bersama Sultan, dibaptis pula adiknya berikut tiga saudara perempuannya. Usai dibaptis, Don Joao bersama Pater Antonio Vaz meakukan penginjilan keliling Bacan dan berhasil mengonversi banyak rakyat Bacan menjadi Kristen.

Rakyat di Bacan terbiasa membawa minyak kelapa ke gereja untuk bahan bakar lampu. Seorang tua di Bacan pernah menerangkan kepada seorang anggota misi Jesuit bahwa segera setelah bertobat dan mengakui dosa, fisiknya langsung menjadi sehat. Sementara orang Bacan yang lain menuturkan bahwa konversi mereka ke Kristen merupakan jalan satu-satunya yang lempang menuju dunia berikutnya.

Di Bacan, tindakan pertama yang dilakukan seorang yang sakit adalah memanggil pastor untuk mengikat pengakuannya kepada Iman Kristen, membacakan kitab suci atau berdoa kepada Tuhan guna mempertebal iman. Orang-orang Kristen Bacan percaya, bahwa agama Kristen efektif melawan *suwanggi*, yakni roh jahat yang paling ditakuti karena dapat “memakan” jantung anak-anak atau membikin orang jadi sakit hingga meninggal. *Suwanggi* juga ditakuti karena dapat “mencabut” nyawa orang dan meminum darahnya. Mereka yakin bahwa *suwanggi* tidak mampu menyerang orang Portugis karena telah lama menjadi Kristen.¹⁶

Tidak lama setelah tur keliling Bacan dalam rangka konversi rakyat Bacan ke dalam agama Kristen, Frater Antonio Vaz jatuh sakit dan kembali ke Ternate. Sebagai gantinya, Pastor Castro didatangkan dari Moro ke Bacan. Tetapi, di dekat pulau Hiri, orang-orang Sultan Khairun mencegat perahunya dan Castro kemudian dibunuh pada bulan Januari 1550.¹⁷

Sampai 1562, sebanyak 800 orang Bacan telah mengonversi agamanya dari Muslim ke Kristen. Tetapi, berita konversi agama secara besar-besaran – terutama di kalangan keluarga Sultan Bacan dan para *bobato*-nya telah menimbulkan kemarahan Sultan Khairun. Sultan Ternate ini meminta agar Don Joao kembali lagi ke agama Islam. Menjawab tuntutan Khairun, Don Joao buru-buru membuat persetujuan dengan Sultan Tidore dan Panglima Portugis di Ambon untuk memberikan perlindungan kepadanya.

Menurut sebuah sumber, Don Joao mati diracun Babullah pada tahun 1577, sebelum ia bertobat dan kembali ke Islam.¹⁸ Sumber lain menyatakan, karena diultimatum Babullah, Don Joao kembali ke Islam berikut sebagian *bobato*-nya, dan anggota keluarga Kerajaan Bacan lalu diangkut ke Ternate. Kesultanan Ternate kemudian mengembalikan adik Don Joao yang bernama baptis Don Henrique untuk naik takhta setelah Don Joao wafat. Akan tetapi Don Henrique yang

¹⁶ Andaya, Leonard, *Op.Cit.* pp.128.

¹⁷ Heuken, Adolf, *Be My Witness to the End of the Earth*. Cipta Loka Caraka, Jakarta 2002, p.102.

¹⁸ Jacobs, Hubert, *Documenta Malucensia*, Vol.II, Jesuit Historical Institute, Rome, 1980 p.11.

ikut mengonversi agama bersama kakak dan keluarganya, tidak mau kembali ke agama asalnya, yakni Islam. Ia lalu meminta bantuan komandan benteng Portugis di Tidore, yang menyebabkan Ternate menyatakan perang terhadap Bacan.

Dalam pertempuran dengan pasukan Kapita Laut Babullah, Don Henrique tewas dan Bacan menyerah pada 1580. Putera Don Joao, Kaicil Raxa Raudin (Alauddin II) kemudian dinobatkan menjadi Sultan Bacan. Kaicil Alauddin II semasa kecilnya telah dibaptis dan dididik secara Katolik. Akan tetapi, ketika berada di Ternate dan mendengar berita bahwa ayahnya Don Joao tewas diracun, ia segera kembali ke keyakinan Islam.

Pada 1580, Alauddin II dilantik menjadi Sultan Bacan dalam usia masih muda – yakni 18 tahun. Anehnya, ketika Frater Mascarenhas tiba di Bacan pada 1581, Alauddin II masih sempat membisikkan kepada Frater bahwa rakyat Bacan ingin kembali lagi ke agama Kristen dengan syarat Portugis mengirim sebuah armada yang kuat untuk melindungi pulau Kasiruta dari serbuan Ternate. Tetapi, karena Portugis sendiri telah lemah dan sedang menanti keruntuhannya, tuntutan Alauddin II tidak dipenuhi.

Sementara itu, *Sangaji* Labuha (pulau Bacan) yang dibaptis dengan nama Rui Pereira bersama rakyatnya pada 1557, kembali lagi ke agama Islam bersama raja mereka Alauddin II. Tetapi, pada 1580, *sangaji* Labuha dan rakyatnya kembali murtad dan beralih lagi ke agama Kristen.¹⁹ Rui Pereira adalah menantu Alauddin I (Don Joao). Setelah kembali ke Kristen dan karena takut penyerbuan pasukan Ternate, *Sangaji* Rui Pereira mengerahkan rakyatnya membangun sebuah benteng. Bersama seluruh rakyatnya yang berjumlah 200 orang, Rui Pereira berdiam di dalam benteng yang merupakan pemukiman sekaligus sarana pertahanan. Rui Pereira meninggal dunia pada 1606.

19. Documenta Malucencia, Vol. II ibid.

BAB 7

Kerajaan-kerajaan Kecil Maluku

Pendahuluan

Di samping 4 kerajaan besar yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, di Maluku juga terdapat sejumlah kerajaan kecil yang pengaruhnya tidak begitu signifikan, sehingga kurang mendapat tempat dalam rekaman-rekaman sejarah. Bab ini mencoba mengungkapkan secara ringkas, sepanjang dimungkinkan oleh sumber-sumber yang ada, beberapa di antara kerajaan kecil tersebut.

Kerajaan Loloda

Salah satu kerajaan tertua di Maluku adalah Loloda, di samping Moro dan Obi. Loloda terletak di ujung utara pulau Halmahera. Tidak diketahui secara pasti kapan kerajaan Loloda didirikan dan siapa penguasa pertamanya. Kemungkinan besar, Kerajaan Loloda lebih dahulu eksis dibandingkan Kerajaan Jailolo. Sejarawan Paramita Abdurachman¹ mengungkapkan bahwa menurut sumber *Nagarakertagama* dari Majapahit, pada masa paling awal ada seorang kolano yang berkuasa di Loloda, Halmahera Utara. Tetapi, kolano ini kehilangan kekuasaannya dengan munculnya Kolano Jailolo pertama, yang berwibawa namun tiran.

Kolano Jailolo pertama ini seorang wanita, karena diberitakan bahwa ia kemudian menikah dengan Kolano Loloda.² Perkawinan ini barangkali bersifat politis dan ditujukan untuk memperluas wilayah Jailolo dengan mencakupkan wilayah Loloda ke dalamnya. Setelah Ratu Jailolo yang tiran itu wafat, Loloda mampu melepaskan diri dari kekuasaan Jailolo.

Loloda adalah kerajaan miskin yang di masa lampau dimitoskan sebagai satu-satunya perempuan yang ditetaskan telur naga. Menurut mitos ini, di zaman dulu belum ada raja dan orang-orang hidup di dalam kelompok masing-masing dengan dipimpin para tetuanya, dan “*seseorang tidak lebih baik dari yang lain.*”

Sering terjadi peperangan di antara berbagai kelompok, dan persekutuan itupun akhirnya pecah, karena saling membunuh antara satu dengan lainnya. Pada masa itu, satu kelompok berusaha lebih kuat dari yang lain. Walaupun Pemerintahan mulai tumbuh, tetapi raja tetap tidak ada atau belum eksis.

Alkisah, pada suatu hari, seorang tua paling berpengaruh di pulau Bacan bernama Bikusagara, pergi melaut dengan sebuah perahu kora-kora. Ia menemukan serumpun rotan yang

¹ Abdurachman, Paramita R., et.al., (eds.), Op.Cit.p.163.

² Lihat juga Françoise Valentijn, *Oud en Nieuw Oost Indie*, ed. Dr. Salomon Keyzer, s'Gravenhage: H.C. Susan & C.H. Zoon, 1856, jilid I, pp. 250 ff.

tumbuh dekat tebing laut yang sangat curam. Bikusagara menyuruh beberapa awak perahunya menyelam dan memotong beberapa batang. Tetapi ketika batang rotan dipotong, darah mengucur darinya.

Melihat fenomena aneh ini, Bikusagara sendiri serentak melompat dan menemukan empat butir telur naga yang terletak di antara batu karang. Ketika mendekati telur-telur tersebut, ia mendengar suara yang memerintahkan padanya agar telur-telur naga itu dibawa pulang ke rumahnya, karena telur-telur itu akan menetaskan *pribadi-pribadi yang tinggi martabatnya*.

Dengan sangat hati-hati Bikusagara membawa pulang telur-telur itu ke rumahnya, kemudian diletakkan pada sebuah kotak yang terbuat dari rotan – disebut *totombo*. Beberapa lama kemudian, telur-telur itu menetaskan 3 anak laki-laki dan seorang perempuan. Setelah dewasa, anak laki-laki yang tertua menjadi Raja Bacan, yang kedua menjadi Raja Papua, dan yang ketiga menjadi Raja Bungku dan Banggai. Sementara anak perempuan menjadi permaisuri Raja Loloda.³ Keturunan dari empat raja inilah yang kelak menjadi raja-raja di Maluku.

Menurut mitos telur naga, Raja Loloda berasal dari keturunan salah satu telur naga yang suci. Karena itu, walaupun Loloda akhirnya dianeksasi Ternate, penguasanya tetap menyandang gelar Raja. Sampai 1662, penduduk kerajaan kecil ini hanya terdiri dari 200 orang, dan setengahnya adalah orang Galela.

Raja Loloda adalah seorang yang miskin, karena daerahnya tidak ditumbuhi pohon rempah-rempah. Ia tidak memiliki budak, dan permaisurinya – yang mempunyai hubungan dengan Kaicil Alam dari Jailolo, karena salah seorang Ratu Jailolo di masa awal pernah menikah dengan Raja Loloda – melakukan semua pekerjaan rumah seorang diri, seperti memasak makanan untuk Raja dan anak-anak, menyuci pakaian, dan mengambil kayu bakar di hutan. Apabila persediaan pangan menipis, sang Raja sendiri yang pergi menebang pohon sagu dan mengolahnya untuk memperoleh tepung sagu. Ia juga melaut memancing ikan, masuk hutan berburu, dan melakukan pekerjaan lain yang lazim dilakukan rakyat biasa.

Ibukota kerajaan Loloda dihuni pemukim Muslim, dan orang-orang Alifuru mendiami daerah pedalaman sekitar beberapa kilometer dari ibukota. Kerajaan Loloda hanya mempunyai 16 tenaga tempur laki-laki dari golongan Islam, dan sekitar 60 tenaga tempur Alifuru.

Walaupun demikian, karena warisan historis, Loloda selalu menempati tempat khusus dalam upacara para raja Maluku dan berhak menyandang gelar Kolano. Karena berasal dari keturunan telur naga, Raja Loloda memperoleh kedudukan dan martabat yang setara dengan raja-raja Maluku yang berasal dari kerajaan-kerajaan besar seperti Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo.

Gubernur Maluku, Robertus Padtbrugge (1677-1682), dalam memori serah terima jabatan kepada penggantinya Jacob Lobs (1682-1686), mengingatkan sebutan yang terkenal bagi kerajaan-kerajaan di Maluku sebagai berikut:

- Loloda, *ngara ma-beno* (dinding pintu)
- Jailolo, *jiko ma-kolano* (penguasa teluk)
- Tidore, *kie ma-kolano* (penguasa pegunungan)
- Ternate, *kolano Maluku* (penguasa Maluku)

³ Jacobs M.SJ,(ed.) *A Treatise on the Moluccas*, Jesuit Historical Institute, Roma, 1971 pp.81.

Bacan, *dehe ma-kolano* (penguasa daerah ujung)⁴

Makna sebutan di atas menunjukkan bahwa dalam deretan kerajaan-kerajaan Maluku, Loloda termasuk salah satu di antaranya. Kerajaan Loloda adalah bagian tak terpisahkan dari kerajaan-kerajaan besar seperti Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Tetapi, tentu saja, pengaruhnya tidak begitu signifikan dalam percaturan politik Maluku. Sebagai *ngara ma-beno*, Kerajaan Loloda yang terletak di bagian utara Halmahera, menjadi "pintu masuk" ke kerajaan-kerajaan Maluku. Sedangkan Bacan, sebagai daerah paling ujung di selatan, merupakan pintu keluarnya.

Menurut Sejarah Maluku versi Tidore, raja-raja Loloda berinduk pada puteri Jafar Sadek ketiga, Sagarnawi. Kerajaan-kerajaan Maluku, yakni Loloda, Jailolo, Tidore, Ternate dan Bacan, merupakan *panca tunggal*.⁵ Bila kerajaan-kerajaan ini diasosiasikan dengan *soa fala raha*, maka muncul skema berikut ini:

Ternate ----> Marsaoli,
Tidore ----> Limatahu,
Jailolo ----> Tomagola,
Bacan ----> Tomaito, dan
Loloda ----> Tamadi.

Ketika dilakukan pertemuan Moti pada 1322, yang diprakarsai Ternate, Loloda juga diundang. Raja Loloda telah meninggalkan kerajaannya untuk menghadiri pertemuan tersebut. Tetapi, lantaran angin ribut, delegasi Loloda terpaksa mendarat di Dufa-dufa Ternate dan gagal mencapai Moti. Karena itu, kerajaan ini tidak ikut dalam persekutuan tersebut dan kemudian menjadi bulan-bulanan politik ekspansi Ternate.

Ketika bangsa Eropa tiba di Maluku pada permulaan abad ke-16, Kerajaan Loloda sudah tidak berperan dan tidak berpengaruh lagi lantaran dianeksasi Ternate. Walaupun demikian, hingga 1662, kerajaan yang berpenduduk sekitar 200 jiwa ini – sebagiannya adalah orang-orang Galela – masih dibiarkan Ternate berfungsi di bawah kekuasaannya, dan Raja Loloda masih diperkenankan menggunakan gelar *kolano*. Demikian pula, dalam perjuangan Nuku melawan Belanda, barisan penasehat yang diangkatnya terdiri dari lima orang, masing-masing dua dari Maba, Kimalaha Galela, seorang dari Mareku, dan Imam Loloda.

Ketika Ternate di bawah kendali Sultan Hamzah (1627-1648), kerajaan Loloda praktis tenggelam. Pada 1628, atas perintah Hamzah, sejumlah penduduk Loloda dipindahkan ke Jailolo, setelah banyak penduduk Jailolo meninggalkan negerinya sebagai protes atas dilikuidasinya kerajaan mereka oleh Ternate.

Kerajaan Moro

Kerajaan Moro terletak di daratan pantai timur Halmahera Utara, mulai dari tanjung Bisoa di utara sampai Tobelo. Karena letaknya di daratan Halmahera ia disebut juga dengan Morotia (Moro daratan). Sebagian lagi wilayahnya terletak di pulau seberang laut yang

⁴ Leonard Y. Andaya, *Op.cit.*, pp. 51 f., 93 dan 232.

⁵ Van Fraassen, *op.cit.*, I, pp. 18-19, 209.

dinamakan Morotai (Moro lautan). Karena itu, Kerajaan Moro berwilayahkan Moro daratan (Morotia) dan Moro lautan (Morotai).

Ibukota kerajaan Moro adalah Mamuya, terletak di Morotia, sekarang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Galela. Sebagaimana Loloda, tidak diketahui secara pasti kapan Kerajaan Moro berdiri dan siapa pendirinya. Menurut Prof.A.B.Lapian, dalam salah satu tulisannya paling akhir tentang kerajaan Bacan, kerajaan Moro sama tuanya dengan kerajaan Loloda dan kerajaan Jailolo. Kota-kota penting Kerajaan Moro, selain Mamuya, adalah Sugala, Pune (Galela), Tolo, Cawa, Samafo (Tobelo), Sakita, Mira, Cio dan Rao (Morotai). Pada masa kekuasaan Portugis, Moro berada dibawah perintah seorang raja bernama Tioliza.

Penduduk Kerajaan Moro sebagiannya memeluk agama Islam, sebagian lagi beragama Katolik, dan lainnya memiliki kepercayaan animisme. Secara etnografis, penduduk Kerajaan Moro terdiri dari etnis Galela dan Tobelo, baik di Morotia ataupun di Morotai. Sampai perempatan ketiga abad ke-16, Kerajaan ini masih eksis.

Moro adalah penghasil beras terbesar di Maluku dan oleh karenanya merupakan gudang pangan – beras dan sagu serta ikan dan daging – yang menyuplai kebutuhan pangan kota Ternate. Kerajaan ini mendapat kesulitan karena kerajaan besar seperti Ternate ingin mencaploknya. Selain Ternate, Moro juga diincar Jailolo.

Orang-orang Ternate memperlakukan rakyat Moro seperti budak, merampas hasil-hasil pertanian dan perkebunan mereka. Mereka sering harus lari ke hutan karena rumah dan kampung halamannya diserang dan dibakar. Pada suatu hari, keadaan yang tidak menentramkan ini dituturkan Raja Tioliza kepada Gonsalo Veloso, seorang pedagang Portugis yang mengunjungi Mamuya. Pedagang Portugis itu menasehati Raja Moro agar beralih ke agama Kristen dan meminta perlindungan tentara Portugis.

Ketika Veloso kembali ke Ternate, Raja Moro mengirim beberapa orang untuk melaporkan situasi Moro kepada Gubernur Portugis dan menyampaikan keinginan mereka memeluk agama Kristen. Gubernur Triastao d'Atayde menyambut hangat dan menerima permohonan mereka. Para utusan yang diterima di benteng Gamlamo itu kemudian dibaptis sebelum bertolak kembali ke Moro.

Setiba kembali di Mamuya, para utusan itu melaporkan semua sambutan yang mereka peroleh di Ternate. Setelah menerima laporan, Raja Moro mengundang para *bobato*-nya dan membahas laporan utusan mereka yang kini telah memeluk Kristen. Diputuskan bahwa Raja dan para *bobato* akan segera ke Ternate untuk dibaptis.

Selang beberapa minggu kemudian, Raja Moro dan *bobato*-nya berikut beberapa pengiring telah berada di dalam benteng Gamlamo serta diterima Gubenur Atayde dan para misionaris. Dalam suatu upacara megah, Raja Moro – yang mengenakan pakaian bangsawan Portugis pemberian Atayde – berikut para *bobato* dan pengiringnya dibaptis oleh Frater Simon Vaz. Raja Moro memperoleh nama baptis Don Joao de Mamuya.

Dengan pembaptisan ini, Raja Moro memperoleh ketenangan batin karena ibukota kerajaannya akan memperoleh bantuan pasukan Portugis untuk menangkal serangan-serangan orang Ternate yang bermukim di Galela dan beragama Islam. Beralihnya Raja Moro ke dalam agama Kristen segera diikuti rakyat di ibukotanya, Mamuya, dan terbentuklah komunitas Kristen pertama di kerajaan Moro di kota itu.

Berita pembaptisan Raja Moro segera menyebar ke Morotia dan Morotai. *Sangaji* Tolo, pemimpin sebuah pemukiman terbesar Moro yang terletak kira-kira 5 kilometer di selatan Mamuya, segera mengikuti jejak rajanya dan beserta beberapa pengiringnya berangkat ke Gamlamo untuk dibaptis. Ia kemudian dikenal dengan nama baptis Don Atayde de Tolo.

Misi katolik di Gamlamo lalu mengutus Frater Simon Vaz ke Mamuya dan Tolo. Simon Vaz berhasil ‘merombak’ tradisi orang-orang Morotia dan merekonstruksinya dengan iman Kristiani. Untuk kebutuhan rohani umatnya, dua buah gereja dibangun di Mamuya dan Tolo. Sampai 1535, selain di Mamuya dan Tolo, pusat-pusat Kristen telah berdiri di Cawa, Samafo, Pune, Loqui (Aru), Sugala, Cunialonga (Lolonga), Todoku (Tutumaloleo) dan Bisoa – semuanya di Morotia. Sementara di Morotai, pusat-pusat serupa terdapat di Sakita, Mira, Sopi, Cio, Hapo, Wayabula, Pilowo, dan Rao.

Pesatnya penyebaran Kristen di Moro telah menimbulkan kecemasan Khairun. Ia lalu mengundang para sultan Maluku dalam suatu pertemuan rahasia yang memutuskan untuk “mengenyahkan orang-orang Kristen dari Moro.” Katarabumi, Raja Jailolo yang berambisi mengambil alih Moro, mengerahkan pasukan Alifurunya menyerang Morotia, mulai dari Sugala sampai ke Mamuya dan Tolo. Ketika mengepung Mamuya, rakyat Moro hendak meneruskan perlawanannya, tetapi Raja Moro menolak perlawanan dan memilih menyerah. Ia takut penyerbu akan membakar habis ladang padi dan kebun kelapa mereka. Dengan jatuhnya Mamuya, komunitas Kristen di utara Halmahera (Morotia) segera menyerah, dan sejak itu tidak ada lagi Pastor Katolik yang mengunjungi Moro sampai Franciscus Xaverius bertandang ke sana pada 1546.

Konversi orang Moro ke agama Kristen pada paruh pertama abad ke-16 telah menciptakan persekutuan yang efektif bagi keuntungan Portugis. Akan tetapi, pemukiman-pemukiman Kristen selalu menjadi target serangan tentara kerajaan Muslim, khususnya Jailolo di bawah Katarabumi dan Ternate di bawah Babullah.

Ketika Babullah dinobatkan sebagai Sultan Ternate pada 1570, ia melanjutkan perang terhadap Portugis yang telah dikobarkan pendahulunya, Khairun. Peperangan ini berhasil dimenangkannya dan mengakibatkan Portugis terusir dari sebagian besar Maluku. Misi Jesuit Moro, yang di zaman Khairun banyak memperoleh bantuan dan kemudahan, mulai surut pada masa Babullah. Para pastor mulai meninggalkan Kerajaan Moro menuju Ternate, dan pada 1574 meninggalkan Maluku.

Pada perempatan terakhir abad ke-16, Babullah menggabungkan Kerajaan Moro ke dalam wilayah kekuasaan Ternate. Ia mengirim ekspedisi militer ke Galela, kemudian ke Tolo (Tobelo), dan ke Morotai. Walaupun pasukan Babullah menemui perlawanan sengit di Tolo, pusat Misi Jesuit di Kerajaan Moro, seluruh wilayah Moro akhirnya berhasil ditundukbawahkan ke dalam Kesultanan Ternate. Eksistensi Kerajaan Moro pun berakhir.

Ketika Sultan Saidi berkuasa di Ternate (1584-1606), penduduk Bisoa, Galela, Tolo, Cawa dan Samafo, mengirim perutusannya dengan iringan musik dan isyarat perdamaian. Mereka meminta Sultan Ternate agar diperkenankan kembali ke agama Katolik. Tidak jelas bagaimana akhir dari permintaan tersebut. Tetapi, pada 27 Nopember 1606, Ternate menandatangani sebuah perjanjian dengan Spanyol,⁶ yang antara lain menetapkan bahwa Ternate akan mengembalikan bekas budak Portugis dan Spanyol yang telah beralih ke agama Islam, dan tidak akan

⁶ *Ibid.*

memaksakan orang Kristen masuk Islam, termasuk para budak. Perjanjian ini bertalian dengan masalah orang-orang Moro.

Pada masa pemerintahan Sultan Mudaffar (1610-1627), sejumlah orang Moro dari Mamuya, Samafo, Kioma dan Tolo dievakuasi ke Ternate. Pada 1628, Sultan Hamzah dari Ternate juga memutuskan membawa sejumlah 800 orang Moro ke Ternate untuk memperkuat angkatan perangnya. Sementara pada 1686, sejumlah orang Moro yang berasal dari Morotai, Cio, Sopi, Sakita dan Mira dipindahkan ke Jailolo dan Dodinga.⁷

Salah satu hal yang menonjol dalam sejarah Kerajaan Moro adalah kristenisasi. Para misionaris dalam menjalankan tugas di Moro maupun di daerah-daerah lain seperti di Bacan menerapkan suatu metode yang amat sederhana dan sesuai kondisi masyarakat bersahaja yang mereka targetkan. Pada pembaptisan massal, usai formalitas, mereka segera melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan ritual-ritual gerejani dan berbagai seremoni seperti menyalakan lilin, musik, dan tidak mendahulukan hal-hal yang bersifat doktrin.

Orang Kristen di Moro sangat kental respeknya terhadap salib, gereja, orang suci Kristen, dan nama Jesus Kristus. Menurut keyakinan mereka, semuanya itu akan memberi kekuatan kepada mereka, baik secara individual maupun kolektif. Di Tolo misalnya, rakyat percaya bahwa percikan air suci sewaktu dibaptis akan menyembuhkan penyakit, dan air itu dapat menangkal segala macam penyakit serta racun. Mereka yang dibaptis yakin bahwa orang sakit akan sembuh setelah meneguk air suci, karena air itu akan memberikan kebajikan dan Tuhan akan menganugerahi kesehatan.

Di Sakita (Morotai), ketika terjadi kemarau panjang, kepala desanya pegi ke gereja dan berdoa minta hujan dengan cara memukul-mukul dada, kemudian mengangkat sebuah piring berisi minyak kelapa yang biasa dijadikan lampu sembari berdoa kepada Tuhan untuk mendatangkan hujan. Setelah itu sang kepala desa memberitahukan seluruh penduduk bahwa jika menghendaki hujan turun, semua rakyat harus membawa minyak kelapa ke gereja sebagai sedekah. Tidak dilaporkan, apakah setelah itu hujan turun atau tidak.

Sungguhpun pribumi-pribumi Kristen Moro telah memperoleh pelajaran tentang ritual dan berbagai seremoni gerejani yang diberikan para rohaniwan lokal, tetapi sejak Magister Franciscus Xaverius mengunjungi daerah ini, mereka mulai mempelajari doktrin Kristen yang diberikan dengan menggunakan metode praktis yang disusun Xaverius.

Franciscus Xaverius telah meramu pengalaman-pengalamannya dan memadukan musik lokal dengan ritual-ritual yang pernah dipraktikkan di India. Ia juga memberikan perhatian khusus kepada anak-anak Moro, karena lebih mudah menyerap dan menghayati doktrin secara lebih efektif dan intens. Pengalamannya di India, Ambon dan Ternate, diterapkan pula di Moro. Pusat-pusat utama penyebaran Kristen di Moro ialah Tolo, Mamuya, Cawa, Sugala, Sakita, dan Mira. Tetapi Pune, Rao, dan Sugala juga mempunyai andil cukup besar.

Selain Magister Franciscus Xaverius, Antonio Vaz termasuk salah satu pastor yang bertugas lama di Moro. Konversi orang Moro ke agama Kristen pada paruh pertama abad ke-16 telah memperkuat persekutuan Portugis-Halmahera (Moro). Tetapi, akibatnya pribumi Kristen Moro berhadapan dengan serangan-serangan Katarabumi dan Babullah.

⁷ Van Fraassen, "Types of Socio-Political Structure in North Halmahera History," dalam Masinambouw, *Op.cit.*, vol. 1, pp. 87 ff.

Misi Jesuit pertama tiba di Maluku pada 1546, bersamaan dengan tibanya Franciscus Xaverius di Ternate.⁸ Tetapi baru pada bulan Oktober 1547 – setelah beberapa pengikut Xavier tiba di Ternate yakni Frater Juan de Seira, Nuno Rubeiro, Nicolau Nunes dan Baltazar Nunes – Misi Jesuit resmi lahir dan melakukan aktivitasnya.

Stasiun-stasiun Jesuit di Maluku

Ternate

Pada masa Gubernur Antonio Galvao (1536-1540), kegiatan evangelisasi Ternate mulai digarap langsung oleh Frater Simon Vaz. Ia berhasil menggarap secara berturut-turut:

1. Tabariji, penguasa Ternate sebelumnya, dan memiliki nama baptis Don Manuel
2. Ibu Tabariji, Nayi Cili Boki Raja, yang dikenal sebagai Mangkubumi Nukila, dengan nama baptis Donna Isabela, dan suami keduanya Pati Sarange.
3. Seorang putri Keraton yang dibaptis dengan nama Donna Catarina.

Don Manuel dan Donna Catarina adalah saudara tiri (sebagai ibu) Sultan Kahirun sendiri. Pada 1544, Donna Catarina kawin dengan Baltazar Veloso yang telah menetap selama 27 tahun di Maluku. Seorang pangeran Jailolo yang mengonversi agama dari Islam ke Kristen pada masa Galvao adalah kemenakan Sultan Jailolo bernama Kolano Sabia. Khairun pernah mengimbau agar Sabia kembali ke agama Islam, tetapi Gubernur Galvao dengan pedang terhunus di tangan menyatakan kepada Khairun bahwa ia tidak berhak menolak seseorang yang telah dibaptis untuk melepaskan kekristenannya. Sabia menggunakan nama baptis Manuel Galvao, sebagai penghormatan kepada Gubernur Galvao. Gubernur merayakan pembaptisan Sabia dengan suatu pesta besar dan membangun rumahnya di dalam benteng serta menyediakan semua kebutuhan hidupnya. Sukses Galvao yang lain adalah pembaptisan seorang Arab Jailolo, Sayyid, dan mengaku masih turunan Nabi Muhammad SAW.

Sejak Gamlamo direbut Spanyol pada 1606, penguasa Spanyol menyebut negeri ini sebagai “rosario”. Penguasa Spanyol memberikan perhatian cukup besar pada kegiatan Misi Jesuit. Gubernur Acuna, sebelum bertolak ke Manila, misalnya, merestorasi gereja St. Paul yang didirikan Frater Luis de Gois pada 1568.

Tidore

Di pulau ini tidak terdapat stasiun Misi Jesuit. Tetapi seorang Frater dari stasiun Ternate ditempatkan di sini untuk melayani orang-orang Portugis penghuni benteng dan sisa-sisa orang Portugis, ketika terjadi evakuasi dari benteng Gamlamo. Para Frater juga melayani orang-orang Spanyol yang mempunyai benteng di Tahula dan benteng-benteng kecil lainnya yang ada di Tidore.

Pada 1610, Frater Jorge de Fonceca ditugaskan untuk sementara di Tidore dan, setelah 1613, ia dibantu oleh Frater Lorenzo Masonio. Frater permanen baru ditempatkan pada 1612, dan Fonceca menjalankan tugas tersebut. Ia berhasil membaptis permaisuri seorang pangeran Tidore

⁸ *Ibid* pp.14-16.

pewaris mahkota, dan konversi agama ini mendapat reaksi keras dari para ulama dan masyarakat Tidore, sehingga ketika seorang pangeran yang lain dari kerajaan ini akan beralih agama dari Islam ke Kristen pada 1665, pembaptisannya terpaksa dilakukan di Manila lantaran reaksi tersebut.

Moro

Konversi yang dilakukan Raja Moro Don Joao, Sangaji Tolo Don Ataide de Tolo, dan Sangaji Sugala Luis Currea, berikut rakyat yang berada dalam komunitas mereka, memberikan pengaruh cukup besar. Sentral Misi Jesuit terdapat di Tolo – berpenduduk sekitar 3000 jiwa – untuk Morotia, serta Mira dan Sakita untuk Morotai. Frater Simon Vaz pernah bertugas di komunitas-komunitas tersebut.

Ketika gunung berapi Dukano di Tobelo meletus pada 1552, yang menimbulkan gempa tektonis, banyak rakyat Morotia datang ke Tolo dan minta dibaptis. Dalam waktu hanya seminggu, sejumlah orang dari Cawa, Samafo, dan Mamuya serta Pune berhasil dibaptis.

Setahun setelah itu, pada 1553, Pastor Alfonso de Castro berkunjung ke Moro dan selanjutnya bertugas di sana. Dalam suratnya tertanggal 7 Februari 1553, yang ditujukan kepada Loyola de Rodriques di Goa, de Castro melaporkan bahwa Misi Jesuit hingga awal 1553 telah berhasil mengonversi warga pribumi Moro sebanyak 35.000 orang. Di Tolo – dekat Mede, kecamatan Tobelo, yang menjadi salah satu pusat Misi Jesuit di Morotia – terdapat lebih dari 3000 orang Kristen. Dilaporkan bahwa dalam sehari saja, Frater Nicolaus Nunes pernah membaptis 340 anak yang datang dari pemukiman di sekitar atau berdekatan dengan Tolo, seperti Cawa dan Samafo.

Di samping sukses tersebut, dalam laporannya Castro juga mengeluh bahwa poligami sukar dihapus, walaupun laki-laki Moro sudah dibaptis. Menurut Castro pria Moro tidak dapat hidup tanpa beberapa istri. Walaupun sudah Kristen, mereka menolak menikah menurut hukum-hukum Kristen, sebab ikatan adat dan tradisi begitu kuat.

Sukses Misi Jesuit di Maluku, terutama di Moro, menyebabkan Gubernur Ataide, dalam laporannya kepada Raja Muda Portugal di Goa, tertanggal 22 Pebruari 1534, menyatakan bahwa pimpinan militer di Moro membuat kesalahan besar dengan membina kekuatan militer sendiri agar lebih berkuasa, tanpa membina rakyat pribumi Moro untuk menciptakan kekuatan sendiri dengan cara mengkristenkan setiap pribumi Moro.

Xaverius dan Kristenisasi di Maluku

Pada masa pemerintahan Sultan Khairun, telah tiba di Ternate evangelis terkenal Franciscus Xaverius, dengan menumpang perahu dari Ambon, pada awal bulan Juli 1546. Xaverius memanfaatkan tiga bulan waktunya untuk melakukan penginjilan di Ternate, dan dari bulan Juli 1546 hingga Januari 1547 melakukan aktivitas misinya di Moro. Di Ternate, ia berhasil mendekati kalangan istana dan bersahabat akrab dengan Sultan Khairun. Xaverius bahkan berhasil membaptis beberapa kerabat dekat kesultanan, antara lain adik tiri Sultan Khairun yang nama baptisnya Donna Catarina, dan Ibu Suri Nyai Cili Boki Raja Nukila dan suami keduanya Pati Sarangi serta kemenakan Raja Jailolo dan beberapa Bobato Ternate. Dalam menyampaikan ajaran Kristen, Xaverius memadukan kepercayaan dan kebiasaan spiritual dengan kesenangan

orang-orang pribumi terhadap musik lokal. Pada hari minggu dia menyampaikan khotbah di gereja yang dihadiri orang-orang Portugis dan pribumi Ternate. Dalam waktu singkat, orang-orang pribumi telah dapat menyanyikan kidung-kidung rohani seperti: *Kredo*, *Pater Noster*, *Ave Maria*, dan telah mampu mengucapkan doa-doa umum.⁹ Ia juga menikahkan orang-orang Portugis yang kumpul kebo dengan orang-orang pribumi.

Franciscus Xaverius di Kerajaan Moro

Dalam bulan September 1546, Franciscus Xaverius (selanjutnya disingkat FX) memutuskan untuk mengunjungi Moro, sebuah kerajaan tua di Halmahera Utara. Rencana tersebut disampaikan kepada Gubernur de Freitas dan meminta sebuah alat angkut yang dapat membawanya ke sana.

Gubernur Atayde menolak permintaan tersebut karena khawatir keselamatannya akan terancam, setelah baru setahun lalu terjadi pembunuhan terhadap Vikaris Simon Vaz di kampung Kristen Sao (Cio) pulau Morotai, ketika tengah berlangsung pembaptisan massal di kampung itu. Sangaji Cio dan beberapa orang Portugis juga tewas. Dan sejak peristiwa pembunuhan Vaz, tidak ada lagi pejabat misi Jesuit yang berkunjung ke Moro, sehingga orang-orang Kristen Moro banyak yang mulai murtad, terutama di Sugala, sebuah pemukiman Kristen besar di utara Galela. Pusat-pusat misi Jesuit di Tolo, Mamuya, Pune, dan pemukiman Kristen lainnya, tidak ada lagi ketenangan, karena orang-orang Tavaros dari pasukan Raja Jailolo menyerang mereka.

Atas fakta-fakta tersebut, de Freitas menyarankan FX membatalkan niatnya mengunjungi Moro. Tetapi FX menyatakan bahwa ia tidak takut bahaya tersebut, dan ia juga tidak takut akan kematian dirinya. Ia tidak mengenal musuh lain, selain mereka yang ingin mencegah dia dalam pekerjaannya. Dia memutuskan akan berangkat ke Moro dengan cara apapun untuk melaksanakan pengabdian kepada Tuhan. Dan apabila Gubernur tidak dapat menyediakan angkutan, ia akan terjun ke laut dan berenang ke Moro. Henrique de Lima dan kawan-kawannya memutuskan menyertainya ke Moro dan bertindak sebagai penerjemah.

Gubernur de Freitas akhirnya menyediakan sebuah juanga berukuran sedang, dengan awak dan persenjataannya, dan dalam bulan September 1546 FX bertolak menuju Moro.¹⁰ Kota pertama yang dituju adalah Mamuya, ibukota kerajaan Moro yang terletak di Morotia. Ia disambut Raja Moro yang telah memeluk Kristen dengan nama baptis Don Joao de Mamuya dan sejumlah rakyat setempat, kemudian dibawa ke kediaman resmi Raja. Orang-orang Mamuya mulai mendatangi FX dengan membawa anak-anak mereka untuk dibaptis, dan orang-orang sakit untuk didoakan kesembuhannya.

Pada tanggal 29 September 1546, ketika tengah berlangsung misa yang dipimpin FX, terjadi gempa bumi yang cukup dahsyat akibat meletusnya gunung api Dukono di Tobelo. Altar gereja roboh dan FX nampak cemas. Orang-orang Mamuya percaya, bahwa penyebab gempa karena ular naga yang berdiam di antara gunung Tarakani dan gunung Ici (Simau), keduanya di Galela, sedang murka dan ingin menelan matahari dan bulan. Tetapi FX meminta jemaat tenang dan kebaktian diteruskan hingga usai.

⁹ Sejarah Katolik di Indonesia, vol.I pp.165 ff.

¹⁰ Sejarah Gereja *Op.Cit.* pp.180 ff.

Kota berikut yang dikunjunginya adalah Tolo dan Cawa yang berjarak 5 kilometer dari Mamuya. Tolo adalah pemukiman Kristen terbesar di Morotia dengan penduduk sekitar 3000 jiwa dan menjadi salah satu pusat misionaris terpenting di Moro. Setelah itu FX melanjutkan kunjungannya ke kampung-kampung Kristen Pune, Lalonga, Tutumaloleo, dan Sugala.

Dari sini FX menyeberang ke pulau Rao di Morotai, kemudian ke Cio, tempat Simon Vaz terbunuh pada 1535. Dari Cio ia meneruskan pelayarannya ke Lofao, Pangeo, dan Misio, kemudian ke Wayabula, Pilowo, Juanga, Momojiu, Mira, dan Sakita. Kota terakhir ini adalah pusat Misi Jesuit di Morotai Utara.

Sementara FX di Moro, telah terjadi beberapa perubahan di Ternate, ketika Bernaldin de Sousa tiba dari Goa dengan membawa mandat khusus Raja Muda. Mandat yang diumumkan de Sousa berupa: pengukuhan kembali Khairun sebagai Sultan Ternate (untuk kedua kalinya) berkenaan dengan telah meninggalnya Don Manuel Tabariji, pencopotan de Freitas sebagai Gubernur Maluku dan dihadapkannya ke pengadilan di Goa, pengangkatan diri de Sousa sebagai Gubernur menggantikan de Freitas, penyitaan semua harta bendanya dan kewajiban untuk mengganti harta kekayaan Sultan Khairun yang telah diambilnya.

Nyai Cili Boki Raja (Nukila) yang menjadi Mangkubumi bagi putranya Tabariji, telah dirampok habis harta kekayaannya dan diharuskan meninggalkan Ternate bersama suaminya untuk pindah ke Goa sesuai janjinya kepada Khairun.

FX tetap menjalin persahabatannya dengan Sultan Kahirun. Setiap ada waktunya yang terluang, biasanya ia berkunjung ke istana, dan Khairun menerimanya dengan segala hormat dan keduanya bertukar pikiran atas berbagai hal. Khairun pernah menyatakan kepadanya, bahwa ia tetap ingin bersahabat dengan orang-orang Kristen, khususnya dengan FX, yang pernah mengajaknya untuk mengonversi agamanya ke Kristen, tetapi Khairun tidak tertarik dengan ajakannya itu.

Pada bulan Januari, setelah mengelilingi seluruh pemukiman Kristen di Moro FX kembali ke Ternate, dan sambil menunggu hubungan ke Ambon ia menjalankan tugasnya seperti biasa. Dalam bulan April 1547, ada juanga Ternate yang bertolak ke Ambon dan FX memperoleh tumpangan. Banyak orang berkumpul di rumahnya baik yang Kristen maupun yang Islam dan mengantarkannya ke pantai. FX membawa sejumlah anak-anak pribumi dari Ternate, Moro, dan Bacan tamatan seminari Ternate, untuk melanjutkan sekolah di Kolese Santo Paulus di Goa.

Pada akhir April 1547, FX tiba di Ambon, kemudian meneruskan perjalanannya ke Malaka dan tiba di sana dalam bulan Juli 1547.

Kesan-kesan FX tentang Moro

Dalam suratnya tanggal 20 Januari 1548 yang dikirimkan kepada pusat Misi Jesuit di Roma, FX menulis laporannya sebagai berikut:¹¹

“Setelah 3 bulan tinggal di Ternate, saya berangkat ke Moro, 60 mil jauhnya dari Maluku. Di Moro banyak terdapat pemukiman Kristen yang sudah lama tidak pernah mendapat kunjungan karena terlalu jauh dari India, dan karena penduduk pribumi telah membunuh seorang Pastor.”¹² Pada tiap

¹¹ *Sejarah Gereja Katolik* Vol.I p.197 ff.

Documenta Vol.I pp. 33-34.

¹² Vikaris Simon Vaz, yang terbunuh di Cio Morotai, pada 1535, (pen).

pulau saya membaptis banyak anak-anak kecil, yang saya pandang pantas untuk dibaptis. Saya tinggal di Moro selama 3 bulan dan selama itu pula saya telah mengunjungi semua pemukiman Kristen di sana. Mereka memberi saya banyak hiburan, begitu pula saya memberikan kepada mereka.

Moro sangat berbahaya karena banyak peperangan yang terjadi di antara mereka satu terhadap yang lain. Penduduknya sangat Barbaris dan masih buta huruf. Mereka gampang sekali meracuni setiap orang yang hendak mereka jahati, sehingga dengan cara ini mereka dapat membunuh banyak orang. Hampir tidak ada jalan darat di pulau Moro. Daerahnya bergunung dan sukar dijelajahi. Bahan makanan agak sukar diperoleh. Anggur putih dan merah tidak mereka kenal. Daging dan binatang ternak tidak ada. Tetapi babi hutan banyak sekali. Mereka makan dari pohon (sagu), dan minum juga dari pohon (enau, tuak), dan memakai pakaian dari pohon (serat pohon mlinjo). Tetapi Moro kaya dengan hiburan rohani, dan mereka menanggung semua kesulitan dan airmata demi Tuhan, yang merupakan harta mereka satu-satunya, serta hiburan rohani yang demikian besarnya dan sangat berlimpah. Seingat saya belum pernah saya alami hiburan yang demikian banyak.

Di tiap-tiap pulau dan sekaligus juga begitu sedikit saya rasakan kesulitan-kesulitan jasmani, selama menjelajahi Moro, yang dikelilingi musuh-musuh dan begitu sedikit didiami sahabat-sahabat sejati, dan tempat di mana tidak tersedia obat-obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani dan sarana-sarana penunjang guna memelihara hidup. Pulau Moro lebih tepat disebut “pulau pengharapan pada Tuhan” daripada kepulauan Moro. Di Moro terdapat suatu bangsa yang disebut Tavaros (Tobaru) yang belum beragama dan mempertaruhkan seluruh keselamatannya dengan sedapat mungkin membunuh. Mereka tidak segan-segan membunuh anak dan istri mereka sendiri, apabila tidak mendapat orang lain untuk dibunuh”.

FX dilahirkan tahun 1506 di istana Javier (Navarra) Spanyol. Dia belajar kedokteran di Universitas Paris dan bersama temannya Ignatius de Loyola mendirikan Society of Jesus (SJ) di Roma setelah tamat belajar.

Dalam bulan April 1541, dia berlayar dari Lisboa ke India dan tiba di Goa dalam bulan Mei 1542. Tiga tahun kemudian, dalam bulan September 1545, dia ke Malaka dalam rencananya untuk pergi ke Makassar. Tetapi dia mengubah pikirannya dan berlayar ke Ambon. Antara bulan Juni-September 1546 dia tinggal di Ternate dan sejak Oktober 1546 hingga Januari 1547 dia keliling Moro untuk mengunjungi perkampungan orang-orang Kristen di Morotia (Tobelo- Galela) dan Morotai. Ia kemudian kembali ke Ternate dan bekerja di sana hingga bulan April, ketika ia bertolak ke Ambon dalam rangka kembali ke Malaka dan Goa. FX kemudian pergi ke Cochin pada 20 Januari 1548, dan pada 1549 ia ke Jepang Selatan, dan dari sana ia kembali lagi ke Goa.

Dalam suatu percobaan untuk melakukan penetrasi pada misteri-misteri Cina, ia pergi ke sana dan meninggal pada 27 Desember 1551 di pulau Sanchian Cina Selatan. Jenazahnya dibawa ke Goa dalam bulan Januari 1552 untuk diawetkan. Pada tanggal 2 Desember 1637, jenazahnya ditempatkan dalam sebuah peti yang terbuat dari perak dan ditempatkan di Basilica of Bom Jesus di Goa yang dapat dilihat oleh umum selama 6 minggu dalam tiap 10 tahun sekali. Ia dinyatakan sebagai orang suci oleh Paus Paulus V pada 25 Oktober 1619.

FX adalah pendiri Misi Jesuit di Maluku.¹³ Gereja Katolik Roma menyatakan FX sebagai tokoh yang paling banyak mengkonversi orang-orang ke dalam agama Kristen setelah Santo Paulus.

¹³ Documenta, Vol.I pp.19 ff.

Metode Misi Jesuit Maluku

Setibanya di Moro, Xaverius membentuk Misi Jesuit dan mengunjungi pusat-pusat pemukiman komunitas Kristen serta mendirikan beberapa gereja. Tetapi, keberhasilan dan kemajuan misi Kristen ini telah menimbulkan kecemasan para sultan Maluku yang saling bersaing untuk mengontrol Moro dan menentang setiap intervensi Portugis atas kerajaan tersebut.¹⁴

Baik Xaverius maupun para pastor yang lain menitikberatkan evangelisasi mereka bukan pada hal-hal yang bersifat doktrinal. Mereka lebih condong menekankan pada hal-hal yang bersifat ritual gerejani, pada beragam bentuk upacara, penyalaan lilin dan musik untuk menimbulkan minat umat Kristen lokal yang sangat bersahaja dan menanamkan rasa hormat mereka kepada gereja, orang-orang suci dan nama Yesus. Dengan cara semacam ini, mereka berharap dapat menimbulkan kepercayaan dan kekuatan pada pribadi umat Kristen secara individual. Di Tolo, misalnya, pernah diberitakan bahwa orang-orang Kristen lokal, setelah minum "air suci," merasa yakin bahwa air itu dapat menangkal segala macam penyakit. Hal serupa juga terjadi di Bacan, ketika berlangsungnya pembaptisan pada 1557. Rakyat yang sakit ketika itu, dipercik "air suci" di wajah mereka, dan mereka merasa "Tuhan memberi mereka kesehatan."

Kepercayaan terhadap ritual-ritual Kristen lainnya juga diterima secara antusias. Seorang lanjut usia menerangkan kepada misi bahwa setelah memperoleh pengampunan dosa, badannya terasa sangat sehat. Sementara lainnya melihat ritual gereja sebagai "jalan memuji dunia lain."¹⁵ Di Bacan, orang Kristen lokal percaya bahwa kekristenannya sangat efektif untuk mengusir *suwanggi*, salah satu makhluk halus paling ditakuti dan dipercayai dapat merobek-robek serta meminum darah manusia. Mereka percaya bahwa orang Portugis tidak mempan diganggu *suwanggi* karena telah lama memeluk Kristen.

Misi Jesuit yang paling berhasil adalah di Moro dan Bacan. Pada bulan Juli 1557, Antonio Vaz berhasil membaptis sekitar enam hingga tujuh *sangaji* di Bacan. Dua setengah bulan berikutnya, ia berhasil membaptis seorang pangeran Bacan dan keluarganya. Berbagai lapisan masyarakat di pulau ini, laki-laki, perempuan dan anak-anak, termasuk orang yang dekat dengan keluarga kerajaan Bacan, juga berhasil dikonversinya ke agama Kristen.

Di Moro, pusat Misi Jesuit ditempatkan di Tolo,¹⁶ sebuah kota dengan penduduk terbanyak di Kerajaan Moro. Sejak 1562, basis Misi Jesuit juga didirikan di Saketa dan pulau Rao di Morotai, yang dipimpin pastor Nicolau Nunes, Fernao de Osario, Marcus Prancudo dan Diego Magelhaes. Ketika Sangaji Sugala dan Cio (Morotai) dibaptis di Ternate pada 1534, pastor Simon Vaz ditugaskan memimpin upacara pembaptisan. Tetapi, Simon Vaz terbunuh pada tahun itu juga di Sao, sebuah desa dekat Wayabula--sekarang masuk pesisir kecamatan Morotai Selatan. Akibat pembunuhan ini, untuk sementara waktu tidak ada pastor yang berani ke Moro.

Kemajuan dan kesuksesan Misi Jesuit di Bacan dan Moro disambut gembira dan penuh harapan oleh Gubernur de Ateyde. Dalam sepucuk suratnya yang ditujukan kepada Raja Muda Portugis di Goa, de Ateyde dengan bangga menyatakan:

¹⁴ John Villiers, "The Jesuit Mission in Moro 1546-1571," dalam Masinambouw, *Op.cit.*, p. 277.

¹⁵ Andaya, *Op.cit.*, p. 127.

¹⁶ Tolo terletak antara Mamuya dan Mede di Tobelo Utara.

“Dengan bantuan orang-orang Kristen Moro, saya berani menjadikan Maluku sebagai Portugis baru. Saya telah melihat dengan mata batin saya bahwa tidak sukar untuk berbuat seperti yang telah saya gambarkan di atas tanpa perlu biaya sepeser pun dari Kerajaan (Portugis -- pen.)”.¹⁷

Tetapi, impian Atayde bertolak belakang dengan laporan Xaverius, seperti telah disebutkan dalam laporannya kepada pusat Jesuit di Roma, yang telah disebutkan di atas.

Impian Atayde itu juga bertolak belakang dengan laporan FX yang menjalankan misi evangelisasi selama 3 bulan di Moro, mulai Oktober 1546 hingga Januari 1547. Menurut Xaverius, negeri Moro sangat berbahaya karena sering terjadi peperangan di antara penduduknya, yang merupakan bangsa Bar-bar yang dan buta huruf. Di Morotia banyak orang Tavaros (Tobaru) yang sering dieksploitasi oleh kesultanan Ternate dan Jailolo dalam peperangan.

Sementara itu pada 1533, Frater Simon Vas dibunuh. Demikian pula pada 1558, Frater Alfonso de Castro yang telah bertugas di Moro selama setahun ikut terbunuh. Dalam pelayaran de Castro dari Moro ke Ternate, awak perahunya yang semuanya muslim mendaratkannya di Iris (pulau Hiri) dan membunuhnya di sana. Dengan terbunuhnya kedua pastor ini, tak ada lagi pejabat Misi Jesuit yang berani datang ke Moro. Baru pada masa pemerintahan Galvao, seorang Frater bernama Fernao Veirage datang ke Moro.

Hasil-hasil kunjungan FX ke Moro

Sejak kedatangan Xaverius ke Moro, agama Kristen Katolik berkembang dengan amat pesat. Hampir semua komunitas Kristen di Moro memperoleh penempatan seorang pastor atau *frater* sebagai pembimbing. Pada 1552, ketika gunung berapi Dukono di Tobelo meletus dan menimbulkan gempa bumi, banyak orang Tobelo melarikan diri ke Tolo dan dibaptis di kota ini. Sebanyak 2000 orang berhasil dibaptis hanya dalam waktu seminggu. Sampai tahun 1553, pastor de Castro melaporkan bahwa jumlah orang Moro yang telah dibaptis mencapai 35.000 orang.¹⁸ Pastor Nicolau Nunes, dalam seminggu pernah membaptis 340 anak-anak Moro.

Walaupun perkembangan kuantitas jemaat berhasil dinaikkan secara drastis oleh para misionaris, tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak terhadap poligami yang dilakukan pengikutnya dari kalangan pribumi Moro. Menurut pastor de Castro, penghapusan poligami mengalami kegagalan total. Orang-orang Moro menolak menikah menurut hukum Kristen, sebab ikatan adat dan tradisi tentangnya jauh lebih kuat. Laki-laki Moro tidak dapat hidup tanpa poligami.

Sehubungan dengan jumlah pengikut Kristen di masa mendatang, de Castro memprediksikan bahwa pada 1562 akan terdapat 36 komunitas Kristen di seluruh Moro. Prediksi ini ternyata tidak meleset bahkan melampaui target, sebab sampai 1562 terdapat sekitar 46 hingga 49 komunitas Kristen di seluruh Moro. Tiap komunitas terdiri dari 700 hingga 800 jiwa yang berasal dari satu atau dua kelompok desa. Hal ini berarti jumlah orang Kristen di Moro sampai 1562 telah melampaui 39.000 jiwa. Oleh sebab itu, sejak 1560 frekuensi kunjungan misionaris ke Moro makin ditingkatkan.

¹⁷ John Villiers, *Op.cit.*, p. 280-281.

¹⁸ *Ibid.* Jumlah yang sama juga diberitakan A.M. Baretta, "Halmahera en Morotai," p. 61.

Pada 1569, hampir seluruh komunitas Kristen di Moro telah memiliki gereja sendiri. Mereka telah mengerti kapan tibanya hari minggu serta hari-hari besar Kristen seperti Natal dan lainnya. Pembagian tugas di kalangan para misionaris pun dilakukan untuk mengkoordinasikan jemaat Kristen Moro. Nicolau Nunes ditempatkan di Sakita, pantai utara Morotai, Antonio Gonsalves di pulau Rao Morotai selatan, dan Magelhaes di Tolo untuk kawasan Tobelo dan Galela.

Titik Balik Perjalanan Misi Jesuit Maluku

Pada 25 Februari 1570, Sultan Khairun -- yang selama ini tidak henti-hentinya memberi kemudahan dan bantuan kepada Misi Jesuit -- mati dibunuh Portugis di dalam benteng Gamlamo, Ternate. Ia digantikan puteranya, Babullah. Peristiwa pembunuhan Khairun dan naiknya Babullah ke tampuk kekuasaan Kesultanan Ternate memiliki dampak negatif bagi aktivitas-aktivitas Misi Jesuit di Moro, Bacan dan daerah-daerah lain, termasuk di Ternate sendiri. Sejak saat itu, serangan-serangan terhadap pusat-pusat misionaris di Moro dan Bacan mulai dilancarkan orang-orang Islam. Sampai akhir 1570, hanya tinggal dua pastor yang bertugas di Moro, yaitu Nunes dan Gomes. Sementara tentara Portugis hanya tersisa 50 orang di sana. Lainnya sudah kembali ke Ternate, lantaran situasi yang mengancam.

Ketika usai dinobatkan, Babullah bersumpah akan menuntut balas atas kematian Khairun dan akan berjuang hingga orang Portugis terakhir meninggalkan Ternate. Sumpah ini direalisasikannya dalam sejumlah kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan Misi Jesuit. Semua kemudahan yang telah diberikan Khairun kepada Misi Jesuit dicabut oleh Babullah. Ia juga mengambil tindakan tegas terhadap pasukan Portugis yang ada di Moro, tidak terkecuali terhadap orang-orang sipil Portugis dan para pastor, bahkan terhadap orang-orang Kristen pribumi.

Pada 1571, sebuah ekspedisi Ternate berkekuatan tiga puluh juanga¹⁹ dikirim untuk menyerang Moro dan membunuh orang-orang Portugis di mana pun ditemukan. Serangan ini membuat Misi Jesuit kocar-kacir dan seluruh aktivitas misi dihentikan. Semua personil Misi Jesuit, berikut ribuan orang Kristen pribumi, meninggalkan Moro menuju Ternate di bawah pimpinan Gonsalo Pereira Maramaque dan Nicolau Nunes.²⁰ Dalam evakuasi ini, beberapa perahu yang ditumpangi pengungsi Moro tenggelam ditelan badai. Sementara yang berhasil mencapai Ternate menjadi beban Gubernur Portugis yang baru, Alvaro de Ataide.

Setelah melalui perundingan dengan Kesultanan Ternate, dicapai jalan keluar: orang-orang Kristen pribumi yang berjanji akan kembali ke agama asli mereka diserahkan kepada Ternate sebagai tawanan. Sementara sisanya yang tidak mau kembali ke agama aslinya dan tetap menjadi Kristen ditampung di benteng Gamlamo -- yang telah terkepung secara ketat oleh pasukan Babullah. Kepada pribumi Moro yang tertawan, Babullah memberikan hak opsi: kembali ke agama asal dan boleh pulang kampung, atau tetap menjadi tawanan. Sebagian besar tawanan memilih opsi pertama, yakni kembali ke agama asal. Babullah menyediakan angkutan untuk memulangkan mereka ke kampung halamannya. Sisanya tetap menjadi tawanan, tetapi akhirnya mereka bergabung dengan rekan-rekan mereka yang memilih opsi pertama dan semuanya dikembalikan ke Moro dan Bacan.

¹⁹ Satu juanga memuat sekitar 200 hingga 300 orang.

²⁰ John Villers, *Op.cit.*, p. 287.

Selama 36 tahun beroperasi di Maluku, Misi Jesuit telah menunjukkan prestasi yang gemilang, khususnya di Moro dan Bacan. Walaupun akhirnya dihentikan Sultan Babullah, tetapi dari segi misi yang diembannya, Misi Jesuit mencatat hasil-hasil capaian yang cukup signifikan. Hanya karena kesalahan kebijakan politik Gubernur Mesquita dalam membunuh Khairun, bencana yang tidak diperhitungkan dan tidak diduga menimpa bukan hanya otoritas dan militer Portugis, tetapi juga harus dipikul Misi Jesuit dan bahkan orang-orang Kristen pribumi.

Sampai 1560, sebanyak 10.000 warga Ternate, Ambon, dan sekitarnya telah beralih ke agama Kristen. Sementara di Moro, Misi Jesuit mengklaim sebanyak 47 komunitas telah mengonversi agama mereka menjadi Kristen. Tiap komunitas terdiri antara 700 hingga 800 orang.

Pada 1562, sekelompok pastor terdiri dari tiga orang – masing-masing Prancude, Gomez, dan Nunes – tiba di Moro diantar sebuah kapal perang Portugis. Tujuan kedatangan mereka adalah *untuk membangun kembali komunitas Kristen yang telah diporakporandakan oleh perang, dan terutama untuk menyenangkan hati orang-orang Kristen, setelah absen selama lima tahun*. Ketika kapal itu tiba dan para pastor mendarat, orang-orang berdatangan ke pantai untuk menyambut dan menghormati mereka. Para penyambut mengungkapkan, bahwa tidak ada orang lain yang datang ke sana selama lima tahun terakhir kecuali rombongan yang sekarang ini mendarat. Ketiadaan kunjungan yang relatif lama itu membuat banyak di antara mereka yang tergoda dan kembali menjadi muslim.

Di awal tahun 1569, Frater Nicolau Nunes melaporkan bahwa hampir semua komunitas Kristen di Moro telah mempunyai gereja sendiri. Di Tolo, yang penduduknya melebihi 3000 jiwa dan menjadi pusat misi untuk Morotia, bahkan memiliki tiga gereja. Dalam laporan Nunes terungkap bahwa orang-orang Kristen Moro telah mengetahui kapan tiba hari minggu, bahkan hari Natal dan hari Paskah.

Nunes sendiri ditugaskan di Sakita, pantai timur Morotai, Antonio Gonzalves di pulau Rao, dan Magelhaes di Tolo. Tetapi, pada tahun ini (1569) Moro diserang berbagai wabah penyakit yang juga menimpa para Pastor. Gonsalves menderita sakit kepala yang berkepanjangan, sementara Magelhaes menderita kejang-kejang di tangan dan luka di kaki yang sukar disembuhkan.

Setelah Ternate direbut Spanyol pada 1606, Moro mendapat kunjungan singkat Frater Mosonio, menyusul Frater Jonge de Fonceca pada tahun yang sama. Setahun setelah itu, beberapa Frater datang ke Moro. Mereka adalah Mosanio, Reita, Simiti, Batista, dan Scalamenti. Tetapi, ketika Spanyol meninggalkan Ternate dan keluar dari Maluku, dan gubernur Spanyol terakhir Jeronimo de Silva menarik pasukannya dari Moro, Misi Jesuit Moro ikut mulai meredup.²¹

Kerajaan Obi

Di pulau Obi juga terdapat sebuah kerajaan, tetapi oleh Kerajaan Bacan mula-mula dijadikan kerajaan *vazal*-nya, kemudian dianeksasi dan menghilang dari percaturan politik Maluku. Tidak diketahui secara pasti kapan Kerajaan Obi berdiri dan siapa yang mendirikaninya.

Pada awal abad ke-14, Obi mengklaim memiliki pemerintahan sendiri, sekalipun tidak memiliki peranan berarti dibandingkan kerajaan-kerajaan besar Maluku lainnya. Tetapi, Bacan

²¹ *Documenta*, Vol.III p.16.

segera meredam klaim tersebut. Kapan Bacan memasukkan Obi ke dalam wilayah kekuasaannya juga tidak diketahui secara pasti. Pada masa Alauddin II bertakhta di Bacan, terjadi skandal yang menghebohkan berkaitan dengan pulau ini, yakni Obi dijualnya kepada Kompeni seharga 800 ringgit.²²

Bacan menjadikan kepulauan besar Obi sebagai sumber bahan makanan dan ikan, sebab kawasan ini memiliki lautan yang kaya ikan dan menghasilkan banyak sagu. Berdasarkan perjanjian Bongaya yang mengakhiri peperangan antara Makassar dan Belanda, Obi dinyatakan sebagai bagian dari Kesultanan Ternate. Sekalipun demikian, dalam kenyataannya Obi tetap merupakan bagian dari Kesultanan Bacan.

²² Coolhaas, "Kroniek van het Rijk Batjan," *Op.cit.*, p. 499.

BAB 8

Rempah-rempah Maluku dan Kedatangan Bangsa Asing

Maluku: Tanah Asal Rempah-rempah

Penulis-penulis Barat mengenal dan menyebut kepulauan Maluku sebagai "kepulauan rempah-rempah" (*spice island*). Penyebutan ini, dalam abad-abad pertengahan, diberikan sebelum orang Barat mengetahui secara pasti lokasi negeri asal rempah-rempah yang mereka konsumsi.

Alfonso d'Albuquerque, Laksamana Portugis yang kemudian menjadi Raja Muda di Goa, setelah berhasil menaklukkan Malaka pada 1511, mengirim Antonio de Abreu dan Francisco Serrao dalam sebuah armada yang terdiri dari tiga kapal dengan perintah: "Cari dan temukan pulau rempah-rempah!" Pernyataan ini merupakan sebuah bukti bahwa Raja Muda tersebut belum mengetahui negeri asal rempah-rempah, yakni Maluku.

Thome Pires, ketika bertemu pedagang-pedagang bangsa Melayu menyatakan, "*Tuhan telah menciptakan Timor untuk kayu cendana dan Banda untuk Pala serta Maluku untuk cengkik, dan barang dagangan ini tidak dikenal di tempat lain di dunia ini kecuali di tempat-tempat tadi; dan telah saya tanyakan dan selidiki dengan teliti apakah barang ini terdapat di tempat lain, dan semua orang katakan tidak.*"¹

Pires adalah pakar obat-obatan Portugis yang tiba di Malaka beberapa saat setelah penaklukkannya oleh Portugis. Ia juga mengunjungi Jawa dan Sumatera untuk penelitian ilmu obat-obatan. Bukunya, *Suma Oriental*, ditulis di Malaka dan diselesaikan di Goa.

Tanah asal tanaman cengkik (*eugenia aromatica*) adalah lima pulau kecil di Maluku: Ternate, Tidore, Moti, Makian dan Bacan. Tetapi, di Halmahera – khususnya Jailolo – juga tumbuh pohon tersebut, yang mungkin disebarkan ke sana oleh burung atau manusia. Sementara tanah asal pala (*myristica fragrans*) adalah Banda. Tanaman ini terdapat pula di Halmahera Timur : Maba, Patani dan Weda.

Karena rempah-rempah memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan harga jualnya mahal, pedagang-pedagang Cina merahasiakan asal-usul dan daerah penghasilnya selama berabad-abad. Sumber-sumber Cina yang belakangan kemudian mengungkapkan bahwa pedagang-pedagang Cina telah mengetahui Maluku sebagai penghasil rempah-rempah dan melakukan pelayaran niaga ke kawasan ini melalui Manila sejak abad ke-13. Junk-junk besar Cina telah melayari daerah Maluku sebelum pedagang nusantara (Jawa dan Melayu) dan pedagang asing lainnya (Arab dan Gujarat) tiba di daerah ini satu abad kemudian.

¹ Pires, Thome. *Suma Oriental: an Account of the East, from the Red Sea to Japan*, dikutip dalam Paramita R. Abdurachman, et.al., *Peninggalan-peninggalan yang Berciri Portugis di Ambon*, p.50.

Pemanfaatan dan Kegunaan Cengkih

Orang-orang Maluku memanfaatkan rempah-rempah sebagai bumbu penyedap masakan dan untuk pengobatan. Ketika Francis Drake mengunjungi Ternate, ia dijamu Sultan Babullah dengan berbagai jenis masakan – dari nasi sampai sagu dan ikan bubar bakar – yang semuanya diramu dengan aroma cengkih. Orang-orang Cina, pada zaman dahulu, menggunakan cengkih untuk pengobatan dan stimulasi selera makan. Bahkan, mereka percaya bahwa cengkih dapat meningkatkan kemampuan seksual manusia.

Pada zaman pemerintahan dinasti Han di Cina, cengkih digunakan para hakim untuk melegakan tenggorokan sebelum mengucapkan putusan atau menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa. Para punggawa juga diharuskan mengunyah cengkih untuk mengharumkan suasana audiensi mereka atau ketika menghadap kaisar menerima titah, supaya mereka bisa berbicara dengan suara yang bagus dan lancar.

Di Eropa, selain untuk pengobatan dan penyedap masakan, cengkih juga digunakan sebagai parfum. Bubuk cengkih dipakai sebagai obat hirup yang biasanya merupakan asesori kalangan menengah ke atas. Tetapi, karena harganya sangat mahal, ia hanya dapat dinikmati oleh golongan berduit.²

Kenyataan Historis tentang Cengkih

Bukti paling kuno tentang penemuan cengkih di luar Maluku diungkapkan suatu temuan arkeologis yang mencatat eksistensinya pada sekitar 1700 SM di tempat peninggalan purbakala di Terqa, Mesopotamia (Syiria). Di antara pohon-pohon yang ditemukan di Kamarsepen terdapat juga tumbuhan cengkih. Setelah masa tersebut, cengkih hanya ditemukan di Maluku.³

Menurut sumber-sumber Cina, India dan Romawi, cengkih telah diperdagangkan di pasaran dunia pada milenium pertama sebelum Masehi. Pada abad ke-3 SM, rempah-rempah telah dikenal di Cina. Demikian pula, dalam *epos Ramayana* India, dikatakan bahwa sekitar 200 tahun sebelum Masehi cengkih telah dikenal dan digunakan sebagai obat. Plinius menyebutkan bahwa sekitar 70 SM, cengkih telah diperdagangkan secara teratur di Eropa oleh pedagang-pedagang Arab dan Eropa, serta sampai abad ke-13 masih merupakan barang mewah yang tidak diketahui dari mana asalnya.⁴

Rujukan kepada rempah-rempah Maluku dalam literatur Timur terdapat dalam kepustakaan Cina periode Han (220-206 SM), berjudul "Rempah Tenggorokan Ayam" (*chicken-tongue spice*), yang secara umum diidentifikasi dengan *ting hiang* ("rempah paku, *nail spice*"), karena bentuk cengkih menyerupai paku. Pada masa ini, cengkih dimanfaatkan untuk pengobatan, parfum dan bumbu masak.⁵

Dalam karya Pliny, *Natural History*, yang dipublikasi pada 77 sesudah Masehi, dikatakan bahwa di India dijumpai sejenis merica pedas, tetapi "lebih menggigit" pedasnya dan disebut

² R.H. Crafton, *A Pegeant of the Spice Island*, John Bace, Sons & Danielson Ltd., 1936, pp. 4 ff.

³ Andaya, *Op.cit.*, pp. 1 f.

⁴ Van Fraassen, *Op.cit.*, vol. II, pp. 29 f.

⁵ Crafton, *Op.cit.*, pp. 136 ff.

Caryophyllon. Pliny mengatakan bahwa *Caryophyllon* bukan cengkih, sebab cengkih hanya terdapat di Maluku. Sementara pada 176 hingga 180, jawatan bea cukai Iskandariyah di Mesir mencatat adanya import cengkih dari "timur," dan dunia Eropa mengenalnya dalam abad ke-2.⁶

Rute Perniagaan Rempah-rempah

Rute Nusantara

Sampai akhir abad ke-13, rempah-rempah Maluku – dalam kebanyakan kasus – hanya diperdagangkan ke Ambon dan Banda oleh para pedagang lokal. Para pedagang Jawa dan Melayu kemudian membawanya dari Ambon atau tepatnya Hitu, dan Banda, ke pelabuhan Gresik, Tuban, Pasai dan Malaka. Tetapi, para pedagang Hitu dan Banda ketika itu juga membawa rempah-rempah Maluku ke pelabuhan-pelabuhan Jawa Timur dan Malaka. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511 tidak mempengaruhi dan menyurutkan keramaian perniagaan rempah-rempah di daerah ini.

Pada awal abad ke-14, pelabuhan Ternate, Tidore, Makian dan Bacan mulai dikunjungi para pedagang nusantara – Jawa dan Melayu – serta pedagang-pedagang Cina, Gujarat dan Arab. Pada 1320, misalnya, telah menetap di Ternate pedagang-pedagang Jawa, Melayu, Cina dan Arab. Hal yang sama juga terjadi di Tidore dan Makian.

Rute Internasional

Perdagangan rempah-rempah adalah salah satu bisnis yang cukup tua dan paling menguntungkan. Sekitar 350 SM, pedagang-pedagang Cina telah melakukan perniagaan rempah-rempah sampai ke India, Sri Lanka dan pantai timur Afrika. Rempah-rempah yang diperdagangkan meliputi merica yang berasal dari India, kayu manis dari Cina dan Birma. Malaka adalah bandar internasional utama perdagangan rempah-rempah sampai awal abad ke-16. Dari Malaka, rempah-rempah dibawa ke India dan Cina.

Dalam abad pertengahan, sejak zaman keemasan Mogul di bawah Kubilai Khan, perdagangan rempah-rempah mulai dilakukan melalui jalan darat. Karavan-karavan onta membawa muatan melalui jalur sutera (*silk road*) yang menghubungkan Cina dan Timur Tengah. Dari sana, muatan di bawa dengan kapal ke pelabuhan-pelabuhan di Venesia. Kemudian rempah-rempah diangkut dari sini melalui darat ke Damaskus dan Aleppo di Mediterranean. Ketika orang-orang Turki menguasai daerah ini pada pertengahan abad ke-15, rute perniagaan dialihkan ke Laut Merah, tetapi tetap dipegang para pedagang Muslim Gujarat dan Cambay di barat laut India, serta pedagang Muslim Mamluk dari Mesir.⁷ Orang Yunani kemudian mematahkan dominasi pedagang Muslim.

Transportasi rempah-rempah melalui jalur darat ternyata beresiko tinggi. Selain harus berhadapan dengan para perampok, para pedagang yang menempuh jalur ini harus mengeluarkan biaya tinggi untuk membayar pungutan di sepanjang jalur tersebut. Orang-orang Partian yang mendiami kawasan sepanjang jalur niaga rempah-rempah memungut pajak atas setiap orang yang

⁶ *Ibid.*

⁷ Andaya, *Op.cit.*, p. 2 f.

melewati daerahnya. Akibatnya, sesampainya rempah-rempah di Eropa, harga jualnya melambung tinggi dan sangat mahal.

Pada awal abad ke-15, Portugis di bawah Henry the Navigator memulai upaya mencari negeri asal rempah-rempah melalui jalur laut. Pada 1488, Bartholomeus Diaz mengelilingi Afrika dalam upaya pencarian tersebut. Satu dekade kemudian, Vasco da Gama melakukan pencarian yang sama dan berhasil mencapai India. Tetapi, sebegitu jauh, ia belum berhasil memperoleh rempah-rempah Maluku. Portugis kemudian menempatkan Raja Mudanya di sini. Sementara orang Italia yang mencoba berlayar ke India melalui Laut, juga menemui kegagalan.

Di India, Raja Muda Portugis, Laksamana Alfonso d'Albuquerque menyusun rencana untuk mengontrol semua jalur perdagangan internasional. Ia kemudian berhasil menguasai Goa di pantai Barat India pada 1510, dan setahun kemudian merebut Malaka (1511), menyusul Hormuz pada 1515. Hanya Aden, pelabuhan di Laut Merah, yang tidak berhasil ditaklukkannya.

Setelah Malaka dikuasai, d'Albuquerque mengirim de Abreu dan Francisco Serrao dengan armada yang terdiri dari tiga kapal ke Maluku pada Desember 1511. Dalam bulan Januari 1512, mereka tiba di Banda. Setelah beberapa waktu di Ambon, karena mengalami ketidakberuntungan dengan karamnya kapal yang ditumpangi, Serrao dijemput utusan Sultan Ternate dan dibawa ke Ternate pada awal 1512.

Tahun 1512 merupakan awal sejarah perdagangan rempah-rempah yang panjang dan penuh konflik antara sesama kerajaan Maluku ataupun antara kerajaan-kerajaan di Maluku dengan orang-orang Eropa serta antara sesama orang Eropa. Konflik-konflik ini terutama dilatari kehendak untuk memperebutkan rempah-rempah dan perniagaannya atau untuk mendapatkan hak monopoli atasnya. Konflik-konflik yang berkepanjangan dan rumit, yang terjadi pada masa-masa selanjutnya, tidak hanya merambat ke dalam kehidupan sosio-kultural dan keagamaan, tetapi juga menggembosei dan meluduskan kedaulatan serta kemerdekaan kerajaan-kerajaan Maluku.

Sementara itu, setelah Colombus berlayar ke Amerika, beberapa penjelajah Spanyol mencoba melakukan pelayaran ke India lewat rute barat. Pada 1513, Balboa mengarungi selat Panama dan melihat samudera Pasifik. Tetapi, upayanya ke India tidak berhasil. Percobaan serupa dilakukan Magellan pada 1519. Ia yakin dapat mengelilingi Amerika Selatan, dan akhirnya berhasil mendarat di Filipina pada 1521. Walaupun Magellan terbunuh di negeri ini dalam suatu pertempuran dengan penduduk lokal, anak buahnya berhasil mencapai Tidore pada tahun itu juga (1521) dan kembali ke Spanyol dengan muatan rempah-rempah.

Keuntungan Luar Biasa dalam Bisnis Rempah-rempah

Pada abad pertengahan, rempah-rempah masih merupakan barang mewah di Eropa yang bernilai sangat mahal. Karena harga jualnya yang sangat tinggi di pasaran Eropa, tidaklah mengherankan jika para pedagang berusaha mati-matian membawanya ke sana, sekalipun dengan resiko tinggi yang mesti dihadapi di sepanjang jalur perniagaan.

Seperti yang diketahui, kerajaan-kerajaan Maluku mengandalkan sumber penghasilannya dari sektor produksi dan perdagangan rempah-rempah. Ternate berhasil meraih hegemoni politik hingga penghujung abad ke-16 dan beberapa dekade pada abad sesudahnya, karena menguasai sebagian besar – bahkan, menjadi sentra perdagangan – rempah-rempah di Maluku. Hal serupa juga ditemukan dalam sejarah Tidore.

Yang menjadi pertanyaan kunci adalah mengapa negara-negara Eropa seperti Portugis, Spanyol dan Belanda – kemudian juga Inggris – seolah-olah berjudi dengan nasib dan mempertaruhkan segalanya dalam upaya memperoleh monopoli kemudian mempertahankannya dengan segala daya dan upaya, baik politik, ekonomi, maupun kekuatan militer?

Jawabannya terletak pada keuntungannya yang menjanjikan. Keuntungan dalam perniagaan rempah-rempah begitu fantastis, bahkan hampir tidak masuk akal. Seorang pedagang Arab pernah mengatakan bahwa jika ia membawa enam perahu bermuatan rempah-rempah dan kehilangan lima perahu lainnya di tengah jalan, maka keuntungan yang diraihinya dari satu perahu yang tinggal itu masih lumayan.

Ketika anak buah Magellan tiba di Tidore pada 1521 dan memuat kapalinya dengan cengkih, beberapa orang Portugis yang kebetulan berpapasan dengan mereka bertanya tentang harga beli cengkih dari Sultan Tidore, Almansur. Setelah memperoleh jawaban, orang-orang Portugis itu menyatakan bahwa harga yang dibayar untuk barang tersebut terlalu mahal, bahkan ada indikasi bahwa orang-orang Spanyol itu telah ditipu. Dengan senyum, orang-orang Spanyol mengatakan bahwa cengkih yang mereka beli itu sama saja dengan mereka dapatkan secara cuma-cuma.⁸

Sebagai bandingan, harga rempah-rempah pada abad ke-16 di pasaran lokal dan internasional dapat di kemukakan sebagai berikut: Cengkih 1 *bahar* (456 lb) di pasaran lokal seharga 1 sampai 2 ducat. Di Malaka 1 *bahar* bisa berharga 10 sampai 14 ducat. Sementara di Calcutta sekitar 500 hingga 600 fanam (1 fanam = 1 real), dan untuk cengkih kualitas utama seharga 700 fanam. Pada 1600, 10 pon cengkih di Maluku – seharga setengah penny per-pon – bila dijual di Eropa, akan menghasilkan keuntungan sebesar 32.000 persen.⁹

Keuntungan yang fantastis itulah yang mendorong para pejabat Eropa – baik Portugis, Spanyol atau Belanda – turut berdagang secara pribadi. Kasus Francisco Serrao barangkali dapat dikemukakan sebagai salah satu ilustrasi tentangnya. Ketika Serrao wafat di Ternate, ia meninggalkan dua anak laki-laki dan perempuan dari isterinya yang berasal dari Jawa, serta sejumlah 100 *bahar* cengkih.

Kedatangan Bangsa-bangsa Timur ke Maluku

Sejarah Maluku sebelum kedatangan bangsa Eropa tidak banyak diketahui. Deineem, dalam tulisannya tentang cengkih, mengemukakan bahwa orang Cina telah berabad-abad lamanya merahasiakan negeri asal cengkih.¹⁰ Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pedagang-pedagang Cina telah lama menjalankan kegiatan niaga di Maluku, sehingga dapat dikemukakan dugaan bahwa merekalah bangsa asing pertama yang datang di Maluku. Orang-orang Cina inilah yang membawa rempah-rempah Maluku ke Calicut di India, Sri Lanka dan ke Cina sendiri, dan kemudian diekspor ke Timur Tengah dan negara-negara di sekitar Laut Tengah.

Selain orang Cina, pada awal abad ke-14 – atau mungkin lebih awal lagi – orang Arab dan Gujarat datang ke Ternate dan Tidore. Pada 1300, sudah banyak orang Jawa, Melayu, Arab dan

⁸ Datu Jamal Ashley Abbas, "Mindanao and the Spice Island," *The Philippine Post*, 11 Maret 2000.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Paramita R. Abdurachman, *Peninggalan-peninggalan yang berciri Portugis di Ambon*, p.50.

Cina yang bermukim di Ternate. Demikian pula, hikayat-hikayat tentang kelahiran kerajaan-kerajaan Maluku menghubungkan orang Arab dengan asal-usul beberapa kerajaan di Maluku.

Pada pertengahan abad ke-15, semakin banyak pedagang Arab dan Cina – juga Jawa dan Melayu – yang datang ke Maluku berdagang rempah-rempah. Bersamaan dengan itu, agama Islam mulai didakwahkan kepada penduduk lokal. Ada sejumlah pedagang Arab – demikian pula Jawa dan Melayu – yang disamping berdagang, menjadi mubaligh untuk menyiarkan agama Islam, hingga akhirnya mencapai lingkaran dalam keluarga kerajaan-kerajaan Maluku.

Para pedagang Cina, Arab, dan Gujarat – demikian pula pedagang nusantara lainnya – datang ke Maluku hanya untuk berdagang tanpa ambisi lainnya. Hal ini berbeda dengan pendatang-pendatang Eropa yang, di samping berdagang, berupaya memperoleh monopoli tata niaga rempah-rempah dan membawa misi evangelisasi serta imperialisme sehingga menimbulkan kontroversi dan pertentangan dengan penguasa-penguasa lokal.

Kedatangan Bangsa-bangsa Eropa

Pada 1506, Lodewijk de Bartomo tiba di Ternate dari Banda. Ia merupakan orang Eropa pertama yang datang ke Maluku, sebagaimana direkam sejarah. De Bartomo adalah seorang Portugis, dan sesampainya ke tanah asal, ia melaporkan bahwa rakyat di Banda masih liar, sementara Islam telah memasyarakat di Ternate hingga ke lingkungan keluarga istana.¹¹ Tidak jelas posisi de Bartomo ketika berkunjung ke daerah-daerah Maluku tersebut. Di samping itu, tidak terdapat bukti adanya kontak resmi yang dilakukan de Bartomo dengan pejabat atau penguasa lokal.

Beberapa tahun setelah kedatangan de Bartomo, Portugis secara resmi tiba di Maluku dalam upayanya mencari daerah asal rempah-rempah. Kedatangan Portugis kemudian disusul Spanyol dalam selang waktu yang relatif singkat, menyusul Belanda dan Inggris dalam selang waktu yang berbeda.

Kedatangan Bangsa Portugis

Enam tahun setelah penemuan Amerika oleh Christopher Columbus pada 1492, Vasco da Gama mencapai Asia selatan dan Asia timur lewat Tanjung Pengharapan pada 1498. Ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan Portugis, lewat kedua "penemu" tersebut, tidak lain diarahkan untuk menemukan daerah asal rempah-rempah yang pada waktu itu merupakan komoditas sangat mahal di Eropa.

Di kalangan bangsa-bangsa Eropa ketika itu, Spanyol dan Portugis merupakan pesaing keras dalam upaya "menemukan" daerah-daerah baru. Karena itu, Paus Alexander VI mengambil inisiatif mempertemukan kedua kerajaan yang bersaing itu, sehingga persaingan yang sengit itu tidak berlarut-larut dan mengancam eksistensi masing-masing. Pertemuan yang diprakarsai Paus pada 1493 ini menghasilkan sebuah perjanjian yang terkenal sebagai Traktat Tordesillas. Traktat yang berkarakter imperialisme ini pada dasarnya "membagi dunia" ke dalam dua bagian, yaitu

¹¹ De Clerq, *Op.cit.*, p. 150.

Amerika dan sekitarnya yang dinyatakan sebagai kawasan di bawah Spanyol, dan Asia dinyatakan untuk Portugis.¹²

Berdasarkan perjanjian di atas, Portugis menuju ke Asia. Laksamana Alfonso d'Albuquerque kemudian menaklukkan Goa (India) pada 1509 dan Malaka pada 1511, menyusul kota Hormuz pada 1515. Ia kemudian diangkat sebagai Raja Muda Portugis di Goa untuk mengendalikan pemerintahan dan perdagangan Portugis di seluruh Asia selatan.

Pada 1512, d'Albuquerque mengirim sebuah ekspedisi yang terdiri dari dua kapal dan sebuah karavel di bawah pimpinan Antonio de Abreu untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Ekspedisi ini tiba di Banda pada awal 1512, dan setelah memuat armadanya dengan rempah-rempah, de Abreu membeli sebuah junk Cina besar, dan menugaskan Francisco Serrao memimpinya. Awak kapal junk ini terdiri dari sejumlah orang Portugis dan pribumi yang direkrut dari orang-orang Banda beragama Islam.

Dalam pelayaran kembali ke Portugis, junk yang dipimpin Serrao dihantam badai dan mengalami kerusakan berat. Ia kemudian mendarat di pulau Penyu, sekitar 90 mil di sebelah barat pulau Banda. Pulau ini tidak berpenghuni dan, menurut awak kapal lokal, sering didatangi para perompak atau bajak laut musiman yang dikenal sebagai orang-orang *Selat* dan *Bajou*. Para bajak laut ini merompak siapa saja yang ditemuinya.

Beberapa waktu kemudian, datanglah segerombolan perompak ke pulau itu. Serrao dan anak buahnya menyergap gerombolan tersebut dan merampas perahu mereka. Terjadi negosiasi antara kedua pihak, dan para perompak menyepakati akan mendaratkan Serrao beserta anak buahnya di Ambon. Mereka kemudian diturunkan di Nusatelo, sebelah barat pulau Ambon.

Berita kedatangan orang-orang Portugis ini sampai ke telinga Sultan Ternate, Boleif (Bayanullah), dan Sultan Tidore, Almansur, melalui agen-agensya di Ambon. Kedua sultan yang tengah bersaing ketat itu mengirim utusannya ke Ambon untuk menjemput Serrao. Sultan Bayan mengirim sembilan *juanga* di bawah pimpinan adiknya, Kuliba, sementara Sultan Almansur mengirim tujuh *juanga* dengan maksud yang sama. Tetapi, Tidore kalah cepat. Ketika armadanya tiba di Ambon, Serrao dan sembilan orang Portugis telah berlayar menuju Ternate dan tiba di pelabuhan Talangame,¹³ Ternate, pada awal 1512.

Kedatangan Serrao di Ternate adalah kedatangan seorang pejabat pertama Eropa – dalam hal ini Portugis – dari sebuah program eksplorasi penguasa Portugis yang ambisius dan telah dimulai sejak pertengahan abad ke-15. Ekspansi Portugis di seberang lautan merupakan penjelmaan visi rakyatnya dan sikap yang diangkat menuju daerah-daerah baru.¹⁴ Serrao adalah fungsionaris Portugis pertama yang berhasil merundingkan hak-hak monopoli negerinya atas perniagaan rempah-rempah dan hak eksklusif pendirian benteng Portugis di Gamlamo dengan Sultan Bayanullah.

Setelah Serrao, Alvaro de Cocho menyusul ke Ternate dengan sebuah junk yang dinakhodai Louis Botin. Kapal inilah yang untuk pertama kalinya membawa dokumen dan muatan rempah-rempah dari Maluku ke Portugis. Serrao menulis surat kepada Raja Portugis, Don

¹² Dr. Joko Suryo, *et.al.*, *Bulan Sabit di bawah Rerimbunan Cengkih*, Laporan Penelitian, Yogyakarta: Univ. Gajah Mada, 1992-1993, p. 113.

¹³ Talangame adalah bandar dan pelabuhan Ternate yang memanjang dari Kota baru hingga depan Kantor Gubernur Maluku Utara sekarang ini.

¹⁴ Cf. Andaya, *Op.cit.*, pp. 35 f.

Manuel, dan mengirim pulang beberapa dari sembilan anak buahnya. Sementara ia sendiri tetap tinggal di Ternate.

Dalam laporannya kepada Raja Portugis, Serrao memuji Sultan Bayanullah sebagai "seorang raja yang sangat bijaksana, sangat ramah dan bersahabat." Pujian semacam ini cukup beralasan, sebab sejak kedatangannya di Ternate, Serrao telah diangkat sebagai penasihat Kesultanan Ternate. Sebagaimana Antonio Galvao pada masa Sultan Khairun, Serrao juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam pemerintahan Kesultanan Ternate.

Raja Muda Goa, Lopo Soares, mengirimkan Don Tristiao de Menese ke Ternate pada 1519. Kapal yang ditumpangi de Menese tiba di Bacan pada 1520, kemudian menuju Ternate. Pada tahun ini juga (1520), Raja Portugal, Don Manuel, mengirim Jorge de Brito untuk membangun benteng Portugis di Gamlamo, Ternate, dan menunjuk adik Jorge de Brito – yakni Antonio de Brito – sebagai komandan benteng tersebut. Benteng yang dibangun itu diberi nama *Nostra Senhora de Rosario* ("Wanita Cantik berkalung Bunga Mawar"), tetapi lebih dikenal sebagai *benteng Gamlamo* oleh penduduk lokal. Setelah menyelesaikan pembangunannya, pada 1521 Jorge de Brito kembali ke Goa dan tewas dalam salah satu pertempuran di Aceh.

Hingga 1569, Gamlamo merupakan satu-satunya benteng yang berdiri di luar Malaka. Setelah itu, benteng-benteng lain dibangun di Ambon, Jailolo, Moro (Tolo dan Samafo), Banda dan Makassar.¹⁵ Tetapi, benteng-benteng yang dibangun belakangan itu lebih mirip rumah kembar ketimbang benteng yang sesungguhnya. Pada benteng tersebut tidak terdapat seorang kapten yang diangkat Raja Portugis, seperti pada benteng Gamlamo di Ternate.

Di dalam benteng ini terdapat sebuah lonceng buatan Perio Diaz Bocarro tahun 1603 yang didatangkan langsung dari Portugal. Di kedua sisi lonceng itu, tertulis untaian puisi dalam bahasa Latin:

<i>O 'Maria Flos Viriginum</i>	Wahai 'Maria, kembang segala perawan
<i>Funde Pieces ad Filium</i>	Harum bagaikan mawar, murni laksana bakung
<i>Velut Rosa vel Lilium</i>	Sampaikan doa untuk puteramu
<i>Pro Saluta Fidelium</i>	Untuk kesucian orang-orang beriman

Ketika Portugis meninggalkan Ternate, lonceng bersejarah itu dipindahkan VOC Belanda dan digantung di pintu masuk benteng Oranje. Hingga 1950 lonceng ini masih terpasang di sana, dan sejak 1951 dipindahkan dan disimpan pada gereja Katolik (Gereja Batu) di Ternate.

Otoritas Portugis paling berkuasa di Maluku disebut "Captain of Moluccas" (Gubernur Maluku), yang diangkat Raja Portugis untuk jangka waktu tiga tahun. Apabila Raja Portugis tidak memberikan nominasinya, maka Raja Muda (*vice roy*) di Goa dapat menetapkan seseorang untuk jabatan gubernur. Orang kedua dalam otoritas Portugis di Maluku adalah komandan benteng Gamlamo. Di benteng ini penempatan orang dikombinasikan dari kantor Raja Muda dan agen perdagangan Raja Portugis yang disebut *feitod*. Dalam keadaan tertentu, Raja atau Raja Muda dapat mengangkat *Capitao mor do mar*, yaitu laksamana armada untuk operasi di perairan Maluku, yang derajat kewenangannya berada di bawah gubernur.

Benteng Ternate seluruhnya bergantung pada Goa, dan di bawahnya adalah Malaka. Pembayaran gaji, logistik, dan kebutuhan lainnya dikirim melalui kapal. Jadi hampir seluruh kebutuhan benteng datang dari Goa melalui Malaka. Persenjataan dan perlengkapan benteng

¹⁵ *Documenta*, Vol.I. pp.7-8.

Gamlamo termasuk canggih untuk zamannya, sehingga sukar menaklukkannya melalui pertempuran. Itulah sebabnya, untuk menaklukkannya Babullah perlu melakukan blokade. Kelaparan dan penyakitlah yang akhirnya memaksa Portugis menyerah tanpa syarat kepada Babullah.

Sasaran utama Portugis di Maluku adalah *mengamankan monopoli perdagangan rempah-rempah*, sebagaimana politik Portugis yang ditegakkannya di seluruh Asia.¹⁶ Ini juga yang menjadi tujuan utama Portugis untuk menjaga dan mempertahankan bentengnya di Ternate. Untuk tujuan itu pula penguasa Portugis membina “perdamaian” dengan para sultan Maluku dan mencegah agar kerajaan Ternate *tidak boleh terlalu kuat*.

Kebijakan yang dijalankan para gubernur Portugis di Ternate, tidak selalu sama dengan pandangan-pandangan Raja Portugis, terutama tentang *kerakusan dan korupsi*. Banyak gubernur Portugis di Ternate, setelah usai masa tugasnya dan kembali ke Portugal, mendadak menjadi kaya raya, padahal masa tugas mereka rata-rata hanya tiga tahun. Dalam perdagangan cengkih, mereka tak segan menjual apa saja yang menjadi hak raja dan kepentingan-kepentingan gereja. Mereka melakukan kejahatan seperti itu karena tahu tidak akan dihukum.

Penduduk awam Portugis (*casados*) pada umumnya bermukim di pemukiman yang disediakan untuk mereka, yang berlokasi di bagian luar benteng. Karena kurang mendapat perhatian gubernur, mereka sering menunggu setiap kesempatan dan bila perlu bergabung dengan kawula kesultanan untuk melawan gubernur atau para misionaris.

Salah satu tugas utama Raja Muda Goa dan Gubernur Hindia adalah mengirim *nau de careira* atau kapal (galleon) cengkih kerajaan ke Maluku dalam bulan April setiap tahun. Mula-mula kapal ini dikirim ke Ternate. Setelah 1578, kapal tersebut juga ke Tidore dan dalam bulan September ke Banda untuk mengangkut cengkih dan pala. Berikut adalah jadwal pelayaran kapal Portugis seperti terekam dalam salah satu sumber sejarah:¹⁷

Jadwal pelayaran Kapal Cengkih

No.	Nama Kota/Pelabuhan	Jadwal bertolak dan tiba
1	Goa	April 15 (b)
2	Cochin	April 23 (t)
3	Cochin	akhir April (b)
4	Malaka	akhir Mei (t)
5	Malaka	Agustus 15 (b)
6	Ternate	akhir Oktober (t)
7	Ternate	Februari 15 (b)
8	Ambon	Mei 15 (b)
9	Malaka	November 15 (b)
10	Cochin	Januari (t)
11	Goa	Februari-Maret (t)

(catatan: b = bertolak; t = tiba; semua dalam perkiraan)

¹⁶ Lihat: *Documenta* Vol.I pp.10-11, dan Dr.H.J.de Graaf: *Geschiedenis van Indonesie, 1949, p.127.*

¹⁷ *Documenta, Vol.I, pp.8-9.*

Kapal kerajaan yang melakukan pelayaran memperoleh pengawalan kapal-kapal lain yang berlayar bersamanya dan membawa para pebisnis swasta. Waktu yang ditentukan dalam jadwal pelayaran tidak dalam kondisi eksklusif. Waktu pelayaran alternatif dapat juga berlaku bila cuaca cukup bersahabat, dan kapten kapalnya punya nyali untuk berlayar. Tetapi, kapal kerajaan harus berlayar sesuai skedul pelayaran yang telah ditetapkan dan berlayar setahun sekali untuk mengangkut personil, uang, surat-surat, bahan logistik serta membawa mereka yang menjadi agen perdagangan kerajaan.¹⁸

Belakangan, timbul beberapa kesulitan bertalian dengan pembayaran harga rempah-rempah yang tidak beres, akibat duitnya sudah dikorupsi para gubernur dan kapten. Karena itu, ada beberapa gubernur yang memungut pajak rempah cukup tinggi dari rakyat dan sultan, sehingga rakyat menolak menjual rempah-rempah mereka kepada Gubernur Portugis. Ataide, yang menjabat Gubernur Portugis di Ternate pada 1533-1536, termasuk orang yang berbuat seperti itu.

Hal ini menyebabkan stagnasi pelayaran kapal rempah-rempah Raja Portugis ke Maluku dan Banda. Pada 1589, 1594, 1596, dan 1602, tidak ada sama sekali pelayaran kapal rempah-rempah milik Raja yang datang ke Banda, dan pada 1579-1581, hal yang sama juga terjadi di Maluku. Padahal, sejak Portugis terusir dari Ternate, Sultan Babullah masih tetap mengizinkan Portugis tetap berdagang di Ternate. Selama Portugis berkuasa di Maluku, sebanyak 20 gubernur dikirim ke Ternate. Gubernur pertama adalah Antonio de Brito (1520-1524) dan gubernur terakhir adalah Nuno Pareira de Laserda (1574-1575).

Pada 24 Juni 1522, Antonio de Brito – adik Jorge de Brito – tiba dari Goa dalam jabatannya sebagai Gubernur Portugis pertama di Ternate.¹⁹ Karena pernah menjabat sebagai komandan pertama benteng Gamlamo, de Brito telah kenal dekat dengan Sultan Bayanullah. Tetapi, setibanya di Ternate, ia dikabari bahwa Bayanullah telah wafat beberapa bulan sebelumnya, disusul Serrao beberapa hari setelah kedatangannya.

Pada 1524 – menurut de Clerq pada 1525 – Garcia Henriques diangkat sebagai Gubernur Portugis ke-2 di Ternate. Ia menerima penyerahan benteng Gamlamo dari de Brito pada bulan September 1525, setelah melalui serangkaian konflik antar keduanya. Henriques kemudian menggempur Tidore dengan bantuan Ternate, beberapa hari setelah wafatnya Sultan Almansur. Penyerangan ini mencatat hasil yang baik.

Pada bulan Mei 1527, Jorge de Menezes diangkat sebagai Gubernur Portugis ke-3, dan tiba di Ternate melalui Goa dan Kalimantan, tidak seperti sebelumnya – melalui Jawa dan Banda. De Menezes melanjutkan perang terhadap Tidore, tetapi kali ini Tidore telah bersekutu dengan Spanyol. Armada Portugis yang dikirim menyerang Tidore berhasil dihancurkan, bahkan banyak prajurit yang dibawa dari India (Goa), berikut pasukan Ternate dan Bacan yang ikut membantu, ikut pula dihancurkan. Akhirnya, suatu perjanjian untuk mengakhiri perang dan permusuhan ditandatangani Tidore dan Portugis. Peristiwa ini membuat Kaicil Darus (Darwis) dari Ternate ditangkap dan dipenjarakan karena dituduh tidak setia. Ia akhirnya dihukum mati dengan dipenggal kepalanya.²⁰

¹⁸ *Documenta*, Vol.I. pp.8-10.

¹⁹ Menurut Galvao, de Brito tiba di Ternate pada 13 Mei 1522 dari Banda, setelah terlebih dahulu singgah di Bacan untuk memerangi rakyat di sana sebagai balas dendam atas kematian orang-orang Portugis yang dibunuh orang-orang Bacan. Lihat Antonio Galvao, *Historia*, p. 211.

²⁰ Galvao, *ibid.*, pp. 218 f.

Pada 22 Desember 1530, Gonsalo Pereira tiba di Ternate melalui Kalimantan sebagai gubernur Portugis yang baru. Beberapa hari setelah berkuasa, ia menangkap de Menezes karena korupsi dan mengirimnya ke Goa sebagai tahanan. Pereira berupaya menjalin hubungan baik dengan Sultan Ternate dan selalu mendesaknya agar mencari cengkih sebanyak-banyaknya dengan harga semurah-murahnya. Bahkan, ia tega membebaskan rakyat membayar harga cengkih yang dibelinya. Di samping itu, Pereira juga menyerang Jailolo dengan alasan merasa terhina oleh pernyataan-pernyataan rajanya.

Tindakan Pereira menimbulkan kebencian di kalangan rakyat. Sementara orang-orang Portugis sendiri juga membencinya. Pada suatu hari, ketika Pereira tengah tidur siang, orang-orang Ternate – yang biasa keluar masuk benteng – berkumpul di dalam masjid dekat benteng. Beberapa orang yang ada di dalam benteng memberi sinyal berupa teriakan nyaring seorang gadis kepada orang-orang yang ada di dalam masjid. Mereka lalu menyerbu ke dalam benteng dan membunuh orang-orang Portugis yang ditemuinya, kemudian menuju kamar Pereira dan menggedor pintu kamarnya. Ketika Pereira membuka pintu kamarnya, ia ditikam dengan sebilah keris yang menyebabkannya tewas. Peristiwa ini terjadi pada 27 Mei 1531,²¹ dan mengakibatkan Sultan Boheyat ditangkap serta dipenjarakan lantaran diduga mendalangnya.

Vincente de Fonceca kemudian dipromosikan sebagai pengganti Pereira pada 1532. Ia segera membebaskan Boheyat dan mengangkatnya kembali sebagai Sultan Ternate. Tetapi, Boheyat diusir rakyatnya, dan kakaknya, Tabariji, menangkap serta mengasingkannya ke Malaka, di mana ia akhirnya meninggal.

Pada 1533, Tristiao de Ataide tiba di Ternate dan ketika melihat adanya peluang, ia mengambil alih benteng Gamlamo dengan kekerasan dari de Fonceca. Ia menangkap de Fonceca dan mengirimnya ke Goa untuk dipenjarakan di sana. De Ataide adalah seorang gubernur yang kejam. Kekejamannya dipamerkan dengan maksud agar ditakuti dan dikagumi orang. Dengan bantuan Ternate dan Tidore, ia menyerang Bacan serta menghancurkannya, menyusul Jailolo. Ketika berselisih dengan Sultan Tabariji dari Ternate dalam urusan perniagaan cengkih, De Ataide menangkap dan memenjarakan Tabariji, termasuk ibu dan keluarganya, serta sejumlah *bobato* Ternate. Dalam keadaan terbelenggu, Sultan Ternate, keluarga serta *bobato*-nya dikirim ke Goa.²²

Akibat kekejaman de Ataide, para sultan Maluku mengirim utusan ke daerah-daerah untuk mempersiapkan rakyatnya berperang. Di Ternate, penduduk setempat dengan bantuan orang Jailolo melakukan pemberontakan dan menyerang orang-orang Portugis. Mantan Sultan Ternate yang dimakzulkan Portugis, Deyalo, dikembalikan ke takhtanya. Para pemberontak ini kemudian membumihanguskan kota Ternate, dan menuju Tidore, Bacan serta Jailolo untuk mempertahankan kota-kota itu dari serangan balasan Portugis. Di Bacan, sebuah sungai dibendung dan dialihkan alirannya untuk mencegah orang memasuki kota. Para pemberontak ini juga membangun benteng dengan pagar-pagar yang tinggi dan menyerang orang-orang Portugis yang ada di Bacan serta merampas harta bendanya, termasuk para budak dan senjata. Bahkan, sebuah kapal Portugis dirampas dan kapten kapalnya, Balthazar, beserta seluruh awaknya dibunuh. Para pemberontak Ternate-Jailolo itu bertekad bila menang, seluruh pohon cengkih yang ada di Bacan akan ditebang habis.

²¹ *Ibid.*, pp. 221 f.

²² *Ibid.*

Tristiao de Ataide mengirim kurir ke Malaka dan Goa meminta bantuan. Don Estevas, penguasa Goa, memenuhi permintaan ini dan mengirimkan bantuan. Setelah bantuan tiba, de Ataide menyerang Tidore, tetapi gagal karena armada perangnya dicegat di tengah laut dan bahkan terpukul mundur ke Ternate. Serangan lalu dialihkan ke Jailolo. Di sini pasukan Portugis berhasil mendarat, namun terpukul mundur dan terbirit-birit melarikan diri ke Ternate. Karena pasukan Portugis banyak yang tewas dalam pertumpuran-pertempuran itu, de Ataide mengirimkan kembali kurirnya meminta bantuan ke Goa. Tetapi, sebagai jawaban atas permintaan tersebut, de Ataide dipecat dan harus menyerahkan jabatan gubernurnya kepada Antonio Galvao. Masa pemerintahan de Ataide merupakan masa yang penuh pertumpahan darah, terutama di Ternate dan Bacan. Perang dan kelaparan melanda kedua negeri ini demikian hebatnya, sehingga orang-orang yang telah meninggal dunia dianggap paling beruntung.²³

Antonio Galvao tiba di Maluku pada 29 Oktober 1536 dengan dua kapal penuh bahan pangan, persenjataan dan pasukan militer yang terpilih dari banyak pelamar. Setibanya di Ternate, ia memperlakukan de Ataide dengan baik. Ataide, menurut penuturan Galvao, menangis di hadapannya menyesali tindakan-tindakan kejahannya.

Galvao mendapati kota Ternate yang telah terpengang dan porak-poranda. Segala fasilitas kota hancur. Banyak orang Portugis, budak dan tawanan mati. Harga bahan kebutuhan pokok melambung sangat tinggi. Pisang, misalnya, dijual seharga 8 hingga 10 real, sebutir telur seharga 20-25 real, dan 300 gantang beras seharga 500 real. Karena itu, tindakan awal Galvao adalah "menurunkan" harga kebutuhan pokok, yang berhasil dicapainya dalam waktu relatif singkat.

Ketika sedang sibuk menata ulang segala yang telah dirusak de Ataide, Galvao memperoleh informasi bahwa para sultan Maluku tengah bermusyawarah di Tidore untuk mempersiapkan peperangan melawannya. Dengan segera Galvao menangani kasus ini dan menyerbu ke Tidore, yang berujung dengan penandatanganan perjanjian pemberian hak monopoli perniagaan rempah-rempah oleh Tidore kepada Portugis pada penghujung 1536.

Galvao adalah salah satu dari segelintir gubernur Portugis terbaik di antara yang jelek. Tindakannya menyerang Tidore serta rencananya menyerbu Bacan dan Jailolo pantas dicela. Namun, selama empat tahun berkuasa, ia telah menjalankan kebijakan yang etis. Ia mendirikan sekolah dan rumah sakit, serta memperbaiki perekonomian rakyat Ternate. Dia juga melakukan tera atas timbangan dan, dengan demikian, menyelamatkan rakyat dari penipuan dan kecurangan timbangan dalam perdagangan rempah-rempah. Ketika Sultan Khairun memindahkan masjid Gamlamo ke tempat yang agak jauh dari benteng Portugis, ia turut merancang dan ikut pula bekerja dalam pemindahan masjid tersebut. Dalam pemerintahan Kesultanan Ternate, ia berperan besar karena dipercaya Khairun. Karena itu, ketika digantikan oleh Jorge de Castro pada 1540, rakyat Ternate mengirimkan petisi kepada Raja Portugis agar Galvao ditetapkan sebagai gubernur seumur hidup. Galvao adalah satu-satunya Gubernur Portugis yang pernah mendaki gunung Gamalama.

Sampai berakhirnya kekuasaan Portugis di Maluku pada 1578, dengan gubernur terakhir Nino Pereira de Lacerda, Portugis – selama 53 tahun berkuasa – telah menempatkan 20 gubernur di Maluku.²⁴ Di antara ke-20 gubernur tersebut, gubernur "paling berdarah" dan terburuk

²³ *Ibid.*, pp. 225-227.

²⁴ Daftar nama keduapuluh Gubernur Portugis itu, lihat lampiran.

reputasinya adalah Diego Lopes de Mesquita – Gubernur Portugis ke-18 – yang memerintahkan pembunuhan atas Sultan Ternate, Khairun Jamil, lewat suatu proses tipu daya dan muslihat.

Babullah menuntut agar de Mesquita diajukan ke pengadilan dan dihukum atas kejahatan pembunuhan. Ketika tuntutan ini ditolak, Babullah mengepung benteng Gamlamo selama 4 tahun (1574-1578) dan mengultimatum agar Portugis segera angkat kaki dari Ternate. Dalam kondisi yang mengharu biru, mulailah evakuasi besar-besaran orang Portugis dari Ternate, mula-mula ke Tidore sebagai tempat transit, dan kemudian ke Goa. Ketika bala bantuan Portugis dari Goa dan Malaka tiba, keadaan sudah terlambat. Pimpinan armada Portugis hanya dapat menyaksikan puing-puing kekuasaan Portugis di Ternate. Gubernur berikut perangkatnya, misionaris dan orang-orang Portugis lainnya telah meninggalkan Ternate dengan meratapi kekalahan dan masa lampau mereka yang penuh kekerasan, arogansi dan pertumpahan darah. Mereka pergi dengan membawa serta kenangan buruk yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya bahwa mereka harus menghadapi akhir kekuasaannya secara menyedihkan.

Kedatangan Bangsa Spanyol

Ferdinan Magellan, seorang ksatria Portugis, pada awal 1519 pergi ke Castilia menghadap Raja Spanyol, Charles, dan mengajukan sebuah rencana pelayaran ke "kepulauan rempah-rempah." Setelah mendapat persetujuan, Raja Spanyol menyiapkan armada yang terdiri dari 5 kapal dan dipimpin oleh Magellan sendiri untuk mewujudkan rencana tersebut. Pada 10 Agustus 1519, armadanya meninggalkan Sevilla menuju Maluku melalui belahan benua Amerika Latin.

Pada 20 September 1519, armada tersebut berlayar dari Sanlucaz de Barrameda menuju kepulauan Canary, dan pada 29 September tahun yang sama tiba di Saint Michaelmas. Setelah beristirahat beberapa hari, armada itu melanjutkan perjalanan ke Brazil dan tiba di Rio de Janeiro untuk memuat perbekalan. Pada 2 Februari 1520, Magellan dan armadanya tiba di Rio de Plata, dan dari sini mereka menyusuri setiap tanjung, teluk dan muara sungai untuk melihat kemungkinan jalan ke sisi lain.

Sepanjang pelayaran Magellan banyak terjadi pemberontakan awak kapal karena perbedaan pendapat dan pertentangan di antara mereka. Tiga kapal yang dikomandani orang Spanyol – masing-masing Luis de Mendoza, Juan de Cartagena dan Gaspar de Quesada – memberontak.

Setelah bersusah payah mencari jalan ke Maluku, pada 21 Oktober 1520, Magellan dan armadanya mencapai sebuah tanjung, dan sekitar delapan mil di luarnya mereka menemukan sebuah selat – kemudian dinamai Selat Magellan – yang panjangnya sekitar 200 mil, terbentang dari timur ke barat. Setibanya di sebelah selat itu, armada Magellan tinggal 3: satu kapal hilang dan satu lagi kabur. Perjalanan kemudian dilanjutkan.

Pada Maret 1521, Magellan dan armadanya tiba di pulau-pulau yang padat penduduknya. Setelah berlayar beberapa saat, mereka tiba di Mindanao, dan mendarat di sebuah pulau bernama Mactan. Tetapi, dalam suatu kontak bersenjata dengan penduduk lokal pada 27 April 1521, Magellan beserta sekitar 60 anak buahnya terbunuh. Anggota ekspedisi yang tersisa kemudian memilih dua kapten pengganti, salah satunya adalah seorang Spanyol dan satunya lagi, Duarte Barbosa, seorang Portugis. Dalam salah satu jamuan makan oleh penduduk lokal, kedua kapten itu beserta 25 awaknya dibunuh.

Anggota ekspedisi Magellan yang tersisa kemudian memilih Carvalhindo sebagai komandan baru, dibantu oleh Gonsalo Gomes de Espinosa. Setelah dihitung, anak buah yang tersisa tinggal 108 orang, semuanya dalam keadaan terluka atau sakit. Karena tidak berani melayarkan ketiga kapal yang tersisa, salah satunya dibakar.

Dengan dua kapal yang tersisa, dan setelah melalui berbagai kesulitan, mereka akhirnya mendekati kepulauan Maluku. Dari kejauhan, nampak pulau-pulau Ternate, Tidore, Moti dan Makian. Seluruh awak kapal bersorak sorai setelah memasuki perairan Maluku, dan sebagai tanda kegirangan mereka menembakkan meriam-meriam yang ada dalam kapalnya sebanyak beberapa kali. Beberapa jam kemudian, tepat jam 15.00 sore tanggal 8 Nopember 1521, mereka mendarat di Tidore. Sultan Tidore, Almansur, menyambut kedatangan mereka dengan hangat dan penuh keramahan. Kedua pihak lalu mengadakan perundingan dan berhasil mencapai kesepakatan untuk transaksi cengkih dengan harga mengikuti pasaran lokal yang relatif tinggi.

Orang-orang Spanyol akhirnya mengapalkan cengkih yang telah dibeli, setelah tercapai suatu kesepakatan dengan Sultan Tidore Almansur, tentang pemberian hak monopoli dan perdagangan cengkih. Ketika akan bertolak, kapal utama mengalami kebocoran. Komando dipindahkan ke kapal lain, Victoria, yang bergerak pada 11 Desember 1521 menuju Buru untuk memuat perbekalan, kemudian ke Timor dan terus ke Tanjung Pengharapan dan Sevilla. Antonio Pigafetta, seorang pengelana Italia, turut serta dalam pelayaran ini. Ia kemudian menulis buku yang memuat banyak informasi tentang Maluku.

Dengan berhasilnya ekspedisi pertama yang penuh pengorbanan itu mencapai kepulauan rempah-rempah, Spanyol kemudian menyusulkan ekspedisi kedua di bawah pimpinan Garcia Jafre de Loasia pada 1525, dan ekspedisi ketiga pada 1527 di bawah pimpinan Alfaro de Saanendra. Setelah itu, Spanyol mengirim lagi dua ekspedisi, masing-masing dipimpin Ruy Lopez de Vellabobos (1542-1546) dan Miguel Lopez de Legazpi (1564). Semua ekspedisi ini berangkat dari Spanyol baru, yaitu Mexico. Ekspedisi Spanyol di bawah komandan Legazpi berhasil menduduki Filipina dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan Spanyol di Asia Selatan.

Setelah Spanyol dan Portugis menyatu dalam sebuah uni pada 1580, operasi-operasi di Maluku langsung berada di bawah Gubernur Jenderal Spanyol di Filipina. Sementara Filipina sendiri berada di bawah Raja Muda Spanyol yang berkedudukan di Mexico. Dengan penempatan Maluku di bawah Filipina, dan Filipina di bawah Mexico, maka Maluku sebenarnya tidak lebih dari "sebuah koloni dari koloni dari koloni."²⁵

Kesulitan awal yang dihadapi Spanyol di Maluku bukanlah dalam menghadapi raja-raja lokal, tetapi menghadapi Portugis dalam kaitannya dengan kewenangan menangani atau yurisdiksi atas kepulauan Maluku. Kedua kekuasaan asing ini memandang dirinya berdaulat dan kompeten untuk urusan itu. Untuk itulah, kedua pihak berupaya memperoleh legitimasi dan dukungan dari kerajaan-kerajaan lokal. Spanyol memperolehnya dari Tidore, dan Portugis dari Ternate. Akhirnya, berdasarkan *Traktat Saragosa* pada 1529, Spanyol di bawah Raja Charles II melepaskan klaim atau haknya atas Maluku dengan kompensasi 500.000 cruzados dari Portugis.

Sebagaimana halnya Portugis, Spanyol juga terlibat dalam sejumlah aksi militer terhadap kerajaan-kerajaan lokal. Sebagaimana telah disinggung, pada 1606 Gubernur Spanyol, Don Pedro da Cunha, menyerbuan benteng Gamlamo dan mendudukinya. Akibat penyerbuan ini, wilayah

²⁵ Andaya, *Op.cit.*, p. 39.

Ternate terpecah dua dan, beberapa waktu kemudian, terdapat tiga kekuasaan atas pulau ini: Ternate utara dikuasai Kerajaan Ternate, Ternate Tengah – sejak 1607 – dikuasai VOC, Ternate Selatan dan barat dikuasai Spanyol.

Ibukota kesultanan, Gamlamo, praktis menjadi ibukota pendudukan Spanyol. Batas demarkasi antara wilayah Ternate-VOC dan wilayah Spanyol mula-mula di Kalumata, sekitar satu kilometer di sebelah selatan benteng Kalumata yang kemudian ditempati VOC. Tetapi, benteng ini kemudian diduduki Spanyol hingga 1663, saat Spanyol terpaksa meninggalkan Maluku. Kawasan antara benteng Kalumata dan benteng Oranje – sekitar 6 kilometer – praktis menjadi daerah tak bertuan setelah pendudukan benteng Kalumata.

Sebagai reaksi atas penangkapan dan pengasingan Sultan Saidi oleh Spanyol pada 1606, jogugu Kesultanan Ternate memutuskan mengutus Kaicil Ali ke Banten untuk meminta bantuan Belanda. Tetapi, kedatangan Laksamana de Jonge dan pasukannya, dalam rangka memenuhi permintaan tersebut, tidak menyurutkan nyali Spanyol dan berbagai rencananya atas Maluku. Beberapa tahun setelah penyerbu benteng Gamlamo, Spanyol – dengan bantuan Tidore – menyerbu dan menduduki Jailolo, Sahu dan Gamkonora pada 1611. Pendudukan ini baru berakhir pada 1620. Semua tindakan itu mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jenderal Spanyol di Manila.

Ketika Laksamana de Jonge tiba di Ternate pada 1607, kesultanan ini memberikan seluruh kemudahan dan memenuhi berbagai tuntutan Belanda – mulai dari pembangunan benteng, pemukiman dan pemerintahan terbatas dalam wilayah eksklusif, serta monopoli rempah-rempah – dengan harapan Kompeni bisa menetralisasi Spanyol. Selain membangun benteng Oranje, Kompeni juga mendirikan sebuah benteng kecil lainnya di Kota Baru yang diberi nama *Coille la Baca*.

Sebagai reaksi atas pembangunan benteng oleh VOC itu, Spanyol membangun sebuah benteng kecil di Leman Kouara – kini disebut Ngade – yang diberi nama *San Pedro y Palelo* atau *Don Gil*,²⁶ namun di kalangan penduduk Ternate lebih dikenal sebagai Kota Janji. Pada 1633 Spanyol juga membangun pemukiman Ave Taduma di pantai selatan Ternate dengan Gamlamo sebagai pusat kekuasaannya.

Berbagai kemudahan yang diberikan Ternate telah dimanfaatkan Belanda untuk memperkuat posisinya di Maluku, yang membuatnya mampu bersaing secara terbuka dengan Spanyol. Sementara itu, tindakan-tindakan kontroversial Spanyol mulai memperoleh reaksi dan perlawanan rakyat, sehingga dukungan yang bersahabat dari rakyat tidak lagi diperolehnya. Rakyat memandangnya tidak berbeda dengan Portugis.

Pada 1623, Gubernur Spanyol, de Heridia, menyerahkan sepucuk "surat referensi" dari mantan Sultan Ternate, Saidi yang hidup dalam pengasingan di Manila, kepada Sultan Mudaffar dan Ibu Suri di Ternate. Surat tersebut berisi informasi tentang perlakuan baik dan penghormatan yang diterima Saidi dari Pemerintah Spanyol di Manila. Menurut Saidi, Spanyol tetap memandangnya sebagai penguasa Ternate. De Heridia juga membawakan untuk Sultan Mudaffar sebuah lukisan cat minyak yang dibuat Saidi di Manila. Lukisan ini kemudian digantung di ruangan istana untuk menghormati pembuatnya.²⁷

²⁶ Van Fraassen, *Op.cit.*, vol. I, pp. 136-137.

²⁷ Andaya, *Op.cit.*, p. 155.

Sejak menerima surat dan lukisan Saidi, Ternate berkeinginan menerima perwakilan Spanyol untuk sebuah perundingan damai. Ternate bertekad berdamai dengan Spanyol baik di darat maupun di laut, dan tidak akan membantu Belanda lagi dalam perangnya melawan Spanyol. Di pihak lain, Gubernur de Heridia juga berjanji akan membawa Saidi dari Manila ke Ternate pada misi berikutnya.

Tetapi, ketika ada armada Spanyol yang tiba dari Manila pada 1624, Saidi tidak diikutsertakan, seperti yang dijanjikan de Heridia. Ternate memandang hal ini sebagai sebuah tindak ingkar janji dan menyebabkan memudarnya kepercayaan Ternate kepada Spanyol. Kepercayaan dan rasa hormat Ternate semakin merosot ketika diketahui bahwa dalam peristiwa penangkapan dan pengasingan Sultan Babullah pada 1583, Spanyol terlibat persekongkolan dengan Portugis.

Sejak VOC melancarkan kegiatan niaganya secara intens, Spanyol ternyata tidak mampu bersaing dengannya dan hanya mampu bertahan karena kemurahan hati para gubernur Belanda yang ada di Ternate. Oleh sebab itu, pada 1662 otoritas Spanyol di Manila memutuskan menutup garnisunnya di Maluku dan menarik kembali pasukan-pasukannya dari wilayah tersebut,²⁸ untuk menghadapi penyerbuan besar-besaran bajak laut Cina yang akan mengambil alih Manila. Pada 1663, pasukan-pasukan Spanyol di Tidore dan Ternate diberangkatkan menuju Manila, yang menandai penarikan diri Spanyol dari Maluku. Don Francisco de Atienza Ybaraz, Panglima Angkatan Laut Spanyol di Manila, memimpin langsung evakuasi ini.

Pada 2 Juni 1663, orang-orang Spanyol terakhir di Maluku diberangkatkan dari Gamlamo ke Manila dipimpin Gubernur Spanyol terakhir, Don Francisco de Attienso. Rombongan terakhir ini menumpang 4 buah kapal – masing-masing *Calamata*, *Santa Lucia*, *Don Giela* dan *Galei* – dan dua belas junk. Dengan keberangkatan rombongan tersebut, berakhirilah riwayat pendudukan Spanyol selama 142 tahun (1521-1663) di Maluku.

Persaingan Belanda VOC - Spanyol

Kehadiran VOC Belanda tidak mengendurkan nyali Spanyol. Pada 20 Juni 1608, Spanyol membentuk pasukan gabungan dengan Tidore untuk menduduki Jailolo, Sahu dan Gamkonora. Penyerbuan pasukan gabungan tersebut ke tiga wilayah itu mencatat hasil gemilang. Tetapi atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, Spanyol akhirnya mengundurkan diri dari ketiga daerah itu.

Pada 1611, Gubernur Jenderal Spanyol di Manila, Don Juan de Silva, bermaksud membebaskan mantan Sultan Ternate, Saidi, dan mengembalikannya ke Ternate serta merehabilitasi kedudukannya sebagai penguasa Kesultanan Ternate. Dengan tindakan ini, ia berharap persekutuan Ternate-Belanda bisa retak, dan Ternate di bawah Saidi akan memihak Spanyol.

Tetapi, da Silva kemudian tidak melihat adanya pengaruh positif dari rencananya itu, setelah pasukan gabungan Belanda-Ternate menyerbu pusat-pusat kedudukan Spanyol di Ternate. Bahkan, ibukota Kesultanan Tidore dan kota Mareku juga diserbu pasukan gabungan tersebut. Karena itu, rencana pembebasan Saidi diurungkan dan da Silva memerintahkan penyerbuan serta pendudukan Jailolo dan Sahu (1611), untuk membalas aksi Belanda-Ternate. Pendudukan ini berlangsung sampai 1620.²⁹

²⁸ *Ibid.*, pp. 155 f.

²⁹ Andaya, *Op.cit.*, pp. 154-156.

Sebagai reaksi atas penyerbuan Spanyol, pada 1614 pasukan gabungan Belanda-Ternate menyerbu benteng Spanyol di Tidore. Pada tahun yang sama, Spanyol membalas menyerbu wilayah-wilayah Kesultanan Ternate di seberang lautan, seperti kepulauan Sula dan lainnya, serta memperkuat kekuatannya di Ternate selatan.

Persaingan antara Spanyol dan Belanda ini telah menyeret sekutu-sekutunya yang telah lama bersaing – yakni Tidore dan Ternate – untuk berseteru secara terus-menerus. Kedua kerajaan besar di Maluku itu terlibat dalam sejumlah konflik militer untuk membantu sekutunya masing-masing.

Pada 1662, posisi Spanyol makin lemah dalam persaingannya dengan Belanda. Gubernur Jenderal Spanyol di Manila memerintahkan mengakhiri kehadiran mereka di Maluku, dan menarik seluruh pasukannya secara bertahap. Pada 1663, proses penarikan ini selesai dan tamatlah riwayat Spanyol di Maluku.

Kepergian Spanyol membuat Tidore kehilangan sekutu strategisnya dalam menghadapi Ternate. Karena itu, dalam suratnya, yang ditulis menyusul berakhirnya kehadiran Spanyol di Maluku, Sultan Saifuddin dari Tidore menyampaikan pesan kepada Sultan Mandar Syah dari Ternate agar kedua kesultanan itu menjalin persekutuan dan perdamaian di Maluku serta mengakhiri konflik di antara mereka.

Kedudukan VOC yang Makin Kokoh

Dengan keluarnya Spanyol dari Maluku, seluruh tata niaga rempah-rempah di daerah ini dan di daerah-daerah yang berada di bawah kontrol kerajaan-kerajaan Maluku praktis beralih ke bawah kendali penuh Kompeni, yang kemudian disahkan dengan berbagai perjanjian yang dibuatnya dengan kerajaan-kerajaan Maluku. Pada 1667, Tidore dan Belanda menandatangani perjanjian tentang *hak monopoli Kompeni* atas tata niaga rempah-rempah.

Perjanjian yang sama juga dibuat Kompeni pada tahun ini dengan Bacan. Laksamana Speelman, yang mewakili Belanda dalam perundingan tersebut, berhadapan dengan Sultan Ternate, Tidore dan Bacan. Speelman, selain selalu menekankan pemberian hak monopoli rempah-rempah kepada Kompeni, juga mendesakkan hak Kompeni untuk memberikan persetujuan pada setiap pergantian sultan di kesultanan-kesultanan tersebut. Dengan demikian, hak prerogatif lembaga-lembaga kesultanan di Maluku dalam pengangkatan sultan telah dilucuti dengan adanya kewajiban memperoleh persetujuan Kompeni terlebih dahulu dalam penetapan seorang sultan. Bahkan, dalam praktek pengangkatan sultan-sultan Maluku setelah itu, suara Kompeni merupakan kata putus, bukan suara lembaga-lembaga adat.

Dalam perundingan terpisah dengan Sultan Saifuddin dari Tidore di benteng Oranje pada 27-28 Maret 1667, Laksamana Speelman – atas nama Kompeni – mengakui hak-hak kesultanan Tidore atas Papua dan kepulauan Raja Ampat, sebagai imbalan atas hak monopoli dalam perniagaan rempah-rempah yang diberikan Sultan Tidore. Pengakuan kedaulatan Tidore ini merupakan prestasi terbesar Saifuddin yang akan dikenang untuk selamanya.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat Laksamana Speelman dengan kesultanan-kesultanan Maluku di atas telah membuat status kesultanan-kesultanan tersebut tidak lebih dari kerajaan *vazal* Belanda. Dengan perjanjian-perjanjian tersebut, posisi para sultan menjadi lebih kuat atas para *bobato*-nya dan lebih lemah terhadap Kompeni. Implikasinya, para sultan menjadi sangat tergantung kepada Kompeni.

Perjanjian-perjanjian itu juga menetapkan bahwa para sultan dilarang berhubungan dengan kekuasaan asing lainnya tanpa seizin Kompeni. Akibatnya, para sultan Maluku dan kesultannya terisolasi dari kemungkinan melakukan kontak dengan negara asing, karena setiap perikatan dengan suatu negara asing mesti mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kompeni. Sepanjang sejarah Maluku sejak 1667, tidak ada lagi hubungan seperti itu yang dilakukan kerajaan-kerajaan Maluku, kecuali yang dilakukan Nuku di akhir abad ke-18.

Di samping itu, Kompeni juga tidak berkehendak mendamaikan kesultanan-kesultanan yang berselisih dan bahkan menjadikannya sebagai sebuah kebijakan. Gubernur Pielat dalam memori serah terima jabatannya pada 1731, menyarankan kepada penggantinya agar kebijakan semacam itu diteruskan.³⁰

Sementara itu, pada 7 Januari 1676, sebuah perjanjian antara Kompeni dan Ternate ditandatangani di Batavia. Perjanjian ini menetapkan bahwa wilayah Ternate di seberang laut, yakni Maluku Tengah, digabungkan kepada propinsi Ambon dan akan diangkat penguasa-penguasa khusus di wilayah tersebut. Dengan demikian, Ternate harus melepaskan kekuasaannya atas pulau Buru, Ambalau, Buano dan Kelang.³¹ Alasan yang digunakan Kompeni untuk memaksakan penyerahan wilayah itu adalah *salahakan* Ternate yang ditempatkan di sana tidak mampu mengatasi penyelundupan rempah-rempah oleh para pedagang Bugis dan Makassar. Dengan alasan yang sama, pada 1768, Sultan Jamaluddin dari Tidore harus melepaskan haknya atas Seram timur dan sekitarnya.³² Pelanggaran terhadap hak monopoli, bagi Kompeni, merupakan hal paling sensitif dan tidak dapat dimaafkan.

Pada 7 Juli 1768, Kompeni menandatangani sebuah perjanjian dengan Sultan Ternate, Tidore dan Bacan, yang menetapkan bahwa semua hukuman mati yang telah diputuskan pengadilan kesultanan harus memperoleh persetujuan Gubernur Belanda sebelum dieksekusi. Dengan perjanjian ini, Kimalaha Tomagola dan Kimalaha Tomajiko yang diputus bersalah oleh pengadilan Kesultanan Ternate dan dijatuhi hukuman mati, selamat dari eksekusi karena gubernur Kompeni menolak memberikan fiat eksekusi.

Semakin besarnya kekuasaan Kompeni di nusantara membuat pimpinan pusat VOC di Belanda (*De Heren Zeventien*) pada 1669 memerintahkan pembentukan Dewan Politik yang bertugas memberikan pertimbangan kepada gubernur dalam menjalankan tugasnya.

Tetapi, tidak semua sultan Maluku memiliki loyalitas tanpa batas. Pada 1680, Sultan Sibori Amsterdam dari Ternate melakukan pemberontakan terhadap Kompeni. Walaupun pemberontakan ini berakhir dengan ditangkanya Sultan Ternate itu di Sahu dan diasingkan ke Batavia. Tindak pembangkangan Sibori Amsterdam – yang kemudian dibebaskan – telah menampakkan keberanian untuk mempertahankan harga diri dan kesultannya.

Tidore dan Bacan juga pernah bertindak serupa. Selain menutup mata dan bersekongkol dengan para penyelundup Mindanao serta membiarkan orang-orang Halmahera Timur melakukan penyelundupan ke Seram selama puluhan tahun, kedua kesultanan ini juga memperlambat realisasi program penebangan pohon pala dan cengkik. Pada 1779, karena tekanan Kompeni yang serius, Sultan Patra Alam dan para petinggi Kesultanan Tidore terpaksa mengumumkan pengaku-

³⁰ Van Fraassen, *Op.cit.*, vol. I, p. 55.

³¹ De Clerq, *Op.cit.*, p. 120

³² Stapel, *Op.cit.*, p. 299.

an kedaulatan Kompeni atas kesultannya.³³ Akibatnya, Kaicil Nuku memisahkan diri dan mulai melakukan pemberontakan.

Kebijakan Kompeni di Maluku, setelah memperoleh seluruh hak monopoli perdagangan rempah-rempah dengan pengunduran diri Spanyol, adalah mengamankan tata niaga rempah-rempah dari seluruh bentuk gangguan. Sekalipun Kompeni mengupayakan semua langkah untuk mengamankan kebijakan itu tetapi dalam prakteknya pelanggaran yang bersifat terobosan tetap saja terjadi. Para pedagang Bugis-Makassar serta para penyelundup dari kepulauan Raja Ampat dan Halmahera Timur tetap bertransaksi di Seram Pasir, surga para penyelundup dan pasar gelap rempah-rempah.

Tuntutan Inggris Atas Maluku

Sejak Prancis menduduki negeri Belanda, keluarga kerajaan Belanda mengungsi ke Inggris dan menempati istana *Warwijk*. Raja William dari negeri Belanda mengeluarkan beberapa edaran yang ditujukan kepada penguasa koloni-koloni Belanda termasuk di Indonesia agar mencegah jatuhnya daerah-daerah koloni Belanda ke tangan Prancis. Kalau terpaksa penguasa koloni Belanda dapat menyerahkan sesuatu wilayah koloninya kepada Inggris. Surat-surat Raja William inilah yang dikenal dengan nama *Plakat Warwijk*.

Pada 1797, orang-orang Inggris di bawah Pakenham tiba di Ternate dan menuntut protektorat Inggris Raya diakui. Gubernur Maluku, Budach, menolak tuntutan tersebut. Ketika tuntutan serupa diajukan lagi setahun kemudian, Budach juga menolaknya, demikian pula dengan tuntutan ketiga Inggris. Setelah Budach digantikan Cransen pada 1800, tuntutan Inggris itu dipenuhi. Dengan demikian, sejak 1800 hingga 1803, Maluku berada di bawah pemerintahan Inggris dan menjadi sebuah keresidenan. Residennya, H. Weber, berkedudukan di Ternate.

Pada 1803, Inggris menyerahkan kembali Maluku kepada Belanda, tetapi pada 1810 Belanda mengembalikannya kepada Inggris di bawah pimpinan Kapten Tucker. Kekuasaan Inggris yang kedua ini berlangsung dari 1810 sampai 1817, dan setelah itu diserahkan lagi kepada Belanda untuk seterusnya hingga pendudukan Jepang. Peralihan kekuasaan dari Belanda ke Inggris dan sebaliknya, dari Inggris ke Belanda, yang terjadi dua kali dalam waktu cukup singkat, tidak menimbulkan kesulitan berarti bagi Maluku, baik secara politis maupun sosio-ekonomik.

Maluku Utara Pasca Pembubaran VOC

Pada 1799, VOC dibubarkan. Karena merupakan badan usaha niaga, pembubaran VOC atau Kompeni praktis hanya berpengaruh bagi Maluku di bidang ekonomi. Dampaknya tidak begitu besar di bidang pemerintahan. Tetapi, pembubaran tersebut memiliki pengaruh cukup signifikan di bidang ketatanegaraan berkenaan dengan program Pemerintah Belanda untuk melakukan reorganisasi. Dengan bubarinya VOC seharusnya monopoli juga ikut dihapuskan, sebagaimana halnya dengan penghapusan ekstirpasi. Tetapi, Pemerintah Belanda masih tetap mempertahankan monopoli sampai beberapa dekade kemudian, hingga akhirnya dihapus pada 1864.³⁴

³³ *Ibid.*, p. 452.

³⁴ Van Fraassen, *Op.cit.*, p. 57.

Sementara itu, diketahui bahwa sejak 1770 orang-orang Perancis telah menyelundupkan sejumlah bibit atau anakan cengkih dari Ambon dan Ternate ke pulau Mauritius serta ditanam di sana. Dari Mauritius, orang-orang Inggris kemudian membawa bibitnya pada 1800 ke Zanzibar. Antara 1801 hingga 1803, Inggris juga membawa sejumlah anakan cengkih Maluku ke Penang. Sampai dewasa ini, kedua bekas koloni Inggris itu masih menghasilkan cengkih, yang di Indonesia dikenal sebagai cengkih Zanzibar.³⁵

Pada pertengahan abad ke-19, perdagangan bebas mulai berkembang. Pedagang-pedagang besar Eropa (Belanda) mulai beroperasi. Perdagangan lokal rempah-rempah mulai ditujukan untuk ekspor. Kerajaan-kerajaan Maluku yang selama ini memegang perdagangan lokal rempah-rempah, tidak lagi memiliki hak tersebut karena dialihkan Belanda kepada pedagang-pedagang swasta. Kerajaan dilarang berdagang. Pelabuhan Ternate dibuka dan menjadi pelabuhan niaga utama di Maluku. Orang-orang Cina mulai membuka toko serta bergerak dalam usaha hasil bumi dan hasil laut, mulai di kota-kota besar hingga ke kampung-kampung.

Pada 1855, rakyat Gamhoku (Tobelo) melakukan pemberontakan dipimpin Laba, seorang mantan pimpinan penyelundup. Akibatnya, Pemerintah Belanda membumihanguskan ibukota Tobelo itu dan memindahkan penduduknya ke Gamsungi, sekaligus menjadikannya sebagai ibukota distrik Tobelo yang baru.

Masalah Perompakan

Abad ke-19 diwarnai juga dengan tindakan perompakan orang-orang Tobelo, Galela dan Loloda, juga orang Weda, Patani dan Maba, yang cukup memusingkan Belanda. Perompakan ini meliputi daerah yang luas, mulai dari Maluku Tengah – oleh orang-orang Weda, Patani dan Maba sampai ke pantai timur Sulawesi, Jawa Timur dan Nusa Tenggara – oleh orang-orang Tobelo dan Galela. Para perompak ini bahkan bekerja sama dengan para perompak Mindanao dan Balangingi dari Filipina Selatan. Selain merampok harta benda, operasi kawanan perompak ini ditujukan untuk menangkap penduduk dan menjadikannya sebagai budak belian.

Hampir lima puluh tahun lamanya Belanda mengejar dan membasmi para perompak. Melalui kerja sama dengan Sultan Ternate, untuk perompakan di perairan Maluku dan perairan Manado. Untuk keperluan tersebut, Kesultanan Ternate mengeluarkan pas jalan bagi perahu-perahu Tobelo dan Galela.³⁶ Demikian pula, sejak abad ke-19 Ternate berpartisipasi mengirim pasukan Alifuru secara berkala untuk merondai daerah-daerah rawan perompakan di sekitar perairan Manado. Walaupun memakan waktu lama, usaha membasmi para perompak cukup berhasil.

Sementara itu, pada 1876, Dano Baba Hasan berupaya menghidupkan kembali Kerajaan Jailolo. Ia datang ke Ambon dan mencoba meyakinkan Gubernur Belanda agar mengakuinya sebagai Sultan Jailolo, tetapi permintaan ini ditolak. Karena merasa didukung rakyat Halmahera Timur dan Tobelo, Dano Baba Hasan melakukan pemberontakan pada bulan Juni atau Juli 1876. Pada 3 September 1876, ibukota Kao diserbu serta dibumihanguskan, dan pada 7 September Dano Baba Hasan beserta pasukannya mencapai Tobelo yang mendukung pemberontakannya. Tetapi, akhirnya Dano Baba Hasan menyerah kepada Belanda pada 21 Juni 1877.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Lihat lebih jauh A.B. Lopian, "Pelayaran Orang-orang Tobelo dalam Sumber Sejarah," dalam *Halmahera dan Raja Ampat*, vol. 2 (1983), pp. 289 ff.

Pada pertengahan abad ke-19, perekonomian Maluku tidak lagi tergantung pada produk rempah-rempah. Hasil bumi dan hutan (damar) serta hasil laut – seperti mutiara, sirip ikan hiu, teripang, dan lainnya – mulai memasuki pasar dan diekspor. Perusahaan perkapalan KPM (*Koningklijk Paketvaart Maatschappij*) mulai menghubungkan pelabuhan-pelabuhan penting di Maluku dengan Sulawesi dan Jawa. Selain pedagang Cina, pedagang Arab, Bugis dan Makassar serta pribumi lokal mulai terjun dalam usaha-usaha perekonomian. Pada akhir abad ke-19, pengusaha perkebunan Belanda mulai memasuki Tobelo dan Bacan, sementara pengusaha dan distributor Belanda, Borsumij dan MHV, masuk ke Ternate.

Pembentukan Pemerintahan Gubernemen

Di bidang pemerintahan, Belanda menata kembali struktur dan organisasi pemerintah setelah dibubarkannya VOC. Pemerintahan Kompeni (VOC) diganti dengan pemerintahan Gubernemen (*Gouvernement van Nederland Indie*), setelah Inggris mengembalikan untuk kedua kalinya Maluku kepada Belanda pada 30 April 1817. Untuk menyongsong penyerahan kembali pemerintahan yang kedua ini, diangkat Letnan Kolonel J. de Groot – berdasarkan Surat Keputusan Komisi Penyerahan Kekuasaan Kepulauan Maluku, tertanggal 5 April 1817 – untuk menerima penyerahan kekuasaan dari Residen Inggris di Ternate, W.G. McKenzie. De Groot, dalam hal ini, dibantu oleh J.A. Nijs, yang ditunjuk sebagai Residen sementara Maluku.³⁷

Dengan kembalinya Maluku kepada Belanda, maka dibentuk sebuah komisi yang bertugas melakukan reorganisasi pemerintahan. Hasilnya, pada 1848 Pemerintah Belanda membentuk *Propinsi Kepulauan Maluku* yang berpusat di Ambon serta menghapuskan jabatan gubernur yang ada di Maluku dan Banda. Propinsi Kepulauan Maluku terdiri atas Keresidenan Ambon, Banda dan Ternate. Pemerintahan Keresidenan Ternate didasarkan pada butir 7 dari nota yang dilampirkan pada Traktat London (1824), antara Kerajaan Belanda dan Inggris, tentang penyerahan kekuasaan oleh Inggris kepada Belanda.³⁸

Pembentukan Keresidenan Ternate didasarkan pada daerah-daerah Kesultanan Ternate, Tidore dan Bacan. Karena itu, ketika keresidenan ini lahir, wilayahnya meliputi Maluku Utara yang sekarang ini dan wilayah-wilayah seberang laut Kesultanan Ternate – kelompok pulau Banggai dan daerah swapraja di pantai Sulawesi Timur yakni Balante, Mindong, Tomeiki dan Tombuku – serta wilayah seberang laut Kesultanan Tidore, yakni sebagian Papua dan kepulauan Raja Ampat. Wilayah Kesultanan Bacan, dalam hal ini, hanya mencakup pulau Bacan dan pulau-pulau di sekitarnya serta pulau Obi, yang kesemuanya tercakup ke dalam wilayah Maluku Utara sekarang ini.

Hubungan ketatanegaraan Kesultanan Ternate dan Tidore dengan Gubernemen diatur di dalam sebuah perjanjian tertanggal 27 Mei 1824. Pasal 3 perjanjian ini menyebutkan:

Sultan Ternate dan Sultan Tidore, berikut penerus-penerus mereka, mengakui kekuasaan penuh dan kedaulatan Gubernemen Belanda atas Kerajaan Ternate dan Tidore; Mereka percaya pada kekuasaan tertinggi tersebut dan menyatakan tunduk, setia dan patuh kepadanya.

³⁷ De Clerq, *Op.cit.*, p. 170.

³⁸ P.H. van der Kemp, *Indisch Bestuur van 1817 op 1818*, s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1917, pp. 328, 334-335.

Sementara pasal 4 perjanjian tersebut menyatakan: *Kedua kerajaan itu menerima Pemerintahan Gubernemen yang berlaku atas kerajaan mereka, mengakui hukum dan peraturan-peraturan Gubernemen serta membantunya bila terjadi perang.*

Pada 19 Pebruari 1828, Kesultanan Ternate dan Tidore menerima pengakuan Gubernemen atas institusi kesultanan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu: seorang Jogugu, seorang Kapita Laut, seorang Hukum Soasio, dan seorang Hukum *Sangaji*. Jogugu adalah pelaksana pemerintahan kesultanan. Kapita Laut adalah pelaksana urusan-urusan kelautan. Sementara dua kelembagaan terakhir, Hukum Soasio dan Hukum *Sangaji*, merupakan pelaksana hukum atau hakim. Institusi kesultanan sendiri akan terdiri dari sebuah Dewan Kerajaan – di Ternate terdiri atas 18 anggota, dan di Tidore 27 anggota, dengan titel *Bobato*. Berdasarkan pasal 5 perjanjian 27 Mei 1824, Dewan Kerajaan merupakan peradilan tertinggi (*Hoogste Rechtsbank*). Dewan ini juga menangani urusan-urusan yang menyangkut kepentingan umum, menetapkan perang dan damai, serta mengangkat kepala-kepala pemerintahan distrik dan kepulauan.³⁹

Dalam perjanjian tersebut juga ditetapkan bahwa orang-orang Alifuru kawula Ternate dan Tidore yang hidup di luar pulau, komunitasnya harus dijamin di bawah pimpinan kepala-kepala mereka sendiri. Sementara Kesultanan Bacan, walaupun penduduknya hanya sekitar 2000 jiwa pada 1828, pemerintahannya tetap berbentuk Dewan Kerajaan.

Atas kehendak Raja Belanda, oleh direksi sebuah perusahaan dagang, dilakukan beberapa percobaan untuk menangkap ikan paus di laut Selatan dengan mengirimkan sebuah kapal Amerika bernama Logan pimpinan Kapten Coffin.

Residen Ternate Nijs menerima tugas tersebut dengan pengecualian tentang pembayaran hak-hak kapal ketika datang, yang diberlakukan sama seperti kapal-kapal Belanda. Percobaan penangkapan ikan paus ini gagal.

Pada 1828, Belanda meminta bantuan pasukan untuk perang Diponegoro (1825-1830) kepada Sultan Ternate dan Tidore. Pada 21 Mei 1828, Ternate mengirimkan pasukan yang terdiri dari 562 orang Alifuru. Pada 21 Juli 1828, Tidore menyusulkan pasukannya sebanyak 290 orang. Pasukan bantuan ini baru kembali ke tempat asalnya pada 3 Juni 1830.⁴⁰

Pada 13 Juni 1909, Pemerintah Belanda memberlakukan *Korte Verklaring* (perjanjian singkat) atas Kesultanan Tidore, dan pada 13 Nopember 1915 atas Kesultanan Ternate, yang mengharuskan kedua kesultanan itu melepaskan wilayah-wilayah seberang lautnya yang akan diperintah secara langsung oleh Belanda. Wilayah-wilayah ini, dengan demikian, tidak lagi berada di bawah pemerintahan Sultan Ternate dan Tidore, tetapi langsung di bawah Gubernemen.⁴¹

Pada 1914 terjadi suatu peristiwa pidana di Jailolo. Orang-orang pedalaman Jailolo, atas provokasi orang-orang Islam, membunuh Kontrolir Agerbeek, ketika tengah melakukan penagihan pajak. Pelaku utamanya, Banau, ditangkap dan dihukum mati. Sedangkan Sultan Ternate, Haji Usman Syah, ditahan atas tuduhan bersekongkol dengan para pelakunya.

Sultan mula-mula dibawa ke Bacan, kemudian ke Jawa dan baru dikembalikan menjelang Perang Dunia ke-2. Sultan Ternate memang menentang sejumlah kebijakan Belanda yang terlalu mencampuri urusan internal kesultanan. Dengan pengasingan Sultan Usman Syah, terdapat

³⁹ *Ibid.*, p. 342.

⁴⁰ De Clerq, *Op.cit.*, p. 175.

⁴¹ A.J. Beverhuis & Mr. A.H.C. Gieben, *Het Gouvernement der Molukken*. Batavia: Weltevreden, 1929, p. 20.

kekosongan pemerintahan di Kesultanan Ternate, dan Pemerintah Belanda untuk sementara waktu mengendalikannya dengan bantuan para *bobato* sampai dinobatkannya Iskandar Muhammad Jabir Syah pada 1929 sebagai Sultan Ternate terakhir sebelum meletusnya Perang Pasifik.

Pada 1933, Propinsi Kepulauan Maluku mengalami reorganisasi dan dibubarkan, berkenaan dengan pembentukan Propinsi Timur Besar (*Grote Oost*) sebagai satu-satunya propinsi yang meliputi seluruh kawasan timur Indonesia--Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara-- Propinsi baru ini dipusatkan di Makassar. Propinsi Kepulauan Maluku yang lama diubah menjadi Keresidenan Maluku yang dipimpin seorang Residen. Keresidenan ini dibagi ke dalam tiga *afdeling*: Ambon, Tual dan Ternate, yang masing-masing dipimpin seorang Asisten Residen. Status *afdeling* ini berlaku hingga masuknya kekuasaan Jepang pada 1942.

Kedatangan Inggris

Orang Inggris pertama yang mengunjungi Maluku adalah Sir Francis Drake. Pada 14 Nopember 1579, ia tiba di Moti dengan kapal *Golden Hind* dari Australia. Deputi Sultan Babullah kemudian membawanya ke Ternate dan disambut dengan upacara kebesaran. Tetapi, tujuan kedatangan Drake hanyalah untuk berdagang rempah-rempah, dan setelah terjadi transaksi, ia kembali ke negaranya melalui Banten.

Keberadaan Inggris di nusantara dalam bentuk yang lebih terorganisasi baru dimulai ketika Sir James Lancaster, yang memimpin sebuah armada dagang di bawah bendera EIC (East India Company, "Serikat Dagang India Timur"), tiba di Aceh pada 1602, kemudian ke Banten dan mendirikan sebuah benteng di sana. Di daerah ini, EIC bertahan sampai 1682.

Pada 1604, EIC menyusulkan sebuah armada di bawah pimpinan Sir Henry Middleton. Armada ini berhasil mencapai Maluku serta singgah di pelabuhan Ternate dan Tidore. Armada Middleton merupakan armada dagang pertama Inggris yang sampai ke Maluku. Dari Maluku Utara, armada tersebut meneruskan perjalanannya ke Ambon. Namun, baru pada 1620 Inggris mendirikan pos dagangnya di Ambon dengan seizin VOC. Pejabat-pejabat Inggris yang ditempatkan di pos Ambon ini – berjumlah 10 orang terdiri atas 8 orang Inggris, 1 orang Jepang dan 1 orang Portugis – belakangan ditangkap Kompeni Belanda pada 1623 dengan dakwaan berkomplot melawan VOC. Kesepuluh orang itu kemudian dihukum mati dengan memenggal kepala mereka. Peristiwa perlawanan terhadap Belanda ini terkenal dengan nama "pembantaian Ambon."

Sejak peristiwa tersebut, Inggris menarik diri bukan hanya dari Ambon dan Maluku, tetapi juga dari seluruh nusantara, kecuali Banten. Tetapi, pos di Banten ini kemudian ditutup dan dipindahkan ke Bengkulu, Sumatera Selatan, sebagai satu-satunya pos permanen yang tersisa di Indonesia. VOC, dengan kepindahan tersebut, tidak lagi menganggap Inggris sebagai ancaman yang serius.⁴²

Mulai 1774-1775, Thomas Forest melayari Maluku dan Papua. Ia berada di Maluku pada bulan Nopember 1774, dan menyinggahi pelabuhan Ternate, Tidore dan Bacan.⁴³ Semasa kunjungannya ke Maluku, ia sempat beraudiensi dengan Gubernur VOC dan Sultan Ternate.

⁴² M.C. Rickfels, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada Univ. Press, 1994, pp. 42-43.

⁴³ Thomas Forest, *A Voyage to New Guinea and the Moluccas, 1774-1776*. Kuala Lumpur: OUP, 1996. pp. 31 ff.

Tetapi, campur tangan politik Inggris di wilayah Maluku baru dimulai ketika Nuku – yang melakukan pendekatan kepada Inggris melalui para *country traders*⁴⁴ – menentang Kompeni.

Sejak 1785, Nuku mulai melakukan kontak-kontak dengan Inggris dan mengirimkan utusannya ke Bengkulu, kemudian ke Bengal dan Madras untuk meyakinkan Inggris agar membuka kembali pos niaganya di Maluku Utara, Maluku Tengah dan Papua, wilayah-wilayah yang dikuasai Nuku. Pada 1786, Inggris membawa dua utusan Nuku menemui Gubernur Jenderal Inggris di Calcutta untuk menyampaikan maksud Nuku tentang pembukaan kembali pos dagang Inggris. Kedua utusan ini kembali ke Tidore pada tahun itu juga.

Pada 1790, EIC mengutus Kapten MacCluer untuk melakukan penyelidikan di pantai sekitar Misool dan tanjung Sele hingga teluk Berau dan pantai selatan Papua. Penyelidikan ini ditujukan untuk membuat peta kawasan tersebut.⁴⁵ Sementara itu, para *country traders* menyampaikan pendapat mereka kepada EIC di Calcutta tentang keuntungan politik dan ekonomi yang dapat diraih Inggris bila membantu Nuku. Pada 1792, Nuku memperbarui perjanjiannya dengan EIC di India melalui para *country traders* di Bengal. Nuku mengharapkan peranan Inggris yang lebih besar dalam permasalahan Maluku.

Pada 1793, EIC mengirimkan dua kapal dari Bengal sebagai tanggapan atas keinginan Nuku. Kedua kapal itu dipimpin Hayes, dan berlayar ke Papua serta tiba di Dore pada bulan Agustus 1793. Di sini Inggris mendirikan pos dagang – yang membeli hasil laut dan burung cenderawasih – berikut sebuah benteng darurat yang terbuat dari kayu. Benteng tersebut dinamakan *Fort Coronation* atau *New Albion*. Tetapi, pada 1795, benteng itu ditinggalkan karena anggota tentara dan personil lainnya menderita sakit serta kekurangan pangan. Semua peralatan militernya dijual kepada Nuku, yang ketika itu bermarkas di Waru, Seram Timur.

Pada 1795, ketika Perancis menyerbu negeri Belanda, dan terbentuk Bataafse Republik, Raja Belanda, Willem IV, berhasil lolos dan mengungsi ke Inggris. Ia ditempatkan di istana Kew. Dari istana inilah, Raja Willem mengeluarkan sejumlah instruksi dan surat kepada para pejabat Belanda di daerah-daerah jajahan agar menyerahkan wilayah mereka kepada Inggris, ketimbang jatuh ke tangan Perancis.⁴⁶ Seluruh instruksi dan surat Willem IV itu dikenal dengan nama *dokumen Kew*. Berdasarkan dokumen tersebut, Inggris merebut atau diberi sejumlah pos niaga di wilayah Indonesia, dan atas dasar dokumen inilah Inggris menduduki Ambon serta Banda pada 1796.

Pada 17 Februari 1797, tiga kapal Inggris di bawah komandan Pakenham berlabuh di selat Hiri. Pimpinan armada Inggris ini menuntut agar Gubernur Maluku, Budach, menyerahkan Maluku kepada Inggris berdasarkan isi dokumen Kew. Budach menolak tuntutan tersebut dengan alasan belum ada perintah dari Batavia. Keesokan harinya, Inggris menembaki benteng Oranje dan Kampung Makassar dari laut. Tetapi, Inggris tidak melakukan pendaratan. Setelah terjadi tembak-menembak yang seru, armada Inggris meninggalkan Ternate menuju Kema di Manado.

Pakenham memerintahkan beberapa komandan pasukannya menuju Manado untuk menuntut kepada Residen Durr agar menyerahkan Manado kepada Inggris. Tuntutan Pakenham ditolak, dan keesokan harinya, dua kapal perang Inggris – masing-masing *Resistance* dan *Opheus*, berlabuh di depan pelabuhan Manado. Residen Durr menyerah, dan Inggris membiarkannya

⁴⁴ *Country traders* adalah pedagang swasta Inggris yang beroperasi dengan seizin EIC.

⁴⁵ Katoppo, *Op.cit.*, pp. 93-94.

⁴⁶ Andaya, *Op.cit.*, p. 229.

menjalankan tugas seperti biasa. Beberapa hari kemudian, giliran Gorontalo diduduki Inggris tanpa perlawanan.

Pada 13 Maret 1797, Inggris muncul di Bacan dan mengajukan tuntutan penyerahan yang sama. Tetapi, komandan pos Belanda di sini juga menolak tuntutan itu. Packenham meneruskan perjalanannya ke Makian dan bertemu dengan Nuku di pulau tersebut. Pada 16 Maret 1797, pasukan gabungan Inggris dan Tidore mendarat di Bacan, dan wilayah ini pun langsung diserahkan ke Inggris.⁴⁷

Pada 1798, untuk kedua kalinya Inggris menuntut penyerahan Maluku dari Gubernur Budach, tetapi tuntutan ini tetap ditolaknya. Bahkan pada 1799, armada Inggris – di bawah pimpinan Hills – mengajukan tuntutan serupa untuk ketiga kalinya, yang juga ditolak Budach. Namun, pada awal Juni 1799, terjadi pergantian gubernur dari Budach ke Cransen, yang kemudian menyerahkan Maluku kepada Inggris.

Cransen sendiri sebenarnya menolak menyerahkan Maluku kepada Inggris. Tetapi, karena pengkhianatan Van Dackum dan Rodijk, Maluku akhirnya diserahkan Cransen kepada Inggris pada 21 Juni 1799, setelah benteng Oranje berhasil ditaklukkan Nuku dan Inggris. Beberapa kali serangan yang dilakukan sebelumnya – 11 Februari dan 4 Mei 1799 – menemui kegagalan. Beberapa waktu setelah penyerahan tersebut, Inggris mengakui Nuku sebagai Sultan Tidore.

Perjuangan Nuku menentang Belanda, selain dibantu badan-badan resmi EIC, juga disokong oleh para *country traders*. Mereka mensuplai senjata dan amunisi untuk pasukan Nuku. Sementara bantuan konkrit yang diberikan Nuku kepada Inggris dilakukannya pada penyerbuan Bacan serta pengepungan dan penyerbuan Ternate dalam upaya memaksa Belanda menyerahkan Maluku kepada Inggris.

Semasa pemerintahan Inggris, seluruh Maluku Utara, Maluku Tengah dan Banda dipimpin seorang gubernur yang berkedudukan di Ambon. Maluku Utara menjadi residen dengan beribukotakan Ternate. Residen pertama Inggris di Maluku Utara adalah H. Webber. Pada 22 Juni 1801, Gubernur Inggris di Ambon, William Farquhar, atas nama Pemerintah Inggris di India, mengadakan perjanjian baru dengan Nuku yang menggarisbawahi "hubungan bersama tanpa mengganggu kemerdekaan Tidore."

Atas prakarsa W.B. Martin, pada 5 Nopember 1801 diadakan perjanjian antara Sultan Nuku dari Tidore dan Sultan Maimuddin Syah dari Ternate. Isi perjanjian perdamaian tersebut antara lain menetapkan: "Semua peristiwa dan perbuatan-perbuatan yang telah berlaku dalam tahun-tahun yang lampau dilupakan dan saling memaafkan, dan kedua kesultanan serta rakyatnya akan hidup damai dalam suasana persahabatan dan persaudaraan."⁴⁸

Suatu hal yang kurang menguntungkan Nuku adalah tercapainya perjanjian perdamaian Amiens pada 27 Maret 1802 antara Inggris dan Belanda. Berdasarkan perjanjian ini, Inggris harus menyerahkan semua wilayahnya di Indonesia, termasuk Maluku. Karena itu, pada 23 Mei 1802 Inggris meninggalkan Maluku, menyusul Ambon pada 23 Juni 1803.

Tetapi, pada 1810, Belanda kembali menyerahkan Maluku kepada Inggris di bawah Kapten Tucker. Pada 1811, Tucker diganti oleh Kapten Forbes, seorang komandan militer dan kepala pemerintahan sipil. Setelah itu, W. Ewer diangkat sebagai Residen Maluku di Ternate, kemudian diganti oleh W.B. Martin. Pada 1814, W.G. McKenzie ditunjuk menjadi Residen

⁴⁷ Katoppo, pp. 112-113.

⁴⁸ Katoppo, *Op.Cit.*, p. 175.

Ternate, menyusul Stuart yang menggantikannya sebagai Residen Inggris untuk Maluku pada 1815. Tetapi, pada 1816, kembali McKenzie menggantikannya.

Pada 1816, semua wilayah Inggris di Indonesia dikembalikan lagi kepada Belanda. Gubernur Jenderal Inggris, Sir Thomas Stanford Raffles menyerahkan kekuasaan Inggris di Indonesia kepada Gubernur Jenderal Belanda sebagai bagian dari penyusunan kembali secara menyeluruh urusan-urusan Eropa setelah berakhirnya perang yang dikumandangkan Napoleon dari Perancis.⁴⁹ Dengan demikian, berakhirilah kehadiran singkat kekuasaan Inggris di nusantara, termasuk Maluku. Di Ternate, McKenzie menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda pada 30 April 1817.⁵⁰

⁴⁹ Ricklefs, *Op.cit.*, p. 176.

⁵⁰ De Clerq, *Op.cit.*, p. 170.

BAB 9

Penyebaran Agama Islam dan Kristen di Maluku

Agama Islam di Maluku

Ketiadaan bukti-bukti tertulis maupun prasasti atau bukti arkeologis pada umumnya telah menyebabkan sulit menetapkan secara akurat kapan agama Islam masuk ke Maluku. Karena penyebaran Islam di seluruh nusantara dilakukan melalui para pedagang, dapat diduga bahwa penyebaran agama ini mengikuti jalur-jalur niaga yang ada ketika itu, dengan sasaran utama kota-kota pantai dan bandar-bandar perniagaan.

Permasalahan seperti bagaimana, mengapa dan kapan penduduk Maluku mulai menganut agama Islam, tidak mudah disepakati secara bulat. Dari sejumlah premis kesejarahan, dapat disimpulkan bahwa orang-orang asing dari Asia – Arab, Gujarat dan Cina – yang berprofesi pedagang, berikut pedagang-pedagang Jawa dan Melayu yang telah memeluk agama Islam, merupakan penyebar-penyebar agama Islam di Maluku pada masa awalnya. Syekh Mansur dari Arab, yang berada di Tidore pada masa pemerintahan Kolano Caliat, serta Datu Maula Hussein dari Jawa, yang berada di Ternate pada masa pemerintahan Kolano Marhum, dapat dipandang sebagai representasi pedagang Arab dan nusantara yang melakukan Islamisasi Maluku.

Proses selanjutnya adalah pergaulan dan pembauran antara orang-orang Islam pendatang dan pribumi lokal, diikuti dengan perkawinan, juga telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam sejarah penyebaran Islam di Maluku. Kombinasi keseluruhan cara semacam itu mungkin dilakukan dengan baik di Maluku, karena iklim pemerintahan para penguasa di kawasan ini cukup kondusif.

Masalah paling kontroversial tentang Islamisasi Maluku, seperti di daerah lainnya di seluruh nusantara, adalah kapan tepatnya agama Islam mulai masuk ke kawasan ini. Para penulis sejarah Maluku, baik asing maupun nasional, lazimnya merujuk sumber-sumber Portugis yang menetapkan tahun pelantikan Sultan Zainal Abidin dari Ternate – yakni 1486 – sebagai permulaan tarikh Islam di Maluku. Dasar penggunaan tahun ini sebagai awal masuknya Islam di Maluku adalah ketika Zainal Abidin bertakhta, ia menggunakan gelar *sultan* yang Islami, dan melepaskan titel tradisional *kolano* yang digunakan raja-raja sebelumnya sejak berabad-abad silam.

Tetapi penentuan peristiwa besar dengan mengaitkannya pada penggunaan gelar ini perlu diberi beberapa catatan:

Pertama: Thome Pires – seorang ahli farmasi Portugis yang tiba di Malaka setelah kerajaan itu jatuh ke tangan Portugis pada 1511 dan penulis buku terkenal, *Suma Oriental: An Account of the East from the Red Sea to Japan*, yang ditulis di Malaka dan diselesaikan di India antara 1512-1515 – menyatakan bahwa menurut orang-orang Maluku, yakni para pedagang Ambon dan Banda yang diwawancarainya ketika bertemu di Malaka,

agama Islam telah masuk di Maluku 50 tahun lalu.¹ Thome Pires berada di Malaka pada 1512, sehingga wawancara yang dilakukannya dengan para pedagang Maluku jelas dilakukan pada tahun itu juga. Dengan demikian, jika Maluku telah menerima Islam 50 tahun sebelum penaklukan Malaka oleh Portugis, maka Islamisasi Maluku terjadi kira-kira pada 1459-1460, dua puluh tahun lebih awal dari pemberitaan sumber-sumber Portugis, yang mematok tahun 1486, saat wafatnya Kaicil Marhum dan bertakhtanya Zainal Abidin. Kaicil Marhum, sebelum wafat, telah memeluk Islam, dan dialah kolano Ternate pertama yang jenazahnya dimakamkan menurut syariat Islam. Dari sudut ini, laporan para pedagang Ambon dan Banda kepada Thome Pires dapat dikatakan cukup masuk akal.

Kedua: De Clerq² melaporkan bahwa pada 1334 dan 1372 telah naik takhta di Tidore dua kolano, masing-masing Nuruddin dan Hasan Syah. Sekalipun keduanya tidak menggunakan gelar *sultan*, tetapi gelar *syah* ("sultan, raja") yang disandang Hasan berasal dari titel Kaisar Persia setelah memeluk agama Islam. Gelar semacam ini juga digunakan raja-raja Malaka dan Aceh setelah memeluk Islam. Sultan Malaka, Iskandar Syah, sebelumnya bernama Paramisara. Ia adalah seorang pangeran asal Majapahit dari Blambangan, Jawa Timur. Iskandar Syah kemudian digantikan puteranya, Muhammad Iskandar Syah. Demikian pula, beberapa Sultan Malaka setelah itu menggunakan gelar *syah* – seperti Mudaffar Syah, Mansur Syah, dan Mahmud Syah. Gelar *syah* ini menunjukkan identitas seseorang sebagai raja beragama Islam dari sebuah kerajaan islami. Dengan demikian, penggunaan gelar "syah" oleh Kolano Hasan dari Tidore mengidentifikasi dirinya sebagai seorang raja Muslim dari kerajaan yang islami. Apabila asumsi ini dapat dibenarkan, dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Tidore sekitar 1372, bukan pada masa pemerintahan Caliat pada 1495. Demikian juga, komunitas Muslim telah terbentuk di Tidore beberapa waktu sebelum bertakhtanya Hasan Syah.

Ketiga: Pada awal abad ke-14, terutama pada masa pemerintahan Sida Arif Malamo di Ternate (1322-1331) dan Kaicil Sele di Tidore serta Sida Hasan di Bacan, telah banyak orang Jawa, Cina, Arab serta Melayu bermukim di Ternate dan di kedua ibukota kerajaan Maluku lainnya yakni Bacan dan Tidore. Diberitakan bahwa Sidang Arif Malamo adalah raja yang sangat luas pergaulannya dengan orang-orang asing, terutama orang Arab. Ia bahkan belajar bahasa Arab, dan gaya hidupnya meniru gaya hidup orang Arab yang Islami. Baik orang Arab, Gujarat, Jawa maupun Melayu yang bermukim di Ternate, Tidore dan Bacan adalah pedagang-pedagang Muslim. Karena itu, tidak sukar membayangkan bahwa mereka telah "menularkan" keyakinan dan agamanya, selain gaya hidup dan budayanya.

Selanjutnya, Naidah, seorang Hukum Soasio Kesultanan Ternate, menulis dalam *Sejarah Ternate*, bahwa "di bawah pemerintahan Cico, agama Islam belum kuat di Ternate." Itulah sebabnya, Zainal Abidin pergi ke Jawa untuk mempelajari Islam secara langsung dari Sunan Giri yang terkenal, dan memboyong sejumlah ulama Jawa ketika kembali ke Ternate. Cico adalah ayah Gapi Baguna dan Kakek Zainal Abidin. Dalam penarikan garis keturunan yang dibuat van Fraassen,³ permaisuri Cico, seorang perempuan dari Seli (Tidore), melahirkan Gapi Baguna yang

¹ Lihat Fraassen, *Op.Cit.* p.32.

² De Clerq, *Op.cit.*, p. 148.

³ Van Fraassen, *Op.cit.*, II, p. 7.

menikah dengan seorang perempuan dari Sula. Dari perkawinan ini lahir Zainal Abidin. Sementara dalam catatan Valentijn⁴ dan de Clerq⁵ disebutkan bahwa Cico adalah nama lain dari Sia (Gapi Baguna II), yang berkuasa antara 1432-1465, dan Gapi Baguna adalah ayah dari Marhum yang berkuasa antara 1465-1486, kemudian digantikan Zainal Abidin yang berkuasa antara 1486-1500. Lebih jauh, Valentijn mengklasifikasikan Marhum sebagai seorang raja Muslim Ternate (*een Moorse koning van Ternate*). Dengan demikian, bila Naidah mencatat bahwa pada masa pemerintahan Cico (1432-1465) Islam belum kuat di Ternate, ia mengemukakan indikasi bahwa Islam telah eksis di sana, tetapi belum memiliki pengaruh sosio-politik yang signifikan terhadap kerajaan, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Zainal Abidin serta para sultan sesudahnya.

Beberapa fakta sejarah yang dikemukakan di atas dimaksudkan untuk memberikan alternatif tarikh masuknya Islam ke Maluku, agama yang sejak awalnya telah memberikan pengaruh yang demikian besar terhadap aspek politik dan militer kerajaan-kerajaan di Maluku, baik terhadap para penguasa ataupun elit-elit kerajaan lainnya.

Sementara itu, perlu pula disimak pendapat beberapa sarjana asing. Pigafetta yang mengunjungi Maluku pada 1521 – ia kembali ke negerinya bersama ekspedisi Spanyol pertama di Tidore – menulis bahwa orang-orang Maluku telah memeluk agama Islam lima puluh tahun yang silam. Sedangkan Barros mengatakan bahwa rakyat Maluku telah menjadi Muslim delapan puluh tahun sebelum kedatangan bangsa Portugis ke sana pada 1512. Thome Pires menulis pada 1544 bahwa Islam masuk ke Maluku sekitar delapan puluh atau sembilan puluh tahun yang lalu. Dengan demikian, masuknya Islam ke Maluku, menurut pendapat-pendapat ini, dapat diringkas sebagai berikut:

- a) Menurut Pigafetta sekitar tahun 1469;
- b) Menurut Barros sekitar tahun 1430; dan
- c) Menurut Thome Pires antara 1420-1430.

Seperti terlihat, suatu hal pasti yang dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat di atas adalah agama Islam masuk ke Maluku bukan pada 1486, tetapi sekitar 50 hingga 60 tahun sebelumnya. Prof. R.A. Kern berpendapat bahwa Islam masuk ke Maluku Utara lewat jalur pedagang-pedagang Jawa. Ia tidak menyebut tahunnya secara pasti, tetapi menyatakan bahwa Islam mulai masuk di Ternate dan Tidore pada pertengahan abad ke-15.⁶

Rute perjalanan Islamisasi mengikuti rute perniagaan, yaitu dari nusantara bagian barat ke timur, dan pada tahap-tahap awal dimulai di pusat-pusat perdagangan serta kota-kota pelabuhan, pulau dan pesisir pantai. Dimulai dari semenanjung Malaka dan Trengganu ke Aceh (Samudera dan Pasai), pantai utara Jawa Timur, Filipina Selatan (Sulu dan Mindanao), Brunei, terus ke Maluku.

Adalah Kerajaan Samudera di Aceh Utara yang tercatat dalam buku-buku sejarah sebagai kerajaan Islam pertama pada akhir abad ke-13. Penjelajah Venesia, Marco Polo, dalam perjalanan pulangnyanya dari Cina ke Persia singgah di Perlak, Aceh Utara, dan menemukan penduduk negeri itu telah memeluk agama Islam. Ia juga menemukan banyak pedagang Muslim asal Gujarat di

⁴ Valentijn, *Op.cit.*, p. 369.

⁵ De Clerq, *Op.cit.*, p. 148.

⁶ R.A. Kern, *De Islam in Indonesie*, (s'Gravenhage: van Hoeve, 1947), pp. 21-22.

Perlak. Karena itu, ia berkesimpulan bahwa perlak adalah kota Islam walaupun sebagian penduduknya belum memeluk agama tersebut.

Penyebaran agama Islam di Maluku pada masa-masa awal tidak dapat dipisahkan dari kerja keras seorang pedagang sekaligus muballigh asal Jawa bernama Datu Maula Hussein. Ia tiba di Ternate pada 1465.⁷ Hussein adalah seorang muballigh besar pada masanya. Ia memiliki pengetahuan agama Islam yang luas dan dalam, serta pakar tilawah dan kaligrafi Arab. Pada waktu senggang, terutama di malam hari, ia membaca al-Quran dengan suara yang merdu, serta membuat kaligrafi di atas potongan-potongan papan. Keahliannya ini membuat pribumi Ternate terpesona dan kagum. Itulah sebabnya, setiap kali ia mendendangkan ayat-ayat suci al-Quran, banyak orang berdatangan untuk mendengarkannya. Jumlah pengagumnya kian bertambah dari waktu ke waktu. Akhirnya, ada di antara pribumi tersebut yang memintanya mengajarkan membaca al-Quran. Hussein menjelaskan bahwa al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang berisi kalam Ilahi (*verbum dei*). Kitab suci ini hanya boleh diajarkan kepada mereka yang telah menganut agama Islam. Mendengar penjelasan Hussein, orang-orang Ternate tidak keberatan dengan syarat itu, dan mulailah mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam.

Dengan semakin banyaknya orang Ternate – demikian juga orang Tidore, Bacan dan Jailolo – yang masuk Islam, Hussein membuka pengajian untuk mengajarkan al-Quran dan Islam. Upayanya bisa dikatakan sukses dan merembet sampai ke lingkungan istana. Hussein diminta membaca al-Quran dan menjelaskannya di depan kolano, para *bobato* serta keluarga istana, yang berujung dengan pengucapan dua kalimat syahadat sebagai pertanda masuk Islamnya mereka.

Datu Maula Hussein adalah guru spiritual Zainal Abidin, mulai dari masa kanak-kanaknya hingga dinobatkan sebagai Sultan Ternate. Seperti terlihat dalam kenyataan sejarah, Islam memperoleh kekuatan politik setelah bertakhtanya Zainal Abidin pada 1486. Zainal Abidin adalah raja pertama Ternate, bahkan Maluku, yang memakai gelar *sultan*, sebagai pengganti gelar *kolano* yang disandang para pendahulunya. Setelah itu, Raja Caliat dari Tidore melakukan langkah serupa atas bimbingan guru spiritualnya Syekh Mansur yang berasal dari Arab.

Pada 1494, Zainal Abidin melakukan perjalanan ke Giri, Jawa Timur, untuk belajar agama Islam pada Sunan Giri, salah satu dari sembilan wali (*walisongo*) yang terkenal itu. Maula Hussein menyertainya dan kembali untuk seterusnya ke kampung halamannya. Dengan demikian, Zainal Abidin adalah sultan Maluku pertama yang belajar agama Islam langsung pada Sunan Giri. Setelah tiga bulan belajar di madrasah Sunan Giri,⁸ ia kembali ke Ternate dengan memboyong beberapa ulama Jawa untuk mengajarkan Islam di Ternate. Di antara ulama-ulama asal Jawa itu ada yang diangkatnya sebagai *imam*, sebuah jabatan struktural Kerajaan Ternate. Inilah asal-usul lembaga Imam Jawa pada struktur kelembagaan Kesultanan Ternate.

Salah satu upaya Zainal Abidin yang terpenting untuk mengembangkan Islam, selain mendirikan sejumlah sekolah dengan guru-guru ulama yang diboyongnya dari Giri, adalah membentuk lembaga *jolebe* sebagai salah satu perangkat agama kerajaan. Dengan demikian, ia telah meletakkan dasar untuk menjadikan Ternate sebagai kerajaan Islam.⁹ Pengganti Zainal

⁷ Valentijn, *Op.cit.*, p. 378.

⁸ *Ibid.* Valentijn menyebut madrasah yang diasuh Sunan Giri sebagai Sekolah Tinggi Agama (*Godsdiens Hogeschool*).

⁹ Amal, M. Adnan, "Sejarah Islam-Kristen di Galela dan Tobelo," dalam *Damai yang Terkoyak*, eds. Kasman Hi. Ahmad, et.al., (Ternate: Podium, 2000), pp. 15-47.

Abidin adalah Bayanullah (1500-1522), yang melanjutkan tugas-tugas penyebaran Islam ke daerah-daerah.

Ada dua tindakan Bayanullah yang layak dicatat:

Pertama: Kesultanan Ternate menyatakan berlakunya hukum perkawinan Islam bagi seluruh kawula kesultanan yang bergama Islam. Sultan Bayanullah juga melarang praktek pergundikan yang marak selama itu, terutama di kalangan para *bobato*.

Kedua: Semua kawula kesultanan, tanpa pandang bulu – baik Muslim maupun bukan – harus berpakaian secara Islami. Sultan Bayanullah melarang laki-laki memakai cawat ("cidako"), dan perempuan harus memakai pakaian yang menutup auratnya.

Untuk kedua tindakan di atas, Sultan Bayanullah memperoleh pujian dari orang-orang Barat dan dipandang sebagai pelopor civilisasi rakyat Maluku. Sultan Bayanullah memang merupakan peletak dasar prinsip-prinsip Islam Kesultanan Ternate. Ia mempertegas Ternate sebagai kerajaan Islam. Berbagai peraturan yang bernafas Islam dibentuknya. Demikian pula, berbagai konvensi yang mengaitkan aktivitas kesultanan dengan penyebaran Islam diciptakannya.

Prinsip-prinsip dan konvensi-konvensi yang diletakkan Bayanullah sedemikian kuatnya, sehingga diikuti para sultan penggantinya dan berlaku sebagai sebuah tradisi kelembagaan yang juga menular kepada kerajaan-kerajaan tetangga Ternate: Tidore dan Bacan. Islamisasi Maluku, baik di pusat-pusat kerajaan maupun di daerah-daerah dan wilayah-wilayah seberang laut, tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan dan kekuatan pemerintahan sentral. Pengangkatan seluruh *bobato* – seperti *salahakan*, *kimalaha*, *sangaji* dan jabatan-jabatan lainnya – selalu dikaitkan dengan identitas Muslim sebagai prasyarat mutlak.

Penerimaan Islam sebagai agama kerajaan mengakibatkan restrukturisasi lembaga-lembaga kerajaan dan badan-badan kekuasaannya, baik di pusat maupun di daerah. Konsekuensi-konsekuensi ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Fungsi sultan, selain sebagai pemimpin pemerintahan dan pemangku tertinggi adat serta tradisi, adalah sebagai pemimpin tertinggi agama Islam dengan gelar *Amir al-din*. Predikat ini bukan sekedar simbol spiritual, tetapi membawa konsekuensi pembebanan sejumlah tugas keagamaan (*diniyah*) kepada sultan, baik menyangkut pelaksanaan hukum Islam (*syariat*) maupun tugas sosio-ekonomik (*muamalah*) untuk kepentingan rakyat dan agama. Sultan, sebagai *amir al-din*, berkewajiban melindungi dan menjaga kesucian agama Islam dari berbagai praktek yang mencemarkannya.

Ketika Sultan Muhammad Zain berkuasadi Ternate, pada 17 Syawal 1261H (1844) ia mengeluarkan sebuah peraturan kesultanan berkenaan dengan wafatnya seorang sultan yang, antara lain, menetapkan: melarang para *bobato* dan keluarga istana memberikan penghormatan berlebihan terhadap jenazah sultan, seperti ketika sultan masih hidup. Isteri para *bobato* dan pembesar kerajaan dilarang mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Mereka juga dilarang menyanyikan *lego-lego* baik di istana maupun di pemakaman, dengan alasan bahwa kebiasaan tersebut berasal dari masa sebelum beragama serta tidak diatur di dalam al-Quran.¹⁰

2. Penerapan Islam dalam lembaga-lembaga kerajaan dilakukan dengan pembentukan institusi kerajaan baru yang disebut *bobato akhirat* atau *jolebe*, di samping *bobato dunia* yang telah

¹⁰ De Clerq, *Op.cit.*, p. 242.

ada. *Bobato akhirat* atau *jolebe* disebut juga *bobato* berjubah putih, sementara *bobato* dunia disebut *bobato* berjubah hitam. Penyebutan ini berkaitan dengan kostum yang digunakan – yakni berwarna hitam atau putih, baik destar ataupun jubahnya.¹¹ Institusi *jolebe* berpuncak pada sultan yang didampingi dan dibantu seorang *kalem* atau qadhi sebagai pelaksana puncak syariat Islam. *Kalem* dibantu empat imam, dan setiap imam dibantu dua khatib serta empat moding. Di daerah-daerah, terdapat seorang imam yang dibantu empat khatib dan delapan moding pada setiap distrik. Di setiap komunitas Muslim semisal kampung atau desa, terdapat seorang khatib yang dibantu dua moding.

Sehubungan dengan *jolebe* atau *bobato* akhirat, kewenangan dan tugasnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. tugas-tugas yang berkaitan dengan ritual-ritual keagamaan yang ditujukan untuk menjaga dan memelihara kehidupan spiritual rakyat (seperti shalat jumat, shalat fardlu, dan yang bertalian dengan pemeliharaan jenazah, kenduri, tahlil maupun hal lain yang menyangkut shalat sunnat, seperti shalat Iedul fitri dan Iedul Adha, tarawih di bulan Ramadhan).
2. menetapkan awal dan akhir Ramadhan, menjadi amil dalam pengumpulan zakat fitrah, zakat mal dan sedekah, serta tugas-tugas lain seperti sunatan, akikah, dan sebagainya.

Di pusat, *kalem* memberikan fatwa atas permintaan sultan atau masyarakat umum tentang suatu persoalan syariat dan fiqih Islam. Disamping itu, para *jolebe* juga disertai tugas-tugas yudisial, khusus di bidang hukum kekeluargaan dan hukum waris Islam. Institusi yudisialnya disebut *hakim syara* yang berwenang mengadili perkara-perkara menurut hukum kekeluargaan dan waris Islam – antara lain meliputi: hukum perkawinan, perceraian dan talak, rujuk dan nafkah, serta pembagian warisan menurut hukum Islam. *Kalem* adalah peradilan banding *hakim syara*, apabila keputusannya tidak diterima pihak yang berperkara. Keputusan *kalem*, dalam hal ini, adalah keputusan akhir.

Walaupun sultan adalah *amir al-din*, ia tidak pernah mencampuri kompetensi *hakim syara*. Satu-satunya hak prerogatif sultan berkenaan dengan hal ini adalah pemberian wali hakim kepada calon pengantin perempuan yang tidak memiliki wali atau apabila walinya enggan memberikan perwalian. Pemberian hak wali inipun dilakukan sultan dengan mendelegasikan kewenangannya kepada para imam dan khatib.

Dapat dikatakan bahwa praktek pelaksanaan pemerintahan pada kerajaan-kerajaan di Maluku Utara sejak masa awal sangat kental dengan semangat Islamisasi. Selain prasyarat harus beragama Islam bagi para *bobato*, pemerintahan-pemerintahan di ibukota distrik tempat para *salahakan*, *utusan* atau *sangaji* berkedudukan harus berlokasi di tempat-tempat pemukiman komunitas Muslim. Masyarakat Muslim pada umumnya berdiam di teluk-teluk dan pesisir pantai, serta jarang di wilayah pedalaman yang masih belum tersentuh Islam. Jadi, tidaklah mengherankan jika sampai dewasa ini hampir semua ibukota kecamatan di Maluku Utara berada di tengah-tengah komunitas Muslim dan terletak di pesisir pantai.

Dalam perjalanan sejarah, agama Islam telah memainkan peran penting dan menjadi kekuatan potensial dalam kehidupan kerajaan-kerajaan Maluku selama berabad-abad. Kehidupan berdampingan kerajaan-kerajaan Maluku tidak selalu rukun dan damai, terutama antara Kesultanan Ternate dan Tidore karena rivalitas dan ambisinya masing-masing. Akan tetapi, bila agama Islam terancam – seperti dialami kaum Muslim di Moro lantaran tekanan Portugis dan

¹¹ Jubah adalah semacam baju panjang melewati lutut, dan destar adalah ikat kepala.

pastor-pastor Kristen – semua perbedaan di antara kerajaan-kerajaan tersebut dilupakan. Persatuan yang kukuh di antara kerajaan-kerajaan itu dijalin demi menyelamatkan Islam dari ancaman. Tidak mengherankan jika Sultan Khairun, yang demikian toleran dan sangat dipuji para pemimpin Kristen karena pembelaan dan kemudahan yang diberikannya kepada mereka, pada akhirnya memprakarsai sebuah pertemuan para penguasa se-Maluku untuk membahas dan menetapkan solusi penyelamatan kaum Muslimin Moro yang mendapat tekanan dari Portugis dan pemimpin-pemimpin Kristen.

Tetapi, agama Islam juga telah dijadikan simbol dan alasan pembenaran bagi suatu tindakan militer, seperti dilakukan Raja Jailolo Katarabumi terhadap umat Kristen Tolo, dan Sultan Babullah terhadap komunitas Kristen Moro. Hal senada juga dilakukan Sultan Sibori Amsterdam, ketika menentang Kompeni Belanda di Maluku Tengah dan Ternate. Walhasil, agama-agama – bukan hanya Islam – memang selalu menjadi alat justifikasi politik. Sehubungan dengan Islam, agama ini telah menjadi alat perekat bagi persatuan dan kesatuan kerajaan-kerajaan Maluku, bersama-sama dengan budaya lokal, seperti akan dikemukakan berikut ini.

Kultur dan Agama Islam sebagai Alat Perekat

Kerajaan-kerajaan di Maluku Utara didirikan di atas fondasi adat dan tradisi yang kukuh dan relatif tidak berbeda. Perbedaan-perbedaan yang memang muncul di sana-sini relatif tidak terkait dengan fondasi tersebut, dan bukan merupakan perbedaan yang signifikan. Bentuk-bentuk masyarakatnya yang pluralistik tidak menjadi handikap dalam komunikasi dan interaksi kultural yang cukup relevan pada masa-masa awal kerajaan-kerajaan tersebut, meskipun mesti diakui bahwa kondisi geografisnya sebagai kawasan dengan lebih dari tiga ratus pulau itu membawa kesulitan-kesulitan tersendiri.

Namun, yang menjadi masalah dalam hal ini adalah faktor-faktor apa saja yang telah menjadi tali pengikat yang kukuh bagi persatuan dan kesatuan kerajaan-kerajaan Maluku. Paling tidak ada dua faktor utama yang inheren dan perlu dicatat dalam masalah ini: (1) *Persamaan kultur*; dan (2) *Faktor agama Islam*. Naidah, sehubungan dengan masalah ini, mengemukakan:¹²

Maluku kie raha ma asal rimoi bato, ma kabasaran se ma istiadat rimoi bato ("Empat gunung Maluku, sesungguhnya punya satu asal-usul, punya kemegahan dan kultur yang sama")

Kesatuan adat-istiadat atau budaya yang mewarnai kerajaan-kerajaan Maluku, seperti ditegaskan Naidah, tampak dalam banyak hal. Sebagai ilustrasinya adalah gelar *Kolano*¹³ yang digunakan raja-raja Maluku pada masa pra-Islam. Penggunaan gelar semacam ini telah melembaga baik di kerajaan-kerajaan besar maupun kecil, bahkan tetap dipertahankan penguasa Jailolo hingga berakhirnya riwayat kerajaan tersebut. Hal serupa juga ditemukan pada penyebutan pangkat dan organ kekuasaan di berbagai kerajaan Maluku.

¹² Naidah, *Op.cit.*, p. 382.

¹³ Kata "kolano," bermakna "penguasa," bukanlah kata pribumi Maluku. Ia dipinjam dari bahasa Jawa. Dalam ceritera Panji -- versi Jawa Timur untuk Arjuna, pangeran idaman yang tak terkalahkan dalam perang dan asmara -- disebutkan seorang tokoh *klano* terkemuka. Dari kata *klano* inilah kata "kolano" berasal. Lihat Andaya, *Op.cit.*, p. 59.

Faktor kultural, dengan demikian, telah menjadi perekat dan pematri kesatuan emosional kerajaan-kerajaan Maluku serta telah menjadi alat penyanggah yang harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh, jika sebuah kerajaan hendak bertindak terhadap kerajaan lain. Contohnya, antara Ternate dan Tidore telah terjadi persaingan politik yang berkepanjangan jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Ketika bangsa-bangsa asing ini hadir di tengah keduanya, dan keduanya menentukan mitranya masing-masing yang berbeda – Ternate bermitra dengan Portugis dan Tidore bermitra dengan Spanyol – perbedaan paradigma politik antara Ternate dan Tidore tidak menimbulkan konflik atau perseteruan terbuka yang menyebabkan salah satunya mencaplok yang lain.

Demikian pula, Tidore dan Bacan terkenal sebagai kerajaan-kerajaan "pemberi ibu" kepada Ternate, karena banyak sultan Ternate menyunting permaisurinya dari kedua kerajaan tersebut. Dengan budaya politik semacam itu, konflik keras antara kerajaan-kerajaan besar Maluku yang mengancam eksistensi salah satu di antaranya – dengan pengecualian Jailolo, yang akhirnya dilikuidasi Ternate – bisa diredam secara efektif.

Sehubungan dengan agama Islam sebagai alat perekat, kenyataan yang mesti dicatat adalah para raja Maluku merupakan orang-orang *moor* atau Muslim. Dalam kenyataannya, agama Islam terlihat secara jelas sebagai salah satu alat perekat yang kuat di antara kerajaan-kerajaan tersebut. Setelah Islam masuk ke jantung kekuasaan kerajaan-kerajaan tersebut, agama ini menjelma sebagai jati dirinya. Hal ini bisa dilihat pada restrukturisasi kerajaan-kerajaan Maluku menjadi kesultanan-kesultanan – kecuali Jailolo – yang dipelopori Ternate dan diikuti Tidore serta Bacan.

Ketika eksistensi Islam terancam oleh perkembangan pesat Kristen Katolik di Moro, terutama setelah kunjungan Franciscus Xaverius ke sana pada 1546, Sultan Khairun dari Ternate – yang terkenal paling tinggi toleransi keagamaannya dan, karena itu, banyak mendapat pujian dari para pastor yang bertugas di Moro¹⁴ – merasa cemas. Ia kemudian mengumpulkan para penguasa Maluku lainnya, yakni Tidore, Bacan dan Jailolo, untuk membahas dan mencari solusi atasnya. Setelah berunding, disepakati sejumlah langkah konkrit. Khairun sendiri kemudian mengeluarkan sejumlah peraturan untuk menanggulangi keselamatan kawulanya dari kecemasan evangelisasi.

Agama Kristen Katolik

Upaya penyebaran agama Kristen katolik di Maluku pada masa awal, dilakukan oleh seorang pedagang bernama Gonsalo Veloso.¹⁵ Penguasa Portugis sebelum de Ataide, jarang melakukan usaha serius untuk mengonversi orang-orang pribumi ke agama Kristen. Setelah selesai pembangunan benteng Gamlamo, penguasa Portugis hanya menyediakan apa yang disebut dengan *podroado* kerajaan dengan sebuah *vicar* dan satu atau dua *benefisiaris* bila diperlukan, yang ditempatkan di bawah garnisun.

Pada 1534, Tristiao de Ataide diangkat sebagai Gubernur Portugis ke-6 untuk Maluku. Ia tiba di Ternate bersama seorang pastor Katolik bernama Simon Vaz, evangelis pertama di Maluku. Setibanya di Ternate, de Ataide mengumumkan bahwa penguasa Kesultanan Ternate yang lama, Tabariji, sedang dalam perjalanan pulang untuk kembali berkuasa. Sementara Sultan

¹⁴ John Villiers, "The Jesuit Mission in Moro 1546-1571," dalam Masinambouw (ed.), *Op.cit.*, p. 182.

¹⁵ *Sejarah Gereja Katolik di Indonesia*, Vol.I,1974 p.59.

Khairun, penguasa Ternate ketika itu, mungkin akan diasingkan bersama Kapita Laut Samarau. De Ataide juga berharap bahwa "dengan tibanya Raja Kristen Tabariji, api dan semangat suci akan menyala dengan membara."

Tabariji menjadi Sultan Ternate menggantikan Boheyat (Abu Hayat) pada 1532 atas sponsor Portugis. Tetapi, ia kemudian dipaksa turun dari takhtanya serta diasingkan ke Goa bersama ibunya, Nyai Cili Boki, dan suaminya, Pati Sarangi pada 1534. Pengganti Tabariji adalah Khairun Jamil (1535-1545), saudara tiri Tabariji sendiri. Pada 1545, Khairun ditangkap Portugis dan diasingkan ke Malaka. Ia dibebaskan setahun kemudian dan bertakhta untuk kedua kalinya mulai 1546 hingga 1570.

Di tempat pengasingannya di Goa, Tabariji bertemu seorang bangsawan Portugis, Jordao de Freitas, yang menasehatinya agar berpaling ke agama Kristen jika mau berjaya dan memperoleh kembali takhtanya. Tabariji menyetujui saran atau nasehat de Freitas dan melakukan konversi ke agama Kristen dengan nama baptis Don Manuel. Setelah selesai dibaptis, Tabariji alias Don Manuel membuat sebuah surat wasiat yang isinya "menghibahkan pulau-pulau Ambon dan sekitarnya, antara pulau Buru dan Seram, kepada de Freitas dan keturunannya, baik yang sah maupun tidak, selama keluarga itu masih hidup." Dokumen wasiat tersebut dikukuhkan kembali pada 1543 dan 1546. Pemerintah Spanyol di Manila – semasa Spanyol dan Portugis menyatu dalam bentuk uni – bahkan menjadikan surat wasiat itu sebagai alas hak untuk merebut kembali Ambon pada abad ke-17.

Ketika menjalani pemeriksaan di hadapan Raja Muda Portugis di Goa, Tabariji alias Don Manuel membuat pembelaan diri dari semua tuduhan Gubernur Fonceca yang membuat ia dimakzulkan dari takhta, ditangkap kemudian diasingkan. Pledoi Tabariji berhasil meyakinkan Raja Muda Portugis dan ia dibebaskan dari seluruh dakwaan. Raja Muda lalu memerintahkan pembebasan Don Manuel, merehabilitasi nama baiknya dan mengembalikannya dalam kedudukan semula sebagai Raja Ternate. Don Manuel kemudian diberangkatkan ke Ternate, tetapi meninggal dalam pelayaran antara Goa dan Malaka pada 1546. Sebelum meninggalkan Goa, Don Manuel memproklamasikan Ternate sebagai kerajaan Kristen dan menjadi bagian (*vazal*) Kerajaan Portugis.

Sementara itu, sukses de Ataide melawan Jailolo telah menarik perhatian Kolano Mamuya dan *Sangaji* Tolo, dua tokoh penting di Kerajaan Moro, Halmahera Utara, untuk melakukan pendekatan terhadapnya. Pendekatan ini dilakukan untuk menghadapi tetangga-tetangga kerajaan Moro yang Muslim, yaitu Ternate dan Jailolo, yang tengah mengincar Moro setiap ada kesempatan. Konon lantaran ancaman tersebut, Raja Mamuya meminta bantuan kepada Gonsalo Veloso, seorang pedagang Portugis yang telah menetap lebih dari 27 tahun di Maluku dan menikah dengan adik Sultan Ternate. Veloso menasehati Raja Mamuya bahwa untuk memperoleh perlindungan Portugis "atas jiwa dan kerajaannya," ia harus memeluk agama Kristen. Raja Mamuya dan *Sangaji* Tolo akhirnya dibaptis di benteng Gamlamo, Ternate, dalam suatu upacara megah yang dipimpin pastor Simon Vaz dan dihadiri Gubernur de Ataide. Mereka memperoleh nama baptis Don Joao de Mamuya untuk Raja Mamuya, dan Don Tristiao de Ataide de Tolo untuk *Sangaji* Tolo.

Konversi agama yang dilakukan Raja Mamuya dan *Sangaji* Tolo memiliki pengaruh yang signifikan dalam bentuk penolakan ataupun sebaliknya. Dalam suatu bentrokan yang terjadi kemudian antara orang-orang Muslim Galela pendukung pasukan Katarabumi dari Jailolo dan Don Joao de Mamuya beserta pengikut-pengikutnya, Raja Mamuya beserta keluarganya mati

terbunuh. Bahkan, pastor Simon Vaz sendiri juga dibunuh pada 1535 dalam suatu pesta keagamaan.

Kerajaan Moro adalah daerah pensuplai bahan pangan untuk Ternate sejak lama. Dari kerajaan ini, terkirim beras, sagu dan ikan ke Ternate serta beberapa daerah lainnya. Karena yakin akan perlindungan Portugis terhadapnya bila terjadi konflik, sejak peristiwa pembunuhan Raja Mamuya umat Kristen Moro menghentikan suplai bahan pangan untuk Ternate serta menolak posisi dominan Ternate dalam hubungannya dengan Moro.¹⁶

Penulis sejarah gereja Katolik membagi evangelisasi Kristen di Maluku dalam 2 bagian. Bagian pertama disebut sebagai: *Pre-xaverian Christianity*, dan bagian kedua sebagai masa *Xaverian Christianity*.¹⁷ Kemajuan pesat dicapai pada masa kedua. Sampai 1555 di Moro saja telah berhasil dikonversi paling tidak 30 pemukiman, padahal 9 tahun sebelumnya baru tercatat 7 pemukiman yang berhasil digarap.

Dalam bulan Juli 1557, Frater Antonio Caz berhasil membaptis sekitar 6 hingga 7 *sangaji* Bacan, dan dua setengah bulan berikutnya ia berhasil membaptis Sultan Bacan Alauddin I dan keluarganya serta beberapa *bobato*-nya. Sultan memilih nama baptisnya Don Joao, sama seperti nama yang dipakai Raja Portugis saat itu dan Raja Moro di Mamuya. Tetapi, Sultan Bacan, yang permaisurinya adalah putri Kahirun dan adik kandung Babullah, kemudian kembali lagi ke agama Islam setelah mendapat tekanan Sultan Khairun. Sultan Bacan yang telah murtad dari agama Kristen itu wafat pada 1577. Menurut sumber-sumber Portugis, ia diracuni Babullah. Putranya Don Henrique meneruskan takhta dan menempuh garis kebijakan ayahnya melawan Ternate dengan bantuan Portugis.

Pada 1580/1581 sebuah rumor beredar di Tidore bahwa sultan dan rakyatnya akan berdamai dengan gereja tetapi rumor itu tidak benar. Pada 1585 dan 1598, penguasa Bacan itu melarikan diri ke Tidore dan meminta perlindungan, karena tidak tahan menghadapi tekanan-tekanan keras penguasa Portugis setempat.

Pada masa ini, kedaton Bacan berlokasi di Kasiruta, sementara Labuha berada di bawah seorang *sangaji* yang masih keluarga sultan. Sangaji Labuha Rui Pereira berikut rakyatnya telah memeluk Kristen sejak 1557. Tetapi sultan mereka, Don Joao, murtad dari Kristen yang mengakibatkan *sangaji* dan rakyatnya ramai-ramai ikut murtad. Tetapi, pada 1580, kembali mereka murtad dan memeluk agama Kristen.

Ketika Belanda merampas benteng Portugis di Ambon dan Tidore pada 1605, Frater Fonceca meninggalkan posnya di Labuha dan bersama pembantunya Antonio Pereira, mengungsi ke Siau.¹⁸ Misi Jesuit kembali menempati posnya di Labuha pada 1609, di bawah otoritas Spanyol yang menguasai kembali Maluku sejak penyerbuannya ke Ternate pada 1606. Otoritas Spanyol menempatkan Frater Masonio. Tetapi, ketika Belanda menyerbu Bacan, Lorenzo Masonio kembali mengungsi ke Tidore.

Berakhirnya Misi Jesuit di Maluku

¹⁶ Andaya, *Op.cit.*, p. 123.

¹⁷ Hubert Jacobs S.J.,ed. *Documenta Malucensia*, Vol.I p.12.

¹⁸ *Documenta*, Vol.II p.11

Tugas misi Jesuit di Maluku tidak terlepas dari beberapa faktor. *Faktor pertama*, motif politik yang kental. Motif politik ini sangat mempengaruhi tugas-tugas misi, terutama di Moro dan Bacan. Khairun sendiri pada mulanya begitu toleran dan banyak membantu pekerjaan-pekerjaan misi. Ketika terjadi gangguan tugas-tugas misi di Morotai, Khairun mengirimkan sebuah *juanga* dengan 400 pasukan, dan dengan pedang terhunus di tangan, pasukan itu diperintahkan memabat habis para perusuh, sekalipun muslim. Karena tugas-tugas misionaris oleh penguasa Portugis diramu dengan elemen-elemen politik, maka pada masa di mana nuansa politik Ternate-Portugis berada pada strata baik, misalnya antara tahun 1530-1570, hasil-hasil yang dicapai misi juga sangat bagus Tetapi, ketika konflik politik mewarnai hubungan Ternate-Portugis, maka tugas-tugas misi pun menurun.

Faktor kedua, kebencian kepada penguasa Portugis. Di antara 20 gubernur Portugis yang bertugas di Maluku, hanya Antonio Galvao, gubernur ke-7 (1536-1540) yang disenangi rakyat. Bahkan, rakyat Ternate mengajukan petisi kepada Raja Portugal agar Galvao dijadikan gubernur seumur hidup. Tetapi gubernur selebihnya adalah orang-orang yang tak disukai karena berbagai tindakannya. Tristao de Ataide, misalnya, memulai debutnya dengan bersikap kejam agar ditakuti rakyat. Hal serupa juga dilakukan Diego Lopez de Mesquita, yang hipokrit dan telah membunuh Sultan Khairun.

Faktor ketiga, khususnya di Moro, konversi rakyat setempat ke agama Kristen, merupakan manifestasi dari *menukar keamanan diri dan harta benda*. Raja Moro Toilisa yang berdomisili di Mamuya, bersedia mengonversi agamanya untuk memperoleh jaminan keamanan dari pasukan Portugis. Sebelumnya, hal serupa juga diupayakan Jordao de Freitas terhadap Tabariji, ketika berada di pengasingannya di Goa. Konversi agama dengan sistem ini menjadikan umat yang dikonversi tidak punya akar yang kuat. Orang-orang Kristen Morotai misalnya, juga Bacan, setelah tidak memperoleh kunjungan misi selama 5 tahun, banyak yang kembali lagi ke agama asli mereka, yakni Islam.

Faktor keempat, pembunuhan terhadap Sultan Khairun telah menimbulkan akibat-akibat serius, baik bagi penguasa Portugis, Misi Jesuit, maupun umat Kristen pribumi. Pada 25 Februari 1570, Sultan Khairun – yang selama ini tidak henti-hentinya memberi kemudahan dan bantuan kepada Misi Jesuit – mati dibunuh Portugis di dalam benteng Gamlamo. Ia digantikan puteranya, Babullah. Peristiwa pembunuhan Khairun dan naiknya Babullah ke tampuk kekuasaan Kesultanan Ternate memiliki dampak negatif bagi aktivitas Misi Jesuit di Moro, Bacan dan daerah-daerah lain, termasuk di Ternate sendiri. Sejak saat itu, serangan-serangan terhadap pusat-pusat misionaris di Moro dan Bacan mulai dilancarkan orang-orang Islam. Sampai akhir 1570, hanya tinggal dua pastor yang bertugas di Moro: Nunes dan Gomes. Sementara tentara Portugis hanya tersisa 50 orang. Sisanya sudah kembali ke Ternate, lantaran situasi yang mengancam.

Ketika dinobatkan, Babullah bersumpah menuntut balas atas kematian Khairun dan akan berjuang hingga orang Portugis terakhir meninggalkan Ternate. Sumpah ini direalisasikannya dalam sejumlah kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan Misi Jesuit. Semua kemudahan yang telah diberikan Khairun kepada Misi Jesuit dicabut oleh Babullah. Ia juga mengambil tindakan tegas terhadap pasukan Portugis yang ada di Moro, tidak terkecuali terhadap orang-orang sipil Portugis dan para pastor, bahkan terhadap orang-orang Kristen pribumi.

Pada 1571, sebuah ekspedisi Ternate berkekuatan 30 *juanga*¹⁹ dikirim menyerang Moro dan membunuh orang-orang Portugis di mana pun ditemukan. Serangan ini membuat Misi Jesuit

¹⁹ Satu *juanga* memuat sekitar 200 hingga 300 orang.

kocar-kacir dan seluruh aktivitas misi dihentikan. Semua personil Misi Jesuit, berikut ribuan orang Kristen pribumi, meninggalkan Moro menuju Ternate di bawah pimpinan Gonsalo Pereira Maramaque dan Nicolau Nunes.²⁰ Dalam evakuasi ini, beberapa perahu yang ditumpangi pengungsi Moro tenggelam ditelan badai. Sementara yang berhasil mencapai Ternate tinggal separohnya dan menjadi beban Gubernur Portugis yang baru, de Ataide.

Selama 36 tahun beroperasi di Maluku, Misi Jesuit telah menunjukkan prestasi yang gemilang, khususnya di Moro dan Bacan. Walaupun akhirnya dihentikan Sultan Babullah, tetapi dari segi misi yang diembannya, Misi Jesuit mencatat hasil-hasil capaian yang cukup signifikan. Hanya karena kesalahan kebijakan politik Gubernur Mesquita membunuh Khairun, bencana yang tidak diperhitungkan dan tidak diduga menimpa bukan hanya otoritas dan militer Portugis, tetapi juga harus dipikul Misi Jesuit dan bahkan orang-orang Kristen pribumi.

Setelah Spanyol kembali menguasai Ternate, evangelisasi masih berlangsung secara terbatas. Di Ternate misalnya, misionaris bekerja terbatas pada pemeliharaan rohani tentara Spanyol dan Filipina yang berada dalam benteng, serta rakyat kota – yakni orang-orang kulit putih dan para budak. Di Tidore, pada 1610 terdapat Frater Jonge de Fonceca yang bekerja untuk garnisum Spanyol setempat. Di Bacan, hanya pada 1609 ada kunjungan Frater Masonio. Tetapi, ketika Belanda menyerbu benteng kecil Spanyol dan menaklukkannya, Frater Masonio memilih mengungsi ke Tidore.

Di Moro, Frater Masonio melakukan kunjungan singkat pada 1606, dan kemudian ditempatkan Frater Jonge de Fonceca hingga akhir tahun itu. Pada 1607, Frater Masonio, Leitao, Simi, Bautista, dan Scalamonti, bertugas masing-masing di Tolo, Cawa, Sakita, dan Mira. Tetapi, beberapa di antara mereka harus kembali ke Ternate karena sakit. Ketika Gubernur Spanyol terakhir di Ternate, Jeronimo de Silva, menarik pasukan Spanyol dari Moro pada 1613, maka Misi Jesuit di daerah inipun berakhir untuk selanjutnya punah.²¹

Agama Kristen Protestan

Gereja Kristen Protestan memulai kehadirannya di Maluku pada 1621. Cikal bakalnya adalah perkumpulan "Pelayat Orang Sakit," yang memberikan pelayanan spiritual kepada orang-orang sakit. Pada 1626, perkumpulan yang dipimpin Tobias dan kawan-kawannya ini diberi izin operasional oleh Gubernur Kompeni Houtman. Pada tahun yang sama, telah bertugas di Bacan Kornelis Maas, dan Geritszoon Bloem di Tafasoho, Makian.²²

Sebelumnya, pada 17 September 1624, beberapa pendeta yang dipimpin Jan Herman – pernah menjadi penginjil di Manila selama 13 tahun – dikirim dari Batavia ke Ternate. Rombongan pendeta ini melakukan tugas tidak atas nama resmi Kompeni, tetapi secara individual. Pendeta resmi pertamanya adalah Gregorius Candidius, yang diangkat dengan persetujuan Pemerintah Pusat Kompeni di Batavia dan tiba di Ternate pada 1626. Namun ia sulit bergerak melakukan tugasnya karena kurang mendapat dukungan dari Gubernur Maluku, Jaques Le Fabre. Candidius pernah melaporkan sepak terjang Le Fabre kepada Dewan Gereja Pusat di Batavia, ketika kembali ke sana lantaran bentrok dengan sang Gubernur. Baru setelah pergantian

²⁰ John Villers, *Op.cit.*, p. 287.

²¹ Documenta, Vol.III pp.14-17.

²² Valentijn, *Op.cit.*, p. 386; Adnan Amal, *Op.cit.*, p. 42.

Le Fabre, Candidius kembali ke Ternate disertai seorang pendeta dari Dewan Gereja Hindia Belanda di Batavia.

Setibanya kedua pendeta itu di Ternate, aktivitas penginjilan kembali digiatkan dan keduanya mulai menggarap daerah Makian, Bacan dan Obi. Pada 1667, sebuah gereja telah didirikan masing-masing di Bacan dan Obi, serta ritual peribadatan Kristen mulai diselenggarakan. Khutbah-khutbah diberikan dalam bahasa Melayu dan Belanda. Dalam laporannya kepada Gubernur Antonie Huardt di Ambon, Candidius – pendeta yang bertanggung jawab atas tugas-tugas penginjilan di Maluku – mengeluh bahwa ketidakberhasilan mereka dalam tugasnya disebabkan hambatan dan kendala yang datang dari para sultan, yang secara terang-terangan menunjukkan sikap antipati kepada mereka. Namun, dalam laporan itu juga digarisbawahi kesuksesan para penginjil dalam misinya di Manado dan Sangir Talaud.

Selama lebih dari dua setengah abad aktivitas penginjilan di Maluku (1621-1880), hasil yang dicapai kurang memuaskan. Di Ternate, komunitas Kristen terbatas di "Kampung Serani" yang sebagian besar penduduknya bukan etnis Maluku Utara, tetapi Manado, Sangir dan Ambon. Sementara di Makian dan Tidore, bisa dikatakan penginjilan "tidak berbekas." Di Bacan, karena digarap lebih intens, hasilnya agak memadai.

Kemajuan-kemajuan penting penginjilan baru terjadi pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Halmahera Utara dan Halmahera Timur, yang dilakukan sebuah perkumpulan zending negeri Belanda, yaitu UZV (Utrechtsche Zending Vereniging, "Perkumpulan Zending Utrecht"). Perkumpulan penginjil ini didirikan di Utrecht pada 1865 dengan tujuan awal melakukan penginjilan di Papua. Tetapi, Residen Ternate pada waktu itu, P. van der Crab (1863-1867), meminta UZV beroperasi di Halmahera. Permintaan ini dikabulkan pimpinan UZV, dan pada 14 April 1866 rombongan pertama pendeta UZV tiba di Galela. Rombongan ini terdiri dari dua pendeta, masing-masing van Dyken dan H.H. Bode, kemudian disusul pendeta ketiga, Klaassen. Pada tahun berikutnya, tiba pula pendeta keempat, Been.

Galela merupakan pos pertama UZV di Halmahera. Kota ini sebenarnya berpenduduk hampir seluruhnya Muslim. Jadi, sebenarnya kurang tepat menempatkan pos zending di sini. Tetapi, atas dasar pertimbangan yang sulit dipahami, UZV menempatkan posnya di sana. Akibatnya, selama lima tahun pertama aktivitas zending di sini, UZV tidak mencatat keberhasilan apapun.²³

Sampai 1870, Klaassen dan Bode masih bekerja dalam misi penginjilan di Galela. Sebuah pos baru dibuka di Leate (Soakonora) dan Klaassen ditugaskan memimpinnya. Pada 1873, Klaassen kembali ke negerinya dan digantikan de Graaf, yang pernah bertugas di Ternate selama sepuluh tahun sebagai wakil pendeta. Selama bertugas di pos Leate, Graaf pernah mengeluh karena "harus menjaga sebuah gereja kecil tanpa seorang Kristen pun." Ketika de Graaf kembali ke Belanda, pos Leate dirangkap kepemimpinannya oleh van Baarda. Namun, karena gagal menunaikan misinya, pos ini ditutup pada 1897. Sejumlah kecil orang Kristen pribumi yang ada di kampung sekitarnya – Seki, Togawa dan Soakonora – diurus secara individual oleh pos UZV di Duma.

Pos zending berikutnya didirikan UZV di Tobelo pada 1870 oleh Been, yang memimpinnya hingga 1878. Tidak jelas apa yang menyebabkan Been dipecat dari

²³ Baretta, *Op.cit.*, p. 62.

kepemimpinannya di pos Tobelo pada 1878. Tetapi, posisinya kemudian digantikan oleh pendeta Hueting yang tiba di Halmahera sejak 1876.

Pada 1875, pemukiman UZV di Galela terbakar habis. Van Dyken lalu memindahkan posnya ke Duma, sebuah perkampungan di pedalaman Galela. Duma merupakan pos pusat UZV di Halmahera Utara. Bersamaan dengan pembangunan pemukiman UZV, didirikan pula sebuah sekolah dasar kelas 3. Pemilihan Duma sebagai pos pengganti barangkali didasarkan pada kenyataan bahwa pada 1871 beberapa pribumi Duma meminum "ake sarani" sebagai tanda konversi mereka ke agama Kristen. Pada akhir 1876, van Dyken cuti ke negeri Belanda, dan kembali lagi ke Duma pada 1 Februari 1877. Pada 1879, Duma resmi menjadi sebuah kampung dengan *kimalaha* (kepala kampung) tersendiri.

Van Dyken bekerja di Duma sekitar 35 tahun, dan selama itu pula Duma – berpenduduk sekitar 200 jiwa pada 1899 – menjadi komunitas Kristen. Dengan demikian, selama 35 tahun melakukan aktivitas zending, van Dyken baru berhasil mengonversi 200 orang ke dalam agama Kristen. Setelah van Dyken meninggal, ia digantikan menantunya, H.J. van Baarda.

Pada 1900, UZV yang dipimpin van Baarda melebarkan sayapnya ke Kao, Loloda, Buli, Weda, pulau Morotai, Dodinga dan Jailolo.²⁴ Para pendeta UZV yang memimpin pos-pos zending di Halmahera ini adalah: van Baarda (Galela), J. Metz (Tobelo), C. Maan (Buli dan Weda), J. Fortgens (Jailolo) G.J. Ellen (Kao), A. van Essen (Morotai), H. Labchuit (Dodinga), D.C. Prins (Loloda). Sementara J.C. Munk mengepalai sekolah guru di Tobelo.

Ada dua pendeta yang, disamping tugas pokoknya menjalankan zending, juga melakukan penelitian mengenai bahasa dan antropologi. Keduanya adalah van Baarda dan A. Hueting. Yang terakhir ini menghasilkan berbagai tulisan dan buku tentang Tobelo. Sementara van Baarda berhasil menulis sebuah kamus Galela-Belanda, tata bahasa Loloda dan berbagai tulisan tentang kepercayaan asli orang Galela. Ia menjadi anggota lembaga terkenal KTL (Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde van Ned. Indie), dan sejak 1906 menjadi anggota korespondensi Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Belanda di Amsterdam. Pada 1915, Hueting dipindahkan dari Tobelo ke Buru, sementara van Baarda kembali ke negeri asalnya, Belanda, pada 1917. Pengganti van Baarda di Galela adalah Boger.

Sampai 1908, sebanyak 80 sekolah dasar dan sebuah sekolah guru berhasil dibangun UZV di berbagai posnya secara merata. Pemerintah Belanda, sejak 1895, telah memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah tersebut. Anggaran belanja UZV sendiri setiap tahun berjumlah 40.000 hingga 50.000 gulden, yang diperolehnya dari pusat UZV di negeri Belanda. Sebagian anggaran itu digunakan membiayai rumah sakit yang didirikan di Tobelo, dan sisanya untuk operasional zending. Untuk menjadikan UZV mandiri di bidang keuangan, Hueting – ketika bertugas di Tobelo – membuka "Perkebunan Kelapa Wari" di Tobelo Utara. Usaha ini berhasil baik. Perkebunan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam membiayai separuh dari kegiatan UZV.

Disamping itu, UZV pernah membuka pendidikan pembantu pendeta di Tobelo dan Galela dengan tujuan menghasilkan pembantu-pembantu pendeta lokal. Tetapi, hasilnya dinilai kurang memuaskan. Karena itu, UZV lebih banyak menggunakan tenaga pembantu pendeta yang didatangkan dari Ambon.

²⁴ *Ibid.*, p. 64.

Ketika Perang Dunia ke-2 pecah, UZV menghentikan seluruh kegiatannya di Halmahera Utara. Tugas-tugasnya kemudian diambil alih oleh Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH), sebuah perkumpulan penginjil lokal.

BAB 10

Lahirnya VOC

Eksistensi VOC

VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*, “Persekutuan Dagang Hindia Timur”) didirikan pada 20 Maret 1602 sebagai gabungan beberapa perusahaan Belanda yang saling bersaing. Untuk menghentikan persaingan itu, empat wilayah di negeri Belanda – masing-masing Amsterdam, Zeeland, de Maas serta Noord Holland – bergabung dan membentuk suatu perusahaan dengan nama *Verenigde Oost Indische Compagnie*, disingkat VOC.

Wilayah-wilayah yang ikut bergabung diwakili sistem majelis yang memiliki sejumlah direktur. Seluruh direktur VOC berjumlah 17 orang: 8 dari Amsterdam, 4 dari Zeeland, dan masing-masing 2 dari de Maas dan Noord Holland. Ke-17 direktur VOC ini disebut *De Heren Zeventien* (“Tuan-tuan 17”). Wilayah Amsterdam diwakili 8 direktur, lantaran modal dan perannya yang dominan. Wilayah ini menyeter f. 3,7 juta untuk modal awal VOC, yang seluruhnya berjumlah f. 6.459.840. Enam tahun kemudian, modal tersebut diperbesar menjadi 30 juta Gulden.

VOC didirikan dengan akta Oktroi dari *Staten Generaal* (Parlemen Belanda). Ia memiliki hak dagang di suatu kawasan yang amat luas, terbentang dari Tanjung Pengharapan sampai Selat Magelhaens, termasuk pulau-pulau di selatan Pasifik, Kepulauan Jepang, Sri Lanka dan Cina selatan. Selain melakukan perdagangan umum, ekspor-impor, perkapalan yang berskala monopoli, ia juga diberi kewenangan membentuk angkatan perang, mengawasi para raja dari kerajaan-kerajaan yang terdapat di dalam wilayah kegiatannya, dan atas nama *Staten Generaal* membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan itu. Ia berhak menyatakan perang dan menerima perdamaian, serta memaksa para raja di wilayahnya tunduk kepada kekuasaan dan aparat VOC. Di samping itu, kewenangannya yang lain adalah membuat undang-undang dan peraturan, serta membentuk pengadilan (*Raad van Justitie*) dan mahkamah agung (*Hoog Gerechtshof*).

Sewaktu pemberian *octroi* pertama pada 1602, tidak ada ketentuan mengenai hubungan atau kewajiban VOC atas pendidikan dan Agama Kristen. Tetapi, pada 1617, *Staten Generaal* menginstruksikan Gubernur Jenderal dan *Raad van Indie* untuk bertanggung jawab menyebarkan agama Kristen serta mengajarkannya melalui sekolah-sekolah dengan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pemahaman yang memadai atas bahasa tersebut dipandang penting bagi pribumi Indonesia penganut agama Kristen.¹

Tetapi, Caspar Wilter – pendeta pertama di Pulau Ambon – menulis bahwa setelah beberapa tahun berada di Ambon, ia menemui kesulitan menggunakan Bahasa Belanda sebagai

¹ Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1967, p.191. Lihat juga I.J. Brugmans *Geschiedenis van het Onderwijs in Ned. Indie*. Groningen-Batavia: J.B. Wolter, 1938, p.19.

bahasa pengantar. Karena itu, ia meminta agar buku-buku berbahasa Belanda diganti dengan buku-buku berbahasa Melayu, sebab “tidak mungkin mengajarkan Bahasa Belanda kepada anak-anak negeri pulau ini.”²

Untuk mengkoordinasi wilayah yang luas dan melaksanakan pemerintahan secara langsung, mulai 1610 ditunjuk seorang gubernur jenderal dan sejumlah gubernur wilayah. Sementara untuk memberikan nasehat, pertimbangan dan pengawasan kepada para gubernur, dibentuk Dewan Hindia (*Raad van Indie*) yang dipimpin seorang ketua, seorang wakil ketua, dan 12 anggota. Dewan ini bertugas memberikan keputusan untuk semua kejadian dan transaksi tanpa campur tangan *De Heren XVII*.

Untuk pertama kalinya, *Staten Generaal* mengangkat Pieter Both (1610-1614) dari Amersfoort sebagai Gubernur Jenderal VOC. Tetapi, sejak masa Jan Pieterzoon Coen, pengangkatan semua gubernur jenderal dilakukan *De Heren XVII* dengan persetujuan *Staten Generaal*.³

Selama masa jabatan tiga gubernur jenderal pertama, masing-masing Pieter Both, Gerard Reynst (1614-1615) dan Dr. Laurens Reael (1615-1619), pusat kegiatan VOC ditempatkan di Benteng Oranje, Ternate. Pemilihan Ternate sebagai markas besar VOC terutama didasarkan pada pertimbangan kedudukan strategis Maluku ketika itu sebagai sentra perniagaan rempah-rempah, dan Ternate sebagai kerajaan Maluku pertama yang memberikan hak monopoli perdagangan rempah-rempah kepada VOC.

Ketika Jan Pieterzoon Coen menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC ke-4, pusat VOC di Belanda berpendapat bahwa perusahaan tersebut memerlukan sebuah pusat kegiatan yang lebih strategis dan lebih mudah menjangkau daerah-daerah operasi VOC yang demikian luas. Jan Pieterzoon Coen kemudian membangun Jakarta, yang diberi nama *Batavia*, sebagai markas besar VOC yang baru. Sejak 1620, tempat kedudukan gubernur jenderal VOC dipindahkan dari Ternate ke Batavia. Sementara Maluku sendiri dipimpin seorang gubernur yang berkedudukan di Ternate – bekas pusat kekuasaan VOC selama satu dekade – hingga perusahaan dagang Belanda itu dibubarkan pada 1800. Gubernur pertama Maluku adalah Frederik de Houtman (1621-1623).

Disamping institusi gubernur jenderal dan gubernur wilayah, VOC juga membentuk lembaga pemerintahan umum di Coromandel, Ambon, Banda, Ternate, Sri Lanka dan Malaka, serta institusi pemerintahan khusus di Tanjung Pengharapan, Makassar, Padang, Timor, Indragiri dan Cochin. Sejumlah kantor juga didirikan di Isfahan, Goruran, Saratte, Agro, Amodobot, Benggala, Palembang, Jambi, Bangka, Siam, Logor, Jepang, dan lain-lain.

VOC dan Maluku

Kedatangan VOC di Maluku Utara bermula dari undangan penguasa Ternate. Ketika Spanyol menyerbu Benteng Gamlamo pada 1606, mereka berhasil menangkap Sultan Saidi beserta hampir seluruh *bobato*-nya yang terdapat di dalamnya. Mereka kemudian diasingkan ke Manila sepanjang hayatnya – hanya Kaicil Hamzah yang dapat kembali ke Ternate pada 1627, setelah hidup selama 21 tahun dalam pengasingan.

² Vlekke, *ibid*.

³ J. De Louter, *Handboek van het Staat en Administratief Recht van Ned. Indie*. 'sGravenhage: Martinus Nijhoff, 1914, p. 61.

Dalam penyerbuan Spanyol itu, Jogugu Hidayat dan Kaicil Ali serta Kimalaha Aja berhasil meloloskan diri. Jogugu Hidayat kemudian mengutus Kaicil Ali – ketika itu berusia sekitar 20 tahun – ditemani Kimalaha Aja ke Banten untuk meminta bantuan VOC mengusir Spanyol dari Ternate.

Pada 29 Maret 1607, Laksamana Matelief de Jonge dan armadanya tiba di Ternate atas upaya Kaicil Ali dan Kimalaha Aja. Tidak lama kemudian, tepatnya 26 Juni 1607, de Jonge menandatangani perjanjian dengan Kesultanan Ternate tentang hak monopoli perdagangan rempah-rempah VOC, pembangunan Benteng Oranje dan pemukiman Willemstad sebagai tukar guling atas bantuan VOC memerangi Spanyol.⁴

Runtuhnya Kekuasaan VOC

Dalam bulan Desember 1794, Kaisar Napoleon Bonaparte dari Perancis menyerbu dan menduduki Belanda. Ia kemudian membentuk pemerintahan boneka dan mengangkat adiknya, Louis Bonaparte, sebagai Raja Belanda. Sementara Raja Belanda sendiri, Willem V, berhasil meloloskan diri ke Inggris dan menetap di Istana Kew.

Selama menetap di Kew, Willem V mengeluarkan sejumlah surat dan instruksi untuk negeri Belanda maupun daerah-daerah jajahannya, yang dikenal sebagai “surat-surat Kew.” Dokumen-dokumen ini antara lain memerintahkan kepada para pejabat di wilayah jajahan Belanda untuk menyerahkan wilayah mereka kepada Inggris, supaya tidak jatuh ke tangan Perancis.

Berdasarkan dokumen Kew, Inggris – yang memiliki lebih banyak kapal, pasukan, dan senjata, ketimbang Belanda (VOC) – berhasil merebut dan memperoleh beberapa pos Belanda di Indonesia. Pada 1795, Inggris menduduki Padang, kemudian Ambon pada 1796. Setahun kemudian, ia mulai menuntut penyerahan seluruh wilayah Maluku.⁵

Pada saat yang sama, kondisi VOC – baik di bidang militer maupun ekonomi – tengah mengalami krisis yang amat parah. Selama Perang Inggris IV (1780-1784), VOC semakin terpisah dari negeri Belanda. Untuk mempertahankan Batavia dari ancaman Inggris, VOC mesti meminjam sekitar 2300 prajurit Surakarta dan Yogyakarta, sekalipun para prajurit itu hanya “nongkrong” dan tidak pernah bertempur, karena serangan Inggris yang dikuatirkan itu tidak pernah dilaksanakan.⁶

Di bidang keuangan, VOC sangat terpuruk, karena dililit utang yang melebihi kapital dan asetnya. Sejak 1781, VOC tidak dapat lagi membagikan deviden kepada pemegang sahamnya, seperti yang biasa dilakukan di setiap akhir tahun buku. Masyarakat dan dunia bisnis di negeri Belanda mulai mempertanyakan hal ini.

⁴ Majalah bulanan *Intisari*, edisi Februari 2002 (pp. 182 ff.) memberitakan bahwa mulai Maret 2002, Pemerintah Belanda menyelenggarakan peringatan sepanjang tahun itu berkenan dengan ulang tahun VOC yang ke-400. Berbagai pameran dan diskusi akan diselenggarakan di Amsterdam, kota kelahiran VOC.

⁵ M.C. Rickles, *Sejarah Indonesia Modern*, tr. Dharmono Hardjowidjono, Yogyakarta: Gajah Mada Univ. Press, 1994, pp. 173 ff.

⁶ *Ibid.*, pp. 168 f.

Berkeenaan dengan krisis tersebut, restrukturisasi di pucuk pimpinan VOC mulai dilakukan Pemerintah Belanda. Manajemen VOC, *De Heren XVII*, yang selama hampir dua abad mengendalikan perusahaan ini dibubarkan dan digantikan dengan sebuah komite yang bertindak sebagai direksi sekaligus menjalankan manajemen perusahaan yang sudah sekarat itu. Sejak Mei 1795, *Staten Generaal* mengusulkan kepada Pemerintah Belanda agar direksi VOC, *De Heren XVII*, diganti dengan sebuah komite yang diberi nama Komite Urusan Dagang dan Pendudukan Hindia Timur (*Committee tot de Zaken van den Oost Indischen Handel en Bezettingen*). Komite ini diusulkan beranggotakan 28 orang.⁷

Di akhir Desember 1799, Pemerintah Belanda memutuskan tidak memperpanjang lagi hak oktroi VOC, yang berakhir pada 31 Desember 1799. Dan sejak 1 Januari 1800, VOC dibubarkan secara resmi. Seluruh aktiva dan pasivanya, berikut daerah kekuasaan serta pemerintahannya di daerah-daerah jajahan, diambil-alih Pemerintah Belanda. Dengan demikian, berakhirilah riwayat sebuah perusahaan dagang terbesar yang hampir dua ratus tahun beroperasi di nusantara. Di Maluku, VOC beroperasi dari 1607 hingga 1800, dengan markas awalnya di Ternate.

Sebab-sebab Keruntuhan VOC

Pada seratus tahun pertama riwayat VOC, perusahaan dagang ini meraih sukses luar biasa. Ia berhasil mencetak laba yang cukup menggiurkan. Keberhasilan ini disebabkan *De Heren XVII* menangani secara langsung manajemen VOC. Operasi-operasinya di Asia, terutama di Indonesia, berada di bawah kendali tangan-tangan terampil. Tetapi, riwayat seratus tahun kedua VOC adalah riwayat merosotnya perusahaan dagang ini secara gradual.

Sukses VOC di bidang niaga tidak diimbangi dengan sukses di bidang militer. Pasal 34 dan 35 dari hak oktroi menentukan bahwa siapapun, kecuali VOC, dilarang melayari lautan antara Tanjung Pengharapan sampai Selat Magelhaens. Namun, dalam kenyataannya, kapal-kapal Inggris, Portugis dan Spanyol dengan leluasa melayari perairan di daerah tersebut, tanpa kontak senjata yang berarti.

Sukses militer VOC menghadapi para pesaing Eropa di Indonesia barangkali hanya terjadi di Ambon, ketika berhasil mengusir orang-orang Portugis dari bentengnya pada 1605. Benteng Portugis itu kemudian diganti namanya menjadi New Victoria, atau lebih dikenal sebagai Benteng Victoria. Tetapi, keberhasilan ini, untuk sebagian besarnya, dikarenakan bantuan orang Hitu dan penduduk pribumi Ambon yang tidak tahan ditindas Portugis. Di luar nusantara, sukses VOC yang bisa dicatat adalah keberhasilannya menaklukkan Malaka dan mengusir Portugis dari sana pada 1641. Sementara di Filipina, VOC tidak bisa berbuat apapun dalam menghadapi Spanyol yang menduduki negeri tersebut.

Pada dekade kedua menjelang 1800, VOC mengalami kemerosotan laba yang sangat drastis. Hal ini terutama disebabkan pengeluaran biaya peperangan yang demikian besar, sewaktu menurunnya daya saing VOC terhadap Inggris, Portugis dan Spanyol. Tetapi, persaingan yang lebih kuat sebenarnya datang dari para pedagang Cina, Jawa, Gujarat dan Arab, yang oleh VOC dipandang lebih berbahaya dari pedagang Eropa. Di Maluku, penyelundupan yang dilakukan pedagang asal Bugis dan pedagang lokal – seperti pedagang Tidore dan Bacan – turut berperan serta dalam memerosotkan laba VOC setempat.

⁷ De Louter, *Op.Cit.*, p. 70.

Terdapat banyak sebab yang meruntuhkan VOC, disamping yang telah diutarakan. Di bidang sumber daya manusia (SDM), khususnya yang bekerja di Asia, tidak semua SDM VOC berkualitas, terutama pada dekade terakhir kekuasaannya. Sebagian besar aparatnya bukan orang Belanda, tetapi para petualang, gelandangan, penjahat, dan orang-orang bernasib jelek dari seluruh Eropa yang mengucapkan sumpah setia kepada VOC. Ketidakberdayagunaan, ketidakjujuran, nepotisme, dan alkoholisme tersebar luas di kalangan aparat VOC.⁸ Dengan kondisi dan mutu SDM seperti itulah VOC dikendalikan dan dikelola, sehingga *salah urus* merupakan faktor potensial yang mendorong VOC menuju jurang keruntuhan.

Tetapi, faktor korupsi merupakan salah satu potensi besar lainnya yang menjadi penyebab kebangkrutan VOC. Korupsi menjamur hampir di semua lini. Dalam setiap kapal yang berlayar ke negeri Belanda dan negeri-negeri Eropa lainnya yang sarat dengan muatan ekspor, hampir separuh muatannya adalah titipan atau selundupan milik pegawai-pegawai VOC tertentu.

Korupsi dilakukan mulai dari pejabat-pejabat yang bergaji antara 16 hingga 24 Gulden, hingga pejabat paling puncak, seperti gubernur jenderal yang bergaji f. 700. Sebagian besar gubernur jenderal, setelah berhenti dari VOC, mendadak menjadi orang kaya baru. Van Hoorn – pada 1704 menjadi Gubernur Jenderal VOC menggantikan mertuanya, Willem van Outhoorn, yang menjabat Gubernur Jenderal VOC dari 1691-1704 – menduduki jabatan karena praktek nepotisme mertuanya. Seusai menjadi gubernur jenderal, ia kembali ke Belanda pada 1709 sebagai jutawan. Hanya dalam waktu lima tahun masa jabatannya, van Hoorn pulang kampung dengan membawa tak kurang dari 10 juta Gulden, suatu jumlah yang cukup spektakuler di masa itu. Padahal, gaji resminya sebagai gubernur jenderal tidak lebih dari f. 700 perbulan.

Di Maluku, korupsi terbesar dilakukan Gubernur Alexander Cornabe (1780-1793). Ketika dilakukan pemeriksaan kas pada 1792, ditemukan ketekoran dalam jumlah yang cukup besar. Cornabe lalu dikirim ke Batavia untuk menjalani pemeriksaan dan dinyatakan bersalah.⁹ Demikian pula, ketika menyerahkan kekuasaannya kepada Inggris di Ambon – dalam kedudukannya sebagai Gubernur Kepulauan Ambon – pada 17 Februari 1796, Cornabe berhasil menyikat uang Pemerintah untuk dirinya sebesar f. 25.000.

Lantaran korupsi yang demikian parah, keruntuhan VOC sering dituding sebagai *V(ergaan) O(nder) C(oruptie)*, “rontok karena korupsi.” Tindakan korupsi yang paling populer di tubuh VOC adalah penyelundupan barang ekspor, *mark up* nota pembelian, sogokan dalam penerimaan pegawai, hingga pembuatan laporan keuangan palsu.

Ketika Gustaaf Willem Baron van Imhoff diangkat sebagai Gubernur Jenderal Belanda untuk Indonesia (1743-1750), ia dibebani tugas tambahan yang dirumuskan dengan ungkapan “memulihkan kekayaan VOC.” Rumusan tugas tambahan ini bermakna ia harus berupaya memberantas korupsi. Van Imhoff berupaya keras menunaikan tugasnya. Tetapi, ketika baru memulainya, ia dihadapkan pada berbagai kesulitan berkenaan dengan tuntutan Cakraningrat IV di Jawa Timur.

⁸ Ricklefs, *Op.Cit.*, pp. 40 f.

⁹ P.A. Leupe, *De Verdediging van Ternate*. TKI, Nieuwe Volgreeks, deel VIII, 1864, pp. 266 f.

Dampak Pembubaran VOC bagi Maluku

Likuidasi VOC hampir tidak terasa pengaruhnya secara ekonomi bagi Maluku, lantaran Pemerintah Belanda tetap meneruskan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pasal 106 Reglemen Pemerintah Hindia Belanda ketika itu menetapkan: “Penyerahan wajib kepada Pemerintah berkenaan dengan rempah-rempah di beberapa kepulauan Maluku akan diteruskan sampai Raja Belanda menentukan lain.”¹⁰ Akibatnya, kehidupan ekonomi rakyat tidak berubah. Kemiskinan tidak beranjak, bahkan bertambah parah sejak Kompeni melakukan ekstirpasi. Ganti rugi yang dijanjikan untuk kebijakan tersebut tidak pernah diterima rakyat. Itulah sebabnya, dalam kebanyakan kasus, rakyat Maluku bertambah miskin dan merana.

Monopoli *ala* VOC baru dihentikan Gubernur Maluku, Merkus, pada 1836.¹¹ Sejak saat itu, perdagangan bebas mulai berlangsung. Langkah penghapusan monopoli ini juga diikuti dengan penghentian campur-tangan para sultan dalam perdagangan. Sebagai kompensasinya, para sultan diberi tunjangan tahunan oleh Gubernur. Tunjangan tahunan serupa juga diberikan kepada *bobato-bobato* tertentu.

¹⁰ *Handelingen der Regering en der Staaten Generaal betreffende het Reglement op het Beleid der Regering van Ned. Indie*. Utrecht: Hemerink & Zoon, 1857, p. 108 f.

¹¹ *Ibid.*, p. 182.

BAB 11

Maluku, Inggris dan Nuku

Tuntutan Penyerahan Maluku

Gubernur Maluku, Budach, menerima dua pucuk surat dari Gubernur Makassar, Beth, masing-masing bertanggal 9 dan 17 Februari 1796. Kedua surat itu menginformasikan bahwa pada 1 Februari tahun itu armada Inggris – terdiri dari 9 kapal – telah tiba di Bulukumba. Tiga di antaranya bertolak menuju ke timur. Karena itu, Gubernur Makassar telah memindahkan 101 tentara garnisun Makassar untuk memperkuat pertahanan Banda. Tetapi, karena situasi di Maluku sendiri cukup genting, Budach memutuskan tidak mengirim bala bantuan ke Banda.

Pada 29 Maret 1796, tiba di Ternate sebuah perahu arumbai dari Ambon di bawah pimpinan Letnan Marinir Kompeni Nicolaas Pilander yang membawa 6 kelasi dan seorang tentara. Mereka memberitakan kepada Budach bahwa pada 17 Februari 1796, Inggris telah menduduki Ambon, yang diserahkan Gubernur Alexander Cornabe, berdasarkan “surat-surat Kew.” Belakangan, pada 8 Maret 1796, Gubernur van Bockholz juga menyerahkan Banda kepada Inggris.

Di bawah otoritas dokumen Kew pula, pada 17 Februari 1797, Komodor Edward Packenham – komandan eskader kapal perang Inggris – memimpin armada Inggris yang terdiri dari 3 kapal, dengan kapal perang *Resistance* sebagai kapal komando, tiba di Talangame, Ternate. Packenham lalu membawa dua perwiranya menemui Budach di Benteng Oranje dan menyerahkan dua pucuk surat tertutup yang ditulis dalam bahasa Inggris. Surat bertanggal 17 Februari 1797 dan ditandatangani Packenham itu menuntut penyerahan Maluku kepada Inggris. Surat lainnya berisi salinan proklamasi Britania Raya dan Maluku di bawah protektorat Ratu Inggris.

Budach menolak tuntutan penyerahan wilayahnya dengan alasan belum ada instruksi dari Batavia. Packenham kembali ke kapal dan armada Inggris pun berlabuh di selat Hiri. Pada malam harinya, sekitar pukul 23.00, kapal *Resistance* menembaki Benteng Toloko ketika melewatinya.¹

Setelah penolakan Budach, armada Inggris bertolak pada 22 Februari ke Kema kemudian ke Manado dengan menggunakan bendera Belanda. Ketika tiba di Kema pada 23 Februari, penguasa Kompeni setempat mengira eskader itu milik Belanda. Komandan kapal Lassum, Vliegenhardt, berikut beberapa kapal kecil milik Belanda lain yang dipenuhi muatan beras, mengira armada Inggris itu sebagai kapal Belanda, dan menyerahkan kapalnya kepada Packenham. Setelah naik ke *Resistance*, barulah Vliegenhardt menyadari eskader tersebut sebagai kapal-kapal Inggris. Komandan eskader Inggris lalu mengirim pasukannya dari Kema melalui darat ke Manado.

¹ Leupe, *Op.Cit.* pp.282 ff.

Setibanya di Manado, pasukan Inggris menuntut Manado diserahkan kepada Inggris. Residen Manado, Durr, mula-mula menolak dengan alasan yang sama seperti diajukan Budach di Ternate. Keesokan harinya, Komodor Pakenham dan ketiga kapal perangnya tiba di Manado. Setelah melihat dan menyadari kekuatan militer Inggris yang tidak dapat dibendung, Durr bertekuk lutut serta menyerahkan Manado kepada Inggris.

Dalam surat tertanggal 26 Februari 1797 kepada Budach, Durr melaporkan sebab-sebab dan alasan-alasan penyerahan Manado: *Kompeni hanya memiliki 24 serdadu yang sehat, sementara pasukan Alifuru dari Ternate yang diperbantukan telah melarikan diri lengkap dengan senjatanya, setelah memanjat tembok benteng. Dalam sekejap, mereka telah berada di hutan. Pasukan Inggris dapat menduduki Benteng Amsterdam hanya dengan kekuatan 20 tentara dan seorang perwira.*²

Surat Durr sampai ke tangan Budach pada 8 Maret tahun yang sama. Gubernur Belanda ini tidak dapat berbuat apa-apa ketika membacanya. Setelah menerima kekuasaan atas Manado dari Kompeni, Komodor Pakenham menugaskan Residen Durr menjalankan pemerintahan seperti biasa, sampai ada ketentuan lebih lanjut tentangnya.

Pada 28 Februari 1797, eskader Inggris di bawah Komodor Pakenham meneruskan pelayarannya ke Gorontalo dengan tujuan yang sama. Sebagaimana Manado, mereka berhasil mengambil-alih kekuasaan dari tangan penguasa Belanda di sana tanpa kesulitan yang berarti.

Kejatuhan Manado dan Gorontalo ke tangan Inggris disembunyikan Budach dari Sultan Ternate, Maimun Syah atau Sarkan, untuk tetap mempertahankan kekuatan moralnya. Ia hanya meminta pasukan Alifuru ditambahkan jumlahnya untuk menghadapi kemungkinan kembalinya Inggris ke Ternate.

Pendudukan Bacan oleh Nuku dan Inggris

Pada 15 Maret 1797, pasukan Nuku berhasil menyita muatan sebuah perahu pinisi yang berisi logistik dan dokumen-dokumen penting dari Makassar untuk Gubernur Maluku. Pada saat yang sama, pasukan Nuku telah menguasai seluruh Tidore, Bacan, Mare dan Makian. Persekutuan Tidore-Inggris semakin kukuh dan Nuku menyatakan kesiapsediaannya membebaskan Ternate bahu-membahu dengan Inggris.

Tidore dan Inggris memulai kembali upaya pembebasan Maluku Utara dengan mengancam Bacan. Laporan tentang ancaman Inggris atas Bacan diterima Budach dari *Posthouder* Bacan dalam suratnya tertanggal 15 Maret 1797, yang sampai ke Ternate tiga hari kemudian. Di dalamnya diungkapkan bahwa pada 13 Maret tahun itu telah tiba di Bacan sebuah kapal layar Inggris. *Posthouder* Kompeni, Alanus Gerardus van Dienst, mengirim dua perahu kecil untuk menanyakan maksud kedatangan kapal tersebut. Tetapi, kapal Inggris menyambut perahu-perahu itu dengan tembakan gencar, yang memaksa keduanya kembali ke darat.

Masih pada hari yang sama, Sekretaris Kesultanan Bacan, Atiatun, mendatangi kapal Inggris dengan menumpang sebuah perahu kecil. Ia diizinkan naik dan komandan kapal Inggris bertanya kepadanya tentang kekuatan pasukan Kompeni yang ada di dalam Benteng Barneveld,

² *Ibid.*, pp. 286 f.

tentang pertahanannya serta hal-hal penduduk. Komandan Inggris juga memintanya menyerahkan kunci gerbang Benteng Bacan paling lambat 16 Maret 1797.

Sekretaris Atiatun dengan tegas menjawab bahwa, sebagaimana Ternate yang belum menyerahkan kunci Benteng Oranje, Bacan juga akan berbuat hal yang sama. Pernyataan ini ditanggapi komandan Inggris dengan mengajukan ultimatum bahwa bila kunci tidak diserahkan, ia akan mengambilnya dengan paksa. Selanjutnya ditambahkan bahwa ia akan tinggal di Bacan sambil menunggu kedatangan dua kapal Inggris dan sejumlah *juanga* Nuku. Ia berharap agar Sultan Bacan dan rakyatnya tidak melakukan hal-hal buruk, sebab kedatangannya di daerah itu adalah sebagai teman.

Atiatun menanggapi semua itu dengan mengemukakan bahwa ia akan menyampaikan permintaan Inggris kepada *posthouder* Kompeni. Petugas Belanda ini, setelah mendengarkan laporan Atiatun, menyatakan bahwa Gubernur Budach telah melimpahkan kewenangan kepadanya untuk bertindak pada waktu yang tepat. Tetapi ia harus menunggu perkembangan selanjutnya dan instruksi yang akan datang dari Ternate.

Sejak saat itu, tidak ada lagi hubungan dan komunikasi antara Bacan dan Ternate, karena armada Nuku telah mengisolasi Ternate dengan memblokadanya secara ketat. Baru pada 22 April 1797, seorang serdadu VOC, Herbert Keegel, tiba di Ternate serta memberitakan pendudukan Bacan kepada Gubernur Budach: Benteng Barneveld, seperti telah diumumkan kapten kapal Inggris, dituntut untuk diserahkan pada 16 Maret.

Dari perundingan antara *Posthouder* dan Sultan Bacan, Iskandar Alam, diputuskan menyerahkan benteng itu kepada Inggris, sebab empat hari sejak tuntutan diajukan, telah tiba di Bacan dua kapal Inggris dan 50 *juanga* Nuku dalam berbagai ukuran. Setelah melakukan pendaratan, semua anggota pasukan mengambil posisi di depan benteng dan menuntut agar Sultan Bacan, para *bobato*-nya, serta Kimalaha Loulou segera menyerahkannya.

Pada waktu yang sama, pasukan Nuku semakin banyak mendarat, dan tidak ada tindakan apapun dari orang Bacan maupun Kompeni untuk mencegahnya. Pasukan yang baru mendarat mengambil posisi di belakang benteng dan mulai menembaki kota disertai tuntutan penyerahan benteng. Kapal-kapal Inggris juga melepaskan tembakan untuk mendukung tuntutan tersebut. Akhirnya, pasukan Inggris mendobrak gerbang Benteng Barneveld dengan kekerasan.

Pada sorenya, pasukan Nuku membakar habis rumah penduduk, setelah merampoki isinya. Banyak rakyat Bacan yang tewas dalam penyerbuan ini. Setelah benteng diduduki, penghuni benteng yang berasal dari Eropa – terdiri dari seorang koprал, seorang penembak kanon, dan 5 prajurit – dibawa ke kapal Inggris. Sementara prajurit yang berasal dari kalangan pribumi beserta keluarganya dan orang sakit ditempatkan di rumah *Posthouder* Bacan.

Pada 1 April 1797, *Posthouder* Bacan dan para tawanan berkebangsaan Eropa dibawa dengan kapal menuju Kema, kemudian dijebloskan ke rumah tahanan di Manado. Beberapa waktu kemudian, mereka dibebaskan dan dikembalikan ke Ternate. Gubernur Budach menerima kedatangan mereka serta memandang *Posthouder* Bacan, Alanus Gerardus van Dienst, cukup berani menentang Inggris dan Nuku. Karena itu, ia mendapat pujian dan ditempatkan pada posisi baru dalam staf Gubernur di Ternate.

Penobatan Nuku dan Serangan ke Ternate

Pada 11 April 1797, Sultan Tidore, Kamaluddin, melarikan diri ke Ternate, karena negerinya dikepung secara ketat oleh pasukan Nuku dan ia tidak mampu memobilisasi rakyat Tidore untuk mengadakan perlawanan. Ia melaporkan diri kepada Gubernur Budach serta Sultan Ternate, Sarkan, dan kemudian diberi tempat kediaman.

Keesokan harinya, 12 April, pasukan Nuku – dengan bantuan kapal Inggris – mulai melakukan pendaratan di Tidore. Hampir tidak ada perlawanan sedikitpun dari rakyat Tidore, meski Sultan Kamaluddin dan pembantu militernya telah mencoba sebelumnya untuk mengerahkan rakyatnya melawan serangan Nuku. Sebaliknya, rakyat yang telah dimobilisasi itu, berbalik memihak Nuku dan menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan antusias. Nuku yang berada di anjungan kapal Inggris dalam rangka memantau pendaratan, kemudian turun ke darat dan diterima para *bobato* Kesultanan Tidore. Bertempat di Istana Soasio, Nuku dilantik sebagai Sultan Tidore, Papua, Seram dan daerah taklukannya.³

Sebenarnya, sejak 1780, Nuku telah dilantik oleh rakyat Halmahera Timur, Seram, Kepulauan Raja Ampat dan Papua daratan sebagai “Sultan untuk seluruh wilayah Kesultanan Tidore” yang berkedudukan di Seram. Ketika itu, ia diberi gelar *Jou Barakati* (“sultan pembawa berkah”). Saat dinobatkan sebagai sultan di Soasio, Tidore, pada 1797, Nuku memakai gelar *Saidul Jihad Muhammadanil Mabus Amiruddin*.

Pada 26 April 1797, terlihat dua eskader *juanga* Nuku melintasi Ternate. Salah satunya lewat di depan Benteng Oranje, tetapi tidak melakukan provokasi apapun, sehingga tidak ada reaksi dari benteng. Mondar-mandirnya *juanga-juanga* Nuku menimbulkan tanda tanya dan kebingungan di pihak Kompeni. Sebenarnya, kedua eskader itu hanya melakukan manuver dalam rangka merayakan penobatan Nuku sebagai Sultan Tidore ke-19.

Sementara itu, dilaporkan bahwa pada 27 April 1797, pasukan penyerbu—Inggris dan Nuku—mulai mengepung Ternate. Bahkan, sebagian darinya telah mendarat di bagian utara Ternate. Pasukan Ternate, dengan kekuatan beberapa *juanga*, mencoba menghalaunya. Pada pengepungan ini, selain sejumlah *juanga* ukuran besar dan kecil, dua kapal perang Inggris turut serta, dan Nuku berada di atas salah satu dari kedua kapal tersebut. Pasukan Nuku yang ikut dalam pengepungan Ternate berjumlah sekitar 4000 orang, beberapa ratus darinya didaratkan tidak jauh dari Benteng Toloko. Tetapi, *juanga-juanga* Ternate dapat menghalaunya.

Pendaratan pasukan Nuku di dekat Benteng Toloko bukanlah suatu aksi militer yang sebenarnya, tetapi hanya merupakan *test case* untuk mengukur kekuatan Kompeni dan Ternate yang sesungguhnya. Titik berat gerakan militer Nuku adalah mengisolasi Ternate dan menimbulkan kesulitan bagi Kompeni, baik di bidang ekonomi maupun militer.

Mobilisasi Pertahanan Ternate

Kejatuhan Bacan, Manado dan Gorontalo ke tangan Inggris dan Tidore merupakan pukulan telak bagi Gubernur Budach. Ia tidak pernah menyampaikan hal itu kepada sekutunya,

³ E. Katoppo, *Nuku: Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara*, Jakarta, Sinar Harapan, 1984, pp. 17 ff.

Sultan Sarkan dari Ternate. Setelah Bacan jatuh dan pasukan Nuku-Inggris menyerbu Benteng Toloko, Kompeni mulai memperkuat pertahanannya. *Fort* Toloko di utara Ternate dan Benteng Kayumerah memperoleh prioritas utama, karena keduanya merupakan perisai pertahanan kota Ternate, yang di tengah-tengahnya terdapat Benteng Oranje, pusat pemerintahan dan militer Kompeni di Maluku Utara. Rapat koordinasi untuk menyusun pertahanan Ternate, antara Kompeni dan Sultan Ternate, sering dilangsungkan di dalam benteng tersebut.

Dalam suatu rapat di Benteng Oranje, yang dihadiri Sultan Ternate dan para *bobato*-nya, Budach menginformasikan kepada Sultan bahwa Benteng Kayumerah tidak boleh jatuh ke tangan penyerbu. Pada tahap awal, akan ditempatkan 25 tentara Belanda dan 20 tentara pribumi di benteng ini, dipimpin seorang perwira bernama Weihl. Benteng dilengkapi dengan sejumlah meriam dan kanon beserta amunisi yang cukup. Atas usul Kapten von Lutzow, Benteng Kayumerah juga dilengkapi dengan sebuah menara pengintai serta lampu sorot agar dapat menyinari pantai di sekitarnya guna memantau penyerbuan di waktu malam.

Selain Benteng Kayumerah, Benteng Toloko mendapat prioritas untuk diperkuat. Budach merekrut pasukan tambahan, terdiri dari orang Belanda yang ada di Ternate (65 orang), orang Makassar (73 orang) dan orang Cina (72 orang). Jadi, pasukan tambahan seluruhnya berjumlah 210 orang.⁴ Para milisi ini ditempatkan di Benteng Kayumerah dan Toloko, yang telah dipersenjatai.

Hingga Juli 1797, garnisun Ternate telah memiliki sembilan perwira serta 323 bintanga dan tamtama. Kebanyakan bintanga dan tamtama berasal dari Manado.⁵ Angkatan laut Kompeni diperkuat tiga kapal kecil, masing-masing dipimpin seorang perwira, dua bintanga dan tujuh kelasi. Sementara pasukan reguler Kesultanan Ternate dan pasukan Alifuru tidak diketahui jumlahnya, tetapi jelas lebih banyak dari pasukan Kompeni. Demikian pula, atas perintah Gubernur Budach, Sultan Ternate, Sarkan, menyediakan beberapa *juanga* yang mengangkut peralatan pemadam kebakaran dan melakukan tugas pengintaian. *Juanga-juanga* ini ditempatkan di Hiri, Makian, Saketa, dan Gane.

Tuntutan kedua Inggris atas Maluku

Pada 27 Januari 1798, dua fregat Inggris tiba di Ternate dipimpin Komodor Ballart. Kapten Forest, didampingi dua perwira Inggris lainnya, mendarat dengan membawa dua pucuk surat, masing-masing dari Komodor Ballart dan Nuku. Surat Ballart berisi tuntutan agar Gubernur Budach menyerahkan Maluku kepada Inggris, sesuai ketentuan dokumen Kew. Di dalamnya juga diberitakan bahwa atas kekuatan dokumen tersebut, Gubernur Ambon, Cornabe, telah menyerahkan kepulauan Ambon kepada protektorat Inggris pada 1796. Dalam pesannya, Komodor Ballart menyatakan kepada Budach bahwa bila tuntutannya ditolak, Inggris akan memberikan perlindungan kepada Nuku, jika Sultan Tidore itu melakukan serangan atas Ternate. Sementara surat Nuku berisi pengakuan dan jaminannya tidak akan mengepung dan menyerang Ternate bila bendera Inggris telah berkibar di Benteng Oranje.⁶

⁴ *Ibid.*, p. 117 ff.

⁵ Leupe, *Op.Cit.*, p. 273.

⁶ *Ibid.*, pp. 318 f., Katoppo, *Op.Cit.*, pp. 133 f.

Ketika perundingan tengah dilakukan Kapten Forest dan Budach, suatu pameran kekuatan pasukan Nuku dipertunjukkan. Ratusan *juanga* yang dipenuhi pasukan Tidore melakukan manuver di sekitar pulau Hiri dan sesekali menampakkan diri melintasi perairan di depan Benteng Oranje. Tetapi, dengan dukungan penuh Sultan dan sejumlah pangeran Ternate – seperti Schoonderwaert, Bainun, dan Baba, yang disokong pasukan reguler Ternate – serta beberapa ratus pasukan Alifuru bersenjata kelewang dan senjata tradisional lainnya⁷, disamping pasukan Kompeni sendiri, Budach menolak untuk kedua kalinya tuntutan Inggris. Alasannya: ia tidak mungkin menyerahkan Maluku tanpa perintah yang sah atau instruksi dari Batavia.

Penolakan ini menyebabkan Inggris dan Nuku mulai memperketat blokade atas pulau Ternate. Pasukan Nuku juga menyerbu Sahu untuk mencegah pengiriman logistik ke Ternate. Sahu, disamping Jailolo, adalah lumbung padi dan sagu bagi Ternate. Dengan pendudukan Sahu, tidak ada lagi bahan pangan yang dapat disuplai ke Ternate.

Serangan Nuku dan Inggris atas Ternate

Pada 25 April 1798, bertolak dari Tidore dua eskader armada Nuku, masing-masing dikawal kapal Inggris. Salah satu armada itu menuju ke Ternate Utara dan mendaratkan pasukannya tidak jauh dari Benteng Toloko. Sementara eskader lainnya menuju ke bagian selatan Ternate.

Tentara Nuku yang mendarat di utara mulai bergerak menuju Benteng Toloko dan membakar habis semua rumah penduduk di sepanjang jalan dan perkampungan yang dilaluinya. Tetapi, laju pasukan ini mulai tersendat beberapa ratus meter menjelang Benteng Toloko, bahkan sebelum tiba di Dufa-dufa. Mereka dihadang pasukan Ternate dalam jumlah besar, yang berhasil memukul mundur mereka. Dalam keadaan cerai-berai, pasukan Nuku kembali ke laut dengan meninggalkan sebagian prajurit yang tewas. *Juanga-juanga* Nuku kembali ke Tidore dengan kekalahan di tangan. Kapal perang Inggris yang mengawal eskader Tidore menembaki Benteng Toloko dan menimbulkan kerusakan serta korban jiwa. Setelah itu, kapal Inggris kembali ke pangkalannya di Tidore.

Eskader kedua Nuku yang mendarat di selatan Ternate, tepatnya di Kalumata, bergerak menuju Kayumerah. Seperti di utara, semua rumah dan perkampungan di selatan Ternate yang dilalui habis dibumihanguskan. Ketika mendekati Benteng Kayumerah, pasukan Kompeni yang ada di dalamnya menembaki pasukan Tidore. Pertempuran seru berkecamuk, dan pasukan Nuku dapat bertahan. Baru pada pukul 10 malam mereka mengundurkan diri, setelah bala bantuan dari Benteng Oranje tiba dan menembaki mereka, yang membuat mereka tercerai-berai menggapai *juanga-juanga*-nya. Pasukan Nuku kembali ke Tidore dengan meninggalkan korban 45 prajurit tewas di tangan pasukan Kompeni, pasukan reguler Kesultanan Ternate, dan pasukan Alifuru. Dalam invasi 25 April yang gagal ini, Nuku mengerahkan sebanyak 150 *juanga* dibantu dua fregat Inggris.⁸

Dua hari berikutnya, 26 dan 27 April, Ternate Utara dan selatan kembali diserbu pasukan Nuku. Sasaran yang dibidik masih tetap sama: Benteng Toloko dan Benteng Kayumerah, yang

⁷ Leupe, *ibid.*, pp. 267 f.

⁸ *Ibid.*, pp. 297 ff.

dipertahankan Kompeni dan Kesultanan Ternate secara mati-matian. Serangan inipun tidak mencapai hasil yang diharapkan, walaupun jumlah pasukan yang dikerahkan Nuku cukup banyak.

Tetapi, pertempuran tiga hari berturut-turut itu telah menimbulkan kepanikan dan ketakutan luar biasa di kalangan penduduk kota Ternate. Sultan Ternate, Sarkan, berikut keluarganya, serta Sultan Tidore yang digulingkan Nuku, Kamaluddin, terpaksa mengungsi ke Benteng Oranje, yang dipandang sebagai tempat yang lebih aman.

Pada 20 Desember 1798,⁹ dengan kekuatan 160 *juanga*, pasukan Nuku kembali melakukan invasi ke Ternate. Dalam invasi ini, armada Nuku mendapat bantuan dan perlindungan dari dua fregat Inggris, masing-masing Hobart dan Bombay. Nuku mendaratkan pasukannya di selatan Ternate pada pukul 5.30 pagi. Sebagian pasukan berjalan kaki dan sebagian lagi tetap di dalam *juanga* yang dikayuh mengikutinya. Meriam-meriam Benteng Kalumata dan Kayumerah mulai memuntahkan peluru, tetapi pasukan Nuku tetap bergerak menuju Benteng Kayumerah. Pertahanan Benteng Kayumerah – yang dikawal tentara Kompeni dan pasukan Kesultanan Ternate – sangat kuat, dan pasukan Nuku akhirnya dapat dihalau ke laut dengan meninggalkan sejumlah korban.

Di utara Ternate, pada pukul 6 pagi, pasukan Nuku dan Inggris mendarat kira-kira dua kilometer dari Benteng Toloko dan berupaya merebutnya. Tetapi, sebagaimana di Kayumerah, di sini juga pasukan Nuku dan Inggris berhasil dihalau dan kembali ke laut.

Tentang invasi Nuku ke Ternate Utara dan selatan ini, laporan Belanda melukiskan: *Dengan suatu armada juanga yang dahsyat, musuh telah menyerang di dua tempat sekaligus. Jam lima lewat tiga puluh menit di Kayumerah dan jam enam pagi di Toloko. Mula-mula, musuh mendarat agak jauh dari Kayumerah, dan tanpa mempedulikan tembakan meriam berat dari benteng, pasukan maju terus, merangkak seperti binatang di atas tanah, kemudian menghujani perairan dan semua yang ada di benteng dengan panah.*

Di Toloko, dengan fantastik armada Nuku menerobos tembakan meriam, lalu menghujani pasukan yang ada di dalam benteng dengan ribuan anak panah.¹⁰

Setelah beberapa kali gagal menyerang Ternate, armada Nuku dan Inggris mengonsentrasikan diri memblokade pulau Ternate dalam rangka melemahkan kekuatan defensif Kompeni dan pasukan Kesultanan Ternate. Dengan mengisolasi Ternate dari dunia luar—terutama dari pusat-pusat logistik seperti Sahu, Jailolo, Makassar dan Batavia—Nuku berharap Kompeni akan menghadapi bahaya kelaparan dan menyerah.

Strategi Isolasi Ternate

Kegagalan Nuku dalam serangkaian penyerbuan ke Ternate sama sekali tidak meredupkan nyali pasukannya. Namun, pengorbanan jiwa prajurit yang demikian banyak tidak seimbang dengan hasil yang diraih, baik secara politik maupun militer. Itulah sebabnya Nuku melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan militernya. Ia mengkaji ulang strategi ofensif yang telah membuahkan kegagalan dengan melakukan pendekatan kepada Inggris dan menyarankan agar lebih memperketat blokade atas Ternate, sambil menanti waktu yang tepat untuk mendudukinya.

⁹ Tanggal ini disebutkan Leupe, *ibid.*, p. 325, dan Katopo, *Op.Cit.*, p. 135.

¹⁰ Katoppo, *ibid.*, pp. 135 f.

Inggris ternyata mendukung kebijakan Nuku, dan untuk sementara waktu kedua sekutu itu menghentikan serangan-serangan militernya atas Ternate. Isolasi terhadap Ternate semakin diperketat, agar kondisi dan ketahanan pulau itu menjadi rapuh. Faktor-faktor ini diharapkan memperlemah moral dan daya tempur Kompeni maupun pasukan reguler Ternate.

Untuk menjalankan strategi isolasi tersebut, Nuku membagi angkatan lautnya ke dalam empat eskader, yang masing-masing ditempatkan di selat Maitara, ibukota Kesultanan Tidore (Soasio), Oba di Halmahera tengah, dan di pulau-pulau Sidangoli-Jailolo-Sahu. Penempatan eskader-eskader ini di posisi-posisi tersebut dimaksudkan untuk mencegah pengiriman logistik dan bala bantuan ke Ternate.

Tetapi, pada 15 Mei 1798, sejumlah *juanga* Kesultanan Ternate yang dikawal armada angkatan laut Kompeni berhasil menenggelamkan 7 *juanga* Nuku di Sidangoli-Jailolo-Sahu, dan sisanya dikejar serta diceraiberaikan. Beberapa pucuk meriam berhasil dirampas, berikut sejumlah amunisi.¹¹ Jalur laut Ternate-Jailolo-Sahu terbuka lagi, dan logistik beras serta sagu dalam jumlah besar berhasil diangkut ke Ternate.

Keadaan ini tidak bertahan lama. Pada 28 Juli 1798, Kaicil Zainal Abidin, Panglima Tidore, berhasil melumpuhkan dan mengirim ke dasar laut sejumlah *juanga* Ternate yang tengah mengangkut perbekalan dari Sahu dan Jailolo. Sebagian *juanga* lainnya ditawan dan diseret ke Tidore, berikut muatan serta senjatanya berupa meriam dan amunisi. Pasukan Nuku kembali menguasai jalur laut Ternate-Sidangoli-Sahu-Jailolo.

Akibat Isolasi Ternate

Karena ketatnya kepungan Inggris dan Tidore, Gubernur Budach memerintahkan – melalui komandan militer Kapten van Lutzow – menerobos blokade dan mengupayakan makanan dari Banda. Van Lutzow mengontak seorang pengusaha Cina, Tan Sie Tiong, untuk melakukan perintah Budach. Dengan sukarela Tan Sie Tiong mencoba menerobos blokade, tetapi gagal. Tan Sie Tiong adalah tokoh Cina yang banyak membantu Kompeni. Perahunya sering dipakai untuk keperluan Kompeni dan ia sendiri pernah memperoleh penghargaan dari Gubernur Jenderal Kompeni.

Dalam rangka menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi, Gubernur Budach tetap berkomunikasi dengan Sultan Ternate. Sebuah keputusan penting yang disepakati keduanya adalah: setiap pengkhianat, apakah berasal dari aparat Sultan atau aparat Kompeni, akan ditangkap dan ditahan serta selanjutnya dikirim ke Batavia untuk diadili.¹²

Sehari setelah tercapainya kesepakatan tersebut, seluruh bangsawan dan *bobato* – termasuk Putera Mahkota Kesultanan Ternate, Muhammad Yasin – berkumpul di Benteng Oranje dalam sebuah pertemuan. Dalam pertemuan itu, Gubernur Budach menjelaskan situasi yang dihadapi berkenaan dengan tuntutan Inggris, serta usaha-usaha yang tengah dilakukan Inggris dan Nuku untuk menyerbu dan menduduki Ternate.

Akibat ketatnya blokade atas Ternate, penduduk Ternate semakin hari semakin kebingungan mencari kebutuhan pangannya, dan harga-harga mulai melonjak. Bahan pokok keperluan hidup mulai langka dan sulit diperoleh. Karena itu, Sultan Ternate menyerukan kepada

¹¹ *Ibid.*, pp. 122 ff.

¹² *Ibid.*, pp. 268 f.

rakyatnya agar mengolah sagu, tetapi pohon-pohon sagu yang layak olah mulai habis. Ransum anggota militer yang sudah sedikit juga dikurangi, dan orang memakan apa saja. Tidak heran jika kuda, anjing dan tikus menjadi lauk sehari-hari penduduk, karena nelayan tidak berani turun ke laut lantaran mondar-mandirnya *juanga* Nuku di sekeliling perairan Ternate.

Pada 30 Mei 1798, Gubernur Budach menyurat kepada atasannya di Batavia: “Dari waktu ke waktu, kelaparan mulai meminta korban, dan hanya Tuhanlah yang maha tahu apa yang akan terjadi jika sisa beras yang ada di gudang habis.” Itulah sebabnya, sejak 27 April, penjatahan yang ketat mulai dijalankan untuk beberapa bahan pokok yang tersedia. Inipun khusus diberikan kepada tentara dan para pegawai Kompeni serta Sultan. Rakyat biasa yang bukan tentara dikecualikan dalam penjatahan. Mereka harus berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri.

Selain kelaparan, serbuan-serbuan Nuku juga menimbulkan korban jiwa cukup banyak. Jumlah penduduk Ternate pada Juli 1797 sebanyak 3307 jiwa. Tetapi, pada akhir tahun tersebut, penduduk yang ada tinggal 2157. Ini berarti penduduk Ternate berkurang 1150 jiwa, baik karena meninggal atau melarikan diri, dalam waktu yang relatif singkat. Di kalangan Kompeni sendiri, dalam waktu yang sama, telah meninggal 76 jiwa – 65 tentara, dan sisanya pejabat sipil.¹³ Pada Juni 1797, komandan militer Kompeni, Kapten Heinrich, juga meninggal dunia dan digantikan oleh Kapten Baron von Munk.

Kepungan pasukan Nuku dan Inggris atas Ternate yang semakin ketat menyebabkan pelayaran di Maluku memiliki resiko tinggi dan sangat berbahaya. Setiap kapal yang masuk ke perairan Maluku tidak hanya mesti berhadapan dengan armada Nuku, tetapi juga dengan kapal-kapal Inggris.

Atas desakan Kompeni, pada 9 Juni 1798, Sultan Ternate mencoba mengirim sebuah perahu ke Buton dengan membawa pesan kepada Sultan Buton, yang akan meneruskan pesan tersebut ke Bulukumba atau Makassar, kemudian disampaikan ke Batavia. Isi pesan itu adalah permohonan pengerahan bala bantuan ke Ternate. Tetapi, ketika melintasi perairan antara Tidore dan Makian, perahu itu dicegat dua *juanga* Nuku, dan upaya meminta bantuan ke Batavia pun gagal.

Pada 31 Juli 1798, Gubernur Budach kembali mencoba menerobos blokade Nuku dengan mengirim Jogugu Ternate, Sabtu, memimpin sebuah eskader *juanga*. Eskader ini berlayar menuju Sahu dan Jailolo. Pesan Budach kepada Jogugu Sabtu: *tenggelamkan semua juanga Nuku yang ditemukan*. Pada 2 Agustus 1798, Jogugu Sabtu tiba kembali di Ternate dan melaporkan kepada Budach bahwa semua *juanga* Nuku di Halmahera telah menghilang. Budach lega mendengar laporan ini. Tetapi, beberapa minggu kemudian, tepatnya pada 27 Agustus 1798, 200 *juanga* Nuku menyerang Kompeni langsung di jantung kota Ternate, sekalipun berhasil dihalau.

31 Agustus 1798 merupakan hari yang membawa ketidaktenangan Kompeni dan Ternate. Armada Nuku terlihat dikonsentrasikan di Cobo, dan dari sini armada tersebut disertai kapal-kapal Inggris terlihat bersiap-siap menyerbu Ternate. Ternyata, armada ini hanya melakukan gertakan, karena waktu invasi belum juga diputuskan. Setelah mendapat briefing, armada itu kembali ke tugas semula mengepung Ternate.

Strategi isolasi Ternate dimaksudkan untuk membuat penduduk setempat berontak melawan Kompeni. Tetapi, strategi ini terbukti meleset. Dalam keadaan yang sulitpun rakyat

¹³ Leupe, *Op.Cit.*, p. 320.

Ternate tetap patuh kepada sultan yang bahu-membahu dengan Kompeni mempertahankan Ternate dari serbuan Nuku dan Inggris.

Pada 23 Nopember 1798, sebuah kapal layar di bawah komando Letnan Marinir Kloeth berhasil menerobos blokade pasukan Nuku dan tiba di Ternate dari Batavia dengan menggunakan bendera Inggris. Beberapa *juanga* Nuku mencegat kapal tersebut dan melakukan interogasi, tetapi dengan jawaban yang direkayasa, Kloeth berhasil mengelabui anak buah Nuku. Karena mengiranya sebagai kapal Inggris, anak buah Nuku tidak mengadakan pemeriksaan yang ketat. Kapal ini membawa bahan pangan dan amunisi dalam jumlah besar, yang dibongkar malam itu juga di Ternate. Menjelang dini hari, kapal tersebut meninggalkan perairan Ternate.

Tuntutan Ketiga Inggris atas Maluku

Dalam bulan Januari 1799, William Farquhar dilantik sebagai Gubernur Inggris di Ambon, setelah penyerahan wilayah itu sebelumnya (1796) berdasarkan dokumen Kew. Berlandaskan otoritas dokumen ini pula, Gubernur Farquhar mengutus Komodor Hills menuntut penyerahan Maluku kepada Inggris oleh Gubernur Budach.

Pada 22 Maret 1799, Hills tiba di Ternate dengan eskadernya, Orpheus dan Hobart. Ia kemudian mengutus dua perwiranya dengan membawa sepucuk surat yang berisi permintaan agar Gubernur Budach menyerahkan Maluku kepada Inggris berdasarkan dokumen Kew. Bila tuntutan ditolak, Inggris akan mengambil tindakan kekerasan memaksakan penyerahan Maluku. Keesokan harinya, 23 Maret, kedua perwira Inggris itu kembali menghadap Budach meminta kepastian jawabannya. Tetapi, dengan alasan yang sama seperti, Budach kembali menolak tuntutan Inggris.

Segera setelah jawaban Budach diterima, Komodor Hills memerintahkan kedua kapalnya menuju bagian utara Ternate dan menghujani Benteng Toloko dengan tembakan. Benteng Toloko membalas tembakan kapal-kapal Inggris itu, dan terjadilah baku menembak selama lima jam, mulai pukul 4.30 sore hingga 9.30 malam.¹⁴ Maksud Hills menembaki Benteng Toloko adalah agar benteng itu mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Tetapi, sampai kedua kapal Inggris itu meninggalkan perairan di depan Benteng Toloko, bendera putih tidak pernah dikibarkan.

Komandan Benteng Toloko, Pembantu Letnan Walter, menunjukkan prestasi militernya yang gemilang dalam pertempuran lima jam itu. Ia pantang menyerah dan, selama pertempuran, berhasil memimpin anak buahnya dengan keberanian yang luar biasa, sehingga Inggris bisa dihalau.

Dengan sia-sia, kedua kapal Inggris bertolak kembali ke Tidore untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan tembak-menembak itu. Hari telah jauh malam, ketika kedua kapal Inggris ini tiba di Soasio. Sejumlah *juanga* dikerahkan Nuku membantu kedua eskader Komodor Hills kembali ke pangkalannya.

Kegagalan Inggris kali ini ditebus dengan makin diperketatnya blokade atas Ternate. Ketika sebuah perahu layar dengan nakhoda Inci Niki yang dikirim Gubernur Makassar, Beth, masuk ke perairan Maluku beberapa hari kemudian, Inggris dan Tidore menahannya. Muatan

¹⁴ *Ibid.*, pp. 331 ff.

perahu berupa 9 pikul kacang, 13 pikul ikan asin, 30 pikul dendeng, dan lainnya untuk Kompeni Ternate disita.

Serangan Balasan Kompeni dan Ternate

Akhir Mei 1799, Budach dan sekutunya, Ternate, merancang sebuah serangan besar-besaran ke Tidore untuk membalas serbuan yang telah berkali-kali dilakukan Nuku dan Inggris. Panglima Perang Kesultanan Ternate, Imam Jiko, dibantu seorang sersan Belanda, bertolak ke Halmahera merekrut pasukan Alifuru. Keduanya berhasil memperoleh 3000 prajurit dan sejumlah *juanga*.

Sidang Dewan Pemerintahan di Benteng Oranje, yang dihadiri Panglima Imam Jiko, kemudian menetapkan 15 Juli 1799 sebagai “hari H” untuk penyerbuan Tidore. Target serbuan, seperti ditegaskan Budach, adalah merebut dan menduduki pulau Tidore, serta menangkap dan menawan Sultan Nuku beserta para *bobatonya*.

Tetapi, tiga hari sebelum serangan dilakukan, seorang intelijen Nuku bernama Gonone menginformasikan seluruh rencana penyerbuan Ternate-Kompeni secara rinci kepada Nuku dan pimpinan militer Tidore. Nuku dan petinggi militernya segera menyusun strategi menghadapi serbuan besar-besaran itu. Perintah yang dikeluarkan Nuku hanya berbunyi: *hancurkan para penyerbu!* Karena panglima militer Tidore, Kaicil Zainal Abidin, sedang bertugas ke Halmahera Timur, Kaicil Morsel menggantikan kedudukannya untuk sementara.

Pada 15 Juli 1799, ketika fajar mulai menyingsing, seluruh kekuatan tempur Kompeni dan Ternate telah berada di perairan Soasio, Tidore. Kekuatan Kompeni dan Kesultanan Ternate terdiri dari 100 *juanga* dalam berbagai ukuran dan beberapa fregat Kompeni yang membawa 3000 pasukan Alifuru, sejumlah besar pasukan reguler Ternate, 200 prajurit Kompeni, dan 38 prajurit artileri (penembak meriam). Pasukan gabungan ini dipimpin Kapten Baron von Lutzow.

Pukul 6 pagi pendaratan dimulai oleh Panglima Imam Jiko yang memimpin pasukan Alifuru serta pasukan reguler Ternate, disusul pasukan Kompeni yang dipimpin von Lutzow beserta pasukan altilerinya. Setelah seluruh pasukan gabungan Kompeni-Ternate mendarat, Benteng Kotabaru dan Tahula mulai dihujani tembakan meriam, sementara pasukan pimpinan Imam Jiko dan von Lutzow bergerak maju untuk merebut kedua benteng itu.

Baru beberapa ratus meter pasukan gabungan Kompeni-Ternate meninggalkan tepi pantai, tiba-tiba muncul pasukan Nuku yang mulai menyerang mereka. Meriam-meriam di Benteng Kotabaru dan Tahula mulai menembaki pasukan Kompeni-Ternate, dan berhasil memporandakan pasukan artileri Kompeni. Kapal-kapal dan *juanga* pasukan Kompeni-Ternate juga mulai ditembaki dengan meriam. Pasukan Nuku ternyata tidak hanya bersenjatakan panah dan tombak, tetapi juga bedil, kelewang dan meriam. Bahkan, Nuku memiliki pasukan berkuda (kavaleri) yang dengan cepat dan gesit memabat para penyerbu dengan pedang dan tombak.

Jika situasi di awal pertempuran memperlihatkan bahwa pasukan gabungan Ternate-Kompeni telah berada beberapa ratus meter dari benteng, kini mereka mulai didesak mundur dan tercerai-berai. Melihat kepanikan dan banyaknya korban yang jatuh di pihaknya, Kapten von Lutzow memerintahkan pasukannya mundur. Di bawah hujanan tembakan meriam, bedil dan

anak panah, pasukan gabungan lari terbirit-birit menuju kapal dan *juanga* dengan meninggalkan senjata dan meriam.

Dalam upaya penarikan mundur pasukan gabungan Ternate-Kompeni ini, Panglima Ternate, Imam Jiko, gugur di medan laga. Sementara kapal-kapal Kompeni yang menunggu pasukannya banyak yang rusak dan tenggelam oleh tembakan-tembakan meriam dari Benteng Cobo, ketika kapal-kapal itu bermanuver di depan benteng tersebut. Pasukan Nuku berhasil menyita sejumlah meriam dan bedil, bahkan beberapa *juanga*, yang ditinggalkan karena panik.

Nuku – yang malam sebelumnya berada di Makian bersama Sultan Bacan, Iskandar Alam,¹⁵ dalam suatu perundingan dengan Inggris – pada pagi hari itu ikut menyaksikan pertempuran di Soasio dari atas anjungan kapal Inggris, Orpheus, bersama Sultan Iskandar Alam. Dalam pertempuran ini, dua kapal Kompeni, Aandacht dan Waker, bersama anak buahnya menyerah kepada Inggris. Anak buah kapal Aandacht terdiri dari dua letnan angkatan laut, termasuk letnan Kloeth yang pernah menjadi *gezaghebber*, seorang koprал, 11 kelasi berkebangsaan Eropa, dan 22 kelasi pribumi. Sementara awak kapal Waker terdiri dari seorang letnan, seorang *gezaghebber*, seorang perawat, seorang koprал, seorang penembak kanon, 6 kelasi Eropa, 28 kelasi pribumi, dan 16 orang Jawa dari pasukan artileri.

Setelah mengundurkan diri dan tiba di Ternate, Kapten von Lutzow melakukan pengecekan terhadap pasukan gabungan Ternate-Kompeni. Hasilnya dilaporkan kepada Budach sebagai berikut: tidak ada satupun kapal Kompeni yang kembali. Semua tenggelam atau tertawan. Dari 100 *juanga* yang dikerahkan dalam penyerbuan, hanya 46 yang kembali dengan selamat. Sisanya tenggelam, rusak atau dirampas. Dari 200 pasukan Kompeni, termasuk beberapa perwira, hanya 17 yang kembali. Sementara pasukan Alifuru dan tentara reguler Ternate yang tewas atau tertawan berjumlah 1000 orang, termasuk Panglima Imam Jiko.

Kekalahan dan kerugian, baik persenjataan maupun personal, dalam pertempuran Soasio yang sedemikian besar itu memberikan beban yang berat kepada Kompeni untuk dapat bangkit kembali dalam waktu singkat. Mujur bagi Budach, pada 4 Agustus 1799, tiba di Ternate dua kapal Perancis berbendera Belanda di bawah pimpinan Kapten Pierre Le Meme yang dikirim Batavia. Kedua kapal itu membawa beras dan sejumlah peralatan perang serta akan diperbantukan kepada Kompeni Ternate untuk memperkuat pertahanannya.¹⁶

Pergantian Gubernur Maluku dan Serangan ke Tidore

Berdasarkan resolusi sidang gabungan Pemerintah Pusat VOC dan Dewan Hindia, pada 25 Mei 1799, Willem Jacob Cranssen diangkat sebagai Gubernur Maluku menggantikan Budach. Cranssen tiba di Ternate pada 12 September 1799, dan langsung mengambil-alih tugas pemerintahan dari Budach. Ia tiba dengan empat kapal besar yang memuat beras, senjata, amunisi, dan 178 serdadu Eropa.

Budach sendiri rencananya akan diangkat sebagai anggota luar biasa Dewan Hindia. Tetapi, dalam sepucuk surat rahasia tertanggal 20 Desember 1799, Budach mengusulkan agar ia

¹⁵ Sejak pendudukan Bacan, Sultan Bacan telah menjalin persekutuan dengan Nuku. Bantuan Bacan kepada Nuku dalam misi pengepungan Ternate berupa suplai logistik (beras dan sagu).

¹⁶ Leupe, *Op.Cit.*, p. 343.

diangkat sebagai anggota Dewan Asia. Setelah serah terima jabatan Gubernur Maluku, Budach diminta membantu Cranssen sebelum kepergiannya ke Batavia.¹⁷ Ia akhirnya tidak sempat ke Batavia karena keburu wafat di Ternate pada 30 Januari 1800.

Atas jasanya mempertahankan Ternate dari serbuan Inggris dan Nuku, Budach memperoleh penghargaan bintang emas dari Dewan Asia di Belanda. Penghargaan bintang perak juga diberikan Belanda kepada Sultan Ternate, Sarkan, dan Komandan Militer Kompeni, Mayor Baron von Luetzow, yang juga memperoleh kenaikan pangkat menjadi letnan kolonel.

Sementara itu, tindakan pertama yang dilakukan Cranssen segera setelah memangku jabatan Gubernur Maluku adalah mengkaji dengan saksama situasi pertahanan Ternate yang telah dirancang dan dilaksanakan Budach. Dalam sebuah rapat Dewan Pemerintahan, Cranssen mengusulkan memberi pelajaran kepada Nuku dengan menyerbu Tidore dan menangkap Nuku. Rencana ini disetujui rapat tersebut.

Ia kemudian melakukan registrasi ulang seluruh personil militer dan peralatan perang VOC di wilayahnya. Milisi yang terdiri dari orang Belanda, Cina, dan suku-suku lain yang berdiam di Ternate – seperti Jawa, Makassar, Manado dan Sangir – dibentuk. Jumlah milisi yang direkrut 249 orang, ditambah 2.000 pasukan Alifuru dan pasukan organik Kesultanan Ternate. Pasukan organik Kompeni sendiri berjumlah 600 orang. Dengan demikian, seluruh kekuatan pasukan yang berhasil dihimpun Cranssen berjumlah sekitar 3.000 orang.

Cranssen sendiri bertindak selaku pimpinan tertinggi militer, dibantu von Luetzow sebagai komandan tempur berikut 3 perwira lain sebagai komandan lapangan. Pasukan Ternate dipimpin Kapita Laut Kaicil Yasin, Jogugu Maribu, dan Utusan Rahan. Selain lima kapal perang VOC, sejumlah *juanga* Kesultanan Ternate dikerahkan mendukung rencana penyerbuan Cranssen.

Rencana penyerangan besar-besaran atas Tidore ini diatur sebagai berikut: von Luetzow akan mendarat di selatan Soasio dengan kekuatan 100 prajurit pasukan infanteri dan 50 prajurit pasukan artileri, disertai seluruh pasukan organik Kesultanan Ternate, pasukan Alifuru dan milisi Sangir. Kapten de Haan memimpin pendaratan di utara Soasio dengan kekuatan 75 prajurit infanteri dan 25 prajurit artileri. Target operasinya adalah menangkap Nuku dan menghancurkan ibukota Tidore beserta seluruh kekuatan militernya. Benteng Kotabaru dan Tahula harus diduduki terlebih dahulu sebelum penghancuran Soasio dengan tembakan meriam dari laut dan dari benteng yang telah direbut. 3 Nopember 1799 ditetapkan sebagai “hari H” penyerbuan.¹⁸

Tetapi, rencana penyerbuan Cranssen kembali dapat diketahui intelijen Nuku dan dilaporkan ke Soasio, Tidore.¹⁹ Setelah menerima informasi ini, Nuku mengonsentrasikan pasukan laut dan daratnya. Benteng Kotabaru dan Tahula diperkuat dengan tambahan meriam dan amunisi serta sejumlah besar tentara. Sebanyak 40 *juanga* disiapkan di Soasio dan selebihnya di Teluk Cobo serta Tanjung Dehegila untuk menghadang penyerbuan Kompeni-Ternate.

Di pagi hari, 3 Nopember 1799, seluruh armada Kompeni dan Ternate telah berada di depan Benteng Kotabaru dan Tahula. Pasukan penyerbu tidak melihat aktivitas pasukan Nuku. Tetapi, karena ragu, pasukan Kompeni-Ternate belum melakukan tindakan apapun, selain

¹⁷ Katoppo, *Op.Cit.*, p. 148.

¹⁸ *Ibid.*, pp. 149 ff.

¹⁹ Nuku memiliki dinas intelijen yang cukup kuat dan mempunyai jaringan yang luas dan tersebar, termasuk di jaringan Kompeni sendiri.

mengamati lokasi yang akan menjadi tempat pendaratan. Baru pada 5 Nopember, mereka mulai mendarat. Setelah bekerja keras selama sehari, mereka berhasil membangun kubu-kubu pertahanan yang dipersenjatai dengan meriam.

Pada 7 Nopember, ofensi besar-besaran pasukan Kompeni-Ternate dimulai. Benteng Kotabaru dan Tahula digempur dengan tembakan meriam dari kubu-kubu pertahan di tepi pantai dan dari kapal-kapal Kompeni. Tetapi, tidak ada balasan tembakan dari kedua benteng itu, kecuali manuver pasukan kecil Tidore yang mengganggu pasukan Kompeni-Ternate.

Pada pukul 10 pagi, seluruh pasukan Kompeni mulai bergerak menuju Benteng Kotabaru dan Tahula. Pada saat itulah tembakan meriam dari kedua benteng tersebut mulai menyalak. Sementara di Cobo, meriam dan artileri Nuku mulai beraksi menembak serta berhasil menghadang lajunya arus serbuan pasukan Kompeni-Ternate. Dalam waktu satu jam, pihak penyerbu menderita banyak korban. Meriam-meriam pantai Kompeni dari kubu-kubu pertahanannya mulai mereda dan jatuh satu demi satu ke tangan pasukan Tidore.

Melihat situasi itu, Cranssen memerintahkan seluruh pasukan gabungan kembali ke kapal dan *juanga* untuk berlayar pulang ke Ternate. Pasukan gabungan kembali ke Ternate dengan kekalahan telak di tangan. Ketika sore tiba, tidak satupun kapal dan *juanga* Kompeni-Ternate terlihat di perairan Tidore, selain yang telah hancur dan dirampas pasukan Nuku.

Kekalahan pasukan Kompeni-Ternate telah mendongkrak moral tentara Nuku yang dalam beberapa kali penyerbuan ke Ternate selalu mengalami kegagalan. Sebaliknya, pihak Kompeni dan Ternate menuduh bahwa strategi Nuku yang berhasil mematahkan serangan ke Tidore itu dirancang dan dipimpin langsung oleh Inggris.

Sementara itu, pada bulan Nopember ini juga – setelah penyerbuan pasukan gabungan Kompeni-Ternate ke Soasio – permaisuri Nuku, Rana Suri, meninggal dunia. Permaisuri Kesultanan Tidore ini adalah puteri Pangeran Wonge, putera Sultan Hamzah Fahrudin.

Jatuhnya Ternate²⁰

Dalam bulan Januari 1801, Komandan tentara Inggris, Kolonel Burr, mengisyaratkan kepada Gubernur Cranssen segera menyerahkan Ternate secara terhormat. Namun, isyarat ini tidak digubris Cranssen yang bahkan menyatakan bahwa hanya kekuatan senjatalah yang dapat menentukan penyerahan semacam itu. Jawaban Cranssen bermakna bahwa Maluku hanya dapat diserahkan Kompeni “*durch blut und eisen,*” atau melalui jalan perang.

Memperoleh jawaban seperti itu, Burr berunding dengan Nuku dan merencanakan sebuah aksi militer. Nuku menyetujui rencana Burr dan mengusulkan bahwa Kompeni juga harus dipecah-belah dari dalam. Surat rahasia agar dikirim kepada tokoh-tokoh sipil maupun militer, selain Cranssen, yang meminta mereka menyingkirkan Cranssen, serta mengambil-alih pemerintahannya, kemudian menyerah secara terhormat kepada Nuku dan Inggris. Keselamatan mereka akan dijamin, bahkan Inggris akan memberi imbalan kepada mereka.

Sementara surat-surat himbuan secara rahasia disampaikan kepada tokoh-tokoh sipil dan militer tertentu di Ternate oleh intelijen Tidore, Nuku dan Inggris menyerang kota tersebut pada 11 Februari 1801. Sebanyak 7 kapal perang Inggris dan 40 *juanga* Nuku mulai menyerbu

²⁰ Lihat Katoppo, *Op.Cit.*, pp. 169 ff.

Ternate. Kapal-kapal Inggris menggempur meriam-meriam Kompeni yang ditempatkan di Santosa dan Kampung Makassar. Di bawah hujan tembakan ke kedua kubu pertahanan Ternate ini, pasukan Nuku mendarat di Salero dan mencoba mencapai Benteng Oranje. Semua *juanga* Ternate yang sedang ditarik ke darat habis dibakar pasukan Nuku. Tetapi, gerak maju pasukan Nuku menuju Benteng Oranje kandas di depan Santosa oleh tembakan gencar meriam dan pasukan gabungan Kompeni-Ternate, yang jauh lebih banyak jumlahnya dari pasukan penyerbu.

Pertempuran sengit di depan Santosa telah menimbulkan korban yang cukup besar di kedua pihak. Karena tidak dapat menembus pertahanan Ternate, dan untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak, komandan pasukan Nuku memerintahkan pasukannya mundur ke Salero dan naik kembali ke *juanga*, dengan meninggalkan korban yang tewas.

Sementara itu, di bagian utara Ternate, kapal-kapal Inggris menembaki Benteng Toloko yang nyaris hancur, dan setelah itu mendaratkan pasukannya. Gubernur Cranssen, yang memimpin sendiri pertahanan benteng itu, memerintahkan pasukannya membalas gempuran kapal-kapal Inggris dan pasukan yang telah didaratkan. Korban yang cukup banyak berjatuh di kedua pihak.

Sebuah gencatan senjata akhirnya disepakati kedua pihak dalam rangka menguburkan korban-korban yang tewas dalam pertempuran dan memindahkan yang terluka. Baik pasukan Nuku maupun Inggris gagal merebut Ternate dalam pertempuran yang sengit ini. Mereka kembali ke Tidore tanpa hasil, kecuali meninggalkan sejumlah korban pertempuran.

Setelah kembali ke Tidore, Nuku dan pihak Inggris sepakat bahwa setelah merehabilitasi dan mengonsolidasi kekuatan militernya, akan dilakukan lagi gempuran terhadap Kompeni dan Ternate dalam dua bulan mendatang.

Pada 1 Mei 1801, Kolonel Burr kembali mengirim ultimatum kepada Gubernur Cranssen agar menyerah dalam waktu 12 jam. Tetapi, sebagaimana sebelumnya, Cranssen menolak ultimatum ini dan menyatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan kewajiban dan sumpahnya.

Akibat penolakan Cranssen, pasukan gabungan Inggris-Tidore memulai lagi gempuran atas Ternate. Inggris mengerahkan 7 kapal perang dan Nuku menurunkan 100 *juanga* dalam penyerbuan ini. Meriam berat mulai didaratkan Inggris di dekat Benteng Toloko dan Kayumerah. Kali ini, pendaratan dilakukan serentak di utara dan selatan Ternate. Tentara Inggris dan Tidore bahu-membahu dalam penyerangan tersebut.

Tetapi, pasukan gabungan Kompeni-Ternate berupaya mati-matian menangkis serbuan serentak itu. Meriam-meriam di balik kubu pertahanan Kompeni-Ternate memuntahkan berondongan peluru kepada para penyerbu, sehingga menyulitkan gerak maju mereka. Sekalipun pasukan gabungan Inggris-Tidore bertempur secara fanatik, mereka menemui kesulitan memaksa pasukan Kompeni-Ternate untuk menyerah.

Sementara itu, surat-surat rahasia yang dikirim kepada sejumlah pejabat sipil dan militer di Ternate berisi hasutan menyingkirkan Cranssen mulai memperlihatkan hasilnya. Pada 9 Mei 1801, Benteng Kayumerah jatuh ke tangan pasukan gabungan Inggris dan Nuku, karena pasukan yang mesti mempertahankannya bertempur setengah hati.

Hal ini disebabkan Sekretaris Kompeni Rodijk, Jaksa van Dockum dan Komandan Militer yang membawahi komandan Benteng Kayumerah, Kapten Baron von Munck, telah bersepakat memaksa Cranssen menyerah setelah kejatuhan benteng tersebut. Para perwira yang

mempertahankan benteng itu, Wiel dan Erferveld, langsung menyerah kepada pasukan Nuku tidak lama setelah pecahnya pertempuran. Hal serupa dilakukan pasukan milisi asal pegawai Kompeni, yang juga segera menyerah kepada pasukan Nuku.

Di sektor utara, pasukan Inggris telah mengurung rapat Benteng Toloko. Komunikasi antara benteng ini dan Benteng Oranje terputus. Kolonel Burr dan pasukannya secara hati-hati bergerak menuju Benteng Oranje, tetapi gerakan pasukan ini tidak berjalan mulus karena mendapat gempuran dan dihadap pasukan gabungan Kompeni-Ternate.

Karena situasi semakin genting, pada 13 Mei 1801, Gubernur Cranssen mengundang anggota Dewan Pemerintahan bersidang membahas situasi perang. Dalam sidang itu, Rodijk dan Dockum mengusulkan Kompeni menyerah secara terhormat, sebab mempertahankan Ternate merupakan hal yang sia-sia. Benteng Kayumerah telah jatuh, Benteng Toloko tinggal menunggu nasib serupa, dan setelah itu pasukan gabungan Inggris-Tidore hanya menanti saat yang tepat untuk merebut Benteng Oranje.

Sebagai jawaban atas usul ini, Cranssen berteriak dengan penuh amarah: “Kamu semua pengecut. Kita sekarang berunding untuk membicarakan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan, dan tidak membicarakan soal penyerahan.” Tetapi, Dewan Pemerintahan mendesak agar soal penyerahan juga mesti dibahas. Cranssen menolak dan menyatakan hal tersebut baru akan dibicarakan dua minggu mendatang, setelah perkembangan situasi dikaji.

Pada 27 Mei 1801, Sekretaris Rodijk dan Jaksa van Dockum menemui Cranssen dan memintanya memanggil Dewan Pemerintahan untuk bersidang. Cranssen meluluskan permintaan ini dan mengundang Dewan bersidang. Dalam persidangan itu, Dewan menuntut Cranssen menyerah, tetapi ia menjawab: “Hari ini kita akan bicarakan agenda penyerahan, bukan harus menyerah pada hari ini juga. Sebab, sampai hari ini, serangan pasukan penyerbu masih dapat dihadapi oleh pasukan kita.”

Pada 19 Juni 1801, ketika sedang menikmati santap malamnya, Cranssen ditodong dengan pistol oleh beberapa perwira anak buah von Munck. Cranssen menyatakan kepada para penodong itu sebagai “pengecut dan pengkhianat.” Meski diancam akan ditembak, Cranssen sama sekali tidak mau tunduk pada kehendak para penodong. Karena tetap melawan, ia diikat kemudian diseret masuk ke ruang sidang Dewan Pemerintahan, di mana para anggota Dewan telah menunggu. Cranssen masih sempat melontarkan tuduhan kepada para anggota Dewan sebagai pengkhianat, pelanggar sumpah jabatan dan orang yang kehilangan kehormatan. Tetapi, tanpa menghiraukan omongan Cranssen, Dewan menyatakan mengambil-alih pemerintahan Maluku, dan kemudian membahas tentang penyerahan serta syarat-syarat yang perlu disepakati oleh Kompeni dan Inggris, sebelum penyerahan secara resmi dilakukan.

Setelah syarat-syarat yang diajukan Kompeni kepada Kolonel Burr disepakati, pada 20 Juni disetujui sebuah gencatan senjata. Keesokan harinya, 21 Juni 1801, Kompeni secara resmi menyerah kepada Inggris dan Nuku. Dengan demikian, berakhirilah pengepungan kota Ternate yang berlangsung sejak 1797. Kapitulasi ini didasarkan pada syarat-syarat berikut:

1. Semua personil (pegawai) Kompeni bekerja seperti biasa;
2. Sultan Ternate dan para *bobato*-nya tetap menjalankan fungsinya;
3. Jaminan bahwa orang-orang Nuku tidak akan membalas dendam dan melakukan perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan lainnya;

4. Mantan Sultan Tidore, Kamaluddin, dapat hidup bebas dan memperoleh tunjangan dari Inggris.

Upacara penyerahan kekuasaan atas Maluku yang berlangsung pada 21 Juni itu dapat dituturkan sebagai berikut: Tepat pukul 11 pagi upacara dimulai di dalam Benteng Oranje. Tentara Kompeni yang telah dilucuti siap dalam satu barisan. Pada pukul 11.30, barisan pasukan Inggris memasuki Benteng Oranje, disusul pasukan Nuku sebanyak 5000 prajurit, lengkap dengan persenjataannya. Bendera Belanda kemudian diturunkan dari Benteng Oranje dan sebagai gantinya dikibarkan bendera Inggris. Hadir pula dalam upacara ini Sultan Muhammad Yasin, yang baru beberapa bulan bertakhta di Kesultanan Ternate.

Langkah Pertama Inggris setelah Berkuasa

Setelah menerima penyerahan Maluku dari Belanda pada 21 Juni 1801, Inggris secara resmi mulai berkuasa di Maluku. Pemerintah Inggris segera mengangkat Robert Townsend Farquhar sebagai residennya yang pertama di Ternate.²¹ Townsend menjalankan pemerintahan di bawah otoritas Gubernur Inggris di Ambon.

Tindakan pertama yang dilakukan Inggris setelah berkuasa di Maluku Utara adalah memberikan legitimasi kepada Kesultanan Tidore di bawah Sultan Nuku sebagai kerajaan yang sah dan independen. Pengakuan ini disampaikan Gubernur di Ambon atas nama Pemerintah Inggris.

Selanjutnya, Residen Farquhar membebaskan Cranssen, mantan Gubernur Belanda untuk Maluku, yang ditawan kelompok oposisi dalam pemerintahannya. Pengikut-pengikut Cranssen, baik sipil maupun militer, juga turut dibebaskan. Para tawanan tersebut, berikut anggota pemerintahan dan anggota Dewan Pemerintahan – termasuk Rodijk dan van Dockum – kemudian dikirim ke Batavia. Setibanya di sana, Rodijk dan van Dockum dipenjara atas dakwaan pengkhianatan. Pemerintah Inggris juga mulai memutar roda pemerintahan dengan merekrut semua pegawai sipil eks pemerintahan Belanda. Para pegawai Belanda itu diminta bekerja kembali di bawah yurisdiksi Inggris.

Sementara itu, pada 25 Nopember tahun ini, Sultan Ternate, Muhammad Yasin – yang baru bertakhta pada 13 Mei 1801, menggantikan Sultan Sarkan – menandatangani sebuah kontrak politik dengan pihak Inggris. Kontrak politik itu merupakan wujud pengakuan resmi Kesultanan Ternate terhadap kedaulatan dan kekuasaan Inggris.

Mendamaikan Ternate dan Tidore

Sejak 1780, Nuku memosisikan diri sebagai penentang yang gigih dan tanpa kompromi terhadap Belanda. Sementara Inggris sendiri telah membantu Nuku, mula-mula lewat para *country traders*. Bahkan, sejak 1797, Inggris bahu-membahu dengan Nuku dalam invasi militer ke Bacan dan pengepungan serta penyerbuan berkali-kali ke Ternate.

²¹ De Clerq, pp. 168 f.

Pengepungan dan serangan-serangan Nuku atas Ternate merupakan pengejawantahan posisinya yang anti penjajahan Belanda dan upayanya untuk mengenyahkan kekuasaan asing itu dari Maluku. Apabila Nuku dengan sangat terpaksa harus melakukan tindakan militer atas Ternate, hal itu tidak ditujukan kepada rakyat Ternate *an sich*,²² tetapi kepada penguasa Kesultanan Ternate yang bekerjasama dan membantu Kompeni.

Nuku menghendaki agar Ternate melepaskan diri dari pengaruh dan kekuasaan Belanda, serta menjadi suatu kerajaan yang mandiri, seperti ketika berada di bawah kendali Sultan Khairun dan Babullah. Pesan semacam itu pernah disampaikan Nuku kepada Sultan Ternate, Sarkan, melalui salah satu suratnya. Bahkan, Nuku juga menyarankan bahwa, jika perlu, Ternate harus mengangkat senjata memperjuangkan kebebasan dan kemandiriannya. Nuku siap memberikan bantuan militer kepada Ternate untuk perjuangan tersebut.

Namun, Sarkan bukanlah Babullah. Ia tidak mampu melakukan tindakan seperti disarankan Nuku. Kondisi ekonomi, terutama militer, sejak terbentuknya pemerintahan kolonial Belanda – yang menggantikan VOC karena dibubarkan sejak 1800 – tidak memungkinkan Ternate bertindak seperti Nuku. Lagi pula, Sultan Sarkan tahu persis bahwa segi lain dari perjuangan Nuku adalah untuk mematahkan hegemoni Ternate.

Residen Farquhar, mengetahui perseteruan Tidore-Ternate ini dengan jelas. Baginya, sebuah upaya rekonsiliasi antara Ternate dan Tidore harus segera dilakukan. Untuk mewujudkan rencana ini, ia mengundang penguasa kedua kesultanan itu menghadiri sebuah pertemuan, di mana ia sendiri bertindak selaku penengah.

Pada 5 Nopember 1801, berlangsung pertemuan rekonsiliasi antara Ternate dan Tidore di Benteng Oranje. Residen Farquhar membuka pertemuan dengan sebuah himbauan agar kedua pihak tidak menyia-nyiaikan kesempatan untuk berdamai. Akhirnya, tercapailah rujukan rekonsiliasi yang disepakati Ternate dan Tidore. Butir-butir utama perjanjian ini adalah:

1. Semua peristiwa dan perbuatan di masa lampau akan dilupakan, dan para pihak saling memaafkan;
2. Sejak penandatanganan perjanjian perdamaian, kedua kesultanan bersama rakyatnya akan hidup dalam suasana perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan;
3. Setiap perselisihan yang timbul, tidak akan diselesaikan dengan senjata dan pernyataan perang, tetapi akan dibawa ke forum perundingan dan Residen Farquhar akan bertindak sebagai penengah yang tidak memihak.²³

Perjanjian di atas hanya bisa menciptakan suasana damai yang singkat antara Kesultanan Ternate dan Tidore. Pada 1804, perseteruan antara kedua musuh bebuyutan itu kembali terjadi sehubungan dengan kasus Kesultanan Jailolo bentukan Sultan Nuku.

²² Dalam pasukan Nuku terdapat banyak orang Ternate. Bahkan, Kaicil Ibrahim, seorang pangeran dari Kesultanan Ternate, sejak awal telah bergabung dengan Nuku, dan bersama Kaicil Zainal Abidin—keduanya fasih berbahasa Inggris—lama menetap di markas besar EIC di Madras untuk mewakili kepentingan Nuku.

²³ Katoppo, *Op.Cit.*, pp. 175 f.

Berakhirnya Kekuasaan Inggris di Maluku

Pada 27 Maret 1802, berlangsung konferensi perdamaian di Amiens – sebuah kota di utara Perancis, berjarak sekitar 72 mil dari Paris – yang dihadiri Perancis, Inggris, Belanda dan Spanyol. Keputusan yang diambil dalam konferensi itu menyebutkan bahwa semua wilayah Belanda yang dikuasai Inggris harus dikembalikan kepada Belanda, kecuali Sri Lanka. Dengan demikian, Indonesia tergolong kepada wilayah yang mesti dikembalikan Inggris kepada Belanda, termasuk Maluku, Ambon dan Banda. Penyerahan wilayah-wilayah tersebut akan dilakukan secara berangsur-angsur, dan direncanakan mulai dilakukan pada 1 Maret 1803.

Selama masa pemerintahan yang singkat, yakni sekitar 2 tahun, Inggris berhasil membawa ribuan anakan cengkih ke Penang (Malaysia), dan ditanam serta dibudidayakan di daerah jajahannya itu.²⁴ Bersama daerah Zanzibar, Penang kemudian muncul sebagai penghasil cengkih, di samping Maluku sendiri.

Sementara itu, terjadi pergantian Residen Ternate dari Farquhar kepada H. Webber. Residen kedua Inggris inilah yang kemudian melangsungkan serah terima kekuasaan Maluku dari Inggris kepada wakil Pemerintah Belanda, Buijskes dan Goldbach, pada 23 Mei 1803. Selesai serah terima, Webber langsung meninggalkan Ternate. Sebulan kemudian, tepatnya pada 23 Juni 1803, Gubernur Inggris di Ambon juga menyerahkan kekuasaannya kepada Gubernur Belanda, Cranssen, dan langsung meninggalkan Ambon.

Untuk menangani serah terima Maluku dari Inggris, Pemerintah Belanda di Batavia membentuk sebuah komisi pengambilalihan yang dipimpin mantan Gubernur Maluku, W.J. Cranssen, dengan anggota C.L. Wieling, mantan *Gezaghebber* pada pemerintahan Propinsi Kepulauan Ambon, dan Kolonel Abraham Melissen, Komandan Angkatan Laut Belanda. Komisi pengambil-alihan ini tiba di Ternate dalam bulan Agustus 1803 dengan kapal layar *Avonturier* dan korvet *The William*.

Status Konstitusional Tidore Pasca-Inggris

Dengan berlalunya Inggris dari Maluku, timbul sebuah masalah: bagaimana status Nuku dan Kesultanan Tidore dengan kembali berkuasanya Belanda di Maluku. Seperti diketahui, bersamaan dengan menyerahnya Belanda kepada Inggris dan Nuku pada 21 Juni 1801, Gubernur Inggris di Ambon memproklamasikan Nuku sebagai Sultan Tidore yang sah dan berdaulat. Beberapa waktu kemudian, sebuah traktat antara Inggris dan Tidore ditandatangani. Traktat ini sangat berbeda dari perjanjian-perjanjian yang biasa dilakukan antara Belanda dengan raja-raja di Maluku selama ini. Traktat Inggris-Tidore itu menggarisbawahi dan menekankan “hubungan kebersamaan” (*mutual relationship*) antara keduanya.²⁵ Apabila Ternate menandatangani kontrak politik pada 25 Nopember 1801, yang berisi pengakuan resminya terhadap kedaulatan dan kekuasaan Inggris, Nuku tidak pernah menandatangani kontrak semacam itu selama berlangsungnya kekuasaan Inggris di Maluku.

Sejak dinobatkan sebagai “Sultan Papua, Seram, Halmahera Timur dan Tidore” pada 1780, Nuku telah menyatakan kesultannya sebagai sebuah negara merdeka yang lepas dari

²⁴ van Fraassen, Ch. F.vol. 1, p. 57 f.

²⁵ Andaya, pp. 237 f.

kekuasaan Belanda. Bahkan, segera setelah Ternate menyerah kepada Inggris dan Nuku – di mana Nuku dan pasukannya berada di garis terdepan selama lebih dari empat tahun pengepungan dan serangkaian penyerbuan atas Ternate (1797-1801) – Inggris telah memperlakukan Nuku sebagai partner atau mitra yang sejajar. Selama berlangsung pemerintahan Inggris di Maluku, Sultan Nuku tidak pernah menyubordinasikan kesultannya kepada kekuasaan Inggris di Ternate. Kedudukan Kesultanan Tidore terhadap Inggris adalah *neben* (“sejajar”) dan bukan *unter* (“di bawah”) otoritas penguasa baru Maluku itu.

Itulah sebabnya, Nuku menganggap kesultannya sebagai negara yang independen, merdeka, berdaulat penuh, dan tidak di bawah kekuasaan asing manapun. Dalam posisi semacam inilah Nuku pernah menghimbau Sultan Ternate, Muhammad Yasin, agar kembali kepada kemandirian kesultannya, bila perlu dengan melancarkan pemberontakan bersenjata, bahkan terhadap Inggris sekalipun. Lebih tegas lagi, Nuku menganjurkan kepada Yasin agar hijrah ke Halmahera, sebagaimana dirinya melakukan hijrah ke Halmahera Timur, kemudian ke Seram dan Papua untuk memperjuangkan independensi kesultannya. Menurut Nuku, di Halmahera rakyat akan memberikan dukungan atas pemberontakannya. Nuku juga menegaskan kesiapannya memberi bantuan militer tak terbatas, bila Yasin mau menjadikan Ternate sebagai kesultanan yang independen, berdaulat, dan bebas dari kekuasaan asing. Sayangnya, himbauan Nuku ini tidak pernah dipertimbangkan Yasin tanpa alasan yang jelas.

Selanjutnya, upaya Nuku menghidupkan kembali Kesultanan Jailolo dengan mengangkat Sangaji Tahane sebagai sultannya, juga dimaksudkan sebagai suatu proklamasi simbolik kepada penduduk lokal tentang restorasi Maluku yang telah terpuruk selama beberapa abad sejak kedatangan Portugis pada 1512 menuju suatu era baru yang penuh damai dan sejahtera.²⁶ Tidak dapat disangkal bahwa pengangkatan Muhammad Arif Billa sebagai Sultan Jailolo dimaksudkan Nuku untuk mewujudkan empat pilar penopang Maluku yang bersatu, kuat dan mandiri. Secara simbolik, tegaknya Maluku di atas empat pilar – Jailolo, Ternate, Tidore dan Bacan – telah tercapai dengan kebijakan Nuku, sekalipun hanya bersifat semu dan berlangsung sesaat.

Usul Perdamaian Nuku kepada Belanda

Bagi Nuku, kepergian Inggris dari Maluku sama sekali tidak mengurangi independensi kesultannya, baik secara politik maupun militer. Bahkan, ia tampil lebih percaya diri. Dalam tahun 1803, segera setelah Inggris menyerahkan Maluku kepada Belanda, Nuku maju dengan sebuah agenda perdamaian. Ia menawarkan perjanjian perdamaian kepada Pemerintah Belanda atas dasar persamaan derajat sebagai dua negara berdaulat.

Inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial Belanda seorang penguasa Maluku menawarkan sebuah pakta yang memuat dasar-dasar kondisional bagi terciptanya perdamaian. Syarat-syarat mendasar perdamaian yang ditawarkan Nuku adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan Pemerintah Belanda atas Kesultanan Jailolo sebagai sebuah kerajaan yang sah;
2. Hak opsi bagi penduduk Makian untuk bergabung dengan Ternate atau Tidore.²⁷

²⁶ *Ibid.*, pp. 235 f.

²⁷ *Ibid.*, pp. 238 f.

Gubernur Maluku, Goldbach, yang amat liberal dan sejak awal sangat bersimpati kepada Nuku, dengan ekstra hati-hati menelaah usul perdamaian Nuku. Ia lalu merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat di Batavia agar usul perdamaian Nuku dipertimbangkan secara saksama. Tetapi, Cranssen – mantan Gubernur Maluku yang selama dua tahun kekuasaannya di Ternate selalu mendapat gempuran Nuku – yang menjabat sebagai Gubernur Ambon ketika itu, menafikan rekomendasi Goldbach. Bahkan, ia menyarankan kepada Gubernur Jenderal Joannes Siberg di Batavia agar beberapa tuntutan Nuku sebagai prasyarat perdamaian hanya boleh dipertimbangkan jika Nuku *telah menginsafi* kesalahan-kesalahan yang dilakukannya terhadap Pemerintah Belanda.

Tentang tuntutan pengakuan atas Kesultanan Jailolo, Cranssen mensehatkan agar Pemerintah Belanda hanya bisa menerimanya dengan ketentuan bahwa wilayah Jailolo cuma sebatas daerah Kayasa, yang terletak di selatan Dodinga. Sementara usulan mengenai opsi penduduk Makian disetujui Cranssen. Mengakhiri surat yang berisi pendapatnya tentang usul perdamaian Nuku, Cranssen menyatakan bahwa pembicaraan tentang usul tersebut sebaiknya ditunda, karena Nuku saat itu sedang sakit-sakitan dan, menurut keyakinan Cranssen, tidak lama lagi Sultan Tidore itu akan tiba ajalnya.

Gubernur Jenderal Joannes Siberg, setelah menimbang semua saran di atas, kemudian menyampaikan kepada Sultan Nuku, melalui Gubernur Goldbach, bahwa usulnya tentang pengakuan Sultan Jailolo ditolak Pemerintah Belanda, karena Muhammad Arif Billa tidak mempunyai *hak asal-usul* atas Kesultanan Jailolo.

Setelah berita penolakan Belanda tersiar, pasukan Sultan Jailolo – terdiri dari orang Tobelo, Galela dan Loloda yang bermarkas di Toniku – dipersiapkan menyerang dan menduduki Halmahera Utara dalam sebuah ekspedisi militer, tetapi tidak jadi dilakukan. Ekspedisi yang direncanakan sendiri oleh Nuku ini bertujuan memperoleh pengakuan para *sangaji* dan memberikan legitimasi kepada Arif Billa sebagai Sultan Jailolo.

Kembalinya Kekuasaan Belanda

Berdasarkan perjanjian Amiens, 27 Maret 1802, antara Pemerintah Inggris, Perancis, Spanyol dan Belanda, Inggris harus menyerahkan kembali seluruh wilayah yang diklaim Belanda, kecuali Sri Lanka. Indonesia, termasuk Maluku, dengan demikian akan dikembalikan Inggris kepada Belanda.

Ketika menerima kembali kekuasaan dari Inggris, Komisaris Umum Pemerintah Pusat Belanda, A.A. Buyskes, yang menerima penyerahan kekuasaan itu, telah menyusun sebuah rencana peralihan pemerintahan Maluku yang diusulkannya kepada Gubernur Jenderal Belanda di Batavia. Menurut rencana tersebut, selama masa peralihan hingga terbentuknya sebuah struktur pemerintahan tetap yang telah diperbarui, Maluku – yakni Maluku Utara – akan disubordinasikan kepada Gubernur Ambon, dan di Maluku sendiri cukup ditempatkan seorang wakil gubernur atau gubernur muda.

Usul Buyskes diterima Batavia, dan mulai 1804 Goldbach, yang berpikiran maju itu, dibebastugaskan dari jabatan Gubernur Maluku. Sebagai gantinya, selaras dengan rancangan Buyskes, Carel Lodewijk Wieling diangkat sebagai Wakil Gubernur untuk Maluku yang

berkedudukan di Ternate. Goldbach sendiri ditarik ke Batavia dan diangkat menjadi direktur sebuah departemen pada kantor Gubernur Jenderal.

Pencopotan Goldbach sebenarnya didasarkan pada alasan yang terlalu bersifat pribadi. Ia sangat dekat dengan Nuku dan bersimpati pada perjuangan Sultan Tidore itu. Lagi pula, Goldbach dipandang terlalu mengobok-obok para *bobato* Ternate yang korup dan sangat memeras rakyat, sehingga taraf hidup masyarakat tidak mengalami perubahan ke arah yang positif. Goldbach membandingkan taraf hidup rakyat Tidore yang dinilainya *lebih baik* dari Ternate. Ia menuduh para *bobato* Ternate kurang memperhatikan kepentingan rakyat banyak dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi mereka.

Dalam salah satu pertemuan tertanggal 28 Januari 1804 dengan Sultan Ternate bersama seluruh *bobato*-nya, Goldbach menyarankan agar para *bobato* yang tidak becus dan hanya memeras rakyat dihukum. Ia juga menganjurkan agar rakyat Kesultanan Ternate diberi kebebasan yang luas untuk berusaha dan jangan dihalangi dengan berbagai peraturan serta pungutan.²⁸

Kembalinya Inggris ke Maluku

Pada 1810, Kapten Tucker, atas nama Pemerintah Inggris, mengambil-alih kekuasaan atas Maluku dari tangan Pemerintah Belanda, yang diwakili J.P. von Mittmann, *Gezaghebber* Ternate. Kapten Tucker kemudian digantikan Kapten M.H. Court sebagai Residen Maluku di Ternate.

Pada 1811, Kapten Forbes diangkat Pemerintah Inggris sebagai Komandan Militer dan William Ewer sebagai Residen Maluku. Residen Ewer didampingi W.B. Martin, yang mendapat tugas khusus menangani semua kepentingan East Indian Company (EIC) di Maluku. Pada 5 Nopember tahun ini, ia menandatangani sebuah perjanjian dengan Sultan Ternate, Muhammad Ali, perihal jaminan bisnis EIC di Ternate.

Komandan Forbes bertugas hingga 1813 dan diganti oleh W.G. MacKenzie, yang sekaligus menjabat sebagai Residen Maluku. Tahun berikutnya, MacKenzie digantikan W.B. Martin. Pada masa pemerintahannya, Martin memprakarsai sebuah perjanjian perdamaian antara Sultan Ternate dan Sultan Tidore.

Sultan Muhammad Ali dari Ternate dan Sultan Muhammad Thahir dari Tidore menyepakati perjanjian perdamaian tersebut, yang tanpa prasyarat dan tidak mengandung hal-hal bersifat politis serta militer, tetapi hanya membicarakan “perdamaian dan persaudaraan.” Dengan perjanjian ini, Inggris berharap permusuhan dan perseteruan antara dua kesultanan besar di Maluku itu akan berakhir.

Pada 1815 Martin digantikan Robert Stuart sebagai Residen Maluku. Martin kemudian menempati posisi barunya sebagai Gubernur Inggris di Ambon.²⁹ Setahun kemudian, MacKenzie kembali diangkat sebagai Residen Inggris di Maluku. MacKenzie merupakan residen terakhir Inggris di Maluku, karena setelah tiba di Ternate pada 24 April 1817, ia kemudian menyerahkan kekuasaan Inggris atas Maluku kepada Pemerintah Belanda selang beberapa hari kemudian—

²⁸ Katoppo, *Op.Cit.*, pp. 177 ff.

²⁹ P.H. van der Kemp, *Het Nederland Indisch Bestuur van 1817 op 1818*, s’Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1919, p. 114, catatan 3.

tepatnya pada 30 April 1817. Wakil Belanda dalam acara serah terima kekuasaan ini adalah sebuah komisi di bawah pimpinan Engelhard yang dibentuk untuk penyerahan tersebut. Dengan penyerahan ini, berakhirilah kekuasaan Inggris atas Maluku, yang berlangsung dalam dua periode singkat.

BAB 12

Maluku Utara Pasca VOC: Perubahan Struktur pemerintahan

Gubernur Jenderal Daendels dan Raffles

Dalam akta Oktroi yang diberikan *Staten Generaal* (Parlemen Belanda) kepada VOC pada 1602, badan niaga ini berhak melakukan kegiatan perdagangan umum dalam arti yang luas dan berwenang membentuk pemerintahan. Corak hukum publik dari kewenangan ini adalah: kekuasaan penuh VOC untuk membuat perjanjian dengan para raja dan kepala persekutuan tradisional, seperti kepala komunitas adat yang ada di Indonesia, disamping membentuk pemerintahan sendiri, menerapkan peraturan perundangan melalui aparat kekuasaannya, serta merekrut tentara dan mendirikan benteng. Dalam salah satu instruksi *Staten Generaal*, tertanggal 14 Nopember 1609, ditentukan bahwa gubernur jenderal harus berusaha di bidang perdagangan dan membina hubungan dengan para raja.

Untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara langsung, seorang gubernur jenderal diangkat. Bersama *Raad van Indie* (Dewan Hindia), gubernur jenderal mengambil keputusan untuk semua kebijakan dan kejadian tanpa campur tangan manajemen puncak VOC di Belanda.

Berdasarkan akta Oktroi itulah, *Staten Generaal* untuk pertama kalinya mengangkat Pieter Both dari Amersfoort sebagai Gubernur Jenderal VOC (1610-1614). Gubernur jenderal VOC pertama ini berdomisili di Ternate sebagai tempat kedudukan pemerintah pusat VOC. Namun, sejak Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen (1619-1623), pengangkatan pejabat tertinggi VOC di Indonesia dilakukan langsung oleh *De Heren XVII* dengan persetujuan *Staten Generaal*. Struktur semacam ini berjalan hingga 1795, ketika tentara Napoleon menyerbu dan menduduki Belanda. Setelah pendudukan itu, Napoleon membentuk pemerintahan boneka dan mengangkat Louis Napoleon sebagai Raja Belanda. Sementara Raja Belanda yang sah, William I, mengungsi ke Inggris dan menetap di Kew. Beberapa tahun kemudian, tepatnya 31 Desember 1779, Pemerintah Belanda memutuskan pembubaran VOC. Tujuh tahun berikutnya, Perancis kemudian Inggris menguasai hak-hak milik Belanda di Indonesia.

Sementara itu, Legiun Batavia yang menamakan dirinya “orang-orang patriotik Belanda” percaya bahwa mereka dapat menggunakan Perancis untuk membebaskan Belanda dari oligarki dan depotisme. Salah satu petinginya, Herman William Daendels, seorang jenderal milisi yang ahli hukum, dikirim ke Indonesia pada akhir 1807 sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan tiba di Anyer pada 1 Januari 1808. Daendels, yang terkenal kekejamannya dalam pembangunan jalan Anyer-Panarukan, memegang jabatan Gubernur Jenderal hingga 1811, saat Inggris mengambil-alih kekuasaan dan mengangkat Sir Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderalnya di Indonesia, berdasarkan Kapitulasi Tuntang, 18 September 1811. Inggris berkuasa di Indonesia hingga 1816.

Sejak orang Bataafsche Republik menguasai pemerintahan Belanda pasca penyerbuan Perancis, negeri Belanda menjadi *vazal* Perancis.¹ Lantaran pengaruh orang-orang inilah, *Staten Generaal* mengusulkan kepada Pemerintah Belanda agar direksi VOC, *De Heren XVII*, diganti dengan *Committee tot de Zaken van den Oost Indischen Handel en Bezettingen* (Komite Urusan Niaga dan Pendudukan Hindia Timur), yang beranggotakan 18 orang. Komite ini sangat pro-Perancis yang tengah mengontrol negeri Belanda ketika itu. Sekalipun hingga 1811 Belanda tetap memegang kekuasaan di Indonesia, penguasa sebenarnya di bumi nusantara ini – sebagaimana juga di Belanda sendiri – adalah Kaisar Napoleon Bonaparte dari Perancis.

Pada 19 Agustus 1816, Pemerintah Hindia Belanda kembali dikukuhkan di Jakarta sebagai penguasa Indonesia.² Kembalinya kekuasaan Belanda ini didasarkan pada perjanjian antara Belanda dan Inggris yang ditandatangani di London pada 13 Agustus 1814. Konvensi London ini menetapkan bahwa seluruh koloni Belanda di Asia dan Afrika dikembalikan kepada Belanda, dengan pengecualian Afrika Selatan, Demorara, Essequebo dan Barbece di Guyana, serta Sri Lanka. Cochin di teluk Malabar ditukar dengan Bangka.

Untuk menerima penyerahan kekuasaan dari Inggris, Pemerintah Belanda membentuk sebuah komisi yang terdiri dari 3 orang, masing-masing Baron van der Cappelen, Mr. C.T. Elout dan A.A. Buyskes. Sementara Nicolaas Engelhardt, yang mengetahui seluk-beluk Maluku secara mendalam, diangkat sebagai komisaris untuk kawasan tersebut.³

Restrukturisasi Pemerintahan

Dengan penandatanganan Konvensi London pada 1814, yang mengalihkan kekuasaan di Indonesia dari Inggris kepada Belanda, reorganisasi pemerintahan mulai dijalankan Belanda untuk seluruh *Nederland Indie*. Pada 3 Januari 1815, diundangkan *Regeringsreglement (RR, Reglemen Pemerintahan)*, yang secara efektif berlaku pada 1818. Bentuk pemerintahan yang ditetapkan dalam *RR* adalah sentralistik.

C. Fasseur mengemukakan bahwa *RR* sarat dengan diskriminasi atas dasar ras dan agama.⁴ Sinyalemen ini cukup beralasan. Rasialisme, misalnya, terdapat pada pembagian kawula negara Hindia Belanda ke dalam golongan Eropa, Timur Asing dan Pribumi. Tiap golongan memiliki hak yang berbeda dalam perlakuan hukum publik maupun privat. Jabatan tertentu, seperti residen, asisten residen, kontrolir (*controleur*), *gezaghebber*, dan lainnya, hanya boleh dijabat orang Eropa. Pengadilan *Landraad* dan swapraja disediakan untuk pribumi, sementara *Raad van Justitie* bagi orang Eropa. Hukum Adat diberlakukan atas pribumi, sementara *BW (Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-undang Hukum Perdata)* untuk orang Eropa. Gaji orang Eropa lebih besar dibanding pribumi, walaupun persyaratan pendidikan, kemampuan dan

¹ W.P.A. Coolhas.p.82.

² Graham Irwin, "Dutch Historical Sources", dalam *An Introduction to Indonesian History*, eds. Soejatmoko, et.al. Ithaca & London: Cornell Univ. Press, 1965, pp. 244 ff.

³ H.J. de Graaf, *Geschiedenis van Ambon en de Zuid Molukken*. Franeker: T. Wever B.V, 1977, p. 212.

⁴ C. Fasseur, "Cornerstone and Stumbling Block: Racial Classification and the Late Colonial State in Indonesia," dalam *Political and Economic Foundation of the Netherland Indies 1880-1942*, ed. Robert Cribb. Leiden: KITLV Press, 1994, p. 32.

kecakupannya sama. Dalam lembaga-lembaga perwakilan, baik *volksraad* ataupun dewan kota, orang Belanda terwakili secara mayoritas, sekalipun jumlahnya minoritas.

Semua yang bukan pribumi dan Eropa digolongkan ke dalam kelompok Timur Asing. Golongan ini dibedakan ke dalam Timur Asing Cina dan bukan Cina, termasuk dalam klasifikasi ini adalah orang Asia, Afrika dan Timur Tengah. Orang Jepang, walaupun berasal dari Asia, digolongkan sebagai orang Eropa berdasarkan perjanjian. Hal yang sama dinikmati orang kulit putih Afrika Selatan.

Pada 1834 dibentuk Kementerian Urusan Daerah Jajahan (*Ministerie van Kolonien*) pada kabinet Kerajaan Belanda. Kementerian ini menjadi kepanjangan tangan Mahkota dan Parlemen Belanda dalam menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Pemerintahan tertinggi di Indonesia yang dijalankan Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia bertanggung jawab kepada Mahkota Belanda dan *Staat Generaal* melalui kementerian ini.

Pada 1848, penetapan anggaran untuk Hindia Belanda masuk ke dalam anggaran belanja Kerajaan Belanda. Dengan demikian, Hindia Belanda memperoleh anggaran, tetapi masih disatukan dengan anggaran Kementerian Urusan daerah Jajahan. Baru pada 1903, Hindia Belanda memperoleh anggaran tersendiri, terpisah dari kementerian tersebut.

Pada 1918, se usai Perang Dunia I, dibentuk Dewan Rakyat (*Volksraad*) yang beranggotakan 61 orang, dan ketuanya diangkat Ratu Belanda. Golongan pribumi diwakili 25 anggota dewan, 20 di antaranya dipilih melalui dewan-dewan lokal dan sisanya diangkat. Walaupun minoritas, golongan Belanda diwakili 30 anggota, 15 dipilih melalui dewan-dewan lokal dan sisanya diangkat. Golongan Timur Asing diwakili 5 anggota, 3 dipilih dan 2 diangkat. *Volksraad* berwenang menetapkan rancangan anggaran belanja sementara, dan bersama Gubernur Jenderal membuat undang-undang serta peraturan. Jika timbul persengketaan antara keduanya, keputusannya dikembalikan ke tangan Raja Belanda setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Urusan Daerah Jajahan.

Se usai Perang Dunia I, Gubernur Jenderal memberi keterangan di depan *Volksraad* pada 18 Nopember 1918, dan mengemukakan bahwa Pemerintah Belanda akan membentuk sebuah komisi untuk meninjau kembali hubungan ketatanegaraan Indonesia-Belanda. Komisi ini kemudian dibentuk beranggotakan 28 orang, sebagian diambil dari *Volksraad*. Komposisi keanggotaannya adalah 9 pribumi, seorang Cina, dan sisanya orang Belanda.⁵ Janji akan meninjau kembali hubungan ketatanegaraan ini ternyata tenggelam tidak tentu rimbanya, dan tidak pernah terlaksana.

Pada September 1940, Pemerintah Hindia Belanda kembali membentuk sebuah komisi dengan tujuan serupa, seperti dijanjikan pada 18 Nopember 1918. Komisi Perubahan Ketatanegaraan ini diketuai oleh Visman – karena itu juga dikenal sebagai Komisi Visman – dan bertugas “*bestudering staatrechtelijk hervorming*” (mengkaji perubahan ketatanegaraan). Pada Desember 1941, komisi tersebut merampungkan tugas dan menyerahkan hasil kajiannya kepada Pemerintah. Tetapi, belum sempat hasil kerja komisi itu dibahas *Volksraad*, Jepang keburu mendarat di Indonesia dan mengambil alih kekuasaan Belanda.⁶

⁵ W.H. Helsdingen, "Staatkundige Ontwikkeling," dalam *Balans van Beleid: Terugblik op Laatste Halve Eeuw van Ned. Indie*, eds. H. Bandet dan J.J. Brugmans. Assen: Van Gorkum NV, 1961, pp. 187 & 194 ff.

⁶ *Ibid.*, p. 201.

Pecahnya Perang Dunia II mengakibatkan Pemerintah Belanda mengungsi ke Inggris, karena negaranya diduduki Jerman. Pada 6 Desember 1942, dari London, Inggris, melalui Radio Oranje, Ratu Wilhelmina mengucapkan pidato yang menjanjikan bahwa Belanda akan melangsungkan pembicaraan dengan Indonesia untuk membahas kemerdekaannya dan hubungan lebih jauh kedua negeri setelah perang usai.⁷ Tetapi, rakyat dan para pemimpin Indonesia tidak terpengaruh dengan janji ini. Seusai perang, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, tanpa menunggu pembicaraan dengan Pemerintah Belanda.

Struktur Pemerintahan Maluku⁸ Sejak VOC: *Landvoogdij der Moluksche Eilanden*

Sekalipun VOC telah eksis di Maluku sejak 1602, tetapi pelaksanaan pemerintahan secara definitif baru dimulai secara resmi dengan terbentuknya *Landvoogdij der Moluksche Eilanden*, dan dengan diangkatnya Paulus van Carden pada 1610 sebagai gubernurnya yang pertama.

Pemerintahan VOC ketika itu lebih difokuskan pada upaya memperoleh monopoli perdagangan rempah-rempah dan cara-cara mempertahankannya – Ternate memberikan hak monopoli ini kepada VOC pada 1607, sementara Bacan dan Tidore pada 1657. Selama lebih dari 135 tahun VOC harus mengerahkan segala daya upaya, baik bersifat politik, ekonomi, maupun militer, untuk mempertahankan monopoli tersebut menghadapi saingannya – Spanyol dan Inggris, serta pesaing-pesaing lokal seperti pedagang Bugis-Makassar – maupun gangguan dari para penyelundup lokal.

Karena VOC memandang Maluku sangat potensial, ia menempatkan pusat kekuasaannya untuk Indonesia di Ternate sejak 1612 hingga 1616. Tiga gubernur jenderal pertama VOC – masing-masing Pieter Both, Gerard Reynst, dan Laurens Reael – bermarkas di Ternate. Baru beberapa saat setelah Jan Pieterzoon Coen menjabat sebagai Gubernur Jenderal, ia memindahkan markas besar VOC dari Ternate ke Batavia pada 1616.

Setelah memantapkan monopolinya, VOC mulai berupaya mengontrol kerajaan-kerajaan di Maluku. Ada dua bentuk kebijakan yang dijalankan VOC untuk tujuan tersebut:

Pertama: terhadap para sultan yang mau bekerjasama, VOC berlaku ramah dan bersahabat serta bersedia memberikan bantuan, baik keuangan maupun militer. Kesultanan Ternate terhitung yang paling ramah dan, karena itu, VOC tidak tanggung-tanggung mengobral bantuannya. Bantuan militer paling signifikan diperoleh Ternate pada abad ke-17, ketika VOC bahu-membahu dengan Ternate mengusir Spanyol dari Benteng Gamlamo (1607), membantu penyerbuan atas Bacan serta mengembalikan Kayoa kepada Ternate (1609), memantapkan pendudukan atas Jailolo (1635), membantu penyerangan atas Gorontalo (1647), serta menyokong berbagai operasi militer di pantai timur Sulawesi Tengah (1655).

Kedua: VOC akan berlaku tidak bersahabat terhadap kerajaan yang tidak suka atau setengah hati dalam menjalin kerjasama dengan VOC. Bacan dan Tidore, misalnya, tidak mendapat perlakuan yang ramah dari VOC, karena kedua kesultanan itu tidak jarang menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan VOC, terutama berkaitan dengan upaya

⁷ S.L. Van der Wal, *Officiele Bescheiden betreffende de Ned.- Indonesische Betrekkingen*, vol. I. s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1971, p. 71.

⁸ Istilah Maluku di sini berarti Maluku Utara yang sekarang.

gelap keduanya menerobos hak monopoli perniagaan rempah-rempah. Pada pertigaan ketiga abad ke-18, penyelundup Filipina Selatan berkeliaran di Tidore dan Halmahera Timur, yang memberi kesan kepada VOC bahwa Tidore telah melindungi para penyelundup dan melanggar hak monopoli yang tertuang dalam perjanjian 1657. Keadaan ini diperburuk oleh penyelundupan rempah-rempah yang dilakukan orang Patani ke Seram Utara. Demikian pula, VOC memandang Bacan tidak mampu mencegah penyelundupan rempah-rempah di wilayahnya.

Karena sikap para sultan Maluku tidak sama terhadap VOC, pemerintahan langsung oleh VOC hanya berjalan di Ternate dalam sejumlah kawasan atau lingkungan yang disebut *wijk*. Kawasan ini meliputi Kampung Makassar, Kampung Cina, Kampung Sarani, dan ke selatan hingga Kalumata. Selebihnya merupakan kawasan dengan pemerintahan tidak langsung yang dipegang Sultan Ternate. Belakangan, sejak 1925, kawasan pemerintahan langsung Belanda melebar ke selatan hingga ke Kastela. Di Tidore, praktis tidak ada pemerintahan langsung VOC atau Belanda. Sementara di Bacan, pemerintahan langsung Belanda baru terjadi pada 1925 dan terbatas pada ibukota Labuha, karena terdapat pemukiman orang-orang Kristen di sana.

Maluku di bawah Gubernemen Belanda (1817-1866) dan Kelahiran Maluku Utara ex RR 1815

Berdasarkan Konvensi London 1814, Inggris menyerahkan kembali kekuasaan atas Indonesia kepada Belanda. Untuk Maluku, Belanda membentuk sebuah badan penyerahan kekuasaan pada 5 April 1817. Komisaris badan ini kemudian mengangkat Letnan Kolonel J. Groot dan Administrator Ambon, J.A. Nijs, untuk menerima penyerahan kekuasaan dari Residen Inggris, W.G. Mac Kenzie.⁹ Penyerahan kekuasaan tersebut berlangsung pada 30 April 1817 di Benteng Oranje.

Beberapa waktu setelah itu, Pemerintah Kolonial Belanda melakukan perubahan struktur pemerintahan untuk seluruh Indonesia berdasarkan RR 1815. RR ini adalah sebuah reglemen ketatanegaraan yang diundangkan pada 3 Januari 1815, tetapi baru mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 1818. Dengan belakunya RR ini, status *Landvoogdij der Moluksche Eilanden* yang mengatur pemerintahan Maluku sejak 1610 dihapus. Jika sebelumnya Maluku terdiri dari Keresidenan Ternate dan Manado di bawah gubernur yang berkedudukan di Ternate, kini *Gouvernement der Moluksche Eilanden* (Gubernemen Kepulauan Maluku) terdiri atas Keresidenan-keresidenan Ambon, Banda, dan Ternate di bawah Gubernemen Ambon.

Nama Maluku yang semula bermakna gugusan pulau Ternate, Tidore, Makian, dan Bacan, sejak 1817 diperluas meliputi seluruh Maluku Utara, Maluku Selatan dan Sulawesi Utara. Dan selama hampir setengah abad, yakni dari 1817 hingga 1866, Maluku menjelma menjadi sebuah wilayah yang luas, mulai dari Sulawesi Tengah ke utara hingga Papua.¹⁰

⁹ de Clerq, *Op.Cit.*, p. 169.

¹⁰ J.H. Tobias, *Memorie van Overgave (1857)*, dan C. Bosscher, *Memorie van Overgave (1859)*, Kata Pengantar: A.B. Lopian. Jakarta: Arsip Nasional, 1980. pp. 1-2.

Maluku Utara antara 1866-1907

Dengan besluit Gubernur jenderal no. 2, tertanggal 6 Desember 1866 (S. 1866 no. 139), *Gouvernement der Moluksche Eilanden* dihapus. Keresidenan Ternate, Manado, Ambon dan Banda tidak lagi disubordinasikan ke dalam *Gouvernement der Moluksche Eilanden*, tetapi masing-masing dinyatakan sebagai keresidenan yang mandiri dan langsung berada di bawah Gubernur Jenderal. Keputusan Gubernur jenderal ini mulai berlaku pada 10 Desember 1866. Pada 1882, Gubernur jenderal menempatkan asisten residen masing-masing di Galela dan Patani.

Keresidenan Ternate (Maluku Utara) sendiri meliputi seluruh wilayah hukum Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore dan Kesultanan Bacan. Wilayah masing-masing kesultanan tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

a. Kesultanan Ternate:

1. Pulau Ternate dan Hiri;
2. Pulau-pulau Moti, Makian, Kepulauan Kayoa dan Guraici;
3. Daerah perbatasan antara Halmahera yang menjadi wilayah Ternate dan Tidore, ditandai garis Tofongo di sebelah timur, di sebelah Teluk Tumiri sampai Kayoa;
4. Pulau Morotai dan Rao yang terletak di ujung utara Halmahera;
5. Bagian selatan Halmahera dengan batas-batas dari Foya di pantai timur menuju Joyopa di pantai barat;
6. Pulau di bagian selatan Halmahera dan meliputi Selat Pontiti dan Danuar;
7. Pulau Mayo dan Tofure yang terletak antara Ternate dan Kema (Batang Dua);
8. Kepulauan Sula - Taliabu;
9. Kepulauan Banggai dan kelompok pulau Kepulauan Sula serta Teluk Banggai di pantai timur Sulawesi;
10. Pantai timur Sulawesi, di mana terletak pulau-pulau di teluk Tomimi. Selanjutnya mulai Tomimi sampai Lasalo dan daerah pedalaman yang berbatasan dengan Tojo dan Swapraja Toraja hingga dekat Tuepe dan Swapraja Luwu;
11. Pulau-pulau Mami dan Wowini.

b. Kesultanan Tidore:

1. Pulau Tidore, Filonga, Maitara dan Mare;
2. Halmahera Tengah dan pulau-pulau di ujung selatan Halmahera, yaitu Sibub, Woda, Rajai, Goratu, Tawin dan Joji;

¹¹ *Regerings Almanak 1924*, bab Dept. van Binnenlandsche Bestuur.

3. Semua pulau yang terletak antara Teluk Halmahera dan Papua, yaitu: Tofongo di utara dan Foya di selatan.

c. Kesultanan Bacan:

1. Pulau Bacan atau Seki;
2. Kasiruta atau Tawale Besar, Mandaoli, Obi atau Batanglobang, Bungamas atau Batupacitaka, Tabubilik, Batu Ampat, Wiring, Nusa Pau, Lata-lata, Tawale Kecil, Nusa Raloid, dan Gilalang atau Batusambo.

Maluku Utara antara 1898-1914

Restrukturisasi pemerintahan dan perubahan status wilayah Maluku Utara kembali diintroduksi Belanda dengan besluit Gubernur Jenderal no. 19, tertanggal 5 Februari 1898. Besluit ini antara lain menetapkan wilayah pemerintahan Keresidenan Ternate dibagi ke dalam 8 *afdeling*, yaitu:

1. *Afdeling Ternate* di bawah pemerintahan langsung residen;
2. *Afdeling Bacan* di bawah seorang kontrolir yang berkedudukan di Labuha;
3. *Afdeling Halmahera Utara* di bawah seorang *bestuur* asisten yang berkedudukan di Galela;
4. *Afdeling Halmahera Timur dan Selatan* di bawah seorang *posthouder* yang berkedudukan di Patani;
5. *Afdeling Kepulauan Sula* di bawah seorang *posthouder* yang berkedudukan di Sanana;
6. *Afdeling Banggai* di bawah *posthouder* yang berkedudukan di Kintang, Banggai, pantai timur Sulawesi;
7. *Afdeling Papua Utara*, di bawah seorang kontrolir yang berkedudukan di Kaap de Goede Hoop. Berdasarkan S. 1898 no. 142, ibukota Papua Utara dipindahkan ke Monokwari di wilayah Swapraja Dori;
8. *Afdeling Papua Barat dan Selatan* di bawah seorang kontrolir yang berkedudukan di Kepulauan Raja Ampat. Dengan S. 1899 no. 142, ibukota *afdeling* ini dipindahkan ke Fak-fak, Swapraja Kapaur.

Belakangan, dengan S. 1902 no. 163, beberapa bagian Papua Selatan, yaitu Tanjung Steenboom dan pulau-pulau yang terletak di sekitarnya, menjadi daerah pemerintahan langsung dan dipisahkan dari Keresidenan Ternate, terhitung sejak 20 Januari 1902. Pemerintahan di kedua wilayah ini dijalankan seorang asisten residen mulai 1 Juni 1902.¹²

Beberapa waktu setelah restrukturisasi tersebut, sejumlah wilayah Keresidenan Ternate mulai dipisahkan melalui ketetapan Gubernemen:

1. *Pemisahan Papua Selatan*: Ketika Pemerintah Kolonial Belanda mengambil langkah awal untuk mengukuhkan kekuasaannya di Papua pada 1898, dibentuklah dua *afdeling*:

¹² *Regerings Almanak voor Ned. Indie*, vol. 2, Jakarta: Land-drukkerij, 1814-1914, pp. 217 f.

Afdeling Papua Utara dan Afdeling Papua Selatan. Papua Selatan dipisahkan dari Kesultanan Tidore dalam administrasi pemerintahannya, dan atas wilayah tersebut berlaku pemerintahan langsung. Melalui perjanjian tambahan antara Gubernur dan Sultan Tidore pada 1902, Papua Selatan mendapat status sebagai daerah pemerintahan langsung di bawah seorang asisten residen.¹³

Pada 1912, *Afdeling Papua Utara dan Papua Selatan*, berikut Kepulauan Raja Ampat, dipisahkan dari Keresidenan Ternate dan digabung ke dalam Keresidenan Maluku Selatan yang berpusat di Ambon. Pemisahan ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi pelaksanaan administrasi pemerintahan.

2. *Pemisahan Afdeling Banggai dan Kepulauan Raja Ampat:* Kepulauan Banggai yang sejak awal abad ke-14 menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate, dan sejak 1866 menjadi *afdeling* dalam lingkungan Keresidenan Ternate, berdasarkan S. 1907 no. 367, dipisahkan dari Ternate dan digabungkan ke dalam *Gouvernement der Celebes en Onderhorigheden* (Gubernur Sulawesi dan Daerah Taklukannya) yang berpusat di Makassar.

Maluku Utara antara 1921-1925

Dengan besluit Kerajaan Belanda tertanggal 16 April 1921 (S. 1921 no. 430), Keresidenan Ternate yang sejak 1866 menjadi keresidenan mandiri, disatukan dengan Keresidenan Amboina. Maluku Utara, dengan demikian, tidak lagi berstatus sebagai keresidenan, tetapi hanya bagian dari Keresidenan Amboina. Ia menjadi *Afdeling Ternate* yang meliputi seluruh wilayah Maluku Utara.

Besluit yang ditandatangani Ratu Wilhelmina ini tidak memuat pertimbangan yuridis mengapa status Keresidenan Ternate diturunkan menjadi *Afdeling Noord Molukken*. Dalam konsiderannya hanya disebutkan usul Menteri Urusan Daerah Koloni tertanggal 11 April 1921 bagian ke-4 no. 112, dan pasal 68 (1) Reglemen Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda.

Lebih jauh, besluit tersebut hanya memuat dua pasal. Pasal 1 menentukan bahwa Keresidenan Ternate dan daerah taklukannya digabungkan pada yurisdiksi Keresidenan Amboina. Sementara pasal 2 menetapkan tanggal mulai berlakunya besluit, yang akan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan Menteri Urusan Koloni ditugaskan melaksanakan besluit. Berdasarkan ketentuan pasal ini, Gubernur Jenderal mengeluarkan besluit tertanggal 16 Juni 1921 no. 27, yang menyatakan berlakunya besluit kerajaan tersebut.

Jika besluit kerajaan itu dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi pada 1921, akan terlihat bahwa perubahan status Keresidenan Ternate menjadi *afdeling* tidak lepas dari upaya Pemerintah Belanda untuk mengintegrasikan seluruh kawasan Indonesia Timur ke dalam Propinsi Timur Besar (*Grote Oost*) di bawah seorang gubernur yang berkedudukan di Makassar.

Dengan melorotnya status Keresidenan Ternate menjadi sekadar *afdeling*, sejumlah *onderafdeling* dibentuk di wilayah bekas keresidenan itu, yakni *Onderafdeling Jailolo*, Weda, Tobelo, Sanana, Bacan dan Ternate. Masing-masing *onderafdeling* dipimpin seorang kontrolir atau *gezaghebber*. *Afdeling Ternate* sendiri dipimpin seorang asisten residen.

¹³ Jeroen A. Overweel, *Topics Relating Netherland - New Guenea*. Leiden-Jakarta: OSALCUL/IRIS, 1995, p.3.

Pembaruan Pemerintahan antara 1925 hingga 1942

Pada 1925, Pemerintah Belanda mengundang Undang-undang Pembaruan Pemerintahan Maluku: Pembentukan Gubernemen Maluku (*Bestuurshervorming Molukken: Instelling van een Gouvernement der Molukken*). Undang-undang yang mulai berlaku pada 1 Januari 1926 ini menentukan bahwa pemerintahan di Maluku dijalankan seorang gubernur atas nama Gubernur Jenderal. Pemerintahan Maluku akan mencakup wilayah Keresidenan Ambon yang meliputi daerah-daerah *Onderafdeling* Timor, dan Keresidenan Timor Kepulauan berikut daerah taklukannya, serta *Afdeling* Ternate. Keresidenan Ambon mencakup 15 *onderafdeling*, dan *Afdeling* Ternate mencakup 12 *onderafdeling*, 6 di Maluku Utara dan sisanya di Papua. Untuk mengepalai tiap-tiap *onderafdeling* diangkat seorang *gezaghebber*, dan jabatan asisten residen ditiadakan.¹⁴ Disamping itu, Gubernur juga mengangkat sejumlah bestuur asistent pada setiap *onderafdeling*.

Ke-15 *onderafdeling* Keresidenan Ambon adalah: Pulau Ambon, Saparua, Banda, Buru, Seram Barat, Amahai, Wahai, Seram Timur, Kepulauan Kei, Aru, Larat, Kepulauan Babar, Papua, Kisar dan Boven Digul. Sementara ke-12 *onderafdeling* Ternate adalah: Ternate, Jailolo, Weda, Tobelo, Bacan, Kepulauan Sula, Sorong, Pulau-pulau Schouten, Kelompok Kepulauan Yapen, Holandia, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Pelaksanaan pemerintahan di Maluku Utara berdasarkan perubahan tersebut tetap berjalan seperti semula. Ada daerah tertentu yang langsung berada di bawah pemerintahan *gezaghebber*, dan ada daerah tertentu yang berpemerintahan tidak langsung di bawah para sultan dan *bobatonya*.¹⁵

Pada 1930, Pemerintah Belanda mengeluarkan *Zelf Bestuur Regeling*, yang menetapkan pembagian Maluku Utara ke dalam tiga swapraja: Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Bacan. Tiap kesultanan dibagi ke dalam distrik-distrik, yang dikepalai oleh kepala distrik, dan membawahi onder-distrik. Kepala distrik diangkat dan diberhentikan oleh masing-masing sultan di wilayahnya.

Pemerintahan dengan corak gabungan semacam ini – yakni pemerintahan langsung Belanda dan pemerintahan tidak langsung Belanda di bawah para para sultan dan *bobato*-nya – berlangsung hingga masuknya tentara pendudukan Jepang pada 1942.

¹⁴ Keputusan Gubernur Maluku 8 Februari 1927 no. 2.

¹⁵ Lihat bab 6, *Maluku Utara antara 1866-1907* di atas.

BAB 13

Maluku Utara: 1817-1914

Sultan Mahmud Badaruddin menjalani hukuman pengasingan di Ternate

Dengan fregat *Malampus* di bawah komandan de Man, Sultan Palembang, Mahmud Badaruddin, tiba di Ternate pada tahun 1822 dalam rangka menjalani hukuman pengasingan. Badaruddin diasingkan Belanda ke Ternate lantaran berupaya memerdekakan daerahnya dari segala bentuk penjajahan asing. Pada 1811, Badaruddin menyerang garnisun Belanda di Palembang dan menewaskan 87 tentara Belanda. Pada 1812, Inggris menyerang Palembang karena Badaruddin tidak mau bekerjasama. Tetapi, Badaruddin berhasil lolos dalam serbuan Inggris itu. Pada 1819, Belanda menggempur Palembang, tetapi berhasil dihalau. Dua tahun kemudian, Belanda mengerahkan pasukan besar menggempur Palembang dan berhasil mengalahkan serta menahan Badaruddin. Bersama keluarga dan pengikutnya, Badaruddin diasingkan ke Ternate. Di Ternate, ia ditempatkan di sebuah rumah, dan kawasan rumah itu belakangan dikenal dengan nama kampung Palembang, sekarang menjadi pusat perdagangan yang terletak di jalan Nukila.

Selama dalam pengasingan, Badaruddin mendapat tunjangan f.800 per bulan, suatu jumlah yang amat kecil untuk membiayai diri, keluarga, serta pengikutnya. Pada 26 Nopember 1852, Badaruddin wafat dalam usia 80 tahun dan dikuburkan di Pekuburan Islam Ternate. Oleh Pemerintah RI, ia diakui sebagai pahlawan nasional.

Setelah wafatnya Badaruddin, sebagian pengikutnya kembali ke Palembang, tetapi sebagian lagi tetap tinggal di Ternate menemani putera Badaruddin. Pengikut setia Badaruddin antara lain adalah keluarga Raden Panji dan keluarga Raden Jahir.

Kunjungan Gubernur Jenderal van der Cappelen

Dalam bulan Mei 1824, Gubernur Jenderal pertama pada masa pemerintahan komisaris jenderal di Indonesia, Baron van der Cappelen, tiba di Ternate. Ini merupakan kunjungan pertama seorang gubernur jenderal pasca kekuasaan Inggris, serta perlu direkam di sini lantaran serangkaian perjanjian yang dibuatnya dengan Kesultanan Ternate dan Tidore, selain waktu kunjungan yang cukup lama. Perjanjian-perjanjian yang berhasil diupayakan van der Cappelen memiliki nilai kesejarahan yang signifikan dalam rangka memperkuat kolonialisme Belanda di Maluku, seperti terlihat dari akibat-akibatnya dalam perjalanan historis daerah ini di masa belakangan.

Setelah serangkaian pertemuan formal dan non-formal dengan Sultan Ternate serta Tidore, yang dilakukan setibanya van der Cappelen di Maluku Utara, pada 18 Mei ia mengunjungi kediaman Sultan Palembang, Badaruddin, yang ketika itu diasingkan di Ternate, dan disambut sendiri sang sultan beserta puteranya. Dalam pertemuan ini, Badaruddin meminta diizinkan menjalani sisa hidupnya di Batavia atau tempat lainnya di Jawa, karena Ternate jauh dari pusat kekuasaan Batavia. Badaruddin juga mengemukakan alasan bahwa di Ternate sering terjadi gempa yang berbahaya. Gubernur Jenderal menjawab bahwa Badaruddin sebaiknya jauh dari Batavia supaya dapat beribadah secara khusyuk, dan bahwa Ternate juga merupakan bagian Netherland Indie, sama seperti Batavia atau Jawa. Sampai akhir hayatnya, permohonan Badaruddin tidak pernah dikabulkan Belanda. Ia wafat dalam usia 89 tahun pada 26 Nopember 1852, dan dimakamkan di pekuburan Islam Ternate.

Pada 19 Mei, Gubernur Jenderal mengunjungi Benteng Toloko, terletak di utara Ternate, sekitar setengah jam perjalanan kaki dari Benteng Oranje. Nama resmi Benteng Toloko adalah *Fort Hollandia*. Benteng ini dibangun di atas punggung sebuah bukit, berjarak sekitar 50 meter dari tepi pantai. Pada 1661, Sultan Mandarsyah pernah tinggal sementara waktu di sini setelah terjadi pertengkaran dengan para *bobato* pemerintahannya. Antara 1797 hingga 1801, Benteng Toloko menjadi salah satu pusat pertahanan Kompeni di utara Ternate menghadapi Inggris dan Nuku. Usaha Nuku dan Inggris merebut benteng ini selalu gagal. Konon, disain Benteng Toloko yang berbentuk alat vital laki-laki berasal dari isteri Gubernur Jenderal pertama VOC, Pieter Both. Sebuah prasasti dari isteri Pieter Both terdapat pada dinding benteng tersebut.¹

Keesokannya, 20 Mei, van der Cappelen mengunjungi Tidore dan berunding dengan Sultan Ahmadul Mansur. Perundingan ini membahas berbagai agenda mengenai kepulauan Raja Ampat dan Papua Utara, serta maraknya aksi bajak laut di seluruh perairan Maluku. Tentang butir terakhir ini, Gubernur Jenderal meminta Sultan Tidore membantu mengatasinya, terutama menyangkut operasi bajak laut yang terjadi dalam wilayah kekuasaannya.

Pada 21 Mei, Gubernur Jenderal mengadakan rapat dinas dengan para pejabat keresidenan. Dalam rapat tersebut, van der Cappelen meminta para pejabat itu berupaya mendamaikan Sultan Tidore dan Ternate. Ia juga memutuskan mengangkat dua pejabat setara asisten residen yang akan ditempatkan di Galela dan Bicoli. Van Geuricke kemudian ditunjuk untuk menjabat di wilayah Galela, dan Combier di wilayah Bicoli.

Antara 22-30 Mei, serangkaian perundingan dilakukan Gubernur Jenderal dengan Sultan Ternate dan Tidore. Rangkaian perundingan ini menghasilkan sejumlah keputusan. Beberapa yang penting adalah:

1. Pemerintah Hindia Belanda menjalin persahabatan dengan Kesultanan Ternate dan Tidore.
2. Persahabatan serupa juga terjalin antara kedua kesultanan tersebut berikut rakyatnya.
3. Kedua kesultanan itu mengakui kekuasaan tertinggi dan kedaulatan penuh Pemerintah Hindia Belanda yang berlaku atas masing-masing kesultanan dan hak Pemerintah Belanda mengangkat pengganti sultan.

¹ V.I. van der Wall, *De Nederlandsche Oudheden in de Molukken*. s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1928, pp. 253-255.

4. Kesultanan Ternate dan Tidore mengakui hak Gubernur atas beberapa daerah kesultanan di seberang lautan,² dan berjanji membantu Gubernur bila terjadi perang, serta kawula kesultannya tidak akan menjadi kawula atau rakyat kerajaan asing.
5. Kedua kesultanan tidak akan membuat perjanjian atau perikatan apapun dengan kekuasaan lain tanpa seizin Gubernur, dan segala perselisihan antara keduanya atau antara kawula kesultanan keduanya akan dilaporkan kepada Gubernur.
6. Kedua kesultanan tidak akan membangun atau menyuruh membangun benteng dalam wilayah kekuasaannya, dan tidak akan membuat peraturan serupa yang telah dibuat Gubernur.
7. Kedua kesultanan mengakui hak Gubernur menempatkan pegawainya di daerah kekuasaannya atau mendirikan bangunan perkantoran atau perumahan yang akan dipilih sendiri oleh Gubernur.
8. Baik sultan maupun pembesar kedua kesultanan akan mengizinkan diberlakukannya beberapa aturan hukum dan harus menjaga agar hakim pengadilan mereka dapat melaksanakan aturan tersebut. Hukum Islam dapat diterapkan di luar bidang hukum pidana. Hukuman mati dan hukuman berat lainnya tidak dapat dilaksanakan tanpa fiat eksekusi dari Residen.
9. Kedua kesultanan berkewajiban memerintahkan dan membantu penyelamatan kapal-kapal atau alat pelayaran lainnya bila terjadi kecelakaan.
10. Orang Eropa atau bangsa-bangsa Eropa lainnya, orang Cina, Makassar, atau orang asing lain berada di bawah kewenangan Gubernur. Pihak kesultanan tidak boleh memberikan izin tempat tinggal di wilayah kesultanan tanpa izin khusus dari Gubernur.
11. Para sultan wajib membantu Gubernur dengan tenaga atau materi bila terjadi keadaan darurat.
12. Pemilik perkebunan rempah-rempah wajib menjaga produk yang dihasilkannya dan hanya boleh menjual kepada Gubernur. Para sultan mewajibkan para produsen rempah-rempah untuk memelihara pohon-pohon mereka sesuai petunjuk yang diberikan.
13. Subsidi tahunan dari Gubernur kepada kesultanan akan dicabut bila para sultan melanggar perjanjian.
14. Dengan berlakunya perjanjian ini, semua perjanjian yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perjanjian di atas ditandatangani Ternate, Tidore dan pihak Belanda pada 27 Mei 1824. Sementara klausa tentang subsidi tahunan kepada Kesultanan Ternate dan Tidore, yang oleh Gubernur disebut *recognitie penningen*, dinaikkan menjadi f. 17.400 pertahun. Dari jumlah tersebut, untuk Tidore harus dibayarkan kepada penguasa kesultanan di Moti sebesar f. 3000 dan Makian sebesar f. 3200 setiap tahun.³ Dengan pembayaran subsidi atau tunjangan tahunan tersebut, para sultan tidak diizinkan lagi melakukan perniagaan rempah-rempah.

² Yang dimaksudkan di sini adalah wilayah kedua kesultanan itu yang terletak di Buru dan Seram Timur.

³ De Clerq, *Op.Cit.*, p. 178.

Kandungan perjanjian di atas juga menjadikan status Kesultanan Ternate dan Tidore tidak lebih dari kerajaan *vazal* Pemerintah Belanda. Para penguasa kedua kesultanan itu hanya merupakan kepanjangan tangan Gubernemen Belanda yang melaksanakan perintah, kekuasaan dan kepentingannya. Pengangkatan para sultan, sejak saat itu, memperlihatkan dominasi kehendak dan pilihan Belanda, ketimbang dewan kerajaan dan para *bobato*.

Arti rempah-rempah Maluku bagi Gubernemen Belanda

Walaupun Belanda secara resmi telah mengakhiri monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku dengan bubarnya VOC, akan tetapi sistim monopoli tetap dipertahankan didaerah ini hingga puluhan tahun kemudian. Hal ini merupakan suatu paradoks antara keinginan sesungguhnya dan kenyataan tentang makna rempah-rempah bagi pemerintah kolonial Belanda, hingga dengan setengah hati Belanda harus melepaskan sistim yang 200 tahun dipraktekkan di daerah Maluku. Karena alasan itu pula, Belanda enggan melaksanakan Traktat London (1824) secara sungguh-sungguh. Padahal, berdasarkan traktat tersebut, pemerintah Belanda harus memberikan kebebasan pelayaran seluas-luasnya di seluruh Asia, khususnya di Maluku.⁴

Seiring dengan belum dihapusnya seluruh bentuk monopoli di Maluku, kapal-kapal Inggris hanya bisa singgah di pelabuhan-pelabuhan yang telah ditentukan dan diberitahukan secara resmi kepada pemerintah Inggris. Pelabuhan yang memiliki potensi ekonomi bagi Gubernemen Belanda tidak diizinkan disinggahi kapal asing, kecuali dalam keadaan darurat.

Di Maluku Utara Belanda melepaskan monopoli rempah-rempah secara sangat hati-hati, setelah berbagai perjanjian bilateral ditandatangani dengan para sultan. Untuk melegitimasi kebijakan ini dibuatlah sebuah pasal dalam Reglemen Kebijakan yang berlaku ketika itu. Pasal 106 Reglemen tersebut menetapkan: "sampai Raja Belanda menentukan lain, maka penyerahan wajib rempah-rempah kepada Pemerintah di beberapa kepulauan di Maluku akan diteruskan hingga 1836."⁵

Pada 1836, Gubernur Maluku, Pieter Merkus, menghapuskan monopoli secara total, setelah kekuatan berlaku pasal 106 Reglemen tersebut berakhir.⁶ Tetapi, untuk beberapa waktu ke depan, Gubernemen Maluku masih memberlakukan "surat izin" untuk membawa rempah-rempah keluar Maluku.

Pandangan Residen Neijs

Residen pertama Pemerintah Belanda sejak pengalihan kekuasaan atas Maluku dari Inggris adalah Johan Alexander Neijs. Sebelumnya, Neijs adalah pejabat Gubernemen di Ambon. Ia terhitung sebagai residen paling lama di Maluku Utara. Ia mulai memangku jabatan ini pada

⁴ Berdasarkan konvensi London, Maluku meliputi seluruh Sulawesi, Maluku Utara dan Selatan serta kepulauan Timor, Papua berikut seluruh kelompok pulau di kawasan tersebut.

⁵ *Handeling der Staaten Generaal betreffende Het Reglement op het beleid der Regering van Ned. Indie*. Utrecht: Hemerink & Zoon, 1857, p.108.

⁶ *Ibid.*, p.182.

Agustus 1817 dan baru menyerahkannya pada 30 April 1831 kepada penggantinya, J.H.J. Moorees, lantaran pensiun.⁷ Setelah mengakhiri tugasnya, Neijs menetap di Ternate. Laki-laki kelahiran 21 Februari 1775 itu tutup usia pada 27 Juli 1835 dan dimakamkan di dalam Benteng Oranje, Ternate.⁸

Dalam sebuah laporan politik (*Staatkundig Overzicht*) kepada Gubernur Jenderal di Batavia pada 1828, Neijs mengemukakan pandangannya tentang arti penting Maluku bagi Belanda pasca penghapusan monopoli rempah-rempah. Menurutnya, eksistensi Belanda di Maluku Utara semata-mata didasarkan pada upaya memperoleh keuntungan dari pelayaran dan perdagangan. Para sultan di Maluku – Ternate, Tidore dan Bacan – dalam kenyataannya, sangat bersahabat dengan Belanda. Karena itu, kelanjutan pemerintahan para sultan itu tetap memungkinkan atas dasar kerjasama tersebut.

Sejak penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Ternate serta Tidore di hadapan Gubernur Jenderal van der Cappelen pada 1824, kemudian diperbarui pada 1828, Pemerintah Belanda telah menjadikan kota Ternate sebagai *pos pertahanan* untuk mengawasi para sultan atas segala kemungkinan berkenaan dengan larangan terhadap mereka untuk berdagang. Tetapi, larangan ini tidak mengganggu jalannya perdagangan maupun kekuasaan Belanda. Dengan adanya pengawasan yang agak diperketat, para sultan Maluku terpaksa harus bersahabat dengan Gubernur. Sebab, bila berani menunjukkan sikap bermusuhan, mereka akan dilengserkan.

Laporan politik Neijs selanjutnya mengungkapkan bahwa Sultan Ternate selalu bersikap simpatik kepada Belanda. Tetapi, Sultan Tidore berani menentang Pemerintah jika pengawasan lemah. Juga dikemukakan bahwa Kesultanan Ternate dan Tidore tidak pernah merencanakan persekutuan melawan Pemerintah Belanda, sebab keduanya memiliki benih-benih perseteruan dan permusuhan sejak berabad-abad silam. Kekuatan politik kedua kesultanan itu berimbang.

Sejak rontoknya kekuasaan VOC dan berakhirnya monopoli, menurut Neijs, kepulauan Maluku tidak begitu penting lagi bagi Pemerintah Belanda, kecuali sebagai tempat yang menghasilkan serdadu. Hal ini disebabkan letak geografisnya yang sangat jauh dari lalu lintas perdagangan utama, dan Maluku tidak cukup menghasilkan bahan kebutuhan pokok yang dapat memenuhi hajat hidup rakyatnya. Pengaruh dari Jawa dan Sumatera hampir tidak ada.⁹

Di akhir 1840, terdapat 1040 orang Ambon dalam ketentaraan KNIL (*Koninklijk Ned. Indische Leger*, “Tentara Kerajaan Belanda di Indonesia”). Sepuluh tahun kemudian, jumlah orang Ambon dalam KNIL mencapai 1830 orang. Dalam perang Aceh (1873-1874), turut bertempur di pihak tentara Kolonial Belanda sejumlah 4434 orang Ambon sebagai marsose.¹⁰ Pada 1905, dari 26.276 tentara angkatan darat Belanda (KNIL), 21 persennya adalah orang Ambon.¹¹

Berbagai Perjanjian Belanda dan Para Sultan Maluku

⁷ De Clerq, *Op.Cit.*, pp. 171, 175.

⁸ V.I. van der Wall, *Nederlandsche Oudheden*, p. 248.

⁹ *Staatkundig overzicht van Ned. Indie*, Arsip Nasional Jakarta (183F), 1971.

¹⁰ H.J. de Graaf, *Op.Cit.*, p. 248.

¹¹ Ricklefs, *Op.Cit.*, p. 223.

Selain perjanjian politik dengan Sultan Ternate dan Tidore pada 27 Mei 1824, seperti telah diutarakan di atas, menjelang kepulangannya, van der Cappelen juga sempat menandatangani perjanjian tambahan dengan Sultan Ternate dan Tidore. Perjanjian ini menyepakati:

1. Pemusnahan tanaman rempah-rempah (ekstirpasi) dihentikan.
2. Monopoli rempah-rempah yang dijalankan Belanda selama ini dihapuskan, tetapi perdagangan ke luar Maluku harus seizin Gubernur.
3. Sultan Ternate dan Tidore tidak boleh lagi berurusan dengan perdagangan rempah-rempah dan mengambil keuntungan dari perdagangan tersebut.
4. Kedua kesultanan boleh memungut pajak yang besarnya tidak boleh melebihi pajak hasil bumi pada umumnya.

Pada 11 Desember 1826 Sultan Bacan, Hayatuddin Carnabe, ikut menandatangani perjanjian di atas. Yang agak kontradiktif adalah butir kedua perjanjian di atas tentang lembaga monopoli rempah-rempah. Dengan bubar VOC mulai 1 Januari 1800, lembaga ini juga semestinya ikut terkubur. Tetapi, dalam kenyataannya, monopoli masih berjalan di Maluku, bahkan setelah penandatanganan perjanjian 1824 itu. Belanda masih tetap mempertahankan monopoli hingga hampir setengah abad kemudian.

Sebelum perjanjian 1824 diperbarui pada 1828, selama abad ke-19 hampir tidak ada perubahan mendasar sehubungan dengan kedudukan para sultan. Tetapi, kekuasaan dan kewenangan mereka mengalami degradasi yang cukup signifikan, terutama kewenangan dalam pengangkatan para sultan. Berdasarkan perjanjian 1824 pemerintah Kolonial Belanda masih menghormati kewenangan mendasar Kesultanan Ternate dan Tidore dalam pengangkatan para sultan. Dalam hal suksesi, pemerintah Belanda cukup memberikan “fiat” pada setiap pergantian sultan. Tetapi, kini dapat dikatakan bahwa hampir seratus persen pengangkatan sultan ditentukan Pemerintah Belanda.¹² Kenyataan-kenyataan berikut menyampaikan kepada kesimpulan tersebut:

1. Pada 22 Oktober 1894, sebuah perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Kesultanan Tidore ditandatangani, setelah Sultan Ahmad Kawiuddin Alting (Syahjoan) naik takhta. Pasal 10 ayat 1 perjanjian ini menentukan bahwa sultan harus mengumumkan haknya yang tidak dapat dibantah (*undisputable rights*) dan hak Pemerintah Belanda untuk membentuk sebuah pemerintahan langsung atas seluruh wilayah kesultanan atau sebagian darinya, setiap waktu bila dipandang perlu. Implikasi dari butir perjanjian ini terlihat pada wilayah Kesultanan Tidore di Papua yang berada langsung di bawah Pemerintah Belanda berdasarkan perjanjian yang ditandatangani Sultan Tidore dan Belanda pada 1902. Ketika Pemerintah Belanda mengambil langkah pertama memantapkan kekuasaannya di Papua pada 1898, dibentuk dua distrik (*afdeling*), yakni Papua Utara dan Papua Selatan. Papua Selatan, dalam administrasi pemerintahan, disipisahkan dari Kesultanan Tidore dan hingga 1901 berjalan pemerintahan langsung di bawah seorang asisten residen. Perjanjian tersebut, menurut para ahli, tidak lebih dari sebuah *move*, karena berdasarkan Traktat 1824, Gubernur Belanda – cq. Gubernur Jenderal van der Capellen – mengakui kedaulatan Tidore dan berjanji tidak mencampuri urusan internalnya. Tetapi, dalam prakteknya, seperti juga dilakukan terhadap Kesultanan Ternate, Belanda melakukan

¹² A.B. Lapijan, “Kata Pengantar,” dalam J.H. Tobias & C. Boscher, *Memorie van overgave*. Jakarta: Arsip Nasional, 1980, p.12.

campur tangan terlalu jauh dan berperan sangat menentukan dalam urusan internal kedua kesultanan.¹³

2. Ketika terjadi kekosongan mahkota di Tidore sejak 1905 dan di Ternate sejak 1914, penghormatan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda terhadap hak otonomi kedua kesultanan itu berada di titik terendah. Gubernur Jenderal memerintahkan agar untuk sementara waktu tidak dilakukan pengangkatan sultan pengganti.
3. Pada 28 Juni 1909 Kesultanan Ternate dan Bacan menandatangani *korte verklaring* (perjanjian pendek) dengan Pemerintah Belanda. Pada 6 September 1909, Kesultanan Tidore menyusul menandatangani perjanjian sejenis. Dengan penandatanganan *korte verklaring* ini, Pemerintah Belanda praktis telah mengakhiri kedaulatan yang tersisa pada ketiga kesultanan tersebut.
4. Sekitar 1880-an, Pemerintah Belanda bahkan sempat memikirkan rencana penghapusan Kesultanan Bacan. Tetapi, ketika Sultan Bacan memberikan hak guna usaha kepada sejumlah perusahaan Belanda untuk waktu 75 tahun pada 1880, niat melikuidasi kesultanan ini diurungkan.¹⁴ Demikian pula, setelah tertangkap dan diasingkannya Sultan Kawiuddin Alting pada 1905, Belanda pernah memikirkan likuidasi Kesultanan Tidore. Hal ini terbukti dari perintah Gubernur Jenderal menunda pemilihan penggantinya untuk waktu yang tidak ditentukan. Hingga berakhirnya kekuasaan Belanda pada 1942, tidak pernah terjadi pengangkatan sultan baru. Sultan Tidore, Zainal Abidin, baru dipilih kembali pada 1946. Kasus sejenis juga terjadi atas Kesultanan Ternate yang lowong selama 15 tahun, sejak Haji Usman Syah ditangkap dan diasingkan ke Bandung pada 1914. Sultan Ternate, Iskandar Muhammad Jabir Syah, baru dilantik pada 1929. Kevakuman kekuasaan di kedua kesultanan ini, yakni Ternate dan Tidore, serta pemerintahan yang hanya dijalankan para *bobato* telah mengakibatkan merosotnya wibawa kedua kesultanan tersebut.¹⁵

Perlawanan Separatis terhadap Kesultanan Ternate

a. Kasus Tobungku

Pada 1825, perasaan tidak puas terhadap Kesultanan Ternate di kalangan rakyat Tobungku mulai meluas. Berbagai faktor telah memicu rasa ketidakpuasan rakyat, yang semula hanya terbatas di kalangan segelintir elit. Pungutan upeti yang semakin membebani dilakukan utusan Ternate, termasuk tugas mengantarkannya ke Ternate. Banyak isteri yang tidak merelakan suaminya melakukan tugas “masnait” (mendayung perahu) dari Tobungku ke Ternate dan memerotes perlakuan pangeran-pangeran Ternate terhadap suami mereka. Para pangeran ini “mengaryakan” pria-pria Tobungku setelah tiba di Ternate: menyuruh menyelam mutiara di Kao atau menyelam teripang di pulau-pulau Halmahera Selatan, dengan makanan yang harus ditanggung sendiri.

¹³ Jerun A. Overweel, *Topics Relating to Ntherland-New Guinea*. Leiden-Jakarta: Osalcul/Iris, 1995, p.3.

¹⁴ Lapian, “Kata Pengantar,” *Op.Cit.* p.12.

¹⁵ W. Ph. Coolhaas, “Ervaring van een jonge bestuur ambtenaar in de Molukken,” dalam S.L. van de Wal, *Bestuur Overzee in Ned. Indie*. Franeker: T. Weber BV, 1977.

Para penyelam mutiara di Kao, misalnya, terpaksa harus membat pohon sagu orang Kao, yang mengakibatkan bentrokan antara para penyelam asal Tobungku itu dengan masyarakat Kao. Pada September 1859, pecah kerusuhan di Kao antara pribumi lokal dengan para penyelam mutiara Tobungku. Kampung Biang, yang menjadi pemukiman pribumi Kao, diserbu dan dibakar atas perintah seorang pangeran Ternate yang menjadi juragan para penyelam Tobungku.

Tetapi, yang sangat memprihatinkan para isteri dan keluarga di Tobungku adalah lamanya pengaryaan orang-orang Tobungku oleh pangeran-pangeran di Ternate. Tidak jarang, orang yang dikaryakan itu tidak pernah kembali lagi ke negeri asalnya di Tobungku.

Masalah upeti akhirnya merupakan masalah krusial bagi rakyat Tobungku yang bermuara pada rasa tidak senang dan anti Ternate. Upeti yang harus diantar ke Ternate setiap tahun menjadi tidak teratur, bahkan sering terjadi baru diantarkan setelah tiga tahun. Atas tekanan para elit, Kaicil Papa (Raja Tobungku) memberikan dukungan kepada gerakan anti Ternate. Klimaks rasa anti Ternate terjadi setelah wafatnya Kaicil Papa pada 1825, yang memaksa permaisuri almarhum Raja Tobungku datang ke Ternate menyatakan kesetiaan dan meminta bantuan Sultan melawan penentang-penentangannya di Tobungku.

Pada 1826 pemberontakan terbuka melanda Tobungku. Sultan Ternate, Muhammad Zain, mengirim sebuah armada *juanga* dengan ribuan tentara untuk memadamkannya. Para pemberontak ternyata cukup tangguh, dan pasukan Ternate pimpinan Kapita Laut Abu Muhammad tidak mampu menundukkan mereka. Sultan Ternate kemudian meminta bantuan Belanda, yang mengirim kapal perang *Dolphine* di bawah komando Letnan G. Lockemeijer dengan membawa ratusan prajurit bersenjata lengkap. Berkat bantuan Belanda, pemberontakan Tobungku dapat dipadamkan.¹⁶

Percobaan penentangan serius lainnya terhadap Kesultanan Ternate pecah antara 1839-1848, ketika serangkaian pemberontakan terbuka terjadi di pesisir Sulawesi itu. Pada 1839, pecah pemberontakan di Tobungku, tetapi tidak sebesar pemberontakan sebelumnya (1826). Hal ini dapat dibuktikan dari kemampuan Ternate menumpasnya tanpa bantuan Belanda.

Pada 1840, kembali rakyat Tobungku mengangkat senjata menentang Ternate. Dengan bantuan orang Bugis, pos-pos Kesultanan Ternate diserobot, tetapi sebagian besar penyerobot mati terbunuh. Keadaan akhirnya dapat dikuasai dan keamanan pun dipulihkan. Sultan Ternate kemudian melantik Bukungku sebagai Raja Tobungku yang baru. Bukungku adalah pengikut setia Kesultanan Ternate yang didepak Daeng Makaka, seorang pangeran Bugis yang menyutradarai pemberontakan 1840. Setelah pemberontakan ditumpas, Daeng Makaka berhasil meloloskan diri dan baru ditangkap pada 1848.¹⁷

b. Kasus Banggai

Pada 1842, giliran Banggai mencoba memperlakukan ketaatannya terhadap Kesultanan Ternate. Alasan pemicu pemberontakan ini adalah perasaan tidak puas di kalangan elit penguasa lokal dan di kalangan akar rumput. Raja Agama, penguasa Banggai ketika itu, mulai membangkang terhadap perintah Sultan Ternate. Ia, misalnya, menolak perintah sultan untuk menghadap. Bahkan, dengan dukungan orang Bugis, Raja Agama mengusir utusan sultan dan

¹⁶ de Clerq, *Op.Cit.*, p.174. Lihat juga *algemene Veslag van Ternate*, 1839.

¹⁷ De Clerq, *ibid.*, p.177.

menyerang pasukan Ternate yang ditempatkan di sana. Ketegangan hubungan Banggai-Ternate telah dimanfaatkan orang Bugis untuk memperkuat pengaruhnya.

Pada Februari 1846, pertempuran sengit antara pasukan Ternate melawan pasukan Raja Agama pecah, dan pasukan Raja Agama berhasil memporandakan kesatuan-kesatuan tentara Ternate yang ada di Banggai. Dalam bulan Oktober tahun yang sama, Ternate mengirim dua *juanga* bermuatan ratusan tentara. Ketika kedua *juanga* itu tiba di Banggai, Raja Agama telah melarikan diri ke Tojo dengan bantuan orang Bugis. Suatu ekspedisi militer yang dikirim ke Tojo akhirnya berhasil menangkapnya. Namun, sebelum sempat dideportasi ke Ternate, Raja Agama – kembali berkat bantuan orang Bugis – berhasil melarikan diri ke Bone dan memperoleh perlindungan Raja Bone.

Pemberontakan Raja Agama di Banggai, yang mendapat dukungan kalangan elit lokal dan orang Bugis, dengan demikian, berhasil dipadamkan. Elit penguasa Banggai, seperti Donke Kombe, Jogugu dan Kapita Laut Banggai, berikut pentolan-pentolan pemberontak lainnya, dikirim ke Ternate untuk diadili. Tetapi, bentuk perlawanan secara sporadis masih terus berlanjut.

Sebagaimana dengan Tobungku, pemberontakan Banggai baru benar-benar padam setelah Residen P. van der Crab (1863-1867) melakukan serangkaian usaha rekonsiliasi antara Sultan Ternate, Muhammad Arsyad, dengan para petinggi dan rakyat kedua kerajaan *vazal* Ternate tersebut.

c. Perlawanan Orang Makian

Dalam bulan Desember 1847, beberapa pemimpin rakyat Makian mengadukan *Sangaji Ngofakiaha* kepada Sultan Ternate, Muhammad Zain, karena tindakannya yang sangat merugikan rakyat. Pengaduan ini kurang mendapat tanggapan yang layak dari para *bobato* maupun Sultan Ternate sendiri. Akibatnya, para pemuka masyarakat Makian menemui Residen Visser pada 1848 dan mengajukan permintaan agar pulau Makian ditempatkan langsung di bawah pemerintahan Gubernemen. Mereka ingin memisahkan diri dari Kesultanan Ternate. Tetapi, Visser menolak permintaan tersebut.

Menerima laporan tentang keinginan masyarakat Makian itu, Sultan Muhammad Zain sangat terkejut dan pada Februari 1849 mengirim seorang utusan dan Sekretaris Kerajaan untuk bertemu rakyat Makian di Ngofakiaha. Tetapi, belum sempat mendarat di Makian, perahu utusan Sultan Ternate diusir rakyat setempat. Sultan Ternate segera melaporkan kejadian ini kepada Residen dan meminta bantuan untuk memulihkan situasi.

Pada April 1849, Residen Visser bertolak ke Makian menumpang kapal *Zwaluw* di bawah komando Noordduijn dengan sejumlah pasukan Belanda. Tetapi, pasukan itu tidak berani mendarat melihat situasi Makian yang begitu gawat. Kapal, berikut Residen Visser, akhirnya singgah di Moti untuk beberapa waktu, menunggu situasi Makian yang lebih kondusif. Karena situasi genting berlarut-larut, Residen dan pasukannya kembali ke Ternate.

Pada 28 Juni 1849, Kapal *Zwaluw* dengan satu detasemen tentara Belanda dan sejumlah besar pasukan Ternate mendarat di Makian. Pemberontakan Makian dapat ditumpas dan kepala-kepala pemerintahan lokal yang memberontak menyerahkan diri.¹⁸ Pemerintahan Kesultanan Ternate di Makian, dengan demikian, dapat dipulihkan kembali berkat bantuan Belanda.

¹⁸ *Ibid.*, p. 169 f.

Masalah Bajak Laut Tobelo-Galela

Pada abad ke-19, beberapa perairan penting di Indonesia dihantui oleh perompakan-perompakan yang dilakukan para bajak laut. Aksi-aksi para bajak laut ini sangat memusingkan Pemerintah Kolonial Belanda dan angkatan lautnya. Perairan-perairan yang menjadi sasaran operasi bajak laut antara lain perairan Manado, Kepulauan Sulawesi Tenggara, pantai timur Sulawesi, Nusa Tenggara, pantai utara Jawa Timur, serta Maluku. Sampai paruh pertama abad ini, pelaku perompakan terutama terdiri dari orang-orang Filipina Selatan, yakni orang Balangigi, Mindanao dan Sulu.

J.A. Muller¹⁹ melaporkan bahwa Komandan kapal Willem I, Wolterbeek Muller, mengalami musibah karam kapalnya ketika tengah mengejar bajak laut "Maluku." Tetapi, para bajak laut tersebut ternyata orang Mindanao yang perahunya dilengkapi dengan senjata api.

Bajak laut Mindanao yang terkenal ketika itu adalah gerombolan yang dipimpin Syarif Takala. Gerombolan ini beroperasi di sekitar pantai timur Kalimantan dan Sulawesi Utara. Pada 1835, Syarif Takala tertangkap di Batu Putih oleh kapal perang Heldin, dan bersamanya ikut diringkus anak buahnya yang baru selesai beroperasi di Sungai Berau. Ketika ditangkap, Syarif Takala baru saja menikahi puteri Sultan Paji Alam dari Kesultanan Panjang.

Disamping gerombolan Syarif Takala, ada gerombolan bajak laut Filipina terkenal lainnya pimpinan Dato Kaiya, yang juga berhasil diringkus Belanda. Baik Syarif Takala maupun Dato Kaiya diseret ke pengadilan kemudian dihukum.

Setelah tertangkapnya kedua pentolan bajak laut Filipina itu, perompakan di perairan Kalimantan mereda untuk sementara waktu. Tetapi, dengan ketatnya patroli angkatan laut di kawasan tersebut, para bajak laut Filipina Selatan memindahkan daerah operasinya ke perairan Nusa Tenggara – Flores, Bima dan sekitarnya – serta Kepulauan Maluku.

Sekitar pertengahan abad ke-19, gerombolan perompak Filipina selatan mendapat saingan baru: gerombolan bajak laut Tobelo-Galela. Pada 1850, angkatan laut Belanda melaporkan bahwa Kepulauan Bawean di pantai utara Jawa Timur diserang oleh tidak kurang dari 15 perahu bajak laut. Perahu-perahu yang digunakan para perompak cukup besar dan dikayuh puluhan orang – tiap perahu memuat sekitar 60 orang – serta dilengkapi meriam, senjata api, dan amunisi.

Perahu-perahu bajak laut itu mendarat di perkampungan ketika kaum lelakinya tengah berlayar untuk berdagang. Rumah-rumah penduduk dibakar setelah harta bendanya dirampok. Sementara perempuan dan anak-anak ditangkap untuk dijadikan budak belian. Patroli angkatan laut yang dikirim ke tempat kejadian melaporkan bahwa perompakan dilakukan oleh bajak laut domestik, bukan perompak Filipina Selatan.

Pada 1852, angkatan laut juga melaporkan terjadinya serangkaian aksi perompakan di perairan Flores dan Sumbawa. Dari para perompak yang berhasil ditangkap, diketahui bahwa para bajak laut itu berasal dari Tobelo, selain sebagiannya berasal dari Filipina Selatan.²⁰ Laporan-laporan tahun selanjutnya mengungkapkan bahwa muncul pula bajak laut yang berasal

¹⁹ J.A. Muller, *Verblijf bij de Zeerovers*. BKTV, vierde volgreeks, eerste deel; pp. 279 ff.

²⁰ A.B. Lopian, "Pelayaran Orang-orang Tobelo dalam Sumber Sejarah (Abad XVIII dan XIX)," dalam Masinambouw, *Halmahera dan Raja Ampat sebagai Kesatuan Majemuk*, vol. 2. Jakarta: Leknas, 1983, pp. 289 ff.

dari Galela. Bahkan, secara insidental, ditemukan pula orang-orang Loloda, Patani dan Gebe yang terlibat dalam aksi-aksi perompakan.

Karena aksi-aksi perompakan yang dilakukan para bajak laut asal Tobelo dan Galela begitu meresahkan, Pemerintah Belanda mendekati para sultan Maluku dan meminta bantuan mereka – terutama Sultan Ternate dan Bacan yang kawulanya termasuk orang Tobelo dan Galela – untuk menanggulangnya. Tetapi, upaya ini tidak segera menunjukkan hasil. Bahkan, para perompak, selain menyerang daerah-daerah seperti Banggai, Buton, dan Tombuku, beroperasi di depan mata para sultan sendiri, seperti di Bacan, Obi, Sanana dan Seram. Pulau-pulau yang berdekatan dengan Tidore dan Ternate, semisal Moti, Makian, dan Mare, tidak luput dari sasaran operasi para bajak laut Tobelo dan Galela.

Salah satu pemimpin bajak laut Tobelo yang sangat ditakuti adalah Laba, yang pada 1855 tertangkap sedang bersembunyi di kampungnya di Tobelo. Residen Ternate, Stierling, setelah menerima informasi bahwa Laba berada di Gamhoku, Tobelo, segera mengirim kapal perang *Visivius* dan menuntut penyerahan Laba yang berada dalam perlindungan penduduk Gamhoku. Tetapi, penduduk kampung ini menolak tuntutan tersebut. Akibatnya, Stierling memerintahkan kapal perangnya menembaki dan membakar kampung Gamhoku. Setelah kampung itu rata dengan tanah, penduduknya dipindahkan dari Gamhoku (“kampung yang terbakar”) ke Gamsungi (“kampung baru”), yang kemudian menjadi ibukota Kecamatan Tobelo hingga sekarang.²¹ Laba sendiri tertangkap dan diseret ke pengadilan di Ternate, serta dijatuhi hukuman pengasingan ke Bengkulu dan meninggal di tempat pengasingannya itu.

Dari laporan angkatan laut Belanda yang didasarkan pada wawancara dengan para perompak yang tertangkap maupun tawanan para bajak laut yang dibebaskan, diketahui bahwa hampir semua gerombolan bajak laut ketika itu dipimpin oleh orang Tobelo atau Galela. Gerombolan-gerombolan perompak ini beroperasi dengan menggunakan perahu-perahu yang dapat mengangkut puluhan pendayung dan ratusan pembajak. Disamping itu, perahu-perahunya dipersenjatai dengan meriam dan senjata api. Bila kepergok kapal patroli Belanda, mereka melakukan perlawanan dan sering terjadi tembak-menembak dengan kapal-kapal Belanda itu.

Dalam melakukan aksinya, para bajak laut Tobelo-Galela tidak diskriminatif. Pada Nopember 1874, perahu Sultan Buton dirompak dan sultan sendiri ikut bertempur menghadapi para perompak Galela. Para bajak laut Tobelo merompak perahu Sultan Banggai dalam perjalanannya ke Ternate, ketika ia akan beraudiensi dengan Sultan Ternate. Semua isi perahu dikuras habis, termasuk sejumlah upeti yang akan dipersembahkan kepada Sultan Ternate. Pada tahun yang sama, perompak Tobelo berhasil menguras sebuah kapal niaga di Seram.

Tetapi, dalam perompakan di pantai timur Sulawesi, misalnya, aparat Kesultanan Ternate yang ditempatkan di Banggai juga turut terlibat. Utusan Ternate dan Sekretaris Kerajaan Banggai, keduanya orang Ternate, merupakan penadah hasil rompakan. Mereka juga menjadi “sole agent” pembelian budak hasil tangkapan para perompak Tobelo-Galela.

Berkenan dengan bajak laut Tobelo-Galela ini, A.B. Lopian antara lain mencatat:

1. Bahwa angka-angka yang dilaporkan Pemerintah Belanda mungkin masih berada jauh di bawah angka sesungguhnya, baik dalam jumlah perahu maupun yang menjadi pelakunya, serta yang menjadi korban sebagai budak.

²¹ Penamaan kampung Gamhoku dan Gamsungi, dengan demikian, muncul belakangan, pasca penembakan dan pembakaran yang dilakukan Belanda. Nama kampung Gamhoku sebelum kebakaran tidak begitu jelas.

2. Daerah operasi para perompak itu sangat luas. Pada masa puncaknya, wilayah yang dijangkau para bajak laut sampai ke Laut Jawa. Bahkan, dengan bekerjasama dengan orang-orang Filipina Selatan, wilayah operasi mereka mungkin lebih luas lagi.
3. Atas dasar hal-hal tersebut, orang-orang Tobelo-Galela yang menjadi bajak laut itu menunjukkan kemampuan mereka mengorganisasikan diri dalam suatu kekuatan yang tangguh menghadapi angkatan laut Belanda.
4. Kemampuan manajemen dan logistik serta kepemimpinan yang piawai dan pengetahuan navigasi serta pelayaran yang luas, dengan demikian, dimiliki para bajak laut Tobelo-Galela.²²

Untuk menanggulangi ulah bajak laut asal Tobelo-Galela, pada 1878 Said Muhammad, seorang keturunan Arab yang bermukim di Makian, mengorganisasi sebuah badan anti bajak laut yang beranggotakan 125 orang. Kelompok ini mengejar dan menangkap para bajak laut yang ditemukannya. Pada tahun pertama setelah badan ini berdiri, Said Muhammad dan anak buahnya berhasil menangkap 140 bajak laut Tobelo-Galela, yang langsung digiring ke Ternate. Keberhasilan kelompok Said Muhammad turut berperanserta dalam mengurangi aksi-aksi perompakan, terutama di Kepulauan Bacan dan Sanana-Taliabu. Disamping itu, Sultan dan Residen Ternate mengeluarkan peraturan bersama yang mewajibkan semua perahu orang Galela dan Tobelo memiliki pas jalan apabila hendak berlayar. Perahu yang tidak memiliki pas jalan dianggap sebagai perahu bajak laut.

Pada akhir abad ke-19, gangguan bajak laut yang dilakukan orang Tobelo-Galela berkurang secara drastis, kemudian berakhir. Menurut van Fraassen, berakhirnya aksi perompakan ini secara alami dikarenakan mulai berkembangnya pelayaran kapal-kapal laut.²³

Gubernur Jenderal Turun-tangan Membasmi Pembajakan

Gubernur jenderal Hindia Belanda, Pahud, mengunjungi Ternate pada Januari tahun 1861. Setiba di Ternate, ia melakukan perundingan dengan Sultan Ternate dan Tidore. Agenda pokok yang dirundingkan adalah usaha-usaha preventif yang harus diambil untuk mencegah kawula kedua kesultanan itu melakukan perompakan, dan bantuan untuk mengatasinya, terutama untuk kasus-kasus pembajakan yang terjadi di Maluku.

Sementara itu, setelah mengetahui bahwa para bajak laut kebanyakan terdiri dari orang Tobelo dan Galela, Pemerintah Hindia Belanda mencoba mendekati Sultan Ternate untuk mengatasinya, karena Tobelo dan Galela berada dalam wilayah hukum Kesultanan Ternate. Sultan Muhammad Arsyad berjanji akan mengatasinya, seperti telah disebutkan di atas. Bersama Residen Ternate, Sultan kemudian mengeluarkan peraturan bahwa semua perahu orang Tobelo dan Galela yang hendak berlayar harus memiliki surat ijin berlayar yang dbubuhi cap Sultan dan Residen. Yang tidak memiliki surat ijin atau pas jalan akan diperlakukan sebagai bajak laut dan ditindak tegas.

²² Lapien, "Pelayaran Orang-orang Tobelo," *Op.Cit.*, pp. 306 f.

²³ van Fraassen, *Op.Cit.*, vol. I, p. 59.

Keluarnya peraturan tersebut cukup efektif dalam menurunkan angka perompakan yang melibatkan orang Tobelo-Galela. Pada tahun 1862, misalnya, hanya ditemukan satu perahu Tobelo yang melakukan perompakan di pulau Buru, dan beberapa tahun berikutnya tidak terdengar lagi adanya pemubajakan yang dilakukan orang Tobelo dan Galela. Baru pada tahun Pebruari 1868, terjadi pembajakan yang dilakukan orang Tobelo terhadap perahu Binongko di Buano, Seram Barat. Dalam kejadian ini, isi perahu ludes dirampok dan awaknya dibunuh.

Pada 1861, Pemerintah Belanda menempatkan satu regu tentara, terdiri dari 6 prajurit pribumi dan seorang kopral Belanda, di Dodinga untuk mengawasi lalu lintas antara Bobaneigo dan Dodinga. Lalu lintas di daerah itu mulai ramai sebagai rute perdagangan darat antara Halmahera dan Ternate. Detasemen tentara tersebut menempati Benteng Dodinga, yang kini tidak ada bekasnya lagi karena digunakan untuk membangun jalan.

Barangkali atas desakan Belanda, Kesultanan Ternate dalam tahun ini melakukan pemecatan terhadap *Sangaji* Tobelo, Manis. Ia dipecat berkenan dengan maraknya aksi pembajakan di laut yang dilakukan orang Tobelo dan Galela. Demikian pula, *Sangaji* Galela dipecat dengan alasan yang sama. Pemecatan juga dilakuakn Kesultanan Tidore. Raja Waigeo dipecat. Begitu pula nasib Ngofamanyira Diklabo dan Kimalaha Sinobe, serta seorang Ngofamanyira Rum dan Kimalaha Doyado Ismail. Pemecatan ini dilatarbelakangi oleh pernyataan-pernyataan mereka yang anti Jogugu. Dengan alasan yang sama, Kimalaha Gamtohe dipecat dari jabatann.

Wallace di Ternate

Pada 5 Januari 1858, Afred Russel Wallace, seorang peneliti dan naturalis Inggris terkemuka, tiba di Ternate untuk melakukan penelitian zoologi di daerah ini sebagai bagian dari suatu penelitian menyeluruh di kepulauan Nusantara. Dengan bantuan konglomerat Belanda terkemuka di Ternate, Renesse van Duivenbode, Wallace memperoleh pinjaman sebuah rumah tinggal. Wallace sendiri melukiskan Duivenbode sebagai pengusaha berdarah Belanda terkaya di Ternate, pemilik beberapa kapal yang melayari Manado, Maluku Utara, Maluku Tengah hingga Papua. Duivenbode juga memiliki perusahaan perkebunan besar dan sejumlah perusahaan berskala besar lainnya. Karena kekayaannya, kalangan umum mengenal Duivenbode sebagai “Raja Ternate.” Dengan kekayaan yang berlimpah-ruah, ia memiliki pengaruh yang besar terhadap ketiga sultan di Maluku Utara: Ternate, Tidore dan Bacan.²⁴

Dalam bukunya, *The Malay Archipelago*, Wallace melukiskan rumah pinjaman Duivenbode itu terletak dekat Benteng Oranje, dan ada jalan menuju ke pedalaman serta gunung. Rumah itu dekat dengan benteng Portugis dan kira-kira berjarak satu mil dari istana Sultan Ternate. Berdasarkan data ini, dapat direkonstruksi bahwa rumah Wallace itu terletak di jalan Santiong, dan di atas tanah bekas rumah tersebut kini berdiri Kantor Asuransi Jiwasraya.

Wallace menjadikan Ternate sebagai pos atau markasnya, dan dari sini ia melakukan perjalanan bolak-balik ke Maluku Tengah, Timor, Halmahera, Manado dan Papua. Pada 25 Maret 1858, dengan menumpang perahu, ia ke Halmahera – Jailolo, Sahu dan Dodinga – kemudian ke Papua dan tiba di Dore pada 11 April 1858. Wallace bermukim di sini hingga 29 Juli, dan kembali tiba di Ternate pada 15 Agustus 1858.

²⁴ A. R. Wallace, *The Malay Archipelago*. Singapore: Oxford Univ. Press, 1989, p. 312 ff.

Pada bulan September tahun yang sama, Wallace mengunjungi Jailolo, di mana ia menemukan kawanan burung parkit berekor panjang berwarna hijau, merah dan biru. Baginya, Jailolo sangat mengesankan, karena ia menemukan berbagai jenis burung khusus yang hanya ada di daerah ini dan berbeda dengan hewan sejenis yang terdapat di Papua Timur, Seram Selatan, Sulawesi, Kepulauan Sula bagian barat.

Dari Jailolo Wallace mengunjungi Sahu dan menginap di sebuah rumah besar milik Sultan Ternate. Setelah kembali ke Ternate, ia mengunjungi Waigeo, masih dalam bulan September tahun yang sama. Sekembali dari Waigeo, ia bertolak ke Bacan pada 9 Oktober 1858, dengan ditemani Ali (pembantunya asal Kalimantan), Lahagi (seorang warga Ternate), dan Lahi dari Jailolo yang pandai berbahasa Melayu. Pengikutnya yang lain adalah Garo, seorang juru masak, serta Lace, jurumudi perahu asal Papua.

Ketika mendekati pulau Makian, perahu yang ditumpangi rombongan Wallace dihantam angin ribut, yang menyebabkan mereka balik haluan dan mendarat di Tidore sembari menunggu redanya badai. Mereka kemudian menuju Mare dan bermalam di pulau itu, kemudian menuju Moti dan Makian. Tengah malam 14 Oktober 1858, rombongan Wallace tiba di Kayoa. Ia menetap di sini selama 5 hari dan berhasil memperoleh tidak kurang dari 70 spesies kumbang yang berbeda-beda, 12 di antaranya merupakan spesies baru. Selain itu, ia berhasil menemukan hampir 246 spesies burung, kupu-kupu dan kumbang, 40 di antaranya merupakan spesies baru. Tetapi, di Kayoa burung agak langka. Yang banyak terdapat di sini hanyalah burung kakatua berbulu merah, yang juga umum ditemukan di hampir seluruh pulau Maluku.

Setelah meninggalkan Kayoa, Wallace tiba di Bacan pada 21 Oktober 1858. Dari hasil pengamatannya, Wallace menyimpulkan bahwa Bacan tidak memiliki penduduk asli. Di Bacan, tidak ada penduduk pedalaman seperti orang Alifuru di Sahu dan Jailolo, atau Halmahera pada umumnya. Penghuni pulau Bacan terdiri dari orang Melayu, orang Serani yang merupakan blasteran Melayu-Portugis, orang Galela, dan orang Tomori yang merupakan imigran asal pantai timur Sulawesi.

Dalam pengelompokan penduduk Bacan, Wallace lupa mencatat bahwa penduduk pertama yang menghuni pulau tersebut adalah orang Makian, termasuk kaum ningrat yang menjadi sultan-sultan Bacan. Kemungkinan lain, Wallace mengelompokkan orang Makian ke dalam kelompok Melayu.

Wallace berdiam di Bacan dari 21 Oktober 1858 sampai 13 April 1859. Yang menarik baginya, sehingga bertahan sekian lama di Bacan, adalah berbagai jenis kupu-kupu langka, serta burung merpati berbulu hijau dan ungu yang sangat unik. Di Bacan juga terdapat burung punai berwarna tembaga dan hijau berkilau, cendrawasih, dan beberapa jenis burung lain yang lebih kecil, mamalia, musang serta sebanyak 9 jenis kelelawar, sekalipun serangga agak langka di pulau ini.

Setelah berdiam selama 6 bulan di Bacan, Wallace meninggalkan pulau ini pada 13 April 1859 menuju Ternate. Ia tiba di Ternate pada 20 April dan pada 1 Mei menuju sasaran berikutnya: Timor. Setelah dari Kupang, ia ke Banda kemudian ke Manado dan tiba di sini pada 10 Juni 1859. Ia berdiam di negeri Kawanua ini selama lebih dari tiga bulan, dan setelah itu ke Ambon. Antara 29 September 1859 hingga awal Nopember 1860, Wallace mengunjungi Papua. Dari sana ia ke Seram, kemudian ke Waigeo dan tiba di sana pada 4 Juli 1860. Dalam perjalanan pulang ke Ternate dari Waigeo, Wallace mampir di Gane, Halmahera Selatan, dan pada 5 Nopember 1860 tiba kembali di Ternate. Hingga awal Januari 1861, ia menetap di posnya di

Ternate, untuk kemudian menuju ke Banda dan tiba di sana pada 29 April 1861. Pada 27 Juni, ia kembali ke Ternate setelah singgah di Kayeli (pulau Buru). Ia mengakhiri lawatannya di Ternate dan berangkat menuju Jawa, melalui Manado serta Makassar pada tahun ini juga, dan kemudian kembali ke negerinya di Inggris, melalui Singapura.²⁵ Ia tiba di negerinya pada 1 April 1862, setelah sekitar 6 tahun berkelana di nusantara.

Hasil penelitian zoologinya di nusantara dirilis sekembali Wallace ke negerinya. Selama enam tahun berkelana di nusantara, dua pertiga waktunya dihabiskan di Maluku, Papua, sebagian kepulauan Timor dan Minahasa, dengan basis operasionalnya di Ternate.

Selama masa penelitiannya yang relatif panjang di nusantara, Wallace berhasil mengumpulkan 125.000 spesimen berbagai burung, kupu-kupu, reptil, dan lainnya, yang rinciannya sebagai berikut: 310 jenis mamalia, 100 jenis reptil, 8050 jenis burung, 7500 jenis kerang, 13.100 jenis lepidoptera, 83.200 jenis coleoptera, dan 13.400 jenis serangga.

Arti penting Maluku Utara dalam kaitannya dengan kunjungan Wallace adalah koleksi-koleksinya yang berjumlah sekian banyak spesimen serta karya-karya ilmiah bermutu yang ditulisnya di Ternate dan Bacan. Bahkan, dalam keadaan menggigil terserang demam (malaria?) di Ternate, pada Februari 1858, Wallace sampai kepada gagasan "*survival of the fittest*" sebagai metode yang dengannya spesies berevolusi. Gagasan ini merupakan cikal-bakal teori evolusi yang satu tahun kemudian diformulasikan Charles Darwin dalam karya monumentalnya, *Origin of the Species* (1859). Jadi, cikal-bakal teori evolusi yang sangat terkenal itu, dalam kenyataannya, digagaskan Wallace di Ternate dalam keadaan menggigil terserang demam.

Wallace menuliskan teorinya itu dalam tulisan yang secara populer dirujuk sebagai *Ternate Paper*, berjudul "On the Tendency of Varieties to depart indefinitely from the Original Type" (1858). Paper ini dikirim kepada Darwin untuk disampaikan kepada Sir Charles Lyell. Bersama dua makalah Darwin tentang tema yang sama – yakni tentang perkembangan varitas, ras, dan spesies – *Ternate Paper* yang ditulis Wallace dibacakan di depan Linnean Society, London, oleh Charles Lyell dan Joseph Dalton Hooker pada 1 Juli 1858. Pembacaan ketiga makalah itu pada tanggal tersebut, belakangan dipandang sebagai saat pertama pengungkapan teori evolusi yang terkenal.

Selama menetap di Ternate, Wallace telah menghasikan sejumlah tulisan, antara lain:

- "Note on the Theory of Permanent and Geographical Varieties", (Januari [?] 1858).
- "On the Entomology of the Aru Island", (Januari [?] 1858).
- "A Disputed Case of Priority in Nomenclature", (Januari, 1858).
- "On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely from the Original Type", (February 1858).
- "Notes of a Voyage to New Guinea", (Juni 1859).
- "Geographical Distribution of Birds", (Bacan, Maret 1859).
- "Note on the Habits of Scolytidae and Bostrichidae", (Desember 1859).
- "Notes on *Semioptera wallacii*", (September 1859).

²⁵ Menurut siaran Radio BBC beberapa tahun lalu, kepulauan Wallace ke Inggris karena pesan ibunya yang datang bertubi-tubi agar ia segera menikah, mengingat usianya.

- “Note on the Sexual Differences in the Genus Lomaptera”, (Februari 1860).
- “On the Ornithology of Ceram and Waigiou”, (Desember 1860); dan lain-lain.

Di samping itu, sejumlah besar surat ditulis Wallace dari Ternate. Surat-surat ini kemudian dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah di Eropa. Sementara perjalanan Wallace secara keseluruhan ke nusantara dituturkannya dalam bukunya *The Malay Archipelago*, pertama kali terbit pada 1869. Di bagian awal jilid kedua karya ini, Wallace menuturkan pengalamannya selama berada di Ternate.

Beberapa Peristiwa di Pertengahan Abad ke-19

Hampir bersamaan dengan kedatangan Wallace di Ternate, pada Januari 1858 Kesultanan Ternate dan Tidore mengirim pasukan Alifurunya ke Seram guna membantu Belanda menumpas pemberontakan yang terjadi di sana. Pemberontakan yang terjadi di Mani, Sahulaut dan Cepaputi ini akhirnya berhasil dipadamkan.

Atas keberhasilan tersebut, pasukan Alifuru diberi penghargaan oleh Belanda. Sekretaris kesultanan Ternate, Suleman bin Salahuddin, sebagai Kapiten Tituler, diberi medali emas. Kapita Laut Loloda, Soniya, dan Kapita Tobaru, Hadi, serta Sekretaris Kesultanan Tidore, Hasanuddin, dan *Sangaji* Maba, Salmuddin, dianugerahi medali perak. Mayor Ali dari Tidore dan Kapita Muhammad Yasin dari Ternate memperoleh pisau dengan sabuk yang dibordir. Pemerintah Belanda juga menghendahkan f.3450 kepada mereka untuk dibagi rata.

Sementara itu, dengan surat rahasia tertanggal 11 Januari 1858, Gubernur Maluku meminta Residen Ternate dan Haruku menyampaikan laporan tentang maksud kedatangan Haji Husain bin Salma al-Makhdasia ke Sirisori Islam. Dalam jawabannya, Residen menyatakan bahwa Haji Husain datang dari kepulauan Sula sebagai seorang ustadz yang akan mengajarkan agama Islam.

Laporan yang diterbitkan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun ini menyebutkan bahwa di perairan Seram terjadi perompakan beberapa kampung dan penculikan sejumlah orang. Kapal Etna yang dikirim ke sana berhasil menemukan tiga perahu pembajak, dua berhasil ditenggelamkan dan satunya ditinggalkan para perompak yang melarikan diri ke hutan. Namun para perompak berhasil dibekuk penduduk Kayeli, dan sejumlah 50 orang yang diculik berhasil dibebaskan. Pada waktu yang sama, orang-orang Tobelo, Galela, Tobaru, Loloda, dan Kao, muncul – bukan sebagai bajak laut, tetapi sebagai bala bantuan pasukan yang dikirim Kesultanan Ternate untuk membantu Belanda menumpas perompakan tersebut. Berbagai daerah di perairan Maluku Utara memang masih rawan bajak laut. Laporan politik Residen Ternate tahun ini menggarisbawahinya dan mengajukan usul penanggulangan berikut upaya-upaya yang telah dilakukan.

Pada September 1859, pecah kerusuhan di Kao antara pribumi lokal dengan penyelam mutiara asal Tobungku. Kampung Biang, pemukiman pribumi Kao, diserbu dan dibakar atas perintah seorang pangeran Ternate yang menjadi juragan para penyelam. Para penyelam Tobungku ini pada mulanya ditugaskan secara paksa sebagai “masnait” (pendayung perahu) untuk mengantarkan upeti ke Ternate. Sesampainya di Ternate, mereka dikaryakan para pangeran untuk menyelam mutiara di Kao atau menyelam teripang di pulau-pulau Halmahera Selatan. Tidak jarang, orang yang dikaryakan itu tidak pernah kembali ke negeri asalnya di Tobungku.

Perjanjian Herendienst dan Gemeentedienst

Pada 22 Oktober 1894, dua perjanjian ditandatangani Pemerintah Kolonial Belanda dan Kesultanan Tidore tentang kerja rodi *herendienst* dan *gemeentedienst* yang mulai berlaku efektif pada 24 Maret 1896. Perjanjian serupa juga ditandatangani Ternate pada 28 Juni 1909.

Kedua perjanjian di atas dibuat untuk menegaskan kembali sistim kerja rodi, seperti diatur dalam pasal 57 *RR* tahun 1815 yang mulai berlaku pada 1868. Lantaran aturan *RR* itu tidak efektif dalam pelaksanaannya di Maluku Utara, perlu ditegaskan kembali aplikasinya melalui kedua perjanjian tersebut. Dengan menggunakan pengaruh para sultan, kerja rodi diharapkan dapat terlaksana secara lebih baik dan efisien.

Herendienst adalah suatu sistim kerja rodi untuk kepentingan umum dan dibebankan kepada pribumi. Pelaksanaan sistim kerja paksa ini ditentukan pejabat pemerintah setempat dan berlaku dalam batas-batas wilayah (distrik) serta obyek-obyek tertentu. Lama *herendienst* 32 hari dalam setahun dan 12 jam sehari, termasuk waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak ke tempat kerja dari tempat tinggal seorang pekerja. Makan dan transportasi ditanggung sendiri oleh pekerja.

Berbagai proyek besar yang seharusnya dibiayai anggaran pemerintah, dalam kenyataannya, dilaksanakan lewat *herendienst*. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalan Tobelo-Galela sejauh 27 kilometer (7 kilometer harus menggusur buki dan jurang batu), jalan Kao-Tobelo sepanjang 80 kilometer, jalan Daruba-Daeo sepanjang 30 kilometer, dan jalan Payahe-Weda untuk kepentingan militer Belanda. Bahkan, seluruh jalan penghubung antar distrik di Halmahera dibuka dengan sistim kerja paksa ini, termasuk pemeliharannya secara berkala. Beberapa peralatan kerja, seperti cangkul dan linggis, disediakan pemerintah setempat, sementara peralatan lainnya – seperti parang, kapak dan alat transportasi (gerobak/perahu) – ditanggung sendiri para pekerja.

Herendienst adalah sisi lain dari kerja rodi yang mengakibatkan penderitaan yang sangat bagi rakyat Maluku Utara. Untuk sampai ke lokasi-lokasi kerja, para pekerja harus menempuh perjalanan yang sulit dan jauhnya sampai puluhan kilometer. Karena itu, mereka harus meninggalkan rumah di pagi buta dan baru kembali setelah terbenamnya matahari. Disamping bekerja di darat, rakyat yang bermukim di daerah pesisir dan pulau harus pula melakukan kerja rodi dalam bentuk lain: mereka harus mendayung perahu untuk menyeberangkan atau mengantar pejabat, baik pejabat Gubernur maupun swapraja (*bobato*), dari kampung ke kampung atau dari satu pulau ke pulau lain. Terkadang, tugas mendayung dilakukan di malam hari, semalam suntuk pergi-pulang, dengan makanan ditanggung sendiri. Kadangkala, anak-anak yang belum dewasa juga dipakai tenaganya untuk *herendienst*.

Sementara *gemeentedienst* adalah kerja rodi di daerah-daerah yang berada di bawah pemerintahan langsung Gubernur. Ketentuannya hampir sama dengan *herendienst*, namun obyeknya berbeda. Lama kerja *gemeentedienst* 30 hari dalam setahun, dengan obyek kerja khusus untuk kepentingan negeri (kampung), jalan atau bangunan ibadah negeri yang bersangkutan.

Yang terbebas dari kedua kerja paksa tersebut adalah para pegawai negeri, guru, pembantu rumah tangga dan rohaniawan. Namun, baik *herendienst* maupun *gemeentedienst*, dalam kebanyakan kasus, menyimpang dalam pelaksanaannya dan memberatkan rakyat. Seringkali, rakyat harus bekerja pada hari-hari tertentu yang jumlah total dalam setahun mencapai

46 hari, 14 hari lebih lama dari yang ditentukan. Begitu pula, obyek kerja tidak semata-mata untuk kepentingan umum atau negeri, tetapi lebih banyak menyangkut kepentingan pribadi pejabat atau *bobato*. Selain itu, sering terjadi penganiayaan, seperti pemukulan dan lainnya, terhadap para pekerja oleh pejabat, jika terjadi pembangkangan atau akal-akalan pekerja yang mencoba menghindari kerja paksa.

Korte Verklaring dan Pemberontakan Jailolo

Terdapat beberapa alasan yang menyulut pemberontakan yang dipimpin Banau di Jailolo. Konklusi-konklusi yang dikedepankan selalu berkisar pada rasa tidak puas rakyat menanggung beban pajak yang berat.

Dalam membicarakan pemberontakan Jailolo, di kalangan publik Maluku Utara, orang selalu terfokus pada peran figur Banau yang melaksanakan pemberontakan tersebut, dan hampir melupakan peran Sultan Ternate Haji Usman Syah, yang tampil sebagai auctor intellectualis dan perencana sekaligus pelaku materiil pemberontakan tersebut. Haji Usman Syah-lah yang sebenarnya menjadi tokoh utama pencetus pemberontakan Jailolo, dan Banau adalah pelaku lapangannya (pelaku materiil, *materiele dader*). Penulis buku ini menempatkan Haji Usman Syah sebagai figur utama pemberontakan, karena tanpa peran yang dimainkannya, pemberontakan Jailolo tidak akan pernah terjadi.

Sebab-sebab Timbulnya Pemberontakan Jailolo

Pada tahun 1903, Gubernemen/Pemerintah Kolonial Belanda dan para Sultan Maluku menyepakati sebuah perjanjian. Ternate diwakili Sultan Ayanhar. Berdasarkan perjanjian ini, pegawai gubernemen diwajibkan *mengawasi kinerja aparat swapraja* dalam menjalankan tugasnya. Butir kedua kesepakatan itu: *memberikan kewenangan kepada aparat pajak Gubernemen memungut pajak-diri (belasting)* atas seluruh kawula swapraja.²⁶

Hal ini kemudian diperkuat dengan perjanjian tanggal 28 Juni 1909 yang menetapkan bahwa semua kawula kesultanan Maluku adalah rakyat Gubernemen Hindia Belanda. Klausula ini kemudian ditafsirkan sebagai berlakunya semua aturan hukum dan perundang-undangan Hindia Belanda dalam Yurisdiksi kesultanan Maluku.

Setelah H. Usman Syah naik takhta, ia mulai menentang perjanjian tersebut. Menurut Sultan Usman, pengawasan *ambtenaar* (pegawai) Gubernemen Belanda atas kinerja aparat swapraja akan menimbulkan *dualisme* dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yang berujung pada penonjolan kelemahan dan hal-hal negatif, ketimbang segi-segi positif kinerja aparat swapraja.

Pemungutan *belasting* atas kawula swapraja telah menyebabkan timbulnya berbagai *paksaan* dan *intimidasi* terhadap rakyat. Bahkan, kebanyakan rakyat harus melepaskan tanah dan kebun kelapa yang dijual dengan murah untuk menutupi tunggakan *belasting*-nya.

Sebab lain yang juga ditentang Sultan Usman Syah adalah *perluasan pendidikan* untuk rakyat. Untuk setiap distrik (kecamatan) Gubernemen hanya membuka satu sekolah dasar yang

²⁶ Van Fraassen, Vol.I.p.60 f dan Baretta pp.73-74 ff.

disebut *Sekolah Desa*. Semua sekolah tersebut hanya sampai kelas 3, dan untuk melanjutkan pendidikannya, orang harus datang ke Ternate untuk menempuh pendidikan kelas 4, 5, dan 6. Karena pendidikan yang sangat rendah dan tidak merata, 97% rakyat Maluku Utara saat itu adalah buta huruf.

Jalannya Pemberontakan

Pada bulan September 1904, ketika dilakukan penagihan pajak di Jailolo, orang-orang Muslim dan non-muslim setempat memulai aksi pemberontakannya. Rakyat yang berada di desa Todohongi dan Tuada membangkang semua ketentuan Belanda. Dipimpin Banau, rakyat Jailolo menyerbu rumah Kontrolir Jailolo, Agerbeek. Peristiwa yang terjadi pada 12 September 1904 ini, bermula dengan berkumpulnya ratusan orang di depan rumah-rumah pos. Mereka mulai menyerang ketika anak buah kontrolir menarik salah seorang dari kelompok itu dan memaksanya menyerahkan senjata. Perlakuan anak buah kontrolir itu membuat massa marah dan menyerang pos. Mereka menurunkan bendera Belanda, merusak rumah jaga, serta membakar sebuah gudang.

Melihat situasi tersebut, Agerbeek menyembunyikan diri di atas loteng rumahnya. Tetapi, massa memburunya dan dengan bambu panjang menusuk-nusuk ke atas loteng tempat Agerbeek bersembunyi. Karena tidak tahan, Agerbeek meloncat turun. Ia disambut Banau yang langsung membunuhnya.²⁷ Sementara Agerbeek dihabisi, orang Belanda lainnya melarikan diri serta melaporkan peristiwa tersebut kepada Residen di Ternate dan penguasa militer.

Penguasa di Ternate kemudian mempersiapkan bantuan militer. Pada 14 September, pasukan Belanda di bawah komando Letnan Ouwerling dikirim untuk menumpas pemberontakan Banau. Ketika mendekati markas Banau, pasukan ini disergap secara tiba-tiba. Ouwerling tewas secara mengenaskan, sedangkan seorang sersan Eropa bernama Worth terluka parah. Akhirnya, pasukan Belanda kembali ke Ternate dengan kekalahan telak.

Pada waktu yang sama, Letnan Eland bersama satu brigade prajurit dengan kapal uap Valk dikirim dari Ambon ke Jailolo. Ketika telegram tentang terbunuhnya Letnan Ouwerling diterima, Kapten Lasonder bergerak bersama 2 brigade pasukan Belanda pada 22 September. Tetapi, mereka dihadang pasukan Banau, dan pertempuran tidak dapat dihindarkan lagi. Karena tidak memiliki perlengkapan perang yang canggih, jatuh korban di pihak Banau – 9 mati dan 7 terluka. Sementara di pihak Kapten Lasonder hanya satu orang yang mengalami luka.

Terbunuhnya Agerbeek beserta beberapa perwira Belanda membuat Belanda marah. Namun, semuanya sia-sia karena kelompok Banau menyebar luas di tempat-tempat strategis di pedalaman Jailolo-Sahu. Sementara Banau sendiri bersama pasukan intinya berdiam di sebuah pegunungan di Jailolo dan memberi komando dari jauh. Pasukannya siang malam menghantui gerak maju tentara Belanda.

Pihak Belanda menyebarluaskan kaki tangan ke seluruh penjuru Jailolo, Sahu dan Ibu, berusaha sekuat tenaga menangkap Banau hidup ataupun mati. Tetapi, Banau menghilang bagai ditelan bumi. Semua rakyat bungkam dan tidak mau memberitahukan tempat persembunyian Banau.

²⁷ cf. Van Fraassen, *Ternate, Op.Cit.*, vol.1, p.60.

Akhir Pemberontakan

Banau tidak rela menyerahkan diri kepada Belanda, tetapi siap menerima perintah Sultan Haji Muhammad Usman Syah yang sangat dijunjung tinggi olehnya. Prinsipnya, lebih terhormat menyerahkan diri kepada sultan dibandingkan kepada Belanda. Dengan memakai *kole-kole* kecil, dan membawa parang serta *salawaku*, Banau menuju ke Pulau Hiri, tetapi kemudian mendarat di Batu Angus. Hal ini dilakukannya untuk menghilangkan jejak. Ia menelusuri pulau Ternate dan menanti waktu yang tepat untuk menyerahkan diri kepada Sultan.

Pada suatu malam menjelang dini hari, Banau turun seorang diri dari bukit Buku Konora menuju istana. Banau kemudian menyerahkan diri kepada sultan dan diamankan laskar pengawal istana. Pagi harinya, berita penyerahan diri Banau sampai kepada penguasa Belanda. Pihak Militer sangat geram, karena Banau menyerahkan diri kepada Sultan, bukan kepada mereka.

Akhirnya, Banau dan teman-temannya diproses untuk diajukan ke Mahkamah Militer Belanda. Selanjutnya, Belanda menumpas habis sisa-sisa pemberontakan Jailolo agar tidak meluas dan merambat ke daerah di sekitarnya. Banau dijatuhi hukuman mati di tiang gantung, sementara anak buahnya dijatuhi hukuman penjara dan pengasingan.

Sultan Usman Syah dituduh mendalangi pemberontakan Jailolo. Alasannya, ketika diminta bekerjasama menyelidiki kerusuhan tersebut, ia memberi jawaban yang tidak memuaskan. Ia tidak mau bekerja sama, tetapi dengan sengaja melindungi para perusuh Tuada dan Todowongi di Ternate. Bukti lainnya, ketika diasingkan ke Bacan, ditemukan sejumlah besar senjata yang tersimpan di istananya. Di Bacan, sultan dan puteranya ditempatkan di rumah kontrolir yang ditinggalkan, dikawal satu brigade pasukan.

Pemerintahan sementara di Ternate dibebankan kepada tiga orang yang ditunjuk dari kalangan bangsawan. Sementara Letnan H.A. Soetens ditugasi sebagai pejabat sipil. Soetens segera mendata penduduk Ternate untuk mencari para pemberontak. Akhirnya, banyak pemberontak yang tertangkap. Dari penelitian, terbukti bahwa banyak pemberontak yang lari ke Ternate segera setelah pecah pemberontakan dan bersembunyi di sana.

Setelah kurang lebih tiga bulan di Bacan, Sultan Usman Syah diasingkan ke Batavia, kemudian ke Bandung, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 15 Januari 1915 nomor 7. Ia ditemani anak laki-laki tertua, Pangeran Muhammad, yang menjadi Kapita Laut Kesultanan Ternate.

Pengasingan Sultan yang tidak terlalu lama di Bacan dikarenakan kekuatiran Belanda akan berkobarnya lagi pemberontakan di Halmahera. Itulah sebabnya Belanda cepat-cepat membawanya ke Jawa. Berdasarkan keputusan Pemerintah Hindia Belanda, tertanggal 23 September 1915 no. 47, Sultan dicopot dari kedudukan, dan kepadanya serta anaknya ditunjuk kota Bandung sebagai tempat tinggal.

Setelah pemberontakan Jailolo dan pembuangan Usman Syah ke Bandung, takhta Kesultanan Ternate kosong untuk sementara. Antara 1914 sampai 1929, seluruh kegiatan dan pelaksanaan pemerintahan diatur dan ditentukan pemerintah Belanda – dalam hal ini Residen dan Asisten Residen sebagai Kepala *Afdeling*.

Satu tahun setelah pengasingan Usman Syah, Belanda menangkap anak-anaknya, khususnya anak laki-laki, yang masih berada di Ternate. Tiga anak laki-laki Sultan Usman dan

Puteri Mihir – Jabir, Ikhtira Jurahman dan Muhammad Nasir – dibawa dengan paksa oleh Belanda dan dikirim menyusuli ayah mereka di Bandung. Usman Syah baru diijinkan kembali ke Ternate pada 1933, atas permintaan Jabir Syah setelah naik takhta pada 1929. Selama pengasingannya, pemerintahan kesultanan dijalankan oleh *Bobato*.

Pada 12 Nopember 1915, Jogugu Kesultanan Ternate menandatangani *Korte Verklaring* (pernyataan pendek) yang mengakhiri kedaulatan Sultan Ternate atas kerajaannya. Sementara itu, dengan terbunuhnya Agerbeek, Gubernemen mengangkat seorang militer berpangkat Kapten untuk memangku jabatan Kontrolir di Jailolo, dibantu seorang sipil yang menjabat sebagai *gezaghebber*.²⁸

²⁸ Bareta, p.74f.

BAB 14

Balans Pemerintahan Kolonial Belanda (1817-1942)

Pendahuluan

Sebuah neraca singkat perlu dikemukakan untuk mencermati hal-hal yang telah dilakukan Pemerintahan Kolonial Belanda di Maluku Utara dalam kurun waktu 125 tahun berkuasa sejak pengambilalihan kekuasaan dari Inggris pada 1817 hingga penyerahannya kepada tentara pendudukan Jepang pada 1942.

Neraca atau balans termaksud tidak mudah diungkapkan secara obyektif, mengingat kinerja pemerintah Belanda sebagai penjajah dan Maluku Utara sebagai bagian dari daerah jajahan. Neraca ini juga dibatasi dan difokuskan pada dua bidang yang menjadi sokoguru atau basis perkembangan daerah jajahan yang tidak memiliki pilihan bebas, yaitu: bidang pendidikan dan pembangunan sosial ekonomi.

Generasi muda yang tidak mengalami masa pahit di zaman penjajahan Belanda berhak memperoleh informasi singkat tentang berbagai pengalaman nenek moyang mereka pada masa pemerintahan kolonial yang cukup panjang itu. Bab ini berupaya mengemukakan secara ringkas kinerja Pemerintah Kolonial Belanda dalam kedua bidang di atas yang dipandang urgen untuk dikemukakan, berikut sebuah refleksi tentangnya.

Pendidikan

Di masa penjajahan Portugis, Gubernur Antonio Galvao (1536-1540) dapat dipandang sebagai orang Portugis pertama yang membuka sebuah seminari di Ternate. Seminari ini merupakan sekolah pertama yang didirikan untuk memberi pendidikan terbatas kepada anak-anak Portugis maupun pribumi Ternate dan daerah Maluku Utara lainnya, seperti Bacan, Moro, serta daerah yang penduduknya telah memeluk Katolik.

Seminari Galvao, disamping mengajarkan agama Katolik, memberikan pelajaran membaca, menulis dan berhitung, dengan Bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar. Di sekolah ini juga diajarkan bahasa Latin. Untuk pendidikan lanjutan, orang harus ke Goa, India, yang menjadi pusat kekuasaan Portugis untuk Asia Timur. Ketika Franciscus Xaverius meninggalkan Ternate pada 1547, ia membawa serta beberapa murid tamatan seminari Ternate guna melanjutkan pendidikannya di Goa.¹

¹ Brugmans, *Geschiedenis, Op.Cit.*, p. 16.

Di samping seminari Galvao, pada awal abad ke-16, kaum misionaris mendirikan beberapa sekolah lain di Ternate, Tidore, dan Bacan untuk mengajarkan agama Kristen Katolik dan pengetahuan dasar membaca, menulis serta berhitung. Tetapi, sangat aneh ketika misionaris Katolik mengalami masa kejayaan di Morotia—Tolo, Mamuya serta Samafo—tidak terdapat laporan tentang upayanya membangun sekolah seperti yang dilakukannya di Ternate, Tidore dan Bacan.

Misi Katolik Roma identik dengan penguasa Portugis, karena perkembangannya di daerah Maluku Utara, seperti di Moro, selalu ditopang kekuasaan pemerintah kolonial. Itulah sebabnya, ketika Babullah berhasil mengusir kekuasaan Portugis dari Maluku, agama Katolik juga mengalami kemunduran yang gawat bersama kekuasaan politik yang mendukungnya.² Tetapi, terlepas dari hali tu, sejarah pendidikan di Maluku Utara telah dimulai dengan kepeloporan Gubernur Portugis, Antonio Galvao.

Semasa kekuasaan VOC, *Staaten Generaal* pada 1617 telah mewajibkan Gubernur Jenderal serta *Raad van Indie* bertanggung jawab dalam penyebaran agama Kristen Protestan dan mengajarkannya melalui sekolah-sekolah. Dalam sekolah-sekolah itu, diinstruksikan bahwa Bahasa Belanda hendaknya diajarkan dan dijadikan bahasa pengantar, karena pengertian yang cukup dalam bahasa tersebut dianggap penting sebelum seorang pribumi menganut agama Kristen.

Tetapi, Caspar Wittens, pendeta pertama di Ambon, setelah berada beberapa tahun di kota itu menulis: “Orang pulau Ambon itu bodoh dan terlalu malas.” Sebuah gereja di Ambon bahkan meminta supaya buku pelajaran dalam bahasa Belanda diganti dengan buku berbahasa Melayu, sebab “tidak mungkin mengajarkan bahasa Belanda kepada anak negeri pulau ini.”³

Walaupun telah ada instruksi berkaitan dengan pendidikan dari *Staaten Generaal*, VOC di Maluku Utara tidak secara langsung membuka sekolah-sekolah. Tugas pembukaannya diserahkan kepada badan-badan kegerejaan, dan VOC membayar gaji gurunya. Hingga 1695, keadaan persekolahan di Maluku Utara yang dibiayai VOC dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Situasi Pendidikan di Maluku Utara hingga 1695⁴

No.	Kota	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah murid
1	Ternate	2	5	54
2	Makian	1	1	12
3	Bacan	1	1	12

Keadaan sekolah di Maluku Utara sangat kontras dibanding situasi serupa di Manado dan kepulauan Sangir Talaud pada masa yang sama. Di Manado terdapat 6 sekolah yang dikelola 7 guru dengan 220 murid. Di Togulandang terdapat 2 sekolah yang memiliki 3 guru dengan 148 murid. Di Siau ada 4 sekolah dengan 4 guru serta 263 murid. Dan di kepulauan Sangir ada 11 sekolah yang dikelola 12 guru dengan 319 murid.

Ketika Gubernur Jenderal van der Cappelen mengunjungi Ternate pada 1824, ia memerintahkan Gubernur Maluku, Merkus, segera mendirikan sekolah bagi anak-anak Kristen

² *Ibid.*, p. 18.

³ Vlekke, *Op.Cit.*, p. 190 f.

⁴ Diolah dari Brugmans, *Geschiedenis, Op.Cit.*, p. 18 f.

pribumi. Dalam kunjungannya ke Ternate, van der Cappelen juga menginspeksi satu-satunya sekolah dasar yang ada di Ternate – berdiri sejak 1818. Tetapi, perkembangan pendidikan di Maluku berjalan sangat lambat lantaran perhatian yang tidak memadai dari Pemerintah Kolonial Belanda.

Sampai 1850, baru ada 8 sekolah dasar 3 tahunan untuk seluruh Maluku Utara dan Ambon, dengan bahasa pengantar Bahasa Melayu.⁵ Dalam laporan perjalanan di Maluku pada 1867, van der Chijs mengemukakan bahwa dengan memberi tugas rangkap persekolahan kepada gereja, guru-guru yang ada adalah pejabat gereja (pendeta). Akibatnya, dalam prakteknya, mereka lebih menitikberatkan tugasnya pada urusan gereja ketimbang mengurus sekolah dan berdiri di depan kelas sebagai guru profesional. Karena itu, van der Chijs mengusulkan memisahkan kedua tugas tersebut. Menurutnya, rangkap tugas sebagai pendeta dan guru bertentangan dengan semangat reglemen pemerintah.

Lantaran berbagai kritik yang dialamatkan kepada Pemerintah Kolonial Belanda, masalah pemisahan pendidikan dari gereja mulai diperhatikan. Di Minahasa, pada 1868, seorang penilik sekolah dasar lokal melarang seorang guru sekolah merangkap jabatan sebagai pimpinan jamaat gereja.⁶

Sampai 1867, lembaga pendidikan boleh dikatakan jarang diurus Pemerintah Kolonial Belanda. Lembaga-lembaga ini berada sepenuhnya di bawah badan-badan kegerejaan. Karena itu, Brugmans secara tepat menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda sukar dicari batu ujiannya. Sejak mengambil-alih penguasaan sepenuhnya atas Indonesia pasca pembubaran VOC, Pemerintah Kolonial Belanda tidak terlalu peduli pada pendidikan.⁷ Baru pada 1867 dibentuk departemen pendidikan dan kebudayaan. Dengan anggaran yang sangat minim, sekolah-sekolah rakyat kelas 3 mulai didirikan. Dengan kebijakan semacam itu, tidak mengherankan jika hingga akhir kekuasaannya pada 1942, jumlah rakyat Indonesia yang buta huruf mencapai angka 97 persen.

Dalam memori serah terima jabatan Residen Niewenhuijs (1867-1869) disebutkan bahwa sampai awal 1869 hanya terdapat dua sekolah dasar 3 tahunan di Ternate dan satu lagi di Bacan, selain sekolah yang didirikan di Papua dan Galela oleh zending Kristen. Hingga akhir abad ke-19, penanganan pendidikan di Maluku Utara masih dilakukan dengan setengah hati, selain tujuan pendidikan kolonial hanyalah untuk memperoleh tenaga kerja tingkat rendahan.

Anthony Reid mencatat bahwa hingga 1899, baru terdapat 13 pribumi yang berpendidikan tingkat menengah di seluruh Indonesia.⁸ Pendidikan modern baru diberikan secara bertahap oleh Pemerintah Kolonial Belanda mulai 1925, dengan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi pribumi.

Bagi Maluku Utara, pendidikan di zaman kolonial, selain bercorak rasial keagamaan, juga terutama hanya dipusatkan di Ambon. Prof. Toedjimah, misalnya mengemukakan:

Politik Belanda terhadap Maluku berbeda dengan daerah-daerah lain. Orang Islam Maluku disamakan dengan orang-orang Islam di lain-lain daerah. Di Ambon, hampir tidak

⁵ *Ibid.*, p. 153.

⁶ *Ibid.*, pp 166 f.

⁷ *ibid.*, p. 121.

⁸ Anthony Reid, *Revolusi Nasional Indonesia*, tr. Pericles G. Katoppo. Jakarta: Sinar Harapan, 1996, p.3.

ada orang Islam yang menjadi sarjana. Almarhum Mr. Abdul Syukur dan A.M. *Sangaji* adalah suatu keistimewaan, padahal orang-orang Islam Ambon tidak kalah pandainya dengan orang-orang Ambon Kristen, tetapi mereka dipersulit untuk maju.⁹

Bagi rakyat pribumi, Pemerintah Belanda mendirikan *volkschool* (sekolah rakyat) hingga kelas 3, yang juga dikenal dengan sebutan sekolah desa. Tetapi, sekolah semacam ini tidak terdapat di semua desa. Ia hanya ada di ibukota distrik (kecamatan). Untuk seluruh wilayah Maluku dengan pulau berjumlah hampir seribu, hanya terdapat 78 sekolah desa kelas 3 dengan 254 guru dan 7700 murid.

Sementara di Maluku Utara sendiri, hanya ada 24 sekolah desa dan sekolah sambungan (sampai kelas 5), yang berlokasi di Ternate, Soasio, Sanana, Ngofakiaha dan Labuha. Di samping itu, ada beberapa sekolah dan madrasah yang didirikan pihak swasta, seperti Taman Siswa, al-Islamiyah School dan BAPMAN di Ternate, Wustha Muallimin Muhammadiyah di Galela dan Tobelo, kemudian Kao, dan masing-masing sebuah madrasah di Weda dan Sanana. Pihak gereja (UZV, *Utrechtsche Zending Vereniging*, "Perkumpulan Zending Utrecht") mendirikan sejumlah sekolah desa kelas 3 di berbagai daerah Halmahera Utara dan Selatan, yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang didirikan pemerintah.

Pada 1916, UZV menerbitkan laporan tahunan mengungkapkan nama pendeta yang terlibat dalam pengelolaan jemaat dan pendidikan di Halmahera:

Tabel Pengelola Jemaat dan Sekolah¹⁰

No	Pendeta	Tahun Tugas	Lokasi	Klp. Jemaat	Anggota	Jml SD	Jml. Murid
1	van Baarda	1889	Galela	1	235	2	68
2	J. Metz	1893	Tobelo	17	2969	16	657
3	G. Maan	1895	Buli & Weda	11	899	11	297
4	J. Fortgens	1901	Jailolo	7	2735	7	213
5	G.J. Ellen	1903	Kao	25	2735	25	643
6	Van Essen	1906	Morotai	6	347	6	138
7	Laschent	1906	Dodinga	10	584	7	169
8	D.C. Prins	1915	Loloda	12	527	6	163
9	J.C. Munk	1908	Tobelo	Kepala sekolah guru			

Untuk sekolah yang dikelola UZV, pada 1912, Pemerintah Kolonial Belanda memberikan subsidi kepada setiap murid di Malifut sebesar f. 3,63 untuk 45 murid, dan f. 39.60 untuk 5 murid di Maripaga, atau rata-rata f. 10 untuk tiap murid. Sementara sekolah-sekolah atau madrasah yang dibangun pribumi tidak memperoleh bantuan apapun.

Bagi anak kaum bangsawan, pegawai negeri, orang Eropa, Arab dan Cina, ataupun orang kaya, pemerintah membuka sekolah HIS dan ELS dengan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Kedua sekolah ini hanya terdapat di Ternate dan Ambon serta Saparua dan Banda. Pada 1920, sebuah sekolah lanjutan MULO dibuka di Ambon, yang dikelola 5 guru dengan 100

⁹ Prof. Dr. Toedjimah, *Masuknya Agama Islam di Maluku*, "Hasil-Hasil Seminar Sejarah Maluku". Ambon: Panitia Seminar Sejarah Maluku, 1992, p.137.

¹⁰ Sumber A.M. Baretta, *Halmahera en Morotai*. Batavia: Javasche Boekhandel, 1917, p.65.

murid. Pada waktu yang hampir bersamaan, juga dibuka di Ambon sebuah sekolah guru atas (HIK). Sementara pada 1925, sebuah Schakel School, yang menerima murid-murid tamatan sekolah desa, dibuka di Ambon.

Sekolah-sekolah elit yang baru disebut, sulit dijangkau anak-anak rakyat kebanyakan. Golongan bangsawan Maluku Utara sebenarnya memiliki peluang sangat besar untuk memasuki sekolah-sekolah tersebut, tetapi kebanyakan mereka tidak memanfaatkannya. Akibat diskriminasi pendidikan yang diciptakan Belanda, tidak mengherankan jika rakyat Maluku Utara di zaman kolonial menduduki peringkat tertinggi dalam jumlah penduduk yang buta huruf, yakni sebesar 98 persen.

Pembangunan Ekonomi, Keuangan dan Kesejahteraan

Setelah monopoli perdagangan rempah-rempah dihapus,¹¹ dan para sultan dilarang ikut serta dalam perdagangan, perkembangan perekonomian Maluku Utara hingga 1870 belum beranjak ke tingkat yang signifikan. Praktis tidak ada perubahan berarti dalam perekonomian rakyat, walaupun perubahan dari monokultur ke multikultur mulai terasa, dengan mulai berlakunya undang-undang agraria dan landreform pada 1870.

Sebelum berlakunya undang-undang agraria, pemerintah Belanda telah mencabut hak monopoli dan mengakhiri ekstirpasi rempah-rempah, tetapi tindakan ini tidak banyak menolong rakyat Maluku Utara lantaran terus merosotnya harga rempah-rempah ke tingkat yang rendah. Dengan merosotnya harga komoditas tersebut, sejak 1850 daerah ini tidak lagi bergantung pada rempah-rempah. Berbagai komoditas baru, seperti hasil hutan, tanaman perkebunan, dan hasil laut—semisal mutiara, teripang dan sirip ikan hiu—mulai menjadi andalan.

Pembukaan pelabuhan Ternate pada 1854 telah menarik minat pedagang-pedagang Eropa (eksportir), Cina dan Arab (pengumpul) untuk turut serta dalam kegiatan perekonomian di Maluku Utara. Kapal-kapal uap mulai menyinggahi pelabuhan Ternate, dan hubungan antara Ternate, Makassar, Surabaya dan Jakarta mulai terbuka.

Sekalipun demikian, volume perdagangan masih terbatas, terutama untuk komoditas ekspor. Tabel perdagangan selama 1850-1855 berikut ini memperlihatkan masih mewarnainya saldo negatif ekspor-impor Maluku Utara ketika itu:

Tabel Volume Ekspor-Impor Maluku Utara (1850-1855)¹²

No.	Tahun	Impor	Ekspor
1	1850	f. 140.825	f. 42.225
2	1851	f. 180.600	f. 65.544
3	1852	f. 169.213	f. 44.319
4	1853	f. 107.472	f. 24.174
5	1854	f. 95.845	f. 43.073
6	1855 (6 bulan	f. 82.027	f. 14.940

¹¹ Monopoli sebenarnya dihapus pada 1800, dengan bubarnya VOC. Tetapi, di Maluku Utara penghapusannya baru dilakukan 36 tahun kemudian. Lihat *Handelingen den Regering*, pasal 106. Utrecht: Hemerink en Zoon, 1857, pp. 108, 182 dan 118.

¹² Sumber: A.J. Duymar van Twist, *Aantekening betreffende eene Reis door de Molukken*. s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1856, p. 68.

	pertama)		
--	----------	--	--

Angka-angka di atas memperlihatkan tidak seimbanginya ekspor Maluku Utara ketimbang impornya. Hingga akhir abad ke-19, angka ekspor baru bertengger pada 1 sampai 3 juta Gulden. Antara 1923 hingga 1927, volume ekspor Maluku Utara mengalami lonjakan yang cukup signifikan, dari 7 juta Gulden menjadi 8,5 juta Gulden. Sementara angka impornya berada antara 6 juta Gulden dan 8,75 juta Gulden.¹³ Angka-angka ini masih memperlihatkan saldo negatif pada impor Maluku Utara, dan ini memberi indikasi bahwa kehidupan rakyat di daerah ini masih jauh dari makmur atau sejahtera dibandingkan ketika rempah-rempah masih menjadi primadona ekspor.

Konglomerat terkenal di Maluku Utara pada masa ini adalah Renese van Duivenbode. Sejak 1850, ia telah menguasai bisnis perdagangan, perkebunan, pertambangan dan pelayaran yang meliputi Maluku, Sulawesi Utara, dan Papua. Ia mengusahakan perkebunan cokelat, karet dan hasil laut—seperti mutiara dan teripang. Perkebunannya terdapat di Morotai dan Ternate Selatan, serta pertambangan tradisionalnya di Bacan. Saking kaya dan berpengaruhnya van Duivenbode, ia dikenal luas sebagai “Raja Maluku Utara.”¹⁴

Dalam bidang keuangan, kinerja Pemerintah Kolonial Belanda juga setali tiga uang. Tabel berikut memperlihatkan:

Tabel Keadaan Keuangan pada 1852 dan 1854

No.	Tahun	Penerimaan	Pengeluaran
1	1852	f. 167.198	f. 251.122
2	1854	f. 184.376	f. 167.297

Kependudukan

Konsentrasi penduduk di Maluku Utara terutama terdapat di Ternate dan Tidore. Sementara Halmahera dan pulau-pulau lain memiliki penduduk yang jarang. Pada umumnya, faktor pemeliharaan kesehatan dan lingkungan yang buruk telah menjadi faktor penghambat penyebaran populasi.

Data kependudukan tahun 1850 memperlihatkan distribusi penduduk di Ternate, Tidore dan Mare sebagai berikut: Di daerah Gubernemen Ternate, terdapat 109 orang Belanda, 14 orang Eropa lainnya, 556 orang keturunan Eropa dan asing lainnya, 2 orang Arab, 386 orang Cina, dan 2050 pribumi. Sementara kawula Swapraja Ternate berjumlah 5250 jiwa. Dengan demikian, jumlah totalnya adalah 8391 Jiwa. Penduduk pulau Tidore dan Mare sejumlah 8157 jiwa.

Angka-angka di atas menunjukkan populasi penduduk yang sangat kecil. Antara 1845 hingga 1854, hanya tercatat 189 angka kelahiran dan 179 angka kematian di Ternate. Sementara penambahan penduduk di kota ini dalam tahun-tahun tersebut hanya 100 jiwa.

¹³ A.J. Beversluys & A.H.C. Gieben, *Het Gouvernement der Molukken*. Weltevreden: Land Drukkery, 1929, p. 184.

¹⁴ H.R. Roelfsema, *Een Jaar in de Molukken*. Haarlem: Tjeenk Willink, 1917, p.20.

Perkembangan Ekonomi sejak 1870

Pada 1870, terjadi perubahan besar dalam perekonomian Indonesia yang, antara lain, disebabkan oleh:

1. Mulai diberlakukannya undang-undang agraria oleh Gubernur Jenderal De Waal yang memberi kesempatan luas kepada pemodal melakukan investasi di sektor agro industri.
2. Di daerah-daerah di luar Jawa-Madura, Pemerintah Belanda menjalankan kebijakan pengakuan hak guna usaha atas tanah yang luas dan dalam jangka waktu cukup lama, sehingga memungkinkan pengusaha perkebunan Eropa tumbuh dan berkembang.
3. Pembukaan Terusan Suez pada 1869 memperpendek jarak pengangkutan produksi dari Indonesia ke Eropa.
4. Pada 1870, perusahaan perkapalan "Nederland" dibentuk dan melakukan pelayaran pulang-pergi secara reguler dari Indonesia ke Eropa. Di dalam negeri, jaringan kereta api dibuka bersamaan dengan pembukaan sejumlah pelabuhan untuk pelayaran.
5. Pada 1888, KPM (Koningklijk Paketvaart Maatschappij), sebuah perusahaan pelayaran inter-insuler besar, mulai beroperasi melayari seluruh pelosok nusantara.¹⁵

Hal-hal di atas telah memicu perkembangan ekonomi Indonesia secara mengesankan. Tetapi, Pemerintah Belanda kurang memberi respon yang memadai di bidang sumber daya manusia, karena kebijakan pendidikan yang tidak tepat. Pendidikan yang ada hanya ditujukan untuk melayani kebutuhan tenaga kerja pada pasar kerja rendahan dan sebagian kecil kebutuhan menengah. Pendidikan yang menyiapkan tenaga kerja madya dan ahli tidak diikhtirakan.

Bagi Maluku Utara, hal yang paling dirasakan secara langsung dari perubahan-perubahan di bidang perekonomian adalah pembukaan pelabuhan Ternate pada 1854, disusul mulai beroperasinya perusahaan pelayaran KPM pada 1888, yang beberapa saat kemudian menyinggahi Ternate.

Pada Januari 1891, KPM memperoleh hak monopoli pelayaran antar pulau. Pada 8 Nopember 1898, kapal KPM van Swoll bertolak dari Jakarta dan untuk pertama kalinya merapat di dermaga Ternate pada 23 Nopember, dalam pelayaran perdana menuju Papua. Pada 1911, KPM berhasil menyingkirkan saingan-saingannya, terutama perusahaan perkapalan Cina yang berpusat di Singapura. Pada saat yang sama, KPM berhasil melayarkan 85 kapal dari armada raksasanya, yang menjelajahi nusantara.

Pada 1921, Gubernur Maluku berhasil membuat perjanjian dengan KPM untuk melayari semua pelabuhan penting dan produktif di Maluku. Di Maluku Utara, kapal-kapal KPM singgah di Sanana, Bacan, Weda, Tobelo, Galela, Morotai, Ibu (secara fakultatif), dan Ternate sendiri.

Seiring dengan itu, makin banyak perusahaan besar Belanda yang mulai menanam modal di sektor perkebunan. Di Bacan, sejak 1855, pihak kesultanan mulai memberikan konsesi pertambangan, perkebunan dan hasil hutan kepada Renese van Duivenbode¹⁶ – belakangan juga

¹⁵ J.J. Brugmans & H. Bandet, *Balans van Beleid, Terugblik op de Laatste halve eeuw van Ned. Indie*. Assen: van Gorkum, 1961, p.157; J.A. Compo, "Steam Navigation and State Information," dalam Robert Cribb, *The Late Colonial State in Indonesia*, Leiden: Kitlu Press, 1994, p.16.

¹⁶ Tobias & Boscher, *Memorie Overgave, Op.Cit.*, p.61.

menguasai pelayaran di seluruh wilayah Maluku Utara, Sulawesi Utara (Manado), Seram Timur dan Seram Barat, berikut usaha perkebunan di Ternate dan Maluku Tengah.¹⁷

Pada 1880, atas nama Pemerintah Pusat di Batavia, Kesultanan Bacan telah menerbitkan lisensi hak guna usaha (hak *erfpacht*) yang berlaku selama 75 tahun dan memberikan kepada sejumlah perusahaan Belanda untuk usaha perkebunan, pertambangan emas, hasil hutan dan laut. Perusahaan yang memperoleh hak guna usaha ini antara lain Elout, Giebert, Raundry, dan H. Hope.

Elout, misalnya, setelah melakukan survei lapangan, melaporkan kepada kantor pusatnya di s'Gravenhage pada 21 Juli 1880, bahwa Bacan mempunyai potensi sagu yang melimpah. Terdapat 1.790.000 pohon sagu yang sudah dewasa, sementara lautnya menyimpan mutiara, penyu, teripang, dan berbagai kerang. Tanaman kopi dan coklat sangat cocok dan potensial dikembangkan secara besar-besaran. Bacan juga menyimpan batubara dan emas. Di Obi terdapat berbagai jenis damar, antara lain damar mata kucing yang laku keras di Eropa. Tentang sektor perikanan, Elout melaporkan bahwa Maluku Utara kaya dengan ikan.

Tentang hutan damar di Bacan, terdapat sebuah laporan yang mengabarkan bahwa di bagian utara Pulau Seki ada hutan damar yang luas, demikian pula di seluruh Kasiruta. Di sini dibangun pos-pos tempat akumulasi damar sebelum dibawa ke pusat penampungan di pelabuhan-pelabuhan pantai.

Orang Galela dan Tobelo sudah sejak lama menjadi pengambil damar dan menguasai sebagian besar produksi. Kesultanan Bacan mendirikan pos-pos damar untuk mengawasinya. Oleh sebab itu, pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, tugas mengambil damar adalah titah kerajaan yang tidak lepas dari unsur-unsur pemaksaan. Pihak kesultanan juga menetapkan beberapa jenis pajak atas damar:

1. *Pajak*, yang dibayar pembeli sebesar f. 4 setiap koli yang dibawa keluar Bacan.
2. *Ngase*, yang harus dibayar para pengambil damar sebesar f. 7,50 perorang setiap tahun.
3. *Sumbangan* untuk sultan, mulai dari satu paloka hingga satu palaudi, dengan dalih untuk damar ela-ela, yang akan dibakar pada malam 27 hingga 29 Ramadhan setiap tahun.

Tetapi, pungutan pajak terakhir di atas – yakni damar ela-ela – sangat besar, sehingga merupakan sumber keuangan kesultanan yang lumayan. *Ngase*, yang merupakan ketentuan hukum adat, akhirnya ditarik Gubernur dan disetor ke kas negeri.

Selain di Bacan, damar dengan mutu tinggi terdapat di Morotai, Kao, Galela dan Sofifi. Lantaran pentingnya damar sebagai sumber penghasilan rakyat, pada 27 September hingga 2 Oktober 1909, sebuah pertemuan fungsionaris adat dilakukan di Morotai dengan agenda khusus membahas hak-hak ulayat rakyat atas hutan damar. Para fungsionaris adat yang menghadiri musyawarah tersebut adalah para *sangaji*, para hukum, ngofamanyira dan para kapita dari Morotai, Galela, Tobelo, dan Loloda.

Petemuan fungsionaris adat itu akhirnya memutuskan: “Menurut hukum adat, tidak ada hak sultan atas pohon damar yang tumbuh secara alami di gunung. Hak menikmati ada pada

¹⁷ van Fraassen, *Ternate, Op.cit.*, vol. I, pp.38 f.

persekutuan hukum masyarakat adat setempat. Hak sultan terbatas pada pengaturan cara pemanfaatannya.”¹⁸

Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, damar dan kopra memang menjadi primadona ekspor Maluku Utara. Kopra menempati ranking teratas disusul damar. Kedua komoditi ini, pada 1923, menghasilkan devisa masing-masing f. 3 juta untuk kopra dan f. 2,875 juta untuk damar.

Sejak 1907, perusahaan-perusahaan besar, seperti Moluksche Handel Vennootschap (MHV), mulai membuka kantor di Ternate dengan cabangnya di Bacan, Kepulauan Sula, Morotai dan Tobelo. Selain melakukan distribusi bahan kebutuhan pokok, MHV juga berusaha di bidang ekspor damar dan berbagai hasil laut serta hasil hutan lainnya.

Disamping MHV, beroperasi pula Jacobson van den Berg dengan membuka kantornya di Ternate, menyusul KPM. Di Bacan, perusahaan perkebunan BAM menjalankan usahanya. Di Tobelo, MKCM membuka perkebunan kelapa. Di Ternate, perusahaan perkebunan pala dibuka Boddendijk di bagian selatan pulau itu. Sementara Tidore memberi izin operasi kepada perusahaan Retty dan Steward Brown. Untuk perburuan burung cendrawasih, perusahaan Belanda Camphuys mendapatkan izinnya.

Sampai 1927, sebanyak 105 hak guna usaha telah diberikan penguasa lokal Maluku Utara atas nama Pemerintah Hindia Belanda kepada perusahaan-perusahaan perkebunan di Bacan, Halmahera dan Seram. Hak guna usaha ini belum mencakup bidang-bidang lainnya.

Bersamaan dengan beroperasinya perusahaan-perusahaan besar, pedagang-pedagang eceran Cina mulai membuka toko di kota-kota hingga ke desa-desa di Maluku Utara. Karena bertindak juga sebagai tengkulak, semua kulakan kopra, damar, berbagai hasil hutan dan laut jatuh ke tangan para pedagang Cina. Eksportir membeli komoditas ekspornya dari pedagang Cina. Ketika itu, Makassar merupakan satu-satunya pelabuhan ekspor bagi kawasan timur Indonesia, termasuk produk-produk Maluku Utara.

Meski terjadi perkembangan yang cukup mengesankan di berbagai bidang perekonomian dan perdagangan, nasib rakyat jelata di Maluku Utara masih jalan di tempat. Jerat kemiskinan belum melepaskan rakyat dari kehidupannya, baik di kota maupun di pedesaan Maluku Utara. Skala kemiskinan semacam ini terus berlangsung hingga 1942, ketika Belanda menyerahkan kekuasaannya atas daerah ini dan Indonesia pada umumnya kepada tentara pendudukan Dai Nippon.

Pembentukan Organ Pemerintah Lainnya

Komando Militer¹⁹

Tahun 1814 tercatat dalam sejarah militer Hindia Belanda sebagai awal pembentukan Komando Militer untuk Indonesia Timur. Sebelum itu, militer yang bertugas di Maluku adalah serdadu VOC, dan sejak 1811-1817 pasukan Inggris ditempatkan di Ternate. Antara 1877-1907, Pemerintah Belanda pernah menempatkan tentaranya di Kao. Demikian pula, pada 1877 sejumlah tentara Belanda ditempatkan di Payahe.

¹⁸ *Adatrechtbundel*, vol. vii, p. 130ff.

¹⁹ Sumber: Beversluys & Gibbon, *Op.Cit.*, p.135.

Bersamaan dengan pembentukan Komando Militer Indonesia Timur, di Maluku dibentuk Komando Militer Kepulauan Maluku (*Militaire Commando in de Moluksche Eilanden*). Nama ini beberapa kali mengalami perubahan, hingga akhirnya pada 1 Januari 1926 dibentuk Komando Militer Kawasan Maluku (*Gewestelijke Militaire Commando der Molukken*), yang berkedudukan di Ambon, dipimpin seorang komandan berpangkat letnan kolonel (*overste*).

Di Maluku Utara, sejak 1923, Belanda menempatkan beberapa kesatuan tentara KNIL. Lima brigade²⁰ tentara KNIL ditempatkan di Ternate, dan masing-masing dua brigade ditempatkan di Sanana, Jailolo, Tobelo dan Weda.

Komando Militer Maluku Utara bermarkas di Benteng Oranje, Ternate, dan berada di bawah seorang komandan berpangkat kapten serta kepala staf berpangkat letnan satu. Sementara brigade yang ada di daerah-daerah seperti di Tobelo, Sanana, Weda dan Jailolo, dipimpin oleh seorang letnan dua. Kapten Zondag adalah komandan KNIL terakhir di Ternate, sebelum Belanda menyerah kepada Jepang pada 1942. Sementara kepala staf terakhir yang semasa dengan Zondag adalah Letnan Satu Didi Kartasasmita.²¹

Peradilan

Peradilan swapraja telah terbentuk jauh sebelum Pemerintah Kolonial Belanda berkuasa. Pengadilan ini diperuntukkan bagi kawula swapraja. Pada masa kekuasaan VOC, untuk daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaannya, VOC mendirikan *Raad van Justitie*. Di Ternate dan Ambon, peradilan ini dibentuk khusus bagi kawula Belanda. Akan tetapi, dengan perubahan ketatanegaraan, yang terjadi sejak 1817, dibentuklah untuk kepentingan penduduk daerah-daerah di bawah kekuasaan langsung Gubernur – yakni daerah Gubernur – sebuah pengadilan negeri bagi pribumi yang menjadi kawula Gubernur.

Dengan S. 1874 no. 144, dikeluarkan *Reglement betreffende de samenstelling van rechtsmacht van de Rijksraad te Ternate* (Reglemen Pembentukan Kekuasaan Peradilan di Ternate). Dengan reglemen tersebut, sejak 1874 telah berdiri di Ternate sebuah pengadilan negeri (*Landraad*). Pengadilan ini juga bersidang secara berkala di ibukota Kesultanan Tidore, Bacan dan Gorontalo, dengan hakim yang berkedudukan di Ternate. Hakim terakhir sebelum masuknya tentara pendudukan Jepang adalah Mr. Aruman.

Sarana Kesehatan dan Telekomunikasi

Rumah sakit pemerintah satu-satunya untuk seluruh Maluku Utara hanya terdapat di Ternate. Di ibukota *onderafdeling* Tobelo, Jailolo, Sanana, Bacan dan Weda, ditempatkan juga seorang dokter, tetapi tanpa rumah sakit, kecuali di Tobelo. Dokter terakhir rumah sakit Ternate, sebelum dan semasa pendudukan Jepang, adalah Chasan Boesoirie.

Untuk penderita penyakit kusta, sebuah panti kusta didirikan di Kastela sekitar 1876, yang menampung 46 pasien penyakit kusta. Pada 1900, panti ini dipindahkan ke Sorofo, di dalam kota

²⁰ Satu brigade terdiri dari 19 anggota.

²¹ Dalam masa revolusi bersenjata pasca proklamasi RI (1945-1950), Didi Kartasasmita adalah anggota TNI dengan pangkat Letnan Jenderal.

Ternate. Panti serupa juga didirikan di kampung Mede, Tobelo. Ketika Jepang masuk ke Maluku Utara, panti kusta di Tobelo dilikuidasi.

Sampai akhir 1927, di semua *onderafdeling* telah ada kantor pos dan telegraf (PTT). Surat-surat dan paket diangkut dengan armada KPM dan alat transportasi pemerintah lainnya. KPM melayari Maluku Utara dua minggu sekali melalui jaringan pelayaran Halmahera dan Papua. Sementara untuk komunikasi telepon, sampai akhir kekuasaan kolonial Belanda pada 1942, jaringan telepon hanya terdapat di Ambon.

Refleksi

Diakhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, walaupun kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda telah tersentuh *politik etika* yang berhembus sangat kencang, dan meskipun janji-janji sesumbar diobral Pemerintah Belanda, tetapi aplikasinya pada tataran realitas tidak terbukti secara meyakinkan. Rakyat Maluku tetap berada dalam *status quo*.

Situasi pendidikan sangat menyedihkan, karena kesempatan untuk memperolehnya amat terbatas. Anak-anak desa nyaris tidak tersentuh, dan yang paling terpinggirkan dari dunia pendidikan adalah anak-anak perempuan. Tradisi lokal yang masih sangat kental telah memasung mereka di luar dunia pendidikan, dan tidak setara dengan kesempatan yang diperoleh anak laki-laki. Bagi anak-anak rakyat jelata, mengenyam pendidikan di sekolah dengan pengantar Bahasa Belanda termasuk sesuatu yang sangat mewah. Uang sekolah sangat mahal dan tidak terjangkau menurut standar ekonomi mereka.

Situasi sarana dan prasarana kesehatan di Maluku Utara juga menyedihkan. Di seluruh daerah ini hanya ada satu rumah sakit pemerintah, yang berlokasi di Ternate. Sementara satu rumah sakit lainnya di Tobelo adalah milik UZV. Hingga 1938, tenaga dokter hanya terdapat di kedua rumah sakit itu dan seorang lagi di Weda. Di Jailolo dan Sanana, belum ada dokter tetap.

Pelayanan kesehatan di desa sangat buruk. Pemberantasan penyakit rakyat, seperti TBC dan penyakit pernapasan lainnya, tidak dapat dilakukan secara konsisten. Angka kematian bayi juga cukup tinggi, begitu pula angka kematian ibu di waktu melahirkan. Sangat mustahil bagi para dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan secara profesional, jika sarana dan prasarannya jauh dari memadai.

Dalam kaitannya dengan perekonomian rakyat, sejak 1880, kapitalis-kapitalis swasta mulai melakukan investasi di Maluku Utara. Para investor bidang perkebunan membuka perkebunan di Bacan, Tobelo dan Halmahera Tengah. Tetapi investasi itu belum mampu mendongkrak taraf hidup rakyat kebanyakan. Pertanian dan perkebunan berskala kecil masih menjadi katup kehidupan rakyat, yang 90 persennya adalah petani.

Perubahan yang signifikan terjadi dengan dibukanya hubungan laut oleh KPM. Para petani kelapa dan tanaman industri lain berskala ekspor mendapat peluang memasarkan hasil-hasilnya. Sementara pembentukan Coprafonds oleh Pemerintah telah membantu petani kelapa memperoleh nilai tambah berkenaan dengan pelatihan peningkatan mutu kopra. Akan tetapi, terbatasnya luas areal perkebunan kelapa rakyat membuat hasil yang diperoleh petani juga sangat terbatas.

Ketika Gubernur Jenderal Dirk Foch menaikkan pajak pada 1926, dalam rangka menciptakan anggaran yang berimbang, beban pajak – terutama pajak langsung – sangat

memberatkan rakyat dan pada ujungnya hanya menggerogoti tingkat pendapatan dan kesejahteraan mereka. Hingga hengkangnya Belanda dari Indonesia, rakyat Maluku Utara dalam beberapa sektor kehidupan seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi, masih tetap berada dalam keadaan yang menyedihkan dan di bawah garis kemiskinan menurut ukuran masa kini.

Lebih dari tiga abad (1607-1942) Maluku Utara dikuasai Belanda, baik oleh VOC atau kemudian Pemerintah Kolonial Belanda. Kekuasaan kolonial ini telah mengeksploitasi dan menanam pengaruhnya tanpa melakukan sesuatu yang bermakna dan patut dikenang atau dibanggakan, kecuali sebuah penderitaan yang berkepanjangan, kemiskinan, ketidakberdayaan, dan goyahnya sendi-sendi komunitas yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya.

Pada awal kedatangannya, kaum penjajah Belanda mengintroduksi suatu politik yang bisa diistilahkan sebagai politik *dibo-dibo*,²² yang sukar dicari padanannya. Mereka melakukan pelayaran bolak-balik mengangkut rempah-rempah hasil negeri Maluku dan meraih keuntungan yang fantastis dari hasil penjualannya. Karena itu, mereka berusaha memperoleh monopoli perniagaan rempah-rempah, tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat produsen yang menjadi obyek eksploitasi.

Kedatangan bangsa Belanda ke Maluku Utara, seperti tercermin dalam kenyataan sejarah, mula-mula dalam kapasitasnya sebagai dewa penyelamat bagi Ternate yang ketika itu tengah menjadi bulan-bulanan militer Spanyol. Karena itu, mereka diterima dengan penuh keramahan dan keikhlasan hati tanpa prasangka buruk sedikitpun. Lagi pula, pada masa awal kedatangannya, Belanda memperlihatkan sikap yang santun, ramah dan suka menolong, sehingga mampu memesonakan elit penguasa daerah ini, yang kebetulan tengah dilanda perseteruan terselubung dalam upaya meraih hegemoni dan persaingan politik yang serius.

Ketika Belanda memaksakan politik monopoli dengan kekerasan militer dan politik adu domba, keraguan dan praduga jelek mulai timbul di kalangan rakyat maupun elit penguasa Maluku Utara, *cum quo* para monarkis. Rakyat tidak hanya menatap semua kejadian dengan sikap kritis, tetapi dalam benak mereka mulai bersemi rasa tidak senang, bahkan kebencian dan antipati. Hal terakhir ini makin berkobar dalam nurani mereka, ketika disadari bahwa sang *dibo-dibo* kini berubah menjadi yang dipertuan pemegang kendali kekuasaan politik. Sementara elit penguasa pribumi tidak lebih dari instrumen kepanjangan tangan (*verlengstuk*) untuk melakukan perintah-perintah penguasa baru yang selama ini dikenal sebagai *dibo-dibo*. Perintah-perintah penguasa baru itu lebih sering menyengsarakan rakyat.

Tidak mengherankan jika perubahan politik seperti itu disikapi rakyat dan sebagian elit kekuasaan Maluku Utara dengan sejumlah pemberontakan dan perlawanan. Perlawanan rakyat – tak jarang bekerja sama dengan elit kekuasaan tradisional tertentu – tidak terlepas dari motif ingin membebaskan diri dari penindasan dan membela harga diri yang dijunjung tinggi. Mereka tidak hanya melawan penjajah, tetapi juga para sultan mereka sendiri yang takluk di bawah kemauan kekuasaan asing.

Pemberontakan *Salahakan* Luhu dari klan Tomagola di Ambon (1641), dilakukan melawan monopoli VOC, sekaligus membangkang perintah Sultan Hamzah. Pemberontakan ini merupakan contoh klasik yang bagus mengenai perlawanan baik terhadap kolonialis maupun monarkis, yang oleh Luhu dipandang sebagai instrumen mati pelayan kekuasaan penjajah.

²² *Dibo-dibo* adalah istilah dalam bahasa Ternate untuk orang yang membeli suatu barang dengan harga semurah mungkin kemudian menjualnya dengan harga setinggi-tingginya. Ada unsur pemerasan dalam *dibo-dibo*.

Pemberontakan serupa juga dilakukan *Salahakan Majira* di Seram (1655), yang berlangsung relatif lama. Sementara pemberontakan para monarkis dapat diilustrasikan dengan perlawanan Sultan Sibori Amsterdam di Ternate, berlangsung dari 1680-1681, yang merupakan pemberontakan pertama seorang sultan terhadap kekuasaan kolonial yang sudah mapan.

Disamping memberontak terhadap kekuasaan Belanda, rakyat juga melakukan hal serupa terhadap elit penguasa lokal-tradisional mereka. Pada 1783, rakyat Tidore memakzulkan Patra Alam dari singgasananya, dan menurunkan Sultan Kamaluddin dari takhtanya pada 1797. Sebelum itu, para *bobato* Ternate juga melakukan pembangkangan terhadap Sultan Mandarsyah pada 1648. Demikian pula, rakyat Makian memberontak terhadap Sultan Muhammad Zain pada 1847.

Kejadian-kejadian di atas mengindikasikan bahwa perlawanan terhadap Belanda tidak hanya datang dari rakyat, tetapi juga dari para elit kekuasaan tradisional. Bahkan, rakyat tidak segan-segan melakukan perlawanan terhadap elit penguasa tradisional mereka – baik dengan membangkang pemerintahnya ataupun dengan kekuatan bersenjata – yang bertindak sebagai instrumen penjajah.

Pemberontakan dan perlawanan yang dilakukan terhadap penjajah Belanda dengan jelas menunjukkan bahwa rakyat Maluku Utara tidak menyenangi sistem yang diberlakukan atas mereka oleh Belanda. Tidak mengherankan, ketika Belanda bertekuk lutut kepada Jepang pada 1942, rakyat melihat bahwa penguasa kolonial itu harus meninggalkan daerah ini sebagai suatu keharusan sejarah.

Awal abad ke-20 adalah masa pencerahan bagi bangsa Indonesia. Pada masa ini bangsa Indonesia mulai bangkit kembali dan menemukan jati dirinya, setelah memudar berabad-abad lamanya. Penemuan kembali jati diri ini *sangat tepat* disebut sebagai sebuah pencerahan (*aufklarung*). Bangsa Indonesia sadar bahwa mereka adalah sebuah *nation* yang harus tahu identitas dan harga dirinya. Pencerahan tersebut dapat dilihat dari mulai maraknya gerakan kebangsaan di pelbagai kalangan, baik priyayi maupun akademisi, kalangan keagamaan, seniman dan budayawan, serta lainnya di seluruh Indonesia.

Situasi dan kondisi kedaerahan menyebabkan pola dan pilar kesadaran itu tidak sama antara satu daerah dengan lainnya. Tetapi, hal paling prinsip adalah polarisasi kebangkitan dan pencerahan itu terjadi secara merata di seluruh wilayah nusantara, walaupun dengan kapasitas dan intensitas yang berbeda.

Karena faktor kondisional, gerakan-gerakan di pelbagai kalangan seperti Budi Utomo (1908), Syarikat Dagang Islam (1911), dan berbagai organisasi kepemudaan, walaupun bercorak kedaerahan—misalnya Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Islamiten Bond, dan lainnya—lahir di Jawa. Organisasi-organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah (1912), al-Irsyad (1915), dan Nahdatul Ulama (1926), juga lahir di Jawa, kecuali beberapa organisasi keagamaan Islam lainnya, seperti Permi yang lahir di Sumatera Barat. Partai-partai politik, seperti Syarikat Islam (SI, kemudian menjelma menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII), Partai Komunis Indonesia (PKI, 1923), dan Parta Nasional Indonesia (PNI, 1927), juga lahir di Jawa. Tetapi, segera setelah itu, gerakan dan partai tersebut menyebar ke seluruh nusantara.

Angin kesadaran nasional yang bertiup sangat kencang itu sampai juga ke Maluku Utara dan mendapat sambutan hangat rakyat di daerah ini. Banyak tokoh Maluku Utara yang terlibat

dalam kepertaian dan keorganisasian tersebut. Sebuah fenomena kebangkitan nasional telah muncul di Maluku Utara.

Bab 15

Maluku Utara di Era Kebangkitan Nasional

Sarikat Islam (SI merah) di Ternate

Pada 1912, Sarekat Dagang Islam, mengubah namanya menjadi Sarikat Islam (SI) yang dipimpin Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Sejak masa itu dan di bawah kepemimpinannya, SI berkembang sangat pesat. Sampai 1919, pimpinan SI mengklaim jumlah anggotanya telah mencapai 2 juta orang. Walaupun SI menyatakan kesetiiaannya kepada Pemerintah Belanda, akan tetapi ketika partai politik ini berkembang di desa-desa, meletuslah berbagai kekerasan.¹ Dalam bulan Pebruari 1923, ketika terjadi proses pertikaian antara SI dengan PKI (SI Merah), HOS Tjokroaminoto memutuskan untuk mendirikan Partai Sarikat Islam.

Di Maluku Utara, SI didirikan oleh beberapa tokoh masyarakat Ternate pada awal 1925 dan memperoleh pengikut cukup banyak.² Sementara Partai Sarikat Islam kurang diminati walaupun dipimpin HOS Tjokroaminoto. Tetapi, ketika SI pecah dan muncul SI merah, dan kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI), orang-orang SI Ternate memilih bergabung dengan SI merah M.A. Kamaruddin (Oom Sau) dan Daniel Bohang termasuk yang ikut bergabung.

Ketika orang-orang PKI melakukan pemberontakan pada bulan Desember 1925, orang-orang SI merah, seperti M.A. Kamaruddin (Oom Sau) dan Bohang, termasuk ke dalam daftar orang yang dicap sebagai pemberontak oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pada bulan Nopember 1926, terjadi penangkapan besar-besaran terhadap pimpinan PKI di seluruh Indonesia. Di kota Ternate, Pemerintah Belanda juga melakukan penggeledahan besar-besaran dari rumah ke rumah dan menangkap sejumlah pimpinan PKI. Oom Sau dan Bohang ikut ditangkap dan diasingkan ke Bovendigul di Papua. Di tempat inilah Oom Sau bertemu dengan Bung Hatta dan Syahrir pada 1934. Sejak waktu itu pula, Oom Sau mengabdikan kepada dan menjadi asisten pribadi Bung Hatta hingga 1936, ketika Bung Hatta dan Syahrir dipindahkan ke pulau Banda. Oom Sau dan Bohang baru dibebaskan pada 1938. Oom Sau menetap di Ternate, sementara Bohang kembali ke Galela dan membuka lahan pertanian.

Di antara para pejuang dan perintis kemerdekaan, selain tokoh-tokoh seperti Oom Sau dan Bohang yang turut dalam pemberontakan PKI, patut pula dicatat peran Haji Salahuddin dan Haji Ngade. Tokoh terakhir ini turut dalam pemberontakan dan pengambi-alihan kapal Angkatan Laut Belanda Zeven Provinciën.

¹ Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*. Tr.Satrio Wahono et.al., Serambi Jakarta 2005, p.348.

² Kotambunan, H.Hamid, *Perjuangan Rakyat Maluku Utara Membebaskan Diri dari Kolonialisme*. Jakarta, PT Gamalama Media, 2003.p.1-2.

Haji Ngade di masa remajanya adalah aktivis Sarekat Islam (SI merah), kemudian masuk Angkatan Laut dan ditempatkan sebagai kelasi pada kapal AL Belanda *Zeven Provincien*. Karena ikut berontak bersama para perwira Indonesia dan mengambil alih komando kapal tersebut pada bulan Pebruari 1933, H.Ngade dipecat dengan tidak hormat. Ia kemudian kembali ke kampung halamannya di Ternate (Kampung Makassar) dan aktif dalam organisasi Muhammadiyah hingga akhir hayatnya.

Budi Mulya

Sementara itu, Pada 1925 seorang pemuda bernama Mas Gondo tiba di Ternate dari Jawa. Ia disertai beberapa pemuda Ternate, di antaranya Mansur Baco, yang kemudian dikenal sebagai seorang aktivis politik terkemuka. Mas Gondo dan Mansur Baco kemudian membentuk sebuah organisasi sosial “Budi Mulya” dan berkantor di sebuah rumah – dikenal di kalangan masyarakat Ternate dengan sebutan *Rumah Tinggi* – berlokasi di Kampung Falajawa. Dalam waktu yang relatif singkat, organisasi sosial Budi Mulya memperoleh pengikut cukup banyak. Kantornya tiap hari memperoleh kunjungan para pemuda. Tetapi Budi Mulya lebih banyak mendiskusikan hal-hal politik ketimbang topik-topik sosial.

Jaringan mata-mata polisi Belanda, akhirnya memperoleh bukti bahwa Budi Mulya bukanlah sebuah organisasi sosial, tetapi jaringan dari sisa-sisa PKI yang dikamufilasi dengan kegiatan sosial. Ketika terjadi penangkapan terhadap pimpinan PKI pada bulan Oktober 1926, Budi Mulya ikut digulung Pemerintah Belanda. Mas Gondo berhasil meloloskan diri ke Jawa, dan Mansur Baco beserta 15 pemuda lainnya berhasil ditangkap dan baru dibebaskan beberapa waktu kemudian.

Ketika polisi menggeledah kantor Budi Mulya, dari dokumen-dokumen yang berhasil disita dapat diketahui bahwa Budi Mulya adalah kedok dari PKI.³ Sejak Budi Mulya digulung dan ditangkannya Oom Sau, Bohang, Mansur Baco serta sejumlah pemuda lainnya, suhu politik di Ternate menurun tajam. Kegiatan-kegiatan politik praktis sepi, dan trauma politik melanda penduduk kota ini selama hampir tiga tahun berikutnya.

Muhammadiyah di Maluku Utara

Membicarakan kebangkitan nasional atau era kesadaran nasional di Maluku Utara tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang masuknya Muhammadiyah di daerah ini. Muhammadiyah, yang didirikan K.H. Ahmad Dachlan pada 1912 di Yogyakarta, merupakan salah satu organisasi Islam modernis terpenting di Indonesia yang telah mengukir sejarahnya dengan gemilang.

Di Maluku Utara, organisasi ini menjadi salah satu organisasi pelopor kebangkitan nasional dan cukup diminati rakyat, khususnya umat Islam. Kepeloporannya dilakukan oleh Haji Muhammad Amal dan murid-muridnya di Galela, Halmahera Utara. Pada 17 September 1928, Haji Muhammad Amal dan murid-muridnya membentuk Muhammadiyah “Groep” Galela. Ketua berada di tangan Haji Muhammad Amal sendiri, sekretarisnya Haji B.S. Rauf, bendahara Daniel

³ Kotambunan.p.2.

Lasiji dan pembantu-pembantunya: Abdullah Joge, M.S. Sawai, Haji Abdul Jalil dan beberapa tokoh lokal lainnya.⁴

Karena di Maluku Utara ketika itu belum ada Konsul Muhammadiyah – penamaan untuk Pimpinan Wilayah – maka Groep (semacam anak cabang) Galela, langsung ditangani oleh Pimpinan Pusat atau *Hoofd Bestuur* di Yogyakarta.⁵

Pada 1933, Muhammadiyah masuk ke Ternate. Pimpinan awal Muhammadiyah di Ternate ini terdiri dari Arifin Patty, Abdullah Petrana, Ibrahim Tolangara, dan Luth Haji Ibrahim. Pada 1938, L.A. Nasibu ikut memperkuat pimpinannya. Pada tahun ini pula, terbentuk secara beturut-turut pimpinan Muhammadiyah di Weda oleh dokter Chasan Bosoirie, Tidore, dan Morotai. Di distrik terakhir ini, pimpinannya di tangan Haji Umar Jamaa, Rajab Puradin dan Musa, seorang aktivis Muhammadiyah asal Gorontalo. Sementara di Tobelo Muhammadiyah sudah berdiri sejak 1934 dan pimpinannya berada di tangan Haji Abdullah Tjan beserta murid-muridnya. Sekolah-sekolah Muhammadiyah berdiri di Ternate sejak 1936, menyusul di Tobelo, Galela, dan Weda pada 1938. Pada tempat-tempat tersebut juga lahir organisasi kepanduan Hizbul Wathan (HW).

Titik berat tugas Muhammadiyah waktu itu adalah melakukan dakwah, di samping pendidikan. Muhammadiyah Tobelo dan Galela mendatangkan ustadz untuk madrasahnyanya langsung dari Padang Panjang dan Padang, semuanya melalui Pimpinan Pusat di Yogyakarta. Sementara Ternate mendatangkannya dari Makassar. Pimpinan Pusat di Yogya juga menugaskan Syamsuddin Yusuf untuk Tobelo, dan Bahrun Sultany untuk Galela. Di Ternate, BAPMAN dipimpin oleh ustadz Jafar. Karena para pengurusnya terlibat dalam kegiatan politik, termasuk ustadz Jafar sendiri, pengendalian sekolah BAPMAN hampir seluruhnya dipegang Arifin Patty, yang ketika itu menjabat Kepala Sekolah Dasar Kenari Tinggi dan merupakan seorang “ambtenaar” (pegawai negeri) yang diharamkan ikut partai politik oleh Pemerintah Belanda.

PNI di Ternate

Pada 1928, Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan penjelmaan dari *Algemene Studie Club* yang didirikan Bung Karno pada 4 Juli 1927.⁶ Hanya setahun setelah PNI berdiri, pada 1929 tiba di Ternate tiga propagandis PNI. Kedatangan ketiga juru kampanye PNI tersebut telah mencairkan trauma politik rakyat Ternate, dan demam politik rakyat Maluku Utara kembali merebak. PNI disambut antusias, terutama di kalangan kawula muda Ternate. Nyonya Suwaeba (Ibu Eba) adalah perempuan pertama yang masuk partai politik tersebut. Dalam suatu wawancara dengan penulis pada 1995 – sebelum almarhumah tutup usia – bertempat di rumahnya di kampung Santiong Ternate, Ibu Eba menyatakan bahwa ia pada usia remaja masuk PNI karena sangat tertarik dengan tokoh pendirinya, yakni Bung Karno.

Tetapi, masuknya PNI ke Maluku Utara bertepatan waktu di mana trauma rakyat pada politik masih belum sembuh, lantaran tindakan-tindakan Pemerintah Belanda terhadap pengurus PKI dan Budi Mulya yang baru lewat setahun. Oleh sebab itu, ketiga juru kampanye PNI

⁴ Tanggal dan tahun berdirinya berikut pengurusnya diberikan H.B.S. Rauf sendiri dalam wawancara dengan penulis pada 1996.

⁵ Ibid, wawancara dengan H.B.S.Rauf.

⁶ Ricklefs, *Op.Cit.*p.378.

bersikap sangat hati-hati. Mereka tidak dapat berkampanye secara terbuka, dan karena selalu dibuntuti mata-mata polisi, ketiga juru kampanye itu akhirnya menghilang dan kembali ke Jawa.

Walaupun situasi yang dihadapi tidak kondusif, ketiga propagandis PNI itu berhasil menanamkan ide-ide PNI secara mantap, khususnya gagasan-gagasan pendiri PNI Bung Karno. Pada 1929, Pemerintah Belanda mengambil tindakan kepada PNI dengan menangkap Bung Karno dan pimpinan PNI lainnya. Mereka kemudian digiring ke pengadilan di Bandung pada akhir 1930. Pledoi (pidato pembelaan diri di depan pengadilan) Bung Karno yang sangat cemerlang dalam proses pengadilan itu tidak mampu menghalanginya ke penjara. Bung Karno tetap dinyatakan bersalah dan dihukum.

Penangkapan Bung Karno telah mengakibatkan PNI Maluku Utara yang baru berumur setahun, mengalami kelumpuhan total. Juru kampanyenya dari Jawa telah menghilang secara misterius, dan segala aktivitas partai yang baru mulai tumbuh lenyap sama sekali. Bahkan, para pemuda yang menjadi aktivisnya seperti Sabtu Mataoga, Ahmad Biyan, Ibu Eba, harus melakukan kegiatan partainya secara sembunyi-sembunyi. Kegiatan politik PNI maupun partai-partai lain, seperti PSII, kembali mengalami keterpurukan, ketika Bung Karno yang telah memperoleh pembebasan bersyarat dari penjara Sukamiskin Bandung kembali ditangkap dan dideportasikan ke Ende di Flores untuk menjalani hukumannya pada bulan Agustus 1933.

Mengalihkan kegiatan ke bidang pendidikan dan organisasi sosial

Karena kegiatan politik praktis sangat tidak kondusif, kaum nasionalis maupun tokoh keagamaan dan politik, yang di kalangan rakyat Ternate dikenal sebagai *Orang Pergerakan* mengalihkan aktivitas mereka ke bidang pendidikan dan usaha-usaha sosial lainnya sebagai sebuah kegiatan antar waktu sambil menunggu waktu yang tepat untuk kembali menggalang aktivitas politik.

Ahmad Syechan Bachmid pada 1936 mendirikan Al-Islamiah School, sebuah sekolah dasar yang berdasarkan Islam. Setahun kemudian, ia mendirikan sebuah Madrasah Raudatul Adab. Selanjutnya, Muhammadiyah Galela mendirikan Madrasah Wustha Muallimin Muhammadiyah dipimpin Bahrin Sultami, dan sebuah madrasah sejenis di Tobelo yang dipimpin Syamsudin Jusuf. Di Ternate, Muhammadiyah mendirikan Madrasah BAPMAN, pimpinan ustadz Jafar, dan di Weda dipimpin oleh dokter Casan Boesoerie sendiri. Di Sanana, sebuah madrasah diusahakan masyarakat setempat dan dipimpin Ustadz Bahsoan. Taman Siswa juga didirikan di Ternate oleh tokoh-tokoh: M.S. Djahir, Sabtu Mataoga, dan Suryadi, yang mendapat sambutan hangat dari orangtua murid.

Di samping sekolah, rakyat juga mendirikan organisasi Kepanduan. Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) berdiri di Ternate dan Weda, sementara Hizbul Wathan (HW), sebuah organisasi kepanduan di bawah asuhan Muhammadiyah berdiri di Ternate, Galela, dan Tobelo.

Di samping organisasi kepanduan yang berskala nasional seperti KBI dan HW, sejak 1938 telah berdiri organisasi kepanduan lokal di Ternate, seperti Annaser pimpinan Ahmad Syechan Bakhmid, dan Persatuan Padvinder Ternate (PPT) pimpinan Yusuf Tjoen. Beberapa organisasi massa lokal juga berdiri di Ternate. Persatuan Tionghoa Islam (PTI) didirikan dan

dipimpin Haji Abdul Kadir Hoatseng, Persatuan Pemuda Islam pimpinan M. Arsyad Hanafi, dan persatuan Pedagang Arab Indonesia pimpinan Husen Al-Ammarie dan Umar Assagaf.⁷

Media Massa

Salah satu keberhasilan penyebaran gagasan ideologi politik oleh “Kaum Pergerakan” Maluku Utara ialah penggunaan dan pemanfaatan media massa secara efisien sebagai alat komunikasi antara partai-partai dengan massa pengikutnya. Demikianlah, pada tahun 1937, Ahmad Syechan Bachmid mendirikan mingguan *Sentosa* disusul Frederik Kansil dengan *Sinar Maluku* dan *Utusan Kita*. Walaupun tiras surat-surat kabar yang beredar di Ternate itu tergolong kecil, akan tetapi sebagai sumber informasi politik media-media tersebut cukup berhasil.

Suhu politik kembali memanas

Sejalan dengan situasi politik yang kian meningkat secara nasional, mulai 1937 aktivitas politik mulai meningkat di Maluku Utara, setelah mereda beberapa tahun. Beberapa faktor ikut menyulut meningkatnya suhu politik tersebut. Tetapi, faktor paling menentukan adalah *transformasi politik* yang makin meningkat dari pusat ke daerah-daerah. Gerakan anti kolonialisme semakin radikal, dan semangat non koperasi (tidak mau bekerjasama dengan Pemerintah Belanda) makin menjiwai partai-partai politik di pusat kekuasaan Hindia Belanda di Batavia. Partai-partai non-kooperatif makin nyaring suaranya menuntut kemerdekaan. Pada bulan Juli 1936, Sutarjo Kartohadikusumo mengajukan sebuah petisi kepada Dewan Rakyat (Volksraad) yang meminta diselenggarakannya suatu konperensi guna mengatur otonomi Indonesia di dalam satu uni Indonesia-Belanda dalam tenggang waktu 10 tahun.⁸

Terbentuknya organisasi MIAI (Majlis Islam A’la Indonesia) di Jakarta diikuti organisasi serupa yang didirikan di Ternate di bawah pimpinan Ahmad Syechan Bachmid. Pada tahun 1941, terbentuk pula di Ternate Gabungan Politik Indonesia (Gapi) yang menghimpun partai-partai politik yang ada di daerah ini, yaitu Parindra (Partai Indonesia Raya), Gerindo (Gabungan Rakyat Indonesia) dan PSII (Partai Sarikat Islam Indonesia). Pimpinan Gapi berada di tangan tokoh-tokoh politik berpengalaman seperti M.Arsyad Hanafi, M.S. Djahir, Nurdin Iskandar Alam, Hasan Esa, Agil bin Syech Abubakar, dan Haji Salahuddin. Sebuah majalah juga diterbitkan, yaitu bulanan *Kebangunan Timur* dipimpin Umar Assagaf dan Abubakar Bachmid.⁹

Pada 2 Desember 1941, MIAI dan Gapi menyelenggarakan pawai raksasa dalam rangka menuntut *Indonesia berparlemen*, dan inilah pawai terbesar pada waktu itu. Ia diikuti lebih 3000 orang dari seluruh lapisan masyarakat. Sebuah keistimewaan dari pawai ini: aktivis MIAI dan Gapi mengenakan stelan jas berwarna putih, dengan insigne (lambang) merah putih di dada dan dasi berwarna merah putih. Karena pawai diorganisasi secara baik, tidak terjadi kerusuhan atau insiden apapun sejak awal hingga akhir pawai.

⁷ Kotambunan. *Op.Cit.*p.7.

⁸ Ricklefs, *Op.Cit.*p.359.

⁹ Kotambunan, p.8.

BAB 16

Maluku Utara di bawah Pendudukan Jepang (1942-1945)

Perang Pasifik

Pada 7 Desember 1941, angkatan udara Jepang secara tiba-tiba menggempur Pearl Harbour di Hawaii, pangkalan angkatan laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik yang menjadi basis Armada Pasifik atau Armada ke-7. Dengan penyerangan ini, Jepang secara resmi memulai Perang Pasifik sebagai bagian dari Perang Dunia ke-2. Di pagi hari minggu yang kelabu itu, sebanyak 360 pesawat tempur Jepang – terdiri dari pesawat pembom, pemburu dan pembawa torpedo – diterbangkan dalam dua gelombang, disertai enam kapal induk, dua kapal perang besar dan sebelas destroyer, berikut 1400 pesawat terbang cadangan yang telah siaga. Pimpinan armada Jepang berada dalam kendali Laksamana Chuichi Nagumo.

Serangan mendadak atas Pearl Harbour berhasil menenggelamkan dua kapal perang dan merusak enam kapal Amerika lainnya. Sebanyak 180 pesawat Amerika yang berada di landasan pacu berhasil dihancurkan, dan sejumlah 2330 tentara Amerika tewas, serta 1140 luka-luka. Tetapi, tiga kapal induk Armada Pasifik selamat, karena tidak berada di Pearl Harbour sewaktu terjadinya serangan.

Pada 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat secara resmi menyatakan perang terhadap Jepang. Tetapi, pada hari yang sama, pangkalan Amerika di Filipina – Clark dan Iba – diserang pesawat-pesawat tempur Jepang. Serangan ini berhasil merusak separuh dari kekuatan tempur udara Amerika di kedua basis militer tersebut.¹

Pada 10 Desember 1941, tentara Jepang memulai penyerbuannya ke Filipina. Ibukota Manila jatuh pada 12 Januari 1942. Komandan tentara Amerika di Filipina, Letnan Jenderal Mac Arthur, mundur ke Bataan dan bertahan di sana. Pada 11 Maret 1942, Mac Arthur ditarik ke Australia dan diangkat sebagai Panglima Wilayah Pasifik. Tugasnya di Filipina diambalalih Letnan Jenderal Jonathan Mainwright, yang kemudian menyerah kepada Jepang pada 9 April 1942. Sebulan setelah Mainwright menyerah, tepatnya pada 9 Mei, seluruh Filipina jatuh ke dalam kekuasaan militer Jepang.²

Beberapa waktu setelah penggempuran Pearl Harbour, Hongkong yang dipertahankan kesatuan tentara Inggris dan Kanada mulai diserang Jepang pada 8 Desember 1941, dan berhasil ditaklukkan pada hari natal, 25 Desember. Sebelumnya, Birma menyerah kepada Jepang pada 16 Desember. Bersamaan dengan pendudukan Hongkong, Jepang juga menyerbu Malaya dan berhasil mendudukinya. Dua hari kemudian, 10 Desember, dua kapal perang Inggris – Prince of Wales dan Repulse – ditenggelamkan Jepang, ketika berupaya menghalangi pendaratannya di

¹ Batara R. Hutagalung, *10 Nopember 1945*, (Surabaya: Yayasan Persahabatan 10 Nopember, 2001), pp. 66 f.

² *Ibid.*

Malaya. Kuching, wilayah jajahan Inggris di Kalimantan Timur, diduduki Jepang pada 17 Desember 1941, menyusul Brunai pada 6 Januari 1942.

Pidato Ratu dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda

Pada 13 Mei 1940, sehari sebelum Pemerintah Belanda menyerah kepada Jerman, Ratu Wilhelmina beserta seluruh anggota pemerintahan Belanda berhasil meloloskan diri ke Inggris dan mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di London, di bawah pimpinan Perdana Menteri Gerbrandy. Sebuah dewan penasehat juga dibentuk mendampingi kabinet Gerbrandy. Dalam Kabinet Gerbrandy, duduk seorang Indonesia, Raden Suyono, sebagai Menteri Negara, dan van Mook sebagai Menteri Urusan Daerah Jajahan.³ Ketika van Mook diangkat secara definitif sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, jabatannya sebagai menteri digantikan oleh Prof. Logemann.

Raden Adipati Suyono adalah mantan bupati yang pernah menjabat sebagai anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat) dan mantan anggota Komisi Visman. Ia merupakan orang Indonesia pertama dan terakhir yang menjabat sebagai menteri dalam sebuah kabinet Belanda. Perdana Menteri Gerbrandy menyebut Suyono sebagai “putera rakyat Indonesia.” Tetapi, pengangkatan Suyono tidak lepas dari upaya Belanda merespon kritik Amerika Serikat yang sangat heran melihat Belanda selalu menekan Indonesia.

Ketika bala tentara Dai Nippon menyerang Pearl Harbour, 7 Desember 1941, Pemerintah Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Jepang, yang diumumkan pada 8 Desember, lewat tengah malam waktu London atau tujuh jam setelah penyerangan Pearl Harbour. Menteri Luar Negeri Kerajaan Belanda, Mr. van Kleffens, menginstruksikan Duta Besar Belanda untuk Jepang, J.C. Pabst, menyampaikan nota pernyataan perang kepada Menteri Luar Negeri Jepang, Shigenori Togo, jam 3 sore waktu Tokyo.⁴ Nota pernyataan perang ini berbentuk surat dengan tambahan bahwa Pemerintah Swedia telah memberikan persetujuannya untuk mengurus semua kepentingan Belanda di Jepang. Jam 6 pagi hari berikutnya, Jepang juga menyatakan perang secara serempak kepada Amerika Serikat dan Inggris. Pernyataan perang ini dikemukakan dengan sebuah dekrit Kaisar Jepang, Hirohito, yang disiarkan lewat Radio Jepang.⁵

Bersamaan dengan pernyataan perang Belanda, Ratu Wilhelmina mengucapkan sebuah pidato yang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia setelah Perang Dunia ke-2 usai dan Jepang telah dikalahkan. Dalam pidato itu, Wilhelmina menegaskan Pemerintah Belanda akan melakukan perubahan ketatanegaraan Kerajaan Belanda segera setelah Perang Dunia ke-2 usai. Tujuan perubahan ketatanegaraan ini, terutama di Nederland Indie (Hindia Belanda atau Indonesia), untuk memungkinkan wilayah jajahan itu menuju kemandirian yang lebih besar (*naar grote zelfstandigheid*) menyongsong masa depan. Oleh sebab itu, seluruh struktur baru Kerajaan Belanda harus disusun ulang dengan menyelenggarakan suatu konperensi antara Kerajaan Belanda dan Indonesia dalam sebuah pertemuan meja bundar, simbol persamaan. Tetapi, pidato Ratu Belanda ini ditanggapi dingin oleh para pemimpin bangsa Indonesia.

³ De Yong, J.J.P., *Diplomatie of Strijd, Nederland beleid tegenover de Indonesische Revolutie 1945-1947*. Amsterdam: Boom Meppel, 1988, p.46.

⁴ J.J. Brugmans, *et.al.*, *Nederland Indie onder Japansche Bezetting (1942-1945)*. Franeker: Wever BV, 1960, p.95.

⁵ *Ibid.*, p.93 f.

Cees Fasseur, yang meneliti pidato Wilhelmina itu, mempertanyakan:

Mengapa pidato sepenting ini baru diucapkan sekarang, di masa perang, ketika Pemerintah Belanda berada dalam pengasingan, dan wilayah Negeri Belanda diduduki Jerman? Pendudukan Jerman atas Nederland telah menjadikan Indonesia sebagai sebuah wilayah berpemerintahan kolonial tanpa negeri induk.⁶

Sementara itu, di Jakarta atau Batavia, pada 8 Desember 1941, jam 07.30, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. Tjarda van Starkenborg Stachouwer, mengucapkan pidato melalui radio. Pidato ini – sekalipun lebih awal disampaikan, yakni sekitar lima jam setelah pemboman Pearl Harbour⁷ – secara umum mengikuti kebijakan Pemerintah Belanda di pengasingan, yakni pernyataan perang Pemerintah Hindia Belanda terhadap Jepang.⁸

Pada 5 dan 8 Oktober 1942, Suyono – satu-satunya menteri berkebangsaan Indonesia dalam kabinet Belanda – mengajukan dua nota kepada sidang kabinet yang tengah membahas pidato Ratu Wilhelmina. Dalam nota tersebut, ia mengemukakan bahwa perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia telah menjiwai seluruh rakyat nusantara. Menurutnya, suatu hubungan yang harmonis dalam ikatan kenegaraan antara Nederland dan Indonesia hanya mungkin bila Nederland dapat memahami keinginan rakyat Indonesia, hak mereka untuk merdeka, dan pengakuan Nederland atas hak-hak tersebut. Dan ini harus disampaikan Nederland kepada rakyat Indonesia secara resmi.

Keterangan Pemerintah Belanda yang dikeluarkan sesuai sidang kabinet pada 13 Oktober 1942 untuk menanggapi nota Suyono menyatakan bahwa Pemerintah telah mempunyai rencana berkenaan dengan perubahan konstitusional di Indonesia dan akan diajukan kepada *Staten Generaal* (Parlemen Belanda) untuk dibahas. Merespon hal ini, Suyono menegaskan bahwa bila Perang Dunia ke-2 selesai dan Negeri Belanda bebas, maka Indonesia juga harus bebas (*komt Nederland vrij, dan ook Indonesia vrij*). Nederland, menurut Suyono, tidak lagi memiliki hak perwalian (penjajahan) atas Indonesia. Pendudukan kembali Belanda atas Indonesia akan semakin memperkuat nasionalisme rakyat melawan Belanda. Karena itu, Nederland harus berpegang teguh pada Atlantic Charter 1941, dan bercermin pada British India dan Filipina.⁹

Pernyataan Suyono ditanggapi miring beberapa menteri dalam kabinet Belanda. Menteri Kehakiman, van Angeren, menyatakan bahwa penentuan nasib sendiri bagi Indonesia tidak dapat diberikan, karena akan merusak kedaulatan Kerajaan Belanda. Sementara Menteri Dalam Negeri, van Baiyen, menanggapi secara lebih sederhana: Negeri Belanda mempunyai kewajiban kembali ke Indonesia. Karena itu, Indonesia tidak dapat dilepaskan.

Tetapi, Menteri Perdagangan, Kerstens, menyatakan bahwa Indonesia harus diberi kesempatan sesuai yang dikemukakan Suyono. Sedangkan Menteri Sosial, van den Tempel, mendukung pandangan Suyono. Demikian pula, Menteri Luar Negeri, van Kleffens, pada prinsipnya menyepakati pendapat Suyono serta menambahkan bahwa Nederland dan Indonesia harus membina kerja sama yang erat.

⁶ Cees Fasseur, *Een Wissel op de toekomst, de Rede van Koningin Wilhelmina 6/7 Desember 1942*, dalam *Between People and Statistics: Essays on Modern Indonesian History*, ed. Francien van Anrooy, et.al; Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979, p.267.

⁷ Marwati Juned Puspongoro, et.al., *Sejarah Nasional Indonesia*, vol. vi. Jakarta: Balai Pustaka, 1993, pp. 1 ff.

⁸ Brugmans, *Nederland Indie, Op.Cit.*

⁹ Cees Fasseur, *Een Wissel op de toekomst*, pp. 270 ff.

Menjawab pernyataan rekan-rekan sekabinetnya, Suyono menyatakan dengan tegas bahwa pengakuan hak-hak bangsa Indonesia untuk merdeka juga menyangkut kepentingan Nederland sendiri. Menurutnya, tidak semua rakyat Indonesia anti Belanda. Suyono juga mengutip program perjuangan Partai Pekerja Sosial Demokrat (SDAP) Belanda tahun 1930 yang menyatakan: *SDAP mengakui tanpa syarat hak rakyat Indonesia untuk merdeka*. Pledoi Suyono ini mendapat simpati dari Amerika Serikat. Pada 5 Januari 1943, Suyono, bangsawan Jawa yang menjadi satu-satunya orang Indonesia dalam Kabinet Belanda, meninggal dunia secara mendadak di London.¹⁰

Pendudukan Indonesia

Dalam rangkaian penyerbuan ke Asia Selatan, Jepang mulai membidik Indonesia sebagai sasaran berikutnya. Wilayah Indonesia pertama yang jatuh ke tangan Jepang adalah Tambalan di Kalimantan Barat Daya. Wilayah ini bertekuk lutut kepada Jepang pada 29 Desember 1941.

Strategi Jepang mencaplok Indonesia dimulai dengan pendudukan daerah-daerah penghasil minyak bumi. Pada 11 Januari 1942, Brigade Sakaguchi mendarat di Tarakan, sebuah lokasi yang merupakan pusat eksploitasi minyak BPM (*Bataafsche Petroleum Maatschappij*) di Kalimantan Timur. Pada 24 Januari, giliran Balikpapan yang menjadi pusat eksploitasi BPM – juga di Kalimantan Timur – jatuh ke tangan Jepang. Setelah itu, berturut-turut jatuh kota-kota Samarinda pada 3 Februari, Kotabangun pada 5 Februari, dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Kota-kota ini seluruhnya adalah penghasil minyak bumi.

Pada 16 Februari 1942, pasukan payung Jepang diterjunkan di Palembang, dan pada hari itu juga kota ini jatuh ke tangan Jepang. Setelah itu, Sumatera Timur dan Sumatera Utara menyerah kepada Jepang pada 8 Maret, dan Sumatera Barat sembilan hari kemudian (17 Maret). Kekuatan terakhir tentara Belanda atau KNIL di Sumatera Utara – dipimpin panglimanya, Mayor Jenderal H.T. Queraker – menyerah kepada Jepang pada 28 Maret di Kutacane.

Perlawanan tentara KNIL di seluruh Indonesia hampir tidak berarti secara militer. Hal ini disebabkan rakyat Indonesia tidak mau memberi bantuan. Bahkan, di beberapa daerah seperti di Aceh, Banten, dan lainnya, rakyat menyerbu tentara KNIL dan orang-orang Belanda mantan pejabat.

Pertahanan yang lemah dan separuh hati, seperti ditunjukkan kebanyakan angkatan darat Belanda terhadap serangan Jepang, memberi kesan buruk kepada rakyat Indonesia. Walaupun ada sekitar 8.000 tentara Inggris dan Amerika di Jawa, di bawah komandan Mayor Jenderal Sitwell (Inggris), tetapi Letnan Jenderal Ter Poorten tetap menyerah tanpa berunding dengan mitranya, pasukan Inggris-Amerika.¹¹

Perlawanan tentara KNIL yang agak berarti terjadi di beberapa daerah lainnya. Di Sulawesi Tengah, Letnan Infanteri de Jong dan van Dalen melakukan perang gerilya serta berhasil membunuh banyak serdadu Jepang. Tetapi, kedua perwira KNIL ini akhirnya menyerah dan dideportasi ke Manado. Di Ambon, tentara KNIL dan tentara Australia bahu-membahu menghadapi serbuan Jepang. Pertempuran sengit di dalam kota Ambon, terutama di Kudamati

¹⁰ *Ibid.*, p. 267.

¹¹ George McTurnen Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, tr. Ismail bin Muhammad & Zakarom bin Abdul Rashid; Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980, p.126.

dan Tantui, telah menimbulkan banyak korban di kedua pihak. Tetapi, akhirnya Ambon jatuh ke tangan Jepang pada 2 Januari 1942.

Pada 24 Januari 1942, Kendari takluk kepada Jepang, menyusul Bali pada 18 Februari dan Timor pada 24 Februari. Sementara Makassar telah menyerah sebelumnya kepada Jepang pada 9 Februari, menyusul Sorong pada 4 April dan Jayapura pada 22 April.

Sebaliknya, angkatan laut dan angkatan udara Belanda memberikan perlawanan yang cukup berarti terhadap Jepang. Perang laut paling heroik terjadi di Laut Jawa pada 27 Februari 1942. Pertempuran ini berlangsung selama tujuh jam dan Sekutu kehilangan lima kapal perang, sementara Jepang hanya kehilangan sebuah destroyer. Pimpinan pertempuran di pihak Sekutu berada di bawah kendali Laksamana Karel Doorman, Komandan Angkatan Laut Belanda di Indoensia. Laksamana Doorman sendiri gugur dalam pertempuran tersebut bersama kapal komandonya, de Ruyter, yang dikirim Jepang ke dasar laut.

Dalam bulan Februari 1942, pesawat-pesawat Jepang juga berhasil mencapai Australia Timur. Pada 19 Februari, Port Darwin memperoleh gempuran pesawat-pesawat pembom Jepang. Pada 8 Maret, kepulauan Solomon dan Salamana jatuh ke tangan Jepang. Antara 25-26 Juli, giliran Townsville, sebuah kota di pantai timur Australia, menerima gempuran Jepang.

Jatuhnya Batavia

Pada 4 Maret 1942, setelah melalui pertempuran yang tidak seimbang, pasukan Belanda di Batavia menyerah kepada Jepang. Komandan tentara KNIL untuk seluruh Indonesia, Letnan Jenderal Ter Poorten, dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. Tjarda van Starckenborgh Stachouwer, mengeluarkan perintah kepada pasukan KNIL di seluruh Indonesia agar menghentikan perlawanan dan menyerah kepada Jepang.

Panglima Tentara ke-16 Jepang, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, yang telah menguasai seluruh pulau Jawa dan berhasil menaklukkan Batavia, memanggil Ter Poorten dan Mr. Tjarda ke Kalijati, di dekat kota Bandung, untuk menandatangani dokumen resmi penyerahan. Pada 8 Maret, kedua petinggi itu secara resmi menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang. Keduanya lalu digiring masuk ke kamp tahanan sebagai tawanan perang.

Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. Tjarda, pada mulanya ditahan di sebuah rumah di Bandung, kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Pada 2 Januari 1943, bersama tawanan internasional lainnya, ia dibawa ke Formosa, Taiwan, melalui Tokyo.¹² Setelah perang di Eropa usai, Mr. Tjarda diangkat sebagai Duta Besar Kerajaan Belanda di Perancis.

Ketika Jepang memulai penyerbuan ke Batavia, H.J. van Mook, dan Gubernur Jawa Timur, Ch. O. van der Plas, beberapa perwira tinggi seperti Letnan Jenderal L.H. van Oyen, Laksamana Velfrich, dan Panglima Angkatan Udara Hindia Belanda, serta Kolonel Abdul Kadir Wijoyoatmojo, sempat melarikan diri ke Australia pada 6 Maret 1942.

Setelah diangkat sebagai Menteri Urusan Daerah Jajahan Pemerintah Belanda di pengasingan, Van Mook kemudian ditugaskan “memelihara” daerah-daerah Hindia Belanda yang tidak diduduki Jepang, dan untuk itu ia membentuk sebuah badan bernama Komisi Hindia

¹² Brugmans, *Nederland Indie, Op.Cit.*, pp. 23 f.

Belanda yang berkedudukan di Brisbane.¹³ Pada 23 Februari 1944, van Mook diangkat menjadi pejabat Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan kemudian dikukuhkan secara definitif dalam jabatan tersebut berdasarkan keputusan Ratu Belanda tertanggal 9 Maret 1945.

Pada 9 Maret 1942, Jepang telah merampungkan seluruh pendudukannya di bumi Indonesia, dan keesokan harinya, 10 Maret 1942, Letnan Jenderal Imamura, Panglima Tentara ke-16 Jepang, mengambilalih seluruh kewenangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda atas Indonesia.

Tindakan Jepang Setelah Pengambilalihan Kekuasaan

a. Pembentukan Pemerintahan Militer Sementara

Segera setelah pengambilalihan kekuasaan dari Hindia Belanda, tentara pendudukan Jepang membentuk pemerintahan militer sementara. Seluruh wilayah Indonesia dibagi ke dalam tiga kawasan pemerintahan:

1. Pemerintahan Militer Sementara untuk Sumatera di bawah Angkatan Darat, Tentara ke-25, yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
2. Pemerintahan Militer Sementara untuk Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat, Tentara ke-16, yang berkedudukan di Jakarta.
3. Pemerintahan Militer Sementara untuk Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua di bawah Angkatan Laut, Armada Selatan ke-2, yang berkedudukan di Makassar.

Dalam *Osamu Seirei* (Undang-undang) no. 1, tertanggal 7 Maret 1942, yang dikeluarkan Panglima Tentara ke-16, ditentukan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaan hukum serta undang-undang pemerintah sebelumnya – yakni Hindia Belanda – tetap berlaku sah untuk sementara waktu, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer (*Osamu Seirei* no. 1 pasal 3). Hal ini berarti semua badan pemerintahan dan produk hukum serta perundang-undangan Hindia Belanda tetap diberlakukan sebagai badan pemerintahan dan produk hukum Pemerintah Militer Sementara Dai Nippon.

Pada Nopember 1942, Jenderal Imamura dimutasikan sebagai Panglima Tentara ke-8. Kedudukannya selaku Panglima Tentara ke-16, sekaligus sebagai Penguasa Militer di Jawa dan Madura, digantikan Jenderal Kumakichi Harada. Mutasi yang sama juga terjadi di bagian timur Indonesia. Penguasa Militer Sementara Angkatan Laut di Makassar, yang memegang kendali pemerintahan di kawasan timur Indonesia, sejak 1942-1945 telah dijabat secara berturut-turut oleh:

1. Laksamana Ibo Takahashi (April 1942-September 1942).
2. Laksamana Shiro Takashu (September 1942-Juni 1944).
3. Laksamana Gunichi Mimura (Juni 1944-Nopember 1944).

¹³ Groen, P.M.H., *Marsouters en Dwaalsporen, Het Ned. Militair-strategisch beleid in Indonesia 1945-1950*. 'sGravenhage: SDU Uitgeverij, 1991; p.20 f.

4. Laksamana Denshichi Ohkochi (Nopember 1944-Agustus 1945).¹⁴

Penguasa Militer Angkatan Laut Jepang untuk Indonesia Timur di Makassar kemudian membentuk pemerintahan sipil sementara di bawah pimpinan *Minseifu*. Di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku terdapat bawahan *Minseifu* yang disebut *Minseibu*.¹⁵ Para *Minseibu* inilah yang menjalankan pemerintahan sipil dan bertanggung jawab kepada *Minseifu*.

Karena wilayah kekuasaan demikian luas dan terdiri dari banyak pulau, sistem komunikasi dan informasi antara pusat kekuasaan di Makassar dan daerah-daerah menjadi sangat sulit. Akibatnya, pemerintahan berjalan tidak efisien dan terkesan bahwa para *Minseibu* serta aparatur bawahannya berjalan sendiri-sendiri. Di daerah-daerah dengan konsentrasi pasukan Jepang yang besar, seperti di Nusa Tenggara, Maluku, dan beberapa daerah di Kalimantan, para *Minseibu* mengeluarkan peraturan-peraturannya sendiri.

Di daerah-daerah dengan konsentrasi militer dalam jumlah besar yang dikuasai Angkatan Darat Jepang, Polisi Militer (*Kenpetai*) adalah penguasa yang menjalankan pemerintahan berdasarkan kepentingan militer. Kekuasaan sipil praktis tidak berjalan. Rakyat terpaksa menaati perintah *Kenpetai* bukan karena respek terhadap kekuasaannya, tetapi karena takut dan demi keselamatan diri serta keluarga.

b. Decivilisasi Budaya Barat & Upaya Memenangkan Perang

Setelah pengambilalihan Indonesia, sivilisasi budaya Jepang segera dilancarkan secara sistematis. Tahun kalender masehi yang digunakan di Indonesia diganti dengan penanggalan Jepang, yakni dari 1942 menjadi 2602. Pemakaian bahasa barat di semua bidang, kecuali bahasa Jerman, dilarang. Pelajaran bahasa Jepang diajarkan di semua sekolah, mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Jurnal-jurnal ilmiah yang selama ini diterbitkan dalam bahasa Belanda dan Inggris harus ditulis dalam bahasa Indonesia atau Jerman.¹⁶ Semua gaya hidup yang bercorak barat dilarang. Masyarakat dilarang mendengar siaran radio luar negeri, dan jika ketahuan melanggar dapat dikenakan tuduhan mata-mata musuh yang bisa dihukum penggal kepala.

Partai politik juga dilarang dan dibekukan kegiatannya oleh Jepang. Sebagai gantinya, dibentuk Gerakan 3 A. Gerakan ini berasal dari semboyan: Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon cahaya Asia. Tetapi, hanya orang dan pemimpin Indonesia tertentu yang tertarik kepadanya. Bung Karno, Bung Hatta dan pemimpin utama bangsa Indonesia lainnya tidak pernah tertarik kepada Gerakan 3 A. Mereka bahkan berhasil mendesak Jepang membentuk pasukan bela diri yang disebut Peta (Pembela Tanah Air). Pasukan bela diri inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Tentara Keamanan Rakyat (TKR) setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Untuk mendukung kekuatan dan mesin perangnya, Jepang membentuk kesatuan *Heiho* (pembantu tentara) dan *Romusha* (barisan kerja paksa) yang dikirim ke front pertempuran di Birma, Maluku – terutama Halmahera – dan daerah-daerah Indonesia timur lainnya.

¹⁴ Marwati-Nugroho, *Op.Cit.*, vol. vi, pp. 7 f.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Jurnal Kedokteran pimpinan Prof. Mukhtar termasuk jurnal yang terbit dalam bahasa Jerman, karena itu diizinkan terbit oleh Jepang.

Sementara itu, propaganda untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya dilaksanakan secara intensif. Dalam propagandanya, Jepang banyak mengumbar kebohongan dan janji-janji hampa. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa walaupun bala tentara Jepang mulai mengalami kemunduran di hampir semua front pertempuran sejak 1943, propaganda Jepang menyatakan pasukannya meraih sukses di hampir semua medan pertempuran. Pada tahun ini, medan laga mulai dikuasai Sekutu dan pasukan Jepang mengalami kekalahan total di Laut Koral serta terusir dari Kepulauan Salomon setelah kalah dalam pertempuran Guadalcanal.

Jepang di Maluku Utara

Pada Januari 1942, pesawat-pesawat Jepang untuk pertama kalinya melakukan pemboman atas pulau Ternate. Menghadapi aksi ini, Asisten Residen dan Komandan KNIL di Ternate memerintahkan para pegawai sipil serta warga keturunan Belanda mendaftarkan diri untuk dilatih sebagai tenaga pertahanan sipil. Tiap sore latihan dilangsungkan di belakang Benteng Oranje, di bawah bimbingan beberapa bintang KNIL, antara lain Sersan Saerang dan Sersan Mayor Paruntu. Disamping itu, tentara KNIL juga membangun barikade kawat berduri di sepanjang pantai Jembatan Residen hingga dermaga, dan menimbun karung-karung goni berisi pasir di setiap persimpangan jalan. Bambu runcing ikut pula dipancang di sepanjang pantai antara Kampung Cina hingga dermaga.

Pada 6 April 1942, tentara Jepang melakukan pendaratan di Ternate,¹⁷ setelah menaklukkan Sorong pada 4 April. Selang beberapa hari kemudian, tepatnya 9 April, Jepang juga mendarat di Makassar, dan pada 22 April berhasil menduduki Jayapura.

Ketika armada Jepang pembawa pasukan pendarat mendekati dermaga Ternate, tentara KNIL kacau balau dalam suasana kebingungan dan berlari tanpa tujuan. Tanpa letusan peluru, tentara KNIL menyerah, dan seluruh Maluku Utara dinyatakan dikuasai pasukan Jepang pada hari itu juga, yakni 6 April 1942.

Sehubungan dengan pendaratan Jepang di Ternate ini, Jeanne van Diejen melukiskan bahwa sebelum pendaratan tersebut, sebuah kapal misterius bernama Honun Maru merapat di dermaga Ternate dan memerintahkan Asisten Residen, Velde, serta Komandan Militer KNIL, Kapten Zondag, dan seorang dokter tentara berkebangsaan Belanda, para biarawati, serta sejumlah anak keluarga Belanda naik ke kapal, kemudian menghilang. Belakangan diketahui bahwa Honun Maru bertolak menuju Ambon.¹⁸

Pada 5 April 1942, pesawat-pesawat Jepang menjatuhkan selebaran yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang buruk dan mengemukakan secara agitatif: *Setelah tiga setengah abad mengalami eksploitasi dan dominasi rakyat Indonesia oleh Belanda, maka kini telah tiba saat pembebasan. Dai Nippon telah memutuskan rantai eksploitasi dan dominasi tersebut. Dai Nippon menyerukan agar rakyat Indonesia menangkap orang-orang Belanda dan menyerahkan hidup-hidup kepada kuasa pemerintah yaitu Angkatan Laut Jepang sebagai tawanan. Orang-orang Belanda diberikan waktu satu jam untuk menyerahkan diri.*¹⁹

¹⁷ Brugmans, *Nederland Indie, Op.Cit.*, p. 23.

¹⁸ Ron Heyneman, *Ibu Maluku: The Story of Jeanne van Diejen*. Victoria: Sid Harta Publisher, 2002, p.345.

¹⁹ *Ibid.*, p. 368.

Malam hari menjelang 6 April, sebanyak 19 kapal perang Jepang yang akan ambil bagian dalam pendaratan Ternate telah dikonsentrasikan di pelabuhan Gane Dalam. Pagi harinya, 6 April 1942, kapal-kapal itu muncul di Ternate dengan moncong meriam diarahkan ke kota dan siap ditembakkan.

Pada 6 April ini, pesawat-pesawat Jepang kembali beraksi menyebarkan selebaran yang ditulis dalam bahasa Belanda dan Inggris. Isinya berupa ultimatum yang ditujukan kepada personil sipil dan militer Belanda. Pihak militer, Asisten Residen, kontrolir dan semua orang Belanda lainnya diserukan berkumpul di dermaga dalam waktu satu jam sebagai tanda menyerah, dan bendera putih dikibarkan di kantor-kantor serta bangunan publik/pemerintah. Bila ultimatum diabaikan, kota Ternate akan digempur.

Ketika batas waktu ultimatum lewat dan belum tampak tanda-tanda penyerahan tentara KNIL dan pejabat sipil Belanda, pesawat-pesawat Jepang mulai menjatuhkan bom dan menembaki gudang Coprafonds, Kantor KPM dan kantor-kantor lainnya yang terdapat di kompleks pelabuhan. Selanjutnya, sebagian wilayah pemukiman Kedaton Tidore juga dibombardir, yang mengakibatkan tewasnya 56 orang.

Asap mengepul selama beberapa hari, karena gudang Coprafonds yang dibom sedang penuh dengan kopra. Setelah api padam, ditemukan dua sosok mayat yang telah menjadi arang. Salah satu di antaranya adalah serdadu KNIL. Sementara satunya lagi adalah pegawai Coprafonds.

Dalam situasi panik, Kontrolir Syirk van der Groot berlari ke rumah sakit menemui dr. Chasan Boesoirie dan Nyonya Jeanne van Diejen, pekerja sosial asal Belgia. Van der Groot mengatakan kepada keduanya bahwa Asisten Residen maupun Komandan Militer telah pergi. Tidak ada seorang pun yang berada di dermaga. Van Diejen, yang bekerja sebagai suster rumah sakit, berlari ke Istana Sultan Ternate. Belum ada bendera putih berkibar di istana. Ia segera kembali ke rumah sakit, mengambil seprei putih dari tempat tidur pasien. Kontrolir van der Groot mengikutinya. Keduanya lalu mengikat seprei itu ke sebatang bambu dan menaikkannya, disaksikan Boesoirie: tanda takluk telah dikibarkan.²⁰

Setelah itu, Kontrolir van der Groot berkata bahwa ia akan naik ke kapal komando Jepang untuk menyerahkan Ternate kepada Dai Nippon. Van der Groot segera meninggalkan rumah sakit diikuti van Diejen. Keduanya berjalan menuju pantai dan mencari perahu nelayan yang dapat mengantar mereka ke kapal Jepang.

Di samping pasar, mereka menemukan perahu nelayan dengan dua pendayung. Tetapi, kedua nelayan itu menolak karena ketakutan. Setelah diberi penjelasan, kedua nelayan itu bersedia mengantarkan ke kapal Jepang. Ketika perahu mulai dikayuh menuju kapal Jepang, Boesoirie memanggil mereka seraya mengatakan dirinya akan ikut ke kapal Jepang, sebab apa yang akan terjadi di atas kapal nanti tidak dapat diduga.

Dengan cepat perahu berpenumpang tiga orang itu dikayuh menuju kapal Jepang. Tampaknya tentara Jepang telah mengamati mereka dari atas kapal. Seorang tentara Jepang yang memegang megafon bertanya siapa yang bisa berbahasa Inggris. Ketika beroleh jawaban bahwa ketiganya bisa berbahasa Inggris, tentara Jepang itu – dengan menggunakan Bahasa Inggris – memerintahkan mereka menuju kapal komando. Lima belas menit kemudian, ketiganya tiba di

²⁰ *Ibid.*, pp. 370-371.

depan kapal perang terbesar, dan Boesoirie menduganya sebagai kapal komando. Ketiganya lalu naik ke atas kapal dan berpesan kepada dua nelayan pengayuh perahu untuk menunggu mereka.

Setelah sepuluh menit berlalu sejak ketiganya tiba di atas kapal, seorang Jepang berpakaian sipil dengan topi helmet bertengger di kepalanya muncul. Ia adalah Mayor Fujiu Egawa,²¹ yang pernah tinggal di Ternate dan merupakan putera pemilik toko besar di Ternate sebelum Perang Dunia ke-2. Dengan agak arogan, Egawa bertanya kepada van der Groot tentang keberadaan Kapten Zondag dan Asisten Residen. Van der Groot menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya. Dengan geram Egawa berkata: “Kapten Zondag, Asisten Residen dan tentara serta orang-orang Belanda lainnya seharusnya sudah berada di dermaga. Serangan akan dilakukan karena kesalahan mereka, dan kalian tidak dapat menolaknya. Ayo bicara! Di mana mereka?” Sambil mengangkat bahu, van der Groot menjawab: “Benar-benar saya tidak tahu.” Mayor Egawa berlalu dan dengan pandangan merendahkan ia mengancam: “Dalam tempo satu jam semua orang Belanda sudah harus berada di dermaga, kalau tidak”

Nyonya van Diejen kemudian menyampaikan kepada Egawa bahwa Asisten Residen dan Kapten Zondag, berikut perempuan serta anak-anak Belanda, telah diangkut kapal Honun Maru dan tidak diketahui ke mana tujuannya. Egawa seolah-olah tidak percaya kepada penjelasan yang didengarnya. Ia meminta konfirmasi Boesoirie, yang membenarkannya. Tanpa banyak komentar Egawa memerintahkan ketiga orang itu meninggalkan kapal, setelah Kontrolir van der Groot secara resmi menyerahkan kota Ternate kepada Angkatan Laut Dai Nippon. Dengan demikian, Maluku Utara pun secara resmi beralih ke bawah kekuasaan Jepang.

Segera setelah menduduki dan mengambilalih kekuasaan Belanda di Ternate, Jepang membentuk sebuah pemerintahan militer. Kepala pemerintahan militer ini disebut *Minseibu*, yang untuk pertama kalinya dijabat oleh Noro San. Karena selalu mengenakan pakaian sipil, tidak diketahui secara jelas pangkatnya dalam ketentaraan. Paling tidak, Noro San adalah seorang perwira menengah Jepang.

Kepala pemerintahan setempat yang dahulunya disebut *Hoofd van Plaatselijk Bestuur* (HPB), masing-masing di Ternate, Weda, Jailolo, dan Tobelo serta selalu dijabat seorang Belanda, kini dipercayakan *Minseibu* kepada tenaga senior pribumi. Lembaga HPB itu sendiri dipimpin seorang *Gunco* yang membawahi kepala-kepala distrik yang disebut *Bungunco*. Selain itu, nama kepala kampung juga diganti dengan *Sonco*. Kecuali *Minseibu* dan Ketua Pengadilan yang dijabat oleh militer Jepang, *Gunco*, *Bungunco* dan *Sonco* semuanya dipercayakan kepada tenaga-tenaga Indonesia. Dinas-dinas yang telah ada sejak zaman Belanda berlanjut seperti biasa. Tetapi, karena situasi dan target Jepang memenangkan perang, dinas-dinas tersebut mandek dan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama antara 1944-1945.

Dalam dunia pendidikan, hampir semua sekolah dipimpin orang Indonesia, dan tentara Jepang hanya dikerahkan untuk mengajar Bahasa Jepang. Namun, karena wilayah Maluku Utara diliputi suasana perang dan serangan laut serta udara oleh Sekutu, lembaga pendidikan praktis mengalami kelumpuhan, terutama di daerah-daerah terpencil serta di daerah-daerah garis depan, seperti Halmahera Utara dan Tengah.

²¹ Egawa merupakan seorang pengusaha perkebunan kumis kucing di Kecamatan Kao. Menjelang Perang Pasifik, ia menghilang dari Ternate. Ternyata ia adalah mata-mata Jepang yang ditempatkan di Kao, dan perkebunan kumis kucingnya adalah sebuah kamufase dalam operasi intelijen. Setelah pendaratan Jepang, Kao menjadi pangkalan angkatan laut Jepang dan satu-satunya basis angkatan laut Jepang di wilayah Maluku Utara.

Suasana perang yang mewarnai Maluku Utara semenjak pendudukan Jepang mengakibatkan kegiatan ekonomi praktis terhenti. Perdagangan dengan Jawa dan daerah-daerah lainnya, seperti Sulawesi Selatan dan Manado, terputus. Produksi kopra, yang selama ini ditangani Coprafonds, ikut terhenti. Demikian pula, produk hasil hutan berupa damar dan rotan serta hasil laut, macet karena ketiadaan pembeli dan transportasi.

Ketika konsentrasi pasukan Jepang belum banyak, produksi pangan seperti beras, sagu dan jagung cukup melimpah. Rakyat tidak mengalami kesulitan dalam pengadaan pangan. Tetapi, dengan terhentinya perdagangan dengan pulau Jawa, kesulitan pangan dan sandang mulai terasa. Sehubungan dengan sandang, berbagai jenis bahan pakaian lenyap dari pasaran dan tidak bisa didapatkan lagi. Di berbagai tempat di Halmahera, kaum perempuan mulai mengenakan karung goni dan pelepah kayu yang disamak sebagai pengganti sarung. Sementara kaum lelaki menyamak kulit pohon melinjo untuk dijadikan celana dan pakaian. Pemerintah Militer Jepang, melalui Egawa Nojo, sebuah perusahaan swasta Jepang, memang menjual tekstil kasar untuk kaum perempuan, tetapi dalam jumlah yang terbatas dan sama sekali tidak mencukupi kebutuhan penduduk.

Demikian pula, sebuah pabrik ikan didirikan di Galela oleh perusahaan swasta Jepang TSK (Toindo Suisan Kabushiki Kaisya). Tetapi, produksinya melulu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan militer Jepang. Perusahaan ini hanya beroperasi hingga akhir 1943 dan kemudian ditutup, karena semua bangunan serta peralatan pabriknya hancur digempur bom-bom Sekutu.

Pada 1943, bala tentara Jepang mulai membangun fasilitas pertahanannya secara besar-besaran. Angkatan Laut Jepang membangun beberapa fasilitas pertahanannya di Kao. Antara 1942-1945, Kao menjadi markas besar angkatan laut Jepang untuk daerah Maluku. Di sini ditempatkan 62.000 pasukan angkatan laut dan sekitar 300 pesawat tempur. Lebih dari 100 perempuan muda asal Hongkong, Singapura dan Indonesia didatangkan ke sini sebagai wanita penghibur. Sebuah lapangan terbang dan fasilitas galangan kapal untuk perbaikan kapal-kapal perang Jepang juga dibangun di Kao. Sementara itu, Angkatan Darat Jepang membangun lapangan terbang di Wasilei, Miti dan Galela, menyusul di Morotai dan Bacan. Tetapi, seluruh superioritas laut dan udara Jepang ini rontok setelah Sekutu menduduki Morotai. Banyak kapal Jepang yang ditenggelamkan Sekutu di Kao. Beberapa bangkai kapal Jepang masih terlihat sekarang di perairan Kao sebagai saksi hidup Perang Dunia ke-2.²²

Untuk membangun berbagai fasilitas pertahanannya, Jepang mengerahkan rakyat secara paksa, tanpa gaji dan makanan yang cukup. Dalam pembangunan dua lapangan terbang di Galela, misalnya, selain rakyat setempat, Jepang juga mendatangkan pekerja paksa dari Morotai dan Loloda. Karena harus bekerja berat dengan jam kerja sepuluh jam perhari tanpa makanan yang cukup, rakyat pekerja paksa di Galela menderita berbagai jenis penyakit – terutama busung lapar – serta tertimpa berbagai kecelakaan lantaran perlindungan kerja yang minim. Wabah kolera berjangkit dan banyak meminta korban di kalangan pekerja paksa setiap harinya. Selain karena kolera, rakyat pekerja paksa banyak yang meninggal lantaran tidak sempat melarikan diri ketika terjadi serangan udara Sekutu. Keadaan seperti ini juga terjadi di Kao dan Wasilei.

Para pekerja paksa tidak dapat melarikan diri atau mencoba memberi alasan tidak bekerja. Mereka yang membangkan atau menolak bekerja tanpa alasan yang dapat diterima akan berhadapan dengan *Kenpetai* yang kejam. Salah satu korban keganasan militer Jepang adalah

²² Karl Muller, *Maluku (De Molukken)*; Berkeley-Singapore: Periplus Editions, 1996, p.123.

seorang guru dari pergerakan Muhammadiyah, Ustadz Syamsuddin Yusuf, asal Padang Panjang. Ia dituduh melakukan spionase untuk Sekutu dan dihukum pancung. Tetapi, tuduhan spionase ini hanyalah rekayasa. Sebenarnya, Ustadz Syamsuddin dipancung karena bisa berbahasa Inggris secara fasih dan lancar.

Pekerjaan pembangunan fasilitas tempur Jepang baru berakhir setelah pasukan Sekutu menduduki Morotai dan melakukan pemboman secara non-stop atas basis-basis pertahanan militer Jepang di Halmahera Utara dan Tengah. Seluruh lapangan terbang Jepang di kawasan ini dihancurkan, termasuk persediaan logistiknya.

Rakyat, yang sebelumnya dipekerjakan secara paksa, kini diperintah mengungsi ke hutan belantara dan gunung serta menggali parit perlindungan untuk menyelamatkan diri dari serangan udara Sekutu. Bahaya kelaparan dan wabah penyakit mulai menyebar. Seperti yang dapat diprediksikan, korban pun mulai berguguran. Ketika perang usai, rakyat di Galela, Kao dan Wasilei hanya tersisa separuh dari jumlah sebelum perang berkecamuk. Beberapa perkampungan bahkan hanya menyisakan 10 hingga 20 persen penduduknya.

Pendaratan Sekutu di Morotai

Pada 15 September 1944, tentara Sekutu mendarat di Morotai.²³ Sejak fajar menyingsing di ufuk timur, pantai di sekitar tempat pendaratan – Daruba, Gotalamo dan Dehegila – dihujani tembakan meriam kapal-kapal perang Sekutu hingga pukul sembilan pagi. Pasukan kemudian didaratkan di sepanjang pantai, dan pulau Morotai praktis dikuasai Sekutu pada hari itu juga.

Pulau Morotai dipertahankan Jepang dengan kekuatan dua batalion tentara, sebagian besarnya terdiri dari orang Taiwan, dan hanya para perwira yang berasal dari bangsa Jepang. Setelah menghadang pendaratan pasukan Sekutu dengan suatu pertempuran singkat, tentara Jepang mundur ke hutan dan pegunungan, serta melakukan gerilya dengan menyerang fasilitas militer Sekutu. Perang gerilya paling seru terjadi di Wayabula (Morotai Selatan), ketika tentara Sekutu diserang di pagi buta. Dalam pertempuran ini, korban berjatuhan di kedua pihak.

Salah satu tentara Jepang yang masuk ke hutan Morotai dan bersembunyi di sana adalah Sersan Nakamura. Ia masuk hutan sejak 1943 dan baru ditemukan pada 1973 oleh pejabat Kecamatan Morotai dan fungsionaris Kedutaan Jepang atas petunjuk rakyat. Nakamura dibujuk melalui pengeras suara. Lagu-lagu rakyat Jepang yang lazim dinyanyikan tentara Jepang dalam Perang Dunia ke-2, termasuk lagu kebangsaan Jepang, diperdengarkan lewat pengeras suara untuk membujuknya. Ketika ditemukan, Nakamura masih memiliki senapan organik yang masih berfungsi berikut lima butir peluru. Menurut keterangan penduduk lokal, disamping Nakamura, masih ada tiga tentara Jepang lain yang bersembunyi di hutan.²⁴

Pendaratan Morotai berarti dimulainya persiapan untuk menyerang Filipina. Bahkan, selain Filipina, Sulawesi dan Kalimantan Timur serta Jawa Timur dan Nusa Tenggara juga mengalami pemboman oleh pesawat-pesawat Sekutu yang berpangkalan di Morotai. Pilihan Morotai sebagai tempat pendaratan Sekutu di Maluku Utara didasarkan pada pertimbangan

²³ Brugmans, *Nederland Indie, Op.Cit.*, p.70.

²⁴ Muller, *Op.Cit.*, p.126.

bahwa dengan menjadikan Morotai sebagai basis militer Sekutu, akan memudahkan Amerika Serikat menyerbu dan merebut Filipina.

Tentara Sekutu yang didaratkan di Morotai terdiri dari dua divisi pasukan Australia – yakni Divisi ke-7 dan Divisi ke-9 – serta satu divisi pasukan Amerika Serikat, yakni Divisi Negro ke-93.²⁵ Australia kemudian menjadikan Morotai sebagai markas besarnya.

Panglima Tentara Sekutu, Jenderal Mac Arthur, juga ikut dalam pendaratan di Morotai. Ia mendirikan markasnya di pulau Sum-sum, sekitar satu setengah mil dari pantai Daruba. Jenderal Mac Arthur sendiri tidak lama berdiam di Morotai, sebab tugas utamanya adalah membebaskan Filipina serta menaklukkan Kepulauan Jepang untuk segera mengakhiri peperangan. Pada Oktober 1944, Mac Arthur bersama Laksamana Nimitz menuju Teluk Leyte di Filipina dan menyapu bersih pasukan Jepang yang ada di situ. Pada Januari 1945, seluruh Filipina menyerah kepada Mac Arthur. Setelah jatuhnya Filipina, semua kekuatan militer Amerika dikonsentrasikan untuk menduduki kepulauan Jepang.

Segera setelah penaklukan Morotai, angkatan udara Sekutu membangun tujuh landasan pesawat terbang, tiga di antaranya memiliki landasan pacu sepanjang tiga kilometer, dan sisanya memiliki landasan pacu sepanjang 2 kilometer.²⁶

Setelah kejatuhan Morotai ke tangan Sekutu, pulau ini dipadati tentara Sekutu dan puluhan ribu pengungsi yang berasal dari berbagai daerah di Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Halmahera Utara. Para pengungsi menyeberang ke Morotai untuk menyelamatkan diri, dan ditampung di pulau-pulau kecil di depan pantai Daruba dan di beberapa kawasan pemukiman, seperti di Sabatai, Daeo, dan sekitarnya. Dua tahun setelah perang usai, barulah para pengungsi itu kembali ke kampung halamannya.

Pendudukan Morotai oleh Sekutu memiliki makna sangat strategis. Sejak saat itu, konsentrasi pasukan Jepang di Halmahera Tengah dan Utara hampir setiap saat mengalami serangan udara dan tembakan kapal perang Sekutu. Hampir semua fasilitas militer Jepang seperti lapangan terbang, artileri dan logistik dihancurkan. Meriam-meriam anti pesawat dan penjaga pantai Jepang yang semula selalu bereaksi terhadap serangan, kini bungkam dan tidak terdengar lagi karena dihancurkan Sekutu.

Supremasi militer di seluruh Maluku Utara kini beralih ke tangan Sekutu. Tetapi, pendudukan Sekutu atas Morotai, yang memungkinkan pesawat Sekutu membombardir pusat-pusat pertahanan Jepang di Halmahera Utara dan Tengah, telah membawa malapetaka besar bagi rakyat di kedua wilayah itu. Kekurangan pangan yang melanda kawasan tersebut telah menyebabkan penyakit busung lapar merajalela, disamping berbagai penyakit menular lainnya seperti disentri dan malaria. Tiap hari banyak penduduk yang tewas, dan pengobatan sama sekali tidak dilakukan tentara Jepang. Keadaan ini diperparah lagi dengan serangan udara Sekutu hampir setiap harinya yang memaksa penduduk harus menyelamatkan diri ke dalam *lofra* (lubang perlindungan atau parit).

²⁵ Van der Wal, S.L., *Officiële Bescheiden betreffende de Nederland-Indonesische Betrekkingen 1945-1950*, vol. 1, (s'Gravenhage: Martinus Nyhoff, 1973), arsip 17-8-1945, p. 38. Lihat juga Phillip Darling, *Australia and Indonesian's Independence*. Canberra: Australian Government Publishing Service, 1994, pp. x ff.

²⁶ Dari ketujuh landasan pesawat peninggalan Sekutu di Morotai, Angkatan Udara Indonesia hanya menggunakan sebuah yang berlandasan pacu sepanjang tiga kilometer.

Pemerintah sipil praktis macet. Seluruh kekuasaan dijalankan oleh *Kenpetai*. *Bungunco* dan *Sonco* hanya menjadi instrumen *Kenpetai*, yang tidak segan menembak mati di tempat siapa saja yang tidak menjalankan perintahnya. *Kenpetai* sangat ditakuti rakyat karena terkenal kejam dan tidak berperikemanusiaan. Ketika Jepang mulai lemah dan menderita berbagai kekalahan, para *Kenpetai* diburu rakyat untuk membayar kekejian yang telah dilakukannya selama masa pendudukan. Pada 8 Maret 1945 di Medi, distrik Wasilei, Halmahera Tengah, misalnya, rakyat mengejar dan membunuh sejumlah anggota *Kenpetai*.²⁷ Tetapi, semua masyarakat yang terlibat pembunuhan ini dihukum pancung oleh Jepang. Setelah perang usai, banyak anggota *Kenpetai* yang dibunuh rakyat di berbagai daerah untuk membalas dendam.

Eksodus Sultan Ternate

Di penghujung September 1944, Sultan Ternate, Muhammad Jabir Syah, menerima sepucuk surat dari Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dr. H.J. van Mook. Isi surat itu mengabarkan bahwa Sultan Ternate dan keluarganya akan dievakuasi ke Morotai oleh satuan tentara Australia dan *Hulptroepen* – yakni “pembantu tentara” bentukan Belanda, yang terdiri dari para pemuda Maluku Utara. Pasukan ini akan menjemput dan membawa Sultan beserta keluarganya dengan perahu ke pulau Hiri, yang tidak memiliki detasemen tentara Jepang. Sebuah perahu motor berkecepatan tinggi akan membawa Sultan dan keluarganya dari Hiri ke Morotai.²⁸

Setelah menerima surat tersebut, Sultan mengutus seorang kurir menyampaikan sepucuk suratnya kepada dr. Chasan Boesoirie, Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara. Setelah berjalan kaki selama satu jam, Boesoirie tiba di tempat pengungsian Sultan. Kepada Boesoirie Sultan memperlihatkan surat van Mook yang menghimbau agar Sultan dan Boesoirie segera meninggalkan Ternate menuju Morotai.²⁹

Untuk mengamankan evakuasi yang direncanakan itu, pesawat-pesawat Sekutu akan membombardir kota Ternate antara pukul 08.00 sampai 10.00 dan antara pukul 16.00 sampai 18.00. Pada saat pemboman berlangsung itulah diharapkan Sultan Ternate dan Boesoirie beserta keluarganya dapat dijemput regu *Hulptroepen* untuk dibawa ke suatu tempat, dan dari sana mereka akan diseberangkan ke pulau Hiri, kemudian ke Morotai.

Setelah terjadi pembicaraan sejenak, Boesoirie menyatakan penolakannya atas ajakan eksodus itu. Ia memilih tetap tinggal di Ternate, karena rakyat sangat membutuhkan kehadirannya. “Saya menunggu dokter hingga jam 24.00 malam nanti,” ujar Sultan kepada Boesoirie.³⁰

Di tengah malam itu, satu regu *Hulptroepen* di bawah pimpinan Ali Mansur Amal tiba di tempat pengungsian Sultan. Tanpa banyak cakap, Sultan serta keluarganya dibawa menuju ke sebuah pantai. Keesokan harinya, ketika sejumlah pesawat Sekutu membombardir kota Ternate, Sultan dan keluarga diseberangkan ke Hiri, kemudian ke Morotai. Menjelang sore, Sultan dan

²⁷ Brugmans, *Nederland Indie, Op.Cit.* pp.79 f.

²⁸ van Frassen, *Ternate, Op.Cit.*, vol. 1, p.61.

²⁹ dr. Chasan Boesoirie, *Memoire*, (Bandung: tt.), p.7.

³⁰ *Ibid.*, p.8.

keluarganya tiba di Morotai. Dengan bantuan Komando Belanda di Morotai, pada 8 Oktober 1944, sebuah pesawat militer menerbangkan Sultan sekeluarga ke Australia.³¹

Evakuasi Sultan Ternate beserta keluarganya baru diketahui Jepang sehari setelah mereka tiba di Morotai. Berita yang sampai ke telinga Jepang juga mengungkapkan bahwa Boesoerie dan keluarganya telah menyertai Sultan ke Morotai. Karena itu, Boesoerie merasa perlu mengklarifikasi ketidaksertaannya dalam rombongan eksodus Sultan Ternate kepada penguasa Jepang di Ternate.³²

Kemunduran Jepang dan Berakhirnya Perang Pasifik

Sejak Februari 1944, militer Jepang mulai mengalami kemunduran di hampir semua front pertempuran. Pasukan Sekutu berhasil mengusir mereka dari kepulauan Marshall, Saipan (Kepulauan Mariana), dan Kepulauan Solomon di Pasifik. Pada 15 September tahun yang sama, Morotai dan Pelau secara bersamaan jatuh ke tangan Sekutu. Sebulan berikutnya (Oktober 1944), armada Jepang disapu bersih di teluk Leyte. Sementara pesawat-pesawat pembom jarak jauh Sekutu mulai menghantam posisi militer Jepang di Tarakan, Banjarmasin, Brunai dan Filipina.

Pada 24 Nopember 1944, Sekutu melakukan serangan udara pertama atas ibukota Jepang, Tokyo, dilakukan pesawat pembom jarak jauh yang berpangkalan di Saipan.³³ Pada 1 Februari 1945, pasukan Amerika Serikat menuju Manila, setelah berhasil menaklukkan Mindanao di Filipina Selatan lewat pertempuran 13-15 Desember 1944. Kota Manila dapat diduduki pada 24 Februari 1945, setelah pertempuran sengit selama empat hari. Hampir seluruh Filipina kembali dikuasai Amerika. Dengan demikian, sumpah Jenderal Mac Arthur sewaktu mengundurkan diri dari Filipina: "saya akan kembali" (*I shall return*), telah terlaksana. Beberapa pulau lainnya di negeri ini baru dibebaskan beberapa saat kemudian: Davao pada 4 April 1945, dan Sulu pada 4 Mei. Pada 5 Juli, seluruh wilayah Filipina benar-benar berada di bawah kendali Amerika.³⁴

Pada 19 Februari 1945, pasukan angkatan laut dan marinir Amerika pimpinan Laksamana Nimitz berhasil mendarat di pulau Iwojima, terletak sekitar 700 mil dari Tokyo. Iwojima, yang merupakan gerbang menuju Jepang, dipertahankan sangat kuat. Dalam perang memperebutkannya, hampir 30.000 tentara tewas di kedua pihak. Baru pada 15 Maret, seluruh pulau itu dapat dikuasai sepenuhnya oleh Amerika. Pada 9 Maret 1945, serangan gencar dilakukan Amerika atas ibukota Tokyo dan daerah-daerah lainnya di Jepang.

Sementara itu, pada 25 April 1945, Sekutu melakukan serangan udara atas Surabaya, Balikpapan, Tarakan dan Makassar. Serangan ini dilakukan oleh pesawat-pesawat yang berpangkalan di Morotai. Dari pangkalan di pulau ini pula, pesawat-pesawat Sekutu menyerang Singapura. Serangan udara sejenis kemudian dilakukan secara gencar, diikuti dengan pendaratan pasukan Sekutu. Pada 1 Mei 1945, unsur-unsur Divisi 9 Australia mendarat dan merebut Tarakan. Dalam pendaratan ini, Belanda memboncengkan sebuah detasemen NICA (*Netherland Indies Civil Administration*). Sebagian personil Divisi 7 Australia kemudian mendarat dalam bulan Juli di Banjarmasin dan Balikpapan. Di penghujung perang, lebih dari 50.000 tentara Australia telah

³¹ Brugmans, *Nederland Indie, Op.Cit.*, p.71.

³² Boesoerie, *Op.Cit.*

³³ Brugmans, *Nederland Indie, Op.Cit.*, pp.73 f.

³⁴ *Ibid.*, p.85.

berada di bagian timur Indonesia dan Kalimantan. Ketika Jepang bertekuk lutut, tentara Australia dengan cepat bergerak melakukan kontrol atas pasukan Jepang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia Timur dan Kalimantan, kemudian merepatriasikan mereka.

Dalam kaitannya dengan tugas-tugas tersebut, pada penghujung 1945 pasukan Australia menduduki Timor Kupang (11 September), Makassar (21 September), Ambon (22 September), Manado (2 Oktober), dan Pontianak (16 Oktober). Seluruh tentara Australia baru meninggalkan Indonesia Timur dan Kalimantan pada awal Februari 1946, setelah Belanda memapankan kembali kekuasaannya atas Indonesia.³⁵

Sebelumnya, pada 16 Juli 1945, Amerika melakukan percobaan peledakan bom atom di negara bagian New Mexico.³⁶ Pada 6 Agustus 1945, sebuah pesawat pembom jarak jauh B-29 yang membawa bom atom lepas landas dari pulau Tinian di kepulauan Mariana. Bom itu kemudian dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang Selatan, yang menewaskan sedikitnya 78.000 jiwa dan melukai lebih dari 70.000 orang. Dua hari kemudian, 8 Agustus, bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki dengan akibat yang sama dahsyatnya, dan pada 14 Agustus 1945 Sekutu menuntut Jepang menyerah tanpa syarat.

Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito, mengumumkan sendiri penyerahan Jepang melalui radio. Ia juga memerintahkan seluruh tentara Dai Nippon menghentikan pertempuran, sementara Jepang dan Amerika merundingkan serta menyepakati penyerahan tanpa syarat Jepang.³⁷ Kapitulasi Jepang terhadap Amerika secara resmi baru ditandatangani pada 2 September 1945 di atas kapal Missouri di Teluk Tokyo. Untuk sosialisasi kapitulasi itu, pesawat-pesawat Sekutu menyebarkan selebaran yang tertulis dalam bahasa Jepang dan Inggris di seluruh kota tempat tentara Jepang dikonsentrasikan.

Pelucutan Senjata dan Penyerahan Kekuasaan Jepang

Segera setelah Jepang menyerah, markas besar pasukan Sekutu di Morotai mengeluarkan perintah pelucutan senjata tentara Jepang. Mereka harus memusnahkan sendiri seluruh peralatan militernya, dan dengan tidak bersenjata semua pasukan Jepang di Maluku Utara – termasuk para Heiho – berkumpul di Kao, menunggu kapal yang akan memulangkan mereka ke negeri asalnya. Beberapa perwira Jepang dan oknum *Kenpetai*, yang dipandang sebagai penjahat perang, dibawa Sekutu ke Morotai. Tetapi, nasib mereka tidak diketahui dengan pasti. Untuk memusnahkan peralatan militernya, Jepang membutuhkan waktu satu bulan. Selain dirusak, banyak senjata berat dan senapan ditenggelamkan ke laut atau dibenamkan ke dasar danau Galela.

Dalam sebuah telegramnya kepada Menteri Urusan Daerah Seberang Belanda, Prof. Lagemann, Letnan Gubernur Jenderal van Mook menyatakan bahwa normalisasi di kawasan Indonesia Timur perlu segera dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada militer agar keamanan dan ketertiban dapat segera dipulihkan, sebab di kawasan tersebut

³⁵ Phillip Darling, *Op.Cit.*, pp. xi f.

³⁶ Brugmans, *Nederland Indie, Op.Cit.*, p.87.

³⁷ *Ibid.*

terdapat sekitar 170.000 tentara Jepang. Di teluk Kao, misalnya, konsentrasi pasukan Jepang berjumlah 39.800 tentara.³⁸ Australia kemudian didesak untuk melucutinya.

Menurut van Mook, adalah sangat berbahaya bila pasukan Australia tidak dikonsentrasikan di daerah tersebut. Saat ini, lanjut van Mook, pasukan Australia terkonsentrasikan di Tarakan, Balikpapan, Anam, Morotai, Makassar dan Kupang. Dari kota-kota inilah kunjungan sporadis dilakukan ke daerah konsentrasi pasukan Jepang.³⁹ Karena pasukan Jepang yang dikonsentrasikan di Kao demikian banyak, sampai Januari 1946 baru sekitar 10.000 tentara yang dapat dipulangkan. Sisanya, sekitar 29.800 tentara, belum terangkut.

Sementara itu, dalam laporannya kepada penguasa tentara Australia di Morotai, Komandan Tentara Jepang di Kao menyatakan bahwa pada 9 Januari 1946 tujuh perusuh Indonesia, termasuk orang-orang bekas Heiho, yang bersenjatakan tiga senapan mesin telah menyerang tentara Jepang. Karena itu, Komandan Tentara Jepang meminta kepada markas tentara Australia di Morotai agar mengizinkan mereka menggunakan senjata menghadapi para penyerang itu. Kolonel Giebel dari tentara NICA berjanji segera mengirimkan satu peleton tentara KNIL dari Galela atau Tobelo ke Kao untuk melindungi tentara Jepang yang tidak bersenjata.⁴⁰

Untuk mencegah terulangnya insiden semacam itu, Komandan Pasukan Australia di Morotai memerintahkan 3.100 orang bekas Heiho yang ada di Kao dipindahkan ke Galela. Evakuasi mulai dilakukan pada 16 Februari 1946. Para bekas Heiho ini mayoritasnya terdiri dari pemuda-pemuda Jawa dan Sumatera, bahkan di antaranya terdapat mantan serdadu KNIL yang berpangkat bintang.

Karena telah jelas aliran politik sebagai orang-orang pro-Republik dan untuk memudahkan pengawasan atas para mantan Heiho, satu peleton KNIL ditempatkan di Galela. Para mantan Heiho itu memiliki Kepala Distrik tersendiri. Pemerintah menunjuk Abdul Rakib Jafaar, seorang pegawai Pekerjaan Umum, memegang jabatan Kepala Distrik dan Sugiri, seorang mantan sersan KNIL, sebagai Komandan kampnya. Barak-barak dan lokasi pemukiman mereka terletak di sekitar Danau Makete dan Kapupu, terpisah dari pemukiman penduduk lokal.

Setelah kekalahan Jepang, pada 25 Agustus 1945, *Minseibu* melakukan pertemuan dengan seluruh aparat pemerintahan Ternate dan Tidore, termasuk para kepala kampung dari kedua pulau itu. Setelah pertemuan dibuka, *Minseibu* mengucapkan pidato singkat: "Tuan-tuan, perang telah selesai dan kami harus pergi. Tuan-tuan harus memilih seorang kepala daerah yang akan menggantikan kami."⁴¹

Mendengar pidato singkat itu banyak peserta pertemuan bengong, karena belum mengetahui bahwa perang telah usai dan Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Setelah itu, *Minseibu* meminta kepada peserta pertemuan mengajukan calon kepala daerah yang akan menerima pimpinan kekuasaan pemerintahan dari Jepang. Pertemuan tersebut mengusulkan tiga nama calon: Arnold Mononutu, Raden Slamet, dan dr. Chasan Boesoerie. Mayoritas peserta pertemuan akhirnya memberikan suara mereka kepada Boesoerie, dan ia dikukuhkan sebagai

³⁸ S.L. van der Wal, *Officiele Bescheiden*, *Op.Cit.*, vol. 2, p. 208, arsip 29 Nop. 1945.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.* vol. 3, arsip 1-1 sampai 30-3-1946.

⁴¹ Boesoerie, *Op.Cit.*, p.9.

Pejabat Sementara Kepala Daerah Maluku Utara yang akan menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Jepang.

Pada September 1945, dua korvet Australia membawa pulang Sultan Ternate, Muhammad Jabir Syah. Ketika merapat di dermaga Ternate, Sultan turun dikawal beberapa serdadu Australia dan diiringi sejumlah perwira NICA.⁴² Selama di Australia, Sultan telah menjalin kontak yang intens dengan Pemerintah Hindia Belanda dalam pengasingan yang dipimpin van Mook. Hasilnya, Maluku Utara kembali memperoleh status keresidenan dan Sultan sendiri diangkat sebagai residennya.

Jabatan Kepala Daerah sementara kemudian diserahkan Boesoirie kepada Sultan. Dengan pengangkatannya sebagai Residen yang membawahi dua *afdeling* – *Afdeling* Noord Molukken dan *Afdeling* Tidore – Sultan mulai menjalankan roda pemerintahan sipil. Morotai yang sebelumnya hanya merupakan distrik, kini ditingkatkan statusnya menjadi HPB (*Hoofd van Plaatselijk Bestuur*), selama Sekutu masih berada di sana. Selain Morotai, Bacan dan Tidore memperoleh status yang sama. Status keswaprajaan ini kemudian ditingkatkan menjadi *afdeling* dan merupakan salah satu bagian di bawah Keresidenan Maluku Utara.

⁴² *Ibid.*, p.10. Van Fraassen . *Ternate, Op.Cit.*, p. 61, sehubungan dengan kepulangan Sultan ke Ternate, menulis: "Na de capitulatie van de Japanners in August 1945 keerde de Sultan naar Ternate terug, met der rang van luitenant-kolonel titulair bij het KNIL" (Setelah penyerahan orang-orang Jepang dalam bulan Agustus 1945 Sultan kembali ke Ternate dengan pangkat Letnan Kolonel titilir KNIL). Boesoirie juga mengatakan pangkat itu disandang Sultan ketika kembali. Lihat Boesoirie, *ibid.*, p. 9.

BAB 17

Maluku Utara di Masa Revolusi Kemerdekaan

Menuju Kemerdekaan Indonesia

Selama Pendudukan Jepang yang relatif singkat, para pemimpin bangsa Indonesia di bawah Bung Karno dan Bung Hatta berhasil meyakinkan Pemerintah Pendudukan tentang cita-cita kemerdekaan Indonesia. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut, bangsa ini dapat bekerjasama atau bersikap kooperatif selama Jepang dapat memahami dan menghargainya.

Karena seluruh konsentrasi dan pemikiran Jepang terfokus pada upaya memenangkan perang, pendekatan para pemimpin Indonesia tentang cita-cita kemerdekaan itu disambut sepintas lalu oleh Jepang. Tetapi, ketika Jepang mulai mengalami kemunduran militer di hampir semua front pertempuran, pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengobral janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kapan janji ini akan ditunaikan, tidak pernah ditentukan olehnya.¹

Dengan makin terpuruknya posisi militer Jepang, pemerintah militernya di Indonesia harus memberi makna kepada janji kemerdekaan yang diobralkan Koiso. Jepang sadar bahwa di suatu masa kelak mereka akan kehilangan kekuasaan di Nusantara. Karena itu, pada 1 Maret 1945, pihak Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI, Dokuritsu Tsyunbi Cosakai).²

Dalam bulan Mei 1945, BPUPKI bersidang untuk pertama kalinya di gedung *Volksraad*, Jakarta. Keanggotaan BPUPKI terdiri dari wakil semua aliran dan golongan bangsa Indonesia. Dokter Rajiman Wediodiningrat dipilih sebagai ketua, dengan anggota-anggota: Soekarno, Hatta, K.H. Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Latuharhary, dan lain-lain. Pembentukan BPUPKI merupakan langkah konkret pertama yang dilakukan Jepang dalam merespon cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu, situasi perang semakin tidak menguntungkan Jepang, dan negeri ini hanya menunggu waktu untuk bertekuk lutut. Karena itu, pada 7 Juli 1945, Kabinet Jepang menyetujui rencana pemberian kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu singkat. Untuk itu, menurut Pemerintah Jepang, harus ada sebuah badan yang mempersiapkan dan mengumumkan kemerdekaan tersebut. Prakarsa pembentukan badan itu diserahkan kepada bangsa Indonesia sendiri.

¹ Ricklefs, *Op.Cit.*, p.310.

² Marwati-Nugroho, *Op.Cit.*, vol. 6, pp. 67 f.

Pada 21 Juli 1945, Kabinet Jepang menyetujui semua rencana yang disusun BPUPKI. Jenderal Sushiro Itagaki menyelenggarakan sebuah konferensi pers di Tokyo—yang dihadiri kepala-kepala staf pasukan Jepang—dan mengemukakan rencana kemerdekaan Indonesia. Sebuah jadwal kerja disusun dan waktu untuk kemerdekaan “seluruh Indonesia” ditetapkan dalam tahun 1946.

Sehubungan dengan rencana tersebut, semua jabatan puncak sipil di bidang ekonomi, keuangan, industri dan lalu lintas ditetapkan harus dipegang tenaga Indonesia. Sebuah panitia Jepang yang dipimpin Itagaki dibentuk dengan tugas mendampingi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam kenyataannya, panitia Itagaki sama sekali tidak berfungsi, karena ditolak pihak Indonesia.³ Perdana Menteri Kaiso sendiri meletakkan jabatannya pada Juli 1945 dan diganti oleh Laksamana Suzuki Kantaro.⁴

Pada 5 Agustus 1945, BPUPKI merampungkan tugas menyusun undang-undang dasar, dan pada 6 Agustus tahun yang sama, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) – lengkap dengan susunan pengurusnya – dibentuk di Jakarta. Panitia yang didukung semua daerah di Indonesia ini direncanakan bersidang pada 19 Agustus.⁵

Pada 7 Agustus, Marsekal Terauchi yang menjabat Panglima Tertinggi Tentara Jepang di Asia Tenggara yang bermarkas di Saigon menugaskan para penguasa Jepang di Jawa membentuk sebuah panitia kemerdekaan Indonesia. Tetapi, instruksi ini terlambat karena sehari sebelumnya PPKI telah dibentuk para pemimpin Indonesia.

Laksamana Terauchi mendapat perintah dari Tokyo untuk melicinkan jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Karena itu, pada 9 Agustus 1945, ia mengundang tiga pemimpin bangsa Indonesia – Bung Karno, Bung Hatta dan Rajiman – ke markas besarnya di Dalat, sekitar 300 kilometer dari Saigon. Undangan tersebut dimaksudkan untuk membahas keputusan Tokyo tentang kemerdekaan seluruh Indonesia. Perundingan di Dalat berlangsung hingga 13 Agustus, dan pada 14 Agustus, ketiga pemimpin Indonesia itu tiba kembali di Jakarta.⁶

Pada 15 Agustus, jam 12.00 waktu Tokyo, Kaisar Tenno Heika mengumumkan penyerahan tanpa syarat Jepang kepada Sekutu. Sejak pengumuman ini, secara yuridis formal, kekuasaan Jepang atas Indonesia telah berakhir, dan Komando Asia Timur pasukan Sekutu pimpinan Mountbatten akan mengambil-alihnya. Sejak pengumuman itu pula, semua aktivitas dan prakarsa Jepang untuk kemerdekaan Indonesia ikut terhenti secara total.

Dengan demikian, antara 15-17 Agustus 1945 terjadi kekosongan kekuasaan. Menurut ketentuan Sekutu yang telah memenangkan Perang Pasifik, Komando Asia Selatan (SEAC, *South East Asia Command*) pimpinan Laksamana Mountbatten akan mengambil-alih kekuasaan Jepang.⁷ Tetapi, Inggris sendiri berkesimpulan bahwa, selain terlambat, ia tidak mungkin

³ Brugmans, *Nederland Indie, Op.Cit.*

⁴ Ricklefs, p.314.

⁵ *Ibid.*

⁶ Brugmans, *Nederland Indie, Op.Cit.* p.87 f.

⁷ Komando SEAC (South East Asia Command) dibentuk berdasarkan hasil perundingan antara Perdana Menteri Inggris, Churchill, dan Presiden Amerika Serikat, Roosevelt, pada Agustus 1943 di Quebec, Kanada. Sebagai Panglima SEAC, di bawah Inggris, ditunjuk Laksamana Mountbatten. Perundingan tersebut juga menghasilkan pembentukan Komando SWPA (South West Pacific Area), di bawah Amerika. Jenderal Mac Arthur ditunjuk sebagai Panglima SWPA. Lihat S.L. van der Wal, *Officiele Bescheiden, Op.Cit.*, vol. 1, p.1, catatan no. 3.

menguasai seluruh Indonesia. Karena itu, pada 10 September 1945, Inggris menyerahkan kekuasaan atas Indonesia Timur dan Kalimantan kepada komando pasukan Australia yang bermarkas di Morotai—ketika itu Australia telah menduduki hampir seluruh wilayah kawasan timur Indonesia. Tanggung jawab Inggris, dengan begitu, hanya meliputi Jawa dan Sumatera.⁸

Sementara itu, kelompok pemuda yang dimotori Chaerul Saleh, Anwar, Harsono Cokroaminoto, dan lainnya, baru saja menyelesaikan Kongres Pemuda di Jakarta. Mereka sangat anti Jepang serta berupaya memaksa Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.⁹ Mereka tidak menghendaki pengaitan kemerdekaan Indonesia kepada Jepang. Ketika kelompok pemuda tersebut mendesak, Bung Hatta mengemukakan kepada mereka:

Bahwa soal kemerdekaan Indonesia, apakah ia datang dari Pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri, tidaklah menjadi soal, karena Jepang tokh sudah berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi.¹⁰

Pada pagi hari 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta tidak berada di Jakarta. Malam hari sebelumnya, kedua pemimpin bangsa itu dibawa ke Rengasdengklok oleh pimpinan para pemuda dengan alasan *untuk memberikan perlindungan bila terjadi pemberontakan*. Tetapi, Bung Karno dan Bung Hatta mengaku para pemuda itu memaksa mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di luar rencana yang ditetapkan Jepang.

Mr. Achmad Subardjo, setelah berunding dengan para pemuda, menjemput dan membawa kedua pemimpin bangsa itu kembali ke Jakarta. Bung Karno dan Bung Hatta meyakinkan para pemuda bahwa keduanya dapat mengatur hingga Jepang tidak akan menghiraukan jika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

Malam 16 Agustus itu juga, kedua pemimpin bangsa ini semalam suntuk merancang proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Maeda. Bung Karno sendiri menulis teks proklamasi dengan bahasa yang sederhana. Keesokan paginya, jumat 17 Agustus 1945, tepat pukul 10.30, teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan Bung Karno di halaman rumah di jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, dihadiri sejumlah tokoh PPKI dan masyarakat. Usai pembacaan teks proklamasi, Abdul Latif Hendraningrat, seorang perwira PETA (Pembela Tanah Air), mengibarkan Bendera Merah Putih, diiringi lagu Indonesia Raya. Dengan demikian, telah lahir Negara Republik Indonesia (RI) dan bangsa Indonesia yang merdeka.

Sementara itu, tentara Sekutu yang bertugas melucuti persenjataan tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negeri asalnya, begitu mendengar proklamasi kemerdekaan Indonesia, dengan tergesa-gesa datang ke Indonesia. Selain mengemban kedua tugas ini, mereka juga berupaya mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia.

Sekalipun Pemerintah Belanda dalam pengasingan di London, lewat keputusan Ratu Wilhelmina no. 42 tertanggal 9 Maret 1945, telah mengangkat secara definitif Dr. H.J. van Mook

⁸ De Jong, *Diplomatie of Strijd, Nederland Beleid tegenover de Indonesische Revolutie*. Amsterdam: Boom Meppel, 1988, p.21.

⁹ Marwati, *Op.Cit.*, p.77.

¹⁰ *Ibid.*, p.79 f.

sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda,¹¹ tetapi Pemerintahan van Mook di Australia baru mendengar proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 19 Agustus, melalui berita radio.¹²

Bangsa Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, dengan demikian, harus menyiapkan diri menghadapi upaya kembalinya kekuasaan kolonial Belanda. Sebuah revolusi besar jelas menanti di hadapan bangsa ini. Bung Hatta benar ketika mengatakan kepada para pemuda yang membawa atau “menculiknya” ke Rengasdengklok: “Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi....”

Upaya “Come Back” Belanda

Pada 10 Desember 1944, pimpinan SWPA (*South West Pacific Area*, Komando Sekutu untuk kawasan Pasifik Barat Daya), Jenderal Douglas Mac Arthur, dan Letnan Gubernur Jendral H.J. van Mook menandatangani *civil Affairs Agreement*. Isi kesepakatan ini menetapkan bahwa pelaksanaan pemerintahan sipil dan peradilan atas seluruh wilayah Hindia Belanda yang masuk ke dalam kewenangan Komando SWPA akan diserahkan kepada Nederland Indie.¹³

Suatu perjanjian serupa ditandatangani pada 17 Agustus 1945 di London, antara Menteri Luar Negeri Belanda, van Kleffens, dan Perdana Menteri Inggris, Atlee, serta Menteri Luar Negeri Inggris, Bevin. Kesepakatan yang dicapai dalam perjanjian ini, antara lain, adalah:

1. Pemerintah Belanda akan mengambil-alih organisasi dan pemerintahan atas Hindia Belanda, antara daerah yang akan dikuasai SEAC – Jawa dan Sumatera – serta daerah sisanya yang dikuasai Australia.
2. Prioritas utama diberikan kepada pulau Jawa, berdasarkan esensi yang dapat ditinjau dari semua segi.
3. Jakarta harus segera diduduki, personil administrasi NICA akan segera dikirim. Demikian pula, sejumlah tentara untuk daerah SEAC harus segera diberangkatkan.¹⁴

Atas dasar perjanjian-perjanjian inilah Belanda membentuk NICA yang akan beroperasi di wilayah Indonesia. Sementara van Mook telah melengkapi kabinetnya untuk menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Kabinet ini terdiri dari van der Plas (urusan dalam negeri), Blom (kehakiman), Warners (lalu-lintas dan pengairan), dan Ma'mun Soemadilaga (pds kesehatan), sebagai direktur departemen.

Pada 24 Agustus 1945, Pemerintah Nederland Indie di Brisbane, Australia, membuat perjanjian dengan pihak Sekutu yang mengizinkan Belanda untuk menjalankan kekuasaan sipil di Indonesia, sekalipun kekuasaan tertinggi di Indonesia berada dalam tanggung jawab pasukan Sekutu untuk kawasan Asia Selatan di bawah komando Inggris yang bermarkas di Singapura.

Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan, Van Mook masih berada di Australia. Ia didampingi tenaga-tenaga sipil dan militer, seperti van der Plas (mantan Gubernur Jawa Timur), Kolonel Abdul Kadir Wijoyoatmojo, Kolonel Simon Spoor (kelak menjabat

¹¹ Brugmans, *Nederland Indie, Op.Cit.*

¹² Groen, *Op.Cit.*, p.22.

¹³ Van Mook, H.J., *Indonesie, Nederland en de Wereld*, (Amsterdam, 1949), p. 57, dikutip dalam van der Wal, *Op.Cit.*, vol. 1, p. 3, catatan kaki no. 2.

¹⁴ *Ibid.*, pp. 41 ff.

Panglima KNIL), Graaf van Bijland, serta lainnya. Setelah mendengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, van Mook mengirim telegram kepada Menteri Urusan Daerah Seberang, Prof. Logemann, yang antara lain berbunyi:

Menunjuk berita sangat rahasia yang telah saya kirimkan kepada Anda dan Pemerintah Australia, rencana pendudukan beberapa wilayah Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda akan dilakukan sebagai berikut: Jawa dan Sumatera oleh Komando Asia Selatan. Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku akan ditunjuk Australia, karena pasukan Australia terdapat di daerah-daerah tersebut. Halmahera dan Sulawesi akan dibantu Amerika Serikat, karena Amerika mempunyai satu Divisi Negro 93 yang ditempatkan di Morotai.¹⁵

Telegram van Mook di atas mengungkapkan fakta bahwa kembalinya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia dilakukan dengan membonceng Komando Asia Selatan Sekutu untuk daerah Jawa dan Sumatera, Divisi Negro 93 Amerika Serikat di Morotai untuk Halmahera dan Sulawesi, serta dua divisi Australia yang bermarkas di Morotai untuk daerah Indonesia Timur lainnya. Tetapi, usul van Mook tentang pendudukan itu ditolak Amerika maupun SWPA. Van Mook beserta stafnya baru kembali ke Indonesia, yakni ke Jakarta, pada Oktober 1945.

Van Mook juga mengusulkan kepada Pemerintah Belanda di Den Haag mengirim tentara KL (*Koninklijk Leger*, Tentara Kerajaan Belanda) ke Indonesia dalam rangka menghadapi situasi militer di Jawa dan Sumatera. Usul ini disetujui Pemerintah Belanda, dan sebagian pasukannya yang berada di bawah komando Sekutu di Eropa dipindahkan ke Indonesia. Pemerintah Belanda menjalin kontak dengan markas besar Sekutu tentang rencana kepindahan tersebut, dan Sekutu menyetujui melepaskan sebagian pasukannya yang berasal dari Belanda untuk diperbantukan kepada SEAC.

Namun, masalah transportasi kemudian menjadi kendala. Dengan bantuan Inggris, rombongan pertama pasukan Belanda itu bertolak ke Indonesia pada 22 Agustus 1945, dan tiba pada awal September. Sisa pasukan menyusul pada 1 Nopember. Kabinet Belanda menginstruksikan Kolonel Doorman yang diperbantukan pada Kepala Staf SEAC, Jenderal Kimnis, agar membantu pasukan Belanda yang tengah menuju ke pulau Jawa.¹⁶

Belakangan, ketika situasi Indonesia semakin mencemaskan, Pemerintah Belanda di Den Haag mengirim lagi sejumlah tentara ke Indonesia pada awal 1946. Sepanjang tahun ini, sejumlah 100.000 serdadu KL tiba di Indonesia. Tetapi, orang Belanda yang pro-RI mencela keras kebijakan pengiriman tentara itu.¹⁷

Sewaktu Sekutu mendarat di Morotai, 15 September 1944, Belanda ikut menempatkan markas besar militernya yang berkekuatan dua batalion – yakni batalion 153 dan batalion 154. Setelah Agustus 1945, Belanda merekrut pasukan tambahan, dan pimpinan militer Belanda melakukan dislokasi pasukan KNIL: empat kompi di Balikpapan, satu kompi di Pontianak, satu kompi di Banjarmasin, empat kompi di Makassar, empat kompi di Ambon, tiga kompi di Kupang, dan 3 kompi di Manado. Di Papua ditempatkan kompi 171 KNIL sebagai bagian dari Batalion Papua. Staf Perwira Penghubung pada Markas Besar KNIL di Morotai ini baru dipindahkan ke Makassar pada 20 Januari 1946.

¹⁵ S.L. van der Wal, *Officiële Bescheiden*, *Op.cit.*, vol. 1, arsip 10 Agustus - 8 Nopember 1945, pp. 43, 53 f.

¹⁶ De Jong, *Op.Cit.*, pp.61 ff.

¹⁷ Pierre Heijboer, *De politionele acties: De strijd om Indie 1945-1949*. Haarlem: Tibula van Dishoeck, 1979, p. 20.

Hal pertama yang memusingkan Belanda setelah kembali ke Indonesia adalah masalah moneter. Di semua wilayah Nusantara uang Jepang harus ditarik dan dikonversi ke mata uang NICA, yakni satu rupiah Jepang dengan tiga sen mata uang NICA. Belanda menetapkan penukaran uang berakhir pada Desember 1945. Menurut data yang dikumpulkan pimpinan militer Australia, hingga pertengahan Agustus 1945, uang Jepang – dihitung menurut kurs konversi uang NICA – yang beredar dan berhasil disita di Halmahera, Sulawesi, Ambon, Seram dan Nusa Tenggara, seluruhnya berjumlah f. 267.821.000.¹⁸

Maluku Utara Pasca Proklamasi Kemerdekaan

Sejak mendaratnya tentara Jepang di Ternate dan daerah lainnya di Maluku Utara, penduduk dilarang mendengar siaran radio, terutama siaran luar negeri. Chasan Boesoirie dalam *Memoir*-nya menulis bahwa baru pada awal September 1945, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diketahui penduduk kota Ternate dan daerah lainnya di Maluku Utara.

Berbeda dengan Ternate, penduduk Morotai telah mengetahui proklamasi kemerdekaan Indonesia selang beberapa hari setelah diumumkan, karena fasilitas komunikasi dan radio militer Sekutu. Di Galela, berita proklamasi diketahui rakyat karena diberitahukan militer Jepang. Demikian pula, melalui para pengungsi yang kembali dari Morotai ke daerah asalnya, berita proklamasi menyebar ke seluruh wilayah Halmahera Utara, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Siaran Radio Republik Indonesia (RRI) mulai terdengar dan rakyat dengan tekun mengikutinya. Bahkan, Radio Bung Tomo juga ditangkap di Ternate dan Morotai, setelah beberapa teknisi merekayasa penerimaan radio mereka.

Karena situasi telah jelas, beberapa pemimpin lokal, seperti Arnold Mononutu, M.A. Kamaruddin, Chasan Boesoirie, M.S. Jahir, M. Arsyad Hanafi, Abubakar Bachmid, dan tokoh pemuda Abjan Soleman, mulai mendiskusikan bagaimana rakyat Maluku Utara mengantisipasi dan menindaklanjuti proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini mesti dilakukan sehubungan dengan kenyataan bahwa di seluruh Maluku Utara Belanda secara pasti mulai mengembalikan kekuasaannya.

Dalam bulan Nopember 1945, Sultan Ternate, Jabir Syah, secara pribadi mengadakan suatu pembicaraan dengan Mononutu dan Boesoirie di istana Kesultanan Ternate. Pembicaraan tersebut berkaitan dengan langkah-langkah politik konkret yang mesti dilakukan pada saat itu. Jabir Syah menganjurkan kedua tokoh itu membentuk sebuah partai politik bercorak *rijks Verband*, dapat bekerjasama dengan pemerintah. Tetapi, Mononutu dan Boesoirie tidak memberi reaksi atas anjuran Jabir Syah.¹⁹ Setelah pertemuan tersebut terbentuklah sebuah partai politik yang diberi nama PERSATUAN INDONESIA disingkat PI, dengan dukungan orang-orang royalis. Sebagai Ketuanya ditunjuk Muhammad Nasir Syah saudara Sultan Jabir Syah, dan sejumlah pengurusnya terdiri dari: M.Ali Kamaruddin, Abdullah Badie, Abdullah Baay, Pusung, Dano Syafei, Raden Slamet, Luth Hi. Ibrahim, Hasan Ayanhar, dan Hutubesi. Sebagai Penasehat ditunjuk dr. Chasan Boesoerie dan Arnold Mononutu.

¹⁸ S.L. van der Wal, *Officiele Bescheiden, Op.Cit.*, vol. 1, pp. 43, 53 f.

¹⁹ Boesoirie, *Op.Cit.*

Banyak pemuda-pemuda tidak mendukung PI tersebut karena menganut azas *rijks Verband*, karena mereka khawatir bahwa partai ini akan mengabdikan kepada kepentingan Belanda, dan menentang proklamasi kemerdekaan.

Pada tanggal 20 Desember 1945, mereka menyelenggarakan suatu rapat dan mengundang M.A. Kamaluddin, Arnold Mononutu, Chasan Boesoerie, M.S.DJahir, dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya, dan menuntut kepada tokoh-tokoh tersebut agar PI harus merobah Anggaran Dasar dan mencantumkan azas dan tujuan PI: mendukung kemerdekaan RI dari Sabang sampai Merauke.

Para pemuda tersebut berteriak-teriak bahwa rakyat Maluku Utara tidak boleh mengkhianati republik proklamasi. Arnold Mononutu dan para pemimpin lainnya menyatakan dengan tegas bahwa karena suara terbanyak rakyat Maluku Utara telah menginginkan menjadikan PI sebagai pendukung Republik Indonesia, maka Mononutu dengan tegas menyatakan bahwa anggaran dasar PI akan dirobah sesuai dengan tuntutan mereka.

Karena azas dan tujuan PI berobah, maka golongan royalis seperti M.Nasir Syah, Hasan Ayanhar, Dano Syafei dan lain-lain menyatakan mengundurkan diri. PI kemudian melengkapi pimpinannya dengan memasukkan tokoh-tokoh nasionalis dan Islam seperti: Suryadi, A.L. Rompis, Arsyad Hanafi, Muhammad Alhadar, Ahmad Biyan, Abubakar Bahmid, Zen Assagaf, dan lain-lain.²⁰

Untuk mengoptimalkan kegiatan PI, M.S.Djahir, dengan dibantu tokoh-tokoh muda Kadir Hi. Ahmad, Abjan Soleman, dan lain-lain diberi tugas oleh pimpinan PI untuk menggalang rakyat dengan berbagai rapat umum baik di Ternate maupun di daerah-daerah lain di seluruh Maluku Utara.

Tanggal 5 April 1946, suatu rapat raksasa diselenggarakan di lapangan belakang Benteng Ternate yang diikuti ribuan rakyat, yang dihadiri juga oleh Residen Jabir Syah.

Pada tanggal 9 April 1946, terjadi perubahan dalam pimpinan RI. Chasan Boesoerie dipilih sebagai Ketua-nya dan Mononutu sebagai Sekjen, dibantu Zen Assagaf, Supit Rumopa, Arsyad Hanafie, Muhammad Abdurrachman, M.S.Djahir, Abubakar Bachmid, dan lain-lain. Sebagai Ketua Kehormatan ditunjuk M.Ali Kamaluddin.

Sejak penggalangan PI, maka sampai dengan bulan Maret 1946, PI telah terbentuk di hampir seluruh kecamatan dalam daerah Maluku Utara. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran kepada pemerintah pendudukan Belanda. Tanggal 15 April 1946, satu minggu setelah reorganisasi pimpinan PI dengan masuknya sejumlah kaum Nasionalis dan Islam, Chasan Boesoerie dalam kapasitasnya sebagai Ketua PI dipanggil menghadap Jabir Syah dalam kedudukannya sebagai CONICA. Residen Jabir Syah meminta kepada Boesoerie jaminan, bahwa PI dalam perjuangannya tidak akan menimbulkan kekacauan apapun, dan meminta pula agar para pengurus PI dapat mengekang diri.

Dalam pada itu, pimpinan PI menugaskan M.Ali Kamaluddin dan Hi. Hamzah Limatahu mengunjungi seluruh wilayah kecamatan Maluku Utara guna mengesahkan pimpinan PI yang baru terbentuk di wilayah-wilayah tersebut. Sampai dengan akhir tahun 1946, di luar kota Ternate, PI telah mempunyai cabang di Tobelo, Galela, Tidore, Bacan, Makian, Sanana, Weda, dan Jailolo, dengan jumlah anggota seluruhnya kurang lebih 10.000 orang.²¹

²⁰ Kotambunan, Hi.Hamid. *Perjuangan Rakyat Maluku Utara Membebaskan Diri dari Kolonialisme*. Jakarta: Gamalama Media, 2003. p.25 dan 28.

²¹ *Ibid.* p.33, 35, dan 37.

Sejak bulan Desember 1945 PI telah menerbitkan sebuah tabloid mingguan dengan nama *Menara Merdeka* dipimpin Umar Assagaf dengan redaktur Arnold Mononutu, Chasan Boesoerie, M.S.Djahir, Abubakar Bachmid. Abjan Soleman, dan L.A.Nasibu. Tata Usaha dipegang Zen Assagaf.

Keterangan politik Kepala Staf NICA di Morotai, de Rooy, yang dikeluarkan pada 15 Februari 1946, mengungkapkan bahwa di Ternate telah berdiri partai politik republikan bernama *Persatuan Indonesia* dan *Pemuda Indonesia*, yang kesemuanya merupakan partai terbuka.²² Yang dimaksud de Rooy dengan *Pemuda Indonesia* adalah sayap kepemudaan PI yang dipimpin Abjan Soleman, Kadir Hi.Ahmad, Taher Zougira, A.L.Rompis, dan Yunus Umar.

Sementara itu, para royalis berhaluan *rijksverband* membentuk Partai Sedjarah Maloekoe Oetara (PASMO), yang dipimpin M. Nasir, seorang saudara Sultan Ternate. Sangat mungkin bahwa pembentukan partai ini, selain sebagai reaksi terhadap PI, adalah untuk mewujudkan keinginan Sultan Ternate, Jabir Syah, tentang partai berhaluan *rijksverband* yang tidak direalisasikan Mononutu dan Boesoerie.

Di kalangan wanita Islam juga terbentuk Perkaimindo (Persatuan Kaum Ibu Muslimat Indonesia), dipimpin Ny. Boki Nasir dan Ny. Chasan Boesoerie. Perkaimindo dalam berpolitik praktis sangat dipengaruhi PI, dan cukup berakar dalam masyarakat dengan cabang dan ranting yang tersebar di seluruh kota kecamatan Maluku Utara.

Chaos di Ternate

Sultan Jabir Syah yang diungsikan ke Australia, baru kembali ke Ternate pada akhir bulan September 1945. Ia diantar oleh 2 buah korvet Australia dari Morotai. Tiba pula bersama Sultan, sejumlah pasukan Hulpstroepen (pembantu tentara) yang terdiri dari para pemuda Maluku Utara yang selama pendudukan Jepang bermukim atau mengungsi di Morotai.

Masa antara akhir Agustus hingga akhir September 1945, telah menempatkan Ternate dalam situasi *chaos* dan tak menentu. Pasalnya, menurut Katambunan,²³ pasukan gerilya bentukan Belanda yang berasal dari pulau Hiri, Morotai, dan kampung-kampung lainnya, memasuki kota Ternate dan bergaya seperti “pahlawan” yang baru kembali dari sebuah perang besar yang dimenangkannya.

Kerja mereka tiap hari, merondai kota dan melepaskan tembakan ke udara yang menimbulkan kepanikan rakyat dan menempatkan kota ini seolah-olah dalam suasana perang. Orang-orang kurang berpendidikan ini (ada yang buta huruf), kemudian melakukan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap setiap tokoh yang dianggap bekerja sama dengan Jepang, kemudian dilaksanakan *hukum rimba* yaitu *tabu*.²⁴ Eksekusi yang mereka lakukan melalui hukum rimba dengan perintah *tabu* menyebabkan terbunuhnya tokoh pejuang seperti: Sabtu Mataoga dan Katija (Taman Siswa), Ahmad Yunus dan Djafar (Muhammadiyah), Hasan Esa (PNI), Said Alting dan Abdul Wahab Alting (keduanya bangsawan Tidore), Junus Jiko (kepala

²² S.L. van der Wal, *Officiële Bescheiden*, *Op.Cit.*, vol. 3, arsip 1 Januari - 30 Maret 1946, pp. 611 f.

²³ Kotambunan, *Op.Cit.* pp.15-16 ff.

²⁴ Tabu dalam bahasa Ternate = tembak

distrik), Dodo (mantan tentara KNIL), Muhidin (seorang pejuang dan aktifis partai) dan beberapa tokoh pejuang lainnya.

Bahkan, tokoh nasional Arnold Mononutu, Oom Sau dan Abubakar Bachmid nyaris menjadi korban perbuatan biadab mereka. Eksekusi biasanya dilakukan di tepi pantai di kampung Koloncucu di mana markas mereka berlokasi, setelah korban dijemput paksa dari rumah mereka di pagi hari buta.

Ketika diklarifikasi siapa yang memerintahkan eksekusi tersebut, dengan enteng dijawab: *perintah komandan*. Yang menjadi komandan, menurut Kotambunan,²⁵ adalah: Muhammad Bahdar dan Haji Jalil. Hukum rimba berlangsung di Ternate selama kurang lebih sebulan, dan baru berakhir setelah Sultan Ternate selaku Residen melakukan tindakan penegakan hukum. Tetapi hingga kini, kasus hukum rimba ini belum terungkap dan diselesaikan tuntas secara hukum.

Klarifikasi

Ali Mansur Amal, tokoh yang duduk dalam pimpinan pasukan gerilya ketika itu dan memimpin evakuasi Sultan Ternate dan keluarganya ke Morotai, membantah bahwa eksekusi terhadap tokoh-tokoh pejuang di Ternate itu dilakukan pasukan gerilya atau *hulptroepen*, di mana ia ikut melahirkannya. Dalam wawancara dengan penulis,²⁶ ia memberikan klarifikasinya sebagai berikut: *Hulptroepen* dibentuk oleh seorang berpangkat Mayor dari ketentaraan Nica di Sabatai, Morotai, beberapa saat setelah tentara sekutu mendarat dalam bulan September 1944. Anggota-anggotanya direkrut dari para pemuda pengungsi yang telah berada di Morotai ketika itu, yaitu dari Maba, Kahatola, dan Morotai sendiri. Orang Ternate di dalam *hulptroepen* sekitar 17 orang, di antaranya Haji Jalil dan beberapa pemuda Hiri. Komandannya ditunjuk seorang Sersan kelas 1 KNIL, Josias Taik, yang berasal dari Flores. Pasukan pembantu tentara ini (*Hulptroepen*) seluruhnya berjumlah 200 personil dan ditugaskan melakukan perang gerilya melawan Jepang. Tugas seperti itu pernah dijalankan di Loloda, Ibu, dan Galela.

Anggota-anggota yang berasal dari Ternate kemudian ditugaskan untuk mengevakuasi Sultan Jabir Syah dan keluarganya dari Ternate ke Morotai. Pada penghujung bulan September, enam anggotanya dipimpin Ali Mansur Amal ke Hiri dan selanjutnya ke Ternate dengan membawa sepucuk surat dari Letnan Gubernur Jenderal H.J. Van Mook. Setelah kontingen ini tiba di Hiri mereka melihat bahwa di pulau ini tidak ada garnisun Jepang. Tetapi, kesulitan segera menghadang: kontingen tidak mengetahui di mana persisnya tempat pengungsian keluarga Sultan di Ternate.

Pimpinan kontingen lantas memutuskan, untuk “menculik” Mohammad Bahdar yang dikenal baik untuk dibawa ke Hiri. Rencana ini berhasil dan keesokan harinya Bahdar, yang ketika itu menjadi polisi Jepang, dapat dibawa ke pulau Hiri. Bahdar tahu persis rumah pengungsian keluarga Sultan, dan di tengah malam hari itu juga, kontingen telah mendarat di pantai utara Ternate dan langsung menuju lokasi pengungsian sultan. Jam 06.00 subuh keesokan harinya, Sultan dan keluarganya telah berada di pulau Hiri dan dengan sebuah *speed boat* berkecepatan tinggi, Sultan dan keluarganya dievakuasi ke Morotai dan tiba sore itu juga.

Jepang baru mengetahui evakuasi Sultan, sehari setelah Sultan tiba di Morotai dan pada pagi itu sejumlah tentara Jepang, Menseibu dan sekretarisnya berikut beberapa orang polisi

²⁵ Kotambunan, *ibid.*

²⁶ Wawancara tanggal 14 Mei 2006 di Ternate.

Jepang yang seluruhnya berjumlah 47 orang, dengan 2 buah perahu besar tiba di pulau Hiri. Dalam kontak senjata yang terjadi kemudian, di pihak Jepang jatuh korban 17 orang, sementara pihak *Hulptroepen* dan rakyat terdapat 11 orang, termasuk 2 orang tentara Australia.

Tentara Jepang kemudian mundur dan kembali ke Ternate hingga mereka bertekuk lutut, satu dan lainnya karena patroli kapal-kapal perang dan pesawat terbang sekutu atas pulau Ternate makin ketat. Kontingen *Hulptroepen* yang masih tersisa kembali ke Morotai setelah dijemput Petty-boat sekutu beberapa hari kemudian, dan mereka baru kembali ke Ternate di akhir bulan September 1945 bersama keluarga Sultan.

Teror yang dilakukan orang-orang bersenjata yang menamakan dirinya “pasukan gerilya” dan telah menimbulkan chaos di Ternate, menurut Ali Mansur Amal, adalah preman-preman Hiri yang tidak tergabung dalam pasukannya. Mereka menangkap dan men-dor setiap orang yang diindikasikan bekerjasama dengan tentara Jepang. Putera Sultan pun, kata mereka, kalau bekerja sama dengan tentara Jepang harus juga di-dor. Mereka umumnya tidak terdidik dan berasal dari akar rumput. Menurut Ali, baik Bahdar maupun Haji Jalil tidak pernah memimpin kelompok teroris tersebut.

Gagasan Federasi Swapraja Jabir Syah

Pada Desember 1945, Dr. van Hoven, Komisaris Pemerintah Belanda untuk Kalimantan dan Indonesia Timur, tiba di Ternate. Ia mengadakan pembicaraan dengan Residen Jabir Syah, yang juga merupakan pimpinan Swapraja. Dalam pembicaraan tersebut, van Hoven menyatakan kepada Sultan Ternate bahwa rangkap jabatan residen dan kepala swapraja, seperti yang dilakukan Jabir Syah, tidaklah tepat. Jabir Syah menjawab bahwa ia praktis telah melepaskan seluruh jabatan swapraja kepada para *bobatonya*, sekalipun pertanggungjawaban tertinggi sebagai kepala pemerintahan masih tetap berada di tangannya.

Pada kesempatan itu pula, Sultan Ternate mengemukakan gagasan tentang pembentukan suatu federasi swapraja antara Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Luwuk di Sulawesi Tengah.²⁷ Luwuk adalah suatu swapraja di Sulawesi Tengah, yang bersama Banggai dan Tobungku pernah menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate hingga permulaan abad ke-20. Gagasan Jabir Syah ini ditanggapi van Hoven dengan mengatakan bahwa usul itu akan dipertimbangkan.

Namun, seperti terjadi belakangan, van Hoven menentang gagasan federasi swapraja tersebut. Dalam surat tertanggal 25 Maret 1946, No. Dir. 572/U/46, yang ditujukan kepada Direktur Departemen Dalam Negeri, van Hoven menyatakan bahwa federasi yang diusulkan Sultan Ternate tidak demokratis dan tidak realistis di masa itu. Akhirnya, Kesultanan Ternate, Tidore dan Bacan hanya dapat membentuk sebuah ikatan longgar, yaitu TTB (Ternate Tidore Bacan), yang diumumkan Pemerintah Hindia Belanda dalam S. 1946 no. 27. Suatu federasi berbentuk Dewan Swapraja yang dicita-citakan Jabir Syah tidak pernah lahir.²⁸

Dalam kaitannya dengan federasi swapraja tersebut, pada Januari 1946, sebuah tim Departemen Dalam Negeri Pemerintah Hindia Belanda tiba di Morotai dari Australia. Tim ini terdiri dari de Waal serta Kolonel Bosch, yang kemudian mengunjungi Ternate dan bertemu

²⁷ *Ibid.*, vol. 2, p. 220, arsip 9 Nopember - 31 Desember 1945.

²⁸ Lihat vol. 3, arsip no. 346, "Staatkunde Organisatie van Molukken," pp. 649 f.

dengan Conica (*Commander NICA*) Jabir Syah dan Kontrolir Ternate, van der Groot. Sebagai Conica Maluku Utara, Jabir Syah memberikan keterangan yang diperlukan. Tim ini kemudian kembali ke Morotai. Selain Ternate, tim ini juga mengunjungi Bali, Timor, Ambon, Manado, Sangir Talaud, Gorontalo, dan Poso.²⁹

Tugas tim tersebut berada di dalam kerangka reformasi administrasi pemerintahan untuk menghilangkan pengaruh administrasi pemerintahan Jepang, bahkan untuk mengeliminasi unsur-unsur pro-Republik, dan mengembalikannya seperti sebelum Perang Dunia ke-2, serta mengidentifikasikannya dengan kekuasaan Belanda. Itulah sebabnya, pada 7 April 1946, Gubernur Sam Ratulangi ditahan, demikian juga Gubernur Bali, Ktoet Poedje, yang pro-Republik.

Dalam publikasi tertanggal 10 Februari 1946, tim de Waal menyatakan bahwa Sultan Jabir Syah, sebagai Conica, telah memberikan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Dalam keterangannya kepada tim, Sultan Ternate menyatakan ia menyadari bahwa daerah Maluku Utara kini tengah dilanda arus demokrasi dan keinginan yang kuat untuk merdeka. Meskipun demikian, daerah ini masih tetap aman dan rakyat *tidak peduli* bila sebuah pemerintahan otokrasi yang permanen berdiri lagi (?).

Sultan sendiri, menurut pernyataan tim, menghendaki sebuah pemerintahan demokratis, dan untuk itu ia menginginkan sebuah ikatan federatif antara swapraja-swapraja Ternate, Tidore, Bacan dan Banggai (Luwuk), yang kini berada di bawah Keresidenan Manado. Sultan menekankan bahwa semua yang diinginkannya itu tidak akan terlaksana tanpa kerja sama antara daerah-daerah swapraja yang bersangkutan. Pembentukan secara demokratis sebuah dewan oleh swapraja yang berfederasi (*gefedereerde landschappen*), menurut Jabir Syah, akan dapat diwujudkan. Dewan ini akan memiliki kewenangan menetapkan anggaran belanja dan peraturan yang berlaku bagi federasi swapraja tersebut.

Sultan Jabir Syah, menurut pernyataan tim de Waal, mengemukakan bahwa di Maluku Selatan terdapat upaya-upaya pembentukan komunitas mandiri yang bertujuan membentuk kerajaan (*zelfstandige gemeenschap in het Koninkrijk te vormen*). Sultan memandang upaya ini tidaklah percuma. Karena itu, ia berharap dengan sangat bahwa keputusan melaksanakan rencana pembentukan Dewan Federasi Swapraja dapat segera terwujud. Bacan, Ternate dan kepulauan Sula dapat memprakarsainya. Dewan Swapraja juga bertujuan melakukan kajian mengenai otonomi Maluku Utara dan bagaimana pelaksanaannya.

Dalam benak Jabir Syah, menurut analisis de Waal, gagasan federasi swapraja dimaksudkan agar Maluku Utara memperoleh otonomi yang besar dan luas, yang dapat menyumbangkan kekuasaan kepada Netherland Indie. Tetapi, dalam hal “menyumbang kemakmuran” bagi Indonesia, Sultan enggan melibatkan Maluku Selatan yang dipandang sebagai sebuah daerah miskin (*een arm gebied*). Konsep Sultan Jabir Syah tentang federasi swapraja ini ditolak Pemerintah Hindia Belanda,³⁰ sehingga yang dapat dilakukannya hanyalah membentuk sebuah ikatan longgar antara tiga kesultanan Maluku Utara (TTB) tanpa Luwuk-Banggai dan Dewan Federasi Swapraja.

²⁹ Yong Mun Cheong, *H.J. van Mook and Indonesian Independence*. s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1982, p.87.

³⁰ S.L. van der Wal, *Officiële Bescheiden, Op.Cit.*, vol. 3, arsip no. 346, pp. 649-651. Penolakan Belanda dilakukan oleh pejabat Direktur Pemerintahan Dalam Negeri, dengan surat tertanggal 25 Maret 1946, no. Dir. 572/u/46. Dalam surat ini hanya diakui eksistensi federasi swapraja Ternate, Tidore dan Bacan (TTB, Stb. 1946 no. 27).

Konperensi Malino (16-24 Juli 1946)³¹

Sesuai janji Ratu Wilhelmina dalam pidato 8 Desember 1942 bahwa bila perang usai Indonesia akan memperoleh kemerdekaan, Letnan Gubernur Jenderal van Mook – setelah kembalinya Pemerintah kolonial Belanda di beberapa daerah Indonesia se usai Perang Dunia ke-2 – berupaya menjalankan politik memecah-belah secara intens. Ia membentuk negara-negara bagian di daerah pendudukan Belanda yang akan menjadi bagian NIS (Negara Indonesia Serikat).

Prakarsa Belanda tentunya bertentangan dengan kenyataan praktis. Sejak 17 Agustus 1945 telah lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka dan berdaulat. Sebagai langkah pertama menuju pembentukan negara federasi Indonesia, Belanda menyelenggarakan berbagai konperensi atas prakarsanya sendiri. Konperensi Malino merupakan salah satu langkah awal. Malino adalah sebuah tempat di Sulawesi Selatan yang terletak hanya belasan kilometer dari Makassar. Kota yang berhawa sejuk ini menjadi kota peristirahatan sejak sebelum Perang Dunia ke-2.

Konperensi Malino pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk membahas dan memintakan persetujuan konsep negara federal van Mook dan pembentukan sebuah badan untuk melaksanakannya. Dalam konperensi ini juga didiskusikan hubungan jangka panjang Indonesia-Belanda. Sebelum Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Negara Indonesia Serikat, menurut van Mook, diperlukan masa transisi.

Konperensi Malino diadakan Pemerintah Hindia Belanda pada 16-24 Juli 1946, yang dihadiri pejabat-pejabat pemerintah, utusan daerah-daerah dan partai-partai politik berbagai daerah, seperti Kalimantan, Bangka, Belitung, Riau, Maluku, Papua, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Maluku Utara diwakili oleh Residen Jabir Syah, Chasan Boesoirie (PI) dan Salim A. Fabanyo (PASMO).

Tepat pukul 09.00, Letnan Gubernur Jenderal van Mook membuka konperensi dan sekaligus bertindak sebagai ketuanya. Dalam pidato pembukaannya, van Mook menyatakan bahwa prakarsa Pemerintah Belanda menyelenggarakan Konperensi Malino telah disampaikan kepada Perdana Menteri RI, Sutan Syahrir.³² Menurut van Mook, Konperensi Malino adalah tonggak bersejarah menuju pembentukan NIS, dan Indonesia Timur merupakan salah satu negara bagian yang akan tergabung ke dalam NIS.

Setelah pidato pembukaan van Mook, sejumlah peserta berbicara pada hari pertama dan kedua konperensi itu, antara lain:

1. E.D. Dengah (Minahasa) menyetujui pidato pembukaan van Mook tentang pembentukan sebuah negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Namun, menurut Dengah, pembentukan negara seperti yang digagaskan van Mook belum dapat dilaksanakan sebelum rakyat RI di Jawa dan Sumatera didengar pendapatnya. Sebab, pembentukan sebuah negara federal tanpa RI bertentangan dengan prinsip Indonesia Raya. Karena itu, Dengah menyetujui adanya suatu masa transisi paling tidak selama lima tahun.

³¹ *Ibid.*, vol. 5, pp. 18 ff.

³² Dalam berbagai konperensi pembentukan negara-negara bagian selanjutnya, pemberitahuan semacam ini tidak pernah lagi dilakukan dan semua protes Pemerintah RI tidak digubris.

2. J.P. Mangula (Minahasa) menegaskan bahwa Perang Dunia ke-2 telah membawa perubahan politik yang mendasar. Dengan demikian, menurutnya, pidato Ratu Wilhelmina pada 8 Desember 1941 hendaknya benar-benar dilaksanakan.
3. Sarapie (Sangir Talaud) menyatakan setuju atas kerja sama yang erat antara Indonesia-Belanda. Tetapi, ia menekankan bahwa Indonesia sebagai sebuah wilayah kesatuan harus tetap berada di bawah bendera Belanda. Tanpa bendera ini, Indonesia akan gagal karena di negeri ini terdapat berbagai daerah heterogen dengan penduduk yang terpisah-pisah (*Indonesia als eenheid bestaat alleen onder Nederlandsche vlag. Zonder deze vlag valt Indonesia in duigen, door zijn heterogene bestanddelen en door de verschilleendenheid van volkeren*).
4. Katili (Gorontalo) mengemukakan bahwa mayoritas rakyat Gorontalo hanya mau bekerjasama dengan Belanda atas dasar persamaan derajat. Karena itu, menurutnya, Pemerintah Belanda harus memperhatikan secara serius pendapat dan pikiran yang hidup di kalangan rakyat daerah seberang.
5. Najamuddin Daeng Malewa (Sulawesi Selatan) menyatakan bahwa hak menentukan nasib sendiri ada pada rakyat Indonesia. Perang Dunia ke-2 telah memberikan pengaruh kuat kepada kemerdekaan dan hak untuk menentukan nasib sendiri yang tidak dapat dielakkan, termasuk oleh Belanda.
6. I Gusti Bagus Oka (Bali) mengemukakan Konperensi Malino hendaknya menjadi dasar untuk Indonesia merdeka, seperti yang diharapkan Perdana Menteri RI, Sutan Syahrir.
7. Sultan Jabir Syah (Maluku Utara) mengemukakan keinginan penduduk Swapraja Ternate, Tidore dan Bacan agar konperensi dapat mengambil keputusan-keputusan bersejarah bagi Indonesia. Apabila rakyat Maluku Utara memperoleh kemerdekaannya, ia akan setara dengan rakyat Nederland dalam ikatan persaudaraan. Menurut Jabir Syah, kesamaan derajat dan status antara Indonesia dan Nederland inilah yang ingin dicapai. Ia kemudian mengusulkan bahwa bila parlemen telah terbentuk untuk Indonesia Timur dan Borneo, hendaklah dibentuk senat atau majelis tinggi – yakni *kamer* – yang anggota-anggotanya diambil dari unsur swapraja (*zelfbestuurders*), pemimpin persekutuan hukum, dan pemuka masyarakat. Jabir Syah juga mempertanyakan lamanya masa transisi, mengapa Borneo dan Timur Besar harus dipisahkan dari Jawa dan Sumatera, serta lagu kebangsaan dan bendera apa yang akan dipakai. Sebagai penutup, ia memohon beberapa hal dalam pidato van Mook dijelaskan lebih jauh untuk menghindari kesalahpahaman.³³
8. R.J. Matekohy (Maluku Selatan) mengemukakan bahwa Pemerintah Pusat di Jakarta (Batavia) hanya sibuk dengan pembicaraan-pembicaraannya dengan Pemerintah RI yang dianggap sangat penting. Menurutnya, rakyat di daerah seberang juga tidak kalah pentingnya.

Pada sidang hari ketiga, 18 Juli 1946, para peserta yang berbicara dalam Konperensi Malino antara lain:

1. Chasan Boesoerie dari PI (Maluku Utara). Ia mengawali pidatonya dengan sebuah pernyataan mendasar bahwa ia hanya ingin bertanggungjawabkan segala sesuatu

³³ Tidak dijelaskan olehnya bagian-bagian manakah dari isi pidato van Mook yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.

yang diputuskan Konperensi Malino kepada Indonesia yang merdeka. Menurutnya, sejak 1848, politik Belanda di Indonesia selalu menjurus kepada pemikiran untuk tidak mengakui suatu Indonesia yang memiliki pemerintahan sendiri. Belanda tidak pernah mengakui bahwa Indonesia telah mampu untuk merdeka. Politik usang yang berusia lebih dari seabad ini harus segera dilenyapkan. Boesoerie merujuk Filipina yang baru 50 tahun berada di bawah Amerika, tetapi telah memperoleh kemerdekaannya. Selanjutnya ia menunjuk pasal 3 Atlantic Charter dan menekankan bahwa Indonesia harus segera merdeka. Prioritas untuk segera memperoleh kemerdekaan, menurutnya, berada di atas semua pertimbangan, baik politik, ekonomi maupun sosial. Indonesia yang merdeka akan dapat bekerjasama dengan masyarakat dunia, termasuk Nederland, sebab antara Indonesia dan Nederland terjalin ikatan kesejarahan, ekonomik, sosial, dan lain-lain. Kemerdekaan Indonesia, kata Boesoerie, tidak boleh ditawar-tawar. Persamaan derajat antara Indonesia dan Nederland adalah sesuatu yang mutlak dan meliputi semua segi pergaulan. Hanya dengan kemerdekaan penuh, kerjasama dalam semua bidang mendapat tempat bagi kedua pihak. Menurutnya, hal terpenting yang harus dibahas pertemuan Malino adalah menyiapkan semua pranata dan sarana untuk sebuah Indonesia yang segera harus bebas dari kolonialisme. Pendidikan kolonial harus segera diganti dengan pendidikan nasional. Semua fungsi pertanggungjawaban harus berada di tangan orang Indonesia. Selanjutnya, Boesoerie menyatakan bahwa memperkenalkan bendera Indonesia merupakan suatu keharusan. Maluku Utara siap mengibarkan bendera kebangsaan seperti yang dikibarkan di Jawa dan Sumatera. Indonesia yang merdeka akan menjalin kerjasama yang erat dengan Nederland atas dasar kebebasan dan persamaan derajat.³⁴

2. Salim Azizuddin Fabanyo dari PASMOM (Maluku Utara). Ia mengawali pidatonya dengan sebuah pernyataan bahwa ia berbicara diforum tersebut mewakili 300.000 jiwa. Dengan semangat berapi-api ia berseru bahwa Indonesia harus merdeka, bebas dari negeri Belanda. Nederland, menurutnya, harus bekerjasama dengan RI. Ia kemudian mengingatkan hak-hak para sultan berpijak pada pasal 8 Undang-undang Dasar RI. Ia menginginkan sebuah kesatuan Indonesia yang tidak terbagi-bagi, dan menyetujui adanya ikatan antara Indonesia dan Nederland berdasarkan asas sejarah. Tetapi, menurutnya, ikatan itu harus dituangkan dalam sebuah traktat yang menentukan bahwa Nederland memperoleh privilese (hak-hak istimewa). Di ujung pidatonya, ia menyerukan agar pada penutupan konperensi harus ditetapkan pengakuan pada Bendera Merah Putih, dan nama Nederland Indie diubah menjadi Indonesia.
3. M. Saleh (Riau). Ia menegaskan bahwa Riau dan Sumatera tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana pembicara-pembicara sebelumnya dari Maluku Utara, Boesoerie dan Fabanyo, ia menghendaki agar Merah Putih diakui sebagai bendera kebangsaan.
4. Kasiepo (Papua). Ia mengemukakan bahwa titik berat politik Papua terhadap Belanda di Indonesia didasarkan pada kemauan kedua pihak untuk bekerjasama. Kasiepo juga mengusulkan agar ikatan Papua dan Tidore diputuskan dan nama Papua diganti, karena nama tersebut dalam bahasa Tidore berarti "budak". Menurutnya, rakyat di daerahnya setuju dengan nama Irian.

Pada sidang hari ke-4, 19 Juli 1946, Boesoerie dari Maluku Utara menyatakan dapat menyetujui usulan Maluku Selatan dan Minahasa yang menghendaki bahwa jika Negara Timur

³⁴ S.L. van der Wal, *Officiele Bescheiden, Op.Cit.*, vol. 5, pp. 18 ff.

Besar atau Negara Indonesia Timur (NIT) dibentuk, Borneo (Kalimantan) harus dipisah, sehingga federasi Indonesia hanya akan meliputi: Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Timur Besar. Timur Besar sendiri akan meliputi Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Dalam sidang hari ke-5, 20 Juli 1946, Konperensi Malino memutuskan membentuk sebuah panitia yang mewakili Timur Besar, Bangka/Belitung, Riau dan Borneo. Wakil dari Timur besar adalah: Najamuddin Daeng Malewa, E.D. Dengah, Jabir Syah dan Kapten Julius Tahiya. Jabir Syah kemudian diganti oleh Sukawati dari Bali. Tugas panitia ini adalah merumuskan resolusi yang menjadi keputusan Konperensi Malino.

Sentimen nasionalisme dapat dikatakan telah mewarnai Konperensi Malino. Utusan Maluku Utara, Boesoirie maupun Fabanyo, misalnya, menuntut agar Merah Putih dijadikan bendera NIT, dan lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan NIT. Tetapi, van Mook berhasil meredam isu ini dengan menyatakan bahwa hal tersebut akan dibicarakan oleh negara-negara bagian bila NIT telah terbentuk.

Pada 23 Juli 1946, tepat pukul 10.00, Letnan Gubernur Jenderal van Mook membuka sidang pleno terakhir Konperensi Malino. Sidang hari terakhir mendengarkan laporan hasil kerja berbagai komisi dan panitia. Sebuah komisi penghubung yang memonitor jalannya konperensi beserta hasil-hasilnya segera mengirim telegram kepada Ratu Wilhelmina. Isinya antara lain menyatakan:

Konperensi Malino telah berakhir dan telah menetapkan sejumlah dasar untuk pekerjaan konstruktif guna mencapai sebuah Indonesia merdeka yang ideal dalam waktu yang tidak terlalu lama, atas dasar kerjasama Indonesia dan Nederland. Dengan ini, janji Sri Baginda dalam pidato tanggal 8 Desember 1942 akan terpenuhi.

Ketua Konperensi, Letnan Gubernur Jenderal van Mook, membacakan kesimpulan dan hasil Konperensi Malino dengan permintaan agar para peserta memberikan persetujuannya. Najamuddin Daeng Malewa, utusan Sulawesi Selatan, menyatakan daerahnya dapat menerima seluruh kesimpulan konperensi. Menurutnya, titik tolak sebuah negara Indonesia serikat melalui suatu aliansi dengan Belanda harus diwujudkan, tanpa perlu adanya jangka waktu tertentu. Tetapi, I.G. Bagus Oka, dari Bali, menyatakan diperlukan waktu paling lama sepuluh tahun sebagai masa transisi sebelum cita-cita Indonesia merdeka terwujud.

Sementara Boesoirie, dari Maluku Utara, mengulangi tuntutan tentang lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan dan Sang Merah Putih sebagai bendera negara. Kedua masalah ini harus diputuskan terlebih dahulu. Menurut Boesoirie, Konperensi Malino memiliki pengaruh tidak hanya pada daerah-daerah yang terwakili, tetapi juga pada Jawa dan Sumatera. Menjawab tuntutan Boesoirie, van Mook mengemukakan bahwa masalah bendera dan lagu kebangsaan terkait dengan aspek internasional, sehingga komisi yang membahasnya belum dapat memberikan keputusan.

Sultan Sumbawa dan Sultan Ternate, pada penutupan Konperensi Malino, menyerukan agar kerjasama perangkat-perangkat swapraja dan dewan-dewan daerah ditingkatkan. Dan tepat pukul 11.00, van Mook secara resmi menutup Konperensi Malino.

Konperensi Malino merupakan langkah awal Belanda membentuk Negara Indonesia Serikat, berdasarkan konsep yang disodorkan van Mook dalam proposal yang telah disampaikan kepada Ratu Belanda, menyusul pelaksanaan isi pidato Ratu Belanda tentang

perubahan konstitusi sesuai Perang Dunia ke-2. Inti sari konsep van Mook adalah pembentukan “the Federal Commonwealth of Indonesia. “

Tetapi, suatu kenyataan yang mesti dicatat adalah Konperensi Malino tidak mengikutsertakan etnis minoritas, seperti Cina dan Arab. Hal ini berbeda, misalnya, dengan Konperensi Pangkalpinang (1-12 Oktober 1946), yang juga merupakan salah satu aspek realisasi proyek van Mook. Karena itu, pendapat umum memandang Konperensi Malino sebagai proyek van Mook untuk kaum feodal yang pro-Belanda dan yang mengalami kesulitan di masa pendudukan Jepang. Bung Hatta bahkan menyatakan Konperensi Malino diselenggarakan di ujung bayonet. Suatu hal yang tidak dapat disangkal dan telah menjadi bukti sejarah adalah bahwa Konperensi Malino merupakan alat yang diinvensi untuk membunuh RI.³⁵ Van Mook sendiri menyadari kenyataan tersebut, sehingga ia ragu dan bahkan tidak menegosiasikannya dengan Pemerintah RI.

Reaksi atas Hasil Konperensi Malino

Berbagai reaksi terhadap Konperensi Malino muncul baik di Kalimantan ataupun di berbagai daerah Indonesia Timur lainnya, selain dari Pemerintah RI sendiri. Orang-orang republikan di Kalimantan dan Sulawesi Selatan dengan tegas menolak ikut ambil bagian dalam Konperensi Malino, karena memandangnya sebagai suatu konspirasi politik. Sementara sejumlah tokoh republikan, seperti A. A. Rivai dan Diapari, serta pemimpin Pemuda Mahoni, telah memboikot pertemuan yang diselenggarakan Asikin Noor, seorang tokoh pro-federalis.

Secara internasional, Konperensi Malino tidak memperoleh publikasi yang luas. Media massa Inggris tidak mempublikasi pelaksanaan maupun hasil-hasil konperensi tersebut, walaupun sejumlah wartawan dikirim untuk melakukan peliputan. Bahkan, setelah penyerahan kekuasaan pada 13 Juli 1946, Inggris memutuskan meninggalkan Makassar dan mengeluhkan adanya reaksi keras terhadap Konperensi Malino.

Tetapi, reaksi paling keras dan kecaman paling tajam atas hasil-hasil Konperensi Malino di Maluku datang dari surat kabar *Menara Merdeka*, media resmi Persatuan Indonesia yang terbit di Ternate. Dalam edisi 5 Agustus 1946, *Menara Merdeka* membuat perbandingan tentang betapa bedanya cara berunding yang dilakukan di Jawa dan di Malino. Dalam perundingan di Jawa, diupayakan memunculkan Indonesia ke atas pentas internasional. Sementara di Malino, orang bermusyawarah mengembalikan kepentingan-kepentingan Indonesia ke dalam suasana Hindia Belanda.

Lebih jauh, *Menara Merdeka* menulis bahwa banyak hal dalam Konperensi Malino yang mesti dipertanyakan, misalnya: apakah yang hadir dalam konperensi itu adalah utusan-utusan sah dan representatif yang boleh berbicara atas nama daerahnya? Surat Kabar PI ini mengeritik dengan pedas konperensi tersebut, pihak yang memprakarsai pelaksanaannya, serta yang mewakili sebagai utusan daerah, karena “tidak menghitung hal-hal yang terjadi di Jawa.” Mengakhiri komentarnya, *Menara Merdeka* menulis: “Persatuan Indonesia hanya berdiri di belakang RI dengan Presidennya Bung Karno dan Perdana Menteri Sutan Syahrir.”

³⁵ Yong Min Cheong, *Op.Cit.*, p.87.

Kritik *Menara Merdeka* – dengan sidang redaksi yang terdiri dari Mononutu, M.S. Jahir, Abjan Soleman dan Abubakar Bachmid – sangat mencengangkan Dr. van Hoven, Komisaris Umum Pemerintah Hindia Belanda untuk Timur Besar. Dalam laporannya pada Agustus 1946, van Hoven menyatakan terkejut melihat reaksi keras yang datang dari *Menara Merdeka*, sebab Boesoirie – salah satu ketua PI Ternate dan juga anggota sidang redaksi *Menara Merdeka* – ikut serta dalam Konperensi Malino sebagai wakil daerah Maluku Utara.

Sementara itu, Letnan Gubernur Jenderal van Mook, dalam laporan tertanggal 23 Desember 1946,³⁶ menyampaikan kepada Menteri Daerah Seberang Kerajaan Belanda, Jonkman, bahwa pengaruh RI terhadap sanubari rakyat Indonesia sangat besar, dan merupakan masalah bagi Pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi atau meniadakannya. Orang-orang Republikan yang militan, terutama orang-orang partai politik yang pro-RI di Makassar, Bali, Lombok dan Maluku Utara, telah memanfaatkan situasi dengan amat baik untuk kepentingan politiknya. Menurut van Mook, generasi muda di Bali, Lombok, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara telah berkembang menjadi generasi muda republikan yang tangguh serta militan, dan – di atas segalanya – mereka berupaya untuk memperoleh senjata.³⁷ Hampir tidak dapat ditemukan di kalangan anak muda, kawula swapraja, maupun rakyat kebanyakan yang “anti Merah Putih.” Hanya ada beberapa daerah tidak penting di Maluku Selatan, yang unsur-unsurnya tergabung dalam pasukan KNIL, berhaluan sebaliknya. Tetapi, menurut van Mook, mereka sangat lemah dan tidak bisa berbuat banyak.

Laporan Politik van Hoven dan Jabir Syah

Selain reaksi keras koran PI Ternate, *Menara Merdeka*, atas Konperensi Malino, Dr. van Hoven juga melaporkan beberapa hal menyangkut kondisi Maluku Utara saat itu, antara lain:

1. Di Ternate dan Tobelo keadaan tenang, demikian pula di *onderafdeling* lain, seperti di Sula, Jailolo dan Weda.
2. Pada Juni 1946, pasukan *Hulptroepen* telah menahan seorang yang menamakan diri penjaga keamanan rakyat di teluk Kao.
3. Pemukiman kembali 2700 mantan Heiho di Galela telah selesai. Demikian pula, repatriasi tentara Jepang telah rampung. Sementara sebagian rakyat yang mengungsi ke Morotai telah kembali ke kampung-kampung halamannya.
4. Residen Jabir Syah meminta kepada Komandan tentara Belanda agar *Hulptroepen* dapat direkrut menjadi tentara KNIL.

Sementara itu, dalam laporan politik periode 15-31 Agustus 1946, Residen Jabir Syah mengemukakan telah menerima sepucuk surat dari Jailolo yang menanyakan tentang Konperensi Malino. Jawaban Jabir Syah atas surat tersebut adalah bahwa konperensi itu tidak mengambil keputusan apapun tentang Negeri Belanda. Residen Maluku Utara ini juga melaporkan telah

³⁶ S.L. van der Wal, *Officiele Bescheiden, Op.Cit.*, vol. 4, pp.134-135; Yong Min Cheong, *ibid.*

³⁷ Abjan Soleman dari Pemuda Indonesia Ternate, misalnya, pernah berupaya menyelam mencari senjata Jepang di danau Galela, tetapi dicegah Boesoirie.

membuat surat edaran kepada seluruh *onderafdeling* (pemerintah wilayah setempat) agar tetap tenang dan memelihara keamanan. Aparat pemerintah di *onderafdeling* supaya menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara keadaan politik di *Onderafdeling* Bacan lebih baik dari sebelumnya. Laporan Jabir Syah diakhiri dengan pesan: (i) jangan bentrok melawan Nederland atau kelompok rakyat lainnya; dan (ii) ikatan persahabatan dengan Nederland supaya tetap dipelihara.

BAB 18

Maluku Utara di Bawah NIT

Perjanjian Linggarjati dan Agresi Militer Belanda

Pada 15 Nopember 1946, Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI mengumumkan sebuah persetujuan yang dihasilkan lewat perundingan di Linggarjati. Perjanjian pertama yang dicapai RI dan Belanda ini menetapkan:

1. Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara federal yang dinamakan Negara Indonesia Serikat (NIS).¹
2. NIS akan bekerjasama dengan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk membentuk sebuah uni Indonesia-Belanda.

Dalam perkembangan politik selanjutnya, Belanda secara konstan berupaya melemahkan RI dengan membentuk negara-negara bagian tanpa mengenal batas, dan melakukan tindakan-tindakan agresi terhadap RI dengan mengatasnamakannya sebagai aksi polisionil. Agresi pertama dilakukan pada tengah malam 20 Juli 1947, dengan maksud menduduki Jawa Barat – tidak termasuk Banten – Madura, ujung Jawa Timur, serta daerah-daerah sekitar Semarang, Medan dan Palembang. Secara praktis, agresi ini tidak menguntungkan Belanda. PBB akhirnya menghentikan agresi ini dan membentuk sebuah komisi untuk meleraikan pertikaian antara RI dan Belanda.

Dalam suratnya, tertanggal 1 Agustus 1947, yang ditujukan kepada van Mook, Presiden NIT, Sukawati, merespon agresi tersebut dengan meminta Pemerintah Belanda agar melaksanakan secara konkret ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Linggarjati.²

Pembentukan NIT dan Reaksi Perjanjian Linggarjati

Seusai Konperensi Malino, yang mendapat reaksi keras rakyat Maluku Utara, Pemerintah Belanda meneruskan upaya membentuk NIS. Untuk itu, berbagai konperensi diselenggarakan tanpa menghiraukan kecaman dan protes dari RI dan rakyat.

¹ Menurut Perjanjian Linggarjati, NIS hanya akan terdiri dari RI, NIT dan Kalimantan. Dalam perjalanan selanjutnya, untuk memperlemah RI, Belanda membentuk tidak kurang dari 15 negara boneka yang tergabung ke dalam NIS.

² P.J. Drooglever & M.J.B. Schouten, *Officiele Bescheiden ... Enz; s'Gravenhage: Instituut voor Ned. Geschiedenis, 1989-1994, vol. 11, pp.176, 161, arsip 1 Agustus 1947.*

Pada 7-24 Desember 1946, sebuah konferensi diselenggarakan van Mook di Denpasar, Bali, sebagai tindak lanjut Konferensi Malino dan upaya Belanda mendirikan negara-negara bagian dalam rangka mewujudkan NIS. Konferensi Denpasar melahirkan NIT, yang merupakan prototipe negara-negara boneka yang kemudian secara terus-menerus dibentuk Belanda. Walaupun kekuasaan Belanda masih dominan, di dalam konferensi inipun ide-ide nasionalisme tetap bertahan kuat dan berujung dalam bentuk kompromi. Hal ini terbukti dari ditetapkannya lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan NIT.³

Sebuah kegagalan yang mencolok dalam Konferensi Denpasar – dihadiri wakil-wakil dari Sulawesi Selatan (20 orang), Minahasa/Sulawesi Utara (3 orang), Sulawesi Tengah (6 orang), Bali (7 orang), Flores (3 orang), dan Sumbawa (3 orang) – adalah tidak hadirnya wakil Maluku Utara. Suara-suara keras dari wakil-wakil Maluku Utara yang diperdengarkan dalam Konferensi Malino barangkali telah menyebabkan van Mook tidak mau mengundang wakil Maluku Utara yang dapat “mengganggu” Konferensi Denpasar.

Pada 7 Desember 1946, suatu konferensi pendahuluan untuk Konferensi Denpasar dilangsungkan, yang dipimpin Komisaris Pemerintah Belanda untuk Kalimantan dan Timur Besar, Dr. W. Hoven. Konferensi pendahuluan ini membahas rencana materi pembentukan NIT, pemilihan Kepala Negara, Ketua Parlemen dan Perdana Menteri NIT, yang masing-masing dijabat oleh Cokorde Gde Rake Sukawati, Mr. Tajuddin Noor, dan Najamuddin Daeng Malewa. Dalam konferensi ini, juga ditetapkan Makassar sebagai ibukota NIT.⁴

NIT adalah negara boneka pertama buatan Belanda dalam rangka pembentukan NIS. Dalam bulan April 1947, Parlemen NIT terbentuk dengan anggota-anggotanya diambil dari dewan-dewan daerah, dan karena itu bersifat sementara, menunggu pelaksanaan pemilihan umum untuk pembentukan sebuah parlemen yang representatif. Rencana pembentukan parlemen yang representatif ini ternyata tetap tinggal rencana. Sampai bubarnya NIT pada 1950, pemilihan umum yang direncanakan tidak pernah terlaksana.

Wakil-wakil yang duduk dalam Parlemen NIT kemudian membentuk fraksi-fraksi. Fraksi yang paling utama adalah Fraksi Progresif pimpinan Mononutu, anggota parlemen mewakili Maluku Utara, yang mencita-citakan NIS berdasarkan Perjanjian Linggarjati dan berupaya memperjuangkan kemakmuran rakyat. Fraksi progresif merupakan fraksi oposisi. Selain itu, ada Fraksi Demokrat dan Fraksi Nasional.⁵

Dalam bulan April 1947, untuk pertama kalinya Parlemen NIT bersidang dengan mengundang tokoh-tokoh dan pejabat RI. Dalam kesempatan ini, RI mengirim delegasi yang dipimpin Sultan Hamengku Buwono IX. Salah satu anggota delegasinya adalah Mr. Latuharhary, Gubernur RI untuk Maluku. Dalam persidangan Parlemen NIT, Mr. Latuharhary ditolak masuk ke ruang sidang dengan alasan daerah Maluku tidak boleh dicampuri pejabat-pejabat RI berdasarkan Perjanjian Linggarjati.⁶

Sementara itu, personal kabinet NIT yang telah terbentuk memperoleh kritik keras bukan hanya dari kalangan politisi Indonesia, tetapi juga dari para petinggi Belanda. Komisaris

³ Ricklefs, *Op.Cit.*, p. 337.

⁴ Lapijan, A.B., *et.al.*, *Terminologi Sejarah*. Jakarta: Departemen P&K, 1996, p. 33.

⁵ Leirissa, *Maluku dalam Perjuangan Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sejarah Fak. Sastra Univ. Indonesia, 1975, p.141.

⁶ *Ibid.*, pp. 142 f.

Pemerintah Belanda untuk Indonesia bagian timur, Brouwer, dalam surat tertanggal 25 Nopember 1947 kepada Letnan Gubernur Jenderal van Mook,⁷ menyatakan bahwa Presiden Sukawati adalah seorang yang lemah. Sementara Jaksa Agung NIT, Dr. Soumokil, ketika memberi keterangan Pemerintah di depan parlemen bertindak seolah-olah membacakan *requisitoir*,⁸ yang semuanya didasarkan pada sensasi. Naskah pidatonya tidak dibagikan kepada anggota parlemen, sedangkan masalah yang disampaikan tidak pernah dibicarakan terlebih dahulu dengan kabinet. Dalam surat yang sama, Brouwer juga mengemukakan: “Saya telah memberi berbagai bimbingan selama beberapa bulan kepadanya agar ia agak hati-hati dan berlaku diplomatis, tetapi hasilnya mengecewakan.”

Brouwer juga mengungkapkan bahwa Mononutu bersama 30 hingga 35 anggota parlemen lainnya dikenal sebagai pihak oposisi. Orang-orang ini selalu berupaya “mengirim menteri-menteri ke rumah”—yakni berupaya membuat mereka dipecat. Tetapi, Brouwer yakin bahwa Presiden tidak begitu percaya kepada Mononutu. Presiden, menurut Brouwer, terlihat lebih percaya kepada Haji Muchtar Lutfi.⁹ Kebanyakan anggota Parlemen lebih berorientasi ke Jakarta, namun kebanyakannya *onvoldoende* (tidak cakap).

Van Emstede, anggota penanggung jawab sementara Badan Pemerintahan Indonesia Timur, dalam surat tertanggal 30 Januari 1948 kepada Prof. Romme, anggota Parlemen Belanda, mengungkapkan kekecewaannya atas sejumlah tindakan penguasa NIT. Najamuddin Daeng Malewa, Perdana Menteri NIT, menurut van Emstede, adalah tokoh yang kurang disenangi kawula negara Belanda dan tidak disukai rakyat. Najamuddin akhirnya dipecat karena korupsi dan diganti oleh Anak Agung Gde Agung.

Van Emstede juga merasa jengkel dengan mosi Arnold Mononutu dari Maluku Utara, yang menjadi Ketua Fraksi Oposisi dalam Parlemen NIT. Pada puncak konfliknya dengan salah seorang residen, fraksi ini telah mengajukan mosi agar semua pegawai diintegrasikan. Mosi ini akhirnya berhasil digagalkan Perdana Menteri NIT, Anak Agung Gde Agung.¹⁰

Sementara itu, Komandan Militer Belanda di Makassar, de Vries, dalam laporan tertanggal 1 Mei 1947,¹¹ mengungkapkan bahwa situasi Indonesia Timur pasca pembentukan NIT memperlihatkan bahwa beberapa kelompok rakyat Maluku menyatakan Maluku dapat bergabung dengan RI berdasarkan pasal 3 Perjanjian Linggarjati. Pendapat ini bertolak dari jalan pikiran bahwa dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan adanya NIT. Karena itu, rakyat Indonesia Timur berwenang untuk bergabung dengan salah satu negara bagian yang akan menjadi negara federal dan akan dibentuk nanti.

Laporan de Vries juga menyebutkan bahwa Pemerintah Swapraja tengah berupaya mengembalikan kekuasaannya seperti sediakala. Sebuah perserikatan para raja sedang disiapkan pembentukannya atas prakarsa Sultan Sumbawa, dan akan dilaksanakan di Makassar. Gagasan pembentukan ini didukung Sultan Arumpone, Ande Pabenteng.

⁷ Drooglever-Schouten, *Op.Cit.*, vol. 11, pp. 730 f., arsip Nopember 1947.

⁸ *Requisitoir* adalah tuntutan hukuman oleh jaksa atas seorang terdakwa di depan persidangan pengadilan.

⁹ Muchtar Lutfi adalah mantan Digulis yang baru saja dibebaskan dan menjadi anggota Parlemen NIT mewakili Makassar.

¹⁰ Drooglever-Schouten, *Op.Cit.*, vol. 12, pp. 654 ff., arsip 30 Januari 1948.

¹¹ *Ibid.*, vol. 9, arsip 1 Mei 1947.

Tentang situasi di Maluku Utara, de Vries mencatat bahwa keamanan di wilayah ini agak terganggu dengan adanya berita bahwa sebuah perahu yang dipersenjatai telah memasuki kepulauan Sula. Dalam bulan April 1947, sebuah perahu Filipina yang dilengkapi senjata api telah berkunjung ke pantai utara pulau Taliabu dan awak perahu itu mendemonstrasikan pemasangan sejumlah ranjau dan bom, yang menimbulkan kecemasan di kalangan rakyat Taliabu.

Selain infiltrasi perahu-perahu Filipina, di Galela juga timbul ketidaktenangan yang dilakukan mantan Heiho pada 1946. Pimpinan orang Jawa dan Sumatera bekas Heiho telah ditahan untuk mencegah propaganda pro-republik kepada rakyat. Para mantan Heiho ini menggali senjata-senjata Jepang yang ditanam di dalam tanah serta menyelami Danau Galela untuk mencari senjata yang dibuang ke dalamnya. Mereka berhasil mengangkat sejumlah senapan mesin pesawat terbang dan mendapatkan pelbagai senjata peninggalan Sekutu yang diselundupkan dari Morotai. Dalam bulan April 1947, ribuan mantan Heiho direpatriasi. Mereka merupakan otak pelanggaran keamanan yang laten di Keresidenan Maluku Utara.

Di Ambon, sebagai reaksi atas tindakan-tindakan Belanda, telah berdiri Partai Indonesia Merdeka (PIM) yang dipimpin Pupella, seorang pro-Republik yang militan. Perjanjian Linggarjati juga telah mendorong berdirinya partai politik yang pro-RI ini. PIM semakin menggebu-gebu aktivitasnya setelah kembalinya dr. Sitanala, seorang republikan dan politikus terkenal sejak sebelum Perang Dunia ke-2. PIM mengangkat Sitanala sebagai “Bapak Tanah Air.”

Di Papua, seorang pejuang republik, S. Ratulangi, diasingkan di pulau Yapen. Tetapi, ia membawa pengaruh buruk bagi keamanan. Residen Papua melaporkan bahwa sejak dua bulan terakhir, rakyat di Wandamen dan Biak meneriakkan yel-yel “merdeka.” Di Jayapura muncul upaya melawan pemerintah dengan cara menjatuhkan wibawanya. Dalam bulan Januari dan Maret 1947, telah ditahan sepuluh orang komisaris Komite Indonesia Merdeka (KIM).¹² Sementara di Gorontalo dan Donggala, kaum republikan memberikan reaksi terhadap Perjanjian Linggarjati dan menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak lebih dari simbol akal-akalan Belanda.

Di Ternate sendiri, PI menggembar-gemborkan kepada masyarakat bahwa Perjanjian Linggarjati adalah praktek akal busuk Pemerintah Kolonial Belanda untuk memecah-belah bangsa Indonesia. Sementara di Minahasa, Sam Ratulangi, dalam pengarahannya kepada Kongres Minahasa pada 21 Nopember 1946, menyatakan bahwa Perjanjian Linggarjati hendaknya tidak mempengaruhi cita-cita rakyat untuk merdeka dan berdaulat.

Setelah eksperimennya dengan NIT berhasil, Belanda mengadakan berbagai konferensi di daerah-daerah yang didudukinya untuk membentuk negara-negara bagian yang akan menjadi anggota federasi NIS. Rakyat menamakan negara bentukan Belanda itu sebagai “negara boneka,” karena pembentukannya dilakukan secara sepihak tanpa mendengar kehendak rakyat setempat dan tanpa memedulikan keberatan atau protes RI. Tujuan Belanda membentuk negara-negara bagian tersebut tidak hanya untuk menjadikannya sebagai federasi NIS, tetapi juga untuk melemahkan RI. Belanda berharap, dengan semakin banyak negara boneka yang dibentuk, RI menjadi semakin kecil dan lemah.

¹² *Ibid.*

Demikianlah, pada Desember 1947, Negara Sumatera Timur terbentuk, menyusul Negara Madura pada Februari 1948. Pada saat yang hampir bersamaan terbentuk pula Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Sumatera Timur, dan lainnya. Keseluruhan negara boneka bentukan Belanda berjumlah 15 negara. Hal ini tidak sesuai dengan keputusan Konperensi Malino bahwa NIS hanya akan terdiri dari tiga negara bagian: NIT, Borneo, dan Jawa-Sumatera (RI). Dengan demikian, Belanda telah melanggar keputusan Malino dan Perjanjian Linggarjati. Tetapi, upaya Belanda membentuk negara-negara bagian itu ternyata hanya membawa hasil yang minimal dan sangat terbatas, karena – seperti terbukti kemudian – kemauan baik yang diperoleh dari komprador-kompradornya menghilang dengan segera.

Sangat sulit melegitimasi NIT sebagai sebuah negara yang memenuhi persyaratan formal ataupun material. Menteri Keuangannya, Hamelink, adalah seorang Belanda. Selain menteri-menterinya yang bermasalah, hampir seluruh pejabat yang memegang posisi kunci di bawahnya adalah orang-orang Belanda. Anggaran belanja negara hampir seluruhnya bergantung pada Pemerintah Belanda di Jakarta. Selanjutnya, jabatan penting di daerah-daerah masih dipegang orang-orang Belanda. Di Ternate, misalnya, semua pejabat *onderafdeling* – seperti HPB (*Hoofd van Plaatselijk Bestuur*), *gezaghebber*, *controleur* – masih dipegang orang Belanda. Disamping itu, NIT tidak memiliki mata uang, tentara dan polisi sendiri. Negara ini masih menggunakan mata uang Belanda, tentara KNIL dan polisi Belanda. Bahkan, lagu kebangsaannya pun masih tetap lagu kebangsaan Belanda, “Wilhelmus,” dan benderanya pun masih tetap merah-putih-biru.

Pengiriman Misi Muhibah ke Yogyakarta

Pada 18 Februari 1948, atas usul Mr. Tajuddin Noor, Ketua Parlemen NIT yang pro-RI, Parlemen dan Pemerintah NIT menyepakati pengiriman sebuah misi muhibah (*goodwill mission*) ke Yogyakarta.¹³ Misi muhibah NIT yang dipimpin Mononutu ini bertujuan mempererat hubungan NIT dan RI. Misi ini mula-mula ke Jakarta, dan dengan didampingi Mr. Latuharhary menuju Yogyakarta. Ketika tiba di Yogyakarta, misi tersebut diterima Presiden Soekarno dalam sebuah upacara resmi. Selain bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden RI, misi muhibah NIT juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP, parlemen sementara RI), Mr. Assaat, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pemerintah RI menekankan perlu dibinanya hubungan baik antara RI dan NIT, serta merencanakan membalas kunjungan ini dengan sebuah misi serupa yang akan dipimpin Mr. Amir Syarifuddin, Perdana Menteri RI ketika itu.

Dalam pertemuan lainnya dengan para pemimpin partai politik, Mononutu menyatakan bahwa kemerdekaan telah berakar kuat dalam sanubari rakyat Indonesia Timur, terutama di kalangan pemuda. Karena itu, Mononutu mengutarakan keinginannya kepada para pemuda Indonesia Timur yang berada di Yogyakarta agar lebih mengutamakan kekuatan semangat semacam itu.

Pada 10 Maret 1948, misi muhibah NIT tiba kembali di Makassar. Kunjungan misi Mononutu ini mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap rakyat di kawasan NIT.

¹³ Mr. Tajuddin Noor sendiri telah menyeberang ke pihak RI sebelum misi muhibah tiba di Yogyakarta. Sebagai seorang republikan, Tajuddin Noor tidak disukai menteri-menteri NIT. Ia menjadi Ketua Panitia Penyambutan ketika Bung Karno dan Bung Hatta serta para menteri RI pulang ke Yogyakarta dari penahanan mereka di Bangka.

Semangat republikan semakin menggelora dan dukungan konkret kepada RI semakin meningkat. Dalam laporan tertanggal 26 Mei 1948, Departemen Dalam Negeri NIT – melalui salah seorang pejabat tingginya, J.E. Hagen – menyatakan misi Mononutu sangat dipengaruhi dan lebih memberi keuntungan politik kepada RI.¹⁴

Rosihan Anwar di Ternate dan Tidore

Seusai menunaikan tugas sebagai pimpinan misi muhibah NIT ke Yogyakarta, pada 29 Maret 1948 Mononutu kembali ke Ternate dengan membawa serta seorang wartawan republikan, Rosihan Anwar, pemimpin redaksi warta sepekan, *Siasat*, yang terbit di Jakarta. Rosihan menulis sebuah artikel dalam *Menara Merdeka* yang memuji PI dan rakyat Maluku Utara dalam perjuangan kemerdekaan. Ia juga memuji *Menara Merdeka* yang kritis dan berani mengungkapkan kebenaran pada saat-saat yang sulit dan menentukan.

Setelah mengadakan berbagai pertemuan dengan pimpinan PI dan tokoh masyarakat lain, Rosihan didampingi Mononutu mengunjungi Tidore dan diterima Sultan Tidore di kediamannya. Pada kesempatan tersebut, Sultan Zainal Abidin Syah telah menyiapkan sebuah pertemuan yang dihadiri sekitar 200 tokoh masyarakat dan pimpinan PI Tidore.

Dalam kesempatan berbicara pada pertemuan itu, Mononutu meminta kepada Sultan dan rakyat Tidore agar mengintegrasikan Papua ke dalam Kesultanan Tidore dan jangan sekali-kali melepaskannya. Menurut Mononutu, ada upaya yang sistematis dan semakin jelas dari Belanda untuk memisahkan Papua bukan saja dari NIT, tetapi juga dari Indonesia, setelah NIS berdiri. Sikap Mononutu tentang Papua ini merupakan salah satu program perjuangan politik PI.¹⁵

Mosi Manai Sophian dkk. dalam Sidang BPKNIP

Dalam sidang BPKNIP¹⁶ di Malang, 5 Maret 1947, sejumlah anggota BPKNIP yang mewakili Kalimantan dan Indonesia Timur – yakni Manai Sophian (Sulawesi Selatan), Gusti Mayur (Kalimantan) dan Syaranamual (Maluku) – mengajukan sebuah mosi. Mosi ini mendesak Pemerintah RI segera memperjuangkan kemerdekaan kawasan timur Indonesia, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku serta Papua, dan segera bergabung dengan RI.

Dalam penjelasan atas mosi tersebut, Manai Sophian mengatakan bahwa rakyat di luar Jawa dan Sumatera sudah tidak sabar lagi menantikan pembebasan dan kemerdekaannya. Manai mengeritik Pemerintah RI karena sangat lamban menanggapi kehendak dan suara rakyat itu. Ia mengingatkan tentang keputusan Presiden RI, tertanggal 6 Juni 1946, mengenai fungsionalisasi para gubernur Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara, yang tidak bertentangan dengan Perjanjian Linggarjati.

¹⁴ Drooglever- Schouten, *Op.Cit.*, vol. 13, arsip bulan Maret 1948.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) adalah parlemen sementara RI. Badan ini beranggotakan 47 orang. Untuk daerah-daerah luar Jawa-Sumatera, keanggotaan BPKNIP masing-masing diwakili oleh Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara—ketika itu masih bernama kepulauan Sunda Kecil.

Para penandatanganan mosi juga mengusulkan pembentukan sebuah direktorat pada Departemen Dalam Negeri untuk menangani tugas-tugas daerah luar Jawa, dan pembentukan sebuah delegasi, yang mengikutsertakan unsur-unsur luar Jawa, untuk berunding dengan Belanda di bawah Komisi Tiga Negara. Dalam penjelasan selanjutnya, Syaranamual meminta Pemerintah RI melaksanakan sebuah plebisit bagi rakyat kawasan timur Indonesia untuk memastikan kehendak mereka bergabung dengan RI. Sementara Gusti Mayur meminta Pemerintah RI segera memfungsikan kekuasaannya di kawasan tersebut. Pembicara lainnya juga mencela Konperensi Malino dan Konperensi Denpasar. Menteri Dalam Negeri RI, Wondoamiseno, menjelaskan dalam jawaban Pemerintah bahwa usul-usul yang tertuang dalam mosi tersebut akan diperjuangkan pelaksanaannya, sebab Pemerintah saat itu tengah menyusun rencana bagi daerah-daerah luar Jawa-Sumatera.

Mosi Manai Sophian dan kawan-kawan diterima BPKNIP dan kemudian dijadikan sebagai salah satu kebijakan Pemerintah RI. Mosi ini, dalam kenyataannya, lahir sebagai reaksi atas upaya Belanda membentuk negara-negara bagian dalam wilayah yang telah didudukinya kembali melalui serangkaian konperensi.

Konperensi Swapraja

Pada 12-13 Mei 1948, dilangsungkan sebuah konperensi di Malino yang dihadiri 18 daerah swapraja dari berbagai daerah dalam wilayah NIT. Konperensi ini dipimpin langsung Perdana Menteri NIT, Anak Agung Gde Agung. Wakil Pemerintah Pusat Belanda di Jakarta, dalam hal ini Sekretaris Pemerintahan Swapraja pada Komisariat Mahkota untuk Indonesia Timur, ikut hadir dalam konperensi tersebut.

Hal-hal yang dibahas dalam konperensi ini meliputi hubungan antara masing-masing pemerintah pwapraja, hubungan antara pemerintah dengan NIT dan NIS yang akan dibentuk, serta hubungan antara swapraja dengan Mahkota Belanda. Konperensi akhirnya menghasilkan resolusi berisi 10 butir pokok mengenai berbagai hubungan tersebut. Salah satu butir resolusi, misalnya, menyatakan: "Posisi swapraja di masa depan harus ditetapkan, dan hubungan berbagai swapraja dengan NIT secara individual harus pula ikut ditandatangani oleh Mahkota Belanda. Hubungan swapraja dengan Mahkota Belanda juga harus diatur dalam suatu perjanjian ketatanegaraan yang baru."¹⁷

Situasi Politik Ambon & Meningkatnya Pengaruh GAPKI

Pergolakan politik yang terjadi di Ambon tercermin dari berbagai ideologi partai politik yang ada di sana. Residen Ambon, Visser, dalam sebuah laporan,¹⁸ mengemukakan bahwa dalam kenyataannya sebagian rakyat Ambon – sebagaimana halnya dengan praktek politik sebelum Perang Dunia ke-2 – ingin tetap berada dalam ikatan dengan Nederland dan Oranje. Menurut Visser, ada empat aliran pikiran yang sedang berkembang di Ambon tentang hal ini:

1. Gagasan yang ingin menjadikan Maluku Selatan sebagai Propinsi ke-13 dalam ikatan dengan Kerajaan Belanda, seperti yang dikehendaki oleh Vigelijn dan Nikijuluw.

¹⁷ Drooglever-Schouten, *Op.Cit.*, vol. 13, pp. 297 f.

¹⁸ S.L. van der Wal, *Officiële Bescheiden*, *Op.Cit.*, vol. 7, pp. 798 ff., arsip 1 - 20 Januari 1947.

2. Gagasan yang menginginkan sebuah ikatan dengan Kerajaan Belanda, bukan sebagai propinsi, seperti dikehendaki oleh Metekohy dengan organisasi gabungannya.
3. Gagasan yang menginginkan bergabung dengan NIT, sebagaimana dikehendaki oleh Kapten Julius Tahya.
4. Gagasan yang menginginkan bergabung dengan RI, seperti dinyatakan secara terbuka oleh Pupela dan Reawaru dalam suatu rapat umum PIM di Ambon. Dalam pandangan Residen Visser, PIM melakukan langkah tidak simpatik dengan menampilkan L. Joris, seorang republikan yang baru dibebaskan dari penjara, untuk berbicara dalam rapat umum PIM pada 16 Februari 1947.

Di Saparua telah didirikan sebuah komite untuk mempropagandakan Maluku Selatan yang lepas dari NIT, dipimpin Manusama, pensiunan *posthouder*. Tetapi, dalam persidangan Dewan Maluku Selatan (*Zuid Molukken Raad*), Maret 1947, terjadi kristalisasi gagasan yang menghendaki tetap bergabung dengan NIT. Ada anggota dewan yang menghendaki Maluku Selatan berpisah dari NIT dan membentuk sebuah federasi dengan Maluku Utara dan Papua. Namun, konsep ini ditolak sebagian besar anggota dewan.

Ketika dilakukan pemungutan suara dalam persidangan tersebut, diperoleh hasil berikut:

1. Tetap dalam ikatan dengan NIT – 27 suara.
2. Lepas dari NIT dan membentuk federasi dengan Maluku Utara dan Papua – 3 suara.
3. Abstain – 3 suara.

Sementara itu, partai-partai republikan di seluruh Indonesia Timur yang bergabung dengan GAPKI semakin menguat. GAPKI, yang dipimpin Mononutu, merupakan aliansi politik terbesar dan terkuat di Indonesia Timur. Sebagai sebuah kekuatan oposisi, GAPKI sangat disegani dan diperhitungkan Pemerintah NIT.

Melihat kenyataan semakin meningkatnya kekuatan republikan di NIT, dalam surat tertanggal 10 Januari 1948 yang ditujukan kepada van Mook, Presiden Sukawati menyarankan agar di dalam senat NIT yang akan dibentuk perlu disediakan tempat bagi orang-orang pro-Republik yang telah memperdengarkan suaranya dengan nyaring dalam Konperensi Malino dan Denpasar.

Orang-orang pro-Republik yang perlu diakomodasi, menurut Sukawati, adalah Chasan Boesoirie dari Maluku Utara dan Senduk dari Sulawesi Utara. Kedua tokoh ini dipandang Sukawati memiliki peran dan pengaruh yang cukup besar di daerahnya masing-masing. Pentingnya penempatan kedua tokoh tersebut dalam senat NIT – walaupun merupakan tindakan “salah pilih dan tidak tepat” – lebih disebabkan oleh tuntutan situasi politik. Dengan pengangkatan kedua orang itu sebagai anggota senat, propaganda unitarianisme yang selama ini dilakukannya dapat diredam.¹⁹

Sementara itu, Departemen Dalam Negeri NIT, dalam laporan politik tertanggal 2 Oktober 1948, mengemukakan tuduhan bahwa GAPKI yang dipimpin Mononutu merupakan biang keladi sosialisasi dan aktualisasi gagasan pro-Republik di seluruh wilayah NIT. Di Manado, suatu rapat umum yang diselenggarakan BNI (Barisan Nasional Indonesia) pimpinan Dauhan telah menghadirkan Ketua PI dan GAPKI, Mononutu, sebagai pembicara bersama Lasut

¹⁹ Drooglever- Schouten, *Op.Cit.*, vol. 12, pp. 493 f., arsip no. 237.

dan Manoppo. Kesemua pembicara ini adalah orang-orang republikan. Sementara di Ternate, para pemimpin PI dalam berbagai rapat umum menyerukan kepada rakyat Maluku Utara agar senantiasa mewaspadai politik NIT.

Ketua PI, Mononutu, telah berbicara dengan pimpinan Partai Kedaulatan Rakyat pada 18 dan 19 Juli 1948 di Makassar. Dalam pembicaraan tersebut dibahas perlunya pendekatan NIT kepada RI, ketimbang kepada Batavia. Bahkan, PSII dan organisasi non-politik, Muhammadiyah, ikut mensosialisasikan gagasan pro-Republik kepada rakyat di berbagai daerah NIT.

Sementara itu, Gubernur Maluku, Mr. Latuharhary, menulis sebuah artikel berjudul “Umat Islam Maluku” dalam majalah Islam *Hikmah* yang terbit di Jakarta. Dalam artikel ini, Latuharhary menyeru umat Islam Maluku agar bahu-membahu dengan umat Nasrani untuk memadu sebuah persaudaraan yang kukuh guna *memenangkan* RI. Imam Besar Masjid Ambon, Abdul Kadir Hatala, dan seorang tokoh Islam lainnya, Abdul Syukur, menyambut dengan penuh antusias seruan Gubernur Maluku itu.²⁰

Pemberontakan Bersenjata di Maluku Utara

Heiho

Seusai Perang Dunia II, semua anggota Heiho asal Jawa dan Sumatera – yang selama perang ditempatkan di berbagai konsentrasi pertahanan Jepang di Kao, Wasile, Hatetabako, Tobelo dan Galela – dikumpulkan di Galela berdasarkan perjanjian Sekutu-Belanda, sambil menunggu kesempatan untuk mengembalikan mereka ke tempat asalnya masing-masing. Jumlah mantan Heiho itu sebanyak 3000 orang. Mereka dilokalisasikan di dua perkampungan besar di pedalaman Galela: di Ngidiho, Makete, dan sekitarnya. Para mantan Heiho itu dibagi ke dalam kesatuan-kesatuan setingkat kompi dan dipimpin seorang komandan. Kompi mereka disebut sesuai nama komandannya, sehingga ada kompi Slamet, Sumadi, Hamid, Sugiri dll. Seluruh personil Heiho ini dipimpin Jasmin dan Mochtar. Di antara para Heiho juga terdapat banyak mantan anggota KNIL (tentara Belanda), dan beberapa di antaranya telah meraih pangkat Bintara.

Pada bulan Maret 1946, suatu pertemuan rahasia di antara pimpinan Heiho dan komandan-komandan kompi telah membidani lahirnya organisasi GATI (Gabungan Tentara Indonesia). Untuk publikasi kepada publik, GATI disebutkan sebagai “Gabungan Tani Indonesia.” Di pucuk pimpinan GATI, terdapat dua putra lokal, masing-masing Yacub Sonda (Ternate) dan Yasin Gamsungi (Galela). Untuk memperoleh legitimasi organisasi “tan” tersebut, satu bulan setelah pembentukannya Mochtar dan Yasmin disertai Jacob Sonda menghadap Sultan Ternate sebagai Residen Maluku Utara dan mengajukan permintaan bantuan alat-alat pertanian. Sultan memenuhi permintaan mereka, dan mereka kembali ke Galela dengan membawa sejumlah alat alat pertanian seperti cangkul, kapak, dan parang.

Tetapi, alat-alat pertanian tersebut tidak dipakai untuk bertani, melainkan untuk menggali senjata-senjata peninggalan tentara Jepang semasa Perang Dunia II. Sementara itu, Mochtar dan Jasmin juga mengerahkan anak buahnya menyelami danau Galela dan berhasil memperoleh sejumlah senjata serta amunisi peninggalan Jepang yang ditenggelamkan di danau tersebut.

²⁰ *Ibid.*

Pihak Belanda telah mengetahui kamouflase dan upaya-upaya pimpinan GATI tersebut. Kepala Staf Angkatan laut Hindia Belanda, Laksamana Pinke melaporkan dalam suatu rapat Dewan Militer tertanggal 8 Mei 1946, bahwa di Galela terdapat banyak senjata dan amunisi Jepang yang dipendam dalam laut dan danau, tetapi Angkatan Laut tidak pernah melakukan inventarisasi.²¹ Dengan bersenjatakan bedil dan amunisi Jepang tersebut, pasukan Heiho berencana menyerbu Pos Polisi dan KNIL di Tobelo, setelah itu menyerang Morotai. Hari H-nya ditetapkan 29 April 1946. Tetapi, pada 21 April 1946, dua kompi tentara Belanda dari Morotai dan satu kompi dari Tobelo melakukan penggerebekan dan menangkap pimpinan GATI beserta para komandan kompi, termasuk Yakub Sonda, orang Ternate satu-satunya yang ikut diciduk. Semua mereka ditahan dalam sebuah rumah tahanan yang khusus dibangun untuk itu di kampung Towara Galela, yang dipagari dengan kawat berduri dan diberi aliran listrik. Menurut Yacub Sonda, kegagalan ini karena pengkhianatan yang dilakukan orang dalam Heiho sendiri.

Pemberontakan Haji Salahuddin²²

- Haji Salahuddin dan Pembentukan “SI”

Haji Salahuddin (selanjutnya disingkat HS) dilahirkan di desa Gemia Patani, pada tahun 1874. Pada 1928 ia masuk SI merah, tetapi lolos dari penangkapan pemerintah Belanda ketika terjadi pemberontakan PKI. Pada 1938, ia bergabung dengan PSII dan duduk dalam kepengurusan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) bersama M. Arsyad Hanafi, M.S. Djahir, A.S. Bachmid dan lainnya.

Karena kegiatan politiknya ia dipenjarakan di Nusakambangan, dan pada 1941 dipindahkan ke Digul. Oleh Jepang ia dibebaskan pada 1942 dan memilih untuk sementara waktu menetap di Sorong. Pada 1946, pindah ke kepulauan Gebe kemudian ke Patani. Di pulau Gebe, kawasan Halmahera Timur, inilah ia mendirikan sebuah organisasi keagamaan Islam bernama *Sarikat Jamiatul Iman wal Islam*. Di kalangan pengikutnya, organisasi ini terkenal dengan nama *Sarikat Islam* (SI). Tujuannya: mempertahankan agama Islam dan Negara Republik Indonesia di bawah Bung Karno dan Bung Hatta yang baru saja diproklamasikan.

Tugas paling utama SI pada masa awal berdirinya adalah menyebarluaskan proklamasi RI. Hal ini dilakukan Haji Salahuddin sejak masih berada di Kepulauan Raja Ampat dan Sorong. Setelah SI terbentuk, ia mulai menyebarluaskan cita-cita proklamasi tersebut. Penduduk dari empat desa di pulau Gebe berbondong-bondong menjadi anggota SI. Kegiatan HS dan pengikut-pengikutnya itu dalam waktu singkat telah merambah ke Distrik Patani.

²¹ Drooglever-Schouten, *Officiele Beschleiden Betreffende de Nederland-Indonesische Betrekkingen*, Vol.4 pp.399. arsip 31 Maret-11 Juni 1946.

²² Sumber untuk uraian dalam paragraf-paragraf berikut adalah:

1. Situatierapport no.50, 15-22 Pebruari 1947, termuat dalam: van der Wal, S.L.: *Officiele Bescheiden Betreffende de Nederland- Indonesische Betrekkingen*, deel 7, pp.376. s'Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1971-1988.
2. Penuturan Haji Salahuddin Faruk, satu-satunya pengikut Haji Salahuddin yang tersisa dan masih hidup, dalam wawancaranya dengan penulis di rumahnya di Patani, 26 Mei 2006. Terimakasih kepada narasumber tersebut, dan kepada Mahmud Umar SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, yang telah menyertai penulis dalam perjalanan ke Patani, yang jauh dan melelahkan, serta membantu penulis mencatat wawancara dengan narasumber tersebut di atas.

Pada bulan Desember 1946, rakyat Patani mengirim sebuah perutusan yang terdiri dari Imam, Sangaji (Kepala Distrik=Camat), Kepala Adat, Kapita Banemo dan beberapa tokoh masyarakat Patani terkemuka untuk bertemu dengan HS, sekaligus memboyongnya ke Patani. Setelah berlangsung pembicaraan yang serius dan alot (karena rakyat Gebe menolak perpindahan pusat pimpinan SI dari Gebe ke Patani), suatu kompromi akhirnya tercapai. Pimpinan SI asal Gebe akan menyertai Haji Salahuddin pindah ke Patani atas tanggungan rakyat Patani. Di akhir bulan Desember 1946 itu juga HS dan tokoh-tokoh SI Gebe pindah ke Patani, sekaligus memindahkan Pimpinan Pusat SI dari Gebe ke Patani.

Hanya dalam waktu 3 minggu, seluruh rakyat kecamatan Patani telah menjadi anggota SI. HS dan pimpinan inti SI bekerja keras untuk merekrut rakyat Patani. Rakyat Patani memberikan respons yang luar biasa. Tiap hari berdatangan utusan dari desa-desa yang melakukan baiat dan menyatakan *siap mati* untuk Islam dan Republik Indonesia. Bahkan, desa Siden Popo, yang seluruh penduduknya beragama Kristen, diwakili dua kepala keluarga dalam SI. Mereka juga menyatakan siap mati untuk RI.

Jumlah anggota SI hingga akhir bulan Januari 1947 telah mencapai lebih dari 3000 orang, baik laki-laki maupun perempuan, dari distrik pulau Gebe dan Patani. Bahkan, anak-anak yang berangkat remaja ikut pula bergabung ke dalam SI.²³ HS sangat sadar bahwa perjuangan SI yang dikaitkannya dengan Negara RI dan fatwa-fatwanya yang mengharamkan rakyat bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda akan membawa resiko besar. Oleh sebab itu, Ia memerintahkan pengikutnya mempersenjatai diri, dan membentuk sayap militer yang dipimpin wakil ketua SI, Kadhi Patani Abdul Hadi. Abdul Hadi merekrut pandai besi yang ada di Patani, dan dengan bekerja siang malam, sebanyak 600 senjata tradisional mulai dari pedang, parang, badik, tombak, hingga panah, siap digunakan. Anggota-anggota sayap militer HS terdiri dari laki-laki maupun perempuan yang dipersenjatai. Bahkan, anak-anak di atas 12 tahun juga dipersenjatai.

- *Mesianisme ataukah gerakan politik berbaju Islam?*

Pemerintah Belanda dalam laporan situasinya di awal Pebruari 1947 menyebutkan gerakan Haji Salahuddin dengan SI-nya adalah sebuah gerakan keagamaan (mesianisme) Islam yang *fanatik*. Sudut pandang pemerintah Belanda terfokus pada kharisma HS berikut ritus-ritus agama yang diajarkannya, yang menyimpang dari kebiasaan. Tetapi pemerintah kolonial Belanda sengaja menyembunyikan sisi lain dari aktivitas HS dan pengikutnya tentang revolusi Indonesia yang tengah berlangsung.

Dakwah-dakwah HS tentang Republik proklamasi yang baru berdiri, dan perlawanan SI terhadap para penentangannya, telah menyadarkan rakyat Halmahera Timur, khususnya di distrik Gebe dan Patani, bahwa membela dan menyelamatkan RI adalah sebuah kemestian.

Ciri keagamaan (Islam) gerakan HS dengan SI-nya memperoleh porsi cukup penting dalam gerakan HS. Ketika mulai tiba di Gebe dan SI mulai dikembangkan, langkah pertama HS adalah membangun sebuah mesjid bernama Nurul-Iman, yang menjadi markas gerakan SI. Seluruh gerakan HS dipusatkan di mesjid ini. Hal serupa juga dilakukan, ketika Pimpinan Pusat SI dipindahkan ke Patani. Usai shalat 5 waktu, dilakukan kegiatan dakwah Islam dengan porsi politik yang terkadang menyita sebagian besar waktu.

²³ Van der Wal, *Officiële Betrekkingen*, *Op.cit.*

HS juga mengajarkan berbagai ritual keagamaan seperti zikir dan doa yang dibaca secara bersama-sama. Tetapi, yang paling menarik dari gerakan HS adalah berzikir mengelilingi kota Patani seusai shalat shubuh. Lirik zikir itu, dalam bahasa Indonesia, berbunyi: *Amankan Islam, amankan syariat Islam, amankan Republik Indonesia! Jangan takut mati dan luka, pintu surga sudah terbuka!*

Zikir dalam ritual agama Islam selalu diucapkan di dalam masjid, perumahan atau tempat terbuka lainnya sambil duduk. Dan semua zikir selalu diucapkan dalam bahasa Arab yang berisikan takbir, tahmid, atau tahlil kepada Allah atau Salawat kepada nabi Muhammad. Sementara zikir yang diajarkan Haji Salahuddin kepada pengikut-pengikutnya adalah dalam bahasa Indonesia dan dilakukan sambil berjalan mengelilingi kota Patani. Zikir ini lebih menyerupai kidung perjuangan, ketimbang zikir untuk mendekatkan diri kepada Khalik.

Di samping dakwah Islam, pada setiap kesempatan HS selalu menjelaskan mengapa SI mendukung Negara RI di bawah pimpinan Bung Karno dan Bung Hatta. Ia memfatwakan wajib hukumnya bagi orang Islam mendukung Negara RI dan haram hukumnya bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Kepada para pengikutnya, baik yang muslim maupun yang bukan, ia minta agar mereka tetap bersatu dan melakukan *ketidakpatuhan* kepada pemerintah Belanda.

Hal yang patut dicatat adalah pernyataan HS kepada pengikutnya bahwa Halmahera Timur (pulau Gebe dan Patani) adalah wilayah kekuasaan RI yang berpusat di Yogyakarta. Karena itu, sejak tiba di pulau Gebe, HS telah menyatakan bahwa rakyat Halmahera Timur adalah warga Negara RI, dan setiap perlawanan terhadap RI harus ditangkal dan dilawan. HS juga mengidentikkan perlawanan terhadap dirinya atau terhadap gerakan SI yang dipimpinnnya sebagai perlawanan menentang pemerintah RI.

Dalam implementasinya, gerakan HS mempunyai kutup yang dapat diidentifikasi sebagai gerakan menentang Belanda yang diberi baju Islam. Cap yang diberikan pemerintah Belanda bahwa *gerakan Haji Salahuddin* adalah sebuah gerakan keagamaan sebenarnya bertujuan membentuk opini publik yang keliru dengan menyembunyikan segi-segi politik yang ingin dicapai gerakan HS melalui SI. HS sendiri telah menginsyafi akibat-akibat yang akan dihadapi oleh gerakannya. Karena itu, ia memberi perintah kepada pembantu-pembantunya untuk memproduksi senjata-senjata tradisional agar rakyat dapat mempersenjatai diri mereka menghadapi kemungkinan terburuk.

- Upaya Belanda menumpas gerakan Haji Salahuddin

Eksodus HS dan pengikut-pengikutnya dari Gebe ke Patani, dan dakwahnya selama beberapa bulan berada di pulau itu, telah menimbulkan kecurigaan pemerintah lokal. Kepala distrik Gebe, Mohammad Yasin melaporkan semua aktivitas HS dan SI-nya, berikut eksodusnya ke Patani dengan memboyong tokoh-tokoh masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, HPB (*Hoofd van Plaatselijk Bestuur* = Kepala Pemerintah Setempat) Weda yang dijabat seorang Belanda mengutus Haji Gani ke Patani untuk mengecek sekaligus mematai-matai aktivitas HS. Haji Gani berhasil bergabung dengan HS dan mengikuti kegiatan SI langsung di jantung organisasi tersebut.

Tetapi, kecurigaan mulai timbul ketika dilaporkan kepada HS bahwa Haji Gani juga melakukan wawancara dengan beberapa tokoh SI asal Gebe untuk memperoleh informasi bagaimana aktivitas HS semasa di Gebe. Ketika laporan itu sampai pada HS, ia memerintahkan

agar Haji Gani dihadapkan kepadanya untuk klarifikasi. Namun, Haji Gani menghilang dan menurut keterangan orang yang melihatnya, ia naik perahu menuju Weda.

Kadhi Abdul Hadi, pemegang komando sayap militer gerakan HS memerintahkan agar dilakukan pengejaran. Haji Gani akhirnya tertangkap di tengah laut antara Patani-Weda. Ketika diinterogasi, Haji Gani mengakui bahwa ia dikirim HPB Weda untuk memata-matai gerakan HS dan SI-nya. Usai diinterogasi, Haji Gani dieksekusi dan mayatnya dipendam ke dasar laut.

Tim serupa juga dikirim SI ke pulau Gebe untuk menculik kepala distrik Mohammad Yasin, seorang guru dan beberapa orang lainnya. Seluruhnya berjumlah 7 orang dan menjalani eksekusi seperti yang dijalani Haji Gani. Jumlah yang dieksekusi gerakan HS dengan demikian adalah 8 orang, bukan 25 orang seperti diumumkan pemerintah Belanda dalam laporan situasinya.²⁴

Penangkapan Haji Salahuddin

Pada 14 Pebruari 1947, sebuah peleton polisi dikirim HPB ke Patani dengan sebuah *landing boat*. Jumlah anggota kesatuan polisi sebanyak 15 orang dipimpin seorang pembantu inspektur bernama Paparang. Tugas misi ini menangkap HS. Kapal yang membawa kesatuan polisi tersebut tiba di waktu malam dan menurunkan pasukannya beberapa kilometer dari Patani. Penduduk Patani tidak tahu bahwa ada pasukan polisi yang telah mendarat di ujung kampung mereka.

Di pagi buta usai shalat subuh, jemaah masjid mendengar bunyi rentetan tembakan senjata api. Pengikut HS berlari keluar dan mencoba melawan dengan senjata kelewang serta parang. Pertempuran yang tidak seimbang antara pengikut-pengikut HS dengan kesatuan polisi Belanda itu terhenti, ketika kaum perempuan Patani yang berjumlah kurang lebih 600 orang menyerbu pasukan polisi dengan pedang terhunus dan parang. Karena perempuan penyerbu demikian banyak jumlahnya, pasukan polisi itu mundur. Perempuan-perempuan Patani itu terus memburu mereka sehingga pasukan polisi itu lari terbirit-birit naik ke kapalnya, dan meninggalkan pantai Patani. Di antara perempuan yang ikut menyerbu polisi Belanda tersebut, terdapat Hajjah Aisah, ibunda dokter Abdul Gafur, mantan menteri Pemuda dan Olahraga semasa pemerintahan Presiden Suharto. Korban pertempuran tersebut 11 orang tewas dan 8 orang luka berat.

Upaya HPB Weda menangkap HS menemui kegagalan padahal HS dan pimpinan SI lainnya berada dalam masjid tidak jauh dari medan pertempuran. Kegagalan penangkapan HS disebabkan perempuan Patani masuk ke dalam kancah pertempuran. Menurut rakyat Patani, peristiwa itu membuktikan bahwa perempuan jauh lebih berani dari pada laki-laki.

Setelah polisi Belanda angkat kaki dari Patani, HS memerintahkan para pengikutnya tetap menyandang senjata untuk mengantisipasi kemungkinan yang lebih buruk. HS juga memberitahukan pengikutnya bahwa serangan berikutnya yang jauh lebih besar tinggal menunggu waktu. Dan waktu yang dinantikan itupun tiba.

Pada 17 Pebruari 1947, jam 16.00 sore, kapal KM Tidor lego jangkar di pelabuhan Patani. Dua orang berpakaian adat segera mendarat dan menemui HS di mesjid dan menyampaikan

²⁴ Van der Wal: *Officiële Bescheiden*, *Op.cit.*

pesan: *Sultan Ternate M. Jabir Syah ingin bertemu.*²⁵ HS merasa memperoleh kehormatan besar dan menyatakan kesediannya. Jam 16.30 Sultan Ternate mendarat dan langsung menuju mesjid diiringi *Hulptroepen* (pembantu tentara) dalam jumlah besar. Ketika pembantu-pembantunya mengkonfirmasi bahwa Sultan disertai sejumlah pasukan tentara, HS memerintahkan agar mereka duduk di sepanjang jalan menuju mesjid dan menjadikan senjata mereka sebagai alas tempat duduk. Tidak boleh ada kericuhan atau tindak kekerasan apapun, demi penghormatan mereka kepada Sultan. Dengan mengenakan jubah warna jingga, HS dan pembantu-pembantunya menerima Sultan di teras depan mesjid. Setelah bersalaman, terjadi dialog singkat:

Haji Salahuddin: “Apa maksud kedatangan Yang Mulia?”

Sultan: “Saya datang untuk menjemput dan membawa Anda ke Ternate. Kita berangkat sekarang juga, karena Sultan Tidore tengah menunggu Anda di Ternate!”

Dengan menggandeng tangan HS, Sultan dan pasukan *Hulptroepen* segera meninggalkan mesjid. HS sempat berbicara kepada pengikutnya agar mereka tetap tenang dan menjaga keamanan, sembari meneriakkan “Hidup Islam, hidup SI, hidup Republik Indonesia!!”

Sultan Ternate berseru kepada pengikut Haji Salahuddin agar menyerahkan senjatanya untuk dikumpulkan. *Hulptroepen* mengumpulkan senjata tersebut dan menaikkan ke atas kapal. Sebanyak 2000 senjata rakitan dan berbagai jenis parang serta kelewang berhasil disita dan dinaikkan ke kapal. Sebanyak 200 orang pengikut Haji Salahuddin, baik laki-laki maupun perempuan, terutama anggota-anggota dan pimpinan sayap militernya, dengan paksa dinaikkan ke kapal. Ketika bedug mesjid ditabuh dan azan magrib dikumandangkan pada jam 18.30, KM Tidore angkat sauh dan pimpinan SI segera diborgol, sementara anggota sayap militer dan para pengikut lainnya diikat tangannya dengan seutas tali. Pada pagi hari 19 Februari 1947, KM Tidore merapat di dermaga Ternate, dan para tahanan diturunkan kemudian dijebloskan ke rumah tahanan (penjara).²⁶

Berakhirnya gerakan SI

Sejak penangkapan HS dan pimpinan SI lainnya, kegiatan organisasi ini praktis berakhir. Tidak ada lagi dakwah seusai shalat, dan zikir keliling kota Patani setiap lepas shalat subuh tidak lagi terdengar. Rakyat Patani dan Gebe seperti anak ayam kehilangan induk, dan mereka hanya pasrah menanti kabar bagaimana nasib HS dan para pemimpin SI lainnya. Dari kawan-kawan mereka yang pulang kampung, mereka memperoleh informasi bahwa Haji Salahuddin dan enam pimpinan teras SI telah dijadikan terdakwa.

Proses persidangan Haji Salahuddin dan pimpinan SI lainnya

²⁵ Sultan Ternate M. Jabir Syah ketika itu menjabat Residen Maluku Utara dan Conica (Commander Netherland Indies Civil Administration).

²⁶ Drs. Idrus Hasan, salah seorang pemuda dengan melongo, menyaksikan Haji Salahuddin dan pengikut-pengikutnya turun ke dermaga, tanpa dapat berbuat sesuatu. Idrus Hasan datang ke dermaga untuk menjemput HS.

Pada bulan Juli 1947, dimulailah proses persidangan Pengadilan Negeri Ternate yang dilangsungkan di Tidore.²⁷ Duduk sebagai terdakwa HS dan enam pimpinan SI yang memimpin sayap militer. Mereka dituduh secara bersama-sama menghasut rakyat melakukan makar, serta secara tanpa hak ingin merobohkan kekuasaan dan pemerintah yang sah dan menggantinya dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Pada 13 September 1947 HS dan keenam pemimpin lainnya *dinyatakan bersalah* dan dijatuhi hukuman. Haji salahuddin dihukum mati, Khadi Abdul Hadi dihukum 12 tahun penjara, sementara kelima pimpinan sayap militer lainnya masing-masing dihukum dari 6 hingga 9 tahun penjara. Kadhi Abdul Hadi menjalani hukumannya di penjara Nusakambangan, sementara terhukum lainnya menjalani hukuman mereka di penjara Manado dan Ambon.

- *Pledoi dan Eksekusi Haji Salahuddin*

Dalam pidato pembelaannya (pledoi) di depan sidang Pengadilan, HS menyampaikan pledoinya (tanpa teks), yang pokok-pokoknya dapat disarikan sebagai berikut²⁸:

1. Pemeriksaan dirinya oleh Pengadilan Negeri Ternate di Tidore tidak sah, sebab pengadilan ini sebuah pengadilan kolonial. Hanya pengadilan RI yang berwenang memeriksa dan menyatakan dirinya dan semua kawan-kawannya bersalah atau tidak.
2. Haji Salahuddin mengakui telah mengeksekusi 8 orang, termasuk kepala distrik Gebe Moh. Yasin dan Haji Gani, karena mereka telah berkhianat dan bekerja untuk musuh RI. Tindakan ini dilakukan untuk dan atas nama Pemerintah RI. Kawasan Halmahera Timur adalah wilayah kedaulatan RI, dan ia bertindak sebagai *pemegang kekuasaan darurat*, selama Pemerintah Pusat RI belum menetapkan lain dan mencabut mandatnya.²⁹
3. Kerjasama kesultanan Ternate dan Tidore dengan pemerintah pendudukan Belanda tidak sah, karena bertentangan dengan Proklamasi 17-8-1945. Itu sebabnya, ia memerintahkan rakyat tidak patuh kepada kedua kesultanan tersebut. Hanya Pemerintah RI yang harus dipatuhi, tidak kepada lainnya.
4. Menyelamatkan RI berarti menyelamatkan Islam. Mengkhianati RI berarti mengkhianati Islam.

Atas putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan hukuman mati, HS tidak mengajukan banding maupun kasasi. Menurut HS, pengadilan banding dan kasasi semacam itu tidak sah. Kejaksaan akhirnya mengajukan grasi demi hukum, karena peraturan yang berlaku ketika itu menetapkan suatu putusan hukuman mati tidak dapat dieksekusi tanpa grasi Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Pada 6 Juni 1948, Kejaksaan Ternate mengeksekusi putusan Pengadilan Negeri, setelah Letnan Gubernur Jenderal van Mook menolak permohonan grasi Haji Salahuddin yang diajukan Kejaksaan. Haji Salahuddin dibawa ke lapangan tembak militer di Skip Ternate, dan tepat jam

²⁷ Untuk daerah Maluku Utara, hanya terdapat satu Pengadilan Negeri (Landraad) yang berkedudukan di Ternate. Pengadilan serupa dibentuk pula di Morotai ketika sekutu mendarat di sana dalam bulan September 1944.

²⁸ Menurut penuturan Drs. Idrus Hasan yang mengikuti sidang pengadilan tersebut.

²⁹ Tidak dijelaskan dari siapa Haji Salahuddin memperoleh mandat tersebut.

06.00 Haji Salahuddin dieksekusi di depan regu tembak. Jasad almarhum kemudian dimakamkan di pekuburan Islam Ternate.

Haji Salahuddin seorang pemimpin kharismatik dan sangat berwibawa. Para pengikutnya percaya bahwa ia mempunyai indera keenam. Ketika kapal KM Tidor yang membawanya ke Ternate angkat sauh dari pelabuhan Patani, selama 30 menit jangkar kapal itu katut dan tidak mau terangkat. Haji Salahuddin minta kepada Sultan agar borgolnya dilepaskan sementara waktu, dan begitu borgolnya lepas, kapal Tidor dengan mulus mengangkat sauhnya.

Ketika peleton polisi Belanda di Weda telah melarikan diri dari Patani karena serbuan kaum perempuan, Haji Salahuddin menyatakan kepada pengikutnya bahwa suatu pasukan militer Belanda yang lebih besar akan tiba di Patani. Hanya 2 hari setelah ucapannya itu, KM Tidor dan Sultan Ternate tiba dengan membawa dua kompi pasukan Hulproepen dari Morotai. Menjelang eksekusinya dia pernah menyatakan kepada salah seorang keluarganya yang menjenguk untuk kali terakhir, bahwa bersama dia akan pergi besok pagi menghadap Allah seorang besar dari kerajaan Tidore. Keesokan harinya permaisuri Sultan Zainal Abidin wafat bersamaan waktu dengan eksekusi atas dirinya.

Pemberontakan Yasin Gamsungi

Dalam pimpinan GATI (Gabungan Tentara Indonesia) sejak awal dibentuk, duduk dua orang putera daerah: masing-masing Yacub Sonda (Ternate) dan Yasin Gamsungi (Galela). Penempatan kedua putra lokal itu dimaksudkan untuk memperoleh dukungan rakyat pribumi, dan barangkali untuk regenerasi – menjadikan mereka sebagai “ahli waris” yang akan melanjutkan gerakan – setelah para mantan Heiho meninggalkan Maluku Utara.

Ketika pasukan Belanda menyerbu pemukiman Heiho dan menangkap para pemimpin GATI pada tanggal 21 April 1946, Yasin Gamsungi merupakan satu-satunya pimpinan GATI yang berhasil meloloskan diri. Setelah para Heiho dievakuasi ke Jawa pada bulan Januari 1947 dengan menggunakan kapal KPM, Yasin segera mereorganisasi kembali dan membentuk GATI jilid II. Yacub Sonda, setelah dibebaskan dari penjara, pulang ke Manado dan tidak pernah kembali ke Galela. Pada GATI jilid II ini, Yasin sendiri terpilih sebagai Ketua, dan Wakil Ketua dijabat Arnold Wiludu. Kepemimpinan GATI juga diperkuat Daniel Bohang, seorang Digulis, dan Saleh Sumati. Sebagai perwakilan di daerah-daerah pesisir ditunjuk M.S. Saway, seorang Kapita dan mantan kepala kampung Soasio Galela, dan Syamsuddin, seorang tokoh pemuda militan untuk wilayah Simau, Toweka-Barataku. GATI berhasil menghimpun lebih dari 250 pemuda yang berasal dari kampung-kampung: Gotalamo, Kira, Dokulamo, Soatabaru, Igobula, Ngidiho, Soakonora, dan Barataku. Latihan-latihan militer dan penyelaman senjata-senjata Jepang di danau Galela mulai dilakukan, sehingga lebih dari 100 anggota GATI dapat dipersenjatai.

Markas GATI ditempatkan di kampung Kira, terletak di pedalaman Galela, dan GATI selanjutnya membangun sebuah basis pertahanan di daerah perbukitan Ira yang disebut Toligoda, berjarak sekitar 10 kilometer dari Kira. Latihan-latihan militer dipusatkan di sekitar basis pertahanan ini.³⁰

³⁰ Wawancara penulis tanggal 4 April 2006 di kampung Dokulamo Galela dengan bekas anak buah Yasin dan anggota GATI. Sebagai narasumber: 1. Abraham Dilago; 2. Manase Dilago; 3. Silawanu Mako; 4. Daud Dam; 5. Hajjah Jamila Dabi-dabi.

- *Upacara pengibaran bendera merah putih*

Di awal Desember 1947, satu kompi pasukan GATI berjumlah sekitar 80 personil berbaris menuju Soasio, ibukota kecamatan Galela. M.S. Saway dan Syamsuddin mengerahkan penduduk dari kampung Soasio, Simau, Toweka, dan Barataku untuk menghadiri upacara yang berlangsung di halaman kantor distrik. Tepat jam 09.00 pagi, pasukan Yasin membentuk barisan dan dengan diiringi lagu Indonesia Raya, bendera merah putih untuk pertama kalinya dikibarkan di Galela. Mohammad Saleh, Kepala Sekolah dasar Soasio, memimpin lagu Indonesia Raya.

Usai pengibaran bendera, Yasin yang menyandang sebuah senjata laras panjang dan kelewang Jepang di pinggangnya mulai berpidato dalam bahasa Indonesia pasaran yang mudah dimengerti rakyat selama kurang lebih 20 menit. Pada awal pidatonya Yasin menyatakan, bahwa Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Karena itu, kata Yasin, rakyat Indonesia termasuk rakyat Maluku Utara hanya boleh patuh kepada pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin Presiden Sukarno dan wakil Presiden Hatta. Pemerintah Belanda dan Negara Indonesia Timur (NIT) bukan pemerintah yang sah, sehingga *kitorang* (“kita”) tidak boleh mematuhi. Mengakhiri pidato singkatnya itu, Yasin menyatakan bahwa GATI berdiri di belakang Bung Karno dan Bung Hatta. Yasin menyerukan agar rakyat di daerah ini bersatu di belakang Bung Karno dan Bung Hatta dan bersatu pula melawan kekuasaan Belanda dan Negara Indonesia Timur.³¹

Hanya dua hari setelah upacara pengibaran bendera, Pemerintah Belanda mengerahkan satu peleton polisi dan satu peleton tentara dari Tobelo untuk menyebu markas GATI di Kira. Tetapi, markas itu telah kosong ditinggalkan pasukan Yasin. Di ibukota kecamatan Galela, Soasio, tentara berhasil menangkap Saleh Sumati dan Syamsuddin yang tidak sempat melarikan diri, sementara M.S. Saway berhasil lolos. Di kampung Ngidiho, pasukan polisi berhasil menciduk Daniel Bohang.

Menurut narasumber Abraham Dilago dan Hajjah Jamila Dabi-Dabi – dua anggota pasukan Yasin yang baru mengundurkan diri setelah polisi dan militer Belanda menduduki markas GATI di Kira – aparat Belanda dapat menguasai markas mereka dengan segera, karena sejak lama pihak polisi Belanda telah melakukan infiltrasi ke dalam tubuh GATI dengan menempatkan seorang anggota polisi bernama Simon Jojaga. Dialah yang menyuplai Pemerintah Belanda di Tobelo dengan berbagai informasi mengenai kegiatan-kegiatan GATI.

Sementara itu, seorang kurir bernama Umar yang dikirim Yasin dari markasnya di Toligoda untuk mencari informasi tentang pendudukan tentara dan polisi atas markas GATI dan sekitarnya tiba di kampung Dokulamo sekitar jam 20.00 malam. Tetapi, kurir ini berhasil ditangkap tentara Belanda, karena tidak tahu bahwa tentara dan polisi telah memberlakukan jam malam. Dengan todongan senjata, kurir itu dipaksa untuk menunjukkan jalan ke markas pasukan Yasin di Toligoda pada malam itu juga. Pasukan Belanda tiba di markas pertahanan Toligoda kira-kira jam 03.00 pagi, dan sejam kemudian markas pertahanan itu diserbu dan direbut dalam suatu *serangan fajar*. Setelah terjadi pertempuran, di pagi harinya pasukan Yasin seluruhnya tertawan. Yasin sendiri gugur bersama dua rekannya – Johan Oci dan Johannes Aba. Yang tidak

³¹ Penulis buku ini, termasuk salah seorang yang mengikuti upacara pengibaran bendera tersebut. Sejak peristiwa pengibaran bendera tersebut, rakyat lebih mengenal gerakan Yasin sebagai *gerakan Merah Putih*.

sempat melarikan dari markas dan tewas adalah Kirois Kaeno dan Otmil Bangada. Yang luka serius satu orang dan beberapa lainnya cedera.

Seluruh anggota pasukan Yasin yang tertawan lalu diperiksa, kemudian sebagian besarnya ditahan di Tobelo tanpa dihadapkan ke pengadilan. Hanya 25 orang yang dikirim ke Ternate dan dihadapkan ke pengadilan. Mereka dihukum penjara satu tahun tanpa dikurangi masa tahanan. Ke-25 anggota pasukan Yasin itu praktis menjalani hukuman selama 2 tahun. Mereka baru dibebaskan sebagai tahanan politik, menjelang pengakuan kedaulatan RI pada 27 Desember 1949.

Kunjungan PM NIT ke Ternate

Pada 23 Maret 1948, Perdana Menteri NIT, Anak Agung Gde Agung, mengunjungi Ternate. Ini merupakan kunjungan pertama seorang perdana menteri NIT ke Ternate. Pada malam harinya, sewaktu tengah berlangsung jamuan makan malam untuk Perdana Menteri NIT yang diadakan Residen Maluku Utara di Keraton Ternate, para pemuda dari organisasi Pemuda Indonesia pimpinan Abjan Soleman melakukan pawai obor dan lampiun. Pawai yang memperoleh izin resmi Kepala Pemerintahan setempat (HPB) ini, lebih merupakan unjuk rasa, karena yel-yel yang diteriakkan sangat berbau politik.

Setelah berputar di depan istana, rombongan pawai menuju ke arah selatan kota Ternate. Menurut versi Pemerintah, setiba di depan Benteng Oranje, rombongan pawai mencoba masuk ke dalam benteng, tetapi dihadang tentara KL dan KNIL. Terjadilah perkelahian massal yang menyebabkan sejumlah peserta pawai cedera. Menurut versi para pemuda, tentara KL dan KNIL-lah yang keluar dari benteng dan menghadang mereka di depan benteng. Dalam insiden ini, tentara juga mengobrak-abrik Masjid Falajawa, kampung yang menjadi sarang orang-orang PI dan republikan. Beberapa tentara KNIL, dipimpin Sersan Pieters, mendatangi rumah Mononutu—Ketua PI, yang ketika itu tengah berada di Jakarta – dan membawa pergi sebuah bendera Merah Putih yang terpancang di ruang tamunya. Insiden ini kemudian diprotes keras PI, dan beberapa orang tentara KNIL akhirnya dihukum.³²

Keesokan harinya, 24 Maret 1948, PI menjawab kebrutalan tentara dengan mengadakan sebuah rapat umum dan menuntut penarikan tentara KL dan KNIL dari Ternate. Untuk meredam meningkatnya suhu politik dan mencegah gejolak lebih jauh, Kolonel Sheffelaar datang ke Ternate dari Makassar. Ia meminta maaf kepada PI dan rakyat Ternate, khususnya penduduk Falajawa yang masjidnya diobrak-abrik. Sheffelaar juga menawarkan perbaikan Masjid Falajawa.³³ Tentara yang membuat keonaran akhirnya ditarik dan diganti tentara lain. PI memandang penarikan atau penggantian ini sebagai suatu kemenangan politik yang sangat berarti.

Kongres GAPKI dan Peta Partai Politik NIT

Akhir Maret 1948, PI mengadakan rapat pengurus di Ternate dipimpin M. Arsyad Hanafi, salah seorang Wakil Ketua PI. Setelah membahas situasi politik terakhir, rapat itu memutuskan meningkatkan konsolidasi partai dan menghimpun seluruh potensi serta kekuatan partai yang ada di kawasan NIT guna mendorong Pemerintah NIT lebih dekat kepada RI. Mononutu, yang baru

³² Drooglever- Schouten, *Op.Cit.*, vol. 13, pp. 795 ff., arsip 20 Februari - 4 Juni 1948.

³³ Boesoirie, *Op.Cit.*, p.14.

tiba di Ternate dari Makassar, juga memberikan laporan situasi politik terakhir di ibukota NIT, Makassar, dalam rapat tersebut. Pimpinan PI akhirnya memutuskan Mononutu segera kembali ke Makassar dan mengontak seluruh partai politik untuk sebuah pertemuan konsolidasi dalam rangka menyamakan persepsi dan pandangan politik.

Setelah kembali ke Makassar dan melakukan berbagai kontak, Mononutu mengirim telegram kepada pimpinan PI di Ternate bahwa sebuah kongres partai-partai politik akan diselenggarakan di Makasar pada penghujung April 1948, sesuai yang diputuskan rapat PI di Ternate.

Demikianlah, kongres partai-partai politik itu akhirnya dilangsungkan pada 29 April-3 Mei 1948 di Makassar. Kongres ini dihadiri utusan-utusan partai politik yang anggotanya duduk dalam Parlemen NIT maupun di luar parlemen. Pada pembukaan kongres, yang juga dihadiri para pejabat tinggi NIT dan Belanda, terpancang sebuah spanduk dengan tulisan “Musnahkan Penjajahan.” Spanduk ini kemudian diturunkan polisi tanpa insiden berarti, sekalipun terjadi perang mulut antara panitia kongres dan Kepala Polisi Kota Makassar, yang memerintahkan penurunan spanduk.

Kongres ini berhasil membuahkan keputusan tentang pembentukan sebuah federasi yang diberi nama Gabungan Politik Kebangsaan Indonesia (GAPKI). Mononutu sebagai terpilih Ketua, J.E. Tatengkeng sebagai Wakil Ketua dan Henk Rondonuwu sebagai Sekretaris. Salah satu keputusan lainnya yang dihasilkan kongres adalah memprotes Letnan Gubernur Jenderal van Mook yang terus membentuk negara-negara boneka dalam rangka mendirikan NIS. Kongres memandang upaya van Mook itu bertentangan dengan Perjanjian Linggarjati, serta bertujuan memecah-belah bangsa Indonesia dan melemahkan RI. Bagi GAPKI, RI merupakan modal perjuangan, dan GAPKI hanya taat pada kepemimpinan Soekarno-Hatta.

Berdasarkan aliran dan ideologi yang dianut berbagai partai politik di wilayah NIT, partai-partai non-republikan tidak bergabung dengan GAPKI. Partai PASMO di Ternate, misalnya, menolak bergabung dengan GAPKI, karena masalah ideologi tersebut. Tetapi, seluruh partai berhaluan republikan, yang merupakan kelompok mayoritas di NIT, bergabung dengan GAPKI.

Menurut data yang ada di Departemen Dalam Negeri NIT, jumlah partai yang eksis di dalam wilayah NIT hingga 1 Juni 1948, berikut aliran politik yang dianutnya – yakni antara pro-Republik dan pro-Federalis ala van Mook – dapat ditabelkan sebagai berikut:

Tabel Distribusi Partai Politik dan Alirannya di Wilayah NIT³⁴

<i>Keresidenan</i>	<i>No</i>	<i>Nama Partai</i>	<i>Pimpinan</i>	<i>Aliran</i>
Manado	1.	Barisan Nasional Indonesia (BIN)	G.E. Dauhan	Republikan
	2.	PSII Sulawesi Utara	Y.Intan Permata	Republikan
	3.	KRIS	C.L.Ponto	Republikan
	4.	Communisten	J. Dengah	Republikan
	5.	GIM(Gerakan Indonesia Merdeka)	B.H.Woworuntu	Republikan
	6.	GAPERBOM (Gabungan Perjuangan Rakyat Bolmong)	A.C. Manoppo	Republikan

³⁴ Diolah dari Drooglever- Schouten, *Op.Cit.*, vol. 13, arsip 20 Februari - 4 Juni 1948.

	7.	GERKINDO (Gerakan Kebangsaan Indonesia)	A. Uno	Republikan
	8.	GERPINDO (Gerakan Pemuda Indonesia)	G.M. Bokings	Republikan
	9.	Partai Demokrat	Sopia	Federalis
	10.	Singa Minahasa	J. Maweikere	Federalis
Sulawesi Selatan	-	-	-	Semua Republikan
	1.	PI (Persatuan Indonesia)	A. Mononutu	Republikan
Maluku Utara	2.	PASMO (Partai Sejarah Maluku Utara)	Dano Umar Saifuddin	Federalis
	1.	PIM (Partai Indonesia Merdeka)	Pupella	Republikan
Ambon	2.	Sembilan Serangkai	Litaay	Federalis
Timor	1.	Lima Serangkai	(?)	Federalis

Catatan:

Partai Sembilan Serangkai di Ambon adalah gabungan berbagai serikat kerja lokal kota Ambon, seperti Regentebond (perkumpulan para kepala desa), Inlandsleraarsbond (perkumpulan para guru), Jemaatbond, Pensiunan Tentara, dan lainnya, yang berhaluan konservatif. Seluruhnya berjumlah sembilan perkumpulan. Partai ini merupakan lawan keras PIM pimpinan Pupella.³⁵

Upaya Belanda Memisahkan Papua dari RI dan Tidore

Sejak semula, Pemerintah Belanda, melalui Menteri Urusan Daerah Seberang Kerajaan Belanda, secara apriori berniat memisahkan Papua dari RI, dan telah diupayakan dengan meminjam tangan Letnan Gubernur Jenderal van Mook. Hal ini diawali dengan tidak mengagendakan Papua ke dalam pembentukan NIT dalam Konperensi Denpasar. Padahal, dalam struktur ketatanegaraan Hindia Belanda, Papua merupakan bagian dari Timur Besar (*Grote Oost*).³⁶

Pada Konperensi Malino maupun Denpasar banyak peserta konperensi mempertanyakan mengapa Papua tidak diintegrasikan ke dalam NIT. Petinggi Belanda dengan sederhana menjawab bahwa kawasan itu akan dimusyawarahkan secara tersendiri setelah NIT terbentuk. Kenyataannya, setelah NIT berdiri, status Papua tidak pernah disinggung lagi.

Menjelang Konperensi Meja Bundar, diadakan pada 23 Agustus-2 Nopember 1949 di Den Haag, Pemerintah Hindia Belanda secara intens mulai melakukan pemisahan Papua dari Kesultanan Tidore. Pada 23 Maret 1949, de Waal – penasehat Pemerintah Belanda urusan

³⁵ Lihat Leirissa, *Maluku dalam Perjuangan*, *Op.Cit.*, p. 146.

³⁶ Timur Besar meliputi Kepulauan Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara dan Papua, yang ketika itu disebut Nieuw Guinea.

perundang-undangan organik – atas nama Wakil Tinggi Mahkota Belanda³⁷ di Indonesia, telah mengirim sebuah nota kepada Menteri Urusan Daerah Seberang Kerajaan Belanda. Nota tersebut berisi pendapat dan saran Wakil Tinggi Mahkota Belanda bahwa Papua harus dipisahkan dari Tidore, sebab Sultan Tidore telah menyatakan bahwa pemerintahan langsung atas wilayah itu sangat sulit dilakukan.

Tetapi, menurut nota tersebut, secara yuridis tidak ada celah yang dapat ditembus sampai Pemerintah Belanda melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan kepala-kepala persekutuan adat setempat untuk memperoleh pembenaran dan legitimasi atas pemisahan Papua. Sultan Tidore diminta Belanda turut aktif dalam jajak pendapat dengan para kepala suku lokal, dan hal itu diharapkan bisa diselesaikan paling lambat dua tahun. Kepada rakyat Papua harus ditekankan bahwa, berdasarkan kepentingan mereka, pemisahan pemerintahan Papua dari Kesultanan Tidore lebih menguntungkan bagi mereka.

De Waal juga mengusulkan agar Sultan Tidore diberi peran dalam Kabinet NIT, atau bahkan diberi tugas khusus untuk pemisahan Papua dari kesultannya. Dalam pandangannya, jika Sultan Tidore diberi semua kewenangan itu, status Papua yang lepas dari Tidore dapat dirampungkan sekitar Desember 1949. Selanjutnya, akan disusun suatu kerangka hukum yang berbentuk kombinasi antara perjanjian pendek (*korte verklaring*) dan sebuah perjanjian lain yang mengandung klausul bahwa Kesultanan Tidore dapat disingkirkan setiap saat (*dat de Sultanaat kan alle tijdens kan worden opgegeven*).

Pemecahan masalah semacam ini, menurut de Waal, mungkin tidak terlalu berat dilaksanakan. Kesulitannya barangkali hanya terletak sehubungan dengan NIT yang menghendaki Papua masuk ke dalam wilayahnya. Tetapi, jika Papua telah dipisahkan dari Tidore, akan dibuat perjanjian tersendiri dengan kesultanan tersebut dengan sebuah jaminan, sebagaimana halnya dengan kerajaan-kerajaan lain di wilayah Indonesia Timur. Sementara untuk Papua dapat diberlakukan konstitusi menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam S. 1946 no. 17.³⁸

Dalam telegram tertanggal 29 Maret 1949 kepada Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia, Dr. Beel, Menteri Urusan Daerah Seberang, Mr. van Maarseveen, mengusulkan agar pemisahan Papua dilakukan dengan sebuah keputusan Wakil Tinggi Mahkota. Dalam keputusan tersebut ditentukan:

1. Kesultanan Tidore akan diintegrasikan ke dalam pemerintahan federal Indonesia.
2. Jajak pendapat di Papua daratan dan kepulauan Raja Ampat “sangat bergantung pada persetujuan Kesultanan Tidore.”³⁹

Pada 11 April 1949, van Maarseveen mengirimkan lagi sebuah telegram kepada Wakil Tinggi Mahkota. Kandungan pokok telegram ini adalah: Dengan merujuk nasehat Sekretaris Negara Urusan Swapraja dan Dalam Negeri, usul yang disampaikan mengenai pemecahan masalah pemisahan Papua dari Kesultanan Tidore – dalam telegram no. G 242 dan 276 – dapat diterima. Dengan kesultanan ini harus dibuat perjanjian seperti yang telah dilakukan dengan

³⁷ Wakil Tinggi Mahkota (*Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon*) adalah pengganti Ratu Belanda secara pribadi di Indonesia. Lembaga ini eksis sejak 1949 untuk menggantikan Letnan Gubernur Jenderal van Mook.

³⁸ Drooglever- Schouten, *Op.Cit.*, vol 18, arsip no. 143, pp. 216-218. S. 1946 no. 17 yang mengatur pelaksanaan pemerintahan swapraja di kawasan Kalimantan dan Indonesia Timur.

³⁹ *Ibid.*, vol. 18, p. 281.

swapraja-swapraja lainnya di NIT. Tetapi, sebagian besar swapraja NIT sangat pro-RI, termasuk Tidore. Para sultan pimpinan swapraja pada umumnya berpandangan bahwa bentuk pemerintahan terbaik adalah yang bersifat demokratis, karena sesuai dengan kehendak zaman.⁴⁰

Sementara itu, Mononutu dan partai yang dipimpinnya, PI, memutuskan bahwa pemerintahan swapraja masih memiliki peluang untuk *masa depan yang singkat*, jika ia mampu berintegrasi dengan pembangunan demokrasi. Inilah sikap resmi PI dalam menghadapi permasalahan swapraja yang oleh beberapa orang sultan hendak dihidupkan lagi kekuasaannya. Hasil rapat PI tersebut direkam dalam nota “Perspektif Politik di Indonesia Timur”, yang disampaikan Mendelaar, Komisaris Mahkota untuk Indonesia Timur, pada 25 Januari 1949.

Pada 3 Februari 1949, Wakil Tinggi Mahkota, Beel, kembali mengirim sebuah telegram kepada van Maarseveen di Den Haag, lagi-lagi berisi tentang pemisahan Papua dari Tidore. Beel, dalam telegram itu, menyarankan kepada van Maarseveen agar kontrak politik yang akan diberlakukan untuk Sultan Tidore dapat ditempuh melalui:

1. *Korte verklaring* yang ditandatangani Pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Tidore serta telah diberlakukan sejak 1909 agar dibatalkan. Dengan pembatalan sepihak ini, Sultan Tidore tidak dapat lagi melakukan pemerintahan secara langsung atas daerah-daerah di luar daerah asalnya. Dengan demikian, Sultan Tidore hanya berwenang menjalankan pemerintahan terbatas pada kepulauan Tidore.
2. Sejak *korte verklaring* berlaku, dalam kenyataannya, Sultan Tidore secara administratif-pemerintahan tidak lagi menjalankan kekuasaannya atas Papua.
3. Sejak meletus Perang Pasifik, Papua diduduki Sekutu, dan residen menjalankan kekuasaan pemerintahan di sana berdasarkan S. no. 108 jo. S. no. 149.
4. Dasar pertimbangan kepentingan Pemerintah tentang pemisahan Papua dari Kesultanan Tidore adalah pendapat Pemerintah bahwa Papua pada prinsipnya telah merupakan daerah swapraja.
5. Dengan demikian, menurut hukum tata negara Hindia Belanda, Pemerintah secara langsung berkuasa atas seluruh atau sebagian daerah swapraja Tidore.⁴¹

Puncak upaya Belanda untuk memisahkan Papua dari Tidore adalah pemberitahuan Wakil Tinggi Mahkota kepada Menteri van Maarseveen melalui sebuah telegram bahwa Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah, telah tiba di Jakarta pertengahan Juni 1949 dan telah melakukan pembicaraan dengan Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia. Pembicaraan tersebut menyangkut surat Pemerintah, tertanggal 12 April 1949, yang disampaikan kepada Sultan di Makassar. Isi surat ini menekankan bahwa seluruh persoalan tentang pemisahan Papua dari Tidore mengikuti peraturan lama. Wakil Tinggi Mahkota memberitahukan kepada Sultan bahwa berdasarkan keputusan Wakil Tinggi Mahkota, tertanggal 8 Juli 1948, wilayah Keresidenan Papua dipisahkan dari Kesultanan Tidore, dan bahwa para raja Kepulauan Raja Ampat telah memberikan persetujuan mereka.⁴²

Berdasarkan perjanjian antara VOC – diwakili Laksamana Cornelis Speelman – dan Sultan Saifuddin dari Tidore, yang disepakati dalam sebuah perundingan di Benteng Oranje pada

⁴⁰ *Ibid.*, p. 359, arsip no. 226.

⁴¹ *Ibid.*, vol. 17, pp. 401 f., arsip no. 240.

⁴² *Ibid.*, vol. 18, p. 407.

27-28 Maret 1667, pihak Belanda mengakui hak-hak dan kedaulatan Tidore atas kepulauan Raja Ampat dan Papua daratan. Sejak saat itu, Tidore menjalankan kekuasaan swaprajanya di sana hingga 1909, ketika Belanda memberlakukan perjanjian pendek (*korte verklaring*). Berdasarkan perjanjian ini, pemerintahan langsung atas Papua dijalankan oleh Pemerintah Belanda, menggantikan Kesultanan Tidore.

Sangat disesalkan bahwa Sultan Zainal Abidin tidak memberi reaksi yang pantas atas tindakan sepihak Wakil Tinggi Mahkota yang memisahkan Papua dari Tidore. Sultan hanya memprotes tindakan ini, tetapi tidak ditanggapi secara serius oleh Belanda. Presiden NIT, Cokorde Gde Rake Sukawati, bahkan tidak memberikan reaksi sedikitpun ketika Wakil Tinggi Mahkota mengabarkannya tentang pemisahan itu pada 12 April 1949.⁴³

Reaksi keras atas tindakan Belanda justeru datang dari PI melalui korannya, *Menara Merdeka*. Pada edisi no. 24 dan 25, tanggal 14 dan 15 Juli 1949, *Menara Merdeka* menyerang Pemerintah Belanda di Jakarta dengan menuduh Wakil Tinggi Mahkota melakukan politik pemerasan terhadap Sultan Tidore yang tidak berdaya. Lantaran pemberitaan ini, redaktur *Menara Merdeka*, M.S. Jahir, diperiksa Polisi Rahasia Belanda (*Nefis*).

Tetapi, di kalangan rakyat awam, terutama di kota Ternate dan sekitarnya, lepasnya Papua dari Tidore tidak terlalu mempengaruhi cermin politik mereka. Rakyat di daerah ini tengah bergembira dengan kembalinya Pemerintah RI dan pimpinan nasional, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta, beserta sejumlah menteri dari pengasingannya di Sumatera ke Yogyakarta. Rakyat Maluku Utara juga dengan cermat tengah mengikuti konperensi antara RI dan BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*, “Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal”). PI mengerahkan kadernya untuk menyebarluaskan kedua peristiwa tersebut kepada masyarakat yang tengah “demam republik.”

Laporan Residen Maluku Utara, Jabir Syah, tertanggal 12 Juli 1949, menyebutkan bahwa PI telah berhasil mendongkrak kesadaran politik rakyat. Sekalipun semangat republikan ini cukup tinggi, laporan tersebut mengemukakan tidak terjadi “*verzetbeweging en politieke extremist*” (gerakan perlawanan dan ekstrimis politik).⁴⁴

Sementara itu, kantor berita Belanda, Aneta, pada 21 Juli 1949, menyiarkan berita tentang tercapainya kata sepakat antara pemuka-pemuka rakyat Papua dengan “Panitia Penentu Nasib Sendiri” bahwa rakyat Papua *tidak mau* dipisahkan dari Maluku dan Tidore.⁴⁵ Berita ini merupakan kebalikan dari apa yang diupayakan petinggi Hindia Belanda.

Pemisahan Papua, baik dari NIT maupun RI, dengan mengobrak-abrik Kesultanan Tidore, dilakukan secara sadar dan sistematis untuk menyisakan kolonialisme Belanda di penggalan wilayah Indonesia paling timur itu. Setelah pemisahan dilakukan, status pemerintahan swapraja di Tidore ditingkatkan menjadi *onderafdeling* – semacam kewedanaan – untuk menyenangkan hati rakyat. Pada 12 Juli 1949, Residen Maluku Utara, Jabir Syah, meresmikan peralihan status Tidore itu atas pelimpahan wewenang Sultan Tidore, dan semua dinas pemerintahan dipusatkan di ibukota Tidore, Soasio.

⁴³ *Ibid.*, vol. 19, dokumen no. 17, catatan kaki 12.

⁴⁴ *Ibid.*, p. 229.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 407.

Agresi Militer Kedua dan Konperensi Antar Indonesia

Pada 18 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua, yang merupakan bencana militer maupun politik baginya, sekalipun pada tataran permukaan terlihat ia dengan mudah memperoleh kemenangan.⁴⁶ Pada 19 Desember, Yogyakarta diduduki dan para pemimpin RI seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Syahrir, Muhammad Natsir dan Haji Agus Salim ditangkap. Lewat agresi ini, Belanda menguasai kota-kota besar di Jawa dan Sumatera, karena bala tentara RI mengundurkan diri dan melakukan perang gerilya.

Agresi militer Belanda telah menyinggung Dewan Keamanan PBB, dan hal ini sangat diharapkan Pemerintah RI. Pemerintah Belanda sendiri akhirnya menyesali agresi tersebut, setelah opini dunia – terutama Amerika Serikat – mencela keras tindakan itu. Pada akhir Januari 1949, Dewan Keamanan PBB menuntut pembebasan semua anggota kabinet RI yang ditahan Belanda, pembentukan suatu pemerintahan sementara, dan pengakuan kedaulatan Indonesia. Pada 7 Mei, Belanda menyepakati kembalinya pimpinan RI ke Yogyakarta, dimulainya suatu gencatan senjata antara Belanda dan RI. Disamping itu, Belanda berjanji menghentikan pembentukan negara-negara bonekanya.

Pada 6 Juli 1949, Bung Karno, Bung Hatta dan anggota kabinet RI lainnya kembali ke Yogyakarta. Dan pada 1 Agustus, gencatan senjata antara RI dan Belanda diumumkan. Sebelum pengumuman gencatan senjata ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil merebut kembali beberapa daerah di Jawa dan Sumatera.⁴⁷

Sejak kembalinya para pimpinan RI ke Yogyakarta, suatu perundingan dilakukan di Yogyakarta, mulai 19-22 Juli 1949, antara BFO dan RI yang dikenal sebagai Konperensi Antar Indonesia. BFO adalah organisasi negara-negara bagian bentukan van Mook, yang dalam bulan Juli 1948 seluruhnya berjumlah 15 negara bagian. BFO diketuai Sultan Hamid Alqadri dari Negara Bagian Pontianak.

Konperensi Antar Indonesia di Yogyakarta itu akhirnya memutuskan antara lain:

1. Nama negara federal yang akan dibentuk adalah Republik Indonesia Serikat (RIS).
2. RIS akan memiliki perwakilan dengan sistem bikameral (dua kamar, senat dan DPR).
3. Akan dibentuk pemerintahan federal sementara yang menerima kedaulatan dari Belanda.
4. Angkatan perang RIS akan dibentuk berintikan TNI.⁴⁸

Pada 30 Juli 1949, Konperensi Antar Indonesia diselenggarakan kembali dengan mengambil tempat di Jakarta. Dalam konperensi ini, RI dan BFO setuju membentuk Panitia Persiapan Nasional untuk menghadapi Konperensi Meja Bundar (KMB). Dalam pemilihan anggota delegasi NIT yang akan duduk sebagai delegasi BFO dalam KMB, Mononutu terpilih sebagai salah satu anggotanya.

Sementara itu, di NIT kabinet Anak Agung jatuh dan digantikan J.E. Tatengkeng sebagai Perdana Menteri. Dalam kabinet J.E. Tatengkeng, Jabir Syah – Sultan Ternate dan Residen

⁴⁶ Ricklefs, *Op.Cit.*, p. 347.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Marwati, *Op.Cit.*, vol. 6, p. 170.

Maluku Utara – diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri. Jabatan Residen Maluku Utara yang ditinggalkan Jabir Syah dipegang Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah.

Di Ternate, PI dan PIM (Partai Indonesia Merdeka) mengusulkan kepada Pemerintah NIT meninjau kembali politik yang dijalankannya selama ini dalam menghadapi pembentukan RIS pada 1 Januari 1950. PI, dalam kaitannya dengan hal itu, meminta agar kedudukan dan peran NIT dalam BFO ditingkatkan untuk menghadapi perundingan dengan Belanda.⁴⁹ Usul ini mendapat dukungan dari BNI Manado, pimpinan Dauhan, dan GERPINDO Gorontalo, pimpinan Bokings.

Laporan Residen Maluku Utara tertanggal 16 Desember 1948, ditandatangani Sekretaris Residen, A.B. Faber,⁵⁰ yang mengevaluasi situasi politik di kawasan itu mengemukakan bahwa kesulitan terbesar di daerah ini eksis sehubungan dengan pemberitaan-pemberitaan koran PI, *Menara Merdeka*, yang terlalu berorientasi ke Yogyakarta. Pengaruh pemberitaan koran tersebut di Ternate dan sekitarnya demikian besar, sehingga Pemerintah sulit menetralsasinya. Redaktur *Menara Merdeka*, M.S. Jahir, yang juga merupakan salah satu pimpinan PI, telah dipanggil dan diberi peringatan keras atas pemberitaan korannya.

Laporan Residen Maluku Utara lebih jauh mengungkapkan bahwa di Morotai, seorang tokoh Islam telah melakukan propaganda bahwa pada 1 Januari 1949 nanti, Belanda akan meninggalkan Indonesia dan wilayah ini akan merdeka. Di Kao dan Wasilei timbul bentrokan antara rakyat dan polisi. Bentrokan-bentrokan militer di Jawa antara RI dan Belanda sangat mempengaruhi daerah Maluku Utara. PI, menurut laporan tersebut, telah menyebarkan selebaran kepada anggotanya dan masyarakat umum. Isi selebaran itu mengemukakan bahwa kemerdekaan bagi Indonesia, sehubungan akan dibentuknya RIS, sudah di ambang pintu. Rakyat dihimbau agar tidak mendengar propaganda kosong atau suara sumbang berkenaan dengannya.

Laporan tersebut juga mengemukakan bahwa pemerintah menghadapi kesulitan besar dalam membenahi situasi politik di Ternate lantaran pemberitaan sistematis koran PI, *Menara Merdeka*, yang mengganggu situasi keamanan, khususnya di dalam kota Ternate.

Konperensi Meja Bundar (KMB) dan Pembentukan RIS

Mulai 23 Agustus hingga 2 Nopember 1949, KMB diselenggarakan di Den Haag. Konperensi ini mempertemukan delegasi RI pimpinan Bung Hatta, delegasi BFO pimpinan Sultan Hamid Alqadri, dan delegasi Kerajaan Belanda pimpinan Menteri Daerah Seberang, van Maarseveen, serta delegasi yang mewakili PBB.⁵¹ Selama KMB berlangsung, Bung Hatta mendominasi pembicaraan pihak Indonesia – RI dan BFO – dan semua peserta mengaguminya.⁵² Hasil utama KMB adalah transfer kedaulatan dari Belanda kepada RIS, dengan pengecualian Papua.

Pada 6 Desember 1949, Pemerintah RI mengajukan hasil-hasil KMB kepada KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) untuk diratifikasi. Perhitungan suara dalam ratifikasi tersebut menghasilkan 226 suara setuju, 62 menolak, dan 31 abstain. Berdasarkan ratifikasi ini, pada 15

⁴⁹ Drooglever- Schouten, *Op.Cit.*, vol. 19.

⁵⁰ *Ibid.*, vol. 16, arsip 1 Desember - 12 Januari 1949.

⁵¹ Marwati, *Op.Cit.*, vol. 6, p. 171, juga tentang nama-nama anggota delegasi peserta KMB.

⁵² Ricklefs, *Op.Cit.*, p. 350.

Desember, dilakukan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Soekarno, yang secara aklamasi terpilih. Dua hari setelah itu, 17 Desember, Bung Karno dilantik sebagai Presiden RIS. Ia kemudian menunjuk Bung Hatta selaku formatur kabinet. Pada 20 Desember 1949, Kabinet RIS terbentuk di bawah pimpinan Bung Hatta selaku Perdana Menteri.

Pada 23 Desember 1949, sebuah delegasi Pemerintah RIS menuju Negeri Belanda untuk menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia. Selain Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Drees, Menteri Urusan Daerah Seberang Mr. Sassen, Bung Hatta juga ikut membubuhkan tanda tangan dalam naskah pengakuan kedaulatan itu sebagai ketua delegasi RIS. Bersamaan dengan itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia, Lovink, melakukan hal serupa dalam suatu upacara di Istana Negara, Jakarta. Bendera Belanda diturunkan dan Merah Putih dikibarkan menggantikannya. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di hampir seluruh Indonesia untuk selamanya. Di Maluku Utara, peristiwa bersejarah tersebut disambut dengan gegap-gempita.

Tetapi, pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda ini tidak mencakup Papua. Dalam perundingan yang alot di KMB, Indonesia terpaksa memberikan konsesi kepada Belanda: Kedaulatan atas Papua tetap dipertahankan Belanda sampai ada perundingan lebih jauh tentangnya. Sementara setumpuk hutang Belanda di Indonesia – sebesar 4,3 miliar Gulden – yang merupakan biaya yang dipakai Belanda, akan dibebankan kepada RIS. Disamping itu, beberapa jaminan terhadap investasi Belanda di Indonesia juga dimasukkan sebagai beban RIS.⁵³

RMS (Republik Maluku Selatan)

Sejak awal, sebagian orang Maluku Selatan tidak begitu tertarik kepada federalisme. Para penentang federalisme, sekalipun merupakan kelompok minoritas di Maluku Selatan, terutama berakar di kalangan pensiunan pegawai negeri, anggota KNIL, dan beberapa petualang politik yang tersingkir. Di bawah pimpinan Dr. Ch. Soumokil, mantan Jaksa Agung NIT, mereka memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS) pada 25 April 1950, yang dinyatakan terpisah dari RIS.

Alasan yang digunakan untuk proklamasi RMS adalah:

1. NIT tidak sanggup mempertahankan kedudukannya sebagai negara bagian selaras dengan keputusan Konperensi Denpasar yang sah dan masih berlaku.
2. RIS telah bertindak bertentangan dengan KMB dan undang-undang dasarnya sendiri.
3. Proklamasi RMS dipandang sah karena sesuai dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD, Raad Ambon), tertanggal 11 Maret 1947.

Proklamasi RMS pada hakikatnya merupakan akumulasi petualangan beberapa politisi Ambon yang memegang kekuasaan pada masa NIT. Para politisi ini sebagian besarnya tergabung ke dalam organisasi politik Sembilan Serangkai pimpinan Dolf Matekohy, dan orang-orang dari Partai Timur Besar, yang orientasi politiknya sangat pro-Belanda, ditambah beberapa intelektual yang tidak pernah ikut dalam pergerakan nasional. Para intelektual seperti Ir. J. Manusama

⁵³ *Ibid.*, p. 350.

(Direktur Sekolah AMS Ambon) dan Mr. Dr. Ch. Soumokil (mantan Jaksa Agung NIT) bahkan menjalani pola hidup yang sangat blandist.

Ketidakstabilan di kota Ambon antara lain disebabkan eksisnya dua kubu yang saling bertentangan sejak proklamasi kemerdekaan: yakni kubu pro-republik dan kubu pro-Belanda. Keadaan ini semakin parah dengan ditariknya pasukan KNIL yang berasal dari suku Ambon – yakni pasukan baret merah dan baret hijau, yang memiliki pengalaman dan kemampuan tempur tinggi – ke Ambon ditambah sejumlah polisi NIT bentukan Soumokil ketika menjabat sebagai Jaksa Agung NIT.⁵⁴

Proklamasi RMS merupakan peristiwa yang mengagetkan banyak kalangan, baik jajaran pimpinan RIS maupun NIT. Untuk mempertahankan proklamasinya, RMS memobilisasi semua pasukan KNIL, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, untuk kembali memanggul senjata mempertahankan RMS. Maluku Utara, pra-pembentukan RMS, telah dihimbau bergabung dengan RMS, tetapi ditolak dengan tegas. Beberapa hari setelah proklamasi RMS, Dr. Soumokil dengan sebuah pesawat Catalina tiba di Ternate dan berlabuh di dekat jembatan Residen. Soumokil meminta agar Sultan Djabir Syah naik ke atas kapal terbang tersebut untuk berunding, dan Soumokil menghimbau agar Maluku Utara bergabung dengan RMS. Sultan Ternate Djabir Syah sebagai Residen Maluku Utara dengan tegas menyatakan bahwa Maluku Utara tidak bersedia bergabung. Berbagai alasan dan argumentasi diberikan Sultan kepada Soumokil. Catalina akhirnya terbang kembali ke Ambon tanpa hasil.

Untuk mengatasi masalah RMS, Pemerintah RIS mengirim Dr. J. Leimena guna mencari pemecahan dan penyelesaiannya. Sementara untuk tujuan yang sama, NIT mengutus Menteri Dalam Negerinya, Jabir Syah. Baik Leimena maupun Jabir Syah tidak berhasil mencapai solusi yang dapat diterima Soumokil. Karena itu, Pemerintah RIS memandang gerakan RMS sebagai tindakan separatisme yang harus diselesaikan secara militer. Angkatan perang RIS dikirim dan mulai melakukan operasi militer pada Juli 1950. Dalam waktu sekitar empat bulan – yakni pada Nopember tahun itu juga – operasi penumpasan RMS dipandang berhasil dan selesai.

Beberapa pimpinan RMS seperti Manuhutu (Presiden), Wairisal (Perdana Menteri) dan Caspersz (Menteri Dalam Negeri), sempat melarikan diri ke Seram. Wairisal dan Caspersz akhirnya tertangkap dan diajukan ke pengadilan. Sementara Manuhutu berhasil melarikan diri ke Belanda dan meninggal di sana. Penggagas intelektual RMS, Soumokil, yang juga ikut melarikan diri ke Seram, akhirnya tertangkap dan dihukum mati.⁵⁵ Setelah penumpasan habis-habisan gerakan separatis RMS, Pemerintah RIS mengirim Latuharhary sebagai Gubernur untuk menjalankan pemerintahan sipil di Maluku, termasuk Maluku Utara.

Proklamasi RMS merupakan noda hitam dalam sejarah Maluku. Untunglah, rakyat di Maluku Utara yang memiliki garis perjuangan yang tegas sejak proklamasi RI, tidak tertarik dan tidak terkontaminasi gagasan-gagasan RMS.

⁵⁴ *Sejarah Daerah Maluku*, (Jakarta: Dep. P&K, 1993), pp. 98 ff.

⁵⁵ *Ibid.*

Lampiran: 1

Daftar Para Kolano Ternate (Sebelum masuknya Islam)

1. 1257-1277 : Ciko. Setelah menjadi raja menyebut dirinya sebagai Mashur Malamo
2. 1277-1284 : Poit, dikenal juga dengan nama Kaicil Yamin
- 3.
4. 1284-1298 : Siale, disebut juga Kaicil Kamalu
5. 1298-1304 : Kalabatta, alias Kaicil Bakuku
6. 1304-1317 : Komala, alias Ngara Malamo
7. 1317-1322 : Patsyaranga Malamo
8. 1322-1331 : Sida Arif Malamo
9. 1331-1332 : Paji Malamo
10. 1332-1343 : Sah Alam
11. 1343-1347 : Tulu Malamo
12. 1347-1350 : Boheyat alias Kaicil Kie Mabiji
13. 1350-1357 : Ngolo Macahaya atau Cahaya laut
14. 1357-1359 : Momole
15. 1359-1372 : Gapi Malamo
16. 1372-1377 : Gapi Baguna I
17. 1377-1432 : Kumala Putu
18. 1432-1405 : Gapi Baguna II.

Para Sultan Ternate (Setelah masuknya Islam)

19. 1466-1486 : Marhum
20. 1486-1500 : Zainal Abidin
21. 1500-1522 : Bayan Sirullah alias Boleif
22. 1522-1529: Deyalo (karena di bawah umur, ibunya Nyai Cili Boki Raja menjadi Mangkubumi dan Taruwese menjadi wakil sultan pada 1529-1530)
23. 1529-1532 : Boheyat
24. 1532-1535 : Tabariji
25. 1535-1570 : Khairun Jamil ¹
26. 1570-1583 : Babullah Datu Syah

¹ Portugis melantik Khairun sebagai Sultan Ternate pada 1534. Tahun 1535 ia ditangkap atas tuduhan pengkhianatan kepada Portugis dan dikirim ke Malaka. Kehendak Portugis menggantikannya dengan Don Manuel Tabariji yang telah dibebaskan di Goa, tetapi sebelum tiba di Ternate Don Manuel Tabariji keburu wafat. Khairun dilantik kembali sebagai Sultan Ternate untuk kedua kalinya (1535) oleh mandataris Raja Muda Goa sekaligus pengganti Gubernur de Ataide, Bernaldin de Sousa.

27. 1583-1606 : Saidi atau Sahid atau Saifuddin
26. 1606-1610 : Hidayat, Jogugu yang bertindak selaku Mangkubumi, karena Mudaffar di bawah umur.
28. 1610-1627 : Mudaffar
29. 1627-1648 : Hamzah
30. 1648-1672 : Mandar Syah
31. 1672-1690 : Sibori Amsterdam
32. 1690-1692 : Kekuasaan kerajaan Ternate dijalankan para Bobato
33. 1692-1714 : Kaicil Toloko
34. 1714-1751 : Kaicil Raja Laut
35. 1751-1754 : Oudhoorn
36. 1754-1777 : Sahmardan
37. 1777-1796 : Arunsah
38. 1796-1801 : Sarka atau Sarkan
39. 1801-1807 : Muhammad Yasin
40. 1807-1823 : Sarmole van der Parra
41. 1823-1861 : Muhammad Zain
42. 1861-1876 : Muhammad Arsyad
43. 1876-1900 : Ayanhar²
44. 1900-1902 : Haji Muhammad Ilham
45. 1902-1914 : Haji Muhammad Usman
46. 1914-1927 : Kesultanan Ternate lowong setelah pengasingan Haji Muhammad Usman ke Bacan kemudian ke Bandung karena dituduh mengotaki pemberontakan Jailolo.
47. 1927-1975 : Iskandar Muhammad Jabir Syah.

² Ia baru dilantik dalam bulan Oktober 1879.

Lampiran: 2

Daftar Para Kolano Tidore (sebelum masuknya Islam)

Catatan: Sumber satu-satunya yang penulis miliki adalah buku de Clerq, di bawah Bab Korte Kroniek pp.149 ff, tetapi de Clerq sendiri tidak mencantumkan tahun berkuasa. Para raja tersebut berturut-turut sbb.:

*Para Kolano Tidore:*³

1. Sah Jati
2. Busamuangi
3. Suhu
4. Balibunga
5. Duhu Madoya
6. Kie Matiti
7. Sele
8. Matagena.

Para Sultan Tidore:

9. 1495-1512 : Tjaliati, Sultan pertama Tidore. Ia diislamkan seorang Arab Syech Mansur dan diberi nama: Jamaluddin
10. 1512-1526 : Almansur
11. 1526-1529 : tidak dilakukan pemilihan sultan
12. 1529-1547 : Amiruddin Iskandar Zulkarnain
13. 1547-1569 : Kie Mansur
14. 1569-1586 : Iskandar Sani
15. 1586-1599 : Gapi Maguna
16. 1599-1626 : Mole Majimu
17. 1626-1633 : Ngara Malamo
18. 1633-1653 : Kaicil Gorontalo
19. 1653-1657 : Magiau
20. 1657-1659 : Saifuddin
21. 1659-1700 : Hamzah Fahrudin

³ Valentijn, vol.I b, pp.100 dan 136 menyebutkan 2 nama dengan gelar *Sultan* masing-masing Nuruddin yang berkuasa tahun 1343, dan Hassan Syah dalam tahun 1372 yang menikah dengan putri Gapi Baguna I (1372-1377) dari Ternate (p.100). Valentijn menyebut juga nama *Malonga*, tetapi sebagai Kepala Persekutuan Desa Tidore (p.136).

22. 1700-1708 : Abdul Falahal Mansur
23. 1708-1728 : Hasanuddin
24. 1728-1756 : Amir Bifadliljadid
25. 1756-1780 : Jamaluddin
26. 1780-1784 : Patra Alam
27. 1805-1810 : Muhammad Zainal Abidin
28. 1810-1821: Muhammad Tahir. Selama pemerintahan Inggris, Raja Muda Kaicil Muhammad Jamaluddin berkuasa atas distrik Maba, Weda, dan Patani di Halmahera Timur.
29. 1821-1857 : Ahmadul Mansur
30. 1857-1865 : Ahmad Safiuddin
31. 1865-1867 : Johar Alam alias Ahmad Fatihuddin
32. 1867-..... : Ahmad Qawiyuddin
Setelah Qawiyuddin, Pemerintah Belanda tidak lagi mengangkat Sultan, dan Tidore dikuasai oleh Jogugu. Usai Perang Dunia II, Belanda mengangkat:
34. 1946-1956 : Zainal Abidin Syah.

Lampiran: 3

Daftar Para Gubernur Portugis di Maluku ⁴

1. 1522-1525 : Antonio de Brito
2. 1525-1527 : Garcia Henriquez
3. 1527-1530 : Jorge de Menezes
4. 1530-1532 : Gonzalo Pereira
5. 1532-1534 : Vincente da Fonceca
6. 1534-1537 : Tristiao de Atayde
7. 1537-1540 : Antonio Galvao
8. 1540-1544 : Yorge de Castro
9. 1544-1547 : Yordao de Freitas
10. 1547-1549 : Bernaldin de Sousa
11. 1549-1550 : Christorao de Sa
12. 1550-1552 : Bernaldin de Sousa (kedua kali)
13. 1552-1555 : Francisco Lopez de Sousa
14. 1555-1559 : Don Duarte de Eca
15. 1559-1561 : Manuel de Vasconcellos
16. 1561-1564 : Henrique de Sa
17. 1564-1566 : Alvaro de Mendoca
18. 1566-1571 : Diogo Lopes de Mesquita
19. 1571-1574 : Alvaro de Ataide
20. 1574-1575 : Nuno Pareira de Lacerda (Gubernur Portugis terakhir).

⁴ Sumber: 1. Valentijn, Françoise, *Op.Cit.*p.370.
2. F.S.A. de Clerq, *Op. Cit.* pp.150 ff.

Lampiran: 4

Benteng Portugis di Tidore dan para Komandannya

Portugis membangun bentengnya di Tidore sejak 1578, dan Raja Portugal telah mengangkat komandannya yang disebut “captain”, tetapi dibandingkan dengan Ternate, benteng Tidore tidak terlalu signifikan.

Tetapi Captain Tidore menyandang gelar *Capitães de Moluco* dan bentengnya bernama: *Dos Reis Mogos de Tidor*.⁵

Capitães de Moluco, antara tahun 1578-1605 sbb:

1. Awal 1578-Oktober 1582 : Diogo de Azambuja de Melo
2. Oktober-Desember 1582 : Alvaro de Castro
3. Akhir 1582-Februari 1586 : Diogo de Azambuja (masa kedua)
4. Februari 1586-1589 : Duarte Pereira de Sampaio
5. 1589-1592 : Rai Dias da Cunha
6. 1592-1595 : Tristao de Sousa
7. 1595-20 Nopember 1598 : Juliao de Noronha
8. 20 Nopember 1598-Februari 1602 : Rui Gonzalves de Sequeira
9. Februari 1602-19 Mei 1605 : Pedro Alvares de Abreau
10. 1605 : Manuel de Melo (belum sempat bertugas).

⁵ Sumber: *Documenta Malucensia*, Vol.II p.4.

Lampiran: 5

Daftar Para Gubernur Spanyol di Maluku (1606-1663) ⁶

1. 1606-1609 : Juan de Esquivel
2. 1609-1610 : Lucas de Vergara Gabiria, pejabat
3. 1610-1612 : Cristobal de Azcueta Menchacha, pejabat
4. 1612-1617 : Don Jeronimo de Silva
5. 1617-1620 : Lucas de Vergara Gabiria, masa jabatan kedua
6. 1620-1623 : Don Luis de Bracamonte, pejabat
7. 1623-1636 : Pedro de Heredia
8. 1636-1640 : Don Pedro de Mendiola, pejabat
9. 1640-1642 : Don Francisco Suares de Figueroa
10. 1642-1643 : Don Pedro Fernandes del Rio, pejabat
11. 1643-1652 : Don Lorenzo de Olaso Achotegui
12. 1652 : Don Pedro Fernandes del Rio, masa jabatan kedua
13. 1652-1656 : Francisco de Esteybar, pejabat
14. 1656-1658 : Diego Sarria Lascano
15. 1658-1659 : Francisco de Esteybar, masa jabatan kedua
16. 1659-1660 : Don Francisco de Atienza Ibanez
17. 1660-1661 : Juan de Chaves
18. 1661-1663 : Don Agustin de Cepeda Carnacedo
19. 1663 : Don Francisco de Atienza Ibanez, masa jabatan kedua.

⁶ Sumber: *Documenta Malucensia*, Vol.III,pp.3-4.

Lampiran: 6

Para Gubernur VOC di Maluku⁷

1. 1607-1608 : Laksamana Kornelis Matelief de Jonge, penguasa VOC mengusir Spanyol dari Ternate dan pendiri benteng Melayu (Fort Oranje)
2. 1608-1609 : Laksamana Paulus van Carden, Laksamana yang memimpin pasukan VOC
3. 1609-1610 : Franchoise Wittert, pendiri benteng Nasau di Moti, pengganti nama benteng Melayu dengan Oranje (penguasa VOC)
4. 1610-1612 : Paulus van Carden (Gubernur)
5. 1612-1616 : Pieter Both, Gubernur Jenderal pertama
6. 1616-1621 : Laurens Reaal, Gubernur Jenderal kedua
7. 1621-1623 : Frederik Houtman, Gubernur
8. 1623-1627 : Jacobus Le Fabre
9. 1627-1629 : Gilles Zeijst
10. 1629-1633 : Gijsbert van Lodenstein
11. 1633-1635 : Johan Ottens
12. 1635-1640 : Jan van Broekom
13. 1640-1642 : Anthony Caen
14. 1642-1648 : Wouter Seroujen
15. 1648-1653 : Gaspar van den Bogaerde
16. 1653-1656 : Jacob Hustaart
17. 1656-1662 : Simon Cos
18. 1662-1667 : Anthony van Voorst
19. 1667-1669 : Maximilian de Jong
20. 1669-1672 : Abraham Vespreet
21. 1672-1675 : Cornelis Frank
22. 1675-1677 : Willem Korput
23. 1677-1682 : Robert Padtbrugge
24. 1682-1686 : Jacob Lobs
25. 1688-1689 : Johan Henrik Thim
26. 1689-1692 : Johannes Cops
27. 1692-1696 : Kornelis van der Duin
28. 1696-1701 : Salomon Le Sage
29. 1701-1706 : Pieter Roselaar
30. 1706-1710 : Jacob Claaszoom
31. 1710-1715 : David van Peterson
32. 1715-1720 : Jacob Bottendorp
33. 1720-1723 : Antoni Heinsius
34. 1723-1724 : Jacob Cloeck

⁷ Sumber: de Clerq pp. 156 ff.

35. 1724-1728 : Joan Happon
36. 1728-1731 : Jacob Christian Pielat
37. 1731-1735 : Elias de Haeze
38. 1735-1737 : Paulus Rouwenhoff
39. 1737-1739 : Martinus Storm
40. 1739-1744 : Marten Lelieveld
41. 1744-1750 : Gerard van Brandwijk van Blokland
42. 1750-1754 : J.E. van Mijlendonk
43. 1754-1758 : Abraham Abeleven
44. 1758-1763 : Jacob van Schoonderwoert
45. 1763-1766 : Zwaardekroon
46. 1766-1767 : Hendrik Breton
47. 1767-1771 : Hermanus Munnik
48. 1771-1778 : Paulus Jacob Volkenaer
49. 1778-1780 : Jacob Roeland Thomassen
50. 1780-1793 : Alexander Cornebe
51. 1793-1796 : J. Ekenholm
52. 1796-1799 : Johan Godfried Budach
53. 1799-1800 : Willem Jacob Cranssen, yang menyerah kepada Inggris.

Catatan: Berdasarkan perjanjian Amiens 27 Maret 1802, Inggris menyerahkan kembali seluruh Indonesia kepada Belanda. Maka mulai 1804-1809, terdapat dua orang Gubernur Belanda berkuasa di Maluku, sbb:

54. 1804-1809 : Carel Lodewijk Wieling
54. 1809-1810 : R. Coop Groen. Kedua Gubernur ini adalah Gubernur Nederland Indie, dan sejak itu Gubernur di Maluku diganti dengan Residen.

Lampiran : 7

Para Residen Inggris di Maluku

1. 1800-1803 : K.T. Farquhar
2. 1803-1804 : H. Webber
Antara 1804-1809 Inggris mengembalikan klaim Belanda atas Indonesia.
3. 1810-1813 : W. Ewer
4. 1813-1815 : R. Stuart
5. 1816 : W.G. Mc Kenzie, Residen Inggris terakhir yang menyerahkan kekuasaannya kepada Komisi Pengambilalihan Maluku dari Pemerintah Hindia Belanda, berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814.

Glossarium

Adat	Peraturan, kebiasaan, kesopanan, tradisi, budaya.
Alferis	Bintara, sersan.
Alifuru	Penduduk asli pedalaman Halmahera, disebut juga Halefuru.
Baru-baru	Serdadu.
Asisten Residen	Pembantu Kepala Wilayah.
Bala	Warga, rakyat.
Barakati	Berkah
Batu Cina	Nama lama untuk Halmahera yang diberikan Portugis.
Beno	Tembok
Besi	Nama alternatif untuk Makian.
Bilolo	Sejenis siput laut yang dijadikan umpan untuk mengail ikan.
Bobato	Arti harfiah: pelaksana peraturan. Secara umum digunakan untuk menunjuk kepala persekutuan, termasuk kadi, imam, khatib dan moding.
Bobato Akhirat	Pimpinan spiritual, pembantu sultan untuk urusan keagamaan Islam.
Bobato Dunia	Pemimpin/pembantu sultan untuk urusan temporal/pemerintahan, penamaan kolektif untuk pemimpin komunitas.
Boki	Puteri, anak perempuan Sultan dari isteri tertua.
Cakalele	Bahasa Ternate: hasa, tarian perang.
Controleur	Kontrolir, pengawas, kepala pemerintahan lokal.
Dano	Bangsawan yang tidak memegang jabatan kerajaan, bangsawan dari salah satu cabang kerabat kesultanan yang tidak memiliki hak menjadi sultan.
Dehe	Ujung, tanjung.
Dibo-dibo	Pedagang perantara ikan, hasil pertanian dan perkebunan di pasaran yang membeli dari produsen dengan harga semurah mungkin, kemudian dijual dengan harga semahal-mahalnya.
Dodego	Tempat duduk, posisi.
Dopolo Ngaruha	Empat pimpinan/kepala pemerintahan, yakni Jogugu, Kapita Laut, Hukum Soasio dan Hukum Sangaji di Kesultanan Ternate. Disebut juga Komisi Ngaruha atau Tau Raha di Kesultanan Tidore.
Fala Raha	Rumah empat, empat klan, yakni Soa Marsaoli, Limatahu, Tomagola dan Tomaito.
Fanyira	Singkatan dari Ngofa Manyira (lihat Ngofa Manyira).
Gapi	Nama alternatif Ternate yang digunakan pada masa awal.
Gezaghebber	Penguasa, kepala pemerintah lokal setingkat distrik.

Ginoti	Kayu yang terapung.
Gufusang	Lalat besar berwarna hijau.
Guheba	Burung laut
Hakim Syara	Hakim Pengadilan Agama Islam dalam lingkungan kesultanan.
Hukum	Magistraat, fungsionaris yang memegang posisi antara pemerintah kerajaan dan pemimpin komunitas, hakim.
Imam	Pemimpin dalam pelaksanaan ibadah agama Islam, pembantu sultan dalam bidang agama Islam.
Jiko ma-kolano	Sebutan kepala distrik di Halmahera.
Jogugu	Perdana Menteri, pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif).
Jojaru	Gadis yang belum menikah.
Juanga	perahu untuk berperang. <i>Juanga</i> ukuran sedang dapat memuat sampai 200 penumpang. <i>Juanga</i> besar dapat memuat 300 - 400 orang.
Kadi	Hakim agama, ketua majelis peradilan agama tertinggi kerajaan, ketua para imam, khatib dan moding.
Kaicil	Pangeran, putera sultan dari permaisuri utama. Kaicil berasal dari bahasa Jawa: kyai cilik (kiyai kecil).
Kalaudi	Pejabat kerajaan yang mengurus pajak, gelar pejabat di daerah taklukan Kesultanan Ternate.
Kalem	Sebutan untuk kadi.
Kampung	Lingkungan kediaman atau desa.
Kapita	Pelaksana kekuasaan militer, komandan pasukan militer, kapten.
Kapita Kie	Pelaksana perang negeri, kepala pasukan pengawal sultan.
Kapita Laut	Pelaksana perang laut, laksamana laut, panglima angkatan laut.
Kapita Ngofa	Kapten yang berasal dari keluarga sultan, kapten pangeran.
Khatib	Pejabat agama yang bertugas membaca khutbah setiap sembahyang jumat.
Khatib Dongofi	Khatib cadangan.
Khatib Juru Tulis	Khatib dengan tugas sebagai sekretaris.
Kie	Gunung, pulau yang memiliki gunung, kerajaan yang berpusat pada sebuah pulau seperti Ternate dan Tidore.
Kie Besi	Nama gunung berapi di Makian.
Kie Ternate	Gunung Ternate (Gamalama), Pulau Ternate, Kerajaan Ternate.
Kolano	Raja, sultan.
Kora-kora	Perahu perang yang digunakan di Maluku Tengah. Di Maluku Utara—Ternate, Tidore, Bacan dan Halmahera—disebut <i>juanga</i> .
Landraad	Pengadilan Negeri.
Landschap	Daerah Swapraja.
Landvoogd	Wali Negeri, Gubernur di masa VOC.

Letnan	Pangkat perwira dalam ketentaraan yang diadopsi dari bahasa Belanda, luitenant.
Letnan Ngofa	Letnan dari kalangan bangsawan kerajaan.
Limau	Tempat yang diperkuat, benteng, ibukota.
Mahimo	Senior, lebih tua, wakil Kimalaha, wakil kepala komunitas.
Mara	Istilah dalam bahasa Ternate untuk Makian.
Mayor Ngofa	Mayor dari keluarga kesultanan, pangeran mayor.
Minister van Kolonie	Menteri Urusan Daerah Jajahan Belanda. Terakhir berganti nama menjadi Minister van Overzee gebied, Menteri Urusan Daerah seberang.
Moding	Anggota/staf imam, muazzin yang ditugaskan di masjid.
Moloku Kie Raha	Empat gunung Maluku. Semula menunjuk kepada Ternate, Tidore, Moti dan Makian. Kemudian berkembang dan memiliki arti empat kerajaan Maluku, yakni Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan.
Ngase	Retribusi hasil hutan atau hasil laut tertentu.
Ngofa Manyira	Titel untuk kepala desa atau kepala soa. Secara harfiah, ngofa manyira bermakna anak yang lebih tua atau anak tertua.
Nyai Cili	Puteri kerajaan, puteri sultan dari permaisuri utama. Nyai cili berasal dari bahasa Jawa: nyai dan cilik. Juga disebut Boki.
Resident	Residen, pegawai tinggi pemerintahan dalam negeri yang mengepalai suatu wilayah.
Sabua	Rumah kebun, sambungan rumah yang dibuat di depan atau di samping, yang bersifat sementara.
Sabua Lamo	Nama suku di Tobelo.
Sadaha	Komisaris, pelaksana tugas yang diberikan sultan, pemelihara benda-benda kerajaan tertentu.
Salahakan	Gelar untuk gubernur di daerah taklukan.
Salawaku	Tameng tradisional Maluku.
Sangaji	Gelar kepala komunitas tradisional, atau kepala distrik.
Syara	Undang-undang agama Islam, hukum atau syariat Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah keperdataan. Berasal dari bahasa Arab, syar'i.
Utusan	Duta, penguasa setempat yang diutus sultan. Utusan terutama mengurus kepentingan sultan di suatu daerah, seperti memungut upeti, dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Abbas, Datu Jamal Ashley, *Mindanao and the Spice Island*, The Philippine Post, 11 March 2000.
- Abdurrachman, Paramita S., et al. (eds.), *Bunga Rampai Sejarah Maluku*, Jakarta: Lembaga Penelitian Sejarah Maluku, 1973.
- , *Moluccan Responses to the First Intrusion of the West, Dynamic of History*, eds. Haryati Subadio, et.al., Amsterdam: North Holland Pub. Co., 1978.
- Adatrechtbundels, jilid VII dan XVI (campuran).
- Agung, Ide Anak Agung Gde, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- Alwi, Des. *Sejarah Maluku, Banda Naira, Ternate, Tidore, dan Ambon*. Dian Rakyat, Jakarta, 2005.
- Ammari, Fachry,(ed.) et.al., *Ternate, Kelahiran dan Sejarah Sebuah Kota*. Pemerintah Kota Ternate, 2003.
- Andaya, Leonard Y., *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawai Press, 1993.
- Andili, Bahar A., “Profil Daerah Maluku Utara”, dalam Masinambouw (ed.), *Halmahera dan Raja Ampat*, pp.3 ff.
- Baretta, A.M., *Halmahera en Morotai*, Batavia: Javasche Boekhandel, 1917.
- Beverluis, A.J. & Mr. A.H.C. Gieben, *Het Gouvernement der Molukken*, Weltevreden: Land Drukkerij, 1929.
- Blucher, Captain Sir Edward, *Narrative of the Voyage of HMS Samarang*, 2 vols, London: F of Pall Mall, 1970.
- Boesoirie, Chasan, *Memoire*, Bandung t.t.
- Bousquet, Mr. L., *Verovering van Ternate door de Engelschen*, Batavia: Lange & Co.1867.
- Brugmans, J.J., *Geschiedenis van het Onderwijs in Ned. Indie*, Groningen, Batavia: J.B. Wolters, 1938.
- & H. Bandet, *Balans van Beleid, Terugblik op de Laatste halve eeuw van Ned. Indie*, Assem: van Gorkum, 1961.
- et.al., *Nederland Indie Onder Japansche Bezetting (1942-1945)*, Franeker: Wever BV, 1960.
- Brumund, J.F.G., *Fragment Mijne Reize door de Molukka's*, Batavia: Lange & Co, 1856.
- Campen, C.F.H., “Het Eiland Halmahera,” *Tijdschrift voor Indische-taal, Land- en Volkenkunde*, vol. XXVIII, 1883, pp.240-313.
- Compo, J.A., “Steam Navigation and the State Information”, *the Late Colonial State in Indonesia*, ed. Robert Cribb, Leiden: KITLV Press, 1994.
- Coolhas, W. Ph., “Ervaring van een Jonge Bestuur Ambtenaar in de Molukken”, *Overzee in Nederland Indie*, S.L. van de Wal (ed.), Franeker: T. Weber BV, 1997.
- , *A Critical Survey of Studies on Dutch Colonial History*, Den Haag: Martinus Nijhoff, 1980.
- , “Kroniek van het Rijk Batjan”, *overgedrukt uit het Tijdschrift van het Kon. Bat. Genootschap van kunsten en Wetenschap*, deel LXIII, afl. 2, 1923.
- , *Mededelingen Betreffende Onderafdeling Batjan*, KTLI, deel LXXXII, afl. 3 & 4, 1926.
- Crab, P. van der, *De Moluksche Eilanden*, Batavia: Lange & Co., 1862.

- , *Geschiedenis van Ternate, in Ternataanschen en Maleischen Tekst, Beschreven door den Ternataan Naidah, met Vertaling en Aanteekeningen door P.A. van der Crab*, BKI, JILID 26, NO. 2, 1878, pp 381-493.
- Crafton, R.H., *A Peagent of Spice Island*, London: John Bale, Sons & Danielson Ltd., 1936.
- Darling, Phillip, *Australia and Indonesian Independence*, Canberra: Australian Government Publication Service, 1994.
- De Booy, A., *De derde reis van de VOC naar Oost Indie onder het beleid van Admiraal Paulus van Carden in 1606*, Vol.I, Martinus Nijhof, s'Gravenhage, 1968.
- de Clerq, F.S.A., *Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate*, Leiden: E.J. Brill, 1890.
- de Graaf, H.J. *Gesehiedenis van Ambon en de Zuid Molukken*, Franeker: T.Wefer BV, 1997.
- , *Geshiedenis van Indonesie*, van Hoeve s'Gravenhage- Bandung, 1949.
- de Jong, J.J.P. *Diplomatie of Strijd, Nederland beleid tegenover de Indonesische Revolutie*, Amsterdam: Boom Meppel, 1988.
- de Louter, J., *Handboek van het Staat en Administratief Recht van Ned. Indie*, s'gravenhage: Martinus Nijhoff, 1914.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Sejarah Daerah Maluku*, Jakarta: Departemen P & K, 1977.
- Drooglever, P.J. & M.J.B. Schouten, *Officiële Becheiden Betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950 (19 vols)*, Martinus Nijhoff- s'Gravenhage- Instituut voor Ned. Geschiedenis, 1989-1994.
- Fasseur, C., *Cornerstone and stumbling Block: Racial Classification and the Late Colonial State in Indonesia, Political and Economic Foundation of the Nederland Indies 1880-1942*, Robert Cribb (ed.), Leiden: KITLV Press, 1994.
- , *Een Wissel op de toekomst, de Rede van Koningen Wilhelmina 6/7 December 1942, Between People and Statistic: Essays on Modern Indonesian History*, eds. Francien van Anrooy, et.al., Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979.
- Fisher, Louis, *The Story of Indonesia*, London: Hamilton, 1959.
- Fraassen, Ch. F.van, "Types of Sociopolitical structure in North Halmahera History," dalam Masinambouw (ed.), *Halmahera dan Raja Ampat*.
- , "Court and State in Ternaten Society", dalam Masinambouw (ed.), *Halmahera dan Raja Ampat*, jilid 2, no. 2, pp.159-172.
- , *Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel*, (disertasi), 2 vols, Leiden, 1987.
- Galvao, Antonio, *Historia das Moluccas*, tr. Hubert Th. M. Jacobs S.J., Rome: Jesuit Historical Institute, 1971.
- Groen, P.M.H., *Marsouters en Dwaalsporen, het Ned. Militair-strategischbeleid in Indonesia 1945-1950*, s'Gravenhage: SDU Uitgeverij, 1991.
- Haire, James, *Sifat dan Pergumulan Gereja Halmahera 1941-1979*. Stephen Sulaeman (tr.) BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1998.
- Hana, Wilarda A. & Des Alwi, *Turbulant Times Past in Ternate and Tidore*, Rumah Banda Neira, 1990.
- , & Des Alwi, *Ternate dan Tidore masa lalu penuh gejolak*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Handelingen der Regering en der Staaten Generaal betreffende het reglement op het beleid der regering van ned. Indie*, Utrecht: Hemerink & Zoon, 1857.
- Heijboer, Pierre, *De Politionele Acties: De Strijd om Indie 1945-1949*, Haarlem: Tibula van Dishoeck, 1979.

- Helsdingen, W.H., "Staatkundige Ontwikkeling", *Balans van beleid, terugblik op laatste halve eeuw van Ned. Indie*, eds. H.Bandet and J.J. Brugmans, Assem: van Gorkum NV, 1961.
- Heuken, Adolf, *Be My Witness to The Ends of The Earth*, Jakarta: Cipta Loka Caraka, 2002.
- Heyneman, *Ron Ibu Maluku, The Story of Jeanne van Diejen*, Victoria: Sid Artha Publisher, 2002.
- Hutagalung, Batara R., *10 Nopember 1945*, Suarabaya: Yayasan Persahabatan 10 Nopember, 2002.
- Intisari, Pebruari 2002.
- Jacobs, Hubert M., (ed.), *A Treatise on the Moluccas*, Jesuit Historical Institute, Rome, 1971.
- Jacobs S.J., Hubert M.(ed.), *Documenta Molucensia* (3 vols.), Jesuit Historical Institute, Rome, 1974-1980.
- Kahin, George Mc Turnen, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, tr. Ismail Muhammad dan Zakaren Abdul Rashid, Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 2 Vols.*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- , *Sejak Indische Sampai Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2005.
- Katoppo, E. *Nuku, Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Kemp, P.H. Van Der, *Het Ned. Indisch Bestuur Van 1817-1818*, s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1919.
- Klerk,J.E., *Batjan*, Batavia: Lange & Co., 1864.
- Kotambunan, H. Hamid, *Perjuangan Rakyat Maluku Utara Membebaskan Diri dari Kolonialisme*, Jakarta: PT Gamalama Media, 2003.
- Lapian, A.B., "Pelayaran Orang Tobelo dalam Sumber Sejarah (Abad XVII dan XIX)," *Halmahera dan Raja Ampat*, Masinambouw (ed.).
- , *Bacan and the Early History of North Maluku*. Halmahera and Beyond. L.E. Visser (ed.), Leiden, KITLV Press, 1994. pp 11-22.
- , et.al., *Terminology Sejarah*, Jakarta: Dep. P&K, 1996.
- , dan P.J. Drooglever, *Menelusuri Jalur Linggarjati*, Jakarta: Grafiti, 1992.
- Leirissa, R.Z., *Halmahera Timur dan Raja Jailolo: Pergolakan Sekitar Laut Seram Awal Abad 19*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- , *Ikhtisar Sejarah Indonesia II*, Jakarta: Fakultas Sastra UI, 1980.
- , et.al., (eds.), *Maluku Tengah di Masa Lampau*, Jakarta: Arsip Nasional, 1982.
- , *Maluku dalam Perjuangan Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta: Lembaga Sejarah Fakultas Sastra UI, 1975.
- Leupe, P.A. *De Verdediging van Ternate*, reproduksi dari Tijdschrift Kon.Instituut, Nieuwe Volgreeks, deel VIII, 1864.
- Luhulima, C.P.F. (ed.), *Bunga Rampai Sejarah Maluku*, Jakarta: LIPI, 1971.
- Masinambouw, EKM, *Halmahera dan Raja Ampat: Konsep dan Strategi Penelitian*, Jakarta: LIPI, 1980.
- Miller, George, *To the Spice Island and Beyond*, Kualalumpur: Oxford University Press, 1996.
- Muller, J.A., *Verblijf bij de Zeerovers*. BKTV, vierde volgreeks, eerste deel.
- Muller, Karl. *Maluku (de Molukken)*, Berkeley, Singapore: Periplus Editions, 1996.
- Olivier, J.Z., *Reizen in den Molukschen Archipel naar Makassar*, Amsterdam: enz., 1837.
- Overweel, Jeroen A., *Topics Relating to the Netherland-New Guinea*, Leiden/Jakarta: DSALCUS/IRIS, 1995.
- Poortman, C., *Bestuur en bestel in Indie*, s'Gravenhage: W. van Hoeve, 1946.
- Pusponegoro, Marwati J., et.al., *Sejarah Nasional Indonesia*, volume V-VI, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

- Putuhena, Saleh A., "Sejarah Agama Islam di Ternate", *Halmahera dan Raja Ampat*, Masinambouw (ed.).
- Regerings Almanak voor Ned. Indie*, vol.2 (Jakarta: Landdrukkerij, 1814-1914).
- Reid, Anthony J.S., *Revolusi Nasional Indonesia*, tr. Pericles G. Katoppo, Jakarta: Sinar Harapan, 1996.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, tr. Satrio Wahono et.al., Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Roelfsema, H.R., *Een jaar in de Molukken*, Haarlem: Tjeenk Willink, 1917.
- Rumphius, G.E. *Ambonsche Landbeschrijving*, Z.J. Manusama (ed.), Jakarta, Arsip Nasional, 1983
- Sejarah Gereja Katolik Di Maluku Utara*, (s.n., s.l.)
- Soegondho, Santoso, "Penelitian Arkeologi Maluku Utara", *Halmahera dan raja Ampat*, Masinambouw, (ed.).
- Sttkundig Overzicht van Nederland Indie*, Jakarta: Arsip Nasional, 1971.
- Stapel, F.W., "De VOC in de grote Oorlogen der XVIIIde Eeuw," Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar pada Universitas Amsterdam, 28 Januari 1932.
- , *Corpus Diplomaticum Neerlandico Indicum 1753-1799*, s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1955.
- Sujatmoko, (ed.), *An Introduction to Indonesian Historiography*, Itacha: Cornell Univ. Press, 1965.
- Tobias, J.H. dan C. Boscher, *Memorie van Overgave*, Kata Pengantar A.B. Lopian, Jakarta: Arsip Nasional, 1980.
- Toedjimah, Prof.Dr., *Masuknya Agama Islam ke Maluku*. Hasil-hasil seminar Sejarah Maluku. Ambon: Panitia Sejarah Maluku, 1992.
- Valentijn, Françoise, *Oud en Nieuw Oost Indien*, vol. 1b, *Beschrijving der Moluccas*, Dordrecht-Amsterdam, 1724.
- , ed. Dr. Keyzer, vol. 1, s'Gravenhage: H.C. Susan, C.H. Zoon, 1856.
- van Anrooij, Francien, et.al., (eds.), *Between People and Statistics, Essays in Modern Indonesian History*, Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979.
- van de Wall, V.I., *Nederlandsche Oudheden in de Molukken*, s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1928.
- van der Crab, P., *De Moluksche Eilanden*, Batavia: Lange & Co., 1862.
- van der Kemp, P.H., *Het Nederland Indisch Bestuur van 1817 op 1818*, s'Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1919.
- van Fraassen, Ch. F., *Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel*, 2 vols., Leiden, 1987.
- van Twist, Mr. A.J. Duymar, *Aantekening Betreffende eene Reis door de Molukken*, s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1856.
- Villiers, John. "The Jesuit Mission in Moro 1546-1571", dalam Masinambouw (ed.), *Halmahera dan Raja Ampat*, vol 2 no.2, Jakarta: Leknas, 1983, pp.277-287.
- Vlekke, Bernard H.M. *Nusantara*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1967.
- Wallace, Alfred Russel, *The Malay Archipelago*, Singapore: Oxford University Press, 1989.
- Wall, V.J. van de, *Rapport van het Voorlopig Onderzoek naar Anwezigheid en der Toestand van Oudheidskunde Overblijfselen uit de Compagnie's tijd in de Residentie Ambon en Ternate*, Welterreden: Albrecht & Co., 1922.
- Yong Mun Cheong, H.J., *van Mook and Indonesian Independence*, s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1982.

